PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2021

## TENTANG

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

## TAHUN 2021-2026

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

# BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati Bantul;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

a. tersedianya dokumen publik yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
b. sebagai landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah; dan
c. tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam mengoptimalkan partisipasinya dalam membangun Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

a. mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum berbagai sumber daya pembangunan di Daerah, yang meliputi kondisi geografis dan sumber daya alam, kondisi perekonomian kondisi sosial budaya dan sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi pemerintahan dan pelayanan umum;
b. merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
c. menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas dalam pembangunan di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

FUNGSI RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam :

a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
b. penyusunan RKPD.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 8

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 terdiri atas :

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS;
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
i. BAB IX : PENUTUP; dan
j. *CASCADING*;

(2) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPPEDA.
(3) BAPPEDA melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6,22/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati Bantul Terpilih Masa Jabatan Tahun 2021-2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul Terpilih Periode Tahun 2021-2026, maka RPJMD Tahun 2021-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

BAB I : PENDAHULUAN. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf b

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Huruf c

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, memuat gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021-2026.

Huruf d

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, memuat gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Huruf e

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan di daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Huruf f

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN, memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Huruf g

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat hubungan urusan pemerintahan dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Huruf h

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Bantul dan wakil Bupati Bantul.

Huruf i

BAB IX : PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 140

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... xiii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1-1
1.1. LATAR BELAKANG ..... 1-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ..... 1-3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... 1-8
1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD ..... 1-9
1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... 1-9
1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 1-10
1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ..... 1-10
1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah ..... 1-10
1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD ..... 1-11
1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD ..... 1-11
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ..... 1-11
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ..... 1-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... 2-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... 2-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah ..... 2-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... 2-18
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ..... 2-26
2.1.4. Demografi ..... 2-35
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... 2-40
2.2.1. Pertumbuhan PDRB ..... 2-40
2.2.2. PDRB Perkapita ..... 2-50
2.2.3. Laju Inflasi ..... 2-50
2.2.4. Indeks Gini ..... 2-51
2.2.5. Kemiskinan ..... 2-52
2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka ..... 2-55
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 2-56
2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ..... 2-57
2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah ..... 2-57
2.2.10. Umur Harapan Hidup ..... 2-58
2.2.11. Angka Kematian Bayi ..... 2-59
2.2.12. Angka Kematian Ibu ..... 2-61
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM ..... 2-62
2.3.1. Layanan Urusan Wajib ..... 2-62
2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan ..... 2-239
2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum ..... 2-264
2.3.4. Layanan Keistimewaan ..... 2-282
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH ..... 2-295
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah ..... 2-295
2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur ..... 2-297

2.4.3. Iklim Berinvestasi ..... 2-300
2.4.4. Sumber Daya Manusia ..... 2-316
2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ..... 2-319
2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021 ..... 2-338
2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) ..... 2-345
2.7.1. Bidang Pendidikan ..... 2-346
2.7.2. Bidang Kesehatan ..... 2-347
2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 2-351
2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 2-351
2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ..... 2-352
2.7.6 Bidang Sosial ..... 2-354
2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR ..... 2-355
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... 3-1
3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU ..... 3-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... 3-5
3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah ..... 3-3
3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah ..... 3-5
3.1.4. Neraca Daerah ..... 3-29
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ..... 3-39
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... 3-39
3.2.2. Analisis Pembiayan ..... 3-44
3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19) 3-48
3.3. KERANGKA PENDANAAN ..... 3-52
3. 3. 1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan ..... 3-52
3. 3. 2 Penghitungan Kerangka Pendanaan ..... 3-75
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ..... 4-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ..... 4-1
4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah ..... 4-1
4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah ..... 4-14
4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19 ..... 4-15
4.2 ISU-ISU STRATEGIS ..... 4-16
4.2.1. Telaah Isu Internasional ..... 4-17
4.2.2. Telaah Isu Nasional ..... 4-20
4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 4-28
4.2.4. Telaah Isu Daerah ..... 4-61
4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul ..... 4-80
4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar ..... 4-88
4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Bantul ..... 4-95
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..... 5-1
5.1. Visi ..... 5-2
5.2. Misi ..... 5-3
5.3. Tujuan dan Sasaran ..... 5-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan ..... 6-1

6.1.1. Analisis SWOT ..... 6-2
6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan ..... 6-11
6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... 6-38
6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan ..... 6-49
6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19 ..... 6-61
6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung ..... 6-63
6.2. Program Pembangunan Daerah ..... 6-64
6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah ..... 6-64
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... 7-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan ..... 7-1
7.2. Program Perangkat Daerah ..... 7-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... 8-1
BAB IX PENUTUP ..... 9-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan ..... 9-2
9.2. Pedoman Transisi ..... 9-2
CASCADING ..... L-1

# DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul .....2-3
Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul .....2-9
Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul.....2-11
Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul.....2-12
Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-13
Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-15
Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.....2-26
Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....2-33
Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....2-34
Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon.....2-36
Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul .....2-37
Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%) .....2-43
Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori.....2-47
Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata.....2-49
Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020.....2-53
Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon .....2-54
Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-55
Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020.....2-56
Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi .....2-60
Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-61
Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....2-63
Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-64
Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....2-66
Tabel 2 24 Jumlah sekolah menurut peringkat akreditasi yang diperoleh .....2-66
Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-66
Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-67
Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....2-68
Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....2-69
Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.....2-69
Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul .....2-70
Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul.....2-71
Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul.....2-72
Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020.....2-73
Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 .....2-74
Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-75
Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-76
Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting .....2-78
Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul.....2-79
Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul.....2-79
Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....2-80
Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-81
Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul .....2-82

Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-88
Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul ..... 2-90
Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-90
Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 ..... 2-91
Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-93
Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-93
Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-94
Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul ..... 2-95
Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul ..... 2-98
Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul ..... 2-100
Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020 ..... 2-103
Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-105
Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 2-106
Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-107
Tabel 2 57 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018 ..... 2-109
Tabel 2 58 Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-110
Tabel 2 59 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 2-111
Tabel 2 60 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-113
Tabel 2 61 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 ..... 2-114
Tabel 2 62 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020 ..... 2-115
Tabel 2 63 Togor EWS Tsunami Kabupaten Bantul ..... 2-115
Tabel 2 64 Indikator Kinerja Utama Sub-Urusan Bencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ... 2-116
Tabel 2 65 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020 ..... 2-121
Tabel 2 66 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-122
Tabel 2 67 Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 2-123
Tabel 2 68 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-124
Tabel 2 69 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020 ..... 2-124
Tabel 2 70 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 2-126
Tabel 2 71 Indikator Kinerja Utama Bidang sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-127
Tabel 2 72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-128
Tabel 2 73 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-128
Tabel 2 74 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-129
Tabel 2 75 Besaran Sengketa Hubungan Industrial yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-130
Tabel 2 76 Indikator Kinerja Utama Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-130
Tabel 2 77 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-131
Tabel 2 78 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019 ..... 2-132
Tabel 2 79 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020 ..... 2-133

Tabel 2 80 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-134
Tabel 2 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-134
Tabel 2 82 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.....2-137
Tabel 2 83 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-138
Tabel 2 84 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-140
Tabel 2 85 Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..2-143
Tabel 2 86 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul.....2-144
Tabel 2 87 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020.....2-144
Tabel 2 88 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-145
Tabel 2 89 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 .....2-146
Tabel 2 90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 .....2-146
Tabel 2 91 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-148
Tabel 2 92 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2020.....2-149
Tabel 2 93 Penambahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul 2020.....2-151
Tabel 2 94 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan .....2-153
Tabel 2 95 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diawasi .....2-154
Tabel 2 96 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan .....2-157
Tabel 2 97 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018 .....2-158
Tabel 2 98 Pengelolaan Sampah Tahun 2019 .....2-158
Tabel 2 99 Pengelolaan Sampah Tahun 2020 .....2-158
Tabel 2 100 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-159
Tabel 2 101 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, .....2-159
Tabel 2 102 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....2-161
Tabel 2 103 Cakupan Penerbitan KTP per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....2-163
Tabel 2 104 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 .....2-163
Tabel 2 105 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....2-164
Tabel 2 106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-165
Tabel 2 107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-166
Tabel 2 108 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020.....2-166
Tabel 2 109 Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.....2-167
Tabel 2 110 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ....2-167
Tabel 2 111 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-168
Tabel 2 112 Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....2-169
Tabel 2 113 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 .....2-170
Tabel 2 114 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-170
Tabel 2 115 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-171
Tabel 2 116 Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.....2-171
Tabel 2 117 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-173
Tabel 2 118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-174
Tabel 2 119 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-178

Tabel 2 120 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018 ....2-179
Tabel 2 121 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 ....2-179
Tabel 2 122 V/C Ratio Ruas Jalan di Kabupaten Bantul ....2-179
Tabel 2 123 Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan Kabupaten Bantul, ....2-180
Tabel 2 124 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 ....2-182
Tabel 2 125 Indikator Kinerja Utama Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020....2-186
Tabel 2 126 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul....2-186
Tabel 2 127 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul ....2-187
Tabel 2 128 Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Bantul ....2-187
Tabel 2 129 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul ....2-188
Tabel 2 130 Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ....2-188
Tabel 2 131 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ....2-189
Tabel 2 132 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ....2-189
Tabel 2 133 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul ....2-190
Tabel 2 134 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020....2-191
Tabel 2 135 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ....2-192
Tabel 2 136 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ....2-195
Tabel 2 137 Pekan Paralimpic Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018 ....2-195
Tabel 2 138 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019....2-196
Tabel 2 139 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020" ....2-197
Tabel 2 140 Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020....2-197
Tabel 2 141 Capaian indikator kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ....2-198
Tabel 2 142 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan SDI ....2-200
Tabel 2 143 Lokasi Penempatan Peralatan Penyadap....2-203
Tabel 2 144 Jumlah Panggilan Masuk Januari-November 2020 ....2-206
Tabel 2 145 Pelaksanan Kegiatan Pengamanan Sistem Elektronik ....2-207
Tabel 2 146 Hasil Pelaksanaan Asesmen ....2-208
Tabel 2 147 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020 ....2-209
Tabel 2 148 Capaian Indiaktor Utama Persandian....2-210
Tabel 2 149 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020 ....2-212
Tabel 2 150 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul....2-214
Tabel 2 151 Data Budaya Tak Benda potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul ....2-226
Tabel 2 152 Indikator Kinerja Utama Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020....2-230
Tabel 2 153 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020 ....2-231
Tabel 2 154 Jumlah Pojok Baca....2-231
Tabel 2 155 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi ....2-232
Tabel 2 156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020....2-233
Tabel 2 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020....2-233
Tabel 2 158 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ....2-235
Tabel 2 159 Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..2-235
Tabel 2 160 Data Hasil Pengawasan Kearsipan....2-236
Tabel 2 161 Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan....2-237
Tabel 2 162 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020 ....2-238

Tabel 2 163 Indikator Kinerja Utama BidangKearsipan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.....2-239
Tabel 2 164 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-240
Tabel 2 165 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-241
Tabel 2 166 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-241
Tabel 2 167 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-242
Tabel 2 168 Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-243
Tabel 2 169 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-244
Tabel 2 170 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 2-244
Tabel 2 171 Data *Even*t Tahun 2019.....2-245
Tabel 2 172 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-246
Tabel 2 173 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020 .....2-246
Tabel 2 174 Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 .....2-248
Tabel 2 175 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-249
Tabel 2 176 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-251
Tabel 2 177 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-252
Tabel 2 178 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-253
Tabel 2 179 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-254
Tabel 2 180 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-254
Tabel 2 181 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-20202-255
Tabel 2 182 Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-256
Tabel 2 183 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 .....2-256
Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul .....2-257
Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-259
Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) .....2-259
Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ...2-260
Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020.....2-260
Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-262
Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020..2-262
Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul .....2-263
Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020.....2-263
Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.....2-264
Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 .....2-266
Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 .....2-267
Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul.....2-268
Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-272
Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020.....2-273
Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-275

Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-278
Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 2-278
Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-279
Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020 ..... 2-280
Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020 ..... 2-281
Tabel 2 205 Penetapan Desa Budaya di Kabupaten Bantul ..... 2-285
Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul ..... 2-286
Tabel 2 207 Penetapan Kalurahan Wisata di Kabupaten Bantul ..... 2-286
Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019 ..... 2-290
Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul ..... 2-292
Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 ..... 2-294
Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul ..... 2-295
Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-296
Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul ..... 2-297
Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019 ..... 2-298
Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019 ..... 2-299
Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019 2-301
Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 2-302
Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-303
Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 ..... 2-304
Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 2-306
Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ..... 2-307
Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-312
Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul ..... 2-312
Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul ..... 2-313
Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020 ..... 2-319
Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ..... 2-320
Tabel 2 227 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Kabupaten Bantul ..... 2-339
Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul ... 2-341
Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 ..... 2-347
Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 ..... 2-348
Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020 ..... 2-351
Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 ..... 2-352
Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 ..... 2-353
Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020 ..... 2-354
Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 2-355
Tabel 3 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta) ..... 3-6
Tabel 3 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020 ..... 3-9
Tabel 3 3 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 3-5

Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 3-12
Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta) ..... 3-17
Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta) ..... 3-21
Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 ..... 3-23
Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020. 3-31
Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020 ..... 3-36
Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 ..... 3-40
Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab Bantul, 2016-2020 .... 3-41
Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 ..... 3-42
Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 ..... 3-43
Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)..... 3-45
Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)..... 3-46
abel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 3-49
Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 ..... 3-51
Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Bantul Tahun 2021-2026 ..... 3-56
Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026..... 3-59
Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait ..... 3-64
Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait ..... 3-68
Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 . 3-71
Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ..... 3-78
Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ..... 3-80
Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ..... 3-81
Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025 .....4-29
Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025 .....4-62
Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang .....4-69
Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang .....4-73
Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis .....4-79
Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD .....4-86
Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain .....4-89
Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul .....5-5
Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026.....5-6
Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026 .....5-8
Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....6-12
Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif .....6-22
Tabel 6 3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak.....6-28
Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026.....6-29
Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD .....6-30

Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU ..... 6-33
Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesos-SLRT tahun 2022 -2026 ..... 6-34
Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi ..... 6-35
Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025 ..... 6-36
Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025 ..... 6-36
Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM ..... 6-40
Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul ..... 6-52
Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas ..... 6-54
Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul ..... 6-55
Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul ..... 6-56
Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 ..... 6-59
Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul ..... 6-59
Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul ..... 6-60
Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 ..... 6-63
Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ..... 6-66
Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul ..... 7-2
Tabel 7 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ..... 7-4
Tabel 8 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. ..... 8-2
Tabel 8 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026. ..... 8-2
Tabel 8 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Bantul ..... 8-5

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....1-8
Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul .....2-2
Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul .....2-2
Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul.....2-6
Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul.....2-7
Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul.....2-9
Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul .....2-10
Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul .....2-12
Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-14
Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-14
Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul.....2-27
Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul.....2-28
Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul.....2-28
Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul .....2-29
Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul.....2-30
Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Kabupaten Bantul .....2-31
Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul.....2-31
Gambar 2 17 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul.....2-32
Gambar 2 18 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul.....2-32
Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021 .....2-39
Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020 .....2-40
Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-41
Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010 .....2-42
Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010 .....2-42
Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kab Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020 .....2-44
Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha.....2-45
Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020.....2-46
Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020.....2-48
Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020 .....2-51
Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 .....2-52
Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020 .....2-53
Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul .....2-57
Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul.....2-58
Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020.....2-59
Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-60
Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-61
Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul .....2-77
Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 .....2-78
Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul.....2-84
Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul .....2-86
Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul .....2-87
Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019.....2-100
Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019 .....2-102

Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik ..... 2-104
Gambar 2 44 Perkembangan Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 ..... 2-117
Gambar 2 45 Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021 ..... 2-118
Gambar 2 46 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2021 ..... 2-123
Gambar 2 47 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 ..... 2-131
Gambar 2 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 ..... 2-135
Gambar 2 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020 ..... 2-136
Gambar 2 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-141
Gambar 2 51 Tren Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020 ..... 2-147
Gambar 2 52 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai ..... 2-148
Gambar 2 53 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020 ..... 2-149
Gambar 2 54 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul ..... 2-150
Gambar 2 55 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul ..... 2-151
Gambar 2 56 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul ..... 2-152
Gambar 2 57 Cakupan Kepemilikian KIA Tahun 2020 ..... 2-162
Gambar 2 58 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-172
Gambar 2 59 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-175
Gambar 2 60 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-176
Gambar 2 61 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data ..... 2-200
Gambar 2 62 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ..... 2-229
Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020 ..... 2-297
Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 2-302
Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan ..... 2-317
Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020 ..... 3-10
Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 ..... 3-11
Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020 ..... 3-18
Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020 ..... 3-19
Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul ..... 5-3
Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan ..... 6-21
Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021 ..... 6-51

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Bantul adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Abdul Halim Muslih dan Joko B. Purnomo. Pelantikan dilaksanakan pada Jumat 26 Februari 2021 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Sedangkan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 angka 3 (tiga) menyatakan bahwa periodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari RPJP Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, yakni Tahapan IV RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2016-2021.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap pelaksanaan Musrenbang, tahap perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan RPJMD.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04).

## 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

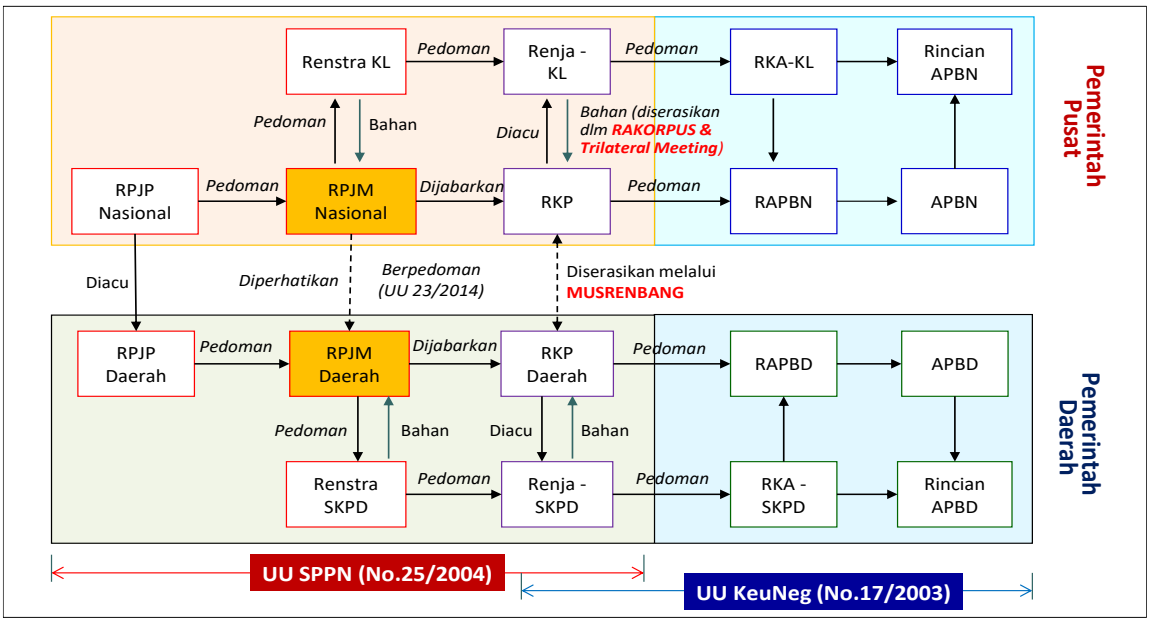


Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1 1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

### 1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD

Pada gambar di atas terlihat bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025. RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025.

Visi RPJPD Kabupaten Bantul tahun 2005-2025 adalah: "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis". Kata "Projotamansari" dimaknai sebagai: etos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparatur Pemerintah Daerah. Kata "Sejahtera, Demokratis, dan Agamis" merupakan keadaan yang ingin diwujudkan di tahun 2025. Secara singkat, kondisi yang ingin diwujudkan Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah: "Bantul yang Produktif-Profesional, Ijo Royo-royo, Tertib, Aman, Sehat, Asri, Sejahtera, dan Demokratis dan Agamis".

### 1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

### 1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Bantul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 mempedomani visi RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. Visi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya adalah: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

### 1.3.4. Keterhubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Bantul sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bantul. RPJMD Kabupaten Bantul juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Bantul.

### 1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah

kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

### 1.3.6. Keterhubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Padukuhan, Kalurahan, Kapanewon hingga Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### 1.3.7. Keterhubungan RPJMD dengan KLHS RPJMD

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Tahun 2021 -2026 didasari pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bantul untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah memberi arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantul mulai Tahun 2022-2026 bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD serta pembangunan daerah dalam

rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah di Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.
3) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan.

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Tahun 2021–2026 disajikan dalam sistematika berikut ini:

**Bab I Pendahuluan**

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

**Bab III Gambaran Keuangan Daerah**

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

**Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah**

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bantul dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

**Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran**

Menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

**Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**

Menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan.

**Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Memuat kerangka pendanaan untuk mendanai belanja daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disertai dengan program perangkat daerah yang disajikan

berdasarkan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul.

**Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

**Bab IX Penutup**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Informasi berkaitan dengan gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul terdiri dari 4 sub bab yaitu: (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, dan (4) Aspek Daya Saing. Analisis dan pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data *time series* dan *cross section.*

Ragam jenis data yang disajikan secara utuh maupun hasil pengolahan kembali data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan periode data yang tersedia sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Periode 2016-2021 (terkait target pembangunan), serta sumber pustaka resmi lain yang terkait dengan kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di Kabupaten Bantul.

## 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

### 2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

#### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah 506,85 km$^2$ (sekitar 15,91% dari luas wilayah DIY). Wilayah administratif Kabupaten Bantul memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

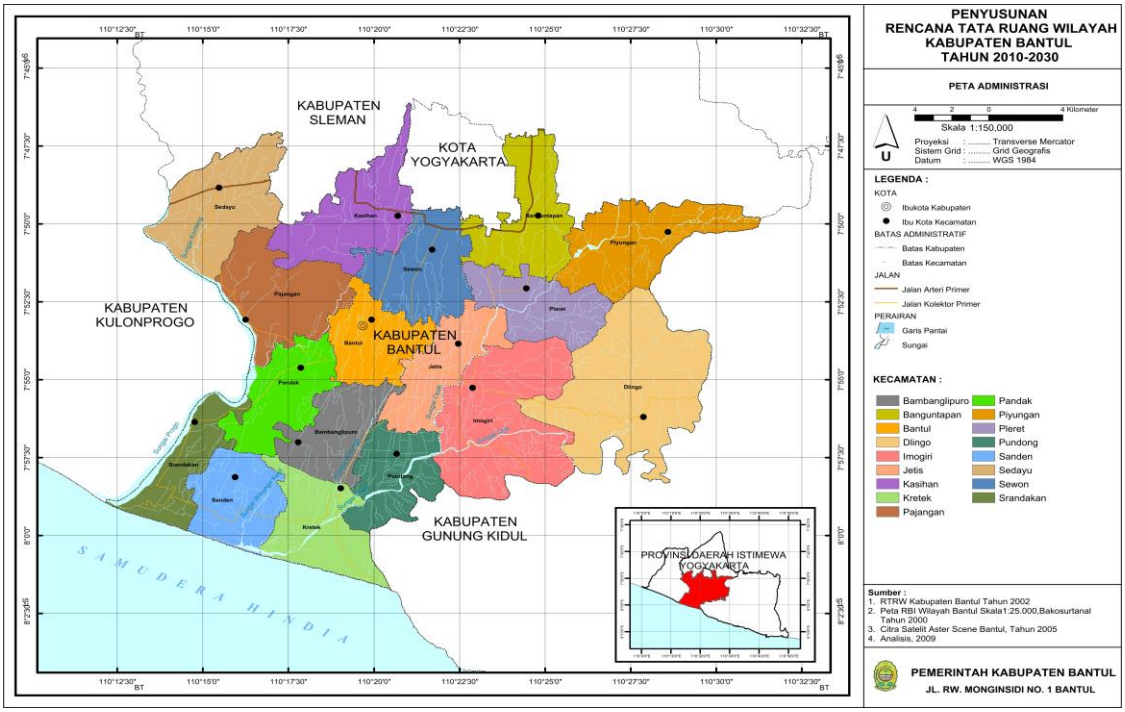


Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Bappeda, 2021

Gambar 2 1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kapanewon. Luas wilayah menurut kapanewon di Kabupaten Bantul disajikan pada gambar berikut :

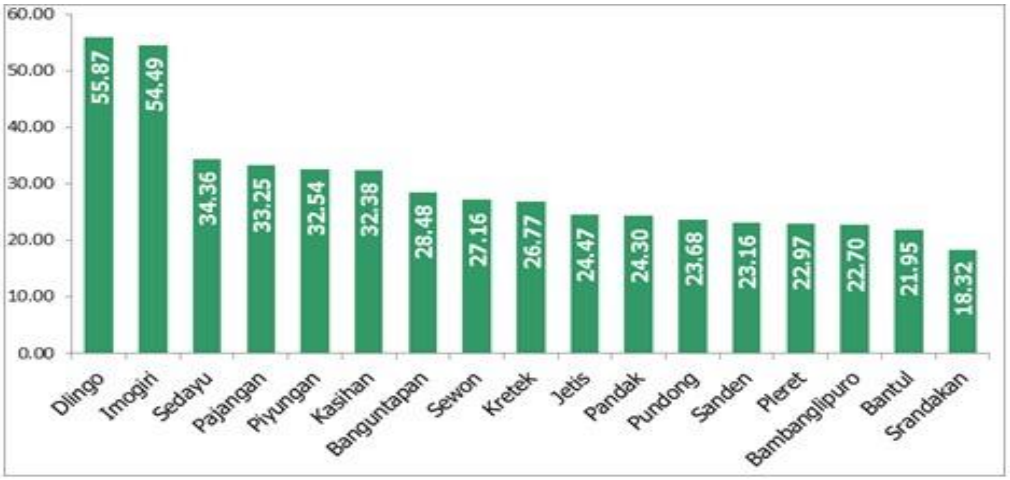


Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka, BPS, 2021

Gambar 2 2 Luas Wilayah Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul terbagi atas 75 kalurahan dan 933 padukuhan dengan jumlah kalurahan dan padukuhan yang terbanyak terletak di Kapanewon Imogiri, yaitu 8 kalurahan dan 72

padukuhan. Sementara kapanewon dengan jumlah kalurahan dan padukuhan paling sedikit adalah Kapanewon Srandakan, yaitu dua kalurahan dan 43 padukuhan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi kalurahan perdesaan (*rural area*) sebanyak 41 kalurahan dan kalurahan perkotaan (*urban area*) sebanyak 34 kalurahan. Secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 1 Klasifikasi Wilayah Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul

| No. | Kapanewon | Klasifikasi Wilayah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kalurahan Perdesaan | Luas ($km^2$) | Kalurahan Perkotaan | Luas ($km^2$) |
| 1 | Srandakan | Poncosari (24 padukuhan) | 11,86 | Trimurti (19 padukuhan) | 6,46 |
| 2 | Sanden | Sri Gading (20 padukuhan) | 7,57 | Gadingsari (18 padukuhan) | 8,12 |
| | | | | Gadingharjo (6 padukuhan) | 3,08 |
| | | | | Murtigading (18 padukuhan) | 4,39 |
| 3 | Kretek | Tirtohargo (6 padukuhan) | 3,62 | Donotirto (13 padukuhan) | 4,70 |
| | | Parangtritis (11 padukuhan) | 11,87 | | |
| | | Tirtosari (7 padukuhan) | 2,39 | | |
| | | Tirtomulyo (15 padukuhan) | 4,19 | | |
| 4 | Pundong | Seloharjo (16 padukuhan) | 11,10 | Srihardono (17 padukuhan) | 6,87 |
| | | Panjangrejo (16 padukuhan) | 5,71 | | |
| 5 | Bambanglipuro | Sumbermulyo (16 padukuhan) | 8,19 | Sidomulyo (15 padukuhan) | 8,05 |
| | | | | Mulyodadi (14 padukuhan) | 6,45 |
| 6 | Pandak | Caturharjo (14 padukuhan) | 5,93 | Wijirejo (10 padukuhan) | 4,68 |
| | | Triharjo (10 padukuhan) | 6,43 | | |
| | | Gilangharjo (15 padukuhan) | 7,26 | | |
| 7 | Pajangan | Guwosari (15 padukuhan) | 8,78 | Triwidadi (22 padukuhan) | 12,71 |
| | | | | Sendangsari (18 padukuhan) | 11,76 |
| 8 | Bantul | Sabdodadi (5 padukuhan) | 2,32 | Palbapang (10 padukuhan) | 5,53 |
| | | | | Ringinharjo (6 padukuhan) | 2,77 |
| | | | | Bantul (12 padukuhan) | 5,24 |
| | | | | Trirenggo (17 padukuhan) | 6,10 |

| No. | Kapanewon | Klasifikasi Wilayah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kalurahan Perdesaan | Luas ($km^2$) | Kalurahan Perkotaan | Luas ($km^2$) |
| 9 | Jetis | Patalan (20 padukuhan) | 5,65 | Trimulyo (12 padukuhan) | 7,11 |
| | | Canden (15 padukuhan) | 5,36 | Sumberagung (17 padukuhan) | 6,35 |
| 10 | Imogiri | Selopamioro (18 padukuhan) | 22,75 | Kebonagung (5 padukuhan) | 1,87 |
| | | Sriharjo (13 padukuhan) | 6,32 | Karangtalun (5 padukuhan) | 1,21 |
| | | Karangtengah (6 padukuhan) | 2,88 | Imogiri (4 padukuhan) | 0,83 |
| | | | | Wukirsari (16 padukuhan) | 15,39 |
| | | | | Girirejo (5 padukuhan) | 3,24 |
| 11 | Dlingo | Mangunan (6 padukuhan) | 9,52 | Dlingo (10 padukuhan) | 9,16 |
| | | Muntuk (11 padukuhan) | 12,85 | | |
| | | Temuwuh (12 padukuhan) | 7,67 | | |
| | | Jatimulyo (10 padukuhan) | 8,91 | | |
| | | Terong (9 padukuhan) | 7,76 | | |
| 12 | Banguntapan | Tamanan (9 padukuhan) | 3,75 | Baturetno (8 padukuhan) | 3,94 |
| | | Jagalan (2 padukuhan) | 0,27 | Banguntapan (11 padukuhan) | 8,33 |
| | | Singosaren (5 padukuhan) | 0,67 | | |
| | | Wirokerten (8 padukuhan) | 3,86 | | |
| | | Jambidan (7 padukuhan) | 3,76 | | |
| | | Potorono (9 padukuhan) | 3,90 | | |
| 13 | Pleret | Bawuran (7 padukuhan) | 4,97 | Wonokromo (12 padukuhan) | 4,34 |
| | | Wonolelo (8 padukuhan) | 4,54 | Pleret (11 padukuhan) | 4,25 |
| | | Segoroyoso (9 padukuhan) | 4,87 | | |
| 14 | Piyungan | Sitimulyo (21 padukuhan) | 9,40 | Srimulyo (22 padukuhan) | 14,56 |
| | | | | Srimartani (17 padukuhan) | 8,58 |
| 15 | Sewon | Pendowoharjo (16 padukuhan) | 6,98 | Bangunharjo (17 padukuhan) | 6,79 |
| | | Timbulharjo (16 padukuhan) | 7,78 | Panggungharjo (14 padukuhan) | 5,61 |
| 16 | Kasihan | Tamantirto (10 padukuhan) | 6,72 | Tirtonirmolo (12 padukuhan) | 5,13 |
| | | Ngestiharjo (12 padukuhan) | 5,10 | | |
| | | Bangunjiwo (19 padukuhan) | 15,43 | | |

| No. | Kapanewon | Klasifikasi Wilayah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kalurahan Perdesaan | Luas ($km^2$) | Kalurahan Perkotaan | Luas ($km^2$) |
| 17 | Sedayu | Argodadi (14 padukuhan) | 11,21 | Argosari (13 padukuhan) | 6,37 |
| | | Argomulyo (14 padukuhan) | 9,55 | Argorejo (13 padukuhan) | 7,23 |
| | **Jumlah** | **41 Kalurahan** | **289,65 (28.965 ha)** | **34 Kalurahan** | **217,20 (21.720 ha)** |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"- 110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04"- 08°00'27" Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil.

Secara geostrategik, Kabupaten Bantul berada pada posisi yang strategis. *Pertama*, Kabupaten Bantul berada di sisi selatan yang merupakan daerah hilir sebagai muara aliran sungai yang memberikan keuntungan ketersedian air untuk pemenuhan kebutuhan air. Selain itu, berdasarkan Visi Gubernur DIY 2017-2022 Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, Kabupaten Bantul akan menjadi muka atau wajah DIY. Namun, wilayah hilir juga mempunyai dampak negative terhadap kualitas lingkungan dan sumber air. K*edua*, wilayah Kabupaten Bantul dilewati jalur transportasi dari Bandara YIA ke Yogyakarta dan sebaliknya. Hal ini memberikan keuntungan strategis untuk berkembangnya wilayah.

### 2.1.1.3 Kondisi Topografi

Ketinggian tempat Kabupaten Bantul meliputi empat kelas ketinggian dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukan pada peta luas wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut.

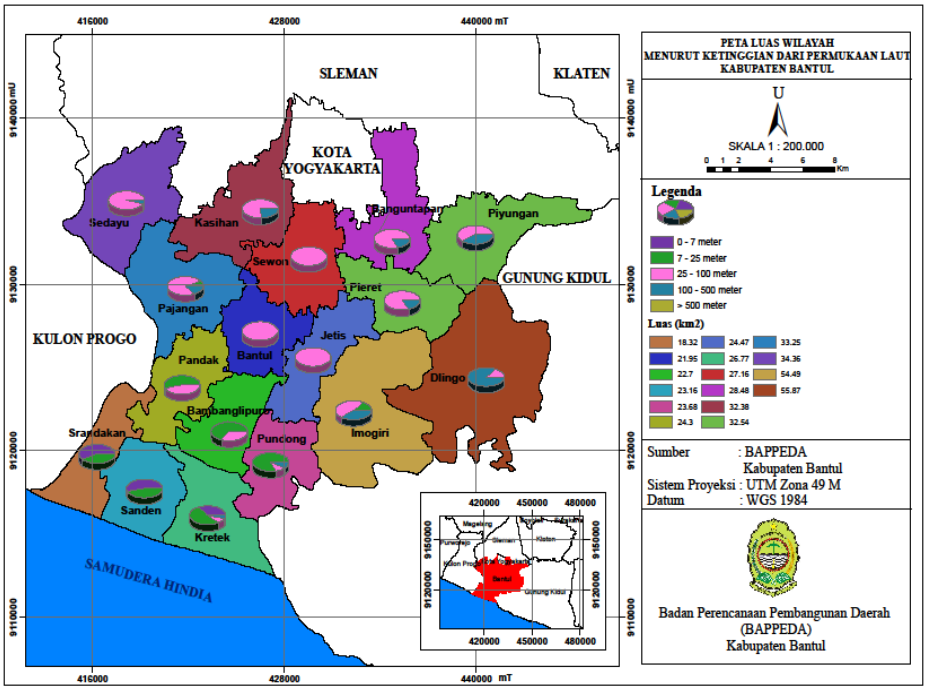


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 3 Luas Wilayah menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Bantul

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25-100 meter (seluas 27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Sedangkan wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kapanewon Kretek, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Srandakan.

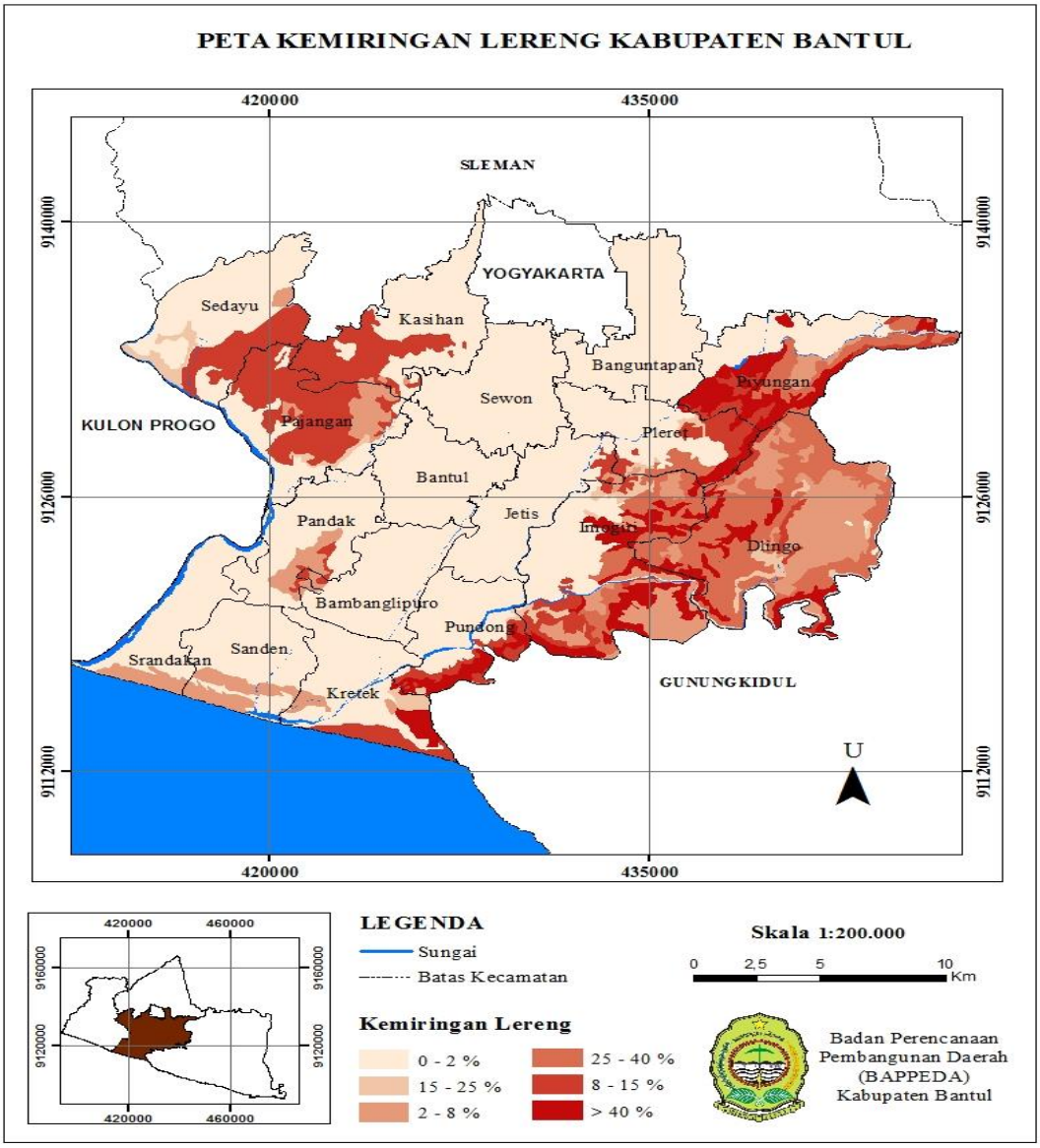


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 4 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bantul

Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Sanden merupakan daerah terendah di antara Kapanewon lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar 0-25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2%).

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas. Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya

berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%).

Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1- 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah Kapanewon terlihat bahwa wilayah Kapanewon yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kapanewon Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah Kapanewon yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kapanewon Sewon dan Banguntapan.

#### 2.1.1.4 Kondisi Geologi

Geologi menunjukkan kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih lanjut. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan.

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat dirinci menjadi beberapa formasi.

Formasi batuan di Kabupaten Bantul sesuai Peta Geologi, dapat dilihat sebagai berikut :

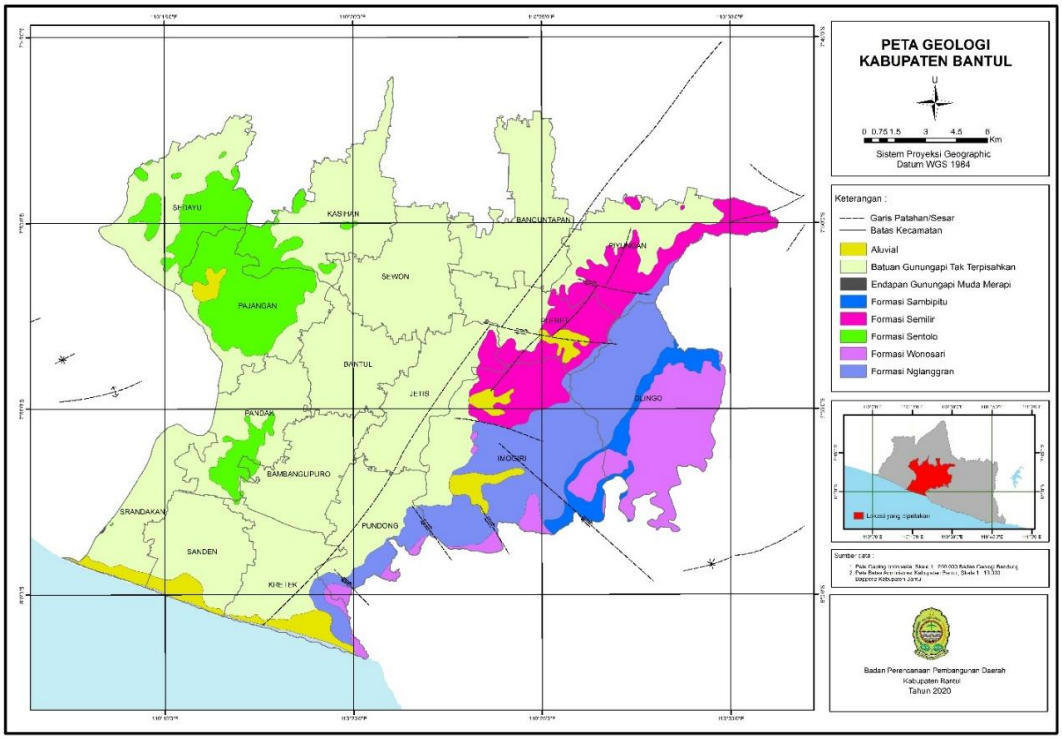


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 5 Peta Geologi Kabupaten Bantul

Sedangkan formasi batuan di Kabupaten Bantul menurut luasannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 2 Formasi Batuan Kabupaten Bantul

| No. | Formasi Batuan | Luas (Ha) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Aluvial | 1.669 | 3,27 |
| 2 | Batuan Gunungapi Tak Terpisahkan | 30.984 | 60,63 |
| 3 | Endapan Gunungapi Muda Merapi | 4 | 0,01 |
| 4 | Formasi Sambipitu | 950 | 1,86 |
| 5 | Formasi Semilir | 3.703 | 7,25 |
| 6 | Formasi Sentolo | 4.622 | 9,04 |
| 7 | Formasi Wonosari | 3.388 | 6,63 |
| 8 | Formasi Nglanggran | 5.783 | 11,32 |
| Jumlah | | 50.685 | 100,00 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Kabupaten Bantul sebagian besar terdiri atas formasi batuan Gunung Api Tak Terpisahkan (*Consolidated*) seluas 30.984.03 Ha atau 60,63%; formasi Nglanggeran seluas 5.783,37 Ha atau 11,32%; formasi Sentolo seluas 4.622,49 Ha atau 9.04 %; formasi Aluvial seluas 1.669,69 Ha atau 3,27%; endapan Gunungapi Muda Merapi seluas 4,02 Ha atau 0,01%; formasi Sambipitu 950,10 Ha atau

1,86%; formasi Wonosari seluas 3.388,69 Ha atau 6,63%; dan formasi Semilir seluas 3.703,62 Ha atau 7,25%.

Wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Renzina, Alluvial, Grumusol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Lithosol. Peta jenis tanah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

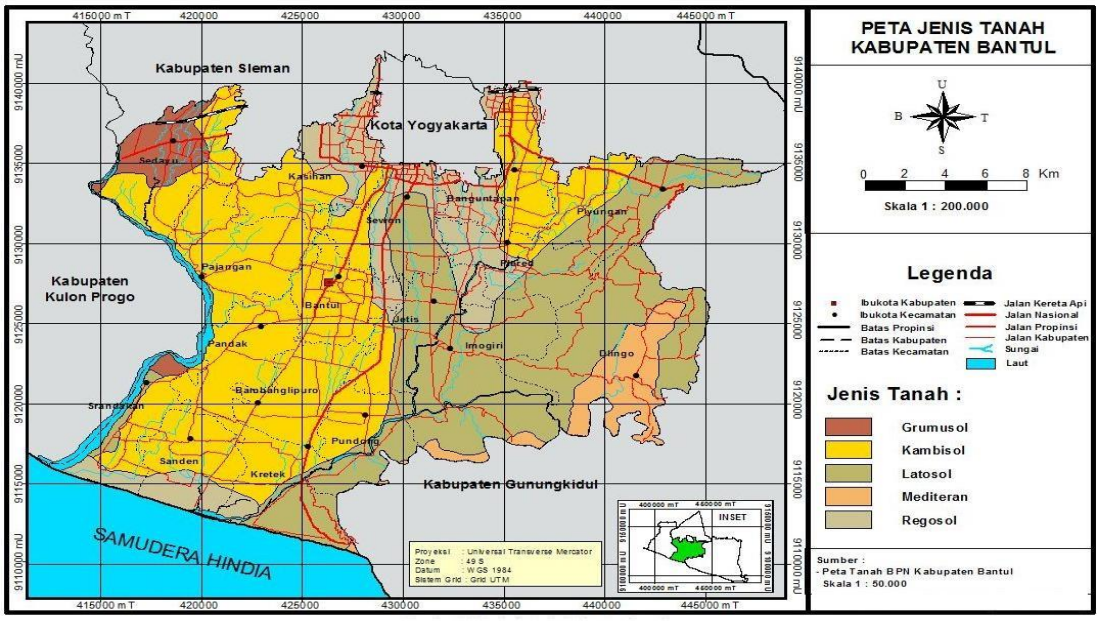


Sumber: BPN,2021

Gambar 2 6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bantul

Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur (mempunyai butiran) kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini tersebar pada Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro.

Tanah Lithosol berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kapanewon Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kapanewon Dlingo dan sedikit di Sedayu.

Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kapanewon Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret.

Tanah Grumusol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan.

#### 2.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum adalah suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar di muara sungai. Di wilayah Bantul terdapat dua DAS yaitu DAS Progo dan DAS Opak.

Tabel 2 3 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bantul

| No. | DAS | Sub DAS | Luas (Ha) | Sub Luas DAS(Ha) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAS Progo | Sub DAS Bedog Progo | 7.979,02 | 19.118,16 |
| | | Sub DAS Gandri | 310,50 | |
| | | Sub DAS Koteng | 5.602,93 | |
| | | Sub DAS Progo Hilir | 5.225,71 | |
| 2 | DAS Opak | Sub DAS Opak | 15.037,44 | 36.500,12 |
| | | Sub DAS Oyo | 11.576,88 | |
| | | Sub DAS Winongo | 9.885,80 | |

Sumber: BPDAS KLHK, 2019

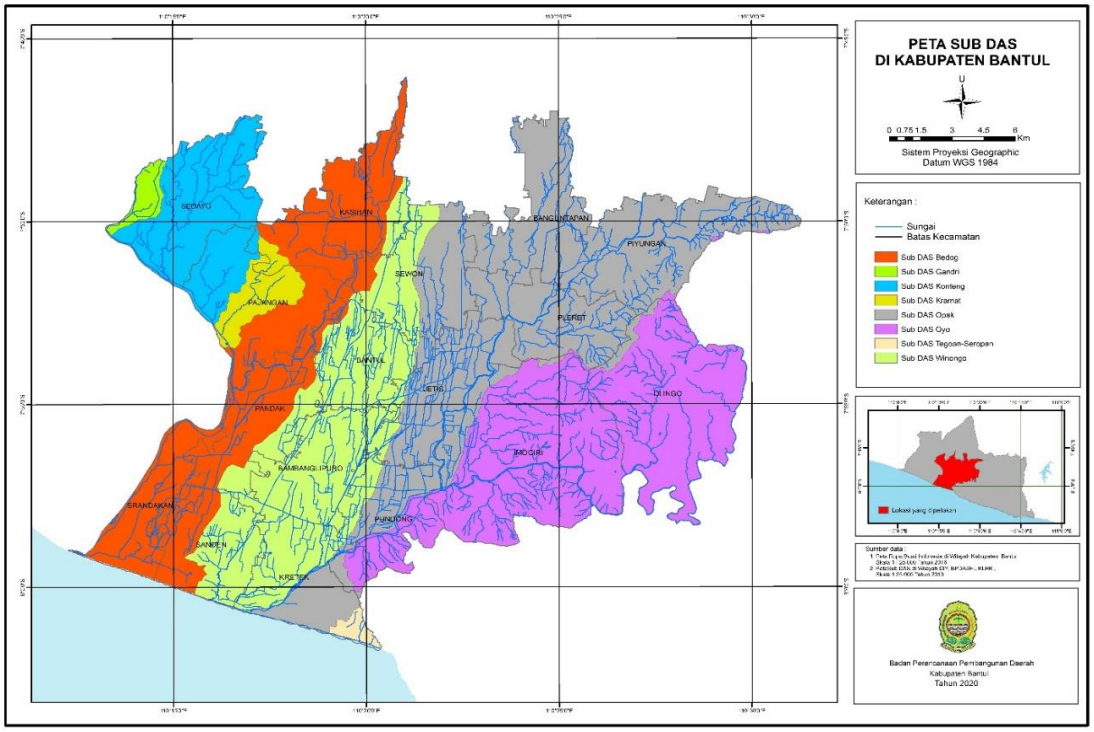


Sumber: BPDAS KLHK, 2019

Gambar 2 7 Peta Sub Das di Kabupaten Bantul

Wilayah Kabupaten Bantul dilewati 5 sungai besar yaitu Sungai Bedog, Winongo, Code, Gadjah Wong dan Opak. Sungai-sungai tersebut berperan sebagai sumber air baku, air irigasi pertanian, perikanan, namun juga digunakan sebagai pembuangan akhir dari kegiatan manusia baik kegiatan domestik maupun kegiatan usaha/ industri yang menjadi sumber pencemar bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius dalam menyusun program kegiatan.

Tabel 2 4 Sungai Di Kabupaten Bantul

| No. | Nama Sungai | Panjang (M) | Hulu | Hilir |
|---|---|---|---|---|
| **I. Sungai Besar** (Lintas Provinsi) | | | | |
| 1 | Opak | 36.140 | Srimulyo, Piyungan | Samudera Indonesia, Parangtritis Kretek |
| 2 | Oyo | 22.850 | Jatimulyo, Dlingo | Sungai Opak, Selopamioro Imogiri |
| 3 | Progo | 26.440 | Argosari, Sedayu | Samudera Indonesia, Poncosari Srandakan |
| **II. Sungai Kecil** (Lintas Kabupaten) | | | | |
| 1 | Bedog | 2.700 | Tirtonirmolo, Kasihan | Sungai Progo, Triharjo Pandak |
| 2 | Buntung | 1.950 | Srimartani, Piyungan | Kali Gawe, Srimulyo Piyungan |

| No. | Nama Sungai | Panjang (M) | Hulu | Hilir |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Code | 9.440 | Tamanan, Banguntapan | Sungai Opak, Trimulyo Jetis |
| 4 | Gadjahwong | 5.520 | Singosaren, Banguntapan | Sungai Opak, Wonokromo Pleret |
| 5 | Gawe | 8.200 | Srimartani, Piyungan | Sungai Opak, Srimulyo Piyungan |
| 6 | Kedung Semerangan | 9.860 | Baturetno, Banguntapan | Sungai Gadjahwong, Pleret |
| 7 | Kenteng | 5.040 | Srimartani, Piyungan | Sungai Gawe, Srimartani, Piyungan |
| 8 | Konteng | 5.570 | Argomulyo, Sedayu | Sungai Progo, Argodadi Sedayu |
| 9 | Krusuk | 5.740 | Argosari, Sedayu | Sungai Konteng, Argorejo Sedayu |
| 10 | Kuning | 1.940 | Sitimulyo, Piyungan | Sungai Opak, Sitimulyo, Piyungan |
| 11 | Mruwe | 7.910 | Baturetno, Banguntapan | Sungai Opak, Jambidan Banguntapan |
| 12 | Timoho | 11.960 | Argomulyo, Sedayu | Sungai Konteng, Argorejo Sedayu |
| 13 | Winongo | 20.080 | Ngestiharjo, Kasihan | Sungai Opak, Donotirto Kretek |
| **III. Sungai Kecil** (Dalam Kabupaten) | | | | |
| 1 | Belik | 5.130 | Tamanan, Banguntapan | Sungai Opak, Trimulyo Jetis |
| 2 | Celeng | 10.370 | Muntuk, Dlingo | Sungai Oyo, Sriharjo Imogiri |
| 3 | Kedung miri | 6.280 | Terong, Dlingo | Sungai Oyo,Terong Dlingo |
| 4 | Kramat | 5.230 | Bangunjiwo, Kasihan | Sungai Progo, Triwidadi Pajangan |
| 5 | Pesing | 8.500 | Srimulyo, Piyungan | Sungai Opak, Segoroyoso Pleret |
| 6 | Plilan | 3.570 | Selopamioro, Imogiri | Sungai Kajor, Selopamioro Imogiri |
| 7 | Urang | 5.670 | Muntuk, Dlingo | Sungai Oyo, Dlingo |
| 8 | Winongo lama | 2.200 | Tirtohargo Kretek | Sungai Opak, Tirtohargo Kretek |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

### 2.1.1.6 Klimatologi

Data curah hujan Kabupaten Bantul diperoleh dari hasil pengamatan di 13 (tiga belas) stasiun pemantau cuaca yaitu Pemantau Ringinharjo, Nyemengan, Gandok, Kotagede, Pundong, Barongan, Ngental, Kebenengan, Piyungan, Sedayu, Ngestiharjo, Dlingo dan Karang Ploso.

Tabel 2 5 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Bulan | Curah Hujan (mm3) | | | | | Hari Hujan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Januari | 132 | 300 | 556 | 171,8 | 145,8 | 18 | 22 | 24 | 20 | 17 |
| Februari | 234 | 302 | 362 | 122,5 | 136,6 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 |
| Maret | 236 | 385 | 395 | 272,5 | 195,9 | 20 | 20 | 16 | 16 | 19 |
| April | 135 | 216 | 227 | 54,6 | 128,4 | 14 | 15 | 14 | 7 | 11 |

| Bulan | Curah Hujan (mm3) | | | | | Hari Hujan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Mei | 80 | 38 | 20 | 1,9 | 79,4 | 16 | 5 | 4 | 6 | 11 |
| Juni | 125 | 24 | 14 | 0,4 | 2,3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Juli | 54 | 4 | - | - | 0,3 | 11 | 3 | - | - | 1 |
| Agustus | 57 | 1 | - | - | 4,0 | 10 | 2 | - | - | 2 |
| September | 169 | 60 | 7 | - | 2,8 | 16 | 4 | 1 | - | 2 |
| Oktober | 223 | 96 | 5 | - | 76,6 | 19 | 13 | 1 | - | 9 |
| Nopember | 347 | 587 | 217 | 23,5 | 114,3 | 21 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| Desember | 318 | 308 | 210 | 73,1 | 188,8 | 24 | 17 | 16 | 12 | 21 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

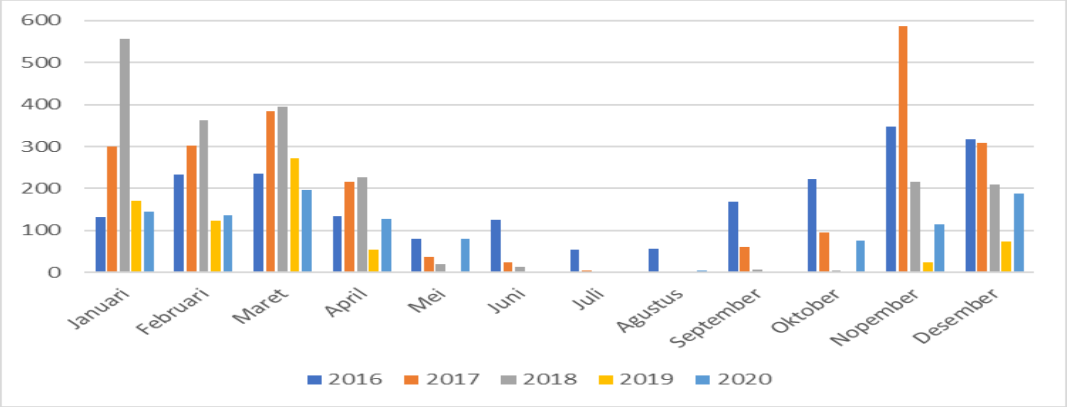


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 8 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

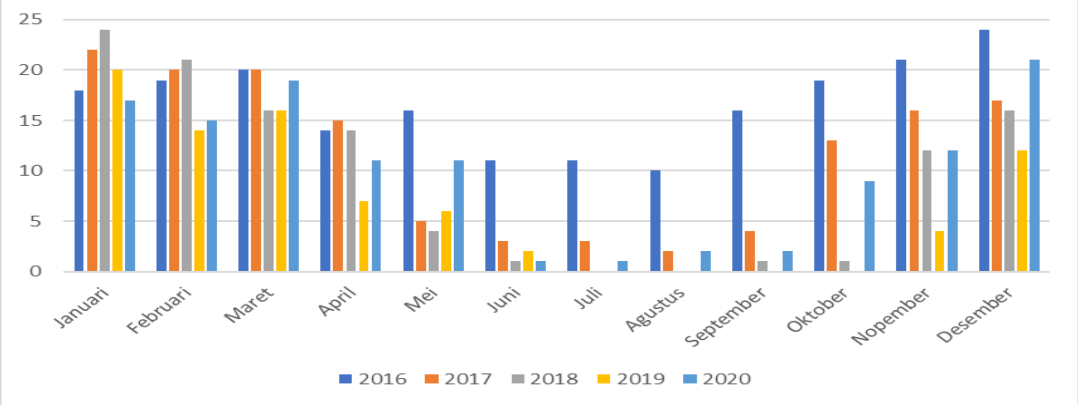


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 9 Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas, intensitas hujan tertinggi selama 5 tahun terjadi pada akhir dan awal tahun. Pada tahun 2016-2017 dan tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi di akhir tahun sedangkan tahun 2018-2019 terjadi pada awal tahun. Intensitas

hujan yang tinggi merupakan konsekuensi dari cuaca ekstrim yang terjadi sebagai dampak perubahan iklim.

Pada tahun 2017 dan tahun 2019, di Kabupaten Bantul terjadi bencana hidrometeorologi berupa banjir besar di beberapa wilayah sebagai akibat dari Siklon Tropis Cempaka dan Siklon Tropis Dahlia serta Siklon Tropis Savanna yang merupakan dampak perubahan iklim. Peristiwa tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan, yaitu perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana.

### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Luas lahan di Kabupaten Bantul sebesar 50.685 ha terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan. Berdasarkan SNI 7645-1:2014 penggunaan lahan diklasifikasi terdiri dari hutan lahan kering, hutan lahan basah, sawah irigasi, sawah non irigasi, Kawasan terbangun, Kawasan tidak terbangun, gosomng sungai, pasir pantai, tambak, tubuh air. Data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Penggunaan Lahan | Luas lahan (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Hutan Lahan Kering | 1.573,6 | 1.547,5 | 1.497,5 | 1.488,8 | 1.471,4 |
| 2 | Hutan Lahan Basah | 49,2 | 47,5 | 46,3 | 45,2 | 47,3 |
| 3 | Sawah Irigasi | 14.935,3 | 14.877,6 | 14.477,6 | 14.270,8 | 13.772,1 |
| 4 | Sawah Non Irigasi | 14.325,4 | 14.281,9 | 13.965,9 | 13.888,3 | 13.566,1 |
| 5 | Kawasan Terbangun | 16.559,3 | 16.721,2 | 17.531,5 | 17.959,9 | 18.675,7 |
| 6 | Kawasan Tidak Terbangun | 2.329,5 | 2.296,4 | 2.258,4 | 2.122,0 | 1.986,3 |
| 7 | Gosong Sungai | 17,7 | 18,3 | 19,2 | 16,5 | 15,9 |

| No. | Penggunaan Lahan | Luas lahan (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8 | Pasir Pantai | 270,3 | 269,9 | 265,9 | 265,9 | 237,2 |
| 9 | Tambak | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| 10 | Tubuh Air | 570,1 | 570,1 | 568,1 | 573,0 | 858,5 |
| | **Jumlah** | **50.685,0** | **50.685,0** | **50.685,0** | **50.685,0** | **50.685,0** |

Sumber: Bappeda dan DPTR, 2021

Berdasarkan tabel di atas penggunaan lahan di Kabupaten Bantul didominasi oleh lahan terbangun sebesar 36,85%, sawah irigasi 27,17% dan sawah non irigasi 26,77%. Selanjutnya, pada data penggunaan lahan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut terjadi perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang berkurang terjadi pada penggunaan lahan sawah baik yang beririgasi maupun tidak beririgasi, kawasan tidak terbangun dan pasir pantai. Sementara untuk penambahan penggunaan lahan terjadi pada kawasan terbangun dan tubuh air. Namun, perlu diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan perubahan lahan yang didasarkan pada data Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) sehingga merupakan data eksisting di lapangan. Hal ini tentu akan memiliki perbedaan dengan data pada perubahan penggunaan lahan yang didasarkan pada data ijin pemanfaatan penggunaan lahan. Fakta perubahan lahan dimaksud di atas mengindikasikan terjadinya alih fungsi lahan pada sawah menjadi lahan terbangun. Hal ini berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada tingginya angka urbanisasi.

Tabel 2 7 Alih Fungsi Sawah Irigasi

| Tahun | Alih Fungsi Sawah Irigasi (Ha) |
|---|---|
| 2017 | 57.70 |
| 2018 | 400.00 |
| 2019 | 206.80 |
| 2020 | 498.70 |

Sumber: Bappeda dan DPTR (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021, diolah

Perubahan penggunaan lahan khususnya lahan sawah yang dilakukan masyarakat didorong oleh kebutuhan untuk pembangunan rumah pribadi yang dilakukan tanpa melalui proses perijinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis dari Pemerintah Bantul terkait alih fungsi lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan langkah-langkah guna pengendalian alih fungsi lahan dengan penyusunan Peraturan Daerah Pengendalian Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan (PLP2B) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain upaya tersebut, juga, dilakukan langkah penumbuhan minat dan perlindungan pertanian, sehingga masyarakat tetap mempertahankan lahannya. Penggunaan lahan secara detail dapat dilihat dalam gambar peta berikut ini:

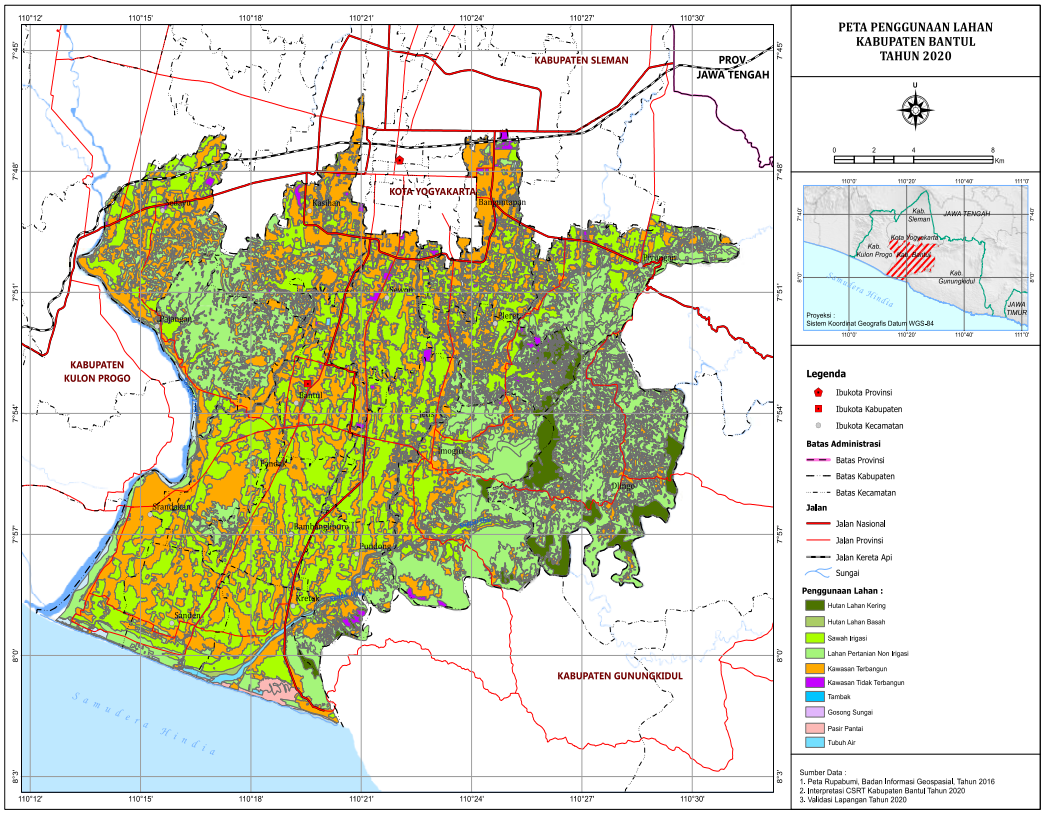


Sumber: Interpretasi CSRT Kabupaten Bantul, 2020

Gambar 2.10. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul

Berdasarkan gambar tersebut di atas, dapat diamati penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan sawah irigasi berada di wilayah bagian tengah memanjang dari utara ke selatan. Hal ini merupakan kansekuensi dari kondisi kesuburan tanah di wilayah ini sehingga juga mendorong perkembangan wilayah terbangun. Sementara wilayah timur cenderung merupakan lahan pertanian non irigasi dan belum banyak lahan terbangun. Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerataan wilayah terbangun agar tidak terkonsentrasi di wilayah tengah.

### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bantul dapat diketahui dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Penataan ruang Kabupaten Bantul yaitu

mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Fungsi budidaya meliputi kawasan peruntukan perkebunan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya.

#### 2.1.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Ha (16,86%) penyebarannya difokuskan pada Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Pundong, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Sanden.

#### 2.1.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian tanaman hortikultura, dan kawasan peternakan, yaitu:

1) Kawasan pertanian tanaman pangan direncanakan seluas ±11.3177,69 Ha (22,05%) difokuskan terutama berada pada wilayah bagian tengah dengan penyebarannya kapanewon;
2) Kawasan hortikultura direncanakan seluas ±7.897,32 Ha (15,58%) yang berada di seluruh wilayah kapanewon, kecuali Kapanewon Sewon dan Kapanewon Bantul;
3) Kawasan peternakan direncanakan untuk peruntukan :
   a. ternak besar potong tersebar di seluruh wilayah kapanewon;
   b. ternak besar perah berada di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Jetis, dan Kapanewon Sedayu;
   c. ternak kecil dan unggas berada di seluruh wilayah Kapanewon;

Kawasan peruntukan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 19.075,01Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 14.407,50Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.667,51Ha.

#### 2.1.2.3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan perikanan berupa:
   a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
   b. Kawasan Perikanan Budi Daya.
2) Kawasan Perikanan Tangkap direncanakan di wilayah Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Kretek;
3) Kawasan Perikanan Budidaya direncanakan di seluruh wilayah kapanewon;
4) Kawasan Perikanan Budidaya untuk pembesaran direncanakan berada di Kapanewon Piyungan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan Kapanewon Pandak, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Sedayu.

5) Kawasan Perikanan Budidaya untuk pembenihan direncanakan berada di Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Pandak.
6) Kawasan Perikanan Budidaya untuk jenis ikan hias direncanakan berada di Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Bantul.

### 2.1.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan direncanakan seluas ±4.426 Ha yang terdiri dari:

1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam seluas ±565Ha terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Imogiri.
2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan seluas ±2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) hektar terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Dlingo.
3) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat seluas ±910Ha terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Jetis.

### 2.1.2.5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1) Kawasan peruntukan industri untuk industri menengah dan besar sebagai berikut :
   1. Kapanewon Piyungan dengan luas 374,96 (tiga ratus tujuh puluh empat koma sembilan enam) hektar;

2. Kapanewon Sedayu dengan luas 246,14 (dua ratus empat puluh enam koma satu empat) hektar;
3. Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar.

2) Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.
3) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kapanewon diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

### 2.1.2.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan, dengan sebaran sebagai berikut:

1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdapat di:
   a. Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri;
   b. Kompleks Situs Ambarbinangun di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan;
   c. Situs Keraton Mataram di Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret;
   d. Padepokan Ki Ageng Mangir di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan;
   e. Kawasan Kotagedhe di Kalurahan Jagalan dan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan;
   f. Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan;
   g. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
   h. Desa/Kalurahan Budaya Dlingo Kapanewon Dlingo, Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan, Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan;
   i. Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan;

j. Cepuri Parangkusumo di Kalurahan Parangtritis; dan
k. Parangendog di Kalurahan Parangtritis.

2) Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di:
   a. Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
   b. Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
   c. Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);
   d. Kompleks Goa Cerme di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri;
   e. Goa Jepang di Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong;
   f. Agrowisata Samas di Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden; dan Agrowisata Dlingo di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo.

3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten Bantul:
   a. Desa Wisata Kebonagung di Kalurahan Kebonagung, Kapanewon Imogiri;
   b. Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kapanewon Bantul dan Kapanewon Sewon;
   c. Desa Kerajinan Krebet di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan;
   d. Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kapanewon Kasihan;
   e. Desa Kerajinan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
   f. Desa Wisata Serut;
   g. Desa Wisata Trimulyo; dan
   h. Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan.

Dari uraian di atas Goa Jepang masuk dalam kawasan pariwisata alam maupun budaya karena sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa Goa Jepang masuk pada wisata budaya dan wisata alam.

Goa Jepang masuk pada wisata budaya karena merupakan peninggalan Jepang, dan masuk dalam cagar budaya, sehingga pengelolaan wisata di Goa Jepang harus memperhatikan ketentuan pengelolaan cagar budaya.

### 2.1.2.7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan sebaran sebagai berikut:

1) Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 4.922,72 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua koma tujuh dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Sewon;
2) Rencana permukiman kota satelit direncanakan seluas 1.846,45 (seribu delapan ratus empat puluh enam koma empat lima) hektar berada di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan; Kalurahan Guwosari, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi, Kapanewon Pajangan; dan Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak;
3) Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 9.450,22 (sembilan ribu empat ratus lima puluh koma dua dua) hektar berada di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan.

### 2.1.2.8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi: kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya, dengan sebaran sebagai berikut:

1). Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:
   a. Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkutan Udara di Kapanewon Banguntapan;
   b. Sekolah Polisi Negara di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri;
   c. Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
   d. Polisi Air Udara di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek;
   e. Pos Angkatan Laut di Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden; dan
   f. Stasiun Radar di Kapanewon Kretek.

2). Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:
   a. Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa yaitu pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
   b. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu mengupayakan terlayaninya wilayah kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA, pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Bantul, Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pajangan;
   c. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti

puskesmas, klinik, dan rumah sakit dan menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan;

d. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga yaitu fasilitas olah raga skala kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung, dan fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing Kapanewon dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penilaian dari BNPB memiliki nilai Indeks Risiko Bencana 187,20 dengan kategori tinggi. Risiko bencana berbanding lurus dengan tingkat bahaya dan kerentanan, artinya semakin tinggi tingkat bahaya dan kerentanan maka semakin tinggi risiko bencana. Sebaliknya, risiko bencana berbanding terbalik dengan kapasitas daerah artinya semakin baik/tinggi kapasitas daerah maka semakin rendah risiko bencana.

Komponen bahaya bencana adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam sedangkan komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Selama tahun 2020 tercatat 530 kejadian bencana yang tersebar hampir di seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil kajian dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2011, Kawasan rawan bencana sebagai berikut :

Tabel 2 7 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

| No | Jenis Bencana | Lokasi yang Berpotensi |
|---|---|---|
| 1. | Kawasan rawan gempa bumi | Di seluruh Kapanewon |
| 2. | Kawasan rawan | Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan |

| No | Jenis Bencana | Lokasi yang Berpotensi |
|---|---|---|
| | longsor | Pajangan |
| 3. | Kawasan rawan banjir | Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret |
| 4. | Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi | Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, sebagian Kapanewon Pundong, sebagian Kapanewon Imogiri, sebagian Kapanewon Jetis, dan sebagian Kapanewon Bambanglipuro |
| 5. | Kawasan rawan kekeringan | Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek |

Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Kawasan Rawan bencana di Kabupaten Bantul disajikan dalam gambar berikut:

1. Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh kapanewon.

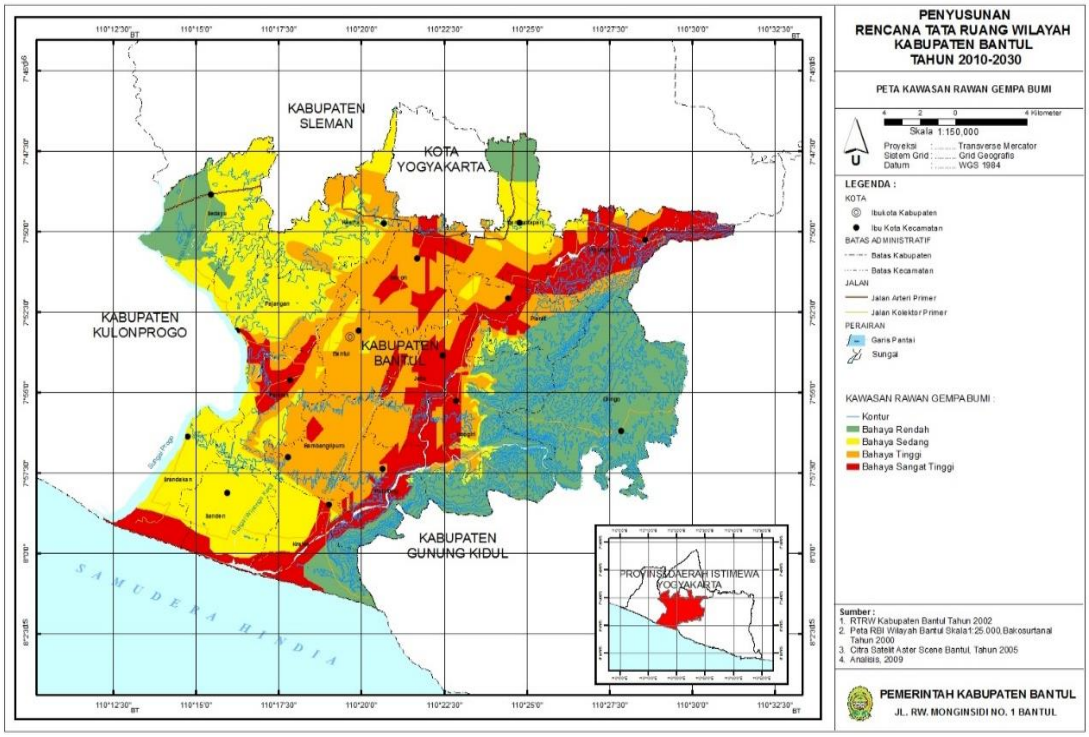


Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 10 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bantul

2. Kawasan rawan longsor meliputi wilayah Kapanewon Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, Pundong dan Pajangan.

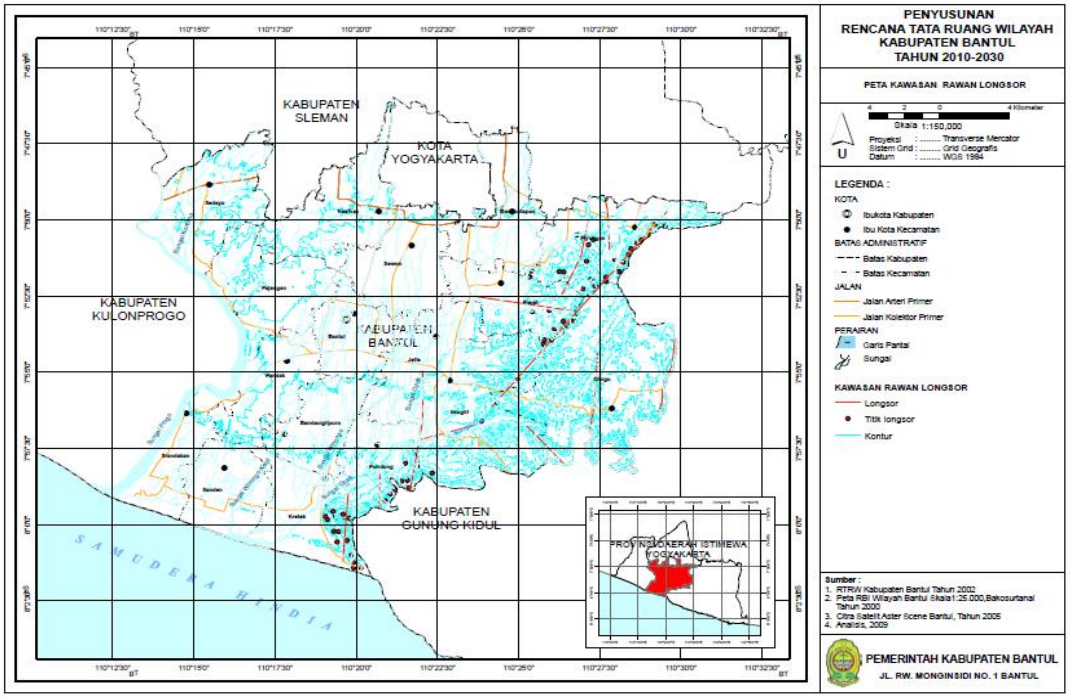


Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 11 Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Bantul

3. Kawasan rawan banjir meliputi wilayah Kapanewon Srandakan, Pandak, Kretek, Sanden, Pundong, Jetis dan Pleret

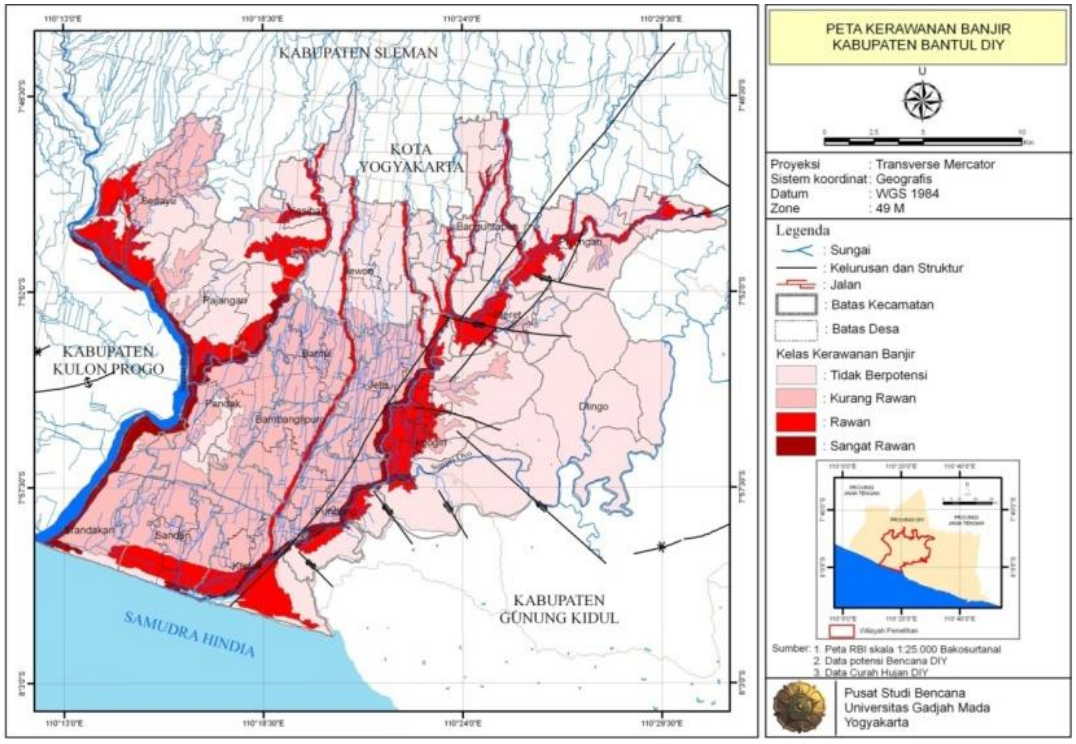


Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030,

Gambar 2 12 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bantul

4. Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi meliputi Kapanewon Kretek, Srandakan, dan Sanden, sebagian Kapanewon Pandak, Pundong, Imogiri, Jetis, dan Bambanglipuro.

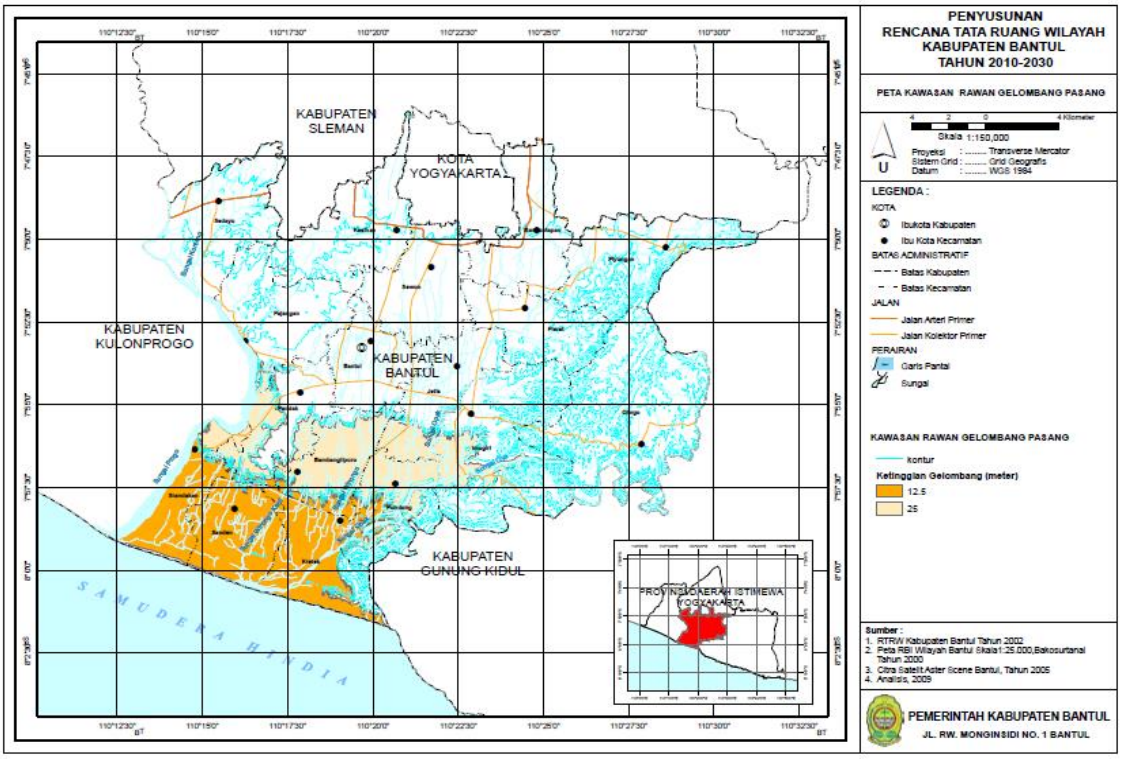


Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 13 Peta Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Kabupaten Bantul

5. Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

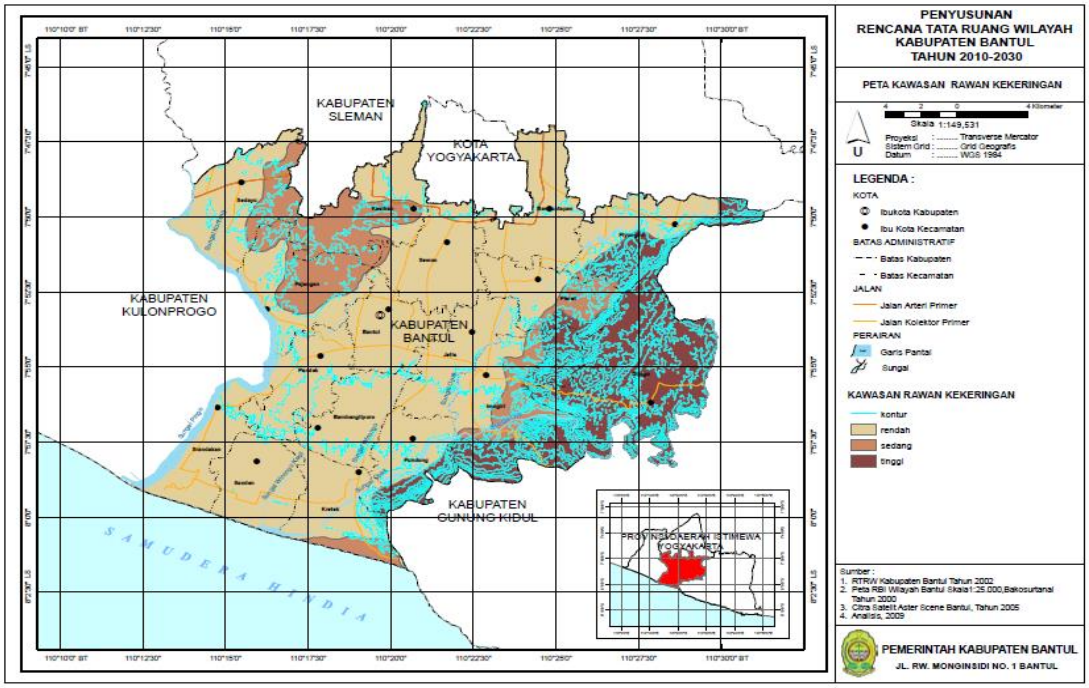


Sumber: RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030

Gambar 2 14 Peta Kawasan Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Bantul

Selain kawasan rawan bencana tersebut di atas menurut BPBD masih ada potensi bencana lain di Kabupaten Bantul, diantaranya bahaya cuaca ekstrem, tsunami, kebakaran, dan epidemi wabah penyakit. Peta potensi bencana disajikan pada gambar berikut.

1. Potensi bahaya cuaca ekstrem meliputi Kapanewon Banguntapan, Sewon, Bantul, Jetis, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, dan sebagian Kretek, Kasihan, Piyungan, Imogiri.

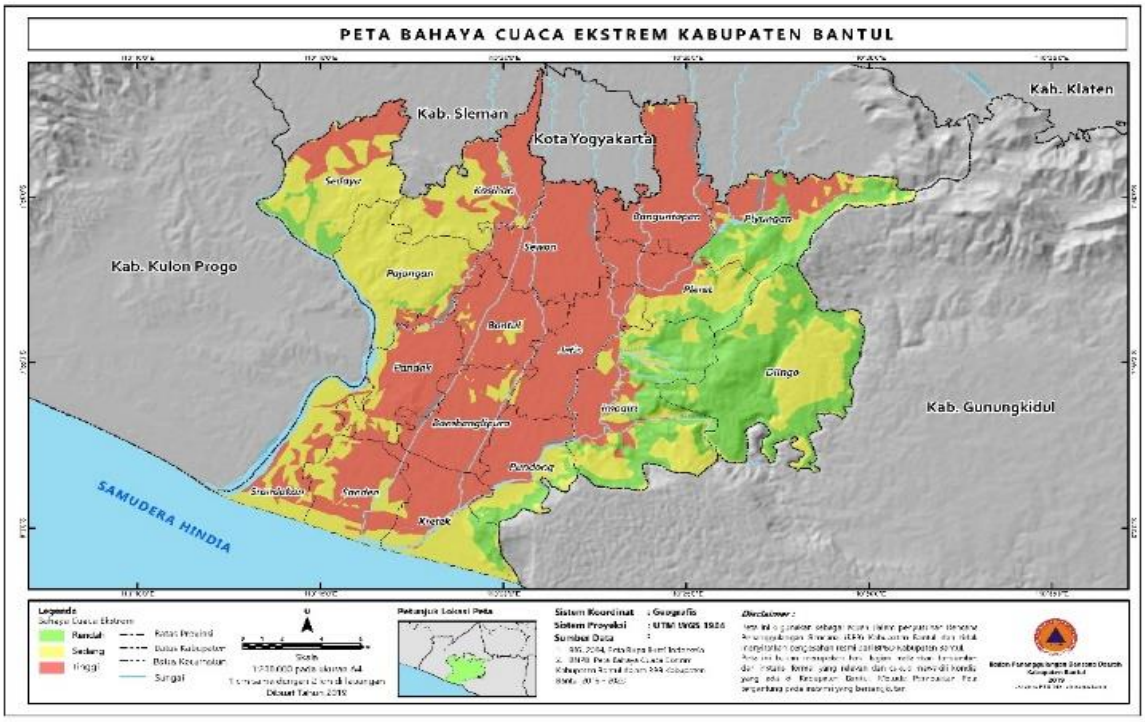


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 15 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul

2. Potensi bahaya tsunami meliputi Kapanewon Srandakan, Sanden, dan Kretek.

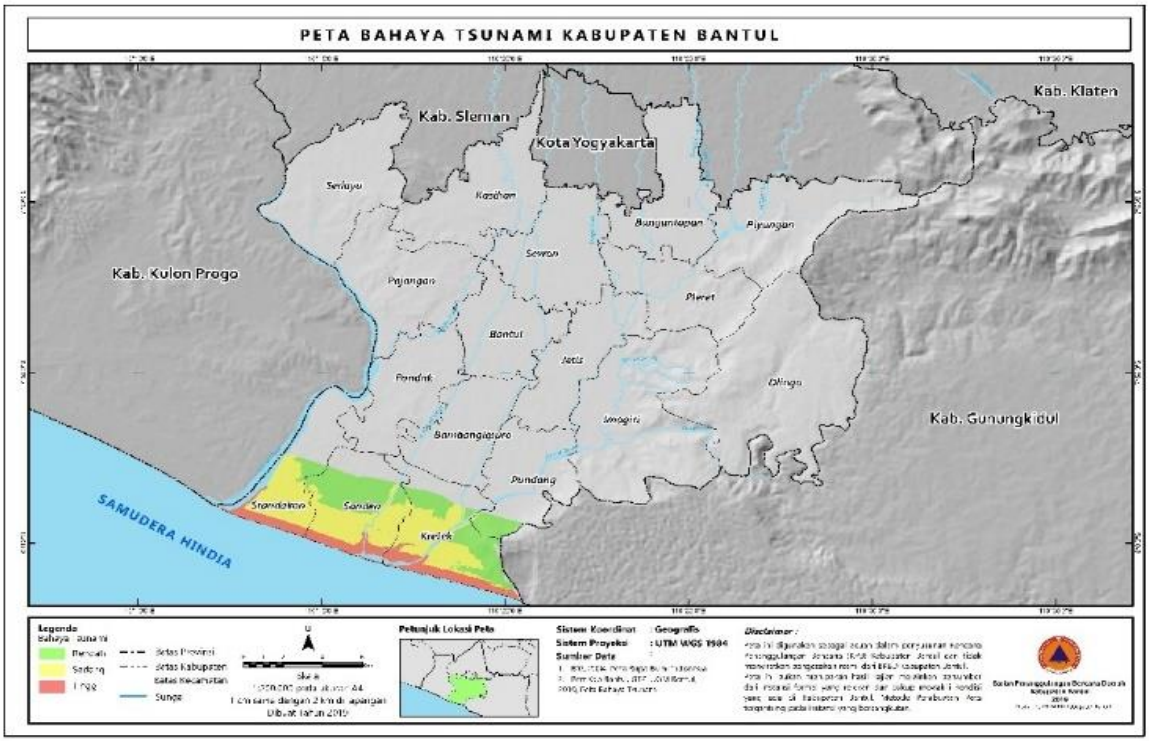


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 16 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Bantul

3. Potensi bahaya kebakaran meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Piyungan, dan sebagian Pleret, dan Imogiri, Pundong, Bantul, Bambanglipuro.

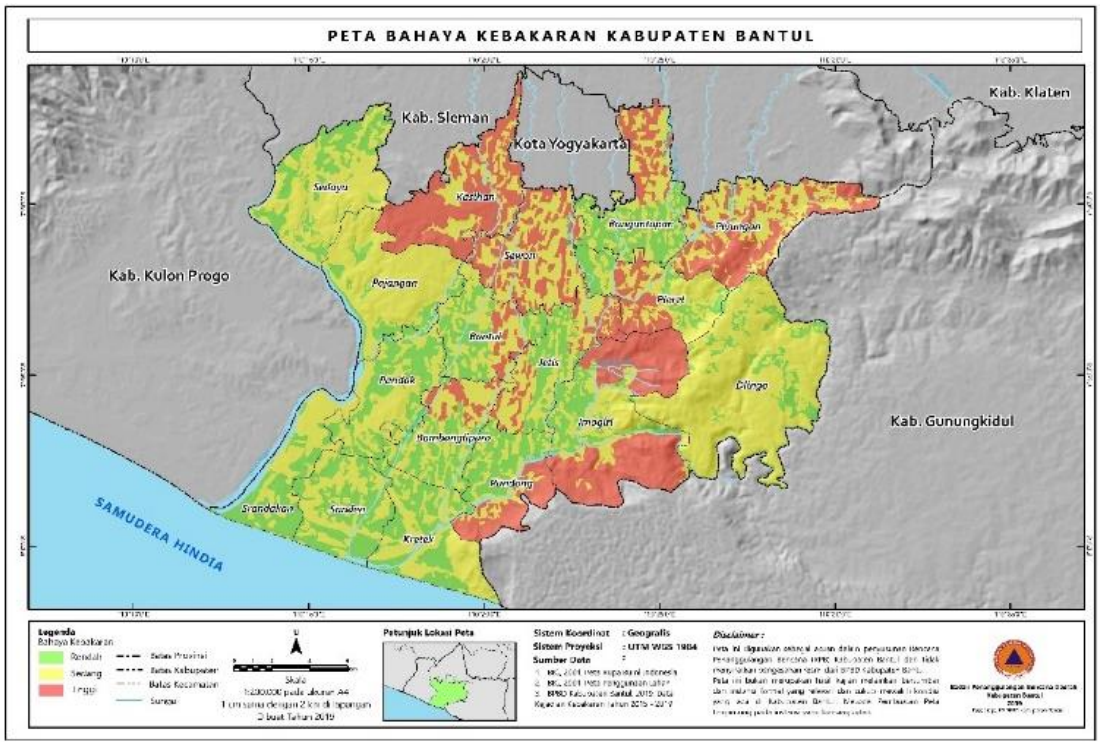


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 17 Peta Bahaya Kebakaran Kabupaten Bantul

4. Potensi bahaya epidemi wabah meliputi seluruh kapanewon.

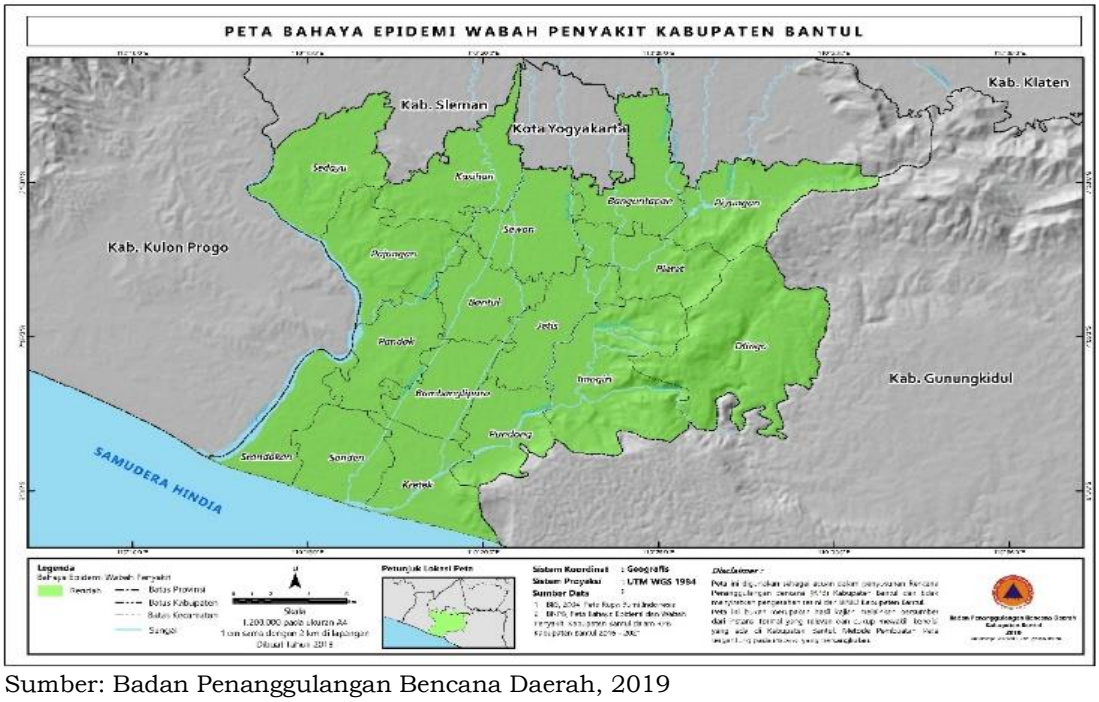


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Gambar 2 18 Peta Bahaya Epidemi Wabah Penyakit Kabupaten Bantul

Komponen kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Peningkatan kapasitas daerah salah satunya dilakukan dengan perwujudan kalurahan tangguh bencana dan satuan pendidikan aman bencana. Pencapaian kalurahan tangguh bencana sampai dengan tahun 2020 sebanyak 35 kalurahan dari 75 kalurahan atau baru mencapai 46,67%. Sedangkan pencapaian Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebanyak 23 atau sebesar 4,51%.

Potensi tingkat risiko bencana pada 9 (sembilan) jenis bencana adalah tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Jenis Ancaman | Luas Ancaman | | Jumlah Penduduk Terpapar | | Nilai Kerugian | | Tingkat Kapasitas Daerah | Tingkat risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ha | Kelas | Jiwa | Kelas | Miliyar | Kelas | Kelas | |
| 1 | Gempa Bumi | 6.978 | Tinggi | 93.414 | Sedang | 8.417 | Sedang | Rendah | Sedang |
| 2 | Longsor | 6.874 | Tinggi | 63.369 | Sedang | 5.629 | Sedang | Rendah | Sedang |
| 3 | Banjir | 15.068 | Tinggi | 24.558 | Sedang | 24.104 | Tinggi | Rendah | Tinggi |
| 4 | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 799 | Tinggi | 7.031 | Rendah | 651 | Rendah | Rendah | Rendah |
| 5 | Kekeringan | 11.225 | Tinggi | 93.460 | Sedang | 13 | Rendah | Rendah | Rendah |
| 6 | Cuaca Ekstrim | 44.768 | Tinggi | 692.936 | Tinggi | 53.486 | Tinggi | Rendah | Tinggi |
| 7 | Tsunami | 3.384 | Tinggi | 34.735 | Sedang | 1.751 | Sedang | Rendah | Sedang |
| 8 | Kebakaran | 11.727 | Tinggi | 94.878 | Sedang | 22.173 | Tinggi | Rendah | Tinggi |
| 9 | Epidemi dan Wabah penyakit | 50.685 | Sedang | 945.441 | Tinggi | 317* | Rendah | Rendah | tinggi |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

*Keterangan : * angka sementara, belum memperhitungkan kerugian* yang dirasakan/dialami masyarakat

Jenis bencana tidak hanya bencana alam, namun bencana non alam juga berpotensi menjadi ancaman. Hal ini terbukti dengan terjadinya pandemi Covid-19. Sejak awal Maret 2020, wilayah Kabupaten Bantul mulai dilanda wabah Covid-19 dan terus bertambah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Bantul bahkan pada bulan Maret 2021 tiga wilayah kapanewon terkonfimasi lebih dari 1000 kasus yaitu Kapanewon Banguntapan, Sewon, dan Kasihan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat karena mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, meskipun pada sektor tertentu ada dampak positif yang diperoleh seperti sektor informasi dan komunikasi. Luasnya sektor kehidupan yang terdampak menjadikan tidak mudah dalam mengidentifikasi atau menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan. Namun, melalui pendekatan kondisi perekonomian makro daerah, kerugian dampak Pandemi Covid-19 dapat tergambar dari pertumbuhan PDRB . Merujuk pada hal tersebut, maka selama pandemi Covid-19 (2019-2020) telah menyebabkan penurunan PDRB sebesar Rp317,140 Milyar. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi pendapatan daerah ada penurunan sebesar Rp30,64 Milyar. Sementara untuk kerugian yang dirasakan/dialami masyarakat setiap sektor belum dapat terhitung secara detil karena luasnya dampak yang ditimbulkan

Tingkat risiko bencana per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 9 Tingkat Risiko Bencana Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Kapanewon | Risiko | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kebakaran | Banjir | Tsunami | Gempa bumi | Tanah Longsor | Kekeringan | Cuaca Ekstrim | Gel. Ekstrim Dan Abrasi | Epidemi dan Wabah Penyakit * |
| 1. | Pajangan | Rendah | Rendah | | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah | | Rendah |
| 2. | Pandak | Rendah | Rendah | | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah | | Sedang |
| 3. | Sedayu | Rendah | Rendah | | Rendah | Rendah | Rendah | Rendah | | Sedang |
| 4. | Sanden | Rendah | Rendah | Tinggi | Sedang | Rendah | Rendah | Tinggi | Tinggi | Sedang |
| 5. | Dlingo | Sedang | Rendah | | Sedang | Tinggi | Tinggi | Rendah | | Sedang |
| 6. | Sewon | Tinggi | Rendah | | Rendah | Rendah | Rendah | Tinggi | | Sedang |

| No | Kapanewon | Risiko | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kebakaran | Banjir | Tsunami | Gempa bumi | Tanah Longsor | Kekeringan | Cuaca Ekstrim | Gel. Ekstrim Dan Abrasi | Epidemi dan Wabah Penyakit * |
| 7. | Srandakan | Rendah | Rendah | Tinggi | Rendah | Rendah | Rendah | Sedang | Tinggi | Sedang |
| 8. | Kasihan | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Sedang | Sedang | Tinggi | | Tinggi |
| 9. | Imogiri | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | | Sedang |
| 10. | Pleret | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Rendah | Rendah | Tinggi | | Tinggi |
| 11. | Bantul | Sedang | Tinggi | | Sedang | Rendah | Rendah | Tinggi | | Tinggi |
| 12. | Pundong | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Rendah | Tinggi | Tinggi | | Sedang |
| 13. | Kretek | Rendah | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Rendah | Rendah | Tinggi | Tinggi | Sedang |
| 14. | Bambanglipuro | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Rendah | Rendah | Tinggi | | Sedang |
| 15. | Piyungan | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | | Rendah |
| 16. | Jetis | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Rendah | Rendah | Tinggi | | Tinggi |
| 17. | Banguntapan | Tinggi | Tinggi | | Tinggi | Rendah | Rendah | Tinggi | | Tinggi |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Keterangan: * Data covid 19 di Kabupaten Bantul per 31 Desember 2020

### 2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2016 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah 928.676 jiwa dan cenderung meningkat mencapai 954.706 jiwa pada tahun 2020. Dihitung dari nilai totalnya, pertumbuhan penduduk di tahun 2020 adalah sebesar 0,57%.

Tabel 2 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul menurut Kapanewon

| No | Kapanewon | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | Pertumbuhan 2020 (%) | Proporsi 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | Jumlah | Sex Ratio | L | P | Jumlah | Sex Ratio | L | P | Jumlah | Sex Ratio | L | P | Jumlah | Sex Ratio | L | P | Jumlah | Sex Ratio | | |
| 1 | Kretek | 15232 | 15850 | 31082 | 96.10 | 15061 | 15776 | 30837 | 95.47 | 15099 | 15756 | 30855 | 95.83 | 15101 | 15762 | 30863 | 95.81 | 15076 | 15688 | 30764 | 96.10 | -0,32% | 3,2 |
| 2 | Srandakan | 15590 | 15654 | 31244 | 99.59 | 15551 | 15725 | 31276 | 98.89 | 15522 | 15642 | 31164 | 99.23 | 15505 | 15713 | 31218 | 98.68 | 15475 | 15607 | 31082 | 99.15 | -0,44% | 3,3 |
| 3 | Sanden | 16085 | 16409 | 32494 | 98.03 | 15755 | 16169 | 31924 | 97.44 | 15747 | 16220 | 31967 | 97.08 | 15763 | 16209 | 31972 | 97.25 | 15713 | 16097 | 31810 | 97.61 | -0,51% | 3,3 |
| 4 | Pundong | 17554 | 17930 | 35484 | 97.90 | 17456 | 17992 | 35448 | 97.02 | 17503 | 18165 | 35668 | 96.36 | 17658 | 18250 | 35908 | 96.76 | 17587 | 18079 | 35666 | 97.28 | -0,67% | 3,7 |
| 5 | Pajangan | 17409 | 17265 | 34674 | 100.83 | 17467 | 17427 | 34894 | 100.23 | 17691 | 17774 | 35465 | 99.53 | 18000 | 18040 | 36040 | 99.78 | 18271 | 18280 | 36551 | 99.95 | 1,42% | 3,8 |
| 6 | Dlingo | 19401 | 19625 | 39026 | 98.86 | 19188 | 19314 | 38502 | 99.35 | 19463 | 19629 | 39092 | 99.15 | 19649 | 19888 | 39537 | 98.80 | 19872 | 20126 | 39998 | 98.74 | 1,17% | 4,2 |
| 7 | Bambanglipuro | 20498 | 20887 | 41385 | 98.14 | 20326 | 20875 | 41201 | 97.37 | 20551 | 21070 | 41621 | 97.54 | 20673 | 21207 | 41880 | 97.48 | 20620 | 21086 | 41706 | 97.79 | -0,42% | 4,4 |
| 8 | Sedayu | 23155 | 22898 | 46053 | 101.12 | 23109 | 23043 | 46152 | 100.29 | 23507 | 23546 | 47053 | 99.83 | 23754 | 23892 | 47646 | 99.42 | 24046 | 24110 | 48156 | 99.73 | 1,07% | 5,0 |
| 9 | Pleret | 23610 | 23053 | 46663 | 102.42 | 23590 | 23235 | 46825 | 101.53 | 23906 | 23953 | 47859 | 99.80 | 24246 | 23924 | 48170 | 101.35 | 24430 | 24067 | 48497 | 101.51 | 0,68% | 5,1 |
| 10 | Pandak | 25986 | 25784 | 51770 | 100.78 | 25820 | 25672 | 51492 | 100.58 | 25981 | 25800 | 51781 | 100.70 | 26112 | 25901 | 52013 | 100.81 | 26118 | 25918 | 52036 | 100.77 | 0,04% | 5,5 |
| 11 | Piyungan | 25463 | 25383 | 50846 | 100.32 | 25490 | 25561 | 51051 | 99.72 | 25714 | 25978 | 51692 | 98.98 | 26041 | 26292 | 52333 | 99.05 | 26320 | 26542 | 52862 | 99.16 | 1,01% | 5,5 |
| 12 | Jetis | 28650 | 28824 | 57474 | 99.40 | 28540 | 28868 | 57408 | 98.86 | 28906 | 29300 | 58206 | 98.66 | 29111 | 29438 | 58549 | 98.89 | 29237 | 29394 | 58631 | 99.47 | 0,14% | 6,1 |
| 13 | Imogiri | 31247 | 31172 | 62419 | 100.24 | 31168 | 31363 | 62531 | 99.38 | 31442 | 31737 | 63179 | 99.07 | 31583 | 31959 | 63542 | 98.82 | 31730 | 32105 | 63835 | 98.83 | 0,46% | 6,7 |
| 14 | Bantul | 31548 | 31576 | 63124 | 99.91 | 31230 | 31558 | 62788 | 98.96 | 31637 | 32032 | 63669 | 98.77 | 31988 | 32377 | 64365 | 98.80 | 32146 | 32506 | 64652 | 98.89 | 0,45% | 6,8 |
| 15 | Sewon | 49084 | 48336 | 97420 | 101.55 | 48760 | 48274 | 97034 | 101.01 | 49463 | 49043 | 98506 | 100.86 | 50183 | 49624 | 99807 | 101.13 | 50539 | 50024 | 100563 | 101.03 | 0,76% | 10,5 |
| 16 | Kasihan | 50397 | 49933 | 100330 | 100.93 | 50152 | 50070 | 100222 | 100.16 | 51055 | 51120 | 102175 | 99.87 | 51749 | 51778 | 103527 | 99.94 | 52215 | 52384 | 104599 | 99.68 | 1,04% | 11 |
| 17 | Banguntapan | 53951 | 53957 | 107908 | 99.99 | 53786 | 53810 | 107596 | 99.96 | 54948 | 55178 | 110126 | 99.58 | 55800 | 56155 | 111955 | 99.37 | 56476 | 56822 | 113298 | 99.39 | 1,20% | 11,9 |
| **Jumlah** | | **464860** | **464536** | **929396** | **100.07** | **462449** | **464732** | **927181** | **99.51** | **5E+05** | **471943** | **940078** | **99.19** | **472916** | **476409** | **949325** | **99.27** | **475871** | **478835** | **954706** | **99.38** | **0,57%** | **100** |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Di tahun 2020, pertumbuhan penduduk yang tertinggi ada di Kapanewon Pajangan (1,42%), Kapanewon Banguntapan (1,20%), dan Dlingo (1,17%). Jumlah penduduk terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan (11,9%), Kasihan (11%) dan Sewon (10,5%). Hal ini terjadi karena ketiga kapanewon tersebut berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Sedangkan penduduk yang paling sedikit ada di Kapanewon Kretek (3,2%), Srandakan (3,3%) dan Sanden (3,3%).

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif *gender.* Dari sisi *sex ratio*, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bantul lebih besar daripada lelaki. Di tahun 2020, kapanewon yang memiliki *sex ratio* di atas 100% (lelaki lebih banyak daripada perempuan) ada di Kapanewon Pandak (100,49%), Pleret (101,64%) dan Sewon (100,94%). Dari sisi *sex ratio* ini sangat jelas bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus dioptimalkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan keluarga untuk pengentasan kemiskinan.

Tabel 2 11 Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul

| No | Kapanewon | Kepadatan (jiwa/km²) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata |
| 1 | Dlingo | 692 | 689 | 700 | 705 | 715 | 700 |
| 2 | Pajangan | 1.043 | 1.049 | 1.067 | 1.076 | 1.099 | 1.066 |
| 3 | Imogiri | 1.146 | 1.148 | 1.159 | 1.164 | 1.171 | 1.157 |
| 4 | Kretek | 1.161 | 1.152 | 1.153 | 1.154 | 1.149 | 1.153 |
| 5 | Sedayu | 1.340 | 1.343 | 1.369 | 1.381 | 1.401 | 1.366 |
| 6 | Sanden | 1.403 | 1.378 | 1.380 | 1.381 | 1.373 | 1.383 |
| 7 | Pundong | 1.498 | 1.497 | 1.506 | 1.510 | 1.506 | 1.503 |
| 8 | Piyungan | 1.563 | 1.569 | 1.589 | 1.601 | 1.624 | 1.589 |
| 9 | Srandakan | 1.705 | 1.707 | 1.701 | 1.704 | 1.696 | 1.702 |
| 10 | Bambanglipuro | 1.823 | 1.815 | 1.834 | 1.840 | 1.837 | 1.829 |

| No | Kapanewon | Kepadatan (jiwa/km²) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata |
| 11 | Pleret | 2.031 | 2.039 | 2.068 | 2.083 | 2.111 | 2.066 |
| 12 | Pandak | 2.130 | 2.119 | 2.131 | 2.137 | 2.141 | 2.131 |
| 13 | Jetis | 2.349 | 2.346 | 2.379 | 2.387 | 2.396 | 2.371 |
| 14 | Bantul | 2.876 | 2.861 | 2.901 | 2.915 | 2.945 | 2.899 |
| 15 | Kasihan | 3.099 | 3.095 | 3.156 | 3.180 | 3.230 | 3.152 |
| 16 | Sewon | 3.587 | 3.573 | 3.627 | 3.655 | 3.702 | 3.628 |
| 17 | Banguntapan | 3.776 | 3.778 | 3.867 | 3.906 | 3.978 | 3.861 |
| **Rerata** | | **1.954** | **1.950** | **1.976** | **1.987** | **2.004** | **1.974** |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Dilihat dari tabel di atas kepadatan penduduk dan penyebaran penduduk belum merata. Rerata tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.974 jiwa per km$^2$ dengan standar deviasi sebesar 914 jiwa per km$^2$.

Di tahun 2020, kepadatan penduduk tertinggi ada di 3 (tiga) wilayah kapanewon yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yaitu Kapanewon Banguntapan (3.861 jiwa/km$^2$), Sewon (3.628 jiwa/km$^2$), dan Kasihan (3.152 jiwa/km$^2$). Sementara itu kepadatan penduduk geografis terendah ada di Kapanewon Dlingo (700 jiwa/km$^2$).

Dari data dapat dilihat bahwa peningkatan kepadatan penduduk hampir terjadi di semua kapanewon. Hal ini perlu diwaspadai karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, disamping juga akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

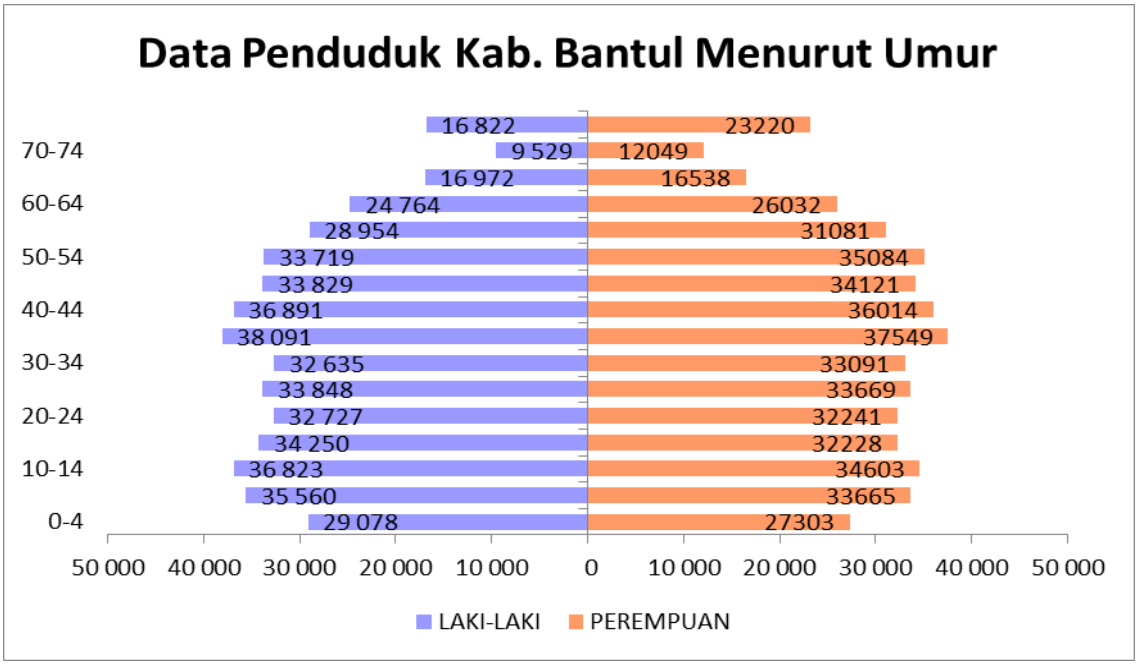


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah

Gambar 2 19 Piramida Penduduk Kabupaten Bantul 2021

Komposisi Penduduk menurut kelompok usia adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.19. Data di tabel tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Bantul didominasi oleh penduduk usia sekolah dan usia produktif, sehingga diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pendidikan dan ketenagakerjaan.

Kondisi dimana jumlah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) meningkat sedangkan jumlah usia yang tidak produktif (0-14 tahun dan di atas 64 tahun) menurun dapat dikatakan Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan.

Pemanfaatan peluang ini dapat terjadi dengan prasyarat, antara lain jika iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Upaya pemanfaatan peluang tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang untuk

menaikkan taraf hidup rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

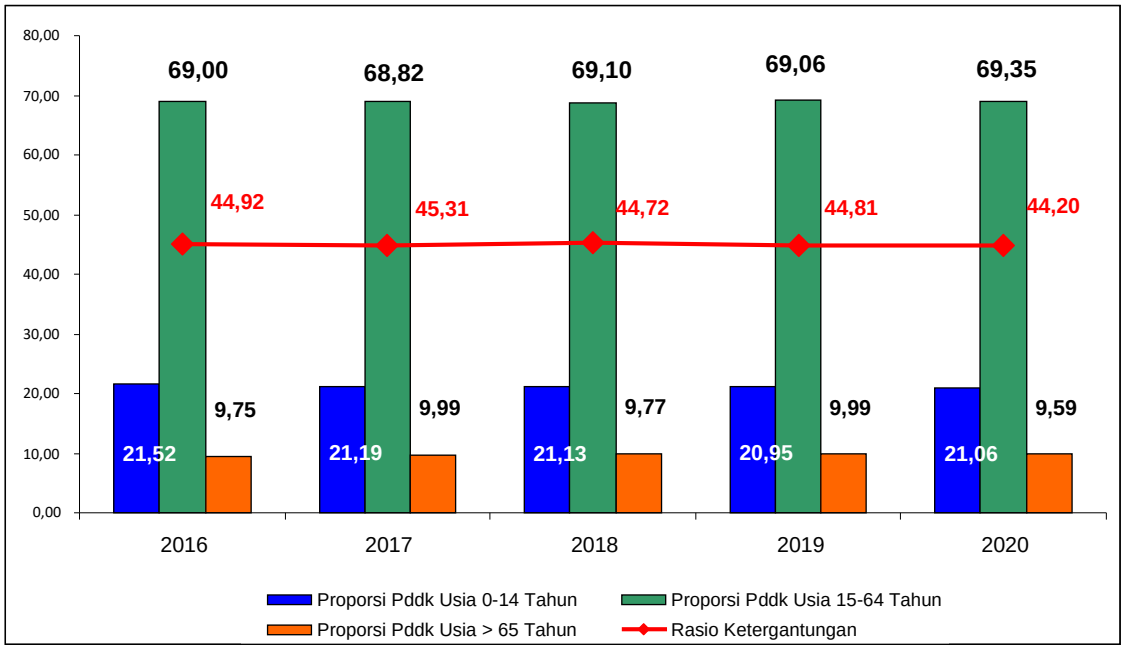


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021, diolah.

Gambar 2 20 Komposisi Penduduk menurut Usia Kabupaten Bantul 2016-2020

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memuat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bantul berdasarkan indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan target serta capaian RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

### 2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB dapat menggambarkan kinerja pembangunan dan transformasi struktural perekonomian. PDRB Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan ini terjadi pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) maupun dengan menggunakan perhitungan harga konstan (PDRB riil). Apabila dicermati angka-angkanya, peningkatan ini dapat dikatakan

signifikan dengan rata-rata 1,3 triliun rupiah per tahun untuk PDRB atas harga berlaku, dan rata-rata peningkatan sebesar 0,61 triliun untuk PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan PDRB baik nominal maupun riil pada periode 2016-2020.

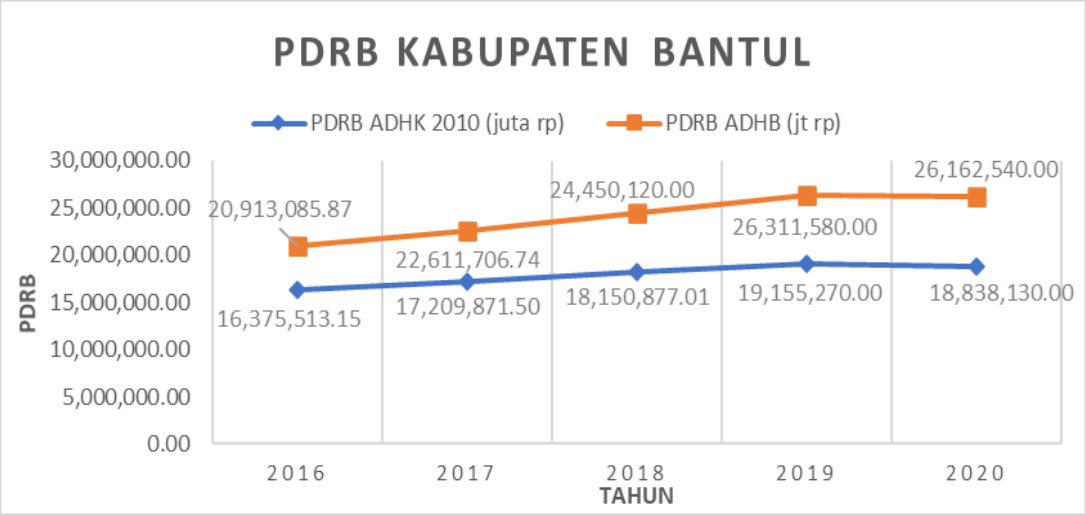


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2.21 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antara tahun 2018-2019 (periode satu tahun) telah mencapai 1,86 trilliun rupiah. Pencapaian PDRB tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Grafik PDRB yang menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan, polanya tidak jauh berbeda dengan yang dihitung menggunakan harga berlaku. Periode 2016-2019 mengalami peningkatan dan PDRB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2018-2019 tercapai peningkatan sebesar 1,0 trilliun rupiah.

Jika diperhatikan berdasar atas harga konstan perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020, besarnya PDRB mengikuti tren yang berbentuk kuadratik. Besarnya PDRB mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Dengan demikian pada

tahun 2021 dan selanjutnya perlu diambil tindakan antisipasi agar penurunannya tidak semakin besar.

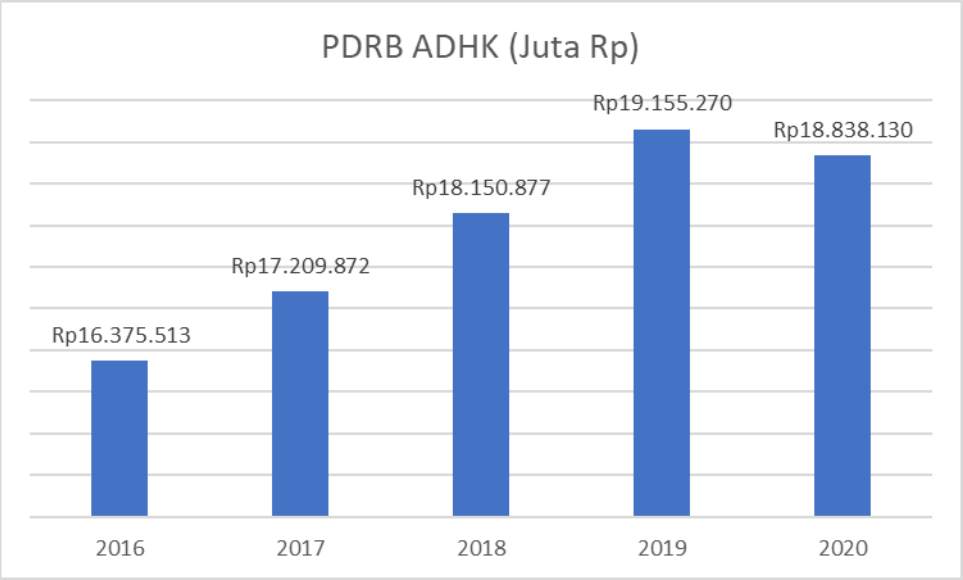


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Konstan 2010

Perkembangan PDRB Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY dalam rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

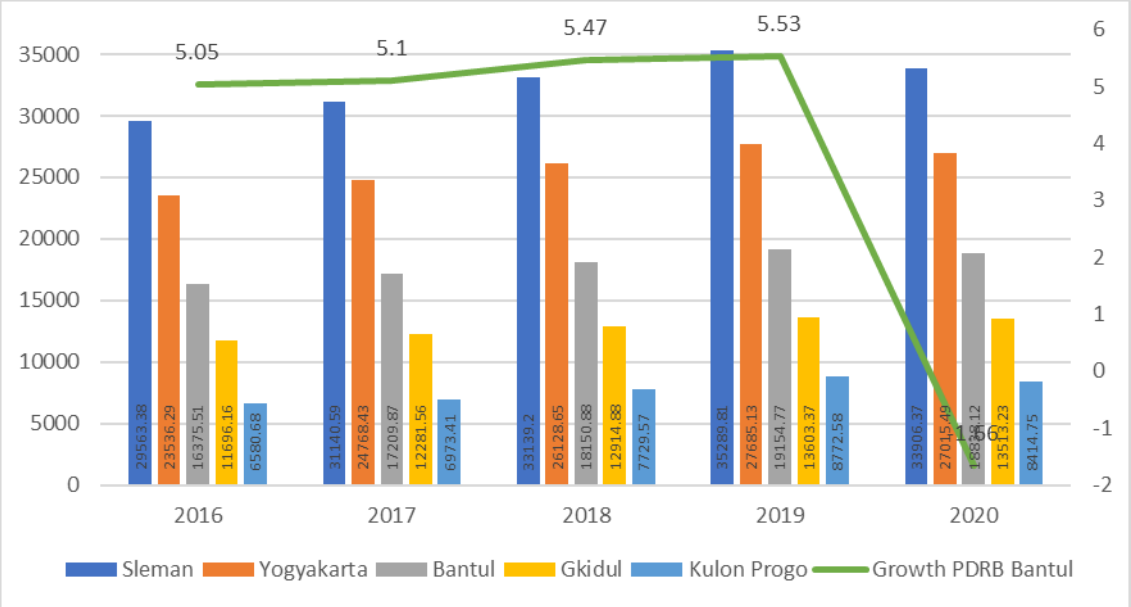


Sumber:Tabel Dinamis, BPS, 2021

Gambar 2 23 Perkembangan PDRB (milyar) ADHK 2010
Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY 2016-2020

Secara umum kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY berada dalam posisi ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam rentang tahun 2016-2020, rerata kontribusi Kabupaten Bantul dalam pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 18,53%, kontribusi Sleman sebesar 33,66% dan kontribusi Kota Yogyakarta sebesar 26,67%. Sedangkan kontribusi kabupaten Gunungkidul pada pembentukan PDRB DIY adalah sebesar 13,22% dan kontribusi Kulonprogo sebesar 7,91%. Pola kontribusi semua kabupaten/kota tersebut cenderung stabil dalam rentang tahun 2016-2020.

Apabila PDRB dilihat dengan menggolongkan lapangan usahanya, maka dengan menggunakan pengelompokan 17 sektor hasil perhitungan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 12 Perkembangan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha dalam (%)

| No. | Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 14,33 | 13,85 | 13,63 | 13,07 | 14,12 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,47 |
| 3 | Industri Pengolahan | 15,21 | 15,25 | 15,22 | 15,18 | 14,84 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Konstruksi | 9,29 | 9,38 | 9,72 | 9,75 | 8,5 |
| 7 | Perdag. dan Reparasi Mobil dan Motor | 8,47 | 8,61 | 8,69 | 8,65 | 8,46 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 4,79 | 4,74 | 4,72 | 4,85 | 4,45 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 11,67 | 11,73 | 11,69 | 11,92 | 10,73 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,32 | 7,38 | 7,32 | 7,27 | 8,74 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,8 | 2,77 | 2,83 | 2,94 | 2,88 |
| 12 | Real Estate | 6,58 | 6,57 | 6,56 | 6,71 | 6,9 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,43 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Perta-hanan, dan Jaminan Sosial | 7,55 | 7,77 | 7,73 | 7,63 | 7,72 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 6,87 | 6,82 | 6,8 | 6,9 | 7,39 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,85 | 1,85 | 1,81 | 1,85 | 2,28 |
| 17 | Jasa-jasa Lainnya | 1,98 | 2,01 | 2,04 | 2,05 | 1,86 |
| | PDRB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada tiga lapangan usaha yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum; yang masing-masing berkisar kurang lebih 14 persen, 15 persen dan 11 persen. Pada tahun 2016-2020 sektor pertanian dan industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang menurun secara bertahap (kecuali sektor pertanian tahun 2020, mengalami sedikit peningkatan).

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di suatu daerah mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut mengalami peningkatan pula. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY tahun 2016-2020.

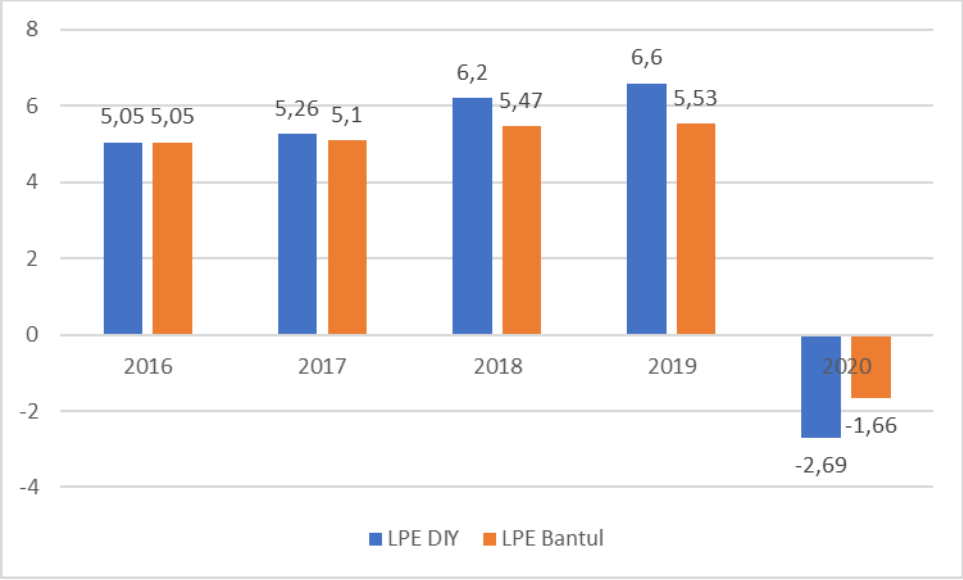


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 24 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul disandingkan dengan DIY Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besar peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan

tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen. Tahun 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY pada tahun 2016 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2017-2019 lebih rendah dibandingkan DIY.

Tren dari data berbentuk kuadratik dengan puncak, perlu usaha yang besar agar tahun-tahun berikutnya besar pertumbuhan ekonominya tidak mengikuti tren seperti di atas. Besaran pertumbuhan ekonomi harus diupayakan menjadi positif kembali agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan

Apabila dilihat dari struktur PDRB maka besarnya pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

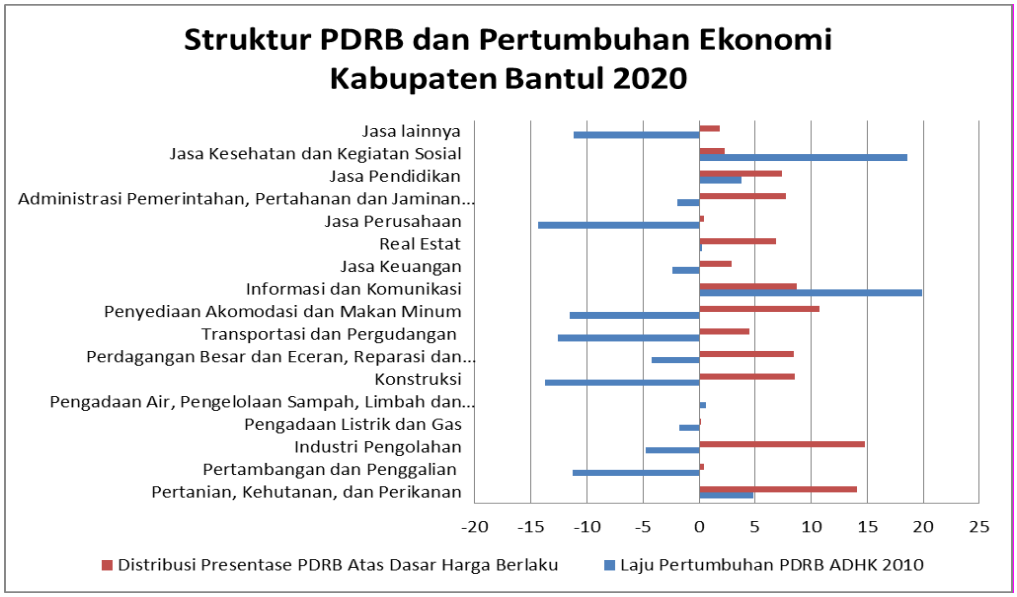


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 25 Struktur PDRB 2020 dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial pertumbuhannya lebih menonjol dibandingkan kategori usaha yang lain. Pertanian mempunyai pertumbuhan yang juga positif

meskipun lebih rendah dibanding kedua sektor tersebut di atas. Kontribusi terbesar masih disumbang oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman.

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku apabila dikelompokkan dalam sektor tersier, sekunder dan primer, dapat dilihat pada gambar berikut.

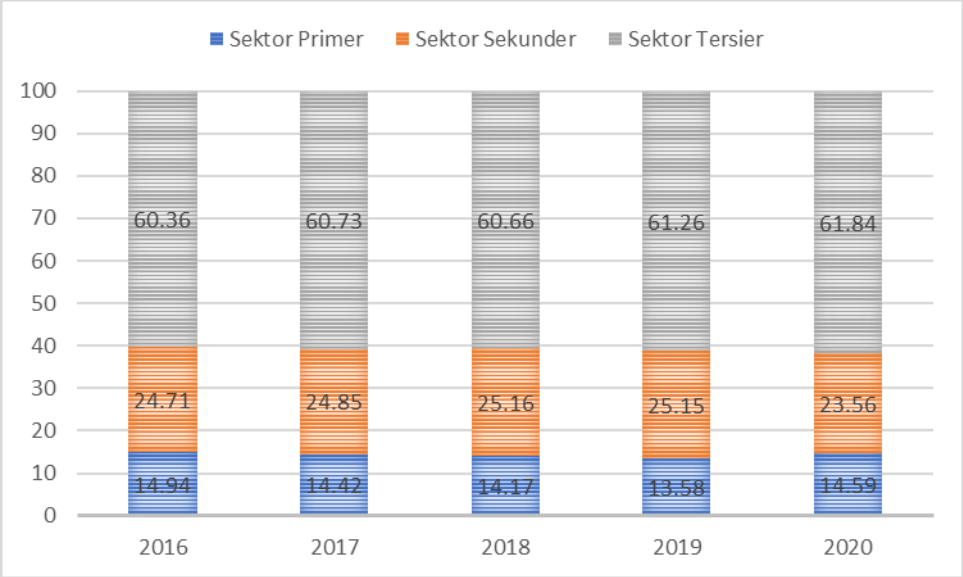


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 26 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor (persen), 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, tahun 2016-2019 pangsa sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian) cenderung menurun, baru tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,01 persen. Sebaliknya sektor sekunder (industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi) cenderung meningkat di tahun 2016 sampai tahun 2019, tetapi mengalami penurunan di tahun 2020. Berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor tersier (kategori lainnya) konsisten rata-rata mengalami kenaikan, kecuali tahun 2018 sedikit sekali mengalami

penurunan. Sektor tersier ini memberikan kontribusi lebih dari 60 persen dari total PDRB Kabupaten Bantul.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 13 Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori

| No | Kategori/Industri/Lapangan Usaha | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1,52 | 2,5 | 2 | 0,13 | 4,86 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,35 | 0,06 | 1,57 | -0,27 | -11,32 |
| 3 | Industri Pengolahan | 5,43 | 6,39 | 5,52 | 5,38 | -4,8 |
| 4 | Pengadaan Listrik, Gas | 15,58 | 3,99 | 4,85 | 4,73 | -1,77 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang | 2,96 | 3,18 | 5,16 | 8,25 | 0,61 |
| 6 | Konstruksi | 4,07 | 5,93 | 7,24 | 5,17 | -13,78 |
| 7 | Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor | 6,54 | 5,79 | 5,64 | 5,19 | -4,2 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 4,23 | 3,88 | 5,51 | 6,46 | -12,58 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,19 | 5,7 | 6,75 | 8,68 | -11,55 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 8,41 | 5,87 | 6,18 | 7,29 | 19,94 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,65 | 2,82 | 6,59 | 9,97 | -2,41 |
| 12 | Real Estate | 5,82 | 4,97 | 5,41 | 6,43 | 0,23 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 4,26 | 4,27 | 5,37 | 7,38 | -14,4 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 5,84 | 4,98 | 4,55 | 3,42 | -1,96 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 2,95 | 5,16 | 6,08 | 6,65 | 3,79 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,2 | 5,13 | 4,62 | 7,02 | 18,59 |
| 17 | Jasa Lainnya | 6,02 | 5,61 | 7,14 | 6,09 | -11,21 |
| | PDRB | 5,05 | 5,1 | 5,47 | 5,53 | -1,66 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2018 dan 2019 melaju relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi masih sebesar 5,1 persen, sementara tahun 2018 tumbuh menjadi 5,47 persen dan tahun 2019 tumbuh sebesar 5,53 persen.

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Hanya ada beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di antaranya adalah sektor informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 19,94%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (tumbuh sebesar 18,59%) dan sektor

pertanian yang tumbuh sebesar 4,86%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi signifikan di antaranya adalah sektor jasa perusahaan (-14,4%), sektor konstruksi (-13,78%), sektor transportasi dan pergudangan (-12,58%), sektor akomodasi dan makan minum (-11,55%), sektor pertambangan dan penggalian (-11,32%) dan sektor jasa lainnya (-11,21%).

Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul dalam pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

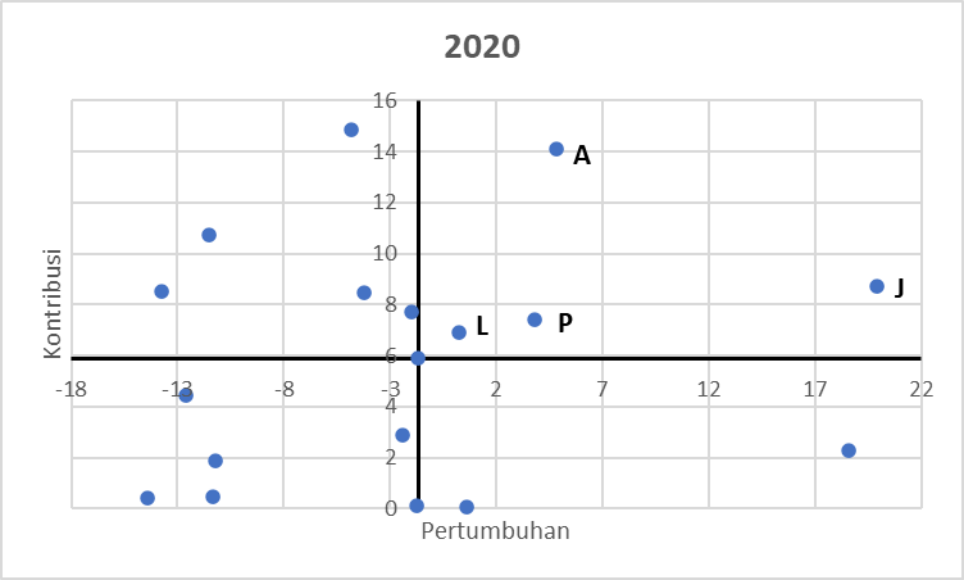


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Keterangan
A: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
J: Informasi dan Komunikasi
P: Jasa Pendidikan
L: Informasi dan Komunikasi.

Gambar 2 27 Pemetaan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Dari pemetaan pertumbuhan dan kontribusi lapangan usaha dapat ditunjukkan perubahan posisi sektor-sektor di Kabupaten Bantul tahun 2016, 2018 dan 2020, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2 14 Lapangan Usaha yang Mempunyai Pertumbuhan dan Kontribusi di atas Rata-rata

| Tahun | 2016 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Lapangan usaha yang mempunyai kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata Kabupaten Bantul | • Industri pengolahan<br>• Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor<br>• Penyediaan akomodasi makanan dan minuman<br>• Informasi dan Komunikasi<br>• Real Estate<br>• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | • Industri pengolahan<br>• Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.<br>• Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor<br>• Penyediaan akomodasi makanan dan minuman<br>• Informasi dan Komunikasi<br>• Jasa Pendidikan | • Pertanian, Kehutanan dan Perikanan<br>• Informasi dan Komunikasi<br>• Real Estate<br>• Jasa Pendidikan |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2018 ada beberapa lapangan usaha yang konsisten tumbuh dan berkontribusi di atas angka rata-rata Kabupaten Bantul. Lapangan usaha tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makanan dan minuman dan informasi dan komunikasi.

Tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 hanya sektor informasi dan komunikasi yang tetap tumbuh dan berkontribusi di atas rata-rata, sementara sektor lain yang juga tumbuh di atas rata-rata adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, real estate dan jasa pendidikan. Hal ini menunjukkan kondisi pandemi telah mengubah komposisi sektor ekonomi.

### 2.2.2. PDRB Perkapita

Perkembangan nilai PDRB per kapita dapat dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. PDRB per kapita secara teoritis merupakan ketersediaan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap masyarakat di daerah tersebut. Semakin besar nilai PDRB per kapita, semakin banyak pula ketersediaan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Dengan demikian semakin besar PDRB per kapita, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Nilai PDRB per kapita diukur menggunakan harga berlaku tahun 2020, yaitu sebesar 25,4 juta rupiah. Dengan perhitungan menggunakan harga konstan tahun 2010 tercatat bahwa nilai PDRB per kapita sebesar 18,29 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2019 mencapai 4,32%, yang merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020.

### 2.2.3. Laju Inflasi

Kenaikan harga yang wajar sesuai perkembangan permintaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian.

Untuk tahun kalender 2020, inflasi IHK tahun 2020 merupakan tingkat perubahan IHK secara umum pada posisi bulan Desember tahun sebelumnya. Kondisi inflasi yang terjadi selama lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

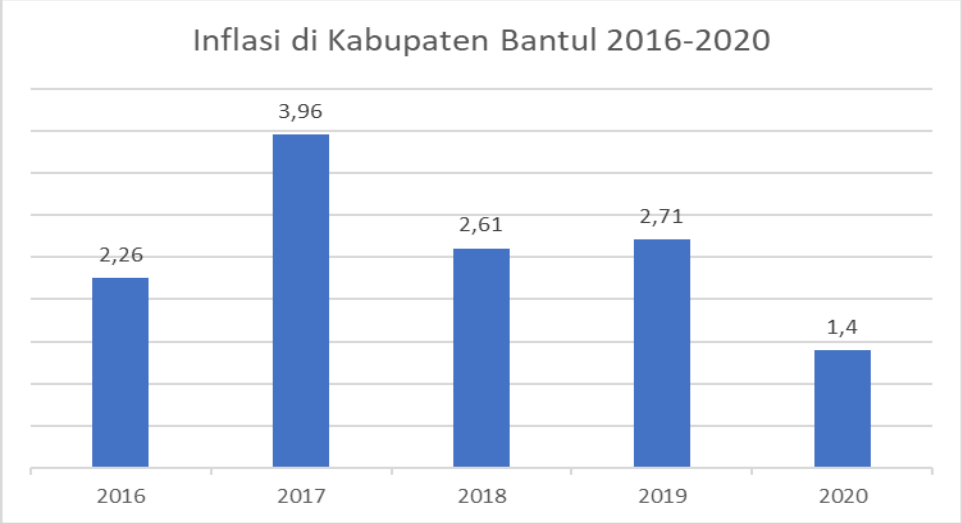


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 28 Inflasi di Kabupaten Bantul 2016-2020

Besaran inflasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan tren kuadratik yang mencapai posisi tertinggi di tahun 2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018, selanjutnya selama tahun 2018 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif, dalam arti mengalami peningkatan di tahun 2019 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020.

### 2.2.4. Indeks Gini

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan "rendah"; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan "moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan "tinggi".

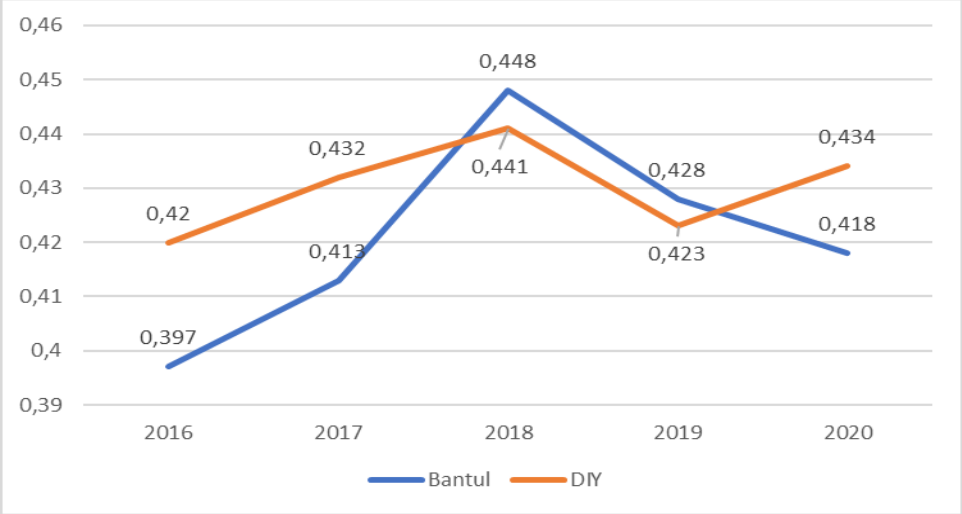


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 29 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Nilai Koefisien Gini Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan 2020 berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5, sehingga dapat dikatakan berada dalam kategori ketimpangan "moderat". Indeks Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2016, 2017 dan 2020 lebih baik dibandingkan DIY. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 lebih tinggi dibandingkan provinsi.

Informasi peningkatan koefisien Gini di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian. Karena pertumbuhan di Kabupaten Bantul masih belum diikuti dengan adanya perbaikan pada aspek pemerataan hasil pembangunan.

### 2.2.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan bukan hanya masalah jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0) tetapi juga menyangkut kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur sejauh mana perbedaan antara rerata

pengeluaran maskin dari garis kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rerata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinannya. Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*) mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2 15 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

| Tahun | Tingkat Kemiskinan (%) | Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan | Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14,55 | 142.760 | 2,02 | 0,41 | 332.057 |
| 2017 | 14,07 | 139.670 | 2,21 | 0,56 | 347.476 |
| 2018 | 13,43 | 134.835 | 2,17 | 0,46 | 369.480 |
| 2019 | 12,92 | 131.151 | 1,87 | 0,43 | 381.538 |
| 2020 | 13,50 | 138.660 | 1,85 | 0,43 | 405.613 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Tingkat kemiskinan pada periode 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten Bantul dengan DIY disajikan pada gambar berikut:

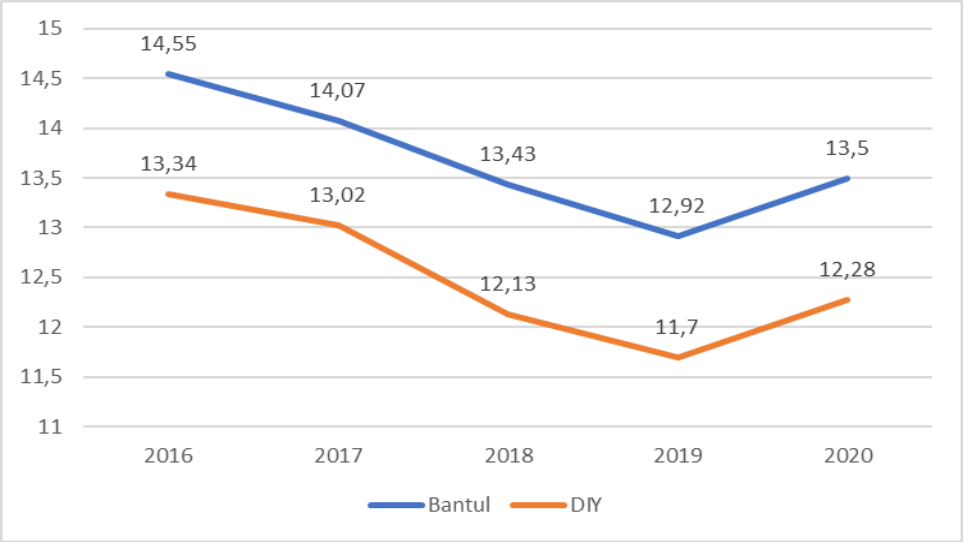


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 30 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul dan DIY 2016-2020

Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019. Jumlah penduduk miskin bertambah kurang lebih 6 ribu jiwa pada 2020. Selama periode 2016-2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul selalu lebih tinggi dibandingkan DIY.

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS di atas digunakan sebagai indikator makro daerah, sehingga tidak dapat menampilkan data *by name by addres* yang dibutuhkan dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam rangka menentukan sasaran penerima manfaat dari program penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial mengeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel berikut menunjukkan data jumlah penduduk miskin di setiap kapanewon menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tabel 2 16 Persentase Data Individu Desil 1-4 dengan Jumlah Penduduk Per Kapanewon

| No. | Kapanewon | Penduduk tahun 2020 | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambanglipuro | 41.706 | 12.637 | 30,30 |
| 2 | Banguntapan | 113.298 | 15.551 | 13,73 |
| 3 | Bantul | 64.652 | 12.341 | 19,09 |
| 4 | Dlingo | 39.998 | 14.518 | 36,30 |
| 5 | Imogiri | 63.835 | 21.458 | 33,61 |
| 6 | Jetis | 58.631 | 15.383 | 26,24 |
| 7 | Kasihan | 104.599 | 18.639 | 17,82 |
| 8 | Kretek | 30..764 | 7.131 | 23,18 |
| 9 | Pajangan | 36.551 | 15.793 | 43,21 |
| 10 | Pandak | 52.036 | 19.824 | 38,10 |
| 11 | Piyungan | 52.862 | 13.603 | 25,73 |
| 12 | Pleret | 48.497 | 14.916 | 30,76 |
| 13 | Pundong | 35.666 | 12.822 | 35,95 |
| 14 | Sanden | 31..810 | 9.369 | 29,45 |
| 15 | Sedayu | 48.156 | 13.456 | 27,94 |
| 16 | Sewon | 100.563 | 18.968 | 18,86 |
| 17 | Srandakan | 31.082 | 10.562 | 33,98 |
| **Total** | | **954.706** | **246.971** | **25,87** |

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) No. 146 tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan kapanewon dengan persentase individu desil 1-4 terbanyak adalah Kapanewon Pajangan, Pandak, Dlingo, Pundong, Imogiri, dan Srandakan, sementara data jumlah penduduk miskin yang sebesar 246.971 berbeda dengan data dari BPS yang sebesar 138.660 karena data penduduk miskin pada DTKS mencakup penduduk miskin dan penduduk rawan miskin.

### 2.2.6. Angka Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT), TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 2 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | TPT | TPT DIY |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 3,00 | 2,72 |
| 2 | 2017 | 2,87 | 3,02 |
| 3 | 2018 | 2,72 | 3,37 |
| 4 | 2019 | 3,06 | 3,18 |
| 5 | 2020 | 4,06 | 4,57 |

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2021

Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka naik dari 3,06% di tahun 2019 menjadi 4,06% di tahun 2020. Setiap tahun TPT Kabupaten Bantul dibandingkan DIY lebih rendah, kecuali tahun 2016. Jumlah pengangguran di Bantul pada tahun 2017 sebanyak 17.466 orang, sempat menurun menjadi 15.730 jiwa pada 2018 kemudian meningkat kembali menjadi 17.700 orang pada

tahun 2019. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

### 2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul terus meningkat.

Tabel 2 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020

| Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulonprogo | 72,38 | 73,23 | 73,76 | 74,44 | 74,46 |
| Bantul | 78,42 | 78,67 | 79,45 | 80,01 | 80,01 |
| Gunungkidul | 67,82 | 68,73 | 69,24 | 69,96 | 69,98 |
| Sleman | 82,15 | 82,85 | 83,42 | 83,85 | 83,84 |
| Yogyakarta | 85,32 | 85,49 | 86,11 | 86,65 | 86,61 |
| D.I Yogyakarta | 78,38 | 78,89 | 79,53 | 79,99 | 79,97 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2019 berubah status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, levelnya mencapai 80,01. Capaian level IPM Kabupaten Bantul termasuk dalam kelompok 36 besar daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 78,42. Komponen IPM Kabupaten Bantul adalah indikator usia harapan hidup (UHH) 73,86 tahun, angka harapan lama sekolah (HLS) 15,17 tahun, rata-rata lama sekolah (RLS) 9,55 tahun, dan pengeluaran perkapita riil (KAP) Rp15,52 juta yang disesuaikan.

Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh posisi beberapa kapanewon di Bantul yang menjadi wilayah penyangga perkembangan Kota Yogyakarta. Beberapa perguruan tinggi juga melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah Bantul, karena daya tampung wilayah Kota Yogyakarta yang sudah tidak memungkinkan.

### 2.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut:

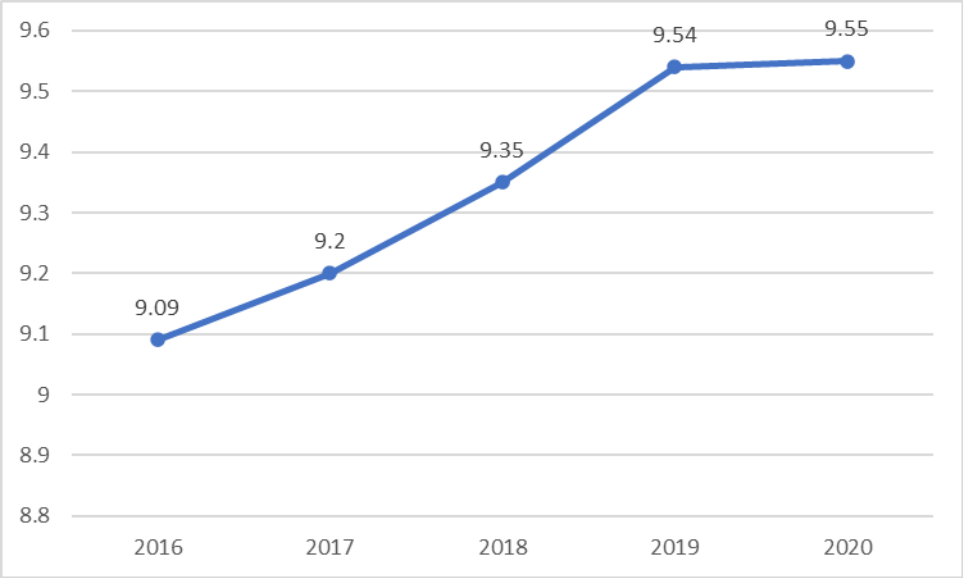


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

*Angka Sementara

Gambar 2 31 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan, dari 9,09 tahun pada tahun 2016 menjadi 9,55 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin meningkat, meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bantul bersekolah hanya setingkat SLTP.

### 2.2.9. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan bidang

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :

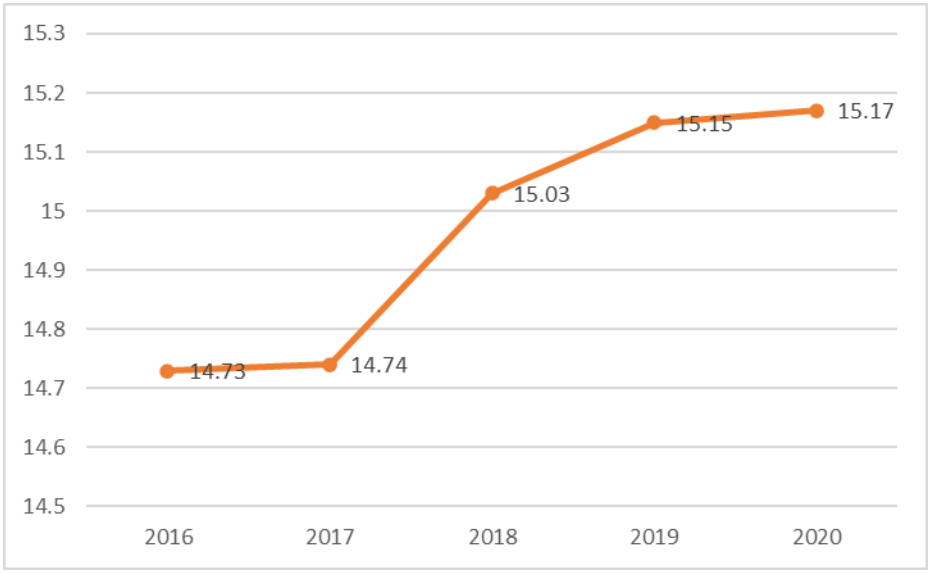


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

*Angka Sementara

Gambar 2 32 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 15,17 tahun. Capaian tersebut dapat diartikan bahwa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 15,17 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi jenjang Diploma III.

### 2.2.10. Umur Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul dapat dinilai dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang menjadi salah satu IKU Bupati. Umur Harapan Hidup Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

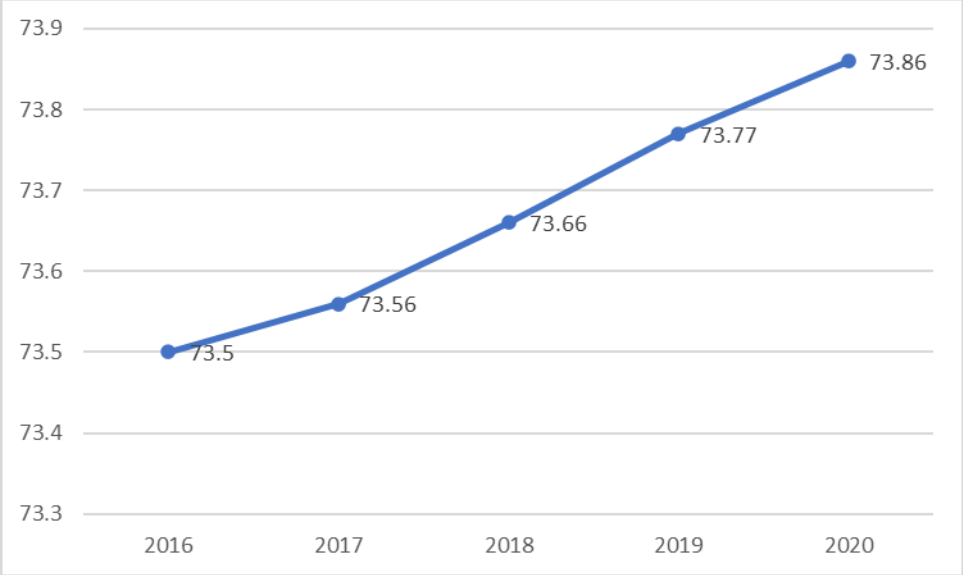


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021, diolah

Gambar 2 33 Umur (Angka) Harapan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan UHH Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu 73,86 tahun, 2019 yaitu 73,77 tahun meningkat dari tahun 2018 sebesar 73,66 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor antara lain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi HIV /AIDS, dan Angka Kesakitan (*Incidence Rate*/ IR) DBD serta penyakit tidak menular (PTM).

### 2.2.11. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun dalam kurun waktu satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

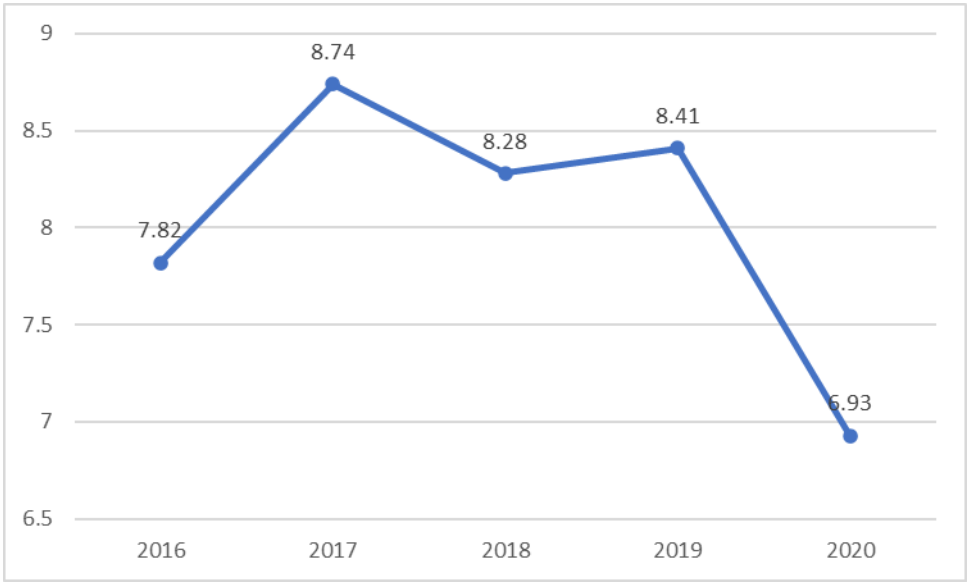


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 34 Perubahan Angka Kematian Bayi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat perubahan angka kematian bayi dari tahun 2016 – 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 cenderung menurun cukup signifikan dibanding tahun 2019. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 6,93 terjadi penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 8,41 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi pada tahun 2020 terbanyak disebabkan kelainan bawaan. Data penyebab kematian bayi di Kabupaten Bantul disajikan pada berikut:

Tabel 2 19 Penyebab Kematian Bayi

| No | Sebab Kematian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayi Berat Lahir Rendah | 22 | 22 | 31 | 28 | 16 |
| 2 | Asfiksia | 24 | 14 | 32 | 27 | 16 |
| 3 | Kelainan bawaan | 23 | 20 | 19 | 20 | 26 |
| 4 | Lain2 (Aspirasi, diare, perdarahan intrakranial dan penyebab lainnya) | 25 | 52 | 25 | 35 | 17 |
| | **J u m l a h** | **94** | **108** | **107** | **109** | **75** |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), dan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada

bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

### 2.2.12. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu maternal (hamil, melahirkan, dan nifas), bukan disebabkan oleh kecelakaan ataupun penyakit lainnya. Kecenderungan AKI pada lima tahun terakhir disajikan pada grafik berikut :

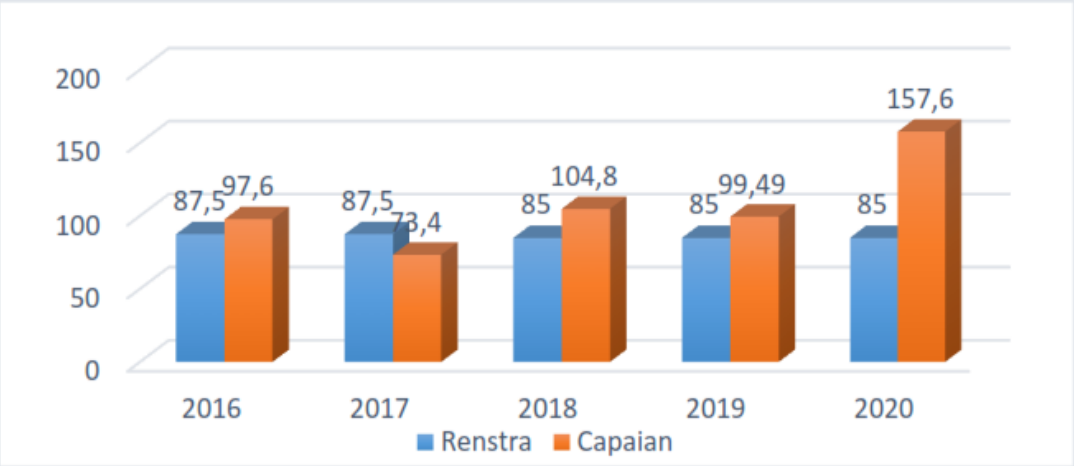


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 35 Kondisi Angka Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian angka kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 157,6 per 100.000 kelahiran hidup (20 kasus kematian ibu). Bila dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 AKI di Kabupaten Bantul sebanyak 13 kasus kematian ibu atau 99,49 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu antara lain adanya perdarahan dan Pre Eklampsia, serta penyebab lain-lain yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 20 Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Penyebab Kematian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perdarahan | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | PER/PEB/Eklampsi | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Emboli air ketuban | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Infeksi | 2 | 2 | 0 | - | 3 |
| 5 | Lain2/Penyakit penyerta | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 |

| No | Penyebab Kematian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Penyakit Jantung | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome | 2 | 1 | 0 | - | 0 |
| 8 | Ileus paralitik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Syok Septik/Hypovolemik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | **J u m l a h** | **12** | **9** | **14** | **13** | **20** |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu: 1) program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK); 2) program pencegahan penyakit; 3) program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam Kalurahan Siaga, ambulan kalurahan, dan donor darah; 4) partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pengenalan deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi; 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia juga melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) diintegrasikan dengan kelas ibu; 6) membentuk jejaring Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); dan 7) peningkatan Puskesmas mampu Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED); serta 8) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal).

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1. Layanan Urusan Wajib

#### 2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemenuhan SPM meliputi 6 (enam) bidang, yaitu: Bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.

#### 2.3.1.1. Pendidikan

Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan kewenangan Kabupaten Bantul meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dan Pendidikan Kesetaraan

**a. Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Tabel 2 21 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Nama Lembaga | Jumlah | | Jumlah Peserta Didik | Guru | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Negeri | Swasta | | Jumlah | Sertifikasi | % |
| 1. | TK/RA | 7 | 553 | 25.793 | 2.886 | 1.674 | 58% |
| 2. | KB | 0 | 492 | 8263 | 1605 | 0 | 0 |
| 3. | TPA | 0 | 56 | 811 | 214 | 0 | 0 |
| 4. | SPS | 0 | 237 | 3.604 | 778 | 0 | 0 |

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Indikator untuk mengukur tingkat Pendidikan PAUD antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini terhadap penduduk pada kelompok usia

tertentu, dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 usia PAUD adalah 4-6 tahun. Sedangkan APM menunjukkan Proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang terdaftar dalam PAUD terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM juga menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia PAUD.

Tingkat Pendidikan PAUD di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh nilai APK dan APM sebagai berikut:

Tabel 2 22 Perkembangan APK dan APM PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | |
| | APK PAUD | 93,44 | 98,20 | 100,70 | 106,24 | 97,70 |
| 2. | Angka Partisipasi Murni | | | | | |
| | APM PAUD | 83,73 | 88,68 | 86,54 | 83,84 | 81,20 |

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai APK yang semakin tinggi dari 2016-2019 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk secara umum semakin meningkat, hal ini berarti kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan yang dimulai pada usia dini semakin meningkat pula, sebagaimana diketahui bahwa usia PAUD merupakan masa emas perkembangan otak dan kecerdasan anak. Namun turunnya nilai APK pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi Covid 19 dimana terjadi perubahan pola pembelajaran yang menuntut penggunaan teknologi informasi/internet yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh siswa PAUD secara optimal.

Nilai APM yang menunjukkan tren menurun, mengindikasikan bahwa daya serap sistem pendidikan yang ada masih belum mencukupi, fasilitas pendidikan jenjang PAUD yang tersedia belum dapat dimanfaatkan penduduk sesuai usia PAUD dalam arti bahwa penduduk usia PAUD belum semua dapat bersekolah tepat waktu.

Dalam perkembangannya sesuai Peraturan Presiden No.60 tahun 2013 tentang Anak Usia Dini Holistik Integratif,

penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara Holistik Integratif pula.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Layanan PAUD HI merupakan layanan yang kompleks dan menyeluruh, sehingga dibutuhkan sinergi dari lintas sektor, antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD), Polres, Kapanewon, Kalurahan, Organisasi Mitra PAUD, Posyandu, Tokoh masyarakat dan Paguyuban Orangtua serta Komite Sekolah.

Pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Bantul telah mencapai 90% dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2020 PAUD HI tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya pandemi Covid 19, namun dari hasil pemantauan perkembangan anak oleh pendidik/guru, layanan PAUD HI tetap dilaksanakan meski sangat terbatas.

**b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan program pemerintah yang menjamin penduduk usia 7-15 tahun untuk mengenyam pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Keberhasilan program wajib belajar Sembilan tahun ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kualitas tenaga pendidik, lembaga pendidikan dan partisipasi peserta didik.

Kondisi pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 23 Kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Nama Lembaga | Jumlah | | Jumlah Siswa | Guru | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Negeri | Swasta | | Jumlah | Sertifikasi | % |
| 1 | SD | 281 | 83 | 73.523 | 5.033 | 2552 | 50,71 |
| 2 | MI | 3 | 30 | 6.584 | 492 | 215 | 43,7 |
| 3 | SMP | 47 | 46 | 31.618 | 2.268 | 1.461 | 64,42 |
| 4 | MTs | 9 | 16 | 8.273 | 735 | 368 | 50,07 |

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Nilai akreditasi yang diperoleh lembaga pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 24 Jumlah Sekolah Menurut Peringkat Akreditasi yang Diperoleh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Nama Lembaga | Peringkat Akreditasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | BT | Jumlah |
| 1 | SD | 306 | 56 | 0 | 2 | 364 |
| 2 | MI | 24 | 8 | 0 | 1 | 33 |
| 3 | SMP | 64 | 22 | 3 | 4 | 93 |
| 4 | MTs | 18 | 6 | 0 | 1 | 25 |

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud, 2021

Partisipasi peserta didik jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SLTP/MTs ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | |
| | APK SD/MI | 96,12 | 98,20 | 98,45 | 95,26 | 101.78 |
| | APK SMP/MTs | 95,00 | 99,23 | 97,83 | 101,38 | 102.86 |
| 2. | Angka Partisipasi Murni | | | | | |
| | APM SD/MI | 84,10 | 88,68 | 89,55 | 85,86 | 92,96 |
| | APM SMP/MTs | 71,09 | 76,60 | 77,33 | 76,8 | 79,01 |
| 3 | Angka Partisipasi Sekolah | | | | | |
| | APS SD/MI | | | 100 | 100 | 99,80 |
| | APS SMP/Mts | | | 100 | 99,74 | 99,36 |

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM

menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Realisasi APK SD/MI tahun 2020 sebesar 101,78%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,84 % dari capaian tahun 2019 sebesar 95,26. Sedangkan realisasi APK SMP/MTs tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,48% menjadi 102,86%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2020 adalah 92,96%, dan APM SMP/MTs tahun 2020 adalah 79,01%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keterjangkauan dan pemerataan pendidikan dengan melihat proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikan. Semakin kecil angka putus sekolah berarti semakin baik pendidikan di wilayah tersebut

Tabel 2 26 Perkembangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angka Putus Sekolah | | | | | |
| | SD/MI | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,004 |
| | SMP/MTs | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang semakin turun dan pada jenjang SMP/MTs sudah mencapai angka 0 berarti tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Kabupaten Bantul sudah semakin baik, namun masih belum merata.

Beberapa strategi dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan indikator di atas diantaranya adalah :

(1) Program Wajar 9 tahun dilakukan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya adalah dengan pengembangan kompentensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan implementasi sistem penilaian;

(2) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.

### c. Pendidikan Kesetaraan dan Non-Formal

Penyelenggaraan pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal.

Tabel 2 27 Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Nama Lembaga dan Keterangan | Jumlah Perkembangan Per Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | SKB | | | | | |
| | - Jumlah Lembaga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - Jumlah Warga Belajar | 143 | 296 | 170 | 317 | 386 |
| | - Jumlah Tutor | 9 | 36 | 36 | 36 | 31 |
| 2 | PKBM | | | | | |
| | - Jumlah Lembaga | 33 | 27 | 31 | 31 | 26 |
| | - Jumlah Warga Belajar | 1762 | 1768 | 2570 | 3115 | 2771 |
| | - Jumlah Tutor | 210 | 423 | 135 | 226 | 404 |
| 3 | LKP | | | | | |
| | - Jumlah Lembaga | 62 | 44 | 44 | 34 | 42 |
| | - Jumlah Warga Belajar | 3276 | 3452 | 2272 | 2296 | 2059 |
| | - Jumlah Tutor | 210 | 423 | 518 | 315 | 264 |
| 4 | TBM | | | | | |
| | - Jumlah Lembaga | 35 | 47 | 53 | 62 | - |
| | - Jumlah Warga Belajar | | | | | |
| | - Jumlah Tutor | | | | | |
| 5 | Rumah Pintar | | | | | |
| | - Jumlah Lembaga | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | - Jumlah Warga Belajar | | | | | |
| | - Jumlah Tutor | | | | | |
| 6 | *Homeschooling* | | | | | |
| | - Jumlah Lembaga | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | - Jumlah Warga Belajar | 21 | 21 | 25 | - | - |
| | - Jumlah Tutor | 10 | 10 | 10 | - | - |

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Keterangan :

SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan;
TBM : Taman Bacaan Masyarakat;
Rumpin : Rumah Pintar;

Dari tabel tersebut diketahui pada tahun 2019-2020 jumlah data rumah pintar dan *homeschooling* nol karena lembaga tersebut tidak mengajukan ijin.

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.

Tabel 2 28 Jumlah Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Nama Program | Jumlah Warga Belajar | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1 | Paket A | 563 | 469 | 1,032 |
| 2 | Paket B | 466 | 203 | 669 |
| 3 | Paket C | 998 | 458 | 1.456 |

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

### d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pendidikan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 29 Indikator Kinerja Utama Pendidikan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APK PAUD | 98,7 | 98,75 | 108.41 | 106.24 | 97,70 |
| 2. | Angka Partisipasi Kasar | | | | | |
| | APK SD/MI | 96,12 | 98,20 | 98,45 | 95,26 | 92,77 |
| | APK SMP/MTs | 95,00 | 99,23 | 97,83 | 101,38 | 97,23 |
| 3. | Angka Partisipasi Murni | | | | | |
| | APM SD/MI | 84,10 | 88,68 | 89,55 | 85,86 | 86,55 |
| | APM SMP/MTs | 71,09 | 76,60 | 77,33 | 76,8 | 76,31 |
| 4 | Rata-Rata Lama Sekolah | 8,79 | 8,84 | 9,2 | 9,35 | 9,55 |
| 5 | Peringkat Rata-rata Nilai USM | | | | | |
| | - Nilai USM SD / MI | - | 4 | 4 | 3 | 0 |
| | - Nilai USM SMP / MTs | - | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Jumlah Prestasi Non Akademik TK Nasional (Buah) | | 6 | 8 | 4 | 4 |

| No | Jenjang Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Persentase Kelulusan | | | | | |
| | - SD / MI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - SMP / MTs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Angka Melanjutkan (AM) | | | | | |
| | - Dari SD/MI ke SMP/MTs | 100 | 100 | 109,61 | 108,56 | 101,27 |
| | - Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 100 | 100 | 108,54 | 111,18 | 105,93 |
| 9 | Angka Putus Sekolah | | | | | |
| | - SD/MI | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,004 | 0,004 |
| | - SMP/MTs | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0 |

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa di tahun 2020 nilai APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs, angka capaiannya mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu yang sekolah di jenjang atasnya. Selain itu, terdapat siswa yang bersekolah di luar wilayah Bantul.

### 2.3.1.2. Kesehatan

#### a. Pelayanan Kesehatan

#### 1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk memberikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka strategi operasional peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Idealnya satu Posyandu melayani 50 Balita.

Tabel 2 30 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kabupaten Bantul

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah posyandu | 1.137 | 1.141 | 1.141 | 1.139 | 1.139 |
| 2 | Jumlah balita | 59.720 | 58.255 | 60.087 | 59.522 | 59.947 |
| 3 | Rasio posyandu per 1000 balita | 19,04 | 19,59 | 18,99 | 19,2 | 20,3 |
| 4 | Cakupan layanan posyandu | 52 (balita) | 51 (balita) | 53 (balita) | 52 (balita) | 49 (balita) |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio Posyandu per 1.000 Balita sebesar 20,3 berarti dalam 1.000 Balita terdapat 20 Posyandu. Hal ini dapat diartikan bahwa satu Posyandu melayani 49 Balita.

**2) Ketersediaan Fasilitas**

Keberhasilan program pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah dan swasta. Secara umum fasilitas kesehatan semakin meningkat, dengan demikian diharapkan lebih banyak kemudahan akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Tabel 2 31 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul

| No | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum | 2016 (unit) | 2017 (unit) | 2018 (unit) | 2019 (unit) | 2020 (unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit Umum | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rumah Sakit Khusus (bedah, paru, KIA) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Klinik Utama | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Klinik Pratama | 47 | 55 | 56 | 61 | 70 |
| | Klinik Pratama Rawat Jalan | 38 | 45 | 45 | 50 | 59 |
| | Klinik Pratama Rawat Inap | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Apotek | 123 | 125 | 140 | 157 | 175 |
| 8 | Klinik kecantikan estetika | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | Laboratorium | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Toko obat | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 11 | Optik | 12 | 12 | 13 | 7 | 7 |
| 12 | Puskesmas rawat inap | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13 | Puskesmas non rawat inap | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 14 | Puskesmas pembantu | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 15 | Puskesmas keliling | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 16 | Posyandu | 1132 | 1132 | 1142 | 1142 | 1139 |
| 17 | Posyandu lansia | 901 | 967 | 1034 | 1034 | 1034 |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit RS sebagaimana diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 534/KPTS/M/2001. Penduduk Kabupaten Bantul tahun 2020 sebanyak 954.706 jiwa, berarti minimal harus ada 4 unit RS. Sampai tahun 2020 terdapat RS sejumlah 10 unit, hal ini menunjukkan ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bantul telah mencukupi.

Seluruh puskesmas di Kabupaten Bantul sudah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh sejak tanggal 2 Januari 2016. Pelaksanaan BLUD Puskesmas ini dilaksanakan di 27 Puskesmas yang terdiri dari 16 Puskesmas rawat inap, dan 11 Puskesmas rawat jalan. Adapun hasil penilaian akreditasi Puskesmas sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan NomornHK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19, pada Tahun 2020 tidak dilaksanakan akreditasi puskesmas.

Tabel 2 32 Penilaian Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Bantul

| No. | Puskesmas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajangan | √ | | | √ | tidak dilaksanakan akreditasi | Utama |
| 2 | Pleret | √ | | | √ | | Utama |
| 3 | Piyungan | √ | | | √ | | Paripurna |
| 4 | Banguntapan II | √ | | | √ | | Utama |
| 5 | Srandakan | √ | | √ | | | Utama |
| 6 | Sanden | √ | | | √ | | Madya |
| 7 | Pundong | √ | | | √ | | Madya |
| 8 | Bantul I | √ | | | √ | | Utama |
| 9 | Imogiri I | √ | | √ | | | Utama |
| 10 | Bambanglipuro | | | √ | | | Utama |
| 11 | Jetis I | √ | | √ | | | Utama |
| 12 | Jetis II | | | √ | | | Paripurna |
| 13 | Kasihan I | | √ | | √ | | Utama |
| 14 | Pandak I | | √ | | √ | | Utama |

| No. | Puskesmas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Pandak II | | √ | | √ | | Utama |
| 16 | Kretek | | √ | | | | Utama |
| 17 | Bantul II | | √ | | | | Utama |
| 18 | Imogiri II | | √ | | | | Madya |
| 19 | Dlingo I | | √ | | | | Madya |
| 20 | Dlingo II | | √ | | | | Utama |
| 21 | Sewon I | | √ | | | | Madya |
| 22 | Sewon II | | √ | | | | Utama |
| 23 | Sedayu I | | √ | | | | Madya |
| 24 | Sedayu II | | √ | | | | Madya |
| 25 | Banguntapan I | | √ | | | | Utama |
| 26 | Banguntapan III | | √ | | | | Madya |
| 27 | Kasihan II | | √ | | | | Madya |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 33 Kelas Rumah Sakit Tahun 2020

| No. | Rumah Sakit | Kelas | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | RSUD Panembahan Senopati | B-Umum | Akreditasi |
| 2 | RSPAU dr. Suradji Hardjolukito | B-Umum | Akreditasi |
| 3 | RSU PKU Muhammadiyah | C-Umum | Akreditasi |
| 4 | RSU Nur Hidayah | D-Umum | Akreditasi |
| 5 | RSU Santa Elizabeth | D-Umum | Akreditasi |
| 6 | RSU Permata Husada | D-Umum | - |
| 7 | RSU Rahma Husada | D-Umum | Akreditasi |
| 8 | RSU Rajawali Citra | D-Umum | Akreditasi |
| 9 | RSU Griya Mahardika | C-Umum | Akreditasi |
| 10 | RSK Ibu dan Anak Ummi Kasanah | C-Khusus KIA | Akreditasi |
| 11 | RSK Bedah Ringroad Selatan | C-Khusus Bedah | Akreditasi |
| 12 | RSK Paru Respira | C-Khusus Paru | Akreditasi |
| 13 | RSK Ibu dan Anak Adinda | C-Khusus KIA | - |

| No. | Rumah Sakit | Kelas | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 14 | RSK Ibu dan Anak Kahyangan | C-Khusus KIA | - |
| 15 | RSK Bedah Adelia | C-Khusus Bedah | Akreditasi |
| 16 | RS UII | C-Umum | - |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain fasilitas fisik sebagaimana diuraikan di atas, fasilitas lain yang disediakan pemerintah Kabupaten Bantul adalah pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk Bantul melalui kepesertaan JKN. Pada tahun 2020 kepesertaan JKN sebesar 841.108 jiwa atau 88,10%. Data kepesertaan JKN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 34 Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

| No. | Jenis Kepesertaan Jaminan Kesehatan | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Peserta (jiwa) | % | Jumlah Peserta (jiwa) | % |
| 1 | Jaminan Kesehatan Nasional | | | | |
| 1.1 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 443.462 | 53,61 | 445.505 | 46,66 |
| 1.2 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 46.674 | 5,64 | 50.887 | 5,33 |
| 1.3 | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 216.212 | 26,14 | 224.980 | 23,57 |
| 1.4 | Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) | 88.543 | 10,70 | 88.688 | 9,29 |
| 1.5 | Bukan Pekerja | 32.340 | 3,90 | 31.048 | 3,25 |
| | Jumlah penduduk yang terdaftar JKN | 827.231 | 87,50 | 841.108 | 88,10 |
| | Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN | 118.210 | 12,50 | 113.598 | 11,90 |
| | Total penduduk Kab Bantul | 945.441 | 100,00% | 954.706 | 100,00 |

Sumber: BPJS Kesehatan, 2021

Dari total kepesertaan JKN tersebut, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN tahun 2020 merupakan kepesertaan dengan jumlah terbesar yaitu 445.505 jiwa atau 46,66%. Kepesertaan JKN-PBI dari APBD sebesar 50.887 jiwa atau 5,33%. Hal tersebut merupakan perubahan program pelayanan kesehatan

bagi penduduk miskin/Jamkesda menjadi peserta JKN. Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 224.980 jiwa atau 23,57%, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 88.688 jiwa atau 9,29% dan Bukan Pekerja (BP) sebesar 31.048 atau 3,25%. Jumlah Penduduk yang belum terdaftar kepesertaan JKN sebesar 113.598 jiwa atau 11,90%, dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan berkoordinasi secara intensif dengan *stakeholder* terkait. Tingginya jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya.

### 3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang disertai dengan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini perlu diimbangi dengan regulasi agar tenaga kerja benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelayanan yang dapat berakibat fatal. Regulasi tersebut antara lain dengan menerbitkan aturan bahwa setiap tenaga yang bekerja di sektor kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis, analis, radiographer, fisioterapis dan sanitarian) wajib memiliki surat izin sebelum melakukan pekerjaan sesuai kompetensinya.

Tabel 2 35 Jumlah Dokter per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Dokter Umum | 127 | 154 | 238 | 307 | 417 |
| 2 | Jumlah Dokter Spesialis | 61 | 65 | 202 | 215 | 304 |
| 3 | Jumlah Penduduk | 928.676 | 931.356 | 939.718 | 949.325 | 954.706 |
| 4 | Rasio Dokter Umum (per 1000 penduduk) | 0,14 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,43 |
| 5 | Rasio Dokter Spesialis (per 1000 penduduk) | 0,065 | 0,070 | 0,21 | 0,23 | 0,32 |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Pada Tahun 2020 rasio dokter umum per 1000 penduduk mencapai 0,43 artinya satu dokter melayani 4.367 penduduk. Hal

ini menunjukkan masih kurangnya dokter di Kabupaten Bantul. Upaya pemenuhan kebutuhan dokter dengan cara rekruitmen tenaga dokter baik melalui tenaga kontrak maupun ASN.

**4) Pelayanan Kesehatan Lansia**

Pelayanan kesehatan lansia meliputi promotif dan preventif sesuai standar (SPM) meliputi pemeriksaan tanda vital, tes kolesterol, gula darah dan tes gangguan memori. Pelayanan ini dilaksanakan bersama oleh dan dari masyarakat melalui Posyandu Lansia. Pada Tahun 2020 telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 1.034, artinya telah terdapat Posyandu Lansia di setiap padukuhan di Kabupaten Bantul. Tidak ada peningkatan jumlah posyandu lansia dari tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan adalah skrining, senam lansia dan penyuluhan kesehatan.

**b. Kesehatan Masyarakat**

**1) Balita Gizi Buruk**

Status gizi Balita dapat diketahui dari berat badan menurut umur, yaitu membandingkan antara berat badan menurut umur ataupun panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan.

Tabel 2 36 Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Balita yang diukur | 48.750 | 48.895 | 48.943 | 48.502 | 18.621 |
| Jumlah Balita Gizi Buruk | 195 | 202 | 202 | 199 | 57 |
| Prevelensi Balita Gizi Buruk | 0,4% | 0,413% | 0,41% | 0,41% | 0,31% |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Dengan adanya pandemi Covid-19, pengukuran berat badan balita pada tahun 2020 dilaksanakan secara sampling. Balita status gizi buruk sebesar 0,31%. Masih adanya kasus gizi buruk disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di

dalam keluarga. Prevalensi gizi buruk pada Balita disajikan pada grafik berikut.

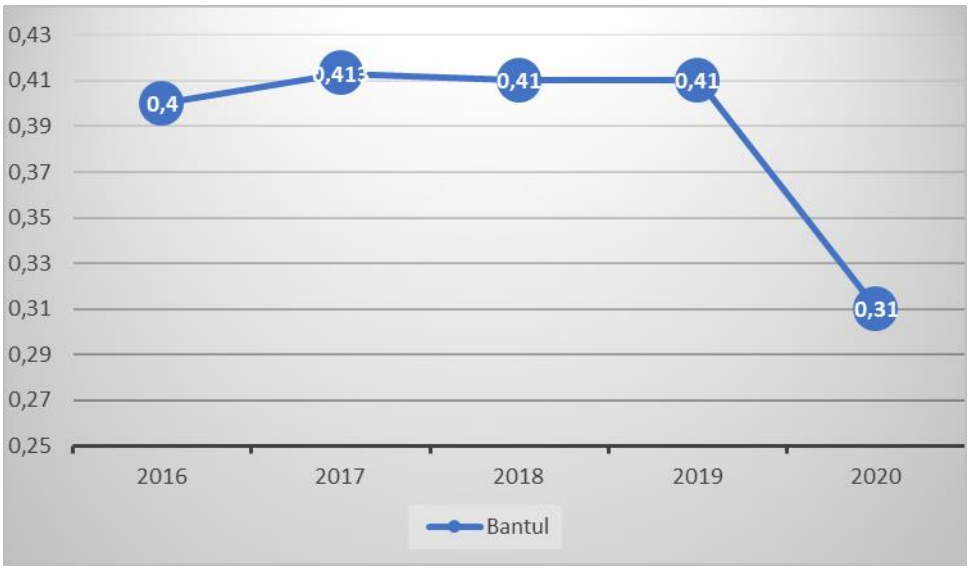


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 36 Prevalensi Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Bantul

Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Stunting adalah kondisi tubuh anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ukuran tubuh yang lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Kondisi stunting tidak bisa dikembalikan seperti semula. Kondisi stunting dapat dicegah, dengan memenuhi kebutuhan nutrisi sejak hamil hingga anak berusia dua tahun (periode 1000 hari pertama kehidupan).

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi balita stunting diantaranya adalah kampanye dan deklarasi penanggulangan stunting, penyusunan peraturan bupati dan RAD Stunting, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan, konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis anak pada balita stunting, dan pendampingan balita stunting oleh kader.

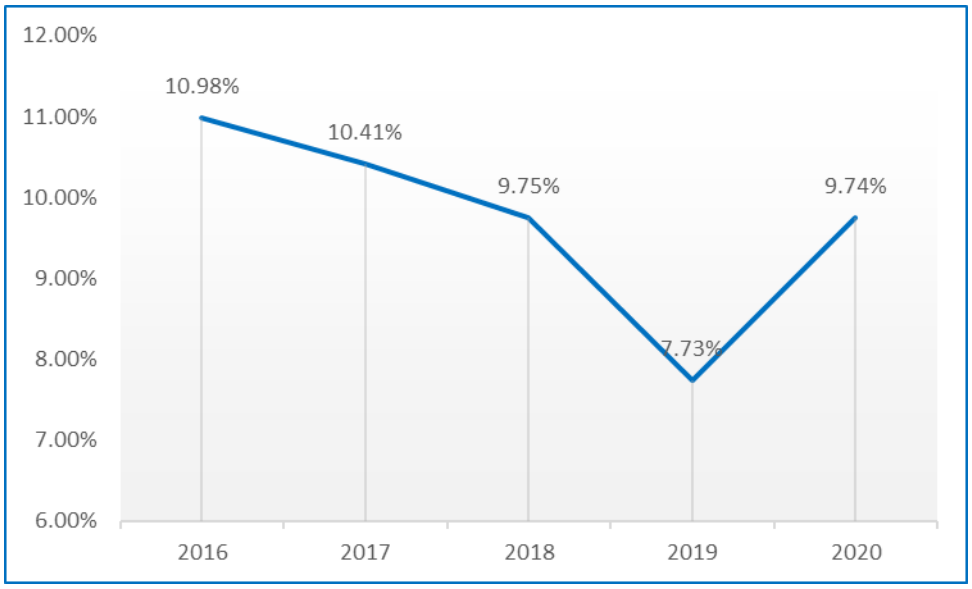


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai Lokasi khusus (lokus) dalam penanggulangan Stunting Tahap 2. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Prevalensi stunting berhasil diturunkan secara signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,41% menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,75% dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 7,73%. Angka prevalensi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%. Data jumlah dan prevalensi Balita Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 37 Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Bantul Tahun 20216-2020

| Tahun | Jumlah Balita yang Diukur | Jumlah Balita Stunting | Prevalensi Balita Stunting (%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 48,476 | 5,325 | 10.98% |
| 2017 | 47,899 | 4,987 | 10.41% |
| 2018 | 48,553 | 4,733 | 9.75% |
| 2019 | 48,181 | 3,725 | 7.73% |
| 2020 | 18,638 | 1,816 | 9.74% |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Determinan masalah penyebab stunting di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 38 Penyebab Balita Stunting di Kabupaten Bantul

| No | Analisa Penyebab | Balita Stunting (%) |
|---|---|---|
| 1 | Keluarga Gakin | 47,29 |
| 2 | Usia Ibu<20 | 3,05 |
| 3 | Usia Ibu>35 | 9,20 |
| 4 | Ibu KEK Sewaktu Hamil | 15,60 |
| 5 | Ibu Anemia Sewaktu Hamil | 11,41 |
| 6 | Tidak ASI Eksklusif | 21,04 |
| 7 | Pengasuhan Anak kepada Orang Lain | 2,7 |
| 8 | Pengasuhan Anak kepada Campuran | 30,03 |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

**2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2020 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada tabel di bawah. Pola hidup sehat masih rendah di tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum. Lingkungan permukiman kumuh berpotensi menjadi semakin buruk dengan tren pola hidup sehat di lingkungan rumah tangga yang masih rendah.

Tabel 2 39 Hasil Capaian Tatanan PHBS di Kabupaten Bantul

| No. | Tatanan PHBS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Tangga | 41,21% | 47,14% | 50,27% | 53,00% | 53,10% |
| 2 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 88,31% | 83,82% | 83,82% | 91,67% | 91,70% |
| 3 | Institusi Pendidikan | 44,38% | 54,77% | 54,77% | 61,00% | 62,20% |
| 4 | Tempat Kerja | 26,15% | 39,15% | 39,15% | 41,21% | 41,21% |
| 5 | Tempat-tempat Umum | 63,18% | 58,52% | 58,52% | 59,00% | 59,15% |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

### 3) Sanitasi

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

### 4) Akses Jamban

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan oleh 27 puskesmas dengan memotret kondisi kesehatan dari anggota keluarga sekaligus memberikan intervensi dan edukasi kesehatan salah satunya adalah tersedianya akses/jamban sehat untuk keluarga sebesar 100%, meskipun masih ada yang menggunakan jenis cemplung dan plengsengan. Adanya jamban jenis cemplung/plengsengan yang berpotensi mengakibatkan memburuknya kualitas lingkungan permukiman, terutama di permukiman padat dapat berdampak pada pola hidup yang kurang sehat dan kesehatan masyarakat. Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 40 Data penggunaan jamban di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| Kapanewon | Jenis Kloset | | |
|---|---|---|---|
| | Cemplung/ Cubluk | Leher Angsa | Plengsengan |
| Bambanglipuro | 39 | 6.713 | 34 |
| Banguntapan | 20 | 7.443 | 89 |
| Bantul | 26 | 7.377 | 136 |
| Dlingo | 1465 | 5.131 | 66 |
| Imogiri | 294 | 8.968 | 49 |
| Jetis | 90 | 7.500 | 49 |
| Kasihan | 225 | 9.166 | 79 |
| Kretek | 8 | 4.391 | 18 |
| Pajangan | 507 | 5.590 | 56 |
| Pandak | 369 | 8.311 | 80 |
| Piyungan | 161 | 6.639 | 31 |
| Pleret | 83 | 6.677 | 71 |
| Pundong | 33 | 6.981 | 82 |

| Kapanewon | Jenis Kloset | | |
|---|---|---|---|
| | Cemplung/ Cubluk | Leher Angsa | Plengsengan |
| Sanden | 76 | 5.482 | 42 |
| Sedayu | 435 | 6.203 | 30 |
| Sewon | 47 | 9.228 | 35 |
| Srandakan | 97 | 5.369 | 16 |
| Jumlah Rumah Tangga | 3.975 | 117.169 | 963 |

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2021

### 5) Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air bagi masyarakat dan dunia usaha. Pengawasan kualitas mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kapanewon dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap kalurahan.

## c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Data penyakit menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 41 Data Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Angka Kesakitan | Jumlah Kasus | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **A** | **Penyakit Menular** | | | | | |
| 1 | Tuberkulosis (TB) BTA Positif | 295 | 175 | 344 | 112,9 | 343 |
| 2 | Jumlah Kasus HIV | 144 | 49 | 184 | 127 | 103 |
| 3 | Jumlah Kasus AIDS | 55 | 9 | 36 | 22 | 38 |
| 4 | Jumlah Kasus Syphilis | 18 | 100 | 8 | 64 | 3 |
| 5 | Kusta | 11 | 7 | 15 | 8 | 4 |

| No | Angka Kesakitan | Jumlah Kasus | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6 | Jumlah Kasus Campak | 124 | - | 3 | 1 | - |
| 7 | Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani | 744 | 1.197 | 1.093 | 941 | 424 |
| 8 | Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani | 4.822 | 5.481 | 4.877 | 4.622 | 6.005 |
| 9 | AFP Rate (non polio) < 15 th | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| 10 | DBD | 2.442 | 538 | 181 | 150 | 128 |
| 11 | Malaria | - | 3 | - | 7 | 3 |
| 12 | Leptospirosis | 74 | 94 | 93 | 92 | 79 |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

**1) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)**

Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 42 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Bantul

| No | Tahun | Jumlah Kasus | IR (‰) | Jumlah Meninggal | CFR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2442 | 2,62 | 4 | 0,16 |
| 2 | 2017 | 538 | 0,55 | 2 | 0,37 |
| 3 | 2018 | 182 | 0,18 | 0 | 0 |
| 4 | 2019 | 1424 | 1,5 | 4 | 0,6 |
| 5 | 2020 | 1222 | 1,3 | 4 | 0,3 |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Angka kesakitan DBD pada tahun 2020 sebesar 129 per 100.000 penduduk (1.222 kasus) menurun dibanding tahun 2019 yaitu 140 per 100.000 penduduk (1424 kasus). Pada tahun 2020 terdapat empat kematian penderita DBD, sama dibandingkan tahun 2019.

Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani kasus DBD yang meningkat antara lain melalui surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue; Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD; Pemberdayaan kader-kader padukuhan, remaja dan siswa SD untuk PSN; Melakukan dan

koordinasi dan komunikasi di tingkat Kapanewon; Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan; Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen dengue; Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik; Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE; KIE dan kerjasama lintas program dan lintas sektor; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN; dan Foging Fokus untuk memutus mata rantai penularan.

**2) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB)**

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh mycobacterium, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya.

Permasalahan penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul masih terkait dengan penemuan kasus yang belum mencapai target dan rendahnya angka kesembuhan. Cakupan Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate*/CNR) yang diobati per 100.000 penduduk dan angka keberhasilan (*Success Rate*/SR) dapat dilihat pada grafik berikut.

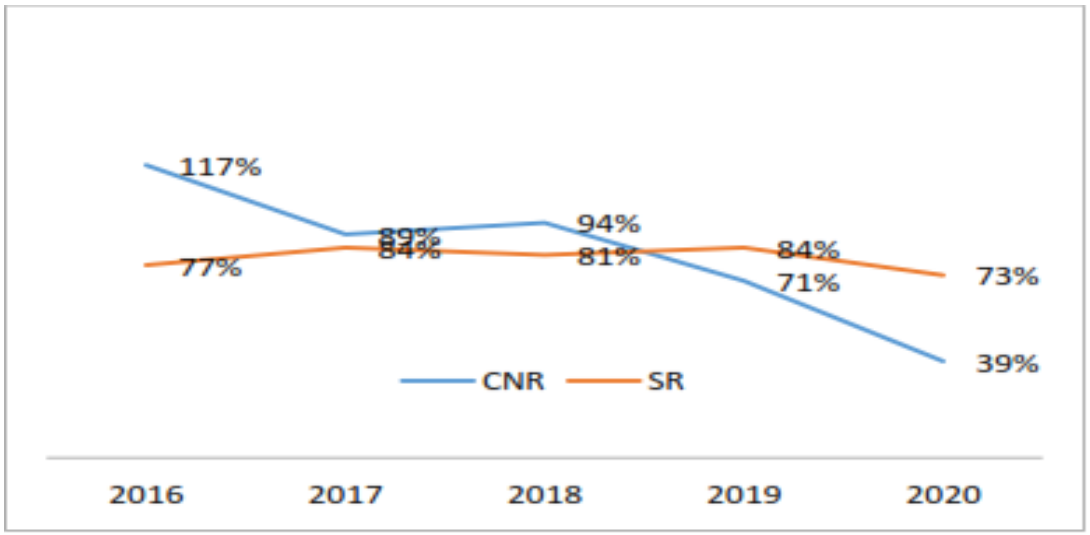


Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 38 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TB di Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka Notifikasi semua kasus TBC (*Case Notification Rate*/CNR) mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2020, pada tahun 2020 ini angka penemuan TBC mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka kunjungan pasien kelayanan mengalami penurunan sehingga mempengaruhi angka penemuan kasus TBC dilayanan. Selanjutnya, terkait dengan angka keberhasilan TBC yang belum mencapai target hal ini disebabkan masih tingginya angka gagal, putus berobat dan meninggal.

Angka penemuan kasus TB *(case detection rate)* terlihat menurun, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menemukan kasus TB secara aktif dan selektif (*Active Selective Case Finding*). Namun demikian, angka kesembuhan (cure rate) tampak fluktuatif, dan terjadinya penurunan cakupan disebabkan antara lain karena putus obat dari pasien TB dan adanya kasus TB dengan jenis *Multi Drug Resisten* (TB MDR). Diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pemutusan rantai penularan TBC.

Upaya penanganan kasus TB antara lain adalah Penyusunan RAD penanggulangan TB; Meningkatkan peran serta dari layanan

kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/*District officer* TB, dan pengelola program HIV; Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; Kolaborasi dengan PD Aisyiyah; Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kapanewon; Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskesmas; dan Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada penyegaran tentang strategi DOTS, *Active Selective Case Finding* (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek, Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.

**3) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis**

Pada tahun 2020 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 79 kasus dengan satu di antaranya meninggal dunia, turun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 92 kasus. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2020 adalah 8,29 per 100.000 penduduk, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu 9,79 per 100.000 penduduk (98 kasus dengan 1 kematian). Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan meliputi sosialisasi penyakit leptospirosis, koordinasi lintas sektor dan program, peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam tatalaksana kasus leptospirosis serta peningkatan surveilans leptospirosis sebagai upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa dan wabah.

**4) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS**

Penyebaran HIV-AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besarnya jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksakan dirinya sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dinamakan

fenomena gunung es. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi hingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV. Berikut disajikan grafik penemuan HIV AIDS tahun 2005 - 2020.

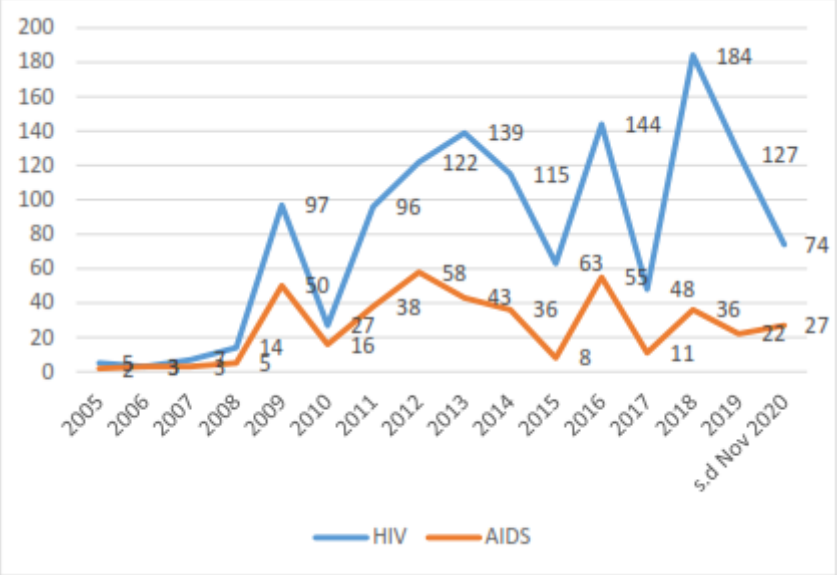


Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 39 Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2020 sebesar 0,01% dari target <0,5%. Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%). Bila di bandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan kasus dari 127 kasus menjadi 74 kasus. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Prevalensi HIV AIDS tahun 2016 – 2020 digambarkan dalam grafik berikut.

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 40 Prevalensi HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2019 dilakukan melalui kegiatan peningkatan akses pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko, yaitu Bumil, TBC dan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan pengadaan bahan medis habis pakai yang didistribusikan ke seluruh fasyankes yang sudah mampu melaksanakan pemeriksaan HIV (27 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit); Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus melalui Voluntary Counseling and Testing (VCT) di Puskesmas; Klinik layanan IMS di 6 (enam) puskesmas yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan VCT; Klinik layanan Harm Reduction di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan Metadhon (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi metadhone, akan diberikan Layanan Alat Suntik Steril (LASS); Klinik pelayanan VCT di 27 Puskesmas dan 8 RS ( RS PKU, RS Elizabeth,

RS Nur Hidayah, RS Rahma Husada, RS Rajawali Citra, RSK Paru Respira, RSPAU Harjolukito, RS Panembahan Senopati). Layanan Care Support and Treatment (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan (PDP) di 2 (dua) RS dan 1 (satu) Puskesmas, yaitu RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Hardjolukito dan Puskesmas Kretek; Penambahan layanan PDP dengan melatih puskesmas (Puskesmas Kasihan II, Puskesmas Banguntapan I, Puskesmas Srandakan, Puskesmas Piyungan dan Puskesmas Sedayu II) untuk memudahkan akses pengobatan Orang dengan HIV AIDS (ODHA); dan Peningkatan penemuan penderita melalui Pengendalian Penularan Ibu dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.

**d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**

Data penyakit tidak menular di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 43 Data Tidak Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| NO | Angka Kesakitan | Jumlah Kasus | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | **Penyakit Tidak Menular** | | | | | |
| 1 | Jumlah Kasus IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun | 254 | 74 | 19 | 44 | 6 |
| 2 | Jumlah tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun | 17 | 4 | 31 | 45 | 2 |
| 3 | Kalurahan/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam | 26 | 14 | 9 | 12 | 81 |
| 4 | Diabetes Melitus | 20.969 | 50.242 | 33.013 | 43.696 | 18.516 |
| 5 | Gangguan Jiwa | 3.875 | 6.864 | 6.844 | 9.761 | 2.097 |
| 6 | Hipertensi/tekanan darah tinggi | 44.954 | 50.242 | 69.228 | 91.266 | 58.069 |
| 7 | Obesitas | 398 | 406 | 994 | 239 | NA |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

**1) Diabetes Mellitus (DM) dan Pengendalian kasus Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD)**

Tahun 2019 dilakukan upaya screening awal untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular DM dan PJPD.

Pada tahun 2020 pelayanan pada DM sebanyak 18.516 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 43.696 kasus, sedangkan pelayanan pada PJPD sebanyak 58.069 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 91.266 kasus.

**2) Deteksi Dini NAPZA**

Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Dinkes bekerjasama dengan BNNK Bantul dan RSPAU dr S. Harjolukito serta Paskas TNI AU dan Kodim 0729 Bantul.

**3) Pengendalian kasus kesehatan jiwa**

Pada tahun 2020 pelayanan pada ODGJ sebanyak 2.097 jiwa menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 9.761 kasus.

**e. Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.**

Fungsi utama surveilans penyakit adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dan respon terhadap potensial KLB dan wabah. Pada tahun 2018 telah terantisipasi 9 (sembilan) kasus kejadian potensial KLB di wilayah Kabupaten Bantul dengan 6 (enam) di antaranya adalah kasus keracunan makanan. Secara kuantitas, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu 14 kasus. pada tahun 2019 masih didominasi dengan kejadian Keracunan Makanan yaitu 9 (Sembilan) kasus diikuti adanya dugaan kasus Pertusis, gastroenteritis dan GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) masing-masing 1 (satu) kasus. Capaian Accute Flaccid Paralysis (AFP) sebagai upaya kewaspadaan dini terhadap adanya virus Polio liar di masyarakat sebanyak 5 (lima) kasus. Surveilans Campak mencatat sebanyak 199 suspek dengan hasil konfirmasi Campak positif 1 kasus dan Rubella positif sebanyak 14 kasus.

Pada tahun 2020 terdapat 3 jenis kejadian luar biasa yaitu: GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), keracunan makanan dan wabah Covid-19 (merscov) yang masih menunjukkan peningkatan,

data sampai dengan per 31 Juli 2021 terkonfirmasi sebanyak 42.374 positif terjangkit virus dengan 988 kasus kematian. Sebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan per 31 Juli 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 44 Jumlah Sebaran Kasus Covid per Kapanewon di Kabupaten Bantul (per 31 Juli 2021)

| No. | Kapanewon | Dalam Perawatan | Meninggal | Sembuh | Jumlah Kasus Positif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambanglipuro | 894 | 31 | 1.106 | 2.031 |
| 2 | Banguntapan | 2.229 | 121 | 3.734 | 6.084 |
| 3 | Bantul | 1.855 | 87 | 2.121 | 4.063 |
| 4 | Dlingo | 170 | 24 | 437 | 631 |
| 5 | Imogiri | 887 | 63 | 1.679 | 2.629 |
| 6 | Jetis | 830 | 83 | 2.455 | 3.368 |
| 7 | Kasihan | 1.014 | 65 | 2.275 | 3.354 |
| 8 | Kretek | 406 | 35 | 824 | 1.265 |
| 9 | Pajangan | 406 | 34 | 1.030 | 1.470 |
| 10 | Pandak | 777 | 43 | 1.455 | 2.275 |
| 11 | Piyungan | 574 | 24 | 634 | 1.232 |
| 12 | Pleret | 660 | 76 | 1.461 | 2.197 |
| 13 | Pundong | 468 | 27 | 689 | 1.184 |
| 14 | Sanden | 268 | 35 | 1.342 | 1.645 |
| 15 | Sedayu | 407 | 50 | 1.828 | 2.285 |
| 16 | Sewon | 1.389 | 136 | 3.663 | 5.188 |
| 17 | Srandakan | 341 | 54 | 1.078 | 1.473 |
| | **Jumlah** | **13.575** | **988** | **27.811** | **42.374** |

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

## f. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Kesehatan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 45 Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH | 96,77 | 72,8 | 108,3 | 99,49 | 157,6 |
| Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH | 7,65 | 8,74 | 8,28 | 8,33 | 6,93 |
| Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,31 |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevalensi Penderita HIV (Angka) | 0,083 | 0,09 | 0,19 | 0,12 | 0,01 |
| Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD) per 100.000 Penduduk | 237,75 | 57,98 | 19,52 | 140 | 128 |
| Net Death Rate per 1000 pasien | 18,69 | 16,98 | 22,62 | 18,7 | 21,17 |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Dari data dapat kita lihat adanya peningkatan nilai Angka Kematian Ibu pada tahun 2020, kondisi ini disebabkan karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu jalan harus dalam kondisi baik untuk memperlancar transportasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, lokasi ruas jalan provinsi di Kabupaten Bantul sepanjang 162,150 km. Sedangkan, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 376 ruas, dengan panjang 624,47 Km.

Tabel 2 46 Kondisi Jalan di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

| Tahun | Panjang (Km) | Kondisi Mantap | | Kondisi Belum Mantap | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Panjang (km) | % | Panjang (km) | % |
| 2017 | 624.47 | 463.23 | 74.18 | 161.24 | 25.82 |
| 2018 | 624.47 | 465.73 | 74.58 | 158.74 | 25.42 |
| 2019 | 624.47 | 468.97 | 75.10 | 156.64 | 24.90 |
| 2020 | 624.47 | 470.98 | 75.42 | 153.49 | 24.58 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Jalan kondisi mantap yaitu jalan aspal kondisi baik dan sedang, sebaliknya kondisi belum mantap yaitu kondisi jalan rusak dan rusak berat. Pada Tahun 2020 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 470,98 km (75,42%) naik dari tahun sebelumnya sepanjang 468,97 km (75,10%) pada Tahun 2019. Kabupaten Bantul masih memiliki jalan dalam kondisi belum mantap dengan panjang 156.64 km, sehingga untuk memperlancar transportasi dan mendukung perekonomian masih diperlukan penanganan jalan agar semua jalan dikabupaten bantul bisa dalam kondisi mantap.

**b. Rasio Jaringan Irigasi**

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Dalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Tolok ukur efisiensi dapat diwakili dengan cakupan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi sementara tolok ukur efektifitas diwakili oleh capaian saluran irigasi dalam kondisi baik.

Berdasarkan Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa kewenangan Kabupaten Bantul meliputi 118 DI terdiri dari 100 DI Permukaan dan 18 DI Air Tanah dengan luas total 9.368 Ha.

Kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul adalah 82,15% (193.125,6m) melebihi dari target yang ditetapkan

82% (192.773m). Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 47 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Target (m) | % | Realisasi (m) | % |
| 2016 | 190.422,09 | 81,00 | 193.957,00 | 82,50 |
| 2017 | 188.071,20 | 80,00 | 188.541,38 | 80,20 |
| 2018 | 189.247,65 | 80,5 | 190.422,09 | 81,00 |
| 2019 | 192.773,00 | 82,00 | 193.125,60 | 82,15 |
| 2020 | 193.644,82 | 81,50 | 194.761,54 | 81,97 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

Pembangunan saluran irigasi diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai). Tabel berikut menunjukkan luas Daerah Irigasi yang terairi dengan baik.

Tabel 2 48 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Ha) | % | Realisasi (Ha) | % |
| 1 | 2016 | 6.820,86 | 79,00 | 7.004,00 | 81,12 |
| 2 | 2017 | 6.907,20 | 80,00 | 7.007,35 | 81,16 |
| 3 | 2018 | 7.050,52 | 81,16 | 6.945,19 | 80,44 |

| No | Tahun | Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target (Ha) | % | Realisasi (Ha) | % |
| 4 | 2019 | 7.093,69 | 82,16 | 7.096,28 | 82,19 |
| 5 | 2020 | 7.136,86 | 82,66 | 6.908,06 | 80,01 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Luas sawah sepanjang DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik mencapai 80,01% (6.908,06), tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 82,66% (7.136,86Ha). Tidak tercapainya target DI yang terlayani air irigasi pada tahun 2020 disebabkan oleh refocusing anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi yang menyebabkan DI yang terlayani menjadi berkurang.

**c. Drainase Dalam Kondisi Baik**

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran.

Kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik. Presentase kinerja penanganan banjir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kejadian bencana cuaca ekstrem berupa siklon tropis yang menyebabkan banjir.

Tabel 2 49 Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Target | | Realisasi | | Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | Penanganan Banjir (ha) | % | Penanganan Banjir (ha) | |
| 1 | 2016 | 13,78 | 123,13 | 20,30 | 181,43 | 147,71 |
| 2 | 2017 | 20,56 | 183,71 | 24,90 | 222,49 | 121,11 |

| No | Tahun | Target | | Realisasi | | Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | Penanganan Banjir (ha) | % | Penanganan Banjir (ha) | |
| 3 | 2018 | 27,34 | 244,30 | 28,84 | 257,70 | 105,49 |
| 4 | 2019 | 34,12 | 303,81 | 34,00 | 257,70 | 99,65 |
| 5 | 2020 | 40,9 | 365,47 | 40,9 | 365,47 | 100,00 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021
Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

### d. Tempat Permakaman Umum

Penyediaan permakaman umum menjadi sebuah upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan lahan seluas 4,6 Ha sebagai TPU yang berada di dusun Tilaman Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. TPU ini dikelola oleh UPT di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu terdapat juga lahan permakaman di Tegaldowo, Bantul. Lahan permakaman disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bagi warga perumahan maupun masyarakat umum namun pada masa pandemi dapat dimanfaatkan bagi jenazah yang meninggal akibat Covid-19. Sampai saat ini belum ada jenazah Covid-19 yang dimakamkan di Tilaman, karena tidak ada penolakan dari warga untuk memakamkan jenazah Covid-19 di permakaman warga.

### e. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 50 Produk Perencanaan dan Peraturan Tata Ruang di Kabupaten Bantul

| No. | Produk Perencanaan Tata Ruang |
|---|---|
| 1. | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 |
| 2. | Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon 2018-2038 |

| No. | Produk Perencanaan Tata Ruang |
|---|---|
| 3. | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan 2018-2038 |
| 4. | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang |
| 5. | Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sejumlah 17 Kapanewon :<br>RDTR dan PZ Kapanewon Pajangan, Imogiri, Pleret, Pandak, dan Sedayu (2014)<br>RDTR dan PZ Kapanewon Piyungan, dan Pantai Selatan ( Sanden, Kretek, Srandakan) (2015)<br>RDTR dan PZ Kapanewon Pundong dan Jetis (2016)<br>RDTR dan PZ Kapanewon Bambanglipuro, Dlingo,(2017)<br>Raperda RDTR dan PZ Piyungan, Pansela, Jetis, Pundong (2017)<br>RDTR dan PZ Kapanewon Sewon dan Kasihan (2018)<br>RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaaan (2018)<br>Draft RDTR Pansela, Perkotaan, dan Perdesaan (2020) |
| 6. | Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) :<br>RTBL Kawasan Srandakan, Kawasan Bantul Kota , Kawasan Sanden (2018)<br>RTBL Zona pengembangnan Kawasan Parangtritis II (2018)<br>RTBL Jetis, Kawasan Industri Kasihan, Watu Gilang, Depok, Parangtritis (2019)<br>RTBL Segoroyoso, RTBL Imogiri, Masjid Pathok Negoro Babadan, Masjid Pathok Negoro Dongkelan (2020) |
| 7. | Dokumen Draft Peninjauan Kembali RTRW (2020) |
| 8. | Masterplan dan DED :<br>Desain Citra Kota Bantul, Jalan Jendral Sudirman (2017)<br>Masterplan dan DED Gerbang masuk Kabupaten Bantul dan Kawasan Lindung Hargodumilah (2018)<br>Masterplan Watu Amben (2019) |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Penyusunan dokumen RDTR di kabupaten Bantul saat ini masih berupa kajian yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu RDTR Perkotaan, RTDR Pansela, RDTR Bantul Barat, dan RDTR Bantul Timur. Sampai saat ini dokumen RDTR yang telah disusun dalam Peraturan Daerah adalah RDTR dan PZ BWP Sewon dan RDTR dan PZ BWP Kasihan, yang kemudian akan masuk dalam RDTR Perkotaan. RDTR Pansela ditargetkan selesai akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022, dan RDTR Perkotaan ditargetkan selesai tahun 2022. RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur ditargetkan selesai tahun 2023. Proses penyusunan RDTR yang membutuhkan waktu cukup lama ini, disebabkan antara lain oleh tata cara dan tata kala proses penyusunan dan tahapan yang cukup panjang dan melibatkan unsur eksternal lintas sektor dan instansi, baik di

lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah DIY, maupun Kementerian/Lembaga pemerintah pusat.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 telah dilaksanakan pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018 peninjauan kembali disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Hasil rekomendasi PK RTRW yaitu dilakukan review RTRW.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan perbaikan revisi RTRW agar sesuai dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan kegiatan konsultasi peta RTRW ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk tahapan persetujuan substansi RTRW ke Kementerian ATR, masih diperlukan persyaratan yang harus dilengkapi pada tahun 2020 antara lain:

1) Berita Acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi dengan DPRD;
2) Rekomendasi Gubernur terhadap rancangan RTRW;
3) SK Bupati tentang rekomendasi hasil PK RTRW (sedang dilaksanakan);
4) Tabel sandingan RTRW eksisting dengan rancangan perubahan RTRW;
5) Surat pernyataan Bupati bahwa bertanggungjawab terhadap kualitas raperda RTRW;
6) Konsultasi publik minimal dua kali;
7) Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan;
8) Berita acara yang dikeluarkan oleh BIG perihal peta dasar RTRW;
9) KLHS RTRW yang sudah divalidasi; dan
10) Surat permohonan persetujuan substansi Materi teknis dan album peta RTRW;

KLHS RTRW telah divalidasi oleh DIY, proses Peninjauan Kembali RTRW, saat ini tengah berproses penyampaian materi untuk evaluasi gubernur dan akan dilanjutkan untuk memperoleh persetujuan DPRD. Setelah itu akan berproses di Kementerian ATR/BPN. Tatakala optimis diperkirakan akhir tahun dapat disampaikan Kementrian ATR, namun tatakala pesimis diperkirakan akan selesai pada triwulan pertama 2022. Target Kabupaten Bantul adalah RTRW selesai di tahun 2021.

### f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk dapat menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, maka perlu dilakukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 51 Kesesuaian Pola Ruang Kabupaten Bantul

| Fungsi Kawasan | | Tingkat Kesesuaian (Ha) | | | Jumlah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sesuai | Belum Sesuai | Tidak Sesuai | |
| LINDUNG | Kawasan Hutan Lindung | 1009,82 | 33,15 | 228,01 | 1.270,98 |
| | Kawasan Resapan Air | 2.231,20 | 0 | 408,53 | 2.639,71 |
| | Sempadan Pantai | 187,33 | 0 | 67,09 | 254,42 |
| | Sempadan Sungai | 1.716,24 | 0 | 657,93 | 2.374,17 |
| | Kawasan Cagar Budaya | 146,48 | 20.14 | 109,02 | 275,64 |
| | **Jumlah Lindung (Ha)** | **5.291,07** | **53,29** | **1.470,58** | **6.814,92** |
| | **% terhadap Kawasan Lindung** | **77,64** | **0,78** | **21,58** | **100,00** |
| | **% terhadap Kabupaten Bantul** | **9,73** | **0,37** | **3,52** | **13,62** |
| BUDIDA | Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan | 10.110,43 | 752,34 | 73,23 | 10.936,00 |

| Fungsi Kawasan | | Tingkat Kesesuaian (Ha) | | | Jumlah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sesuai | Belum Sesuai | Tidak Sesuai | |
| | Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan | 7.005,58 | 5.182,31 | 7,87 | 12.195,75 |
| | Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat | 410,27 | 383,85 | 385,39 | 1.179,52 |
| | Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah | 8.284,00 | 654,09 | 1.728,10 | 10.666,19 |
| | Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering | 3.660,16 | 2,15 | 1.122,99 | 4.785,30 |
| | Kawasan Peruntukan Industri | 1.776,79 | - | 686,96 | 2.463,75 |
| | Kawasan Peruntukan Pariwisata | 982,96 | - | - | 982,96 |
| | **Jumlah Budidaya (Ha)** | **32.230,19** | **6.974,74** | **4.004,54** | **43.209,47** |
| | **% terhadap Kawasan Budidaya** | **74,59** | **16,14** | **9,27** | **100** |
| | **% terhadap Kabupaten Bantul** | **64,43** | **13,94** | **8,01** | **86,38** |
| **TOTAL (Ha)** | | **37.521,26** | **7.028,03** | **5.475,12** | **50.024,41** |
| **% terhadap Kabupaten Bantul** | | **75,01** | **14,05** | **10,94** | **100** |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Evaluasi terhadap kesesuaian pemanfaatan pola ruang diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaian pola ruang Kabupaten Bantul tahun 2020 dengan kriteria 'sesuai' sebesar 75,01%; 'belum sesuai' sebesar 14,05%; dan 'tidak sesuai' sebesar 10,94%.

Berdasarkan penilaian kesesuaian pola ruang tersebut, maka tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Bantul menurut klasifikasi dari Permen ATR/Kepala BPN No. 9/2017 secara umum berada pada klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas (<80%), artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

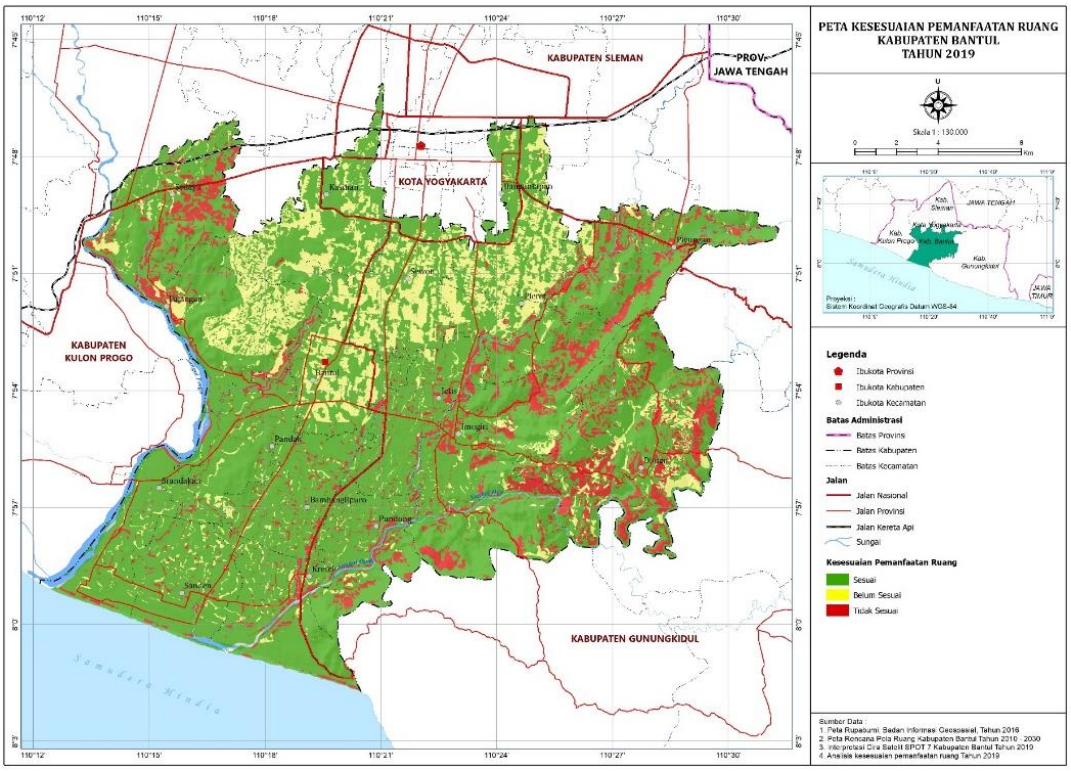


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Gambar 2 41 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2019

## g. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasar pasal 20 UU No. 26/2007, terdapat dua jenis RTH yaitu RTH publik dan RTH privat. Proporsi luasan RTH pada wilayah kota adalah minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah, dengan porsi 20% sebagai RTH publik. Jenis dan luas Ruang Terbuka Hijau dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2 52 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul

| No. | Jenis RTH | | Luas RTH (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | BANGUNAN | Perumahan | 132,61 |
| | | Perkantoran (pemerintah dan swasta) | 26,05 |
| | | Fasilitas Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosbud) | 113,42 |

| No. | Jenis RTH | | Luas RTH (Ha) |
|---|---|---|---|
| | | **Sub total** | **272,08** |
| **2** | **LINGKUNGAN** | Lapangan | 32,03 |
| | | Permakaman | 81,93 |
| | | Taman Kelurahan | 230,63 |
| | | Taman Kapanewon | 9,58 |
| | | Taman Kota | 1,51 |
| | | Wanadesa | 5,51 |
| | | **Sub total** | **361,2** |
| **3** | **PERKOTAAN** | Sempadan Jalan | 630,43 |
| | | Taman/jalur hijau | 3,86 |
| | | **Sub total** | **634,3** |
| **4** | **FUNGSI TERTENTU** | Sempadan SUTT | 107,09 |
| | | Sempadan Rel | 1,12 |
| | | Sempadan Sungai | 254,88 |
| | | Sempadan Irigasi | 88,92 |
| | | Sempadan Danau/Telaga Desa | 3,63 |
| | | Pariwisata | 15,19 |
| | | Sempadan Pipa Pertamina | 14,03 |
| | | Cagar Budaya | 11,87 |
| | | Gardu Induk PLN | 3,1 |
| | | Hankam | 23,86 |
| | | IPAL | 7,39 |
| | | TPST | 0,17 |
| | | **Sub total** | **531,25** |
| **Total Luas RTH** | | | **1.798,83** |
| **Luas Wilayah** | | | **19.873,00** |
| **Luas Kawasan Perkotaan** | | | **12.544,00** |
| **% Luas Kawasan PerkotaaN** | | | **63,12** |
| **RTH Kawasan Perkotaan (%)** | | | **14,34** |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021 , diolah

Dari tabel dapat kita lihat RTH Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul baru seluas 14,34%, Angka tersebut menunjukkan bahwa RTH di Kabupaten Bantul belum memenuhi standar luasan RTH yang telah ditetapkan. Peta identifikasi RTH disajikan pada gambar berikut:

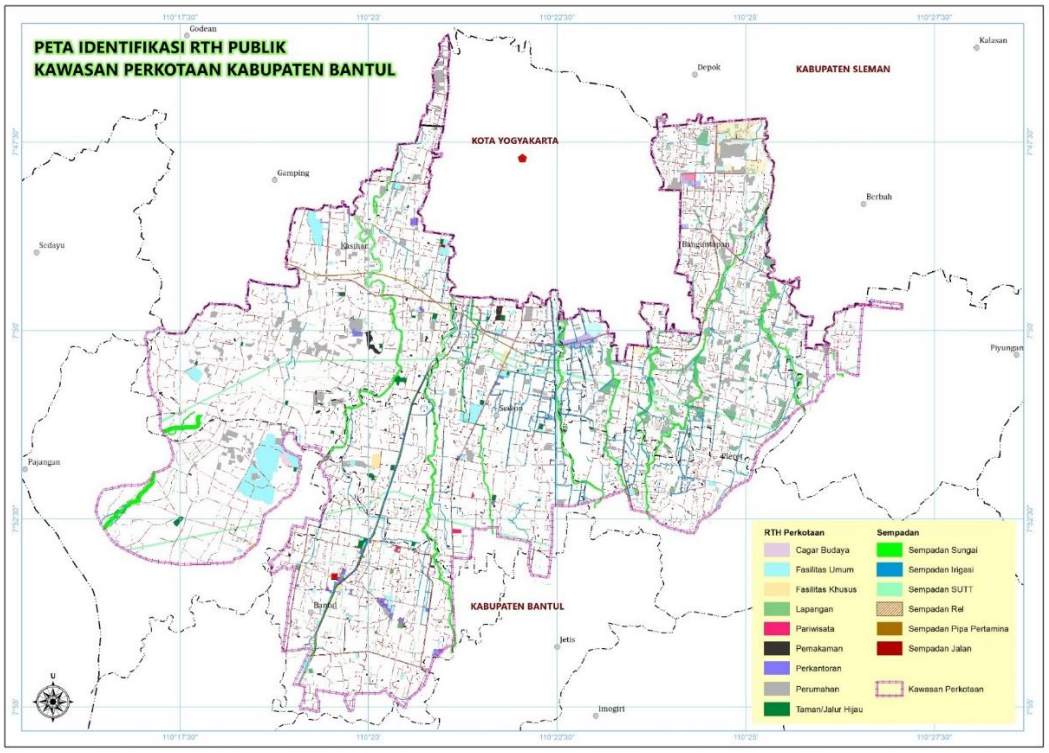


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020

Gambar 2 42 Peta Identifikasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2019

### h. Penanganan Air Limbah

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua yaitu grey water dan black water. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah air limbah rumah tangga berupa limbah cucian dapur, cucian pakaian (sabun), dan air buangan dari kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam black water adalah, tinja manusia, urine, air penggelontor, kertas pembersih, dan air pembersih. Secara umum dari hasil survey air limbah relatif terkelola dengan baik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbah ataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja terkelola dengan tangki septik ataupun IPAL Komunal.

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: kesadaran masyarakat akan kesehatan,

sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Tabel 2 53 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020

| No | Jenis | Satuan | Jumlah/ Kapasitas | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Berfungsi | Tdk berfungsi |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| | **SPALD-Setempat** | | | | |
| 1 | Berbasis komunal | | | | |
| | - MCK Komunal | unit | - | | - |
| 2 | Truk Tinja | unit | 2 | √ | |
| 3 | IPLT : kapasitas | m3/hari | 50 | √ | |
| | **SPALD-Terpusat** | | | | |
| 1 | Berbasis komunal | | | | |
| | - Tangki septik komunal >10KK | unit | - | - | - |
| | - IPAL Komunal | Unit/kk | 170/ 12.521 | √ | - |
| 2 | IPAL Kawasan/Terpusat | | | | |
| | - Kapasitas | kk | 3.000 | √ | - |
| | - Sistem | | - | - | - |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Berdasarkan data kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik menunjukkan bahwa prasarana dan sarana yang terbangun sampai 2020 ini masih berfungsi dengan baik. Penanganan pengelolaan air diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon.

Berdasarkan Studi EHRA (2019), ditinjau dari sanitasi air limbah domestik Kabupaten Bantul terbagi menjadi 2 zona tingkat risiko sanitasi yang menunjukkan skala 4 dan 3, yaitu :

(1) Risiko Sangat Tinggi (skala 4) , yang meliputi Kalurahan Srihardono, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Temuwuh,

Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Srimartani, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Sendangsari

(2) Risiko Tinggi (skala 3), yang meliputi Kalurahan Poncosari, Kalurahan Gadingsari, Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, Kalurahan Tirtohargo, Kalurahan Parangtritis, Kalurahan, Tirtosari, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Panjangrejo, Kalurahan Sidomulyo, Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Gilangharjo, Kalurahan Wijirejo, Kalurahan Palbapang, Kalurahan Bantul, Kalurahan Sabdodadi, Kalurahan Patalan, Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Kebonagung, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Karang Talun, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Wonolelo, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Guwosari, Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argorejo, Kalurahan Argosari, Kalurahan Argomulyo.

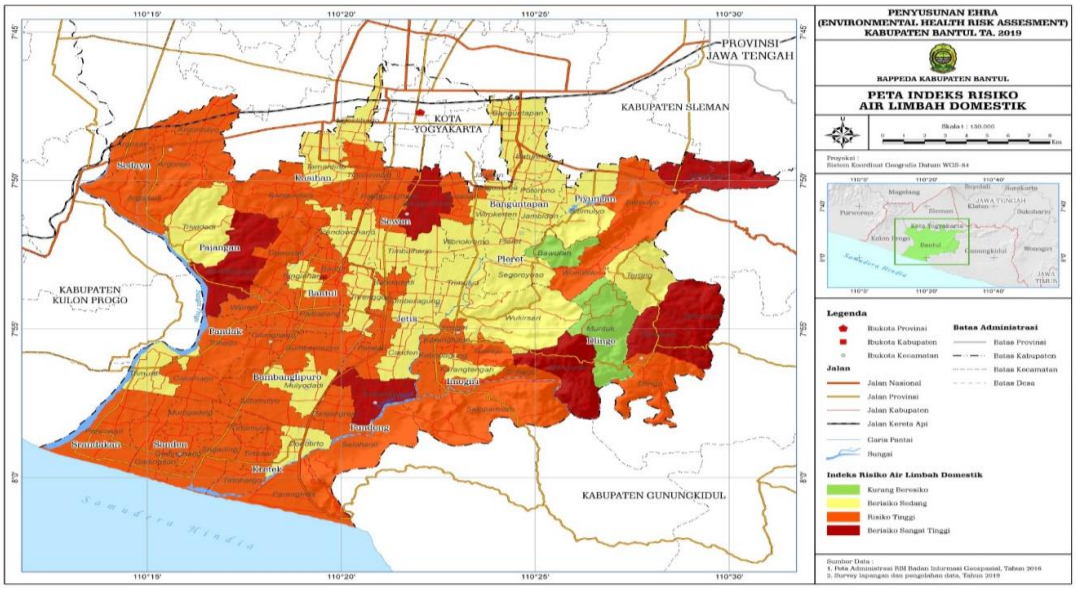


Sumber: Studi EHRA, Bappeda, 2019

Gambar 2 43 Peta Indeks Risiko Air Limbah Domestik

### i. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 54 Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%) | 82,79 | 74,18 | 74,58 | 75,10 | 75.42 |
| Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik (%) | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 |
| Persentase kecukupan air irigasi (%) | 81,12 | 81,16 | 80,44 | 82,19 | 80,01 |
| Persentase Penanganan Banjir (%) | 20,30 | 24,90 | 28,84 | 34 | 41,31 |
| Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Persentase Cakupan Pengendalian Tata (%) | - | 71 | 70,35 | 72,5 | 75,01 |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

## 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### a. Penduduk Berakses Air Bersih

Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih diantaranya dengan menambah jumlah sambungan rumah ke jaringan PDAM dan membangun instalasi Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) melalui program APBD dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di daerah yang rawan air bersih. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air layak pada tahun 2019 mencapai 96,81% dari target 100%. Hal ini menunjukkan belum tercapainya nilai target pemenuhan akses air layak di Kab. Bantul.

Air layak di Kabupaten Bantul dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga salah satu

upaya pemenuhannya dapat dilakukan dengan penambahan sambungan rumah. Layanan sambungan rumah yang telah dipasang oleh PDAM sebanyak 33.886 SR dengan pengelolaan 15 SPAM. Pada beberapa rumah tangga di Kapanewon Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

**b. Lingkungan Permukiman Kumuh**

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 364 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, sebanyak 19 lokasi dengan luas 79,58 Ha.

Tabel 2 55 Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Nama Lokasi | Luas (Ha) | Lingkup Administratif | | Penanganan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kalurahan | Kapanewon | Tahun | % |
| 1 | Gandekan | 1,27 | Bantul | Bantul | 2017-2018 | 100% |
| 2 | Deresan | 2,76 | Ringinharjo | Bantul | - | 0% |
| 3 | Mandingan | 2,31 | Ringinharjo | Bantul | - | 0% |
| 4 | Soropaten | 0,71 | Ringinharjo | Bantul | 2017 | 100% |
| 5 | Karangmojo | 2,96 | Trirenggo | Bantul | 2017 | 100% |
| 6 | Kweden | 0,91 | Trirenggo | Bantul | - | 0% |
| 7 | Jaranan | 0,34 | Banguntapan | Banguntapan | 2019 | 100% |
| 8 | Jomblang | 3,60 | Banguntapan | Banguntapan | 2017 | 100% |
| 9 | Blado | 15,77 | Potorono | Banguntapan | 2017-2018 | 100% |
| 10 | Semoyan | 1,91 | Singosaren | Banguntapan | 2017 | 100% |
| 11 | Dladan | 2,70 | Tamanan | Banguntapan | 2017 | 100% |
| 12 | Ngewotan | 16,97 | Ngestiharjo | Kasihan | 2018 | 100% |
| 13 | Gonjen | 3,92 | Tamantirto | Kasihan | 2018 | 100% |
| 14 | Kalipakis | 1,11 | Tirtonirmolo | Kasihan | 2017 | 100% |
| 15 | Salakan | 2,45 | Bangunharjo | Sewon | 2017 | 100% |
| 16 | Glugo | 4,37 | Panggungharjo | Sewon | 2017 | 100% |
| 17 | Cepit | 11,71 | Pendowoharjo | Sewon | 2018 | 100% |
| 18 | Pacetan | 2,18 | Pendowoharjo | Sewon | 2017 | 100% |
| 19 | Pendowo | 1,66 | Pendowoharjo | Sewon | 2017 | 100% |
| | Total | 79,58 | | | | 92,49% |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Penanganan kawasan kumuh dengan gerakan nasional 100-0-100 diantaranya tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Tahun 2018, upaya penanganan kawasan kumuh Kabupaten Bantul telah mencapai 92,06%. Kemudian pada tahun 2019, terdapat penambahan penanganan di Padukuhan Jaranan Banguntapan sehingga total peanganan hingga tahun 2019 mencapai 92,49%. Terdapat kekurangan penanganan di Padukuhan Deresan Kalurahan Ringinharjo, Padukuhan Mandingan Kalurahan Ringinharjo dan Padukuhan Kweden Kalurahan Trirenggo.

Selanjutnya untuk mewujudkan nol persen kawasan kumuh, pada tahun 2020 dilakukan peninjauan kembali kondisi kekumuhan. Berdasarkan hasil review ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan dengan lokasi Kawasan kumuh. Lokasi Kawasan kumuh ada di 31 Kalurahan pada 7 Kapanewon dengan luas 330,26Ha.

### c. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bangunan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian secara teknis maupun non teknis. Kriteria atau persyaratan yang dimaksud, yaitu keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Tabel 2 56 Realisasi Pembangunan RTLH di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Sumber Anggaran RTLH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSPS (Unit) | 652 | 365 | 959 | 1365 | 1577 |
| DAK (Unit) | - | - | 150 | 176 | 139 |
| APBD I (Unit) | - | 582 | 517 | 443 | - |
| APBD II (Unit) | - | - | 171 | 83 | - |
| **Total** | **652** | **947** | **1794** | **2067** | **1716** |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% menurun di tahun 2020.

Realisasi pembangunan RTLH mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Tahun 2018 ke 2019, menunjukkan peningkatan sebesar 15% namun menurun di tahun 2020. Sampai tahun 2020 ini realisasi kurang lebih hampir di angka 59%. Akan tetapi berjalannya waktu, karena pandemi, masuk dalam anggaran refocusing. Pada APBD II di refocusing untuk penanganan Covid-19. Dan pada APBD I tidak dianggarkan.

**d. Fasilitasi Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi MBR yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi backlog rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan. Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan perumahan yang layak bagi MBR.

Rusunawa di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dibangun di wilayah Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan. Pada tahun 2009 di wilayah Kapanewon Sewon telah dibangun rusunawa Panggungharjo sebanyak 2 Twin Blok (TB) atau 198 unit. Pada tahun 2011 di wilayah Kapanewon Kasihan dibangun Rusunawa di Padukuhan Tambak, Kalurahan Ngestiharjo sebanyak satu TB atau 98 unit. Selanjutnya di wilayah Kapanewon Banguntapan dibangun rusunawa di dua Kalurahan, yaitu pada tahun 2012 di Padukuhan Pringgolayan, Kalurahan Banguntapan sebanyak dua TB atau 198 unit, dan pada tahun 2016 di Kalurahan Tamanan dibangun rusunawa pekerja sebanyak dua TB atau 190 unit.

Tabel 2 57 Pembangunan Rusunawa dan Operasional pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2018

| No. | Lokasi Rusunawa | Tahun | | Kapasitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembangunan | Operasional | Twin blok | Unit |
| 1. | Panggungharjo, Sewon | 2008 | 2010 | 2 | 198 |
| 2. | Tambak, Ngestiharjo, Kasihan | 2011 | 2012 | 1 | 96 |
| 3. | Pringgolayan, Banguntapan | 2012 | 2013 | 2 | 198 |
| 4. | Tamanan, Banguntapan (Rusunawa Pekerja) | 2015 (Pematangan lahan) | 2017<br>2018 | 2 | 190 (66 pekerja keluarga, 104 pekerja lajang) |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Tahun 2017 Operasional 4 unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos satpam dan landsekap. Tahun 2018 masih dilakukan operasional empat unit rusunawa tersebut dan pembangunan tempat parkir Rusunawa Panggungharjo dan Tamanan.

**e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 58 Indikator Kinerja Utama Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (%) | 50,13 | 79,690 | 92,06 | 92,490 | 92,490 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

### 2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum capaian pelayanan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum) di Kabupaten Bantul telah mencapai target, namun demikian Kabupaten Bantul masih memiliki masalah terkait urusan trantibum pada penegakan perda yang baru mencapai 70%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius. Sementara itu dari aspek kebencanaan belum semua Desa Tangguh Bencana yang dibentuk yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Desa Tanggap Bencana.

#### 2.3.1.5.1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

**a. Penegakan Perda**

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas Penegakan Perda melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi serta melaksanakan patroli wilayah untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Operasi Yustisi dan non yustisi dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah untuk meminimalisir penyakit masyarakat dan pelanggaran peraturan daerah dengan tujuan akhir menurunnya Pelanggaran Perda

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi dan pencegahan miras dan Napza.

Dalam rangka mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran Perda dilaksanakan Operasi Penegakan Perda melalui 406 kali operasi yustisi dan non yustisi. Program ini juga didukung dengan kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian serta Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Rekapitulasi hasil operasi penegakan Perda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 59 Jumlah Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang ditindaklanjuti di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Tindakan | Jumlah | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | Berijin | 9 | 21 | 30 | 17 | 77 |
| 2 | Proses Hukum | 8 | 12 | 25 | 31 | 76 |
| 3 | Pembinaan | 53 | 49 | 45 | 47 | 193 |
| 4 | Panggilan PPNS | 3 | - | - | 22 | 25 |
| 5 | Bukti Pelanggaran Perda | 8 | - | - | - | 8 |
| 6 | Membuat Surat Pernyataan | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Pembongkaran Pribadi | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 8 | Tidak Memenuhi Panggilan | 4 | 1 | - | - | 5 |
| 9 | Tidak Ditemukan Barang Bukti | - | 14 | - | - | 14 |
| | Jumlah | 86 | 99 | 101 | 120 | 406 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

**b. Peningkatan Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Program ini dilaksanakan dengan menjalin kerja sama lintas sektoral yang intensif dan diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, serta peningkatan kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah penertiban PKL, penertiban Anak Jalanan (Anjal), dan menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.

Penertiban PKL dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku. Penertiban anjal dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Anjal yang terjaring diberikan pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing, sementara pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi semua ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan, pemanggilan, serta untuk kasus tertentu dilakukan penyidangan.

Dari keseluruhan jumlah pengaduan masyarakat semuanya telah ditindaklanjuti sesuai kasus masing-masing. Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) tercapai 100%.

**c. Rasio Jumlah Linmas**

Pelibatan masyarakat/komunitas dalam menjaga trantibum diketahui belum baik. Hal tersebut ditandai dengan belum semua padukuhan memiliki jaga warga.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Rasio jumlah petugas linmas dan jumlah RT pada

tahun 2020, tercapai 95,3 %, yaitu jumlah Linmas 5.501 dan jumlah RT 5.775.

**d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 60 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase penegakan PERDA (%) | 57 | 77,7 | 95,3 | 66 | 70 |
| Persentase Penyelesaian K3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021.

### 2.3.1.5.2. Sub-Urusan Bencana Daerah

**a. Bencana Daerah**

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, yaitu (1) pelayanan informasi rawan bencana; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pelayanan Informasi rawan bencana diwujudkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menerangkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) ancaman bencana dengan berbagai tingkat risiko. Capaian nilai risiko bencana tahun 2020 adalah 187,200 atau masuk dalam kategori tinggi. Tingginya indeks risiko ini disebabkan masih tingginya ancaman bencana di wilayah Kabupaten Bantul dan masih tingginya tingkat kerentanan

yang disebabkan pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, dan belum optimalnya integrasi tata ruang dengan mitigasi bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, berupa serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 23 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) atau sebesar 4,51%, dibawah target yang ditetapkan yaitu 4,7%.

Capaian persentase Desa Tangguh Bencana yang terbentuk adalah 46,67% (35 Kalurahan) telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 38,66 % (28 Kalurahan). Pada tahun 2019 dilaksanakan pembentukan 4 Desa Tangguh Bencana yaitu Kalurahan Terong, Temuwuh, Dlingo, dan Guwosari. Pada tahun 2020 pembentukan maupun pengembangan Desa Tangguh Bencana tidak bisa dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk percepatan penanganan corona virus 19.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Kejadian bencana tahun 2016 -2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 61 Kejadian Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020

| No | Jenis Ancaman | Jumlah Kejadian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kebakaran | 58 | 111 | 208 | 227 | 130 |
| 2 | Banjir | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Tsunami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gempa * | 11 | 27 | 7 | 6 | 13 |
| 5 | Tanah Longsor | 77 | 319 | 23 | 176 | 85 |
| 6 | Kekeringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abrasi danGelombang Pasang | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Cuaca Ekstrim : Angin Kencang | 39 | 3 | 22 | 16 | 22 |
| | Pohon Tumbang | 52 | 63 | 80 | 105 | 115 |

| No | Jenis Ancaman | Jumlah Kejadian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9 | Epidemi penyakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021
Keterangan : * dirasakan di Bantul

Sepanjang tahun 2016-2020 Kabupaten Bantul mencatat kejadian bencana terbesar adalah kejadian kebakaran, cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor, dengan trend yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Cuaca ekstrim pada tahun 2017 dan tahun 2019 berupa siklon tropis cempaka, siklon tropis Dahlia dan siklon tropis savanna yaitu terjadinya peningkatan intensitas hujan, angin puting beliung di Kabupaten Bantul menyebabkan terjadi banjir besar di beberapa wilayah menyebabkan korban jiwa dan kerusakan sejumlah infrastruktur. Kerugian akibat bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 62 Kerugian dan Korban Bencana di Kabupaten Bantul 2016-2020

| Tahun | Bencana non Pandemi Covid-19 | | | Covid 19 (Pandemi) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Estimasi kerusakan | Jumlah Korban | | | |
| | | Luka | MD | Confirm | MD |
| 2016 | Rp 5.486.054.889,00 | 5 | 1 | | |
| 2017 | Rp 298.836.444.366,00 | 5 | 3 | | |
| 2018 | Rp 2.667.930.000,00 | 7 | 4 | | |
| 2019 | Rp 95.675.921.376,00 | 7 | 7 | | |
| 2020 | Rp 14.576.944.000,00 | 4 | 2 | 3163 | 90 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Untuk mengurangi kerugian yang besar akibat terjadinya bencana, diperlukan alat *Early Warning System*. EWS yang ada di Kabupaten Bantul adalah EWS Tsunami.

Tabel 2 63 Togor EWS Tsunami Kabupaten Bantul

| No | Lokasi |
|---|---|
| 1 | Padukuhan Ngentak Kalurahan Poncosari, Srandakan |
| 2 | TPR Samas Kalurahan Srigading, Sanden |
| 3 | Pos SAR Parangtritis, Kretek/Paranghargo |
| 4 | Padukuhan Cangkring, Kalurahan Poncosari, Srandakan |
| 5 | Padukuhan Muneng Kalurahan Tirtohargo, Kretek |
| 6 | Padukuhan Depok Kalurahan Parangtritis, Kretek |
| 7 | Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis, Kretek |

| No | Lokasi |
|---|---|
| 8 | Padukuhan Parangkusumo Kalurahan Parangtritis, Kretek |
| 9 | Padukuhan Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan |
| 10 | Masjid Pranasakti Padukuhan Ngepet Kalurahan Srigading, Sanden |
| 11 | Padukuhan Mancingan Belakang Pendopo Parangtritis, Kretek |
| 12 | Masjid Al-Fajar, Ngentak, Poncosari, Srandakan |
| 13 | Masjid Kuwatul Islam, Kuwaru, Poncosari, Srandakan |
| 14 | Masjid Makmur, Babakan Kalurahan Poncosari, Srandakan |
| 15 | Masjid Sabilil Huda, Bondowaluh, Poncosari, Srandakan |
| 16 | Masjid Singgelo, Singgelo, Poncosari, Srandakan |
| 17 | Masjid Baiturrahman, Krajan, Poncosari, Srandakan |
| 18 | Masjid Baitur Rohman, Demangan, Gadingsari, Sanden |
| 19 | Masjid Bismillahinur, Wonorejo, Gadingsari, Sanden |
| 20 | Masjid An-Nur Era, Patehan, Gadingsari, Sanden |
| 21 | Masjid Wonoroto, Gadingsari, Sanden |
| 22 | Masjid Al-Haadti, Gadingsari, Sanden |
| 23 | Masjid Al-Muttaqin, Ngepet, Srigading, Sanden |
| 24 | Masjid Al-Huda, Tegalrejo, Srigading, Sanden |
| 25 | Masjid Al-Mujahidin, Bros Muneng, Tirtohargo, Kretek |
| 26 | Masjid Nurul Hidayah, Gegunung, Tirtohargo, Kretek |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

### b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Bencana Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 64 Indikator Kinerja Utama Sub-Urusan Bencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Relokasi Warga | 9,09 | 27,28 | 36,36 | 89,09 | 132 |
| Persentase Sekolah Siaga Bencana | 2,69 | 3,19 | 3,97 | 4,12 | 4,51 |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

### c. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menjadi isu global yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Awal wabah ini terjadi di China berdasarakan laporan WHO *China Country Office* yang melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Selanjutnya, *World Health Organization*

(WHO) telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari penyebaran *corona virus-disease (Covid-19)* sebagai isu pandemik dunia, maka perlu menjadi pertimbangan dan perhatian dalam proses perencanaan pembangunan.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Pasien positif Covid-19 di DIY mulai terkonfirmasi pada tanggal 15 Maret 2020 sebanyak satu orang dan terus meningkat. Kasus pertama di Kabupaten Bantul terkonfirmasi sejumlah satu orang positif pada tanggal 18 Maret 2020, kemudian ditetapkan status tanggap darurat Covid-19 dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 tahun 2020 pada 20 Maret 2020

Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Juli 2021 belum menunjukkan kecenderungan menurun, namun yang terjadi sebaliknya.

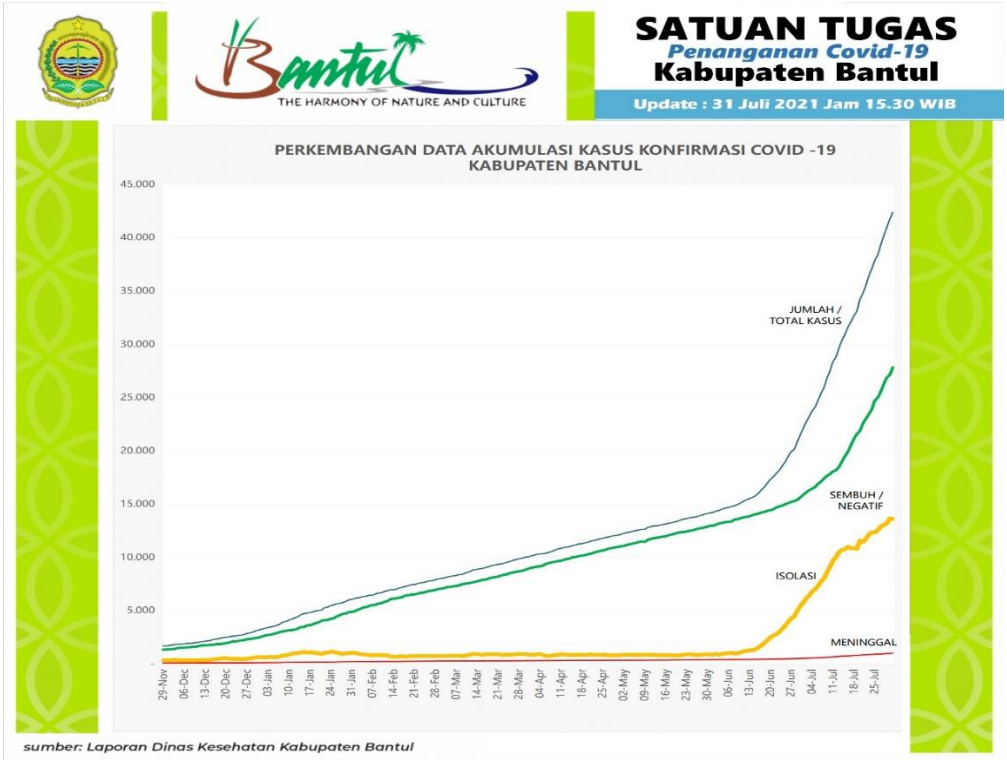


Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 44 Perkembangan Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021

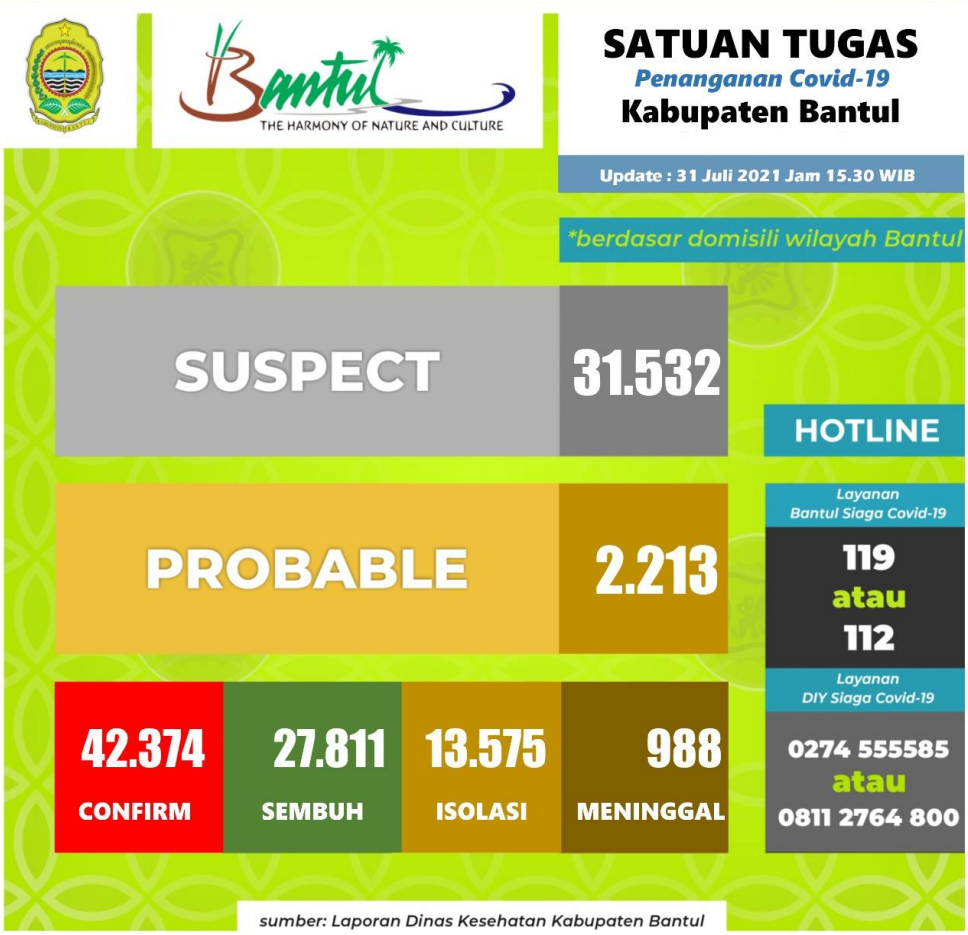


Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Gambar 2 45 Kasus Covid-19 per 31 Juli 2021

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (sampai dengan per 31 Juli 2021) menyatakan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 42.374 kasus, 27.811 pasien dinyatakan sembuh dan 988 meninggal dunia. Selanjutnya jumlah pasien dalam isolasi sebanyak 13.575 orang.

Upaya penanganan pasien Covid-19 dengan penyediaan Rumah Sakit Rujukan, RSLKC dan Shelter, sebagai berikut:

- RS rujukan COVID ada16 RS dengan rincian kamar : R. Isolasi: 187 ruang, R. ICU tanpa tek. negative: 5 ruang, R. ICU dengan tek. negative: 9 ruang, R. NICU: 5 ruang
- Shelter Kabupaten: Semaul: 15 kamar, Niten: 88 kamar dan Patmasuri: 60 kamar

Upaya Disinfeksi Ruang dan Lingkungan, sebagai berikut:

- 47 kali disinfeksi Fasilitas Umum
- 161 kali disinfeksi Rumah dan Lingkungan warga Terkonfirmasi Positif Covid-19
- Petugas gabungan dari BPBD Kab. Bantul – TNI – POLRI – PMI Bantul – MDMC Bantul – Sarlinmas Bantul – LPBNU Bantul – FPRB Kalurahan – Relawan
- Pelatihan Disinfeksi Ruang dan Lingkungan kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan
- Pendampingan Disinfeksi Ruang dan Lingkungan kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan

Upaya penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19:

- 50 kali penanganan
- Petugas gabungan dari BPBD Kab. Bantul - PMI Bantul – MDMC Bantul – Sarlinmas Bantul – LPBNU Bantul
- Pelatihan Penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19 kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan
- Pendampingan Penanganan Jenazah Terduga Infeksius/Covid-19 kepada Petugas Satgas Covid-19 di 75 Kalurahan

Selain upaya di atas, ada beberapa upaya lain yang telah dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan melalui media leaflet, baliho, spanduk, media elektronik
2. Skrining rapid di lokasi pasar, populasi pelaku perjalanan, tenaga kesehatan, petugas yang melayani masyarakat.
3. Skrining swab / RT-PCR secara langsung pada karyawan di puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan, serta swab massal pada populasi berisiko ( pelaku perjalanan dan kontak erat pasien positip ) yang dijaring melalui aplikasi
4. Penguatan Laboratorium untuk COVID : yaitu E. Clia dan Skrining RDT dan Mobile PCR

5. Penegakaan disiplin protokol kesehatan di masyarakat oleh satgas penegkan hukum
6. Sosialisasi protokol kesehatan kepada instusi perguruan tinggi dan pengelola pondok pesantren
7. Rujukan pasien dari rumah domisili ke RS oleh PSC 119

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak di bidang kesehatan namun juga berpengaruh pada sektor lainnya. Secara umum sangat dirasakan bagi masyarakat menengah ke bawah. Adanya beberapa kebijakan untuk mencegah penularan wabah virus corona, antara lain penerapan *social distancing* dan pengaturan jadwal kerja dari rumah (*work from home*), mengakibatkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pegawai di perusahaan/pabrik, UMKM dan pedagang kaki lima tidak bisa berjualan dengan normal, jasa ojek *online* tidak bisa beroperasi seperti biasa sebab orderan yang menurun. Kondisi ini menyebabkan perekonomian melemah.

Dampak pandemi Covid-19 terkadap makro ekonomi Kabupaten Bantul tahun 2020 menurut BPS adalah pertumbuhan PDRB ADHK sebesar -1,66, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK sebesar -2,76, persentase penduduk miskin sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 4,06

Pengaruh ekonomi di Kabupaten Bantul ditunjukan dengan adanya trend menurun pada sektor:belanja, industry, pariwisata dan keuangan.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap perusahaan di Kabupaten Bantul, sebanyak 42% perusahaan mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %, 26-50% perusahaan mengalami penurunan pendapatan 32 %, 25 % perusahaan mengalami penurunan pendapatan 22%. dan sebanyak 43 % mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UKM di Kabupaten Bantul, sebanyak 43 % UKM mengalami penurunan pendapatan antara 51-100 %, 32 %UKM mengalami penurunan pendapatan antara 26-50%, 21% UKM mengalami penurunan pendapatan hingga 25 % dan UKM yang pendapatannya naik sebesar 4%.

Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah:

1. Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat
2. Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Tabel 2 65 Rekapitulasi Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Tahun 2020

| No | Nama Bantuan Sosial | Jumlah (KK) | Sumber Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Sosial (BST) | 17.328 | Kementerian Sosial RI |
| 2 | Sembako (BPNT) | 106.419 | Kementerian Sosial RI |
| 3 | Top Up DIY | 36.858 | APBD DIY |
| 4 | BLT APBD | 5.340 | APBD Bantul |
| 5 | BLT DD | 17.886 | APBDES |

Sumber : Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data dari penerima bantuan sosial merupakan data sasaran yang sudah melewati proses Musyawarah Kalurahan (Muskal). Untuk pendampingan dan penyaluran Bansos dilakasanakan oleh semua lini dari tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan. Pendampingan dan distribusi dilaksanakan oleh pendamping TKPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa/Kalurahan

### 2.3.1.5.3. Sub Urusan Kebakaran

Penanganan kebakaran, mengacu Permendagri No 114 Tahun 2018 yaitu SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, berupa layanan respon cepat *(Response Time)* penanggulangan kejadian kebakaran; layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK.

Tabel 2 66 Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap. | 39 | 93 | 175 | 203 | 114 |
| 2 | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK | 39 | 93 | 175 | 193 | 114 |
| 3 | Jumlah total terjadi kebakaran | 48 | 111 | 208 | 227 | 130 |
| 4 | Jumlah kebakaran di luar jangkauan WMK | 9 | 18 | 34 | 34 | 16 |
| 5 | Tingkat waktu tanggap | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Pada tahun 2020 luas WMK adalah 176,62 Ha, di tahun 2019 adalah 353,35 Ha. Sementara jumlah luas potensi kebakaran tercatat sebesar 506,85 Ha. Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter yang dimiliki pada Tahun 2020 sebanyak 8 unit. Mengingat luasnya WMK dan potensi terjadinya musibah kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul ini, pada Tahun 2020 sudah terdapat 7 pos pemadam yaitu pos induk BPBD, pos di Kapanewon Kasihan, Banguntapan dan Imogiri, Piyungan, Pundong dan Sedayu.

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Gambar 2 46 Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul Tahun 2021

Pencapaian indikator kinerja utama Kebakaran Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 67 Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit (%) | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja BPBD, Bappeda 2021

### 2.3.1.6. Sosial

**a. Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi)**

Sarana sosial yang dimiliki Kabupaten Bantul adalah panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Jumlah sarana sosial sampai tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 68 Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 27 |
| 2 | 2017 | 26 |
| 3 | 2018 | 26 |
| 4 | 2019 | 43 |
| 5 | 2020 | 52 |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

**b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial**

PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kondisi tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dari kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. PMKS merupakan permasalahan sosial yang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan dunia swasta.

Tabel 2 69 Jenis PMKS di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

| Jenis PMKS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Anak Balita Terlantar | n/a | 110 | 74 | 65 | 34 |
| Anak Terlantar | n/a | 2094 | 1862 | 1731 | 1475 |
| Anak yang Berhadapan dengan Hukum | n/a | 63 | 87 | 124 | 121 |
| Anak Jalanan | n/a | 56 | 14 | 12 | 5 |
| Korban Tindak Kekerasan | n/a | 163 | 210 | 229 | 231 |
| Lanjut Usia Terlantar | n/a | 9278 | 8971 | 8085 | 7684 |
| Penyandang Cacat | n/a | 5900 | 6324 | 6137 | 6535 |
| Tuna Susila | n/a | 83 | 71 | 46 | 24 |
| Pengemis | n/a | 25 | 25 | 22 | 25 |

| Jenis PMKS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Gelandangan | n/a | 29 | 38 | 35 | 12 |
| Korban Penyalahgunaan Napza | n/a | 101 | 100 | 97 | 21 |
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | n/a | 54 | 69 | 57 | 30 |
| Wanita Rawan Sosial Ekonomi | n/a | 2771 | 3068 | 2991 | 2865 |
| Orang dengan HIV/AIDS | n/a | n/a | 184 | 127 | 103 |
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | n/a | 1185 | 1329 | 1319 | 1228 |
| Keluarga Fakir Miskin | n/a | 57.210 | 57.022 | 52.509 | 50.609 |
| Korban Trafficking | n/a | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Korban Bencana Sosial | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 |
| Korban Bencana Alam | n/a | n/a | 61 | 21 | 405 |
| Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan | n/a | 107 | 155 | 151 | 47 |
| Anak dengan Kedisabilitasan | n/a | 625 | 446 | 450 | 353 |
| Anak dengan Korban Tindak Kekerasan | n/a | 54 | 81 | 115 | 114 |
| Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | n/a | 54 | 81 | 115 | 114 |
| Pemulung | n/a | 153 | 156 | 154 | 66 |
| Korban Minoritas | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | n/a | 80116 | 80430 | 74593 | 72101 |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

Data tabel menunjukkan jenis PMKS terbesar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dan anak terlantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui terdapat 26 jenis PMKS. Namun demikian di Kabupaten Bantul hanya terdapat 25 jenis PMKS karena tidak adanya jenis PMKS Komunitas Adat Terpencil.

Upaya penanganan yang dilakukan terhadap PMKS berupa pelayanan rehabilitasi antara lain :

a. meningkatkan mentalitas anak yatim,
b. meningkatkan keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial,
c. penyelenggaraan penanganan jenazah terlantar,
d. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak,
e. mengurangi permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan jamkesus dengan bekerjasama dengan Bapeljamkesus DIY,
f. pemberian fasilitas konsumsi (permakanan) ke 19 panti,
g. perawatan dan permakaman jenazah terlantar, dan
h. sosialisasi peduli PMKS

Selain itu dilakukan razia anak gelandangan dan pengemis dan psikotik lainnya dengan data sebagai berikut.

Tabel 2 70 Daftar PMKS Terjaring Razia di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Jenis PMKS | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Anak Jalanan | 12 orang |
| 2 | Gelandangan/Pengemis | 57 orang |
| 3 | Psikotik | - orang |
| **Total** | | **69 orang** |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021

### c. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan yang ada membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut

ditangani dengan baik. SLRT merupakan sistem yang ada di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat Kalurahan terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). SLRT dan Puskessos diharapkan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat mewujudkan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk memperoleh layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2018 perkembangan SLRT masih berupa embrio dengan *pilot project* dua puskesos, 21 puskesos penumbuhan, 75 fasilitator dan 34 supervisor. Tahun 2019 untuk mendukung pengembangan SLRT dan Puskesos telah disusun Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019, selain itu 75 Kalurahan di Kabupaten Bantul sudah memiliki SK kelembagaan Puskesos. Tahun 2020 Puskesos mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan berinovasi serta berperan aktif dalam penanggulangan wabah Covid-19 antara lain Ambulance standby, CSR puskesos, Kerjasama baznas, lazizmu, dan lain lain, Layanan antar SEP, Gojek puskesos, Registrasi KIS, KIP. Puskesos juga menjadi mitra penting Kalurahan dalam menanggulangi Covid-19.

### d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang sosial Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 71 Indikator Kinerja Utama Bidang sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penanganan NAPZA | 4 | 5 | NA | NA | NA |
| Persentase PMKS | 13,5 | 13,25 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

### 2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

**a. Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bantul cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 67,84 |
| 2 | 2017 | 72,21 |
| 3 | 2018 | 73,87 |
| 4 | 2019 | 73,18 |
| 5 | 2020 | 74,45 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

**b. Pencari Kerja yang Ditempatkan**

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya pada dinas kabupaten/kota. Capaian besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2016-2020 di Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 73 Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pembilang**: Pencari kerja yang ditempatkan | 2.107 | 2.650 | 3.230 | 3.329 | 3.305 |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Penyebut**: Pencari kerja yang terdaftar | 2.797 | 4.188 | 3.772 | 3.828 | 4.816 |
| Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan | 75,3% | 63,27% | 85,63% | 86,96% | 86,62% |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 86,62% atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 86,96%.

### c. Perlindungan Tenaga Kerja

Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bantul, dilakukan melalui program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta program peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan tenaga kerja adalah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (kepesertaan BPJS ketenagakerjaan) dan besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial. Capaian besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek tahun 2016-2020 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2 74 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pembilang**: Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek | 25.325 | 23.753 | 26.664 | 28.666 | 26.664 |
| **Penyebut**: Jumlah pekerja/buruh | 40.484 | 42.842 | 48.908 | 49.036 | 44.263 |
| Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek | 62,00% | 55,44% | 54,73% | 58,61% | 60,24% |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Besaran pekerja/buruh di Kabupaten Bantul yang menjadi peserta Jamsostek/kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2020 mencapai 60,24%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan

tahun 2019. Besaran penyelesaian sengketa hubungan industrial tahun 2016-2020 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 75 Besaran Sengketa Hubungan Industrial
yang Terselesaikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Besaran sengketa yang terselesaikan | 97% | 97% | 95% | 94% | 100% |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.

Kasus yang terselesaikan tahun 2020 mencapai 100% dari jumlah kasus yang ada, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

**d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Tenaga Kerja Bantul tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 76 Indikator Kinerja Utama Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka pengangguran(%) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,06 | 4,06 |
| Upah Minimum Kabupaten(Rp.) | 1.297.700 | 1.404.760 | 1.404.760 | 1.649.800 | 1.842.460 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

**2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah ini diwakili dengan persentase Pegawai Negeri Sipil perempuan yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

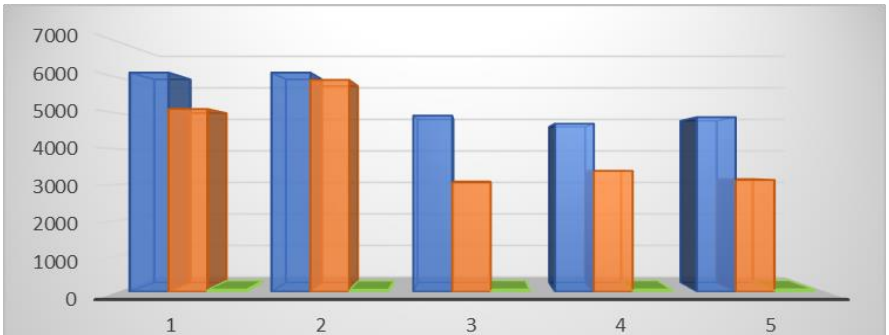


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNS Perempuan | 6131 | 6131 | 4926 | 4701 | 4883 |
| PNS Laki-Laki | 5113 | 5928 | 3058 | 3380 | 3128 |
| % PNS Perempuan | 54.53 | 50.84 | 57.39 | 58.17 | 60.95 |

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Gambar 2 47 Persentase Partisipasi PNS Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

Berdasar data pilah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul diketahui tingkat partisipasi dan pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 77 Persentase PNS Perempuan yang Menduduki Jabatan Eselon Di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III | 37 | 37 | 43 | 46 | 37 |
| 3 | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV | 223 | 223 | 231 | 250 | 277 |
| 4 | Jumlah Pekerja perempuan yang menempati jabatan eselon II -IV | 273 | 263 | 278 | 300 | 317 |
| 5 | Jumlah PNS perempuan | 6.131 | 5.928 | 4.701 | 4883 | 3592 |
| 6 | Persentase PNS perempuan yang menempati jabatan eselon II – IV (4/5) | 4.45 | 4.44 | 5,91 | 6,14 | 8,83 |

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Tabel di atas menunjukkan dari jumlah PNS perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2019, sejumlah 300 pegawai menduduki jabatan eselon II-IV.

### b. Partisipasi Perempuan di Masyarakat

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah untuk perempuan sendiri untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam melakukan transformasi gender.

Tabel 2 78 Partisipasi Perempuan di Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktivis P2WKSS | 300 | 300 | 300 | 360 |
| 2 | Pengurus harian Parpol | 75 | 76 | 76 | 120 |
| 3 | Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 4 | Lembaga Legislatif Daerah | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Pekerja Sektor Informal | 128.958 | 206.055 | 206.055 | 131.110 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

### c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan mengamanatkan bahwa anak dan perempuan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, seperti kekerasan fisik (*physical violence*), kekerasan psikis (*psycological violence*),

pencabulan (*molestation*), perkosaan (*rape*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), eksploitasi (*sexual exploitation*), perdagangan orang (*trafficking)*, dan penelantaran (*neglect*).

Kasus KDRT dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2 79 Jumlah KDRT di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Persentase Kasus Tertangani |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 186 Kasus | 100% |
| 2 | 2018 | 210 Kasus | 100% |
| 3 | 2019 | 229 Kasus | 100% |
| 4 | 2020 | 224 Kasus | 100% |

Sumber : UPT PPA, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak 2021

Kasus KDRT di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

**d. Pernikahan Dini**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi.

Rumah tangga pasangan pernikahan dini dapat mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan berlanjut pada generasi yang akan datang. Persentase pernikahan dini di Kabupaten Bantul terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2 80 Persentase Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Jumlah pernikahan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Usia dini | 95 | 83 | 81 | 74 | 56 |
| 2 | Semua usia | 11.528 | 12.359 | 12.604 | 12.927 | 6.232 |
| | Persentase pernikahan dini | 0,82 | 0,67 | 0,64 | 0,57 | 0,90 |

Sumber: Kementrian Agama Bantul, 2021

### e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Angka tingkat partispasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan persentase angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul.

Tabel 2 81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Angkatan Kerja | | Total | Prosentase Angkatan Kerja Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1 | 2016 | Na* | Na* | Na* | Na* |
| 2 | 2017 | 313.139 | 25.839 | 558.978 | 46,22% |
| 3 | 2018 | 323.287 | 254.243 | 577.530 | 44,02% |
| 4 | 2019 | 319.784 | 259.445 | 579.229 | 44,79% |
| 5 | 2020 | 339.974 | 269.969 | 609.943 | 44,26% |

Sumber: Sakernas, BPS, 2021
Keterangan : *tidak terdapat data dikarenakan tidak diakukan Survei Angkatan Kerja Nasional

Jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bantul menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, akan tetapi jika dilihat dari tingkat persentasenya maka dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari 46,22% di tahun 2017 menjadi 44,02%, 44,79% dan terakhir 44,26% di tahun 2020.

### f. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG sama dengan IPM.

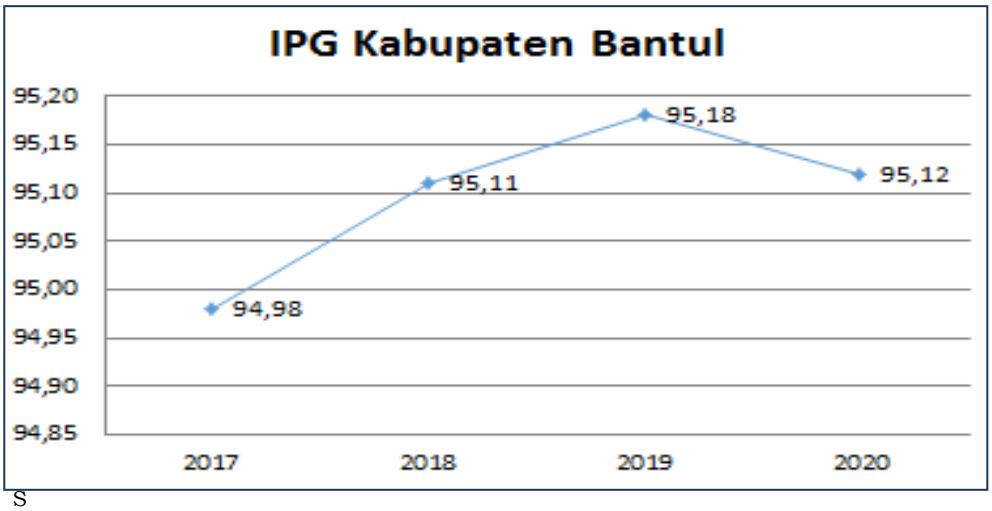


Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Gambar 2 48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Pada kurun waktu 2017-2019 capaian IPG Kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,06 dibandingkan tahun sebelumnya.

### g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

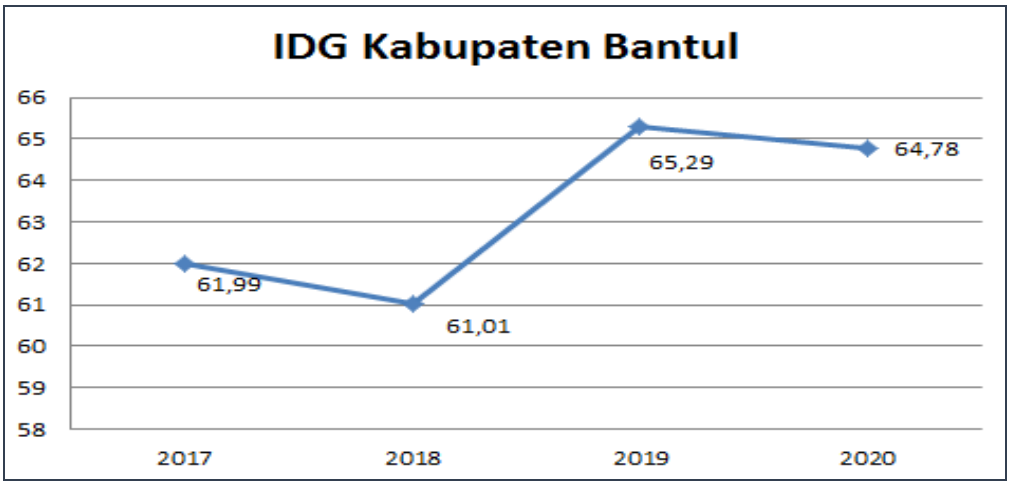


Sumber : Badan Pusat Statistik DIY 2021

Gambar 2 49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

Pada tahun 2019 Kabupaten Bantul mengalami peningkatan capaian IDG yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 61,01 menjadi 65,29, sementara untuk tahun 2020 capaian IDG Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,51 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

### h. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana.

Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh kapanewon di kabupaten tersebut layak anak, dan kapanewon dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kalurahannya layak anak, begitu pula desa/kalurahan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak.

Ada lima kategori dalam KLA yaitu:

1. Pratama (500-600)
2. Madya (600-700)
3. Nindya (700-800)
4. Utama (800-900)

5. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (>900).

Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul masih termasuk dalam kategori 'Pratama', dan tahun 2018-2020 masuk dalam kategori 'Madya'.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya KLA, Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021 dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas KLA. Selain adanya dukungan regulasi, di kabupaten Bantul juga sudah terbentuk 11 Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana), 13 Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana), dan 11 Forum Anak tingkat kecamatan/kapanewon.

**i. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 82 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak | 0,38 | 0,38 | 0,73 | 0,73 | 0,18 |

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, 2021.

### 2.3.1.2.3. Ketahanan Pangan

**a. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita**

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber

yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2019 berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr.

Tabel 2 83 Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Energi (Kal/Kap/Hr) | Tingkat Ketersediaan Energi (%) | Protein (Gram/Kap/hr) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nabati | Hewani | Total |
| 1 | 2016 | 3.072 | 142.88 | 54,61 | 23,20 | 77,80 |
| 2 | 2017 | 3.079 | 143.21 | 56,93 | 18,80 | 75,73 |
| 3 | 2018 | 2.993 | 139.21 | 66,73 | 11,63 | 78,36 |
| 4 | 2019 | 3.123 | 130.13 | 75,10 | 14,86 | 89,95 |
| 5 | 2020 | 3.092 | 100 | 71,28 | 11,62 | 82,90 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ketersediaan energi dan protein di atas rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 ketersediaan energi mencapai 3.092 kal/kap/hr, atau 28,83% di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Ketersediaan protein mencapai 82,90 gr/kap/hr atau 45,43% di atas rata-rata kecukupan protein penduduk Indonesia.

### b. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu, sehingga

diharapkan tidak terjadi lonjakan harga pangan pokok. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan dan mengelola cadangan pangan pemerintah Kabupaten berdasar Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini sesuai dengan UU no. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana pemerintah bertanggungjawab dalam peningkatan ketahanan pangan, termasuk penyelenggaraan cadangan pangan.

Pada tahun 2017 cadangan pangan Kabupaten Bantul sebesar 3 ton lebih besar dibanding tahun 2016 (267 kg). Cadangan pangan pada tahun 2017 terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 5,036 ton beras dan cadangan pangan masyarakat sebesar 147,11 ton yang disimpan dalam 20 lumbung pangan dan 17 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Cadangan pangan pemerintah daerah dikelola oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Koperasi Beras Sehat Makmur Wijirejo Pandak. Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan 2020 adalah 5,036 ton beras.

Mulai tahun 2018 dilaksanakan analisis cadangan pangan rumah tangga, dengan tujuan untuk mengetahui situasi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Tahun 2018 dilaksanakan di 6 (enam) kapanewon, didapat hasil bahwa stok cadangan pangan rumah tangga di Kapanewon Bambanglipuro: 12,20%, Bantul:

17,29%, Kasihan: 6,32%, Imogiri: 5,08%, Srandakan: 9,34%, dan Pleret: 5,44%. Rata-rata cadangan pangan rumah tangga di 6 kapanewon tersebut 9,28%.

Tahun 2019 lanjutkan analisis cadangan pangan rumah tangga di 6 (enam) kapanewon, didapat hasil bahwa stok cadangan pangan rumah tangga di Kapanewon Pajangan: 8,12%, Kapanewon Piyungan: 12,04%, Kapanewon Kretek: 11,46%, Kapanewon Pundong: 11,07%, Kapanewon Dlingo: 4,82% dan Kapanewon Banguntapan: 2,93%. Rata - rata cadangan pangan rumah tangga di 6 Kapanewon tersebut adalah 8,41%.

Pada tahun 2020 cadangan pangan pemerintah masih tetap yaiti 5,036 ton masih jauh dari target yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian yaitu 283 ton.

### c. Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam.

Tabel 2 84 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Kelompok Pangan | Skor Pola PanganHarapan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Padi-padian | 25,0 | 21,7 | 25.0 | 25.0 | 25,0 |
| 2 | Umbi-umbian | 1,5 | 1,7 | 1.4 | 1.3 | 2,0 |
| 3 | Pangan hewani | 24,0 | 24 | 24.0 | 24.0 | 22,4 |
| 4 | Minyak dan lemak | 2,8 | 3,1 | 1.5 | 1.8 | 1,2 |
| 5 | Buah/biji berlemak | 0,7 | 0,9 | 0.6 | 1,0 | 0,5 |
| 6 | Kacang-kacangan | 10,0 | 10,0 | 10.0 | 10.0 | 10,0 |
| 7 | Gula | 1,1 | 1,4 | 0.4 | 0.6 | 0,3 |

| No. | Kelompok Pangan | Skor Pola PanganHarapan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8 | Sayur dan buah | 27,5 | 28,0 | 28.8 | 30.0 | 30,0 |
| 9 | Lain-lain | 0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Total | 92,6 | 90,8 | 91,7 | 93,7 | 91.4 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Tahun 2020 Skor PPH menurun menjadi 91,4 dibandingkan tahun 2019. Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) beragam diantara 9 kelompok pangan utama. Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten bantul tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut :

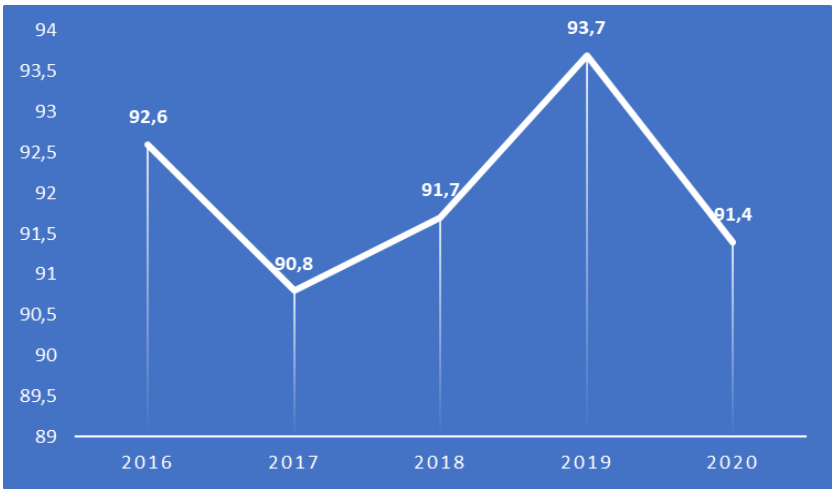


Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul, 2021

Gambar 2 50 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada 2017, namun meningkat di tahun 2018 dan 2019 kemudian menurun kembali pada 2020.

### d. Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan

Pengukuran Kerentanan Pangan dan Kerawanan Pangan adalah sbagai berikut :

1. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

   Penyusunan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi berdasarkan pada 3 indikator yaitu:

   1) Ketersediaan Pangan dipengaruhi oleh Produksi, Jumlah Penduduk, dan Cadangan Pangan;
   2) Akses Pangan diperoleh dari jumlah keluarga prasejahtera;
   3) Pemanfaatan Pangan diperoleh dari data kekurangan energi protein (KEP).

   Berdasarkan Peta Desa Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut :

   1) Tidak ada Kalurahan yang masuk kategori rawan pangan (Merah);
   2) Hanya ada 1 Kalurahan yang masuk kategori Waspada Pangan (Kuning) yaitu Kalurahan Wonolelo.

2. Analisis *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA)/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

   Penyusunan Peta FSVA disusun berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

   a) Aspek Ketersediaan Pangan
      1) Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah Kalurahan;
      2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga.
   b) Aspek Akses terhadap Pangan
      1) Rasio jumlah penduduk dengan kesejahteraan rendah pada desil I dibanding dengan jumlah penduduk kalurahan;
      2) Kalurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air dan udara.
   c) Aspek Pemanfaatan Pangan
      1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kalurahan;

2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kalurahan.

Berdasarkan Peta FSVA Kabupaten Bantul tahun 2020 terdapat 18 Desa Rentan Pangan, sebagai berikut :

1) Desa Rentan Pangan Prioritas 1, ada 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Selopamioro, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Triwidadi.
2) Desa Rentan Pangan Prioritas 2, ada 1 Kalurahan, yaitu : Kalurahan Dlingo
3) Desa Rentan Pangan Prioritas 3, ada 12 Kalurahan, yaitu : Kalurahan Seloharjo, Triharjo, Sriharjo, Girirejo, Wukirsari, Mangunan, Temuwuh, Bawuran, Wonolelo, Bangunjiwo, Guwosari dan Argodadi.

**e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 85 Indikator Kinerja Utama Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) | 3.079 | 2.993 | 3.121 | 3.123 | 3.092 |
| Ketersediaan Protein (kkal/kapita/hari) | 75 | 78,36 | 87,23 | 89,95 | 82.90 |
| Skor Pola Pangan Harapan | 92,60 | 90,80 | 91,7 | 93,7 | 91,4 |
| Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani | 27 | 29 | 69 | 16 | 19 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

.

### 2.3.1.2.4. Pertanahan

#### a. Luas Lahan Bersertifikat

Pada tahun 2020 dilakukan pensertifikatan pada lima bidang tanah pemerintah. Data status tanah di Kabupaten Bantul tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 86 Luas Wilayah Kerja dan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Uraian | Jumlah | | Prosentase (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bidang | Luas (m²) | Bidang | Luas (m²) |
| A | Kabupaten Bantul | 634.314 | 506.850.000 | 100 | 100 |
| B | Tanah terdaftar* | | | | |
| | - Hak milik (HM) | 637.682 | 353.647.046 | 96,099 | 69,773 |
| | - Hak Guna Bangunan (HGB) | 19.889 | 7.204.828 | 3,997 | 1,421 |
| | - Hak Pakai (HP) | 3.461 | 9.394.135 | 0,54 | 1,85 |
| | - Wakaf | 1.932 | 580.979 | 0,291 | 0,115 |
| | - Hak lainnya (HGU, HPL) | 44 | 806.761 | 0,006 | 0,159 |
| | Jumlah | 663.567 | 373.572.020 | | 73.704 |
| C | Tanah belum terdaftar | | 133.277.980 | | 26,29 |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Bantul, 2021
Keterangan : *Sudah bersertifikat

#### b. Konflik Pertanahan

Konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga terjadi di 34 Kalurahan selama tahun 2017 – 2020, sebagai berikut :

Tabel 2 87 Permasalahan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020

| No | Lokasi | Jumlah | Masalah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalurahan Selopamioro | 2 | Tukar guling tanah | 2017 |
| 2 | Kalurahan Argorejo | 1 | Tukar guling tanah | 2017 |
| 3 | Kalurahan Poncosari | 1 | Tukar guling tanah | 2017 |
| 4 | Kalurahan Sriharjo | 1 | Tukar guling tanah | 2017 |
| 5 | Kalurahan Sendangsari | 1 | Warisan | 2017 |
| 6 | Kalurahan Bangunjiwo | 1 | Tukar guling tanah | 2018 |
| 7 | Kalurahan Selopamioro | 1 | Tukar guling tanah | 2018 |
| 8 | Kalurahan Sitimulyo | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 9 | Kalurahan Bangunharjo | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 10 | Kalurahan Triwidadi | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 11 | Kalurahan Argomulyo | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 12 | Kalurahan Tamantirto | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 13 | Kalurahan Srimulyo | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 14 | Kalurahan Bantul | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 15 | Kalurahan Sumberagung | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 16 | Kalurahan Sriharjo | 5 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 17 | Kalurahan Tirtonirmolo | 1 | Tukar guling tanah | 2019 |
| 18 | Kalurahan Murtigading | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 19 | Kalurahan Sumberagung | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 20 | Kalurahan Canden | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 21 | Kalurahan Tirtohargo | 2 | Tukar guling tanah | 2020 |

| No | Lokasi | Jumlah | Masalah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Kalurahan Poncosari | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 23 | Kalurahan Terong | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 24 | Kalurahan Pleret | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 25 | Kalurahan Mangunan | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 26 | Kalurahan Srigading | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 27 | Kalurahan Tamantirto | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 28 | Kalurahan Patalan | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 29 | Kalurahan Segoroyoso | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 30 | Kalurahan Tirtonirmolo | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 31 | Kalurahan Argomulyo | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 32 | Kalurahan Temuwuh | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 33 | Kalurahan Bawuran | 1 | Tukar guling tanah | 2020 |
| 34 | Kalurahan Timbulharjo | 1 | Penyalahgunaan tanah SG | 2020 |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Tabel di atas menunjukkan antara tahun 2017-2020 terdapat konflik permasalahan tanah yang terjadi pada warga di 34 Kalurahan di Kabupaten Bantul, dan sebagian besar mengenai tukar guling tanah. Penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan adalah melalui fasilisasi dan mediasai pihak-pihak yang bermasalah khususnya untuk tanah desa dan SG. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut sertifikasi di BPN.

### c. Penyelesaian Izin Lokasi

Perizinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), perizinan klarifikasi/perizinan lokasi, perizinan mendirikan bangunan, perizinan gangguan, dan perizinan teknis operasional. Perizinan lokasi di peruntukan untuk izin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar. Untuk tahun 2020 jumlah permohonan izin lokasi sebanyak 10 izin dengan jumlah izin lokasi yang diberikan sebanyak 8 izin lokasi.

Tabel 2 88 Persentase Jumlah Izin Lokasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah Permohonan Izin Lokasi | Jumlah Izin Lokasi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 5 | 83,33 |
| 2017 | 2 | 2 | 100,00 |
| 2018 | 6 | 4 | 66,66 |

| Tahun | Jumlah Permohonan Izin Lokasi | Jumlah Izin Lokasi | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 5 | 100,00 |
| 2020 | 10 | 8 | 80,00 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

### d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pertanahan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 89 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Sertifikasi Tanah | NA | 100 | 93,16 | 99,37 | 100 |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021.
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

## 2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

### a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, di mana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota dan Provinsi di Indonesia.

IKLH terdiri dari 3 indikator : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKUd) dengan bobot 30%, parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40%, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan.

Tabel 2 90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

| No | Indeks Kualitas | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | 34 | 24 | 34,67 | 39,63 | 51,80 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 87,76 | 90,9 | 85,66 | 90,9 | 85,18 |
| 3 | Indeks Tutupan Lahan (ITL) | 27,5 | 27,51 | 43,15 | 53,09 | 54,82 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | 47,53 | 45,50 | 53,36 | 60,40 | 63,02 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan capaian IKA, IKU dan ITL di atas memberi dampak positif terhadap kinerja kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bantul yang tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,2 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), meningkat lebih baik di atas capaian tahun 2019 sebesar 60,4. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian adalah meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan, namun pada capaian kualitas air masih belum optimal. IKLH Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun menunjukkan trend membaik. Meskipun capaian IKLH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun capaian tersebut masih berada pada ambang batas klasifikasi cukup baik dengan klasifikasi kurang baik sehingga harus dijaga agar capaian IKLH tidak semakin buruk.

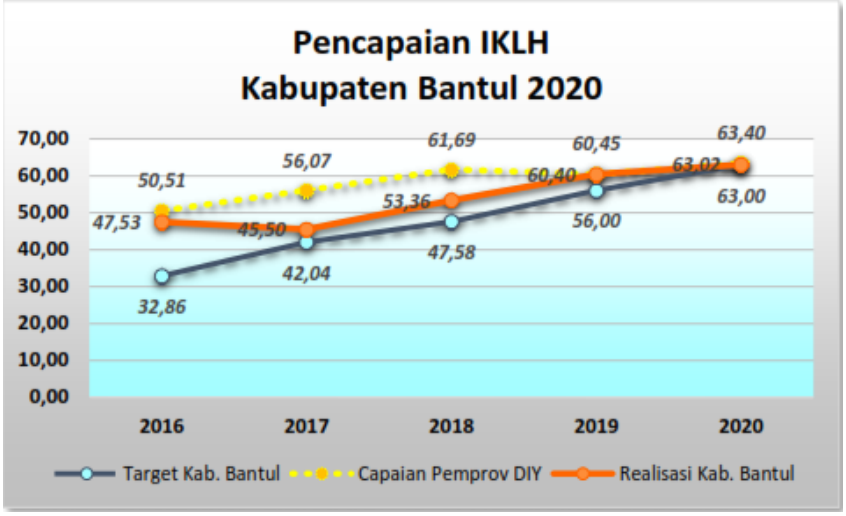


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 51 Tren Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Keterangan :
Sangat baik (IKLH>80), Baik (70<IKLH≤80), Cukup Baik (60<IKLH≤70), Kurang Baik (50<IKLH≤60), Waspada (40<IKLH≤50)

**b. Indeks Kualitas Air (IKA)**

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dan Peraturan Gubenur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong di 15 titik (mewakili hulu, tengah, hilir) pada 2 periode (penghujan dan kemarau).

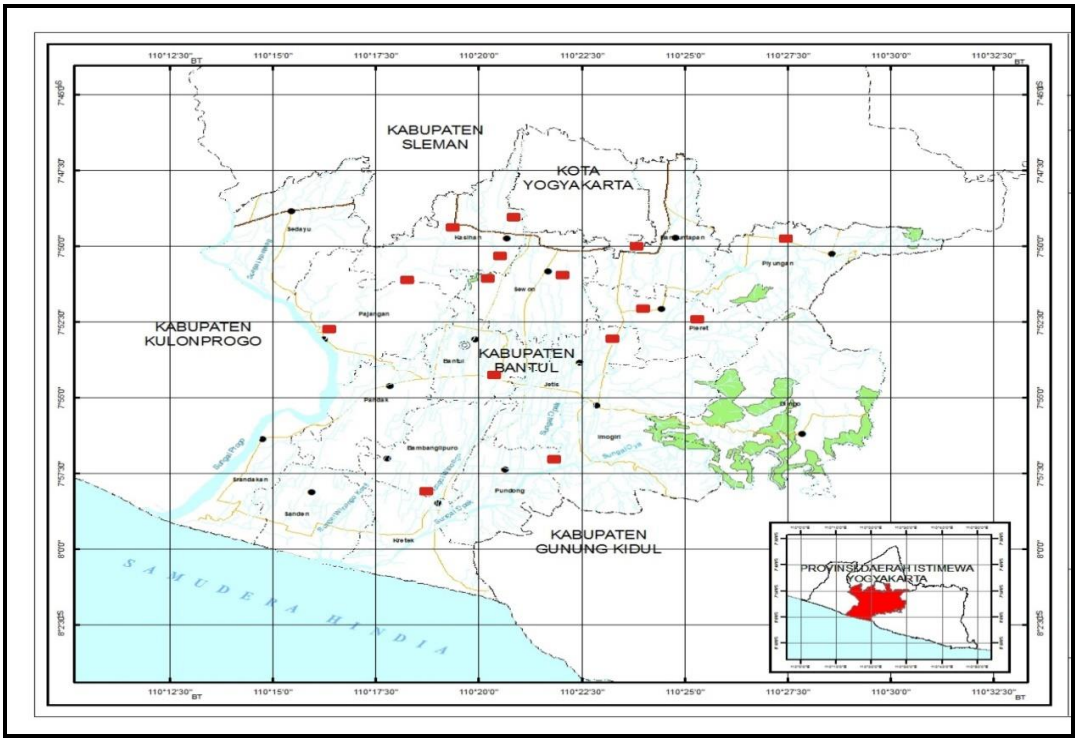


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 52 Peta lokasi pengambilan sampel air sungai

Kabupaten Bantul berdasarkan parameter kimia anorganik, mikrobiologi, dan kimia organik, selanjutnya dianalisa untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Tabel 2 91 Hasil Kualitas Air Sungai di Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Nama Sungai | Nilai Indeks Pencemaran Air Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Winongo | 32,500 | 33,334 | 37,500 | 43,333 | 53,330 |
| Code | 35,832 | 33,334 | 41,666 | 42,500 | 50,830 |
| Gajahwong | 33,334 | 31,666 | 38,334 | 30,000 | 43,330 |
| Bedog | 27,334 | 31,334 | 43,332 | 40,667 | 48,180 |
| Oyo | 28,334 | 28,334 | 33,334 | 41,667 | 37,500 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Hasil capaian IKA Kabupaten Tahun 2020 sebesar 51,8 meningkat dibandingkan pada tahun 2019. IKA dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan.

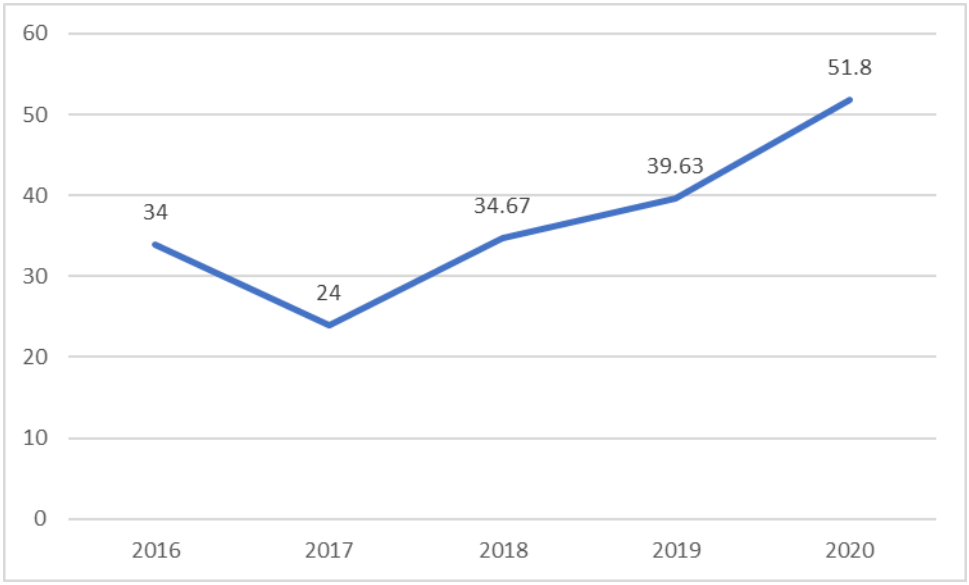


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 53 Grafik Indeks Kualitas Air Sungai di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

### c. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pencemaran udara. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas udara ambient dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Pemantauan udara ambient dilakukan di 4 (empat) titik pantau/lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul, pada lokasi-lokasi yang mewakili wilayah padat kendaraan bermotor (transportasi), wilayah industri/argoindustri, wilayah pemukiman, dan wilayah perkantoran/ komersial.

Tabel 2 92 Hasil Analisa Laboratorium Udara Ambient Tahun 2020

| Parameter | Rerata (µg/Nm3) | EU | IEU |
|---|---|---|---|
| NO2 | 13,97 | 40,00 | 0,34925 |
| SO2 | 7,68 | 20,00 | 0,384 |
| Rerata | | | 0,3666 |
| Indeks Kualitas Udara | | | 85,18 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul telah melebihi target kinerja pada Tahun 2020 sebesar 80. Indeks kualitas udara Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 54 Grafik Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul

**d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung berdasarkan luas tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten. Tutupan lahan/vegetasi yang dimaksud adalah luasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan lindung bervegetasi dan lain-lain.

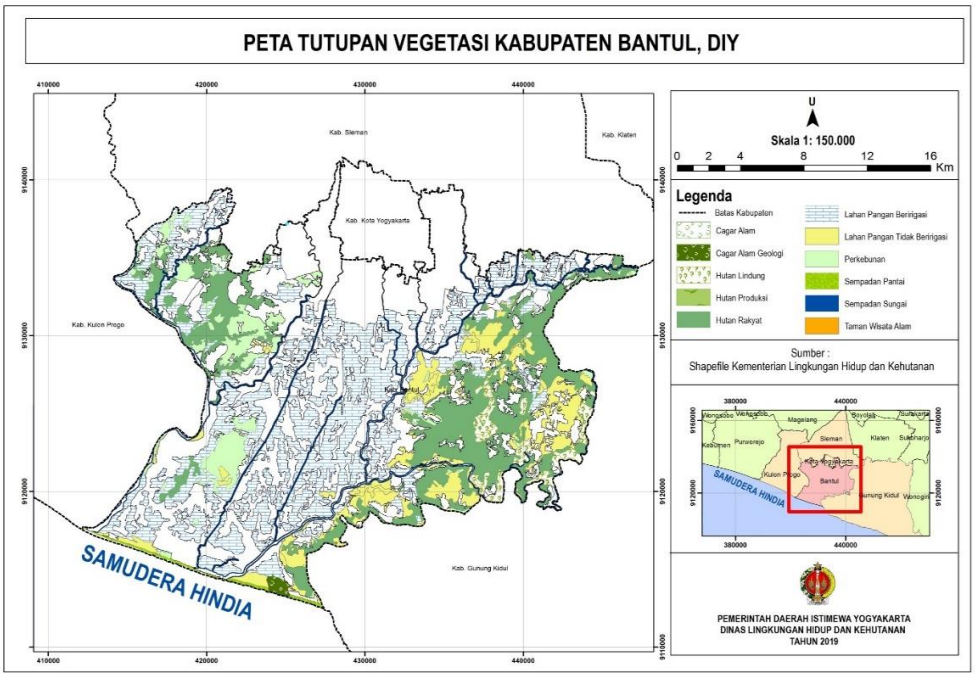


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 55 Peta Tutupan Vegetasi Kabupaten Bantul

Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Tabel 2 93 Penambahan Tutupan Lahan di Kabupaten Bantul 2020

| No. | Jenis Tutupan Vegetasi | Luasan (km²) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Penghijauan lingkungan | 0,462 | 0,0125 | 0,12885 | 12 | 9,53125 |
| 2 | Mangrove | 0,02 | 0,0125 | 0,012 | 0,012 | 0,01 |
| 3 | Reklamasi bekas tambang | 0 | 0 | 0,0379 | 0,021 | 0,001 |
| 4 | Hutan rakyat | 0 | 0,0105 | 85,95 | 42,65 | 0 |
| 5 | RTH/TAMAN | 0 | 0,00101 | 0 | 0 | 0,0016 |
| | Total penambahan | 0,482 | 0,03651 | 86,12875 | 54,683 | 9,54385 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2020 ada penambahan tutupan lahan sebesar 9,54385 km², maka total luas tutupan lahan Kabupaten Bantul hingga tahun 2020 menjadi 178,60 km². Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebesar 54,82 atau naik sebesar 1,73 poin

dibandingkan dengan tahun 2019 dengan keseluruhan luas tutupan lahan Kabupaten Bantul mencapai 178,60 km2.

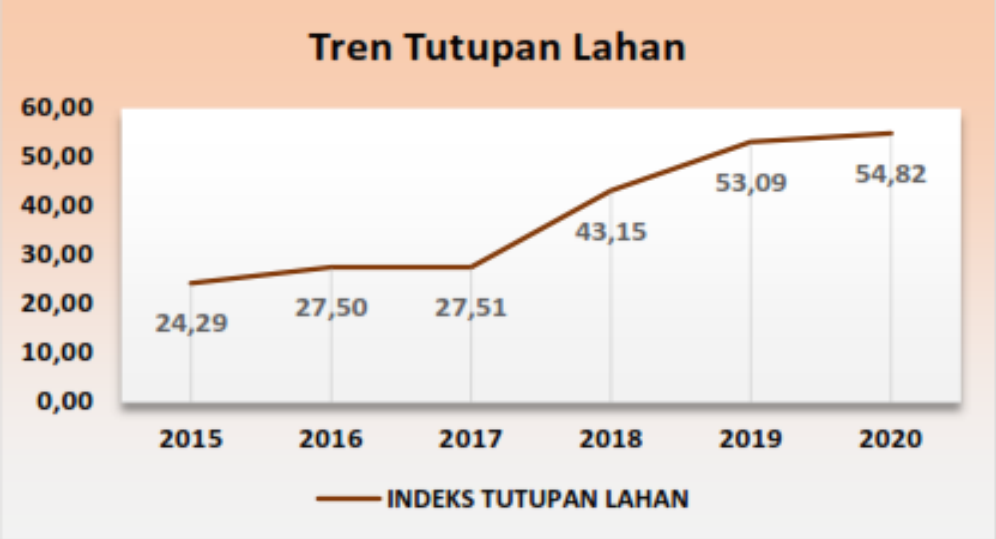


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Gambar 2 56 Grafik Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Bantul

Dari gambar di atas, secara keseluruhan dari tahun 2015 – 2020 terdapat kenaikan IKTL yang sangat signifikan pada tahun 2018 dibandingkan capaian pada tahun 2017 yang dipengaruhi oleh adanya penambahan komponen Hutan Rakyat yang sebelumnya tidak diperhitungkan, dengan luasan Hutan Rakyat tahun 2018 sebesar 8.595 Ha atau 85,95 km2.

**e. Izin Lingkungan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Linkungan Hidup**

**1) Izin Lingkungan**

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pemberian Izin Lingkungan Hidup mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Mulai tahun 2019 Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa ijin lingkungan hanya untuk kantor

pemerintah, sekolah, pasar dan tambang pasir. Sedangkan Izin untuk badan usaha maupun perorangan diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Bupati Bantul yaitu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Dokumen AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH merupakan persyaratan permohonan Izin Lingkungan. Berikut data Dokumen Lingkungan Hidup yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebagai syarat pengurusan Izin Lingkungan.

Tabel 2 94 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

| No | Tahun | Dokumen Lingkungan Hidup | | | Izin Lingkungan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DPLH | UKL-UPL | Jumlah | | |
| 1 | 2017 | 342 | 29 | 371 | 371 | Industri, klinik, SPBU, perumahan, bengkel, perdagangan, sekolah, hotel, galeri, kantor |
| 2 | 2018 | 95 | 33 | 128 | 128 | Perumahan, kantor, sekolah, rumah makan, SPBE, SPBU, pasar, klinik |
| 3 | 2019 | 1 | 66 | 67 | 67 | OSS= Hotel, perdagangan, perumahan, rumah sakit/klinik, SPBE, gereja |
| | | 54 | 17 | 71 | 71 | DLH = Kantor, Sekolah, Pasar, Tambang Pasir |
| 4 | 2020 | N/A | 62 | 62 | 62 | Kantor, gudang, pedagangan (toko, swalayan), sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah makan, tempat ibadah, permakaman, permukiman (kos dan perumahan), hotel/penginapan, industri (pakaian, kulit, logam, AMP, makanan, suku cadang, kerajinan, kayu, obat tradisional) |
| | | 10 | 14 | 24 | 24 | Kegiatan pemerintah (kantor, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan PAL, embung), bidang pertambangan dan migas (tambang pasir, SPBE, SPBU) |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan data di atas, Ijin Lingkungan yang diterbitkan tahun 2020 sejumlah 86 ijin, lebih rendah dari 2019 yaitu 138 ijin.

Terdapat 15 Usaha/kegiatan yang membuang limbah ke sungai yaitu PG Madukismo, PT ASA, PT Samitex, PT Dagsap Endura Eatore, PT Cahaya Mulia Persada, Ros In Hotel, Dafam Rohan Hotel, Balai Pialam, RS Paru Respira, RSUD Panembahan Senopati, RS Santa Elisabeth, RS Khusus Bedah, RSU PKU Muh Bantul, RS KIA Ummi Khasanah, RSPAU Harjolukito, RS UII Pandak, PT Pertamina.

Tingkat ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kegiatan pengawasan, sesuai pasal 496 PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular dan insidentil. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal hasil pengawasan tindak langsung menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup selanjutnya dilakukan pengawasan langsung

Tabel 2 95 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang diawasi

| No | Tahun | Dokumen Lingkungan Hidup | | | Izin Lingkungan | Yang Diawasi | Yang Taat | Yang Tdk Taat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DPLH | UKL-UPL | Jumlah | | | | | |
| 1 | 2017 | 342 | 29 | 371 | 371 | NA | NA | NA | Industri, klinik, SPBU, perumahan, bengkel, perdagangan, sekolah, hotel, galeri, kantor |
| 2 | 2018 | 95 | 33 | 128 | 128 | 11 | 0 | 11 | Perumahan, kantor, sekolah, |

| No | Tahun | Dokumen Lingkungan Hidup | | | Izin Lingkungan | Yang Diawasi | Yang Taat | Yang Tdk Taat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DPLH | UKL-UPL | Jumlah | | | | | |
| | | | | | | | | | rumah makan, SPBE, SPBU, pasar, klinik |
| 3 | 2019 | 1 | 66 | 67 | 67 | 24 | 13 | 11 | OSS= Hotel, perdagangan, perumahan, rumah sakit/klinik, SPBE, gereja |
| | | 54 | 17 | 71 | 71 | | | | DLH = Kantor, Sekolah, Pasar, Tambang Pasir |
| 4 | 2020 | N/A | 62 | 62 | 62 | 19 | 12 | 7 | Kantor, gudang, pedagangan (toko, swalayan), sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah makan, tempat ibadah, permakaman, permukiman (kos dan perumahan), hotel/penginapan, industri (pakaian, kulit, logam, AMP, makanan, suku cadang, kerajinan, kayu, obat tradisional) |
| | | 10 | 14 | 24 | 24 | | | | Kegiatan pemerintah (kantor, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jaringan PAL, embung), bidang pertambangan dan migas (tambang pasir, SPBE, SPBU) |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2018, dari 11 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung, hasil pengawasan menunjukkan semuanya belum memenuhi ketentuan izin lingkungan. Selanjutnya pada tahun 2019, dari 24 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung terdapat 13 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat.

Untuk tahun 2020, dari 19 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan langsung terdapat 12 penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat.

Tingkat penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan diharapkan setiap tahun semakin meningkat dan diharapkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah taat dapat mempertahankan pengelolaan lingkungannya. Pada tahun 2021, DLH Bantul melakukan inovasi terkait pengawasan tidak langsung melalui penelaahan data laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan mengirimkan hasil penelaahan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk dapat dipergunakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan perbaikan pengelolaan lingkungannya

**2) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup**

Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Bupati tersebut masih relevan dengan Permen LHK di atas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pokok aduan antara lain tentang gangguan kebisingan, pencemaran air, dan gangguan limbah cair. Setiap aduan yang masuk diverifikasi oleh DLH Kabupaten Bantul bekerjasama dengan instansi terkait. Verifikasi yang

dilakukan berupa peninjauan langsung ke lokasi kejadian, pengambilan dan analisa sampel jika dianggap perlu. Jika hasil analisa laboratorium menunjukkan adanya pencemaran yang ditunjukkan dengan telah terlampauinya baku mutu, maka DLH Kabupaten Bantul akan memberikan rekomendasi teknis terkait penanggulangan pencemaran yang terjadi. Sebagian besar kasus diselesaikan dengan cara mediasi antara pihak pelapor dan terlapor oleh DLH Kabupaten Bantul. Beberapa kasus setelah diverifikasi dan ditemukan terjadi pelanggaran peraturan daerah akan ditinjaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Bantul.

Tabel 2 96 Pokok Aduan Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

| No | Pokok Aduan | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangguan Kebisingan dan Pencemaran Udara | 10 | 11 | 17 |
| 2 | Pencemaran Air dan Pencemaran akibat Limbah Cair | 6 | 27 | 8 |
| | Total | 16 | 38 | 25 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat jumlah aduan meningkat tahun 2020 sejumlah 25 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 25 aduan, penurunan jumlah aduan disebabkan pengaruh adanya pandemi covid 19 berpengaruh pada penurunan jumlah kegiatan sehingga dampak lingkungan yang ditimbulkan berkurang. Semua aduan yang masuk sudah diselesaikan dengan baik.

### f. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas pengelolaan cara setempat, pengelolaan cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, sedangkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

Tabel 2 97 Pengelolaan Sampah Tahun 2017-2018

| Uraian | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Total sampah yang terkelola (a) | 441.000 | 486.784 |
| Volume timbulan sampah (b) | 715.400 | 726.543 |
| Volume Sampah yang tertangani (a/b)x100% | 72,42% | 72,50% |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

JAKSTRADA disahkan Desember 2018, pengelolaan sampah pada tahun 2017-2018 belum dihitung secara rinci. Pengelolaan sampah pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2 98 Pengelolaan Sampah Tahun 2019

| No | Uraian | m3/tahun |
|---|---|---|
| 1 | Volume timbulan sampah | 608.731.643 |
| 2 | Volume sampah yang terangkut ke TPS Piyungan | 82.380.960 |
| 3 | Volume sampah yang terolah ke TPS3R, Bank Sampah (Anorganik) | 36.523.899 |
| 4 | Volume sampah organic yang terkelola di pedesaan | 271.646.495 |
| 5 | Volume sampah organic yang terkelola di KPY | 61.634.079 |
| 6 | Total volume sampah tertangani | 452.185.433 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pengelolaan sampah pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2 99 Pengelolaan Sampah Tahun 2020

| No | Uraian | ton / th | m3/tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengurangan sampah | 83.069.71 | 324.841.87 |
| | Jumlah pembatasan timbulan sampah | 56.376,28 | 220.282.47 |
| | Jumlah sampah terdaur ulang | 26.693,43 | 104.559.40 |
| 2 | Penanganan sampah | 34.373.91 | 134.644,21 |
| | Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle) | 415,26 | 1.626.61 |
| | Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir | 33.958,65 | 133.017.60 |
| 3 | Jumlah sampah terkelola | 117.443,63 | 460.032.08 |
| 4 | Timbulan sampah | 192.020,7442 | 752.154,03 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2 100 Rasio Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah TPS (unit) | 231 | 245 | 275 | 334 | 350 |
| Jumlah Daya Tampung TPS (m3) | 1.386 | 1.470 | 1.650 | 2.668 | 3.088 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 968.632 | 927.181 | 939.718 | 945.441 | 954.706 |
| Rasio Daya Tampung TPS per 1000 penduduk (m3/1000 penduduk) | 1,43 | 1,59 | 1,76 | 2,82 | 3,23 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah TPS sebanyak 350 unit dengan rasio daya tampung TPS per 1000 penduduk adalah 3,253 m3. Masih sangat kecil namun ada peningkatan dibanding tahun 2019.

### g. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 101 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kualitas Air | 34,00 | 31,33 | 34,67 | 39,63 | 51,80 |
| Indeks Kualitas Udara | 87,76 | 82,31 | 85,66 | 90,90 | 85,25 |
| Indeks Tutupan Lahan | 27,50 | 27,50 | 43,15 | 53,09 | 54,82 |
| Volume sampah yang tertangani | 420.000$m^3$ | 441.000$m^3$ | 486.784$m^3$ | 452.185$m^3$ | 460.032$m^3$ |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

## 2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan standar pelayanan administrasi kependudukan tahun 2019 meliputi Pencatatan Biodata Penduduk, Penerbitan KK, Penerbitan KTP elektronik, Penerbitan KIA, Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Penerbitan Akta Kelahiran, Pencatatan Lahir Mati, Penerbitan Akta Perceraian, Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pencatatan Pengakuan Anak, Pencatatan Pengesahan Anak, Pencatatan Perubahan Nama, Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, Pencatatan Pembetulan Akta, Pencatatan Pembatalan Akta, Pencatatan Penerbitan Kutipan II, Legalisir Fotocopi Dokumen Adminduk. Pelayanan dokumen kependudukan diantaranya meliputi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa poin utama pengelolaan administrasi kependudukan meliputi :

1. Pendaftaran Penduduk, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;
2. Pencatatan sipil, yang akan membawa akibat terhadap penerbitan Akte Kelahiran, Akte Kematian serta surat keterangan terkait lainnya;
3. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan

### a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Cakupan penerbitan KK di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 102 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Kapanewon | Kartu Keluarga (KK) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah KK | Kepemilikan KK | Prosentase |
| 1 | Srandakan | 10.929 | 10.929 | 100 |
| 2 | Sanden | 11.524 | 11.524 | 100 |
| 3 | Kretek | 11.083 | 11.083 | 100 |
| 4 | Pundong | 12.648 | 12.648 | 100 |
| 5 | Bambanglipuro | 15.023 | 15.023 | 100 |
| 6 | Pandak | 18.261 | 18.261 | 100 |
| 7 | Bantul | 22.709 | 22.709 | 100 |
| 8 | Jetis | 20.596 | 20.596 | 100 |
| 9 | Imogiri | 22.358 | 22.358 | 100 |
| 10 | Dlingo | 13.984 | 13.984 | 100 |
| 11 | Pleret | 16.252 | 16.252 | 100 |
| 12 | Piyungan | 17.940 | 17.940 | 100 |
| 13 | Banguntapan | 37.647 | 37.647 | 100 |
| 14 | Sewon | 34.409 | 34.409 | 100 |
| 15 | Kasihan | 35.548 | 35.548 | 100 |
| 16 | Pajangan | 12.161 | 12.161 | 100 |
| 17 | Sedayu | 16.544 | 16.544 | 100 |
| **Total** | | **329.616** | **329.616** | **100** |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

### b. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 2 tahun 2016, yang menyatakan bahwa setiap anak Indonesia perlu memiliki KIA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Identitas Anak. KIA bertujuan untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak

konstitusional anak. KIA menjadi bukti identitas resmi anak yang umurnya 0-17 tahun, kartu ini berlaku layaknya KTP.

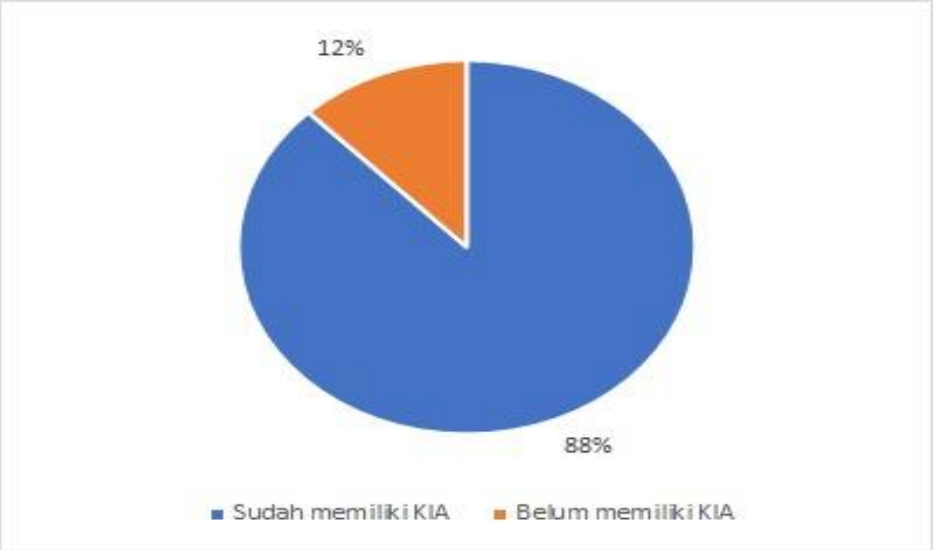


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil, 2021

Gambar 2 57 Cakupan Kepemilikian KIA Tahun 2020

Data di atas menunjukkan jumlah anak yang belum memiliki KIA mencapai 12%, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak.

**c. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Kartu tanda penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan standar pelayanan lima hari harus selesai diterbitkan KTP. Cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 103 Cakupan Penerbitan KTP per Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| Kapanewon | Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Wajib KTP | Kepemilikan KTP-El | Persentase |
| Srandakan | 24.060 | 24.002 | 99,76 |
| Sanden | 25.056 | 24.988 | 99,73 |
| Kretek | 24.198 | 24.134 | 99,74 |
| Pundong | 27.601 | 27.508 | 99,66 |
| Bambanglipuro | 32.258 | 32.174 | 99,74 |
| Pandak | 40.280 | 40.176 | 99,74 |
| Pajangan | 27.781 | 27.675 | 99,61 |
| Bantul | 49.295 | 49.132 | 99,66 |
| Jetis | 44.706 | 44.588 | 99,73 |
| Imogiri | 48.508 | 48.320 | 99,61 |
| Dlingo | 31.021 | 30.890 | 99,57 |
| Banguntapan | 84.376 | 84.110 | 99,68 |
| Pleret | 35.746 | 35.596 | 99,58 |
| Piyungan | 39.633 | 39.498 | 99,65 |
| Sewon | 76.331 | 76.047 | 99,62 |
| Kasihan | 79.240 | 78.982 | 99,67 |
| Sedayu | 36.740 | 36.618 | 99,67 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Perkembangan pencapaian cakupan penerbitan kartu tanda penduduk di Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 104 Cakupan Penerbitan KTP di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan | 677.425 | 703.660 | 713.078 | 718.179 | 724.438 |
| 2 | Jumlah PendudukWajib KTP | 704.074 | 710.225 | 714.518 | 721.687 | 726.830 |
| 3 | Persentasependuduk yang memiliki KTP ber-NIK | 96,21% | 99,07% | 99,79% | 99,51 | 99,67 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

## d. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk

registrasi kependudukan sesuai dengan standar pelayanan tujuh hari harus selesai diterbitkan.

Penerbitan akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran, registrasi setiap kelahiran dan penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 105 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| Kapanewon | Kepemilikan Akta Kelahiran | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk | Memiliki Akte Kelahiran | Persentase |
| Srandakan | 31.082 | 19.448 | 62,57 |
| Sanden | 31.810 | 18.875 | 59,34 |
| Kretek | 30.764 | 17.593 | 57,19 |
| Pundong | 35.666 | 19.347 | 54,24 |
| Bambanglipuro | 41.706 | 22.807 | 54,69 |
| Pandak | 52.036 | 30.864 | 59,31 |
| Bantul | 64.652 | 41.430 | 64,08 |
| Jetis | 58.631 | 35.760 | 60,99 |
| Imogiri | 63.835 | 35.926 | 56,28 |
| Dlingo | 39.998 | 19.976 | 49,94 |
| Pleret | 48.497 | 26.925 | 55,52 |
| Piyungan | 52.862 | 30.056 | 56,86 |
| Banguntapan | 113.298 | 64.961 | 57,34 |
| Sewon | 100.563 | 58.306 | 57,98 |
| Kasihan | 104.599 | 57.018 | 54,51 |
| Pajangan | 36.551 | 22.531 | 61,64 |
| Sedayu | 48.156 | 29.911 | 62,11 |
| Srandakan | 31.082 | 19.448 | 62,57 |
| Total | 954.706 | 551.734 | 57,79 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pencapaian cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bantul dari tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 106 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun N | 10.127 | 10.949 | 10.000 | 9.928 | 9.038 |
| Jumlah kelahiran di tahun N | 10.516 | 11.056 | 10.900 | 9.938 | 9.075 |
| Persentase penerbitan akta kelahiran | 96,30 | 99,85 | 99,88 | 99.90 | 99.59 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

### e. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen sebagai tanda bukti sah mengenai peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Akta Kematian mempunyai manfaat penting bagi penduduk karena dapat digunakan sebagai penetapan status janda atau duda (terutama bagi pegawai negeri), sebagai syarat menikah lagi bagi janda atau duda cerai mati, persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), pengurusan pensiun bagi ahli warisnya, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi, dan perbankan.

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 44 ayat 1, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, pejabat pencatatan sipil kemudian akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon, dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

Tabel 2 107 Cakupan Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 10.817 |
| 2 | 2017 | 15.653 |
| 3 | 2018 | 20.672 |
| 4 | 2019 | 12.245 |
| 5 | 2020 | 10.006 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Dari uraian di atas, secara keseluruhan penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 108 Data Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Tahun 2020

| No | Kapanewon | Jumlah Penduduk | Jumlah Kk | Jumlah Kepemilikan Kk | Jumlah Wajib Ktp | Kepemilikan Ktp-El | Memiliki Akte Kelahiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 31.082 | 10.929 | 10.929 | 24.060 | 24.002 | 19.448 |
| 2 | Sanden | 31.810 | 11.524 | 11.524 | 25.056 | 24.988 | 18.875 |
| 3 | Kretek | 30.764 | 11.083 | 11.083 | 24.198 | 24.134 | 17.593 |
| 4 | Pundong | 35.666 | 12.648 | 12.648 | 27.601 | 27.508 | 19.347 |
| 5 | Bambanglipuro | 41.706 | 15.023 | 15.023 | 32.258 | 32.174 | 22.807 |
| 6 | Pandak | 52.036 | 18.261 | 18.261 | 40.280 | 40.176 | 30.864 |
| 7 | Bantul | 64.652 | 22.709 | 22.709 | 49.295 | 49.132 | 41.430 |
| 8 | Jetis | 58.631 | 20.596 | 20.596 | 44.706 | 44.588 | 35.760 |
| 9 | Imogiri | 63.835 | 22.358 | 22.358 | 48.508 | 48.320 | 35.926 |
| 10 | Dlingo | 39.998 | 13.984 | 13.984 | 31.021 | 30.890 | 19.976 |
| 11 | Pleret | 48.497 | 16.252 | 16.252 | 35.746 | 35.596 | 26.925 |
| 12 | Piyungan | 52.862 | 17.940 | 17.940 | 39.633 | 39.498 | 30.056 |
| 13 | Banguntapan | 113.298 | 37.647 | 37.647 | 84.376 | 84.110 | 64.961 |
| 14 | Sewon | 100.563 | 34.409 | 34.409 | 76.331 | 76.047 | 58.306 |
| 15 | Kasihan | 104.599 | 35.548 | 35.548 | 79.240 | 78.982 | 57.018 |
| 16 | Pajangan | 36.551 | 12.161 | 12.161 | 27.781 | 27.675 | 22.531 |
| 17 | Sedayu | 48.156 | 16.544 | 16.544 | 36.740 | 36.618 | 29.911 |
| **Total** | | **954.7066** | **329.6166** | **329.616** | **726.8300** | **724.438** | **551.7344** |

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri,2021

**f. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 109 Indikator Kinerja Utama Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | NA | 97,45 | 97,83 | 99,55 | 99,63 |
| Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil | NA | 91,74 | 85 | 85 | 78,05 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 80,18 | 80,20 | 83,90 | 92,3 | 90,01 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

## 2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**a. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)**

Lembaga Pemberdayan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 110 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPMD di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kelompok Binaan LPMD | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 2 | Jumlah LPMD | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Rata-rata jumlah Kelompok Binaan LPMD | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Dari data diketahui rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD di Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 4,17, dalam arti rata-rata

satu LPMD membina sekitar 4 kelompok. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPMD tersebut menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPMD.

**b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah tim penggerak PKK Kalurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Kelompok binaan PKK di Kabupaten Bantul sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2 111 Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PKK Kapanewon | Kelompok PKBN | Kelompok Kadarkum | Kelompok Pola Asuh | Kelompok PKK Padukuhan |
| 2016 | 17 | 325 | 339 | 402 | 933 |
| 2017 | 17 | 325 | 339 | 402 | 933 |
| 2018 | 17 | - | - | - | 933 |
| 2019 | 17 | - | - | - | 933 |
| 2020 | 17 | - | - | - | 933 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

**c. Pemberian Bantuan Khusus P2MD dan BKK**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kalurahan khususnya pembangunan sarana umum yang bersifat fisik diberikan bantuan khusus dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan. Bantuan Keuangan P2MD tahun 2020 dialokasikan sebesar 24,96 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 24,96 milyar rupiah. Sedangkan untuk Bantuan

Keuangan Khusus (BKK) dialokasikan sebesar 28,94 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 28,94 milyar. Tahun 2020 bantuan khusus diberikan untuk pembangunan sarana umum yang bersifat fisik, kawasan khusus, pembangunan fisik obyek wisata dan kawasan kulin. Untuk penanganan covid, ada BKK khusus covid bagi 75 Kalurahan masing masing dialokasikan berkisar 1,3 milyar.

Adapun output dari BKK dan P2MD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 112 Output BKK dan P2MD di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Proposal | Kegiatan | Jumlah ( %) | Jumlah proposal | Jumlah Alokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **BKK** | Corblok, (Perbaikan Jalan) | 43,60% | 320 | 11.193.000.000 |
| | | Bangket, Talud | 14,44% | 106 | 3.918.000.000 |
| | | Drainase, Irigasi dll | 5,99% | 44 | 1.709.000.000 |
| | | Masjid / Rumah Ibadah | 14,58% | 107 | 4.658.000.000 |
| | | Penerangan Jalan | 11,58% | 85 | 2.315.000.000 |
| | | TK / PAUD | 0,95% | 7 | 420.000.000 |
| | | Gedung (pertemuan, Olahraga, serbaguna) | 4,09% | 29 | 2.235.000.000 |
| | | Lain- lain | 4,77% | 35 | 2.499.000.000 |
| | | **Total** | **100%** | **733** | **28.947.000.000** |
| **2** | **P2MD** | Corblok, (Perbaikan Jalan) | 51,89% | 385 | 13.525.000.000 |
| | | Bangket, Talud | 20,49% | 152 | 5.465.000.000 |
| | | Drainase, Irigasi dll | 9,84% | 73 | 2.995.000.000 |
| | | Penerangan Jalan | 16,98% | 126 | 2.520.000.000 |
| | | Lain - lain | 0,81% | 6 | 455.000.000 |
| | | **Total** | **100%** | **742** | **24.960.000.000** |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

### d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 113 Indikator Kinerja Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Desa Mandiri | 14 | 16 | 22 | 24 | 27 |
| Indeks Desa Membangun (%) | NA | NA | 22 | 24 | 36 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

### 2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### a. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta PUS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018, tampak pada tabel berikut.

Tabel 2 114 Kepesertaan KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | PUS | 154,202 | - | 143,861 | - | 141,317 | - | 139,938 | - | 140,324 | - |
| 2 | Peserta KB Aktif | 121,764 | 78,96 | 109,257 | 75,95 | 103,912 | 73.53 | 101,691 | 72.67 | 102,751 | 73.22 |
| 3 | Peserta KB MKJP | 42,308 | 34,75 | 37,453 | 34,28 | 36,454 | 35,08 | 35,850 | 35.25 | 36,934 | 29.62 |
| 4 | Peserta KB Pria | 9,543 | 7,84 | 9,308 | 8,52 | 9,651 | 9,29 | 11,472 | 11.28 | 991 | 0.96 |
| 5 | Peserta KB Baru | 13,837 | 100,45 | 11,801 | 85,36 | 17,686 | 44,42 | 9,473 | 53.54 | 9730 | 34.74 |
| 6 | PUS *Unmetneed* | 9,058 | 5,87 | 12,118 | 8,42 | 14,226 | 10,07 | 14,757 | 10.55 | 13,975 | 9.96 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Penurunan jumlah Pasangan Usia Subur disebabkan oleh banyaknya pasangan yang telah memasuki lansia. Hal ini juga diikuti oleh penurunan jumlah peserta keluarga berencana aktif maupun Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun untuk kepesertaan KB pria dan peserta KB baru mengalami peningkatan. Hal ini berarti tingkat kesadaran dari pasangan usia subur yang belum mengikuti program KB mengalami peningkatan.

**b. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**

Cakupan anggota kelompok BKB ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih pasangan usia subur untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial.

Tabel 2 115 Cakupan Anggota BKB ber-KB di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Cakupan anggota BKB ber-KB | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 91,88 | 94,50 | 91.04 | 93.02 | 90.79 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

**c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 116 Indikator Kinerja Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase kategori keluarga kurang sejahtera (%) | 13,49 | 11,94 | 12 | NA | NA |
| Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga | 3,29 | 3,12 | 3,12 | NA | NA |
| Total Fertility Rate (TFR) | NA | NA | NA | 1,67 | 1,67 |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021
Keterangan: Data NA disebabkan perubahan IKU

### 2.3.1.2.9. Perhubungan

#### a. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis angkutan umum sedangkan armada lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul.

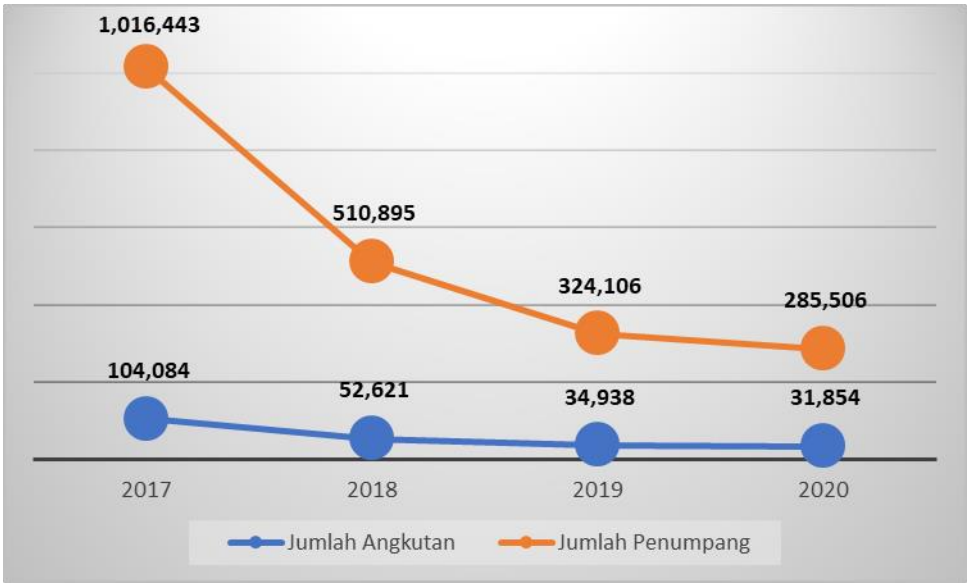


Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Gambar 2 58 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Jumlah penumpang angkutan umum bus di Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain melakukan kajian tentang pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan

umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum melalui program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan pengumpulan database pelayanan angkutan, survei angkutan umum dan tradisional, dan survei angkutan barang.

**b. Ijin Trayek**

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan kabupaten adalah memberikan ijin trayek untuk kalurahan. Ijin trayek di Kabupaten Bantul dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Sejak tahun 2012 trayek yang ada di Bantul berjumlah enam trayek yang tersebar di lima Kapanewon yaitu: Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo, dan Kasihan. Kemudian pada tahun 2014 terdapat ijin trayek baru sebanyak satu trayek yang melayani Imogiri. Sampai dengan tahun 2020 belum ada penambahan trayek. Jumlah ijin trayek di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 117 Jumlah Ijin trayek di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah ijin trayek | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 7 | Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri |
| 2 | 2017 | 7 | Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri |
| 3 | 2018 | 7 | Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri |
| 4 | 2019 | 7 | Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri |
| 5 | 2020 | 7 | Kapanewon Bantul, Kasihan, Pajangan, Dlingo dan Kasihan, Imogiri |

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

### c. Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Tabel 2 118 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | Jumlah Uji KIR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Uji kir kendaraan umum | 17.810 | 18.730 | 20.923 | 19.131 | 11.762 |

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul dilakukan enam bulan sekali oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis berdasarkan ketetapan oleh Menteri Perhubungan. Jumlah uji KIR di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018, namun terjadi penurunan di tahun 2019 yang dikarenakan mutasi keluar dan beberapa kendaraan yang melakukan uji KIR di luar Kabupaten Bantul. Hal lain yang juga mempengaruhi penurunan jumlah uji kir adalah karena *brake tester* yang mengalami kerusakan. Sementara untuk tahun 2020 juga terjadi penurunan jumlah uji KIR yang disebabkan kuota yang dikurangi hingga 50% sebagai bentuk pencegahan penularan virus covid-19 (*social distancing*) sebagaimana dianjurkan oleh kemenhub. Alasan lain adalah masih sama dengan tahun 2019 yaitu karena *brake tester* yang rusak sebanyak 4 kali dalam setahun sehingga menghambat pengujian KIR.

### d. Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan, dan di tahun 2020 mengalami penurunan. Adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh terhadap aktivitas warga berlalu lintas. Sebagai dampak dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pengurangan kegiatan perkantoran, peniadaan kegiatan di lingkungan sekolah dan pengurangan aktivitas warga.

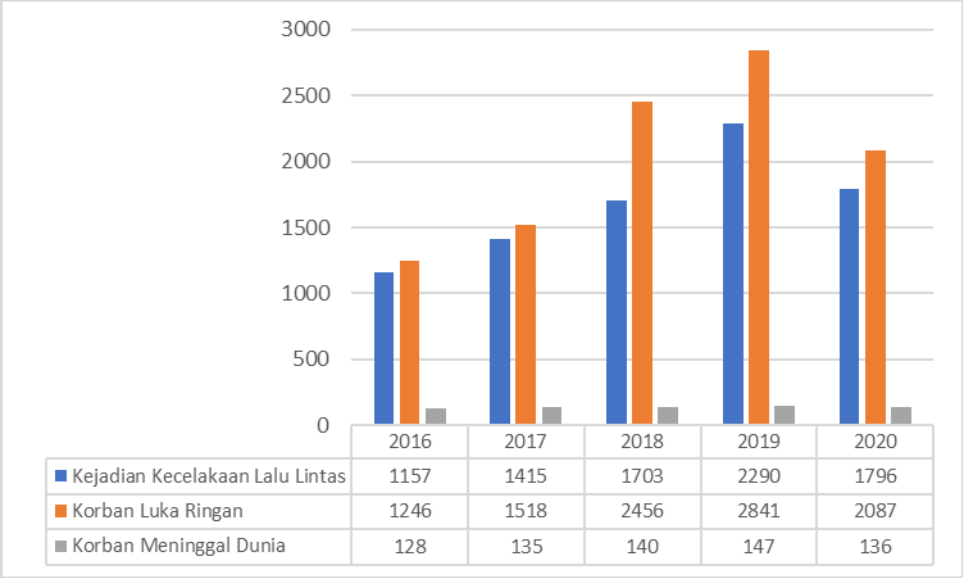


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas | 1157 | 1415 | 1703 | 2290 | 1796 |
| Korban Luka Ringan | 1246 | 1518 | 2456 | 2841 | 2087 |
| Korban Meninggal Dunia | 128 | 135 | 140 | 147 | 136 |

Sumber: POLRES Bantul, 2021

Gambar 2 59 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan kejadian pada tahun 2019. Meskipun jumlah kecelakaan lalulintas menurun, masih perlu upaya untuk mengurangi angka kecelakaan dengan melakukan sosialisasi *safety riding,* memberlakukan batas kecepatan kendaraan dan melengkapi rambu-rambu lalu lintas.

Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul adalah Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari,

dan Jalan *Ringroad* Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan yang padat di pagi hari dan sore hari.

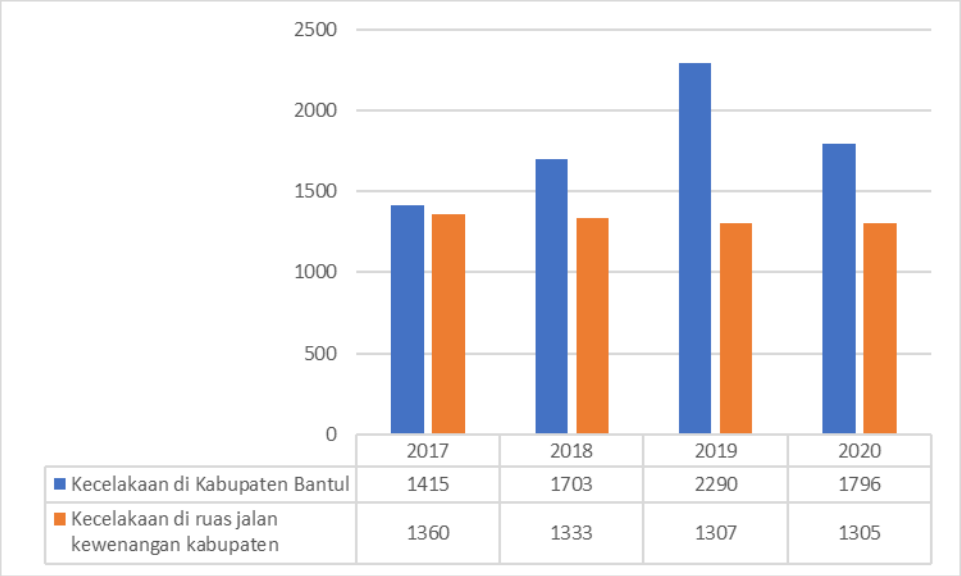


| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Kecelakaan di Kabupaten Bantul | 1415 | 1703 | 2290 | 1796 |
| Kecelakaan di ruas jalan kewenangan kabupaten | 1360 | 1333 | 1307 | 1305 |

Sumber: POLRES Bantul, 2021

Gambar 2 60 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari gambar di atas, kecelakaan yag terjadi di ruas jalan kewenangan kabupaten cukup tinggi antara 57% sd 96%.

### e. Terminal Bus

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Di Kabupaten Bantul terdapat empat terminal dengan kategori C, selain itu terdapat tiga lokasi pemungutan retribusi yaitu TPR Imogiri, TPR Piyungan, TPR Sedayu dan TPR Parangtritis. Selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami pertambahan atau pengurangan jumlah lokasi terminal.

Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal

maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

1) terminal penumpang tipe C di Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul;
2) terminal angkutan barang di Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu;
3) stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;
4) terminal angkutan barang di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan.

Tahun 2017 pembangunan halte sebanyak lima unit yang terpasang di halte Pasar Barongan, halte SMAN 1 Bantul, halte SMPN 1 Pandak, halte Sapuangin, dan halte Bandung. Tahun 2018 sebanyak lima unit halte terpasang di halte sebelah Utara *Traffic Light* S4 Kasongan, sebelah Utara *Traffic Light* S4 Palbapang, depan SMP 2 Bantul, dan dua di depan SMU Muhammadiyah Bantul (MUHIBA).

**f. Angkutan Darat**

Angkutan Darat adalah jenis kegiatan ekonomi berupa pemberian/bisnis jasa angkutan/transportasi barang atau orang di darat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan bus, taksi maupun kereta api. Angkutan darat yang terorganisir di Kabupaten Bantul berupa angkutan umum penumpang bus dan minibus.

Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah pengguna angkutan umum karena saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum akibat semakin mudahnya dalam memperoleh kendaraan pribadi (sepeda motor). Penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi massal dapat mengurangi beban lalu lintas yang semakin padat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang strategis

sehingga masyarakat bersedia beralih menggunakan angkutan umum.

Tabel 2 119 Data Trayek Kendaraan Angkutan Umum yang masih Beroperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Trayek | Jumlah Armada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | **Angkudes** | | | | | |
| 1 | Ps.Bantul-Imogiri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ps.Bantul-Tugu Genthong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ps.Bantul-Pundong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ps.Bantul-Kretek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Munthuk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ps.Imogiri-Dlingo (lewat Seropan) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ps.Bantul-Pleret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ps.Bantul-Krebet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dlingo-Rejoinangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pajangan-Bantul-Pajangan | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| | **Angkutan Perbatasan** | | | | | |
| 1 | Yogya- Parangtritis | 29 | 29 | 21 | 15 | 15 |
| 2 | Yogya- Samas | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Yogya- Sorobayan | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Yogya-Srandakan | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Dlingo - Terminal Giwangan | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| 6 | Yogyakarta – Petoyan | 7 | 7 | 15 | 6 | 6 |
| 7 | Trisik - Giwangan | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| | Jumlah | 89 | 89 | 75 | 56 | 56 |
| | **AKDP** | | | | | |
| 1 | Yogya- Panggang GK | 17 | 18 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Yogya- Parangtritis | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| 3 | Yogya- Samas | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | Yogya- Pandansimo | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 5 | Yogya- Wates | 16 | 16 | 17 | 17 | 0 |
| 6 | Yogya- Ngentakrejo | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| | Jumlah | 105 | 94 | 91 | 91 | |

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

## g. Rasio Konektivitas dan V/C Ratio

### 1) Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah rasio jumlah trayek dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah kebutuhan trayek pada wilayah tersebut. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2016 - 2018 sebagai berikut.

Tabel 2 120 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2016-2018

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Jumlah Angkutan Darat | 109.018 | 104.084 | 52.621 |
| Jumlah Penumpang Angkutan Darat | 1.089.241 | 1.016.443 | 610.895 |
| Rasio Konektivitas (%) * | 10,1 | 10,24 | 10,30 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021
Keterangan :
*) Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ ANGKUTAN\ DARAT}{JUMLAH\ PENUMPANG\ ANGKUTAN\ DARAT}\ X\ 100\%$$

Pada tahun 2019 – 2020 terdapat perubahan perhitungan rasio konektivitas menyesuaikan manual Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019. Rasio konektivitas Kabupaten Bantul pada tahun 2019 -2020 sebagai berikut :

Tabel 2 121 Rasio Konektivitas Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

| Uraian | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Jumlah Trayek yang dilayani pada kabupaten | 7 | 7 |
| Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten | 23 | 23 |
| Bobot Trayek | 1 | 1 |
| Bobot Angkutan Jalan | 100 | 100 |
| Rasio Konektivitas (%)* | 30,34 | 30,34 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021
Keterangan :
*) Rumus :

$$\frac{JUMLAH\ TRAYEK\ YANG\ DILAYANI\ PADA\ KAB\ x\ BOBOT\ TRAYEK}{JUMLAH\ KEBUTUHAN\ TRAYEK\ PADA\ KABUPATEN}\ X\ BOBOT\ ANGKUTAN\ JALAN$$

**2) V/C Ratio**

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 dijelaskan bahwa nisbah volume/kapasitas atau (V/C ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. V/C rasio sendiri berfungsi untuk mengetahui nilai tingkat pelayanan dari ruas jalan di suatu wilayah. Data V/C Ratio Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 2 122 V/C Ratio Ruas Jalan di Kabupaten Bantul

| No | Tahun | Ruas Jalan | V/C Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Jalan Parangtritis | 0,31 |
| | | Jalan Bantul | 0,27 |

| No | Tahun | Ruas Jalan | V/C Ratio |
|---|---|---|---|
| 2 | 2019 | Jalan Srandakan | 0,39 |
| | | Jalan Parangtritis | 0,45 |
| 3 | 2020 | Jalan Dr. Wahidin S | 0,17 |
| | | Jalan Jend Sudirman | 0,39 |

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

### h. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Perhubungan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 123 Indikator Kinerja Utama Bidang Perhubungan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas (%) | 5 | 6 | 1,99 | 1,95 | 1,83 |

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

## 2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

### a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelengaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses

bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

**b. Penerbitan Informasi Media Cetak**

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Buletin Sejada yang penyebarannya sampai ke tingkat padukuhan melalui kapanewon. Tujuan utama penerbitan buletin ini adalah: sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat serta sebagai sarana sosialisasi program kerja dan kegiatan pemerintah. Penerbitan buletin ini dilakukan empat kali/edisi dalam setiap tahunnya.

**c. Penyiaran Radio/TV**

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat adalah melalui dialog interaktif berupa penyiaran di radio ataupun televisi. Tujuan kegiatan ini adalah agar program kerja dan kebijakan pemerintah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Penyiaran di radio dilakukan bekerjasama dengan Radio Bantul, Radio Persatuan, dan RRI, sementara penyiaran televisi bekerjasama dengan TVRI dalam acara Taman Gabusan. Model siaran adalah *talk show* dengan dialog interatif dengan pemirsa di luar studio.

**d. *Website* Milik Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki satu website utama dengan alamat http://www.bantulkab.go.id, dengan beberapa subdomain untuk SKPD dan 1 subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul. Subdomain untuk produk hukum Kabupaten Bantul, adalah http://hukum.bantulkab.go.id dan subdomain untuk SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 124 Alamat Subdomain Website Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Instansi | Subdomain |
|---|---|---|
| | Dinas | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | dikpora.bantulkab.go.id |
| 2 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul | sosial.bantulkab.go.id |
| 3 | Dinas Pariwisata | pariwisata.bantulkab.go.id |
| 4 | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan | diperpautkan.bantulkab.go.id |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | pu.bantulkab.go.id |
| 6 | Dinas Kesehatan | dinkes.bantulkab.go.id |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | disdukcapil.bantulkab.go.id |
| 8 | Dinas Perhubungan | dishub.bantulkab.go.id |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | nakertrans.bantulkab.go.id |
| 10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | diskukmp.bantulkab.go.id |
| 11 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | dppkbpmd.bantulkab.go.id |
| 12 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | disbud.bantulkab.go.id |
| 13 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), | dptr.bantulkab.go.id |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | diskominfo.bantulkab.go.id |
| 15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | dpk.bantulkab.go.id |
| 16 | Satpol PP | satpolpp.bantulkab.go.id |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | dpmpt.bantulkab.go.id |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup | dlh.bantulkab.go.id |
| 19 | Dinas Perdagangan | perdagangan.bantulkab.go.id |
| | Badan | |
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | bappeda.bantulkab.go.id |
| 2 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | bkpp.bantulkab.go.id |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | bkad.bantulkab.go.id |

| No. | Instansi | Subdomain |
|---|---|---|
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | bpbd.bantulkab.go.id |
| 5 | Inspektorat | inspektorat.bantulkab.go.id |
| 6 | Kantor Kesbangpol | kesbangpol.bantulkab.go.id |
| | PD | |
| 1 | Sekretariat Daerah | setda.bantulkab.go.id |
| 2 | Sekretariat DPRD | dprd.bantulkab.go.id |
| 3 | RSUD Panembahan Senopati | rsudps.bantulkab.go.id |
| 4 | Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | ulp.bantulkab.go.id |
| | Kapanewon | |
| 1 | Kapanewon Bambanglipuro | Kapanewon-bambanglipuro.bantulkab.go.id |
| 2 | Kapanewon Banguntapan | Kapanewon-banguntapan.bantulkab.go.id |
| 3 | Kapanewon Bantul | Kapanewon-bantul.bantulkab.go.id |
| 4 | Kapanewon Dlingo | Kapanewon-dlingo.bantulkab.go.id |
| 5 | Kapanewon Imogiri | Kapanewon-imogiri.bantulkab.go.id |
| 6 | Kapanewon Jetis | Kapanewon-jetis.bantulkab.go.id |
| 7 | Kapanewon Kasihan | Kapanewon-kasihan.bantulkab.go.id |
| 8 | Kapanewon Kretek | Kapanewon-kretek.bantulkab.go.id |
| 9 | Kapanewon Pajangan | Kapanewon-pajangan.bantulkab.go.id |
| 10 | Kapanewon Pandak | Kapanewon-pandak.bantulkab.go.id |
| 11 | Kapanewon Piyungan | Kapanewon-piyungan.bantulkab.go.id |
| 12 | Kapanewon Pleret | Kapanewon-pleret.bantulkab.go.id |
| 13 | Kapanewon Pundong | Kapanewon-pundong.bantulkab.go.id |
| 14 | Kapanewon Sanden | Kapanewon-sanden.bantulkab.go.id |
| 15 | Kapanewon Sedayu | Kapanewon-sedayu.bantulkab.go.id |
| 16 | Kapanewon Sewon | Kapanewon-sewon.bantulkab.go.id |
| 17 | Kapanewon Srandakan | Kapanewon-srandakan.bantulkab.go.id |
| | Kalurahan | |
| 1 | Kalurahan : Argodadi | http://argodadi.bantulkab.go.id |
| 2 | Kalurahan : Argomulyo | http://argomulyo.bantulkab.go.id |
| 3 | Kalurahan : Argorejo | http://argorejo.bantulkab.go.id |
| 4 | Kalurahan : Argosari | http://argosari.bantulkab.go.id |
| 5 | Kalurahan : Bangunharjo | http://bangunharjo.bantulkab.go.id |
| 6 | Kalurahan : Bangunjiwo | http://bangunjiwo.bantulkab.go.id |
| 7 | Kalurahan : Banguntapan | http://banguntapan.bantulkab.go.id |
| 8 | Kalurahan : Bantul | http://bantul.bantulkab.go.id |
| 9 | Kalurahan : Baturetno | http://baturetno.bantulkab.go.id |
| 10 | Kalurahan : Bawuran | http://bawuran.bantulkab.go.id |
| 11 | Kalurahan : Canden | http://canden.bantulkab.go.id |

| No. | Instansi | Subdomain |
|---|---|---|
| 12 | Kalurahan : Caturharjo | http://caturharjo.bantulkab.go.id |
| 13 | Kalurahan : Dlingo | http://dlingo-bantul.desa.id |
| 14 | Kalurahan : Donotirto | http://donotirto.bantulkab.go.id |
| 15 | Kalurahan : Gadingharjo | http://gadingharjo.bantulkab.go.id |
| 16 | Kalurahan : Gadingsari | http://gadingsari.bantulkab.go.id |
| 17 | Kalurahan : Gilangharjo | http://gilangharjo.bantulkab.go.id |
| 18 | Kalurahan : Girirejo | http://girirejo.bantulkab.go.id |
| 19 | Kalurahan : Guwosari | http://guwosari.bantulkab.go.id |
| 20 | Kalurahan : Imogiri | http://imogiri.bantulkab.go.id |
| 21 | Kalurahan : Jagalan | http://jagalan.bantulkab.go.id |
| 22 | Kalurahan : Jambidan | http://jambidan.bantulkab.go.id |
| 23 | Kalurahan : Jatimulyo | http://jatimulyo.bantulkab.go.id |
| 24 | Kalurahan : Karangtalun | http://karangtalun.bantulkab.go.id |
| 25 | Kalurahan : Karangtengah | http://karangtengah.bantulkab.go.id |
| 26 | Kalurahan : Kebonagung | http://kebonagung.bantulkab.go.id |
| 27 | Kalurahan : Mangunan | http://mangunan.bantulkab.go.id |
| 28 | Kalurahan : Mulyodadi | http://mulyodadi.bantulkab.go.id |
| 29 | Kalurahan : Muntuk | http://muntuk.bantulkab.go.id |
| 30 | Kalurahan : Murtigading | http://murtigading.bantulkab.go.id |
| 31 | Kalurahan : Ngestiharjo | http://ngestiharjo.bantulkab.go.id |
| 32 | Kalurahan : Palbapang | http://palbapang.bantulkab.go.id |
| 33 | Kalurahan : Panggungharjo | http://panggungharjo.desa.id |
| 34 | Kalurahan : Panjangrejo | http://panjangrejo.bantulkab.go.id |
| 35 | Kalurahan : Parangtritis | http://parangtritis.bantulkab.go.id |
| 36 | Kalurahan : Patalan | http://patalan.bantulkab.go.id |
| 37 | Kalurahan : Pendowoharjo | http://pendowoharjo.bantulkab.go.id |
| 38 | Kalurahan : Pleret | http://pleret.bantulkab.go.id |
| 39 | Kalurahan : Poncosari | http://poncosari.bantulkab.go.id |
| 40 | Kalurahan : Potorono | http://potorono.bantulkab.go.id |
| 41 | Kalurahan : Ringinharjo | http://ringinharjo.bantulkab.go.id |
| 42 | Kalurahan : Sabdodadi | http://sabdodadi.bantulkab.go.id |
| 43 | Kalurahan : Segoroyoso | http://segoroyoso.bantulkab.go.id |
| 44 | Kalurahan : Seloharjo | http://seloharjo.bantulkab.go.id |
| 45 | Kalurahan : Selopamioro | http://selopamioro.bantulkab.go.id |
| 46 | Kalurahan : Sendangsari | http://sendangsari.bantulkab.go.id |
| 47 | Kalurahan : Sidomulyo | http://sidomulyo.bantulkab.go.id |
| 48 | Kalurahan : Singosaren | http://singosaren.bantulkab.go.id |
| 49 | Kalurahan : Sitimulyo | http://sitimulyo.bantulkab.go.id |
| 50 | Kalurahan : Srigading | http://srigading.bantulkab.go.id |
| 51 | Kalurahan : Srihardono | http://srihardono.bantulkab.go.id |

| No. | Instansi | Subdomain |
|---|---|---|
| 52 | Kalurahan : Sriharjo | http://sriharjo.bantulkab.go.id |
| 53 | Kalurahan : Srimartani | http://srimartani.bantulkab.go.id |
| 54 | Kalurahan : Srimulyo | http://srimulyo.bantulkab.go.id |
| 55 | Kalurahan : Sumberagung | http://sumberagung.bantulkab.go.id |
| 56 | Kalurahan : Sumbermulyo | http://sumbermulyo.bantulkab.go.id |
| 57 | Kalurahan : Tamanan | http://tamanan.bantulkab.go.id |
| 58 | Kalurahan : Tamantirto | http://tamantirto.bantulkab.go.id |
| 59 | Kalurahan : Temuwuh | http://temuwuh.bantulkab.go.id |
| 60 | Kalurahan : Terong | http://terong.bantulkab.go.id |
| 61 | Kalurahan : Timbulharjo | http://timbulharjo.bantulkab.go.id |
| 62 | Kalurahan : Tirtohargo | http://tirtohargo.bantulkab.go.id |
| 63 | Kalurahan : Tirtomulyo | http://tirtomulyo.bantulkab.go.id |
| 64 | Kalurahan : Tirtonirmolo | http://tirtonirmolo.bantulkab.go.id |
| 65 | Kalurahan : Tirtosari | http://tirtosari.bantulkab.go.id |
| 66 | Kalurahan : Triharjo | http://triharjo.bantulkab.go.id |
| 67 | Kalurahan : Trimulyo | http://trimulyo.bantulkab.go.id |
| 68 | Kalurahan : Trimurti | http://trimurti.bantulkab.go.id |
| 69 | Kalurahan : Trirenggo | http://trirenggo.bantulkab.go.id |
| 70 | Kalurahan : Triwidadi | http://triwidadi.bantulkab.go.id |
| 71 | Kalurahan : Wijirejo | http://wijirejo.bantulkab.go.id |
| 72 | Kalurahan : Wirokerten | http://wirokerten.bantulkab.go.id |
| 73 | Kalurahan : Wonokromo | http://wonokromo.bantulkab.go.id |
| 74 | Kalurahan : Wonolelo | http://wonolelo.bantulkab.go.id |
| 75 | Kalurahan : Wukirsari | http://wukirsari.bantulkab.go.id |
| | Lembaga lain | |
| 1 | PPID utama | ppid.bantulkab.go.id |
| 2 | KIM Kabupaten Bantul | kim.bantulkab.go.id |
| 3 | Karang Taruna Kabupaten Bantul | karangtaruna.bantulkab.go.id |
| 4 | Ikatan Bidan | ibi.bantulkab.go.id |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Jumlah titik sambung jaringan internet Kabupaten Bantul hingga saat ini meliputi 202 titik. Dari jumlah tersebut 70 titik telah menggunakan jaringan *fiber optic* (FO) dan 132 titik lainnya menggunakan radio nirkabel. Guna melayani penggunaan internet, telah dialokasikan bandwith 500 MB.

### e. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 125 Indikator Kinerja Utama Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services | 60 | 70,33 | 77,70 | 80,69 | 100 |
| Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik | - | 75,23 | 75,33 | 78,56 | 100,04 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

## 2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### a. Koperasi Berbadan Hukum

Pada tahun 2016 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi No: 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No: 244/Dep.1/XII/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang: Pembubaran Koperasi Tidak Aktif Dalam Rangka Pendataan dan Penataan Koperasi. Di tahun 2016 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 64 koperasi. Jumlah koperasi berbadan hukum sampai dengan tahun 2019 ada peningkatan dibanding tahun 2018. Jumlah koperasi berbadan hukum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 126 Koperasi Berbadan Hukum di Kabupaten Bantul

| No. | Kapanewon | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kasihan | 10 | 35 | 28 | 28 | 27 |
| 2 | Sewon | 62 | 51 | 43 | 42 | 44 |
| 3 | Banguntapan | 42 | 34 | 25 | 25 | 24 |
| 4 | Pundong | 12 | 6 | 8 | 9 | 9 |

| No. | Kapanewon | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5 | Dlingo | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Piyungan | 23 | 21 | 17 | 16 | 17 |
| 7 | Pajangan | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Bantul | 92 | 86 | 69 | 69 | 70 |
| 9 | Srandakan | 18 | 16 | 10 | 11 | 11 |
| 10 | Pandak | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| 11 | Imogiri | 31 | 30 | 24 | 25 | 25 |
| 12 | Sanden | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 |
| 13 | Kretek | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Sedayu | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Jetis | 31 | 26 | 17 | 18 | 17 |
| 16 | Pleret | 23 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Bambanglipuro | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 |
| **Jumlah** | | **493** | **433** | **347** | **349** | **351** |

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 202i

## b. Perkembangan UKM

Perkembangan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bantul mencapai sebanyak 49.801 unit, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2019.

Tabel 2 127 Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usaha Mikro | 27.708 | 27.828 | 28.384 | 29.098 | 30.468 |
| 2. | Usaha Kecil | 11.544 | 11.594 | 11.768 | 11.992 | 12.201 |
| 3. | Usaha Menengah | 6.926 | 6.956 | 6.991 | 7.058 | 7.114 |
| | Jumlah | 46.178 | 46.378 | 47.143 | 48.148 | 49.801 |

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Tabel 2 128 Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM di Kabupaten Bantul

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usaha Mikro | 55.416 | 55.656 | 56.768 | 58.225 | 59.890 |
| 2. | Usaha Kecil | 34.632 | 34.782 | 35.130 | 36.048 | 36.925 |
| 3. | Usaha Menengah | 6.926 | 6.956 | 111.856 | 112.977 | 113.884 |
| | Jumlah | 200.864 | 201.734 | 203.754 | 207.250 | 210.699 |

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM.

Tabel 2 129 Data Penerbitan IUMK di Kabupaten Bantul

| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 4.674 |
| 2 | 2017 | 2.749 |
| 3 | 2018 | 4.996 |
| 4 | 2019 | 6.864 |
| 5 | 2020 | 4.531 (Melalui OSS) |
| Jumlah | | 23.814 |

Sumber data : Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2020

### c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 130 Indikator Kinerja Utama Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas | 0 | 192 | 183 | 185 | 185 |
| Peningkatan Kesehatan Koperasi | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 |

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021.

Peningkatan kesehatan koperasi turun pada tahun 2020 karena dipengaruhi oleh salah satu unsur penilaiannya, yaitu penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT). Pada masa pandemi Covid-19 kegiatan berkumpul dibatasi sehingga koperasi ada yang tidak menyelenggarakan RAT.

## 2.3.1.2.12. Penanaman Modal

### a. Investasi PMA dan PMDN

Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Bantul kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2 131 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah Investor | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | PMA | PMDN | |
| 1 | 2016 | 37 | 5 | 42 |
| 2 | 2017 | 46 | 15 | 61 |
| 3 | 2018 | 47 | 47 | 94 |
| 4 | 2019 | 106 | 103 | 209 |
| 5 | 2020 | 96 | 338 | 434 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Data di atas menunjukkan jumlah investor secara keseluruhan (PMA dan PMDN) di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 225 investor dibandingkan dengan tahun 2019. Meningkatnya jumlah investor tentunya berdampak pula pada nilai investasi yang ditanamkan. Nilai investasi PMA/PMDN sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 132 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | Jmlh Proyek PMDN | Jmlh Proyek PMA | Jmlh Proyek PMDN + PMA | Nilai Investasi PMDN | Nilai Investasi PMA (Rp) | Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp) | Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp) | Pertum-buhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.d 2016 | 5 | 37 | 42 | 564.682.781.966,05 | 550.714.055.730,00 | 1.115.396.837.696, | 142.143.455.561,11 | 14,60 |
| s.d 2017 | 15 | 46 | 61 | 601.765.581.966,05 | 655.549.055.730,00 | 1.257.314.637.596, | 141.917.800.000,00 | 12,72 |
| s.d 2018 | 47 | 47 | 94 | 666.256.881.966,05 | 740.109.755.730,00 | 1.406.366.637.696, | 149.052.000.000,00 | 11,85 |
| s.d 2019 | 103 | 106 | 209 | 777.051.181.966,05 | 760.194.755.730,00 | 1.537.245.937.696, | 130.897.300.000,00 | 9,31 |
| s.d.2020 | 338 | 96 | 434 | 808.479.481.966,05 | 786.267.395.730,00 | 1.594.746.877.696, | 57.500.940.000,00 | 3,74 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021
Catatan:
- Realisasi investasi pada tahun 2016 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situshttps://lkpmonline.bkpm.go.id
- 2016 , kurs US$ 1 = Rp13.500 sesuai APBN-P2016
- 2017 , kurs US$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-P2017
- 2018 , kurs US$ 1 = Rp13.400 sesuai APBN-2018
- 2019 , kurs US$ 1 = Rp15.000 sesuai APBN-2019

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 secara keseluruhan

mencapai nilai Rp1.594.746.877.696 meningkat bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp1.587.245.987.696 . Jika dilihat dari nilai investasi, PMDN lebih besar dibanding PMA. Nilai investasi PDMN tahun 2020 sebesar Rp808.479.481.996,00, sementara nilai investasi PMA sebesar Rp786.267.895.780.

**b. Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja**

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio ini mencerminkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar daya tampung proyek investasi PMA/PMDN tersebut.

Tabel 2 133 Rasio Daya Serap Investor terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah Investor | | | Jumlah Tenaga Kerja | | | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PMA | PMDN | Jumlah | PMA | PMDN | Jumlah | |
| 1 | 2016 | 37 | 5 | 42 | 10.364 | 9.366 | 19.730 | 469,76 |
| 2 | 2017 | 46 | 15 | 61 | 13.880 | 9.880 | 23.760 | 389,51 |
| 3 | 2018 | 47 | 47 | 94 | 15.311 | 11.610 | 26.921 | 286,39 |
| 4 | 2019 | 103 | 106 | 209 | 17.146 | 11.834 | 28.980 | 138,66 |
| 5 | 2020 | 96 | 338 | 434 | 17.385 | 12.068 | 29.453 | 67,86 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 hanya mencapai 67,86 hal ini berarti satu perusahaan PMA/PMDN mampu menyerap sekitar 67 sampai 68 tenaga kerja, menurun jauh bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 138,66 yang berarti satu perusahaan PMA/PMDN mampu menyerap sekitar 138 sampai 139 tenaga kerja.

### c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 134 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Penanaman Modal Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Layanan perijinan tepat waktu | 81,60 | 70,98 | 83,87 | 83,80 | 96,92 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 78,99 | 83,08 | 83,29 | 85,89 | 87,89 |
| Pertumbuhan realisasi investasi | 12,20 | 12,72 | 11,85 | 9,30 | 3,74 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

## 2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bantul bisa dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh dalam setiap event pertandingan olahraga, baik tingkat provinsi maupun nasinal yang sangat bagus dan membanggakan. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Bantul lebih serius menangani bidang kepemudaan baik dari segi pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemudaan dan kemitraan serta kelembagaan pemuda, maupun pembinaan olahraga serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga.

### a. Kepemudaan

Ada banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di bidang kepemudaan dengan tujuan untuk melatih kemandirian pemuda, meningkatkan keperdulian pada lingkungan serta meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah.

Berbagai kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 135 Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| Program | Kegiatan | Wujud Kegiatan |
|---|---|---|
| 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | Kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda | (1) Lomba Wirausaha Muda Bantul;<br>(2) MTQ Pelajar Kapanewon se-Kabupaten Bantul; |
| 2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda | a) Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan | Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten, dilaksanakan dalam lima kategori bidang kepeloporan, yaitu pendidikan; sosial budaya dan pariwisata; pengelolalan SDA dan lingkungan; pangan; dan inovasi teknologi dan dari hasil seleksi ditentukan perwakilan untuk mengikuti seleksi di tingkat DIY pada tahun 2021 |
| | b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda | (1) Seleksi Paskibraka Kabupaten Bantul; Sesuai instruksi presiden terkait adanya Pandemi Covid 19 maka perwakilan, pengiriman petugas Paskibraka tidak dilaksanakan.<br>(2) Pelatihan Tallent Mapping (pemetaan potensi pemuda);<br>(3) Bhakti Pemuda Kabupaten Bantul (peran aktif pemuda di masyarakat dalam kegiatan rehab rumah, fasilitas umum dan tempat ibadah);<br>(4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda;<br>(5) Pelatihan Bela Negara Pemuda (terutama pelajar sekolah menengah untuk menangkal aliran radikal dan mengembangkan budaya disiplin);<br>(6) Seminar NAPZA (bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Bantul dan LSM); |
| 3) Program Peningkatan Upaya dan Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda | Pelatihan Kewirausahaan Pemuda (termasuk kemampuan *public speaking)* |
| 4) Program Pengembangan Kebijakan dan Menajemen Olahraga | Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan | (1) Pelatihan Wasit Tenis Lapangan, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket.<br>(2) Pelatih Sepak Takraw, Badminton, Wood Ball, Gate Ball, Bola Basket. |
| 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | a) Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi | (1) Car Free Day (hanya dilaksanakan pada Januari dan Februari selanjutnya dihentikan karena adanya pembatasan kegiatan masyarkat akibat pandemi Covid 19);<br>(2) Olahraga Tradisional (penyelenggaraan lomba untuk melestarikan nilai-nilai |

| Program | Kegiatan | Wujud Kegiatan |
|---|---|---|
| | | pembentukan karakter yang terkandung dalam permainan tradisional warisan leluhur);<br>(3) Pemassalan Olahraga. |
| | b) Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga | (1) Pekan Olahraga Pelajar Kab. Bantul;<br>(2) Pekan Olahraga Daerah (POPDA)<br>(3) Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Kab. Bantul (POSPEDA);<br>(4) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARPEDA);<br>(5) Pekan Paralimpic Pelajar Daerah Kab. Bantul (PEPARDA) dan Pembinaan NPC;<br>(6) Tri Lomba Juang Tingkat Kabupaten Bantul;<br>(7) Pembinaan Atlet Berprestasi (90 atlet dari 10 cabang olahraga unggulan);<br>(8) Reward / Bonus Atlet Berprestasi POPDA, PEPARPEDA, PEPARDA dan POSPEDA (549 atlit dan 95 pelatih); |
| 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | (1) Pengadaan peralatan E Sport<br>(2) Program Perisai, Penambahan fasilitas kebersihan SSA dan Dwi windiu<br>(3) Pemeliharaan rutin/berkala sarpras olahraga |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Unsur penilaian kegiatan lomba Wirausaha Muda Bantul sebagaimana tersebut dalam tabel di atas diantaranya meliputi kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan wirausaha muda dalam penguasaan teknologi informasi melalui media, terutama dalam hal promosi dan kemasan publikasi yang menarik, akurat dan inovatif. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan potensi anak muda dibidang kewirausahaan dapat berkembang dengan baik.

Selain berbagai macam kegiatan kepemudaan sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, di Kabupaten Bantul juga ada wadah pengembangan potensi anak muda antara lain: Rumah milenial dan kegiatan forum anak bantul.

**b. Olahraga**

**1) Organisasi Olahraga**

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki 71 organisasi induk cabang olahraga. Sebagai anggota KONI, Kabupaten Bantul telah memiliki 43 organisasi cabang olahraga seperti Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) dan sebagainya, dari berbagai macam cabang olahraga tersebut masing-masing membina beberapa klub yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

**2) Prestasi dalam Bidang Olahraga**

Dalam rangka mensosialisasikan dan memasyarakatkan olahraga maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengadakan berbagai macam kegiatan antara lain olahraga rekreasi yang dikemas dalam *Car Free Day* dan olahraga tradisional, serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga seperti PORDA, POR, POPDA, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA), POSPEDA dan lain sebagainya.

Pekan Olahraga (POR) Pelajar kabupaten merupakan kompetisi olahraga berjenjang yang mempertandingkan 23 cabang olahraga dengan peserta pelajar SD, SMP dan SMA. Kegiatan ini merupakan seleksi untuk memilih wakil kabupaten Bantul maju ke POPDA DIY.

Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) merupakan salah satu sarana peningkatan mutu prestasi pelajar difabel dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit pelajar berprestasi, sementara POSPEDA merupakan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pasantren Tingkat Daerah dan merupakan salah satu ruang kreasi dan prestasi bagi santriwan dan santriwati di bidang olahraga dan seni Islami.

Pada ajang POPDA DIY Tahun 2020, Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan prestas sebagai juara umum dengan memperoleh medali emas 96, perak 77 dan perunggu 72 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 136 Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Pelajar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Kab./Kota | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Bantul | 96 | 77 | 72 | 246 | 1 |
| 2 | Kab. Sleman | 67 | 61 | 97 | 225 | 2 |
| 3 | Kota Yogyakarta | 45 | 41 | 63 | 149 | 3 |
| 4 | Kab. Kulonprogo | 18 | 34 | 51 | 103 | 4 |
| 5 | Kab. Gunungkidul | 14 | 27 | 53 | 94 | 5 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Sementara dalam Pekan Paralimpik Nasional, berbagai macam kejuaraan cabang olahraga dari tahun 2018 sampai tahun 2020 juga diraih oleh Kabupaten Bantul. Daftar prestasi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

1. Pekan Paralimpik Nasional Tahun 2018, prestasi yang diraih sebagai berikut.

Tabel 2 137 Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XV JAWA BARAT Tahun 2018

| No | Cabor | Nomor | Klasifikasi | Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenis kursi roda | Ganda Pemula Putri | Tuna Daksa Bawah | Emas |
| 2 | Tenis kursi roda | Tunggal Pemula Putri | Tuna Daksa Bawah | Emas |
| 3 | Tenis kursi roda | Ganda Campuran (Quad dan pemula putri) | Tuna Daksa Bawah | Emas |
| 4 | Tenis kursi roda | Ganda Pemula Putra | Tuna Daksa Bawah | Emas |
| 5 | Tenis kursi roda | Tunggal Pemula Putra | Tuna Daksa Bawah | Emas |
| 6 | Tenis kursi roda | Ganda Quad dan Pemula Putra | Tuna Daksa Bawah | Emas |
| 7 | Atletik | Lari 100 m T/F 44 (Ambulant) Putri | Tuna Daksa Atas | Perak |
| 8 | Atletik | Lari 200 m T/F 44 (Ambulant) Putri | Tuna Daksa Atas | Perak |
| 9 | Atletik | Lompat jauh T.F 54 Putri | Tuna Rungu Wicara | Perak |
| 10 | Atletik | Lempar lembing F. 55 (Ambulant) Putra | Tuna Daksa Bawah | Perak |

| No | Cabor | Nomor | Klasifikasi | Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Tenis Meja | Ganda Mix Class 9 | Tuna Daksa Bawah | Perak |
| 12 | Bulutangkis | Ganda Putra (Wch 1 + 2) | Tuna Daksa Bawah | Perak |
| 13 | Bulutangkis | Ganda Putra (Wch 1 + 2) | Tuna Daksa Bawah | Perak |
| 14 | Bulutangkis | Tunggal Putri Wch Open | Tuna Daksa Bawah | Perak |
| 15 | Atletik | Lempar Cakram F. 55 (Ambulant) Putra | Tuna Daksa Bawah | Perunggu |
| 16 | Atletik | Lempar Peluru F. 55 (Ambulant) Putra | Tuna Daksa Bawah | Perunggu |
| 17 | Atletik | Lompat Jauh T/F 44 (Ambulant) Putri | Tuna Daksa Atas | Perunggu |
| 18 | Atletik | Lari 800 m T/F. 37 (CP) Putra | CP | Perunggu |
| 19 | Tenis Meja | Tunggal Kelas Tuna Netra Putra | Tuna Netra | Perunggu |
| 20 | Tenis Meja | Ganda Mix Kelas 11 | Tuna Grahita | Perunggu |
| 21 | Tenis Meja | Beregu Mix Kelas Tuna Netra | Tuna Netra | Perunggu |
| 22 | Tenis Meja | Beregu Mix Kelas Tuna Netra | Tuna Netra | Perunggu |
| 23 | Tenis kursi roda | Beregu Putra | Tuna Daksa Bawah | Perunggu |
| 24 | Bulutangkis | Ganda Campuran Open Wheelchair 2 | Tuna Daksa Bawah | Perunggu |
| 25 | Bulutangkis | Ganda Campuran Open Wheelchair 2 | Tuna Daksa Bawah | Perunggu |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

2. Pekan Paralimpik Nasional Tahun 2019, prestasi yang diraih sebagai berikut.

Tabel 2 138 Kejuaraan Nasional NPC Indonesia 2019

| No | Cabor | Nomor | Klasifikasi | Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenis Meja | Tunggal | Tuna Netra | Emas |
| 2 | Tenis Meja | Tunggal | TT4 | Perak |
| 3 | Tenis Meja | Beregu | TT3-TT5 | Perak |
| 4 | Tenis Meja | Tunggal | Tuna Netra | Perunggu |
| 5 | Tenis Meja | Tunggal | TT3-TT5 | Perunggu |
| 6 | Bocia | Tunggal | BC 5 | Perak |
| 7 | Basket Kursi Roda | Beregu 3x3 | Wheelchair | Perunggu |
| 8 | Angkat Berat | 49 Kg | Daksa | Emas |
| 9 | Atletik | T. Peluru | F11 | Perak |
| 10 | Atletik | L. Cakram | F11 | Emas |

| No | Cabor | Nomor | Klasifikasi | Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Atletik | 200 M | T37 | Perunggu |
| 12 | Atletik | 400 M | T37 | Perunggu |
| 13 | Atletik | 200 M | T11 | Perak |
| 14 | Atletik | L. Jauh | F11 | Emas |
| 15 | Atletik | 100 M | T11 | Perunggu |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

Pada Tahun 2020 karena pandemi Covid-19 Pekan Paralimpik Nasional ditunda pelaksanaannya, namun demikian Kabupaten Bantul mengikuti kejuraan tenis kusi roda "Kapusrehab Cup 2020" dan memperoleh prestasi sebagai berikut.

Tabel 2 139 Kejuaraan Tenis Kursi Roda "Kapusrehab Cup 2020"

| No | Cabang Olahraga | Nomor | Klasifikasi | Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenis Kursi Roda | Beregu | Main Draw | Emas |
| 2 | Tenis Kursi Roda | Beregu | Second Draw | Emas |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

### c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 140 Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikut | 32,00 | 31,40 | 34,21 | 32,18 | 40,33 |
| Jumlah Pemuda Pelopor | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

## 2.3.1.2.14. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya).

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai dari penetapan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2016 – 2019, urusan statistik belum dilaksanakan melalui program tersendiri. Setelah perubahan RPJMD 2016-2021, pada tahun 2020, urusan statistik dilaksanakan melalui Program Penyajian Data Statistik Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah.

Tabel 2 141 Capaian indikator kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2020

| No. | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Capaian |
| 1 | Program Penyajian Data Statistik Daerah | Data statistik acuan perencanaan pembangunan | Dokumen | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 1 |
| 2 | Pengelolaan Updating dan | Jumlah data statistik | Dokumen | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 |

| No. | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Capaian |
| | Analisis Data dan Statistik Daerah | daerah sebagai acuan pembangunan | | | | | | | |
| | | Portal data terkelola | Portal | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 2 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Kabupaten Bantul telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan portal data statistik sektoral yang dapat diakses di http://data.bantulkab.go.id/ dan telah terhubung ke geoportal nasional https://tanahair.indonesia.go.id/ dan portal data nasional https://data.go.id/. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 380 kumpulan data (dataset) dan 739 data (*resource*) yang diunggah oleh 37 perangkat daerah dan satu Kalurahan (Kalurahan Panggungharjo). Kalurahan Panggungharjo menjadi *pilot project* nasional oleh Sekretariat SDI Bappenas untuk integrasi data nasional sampai dengan tingkat Kalurahan. Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (*resource*) tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 157 layer data spasial.

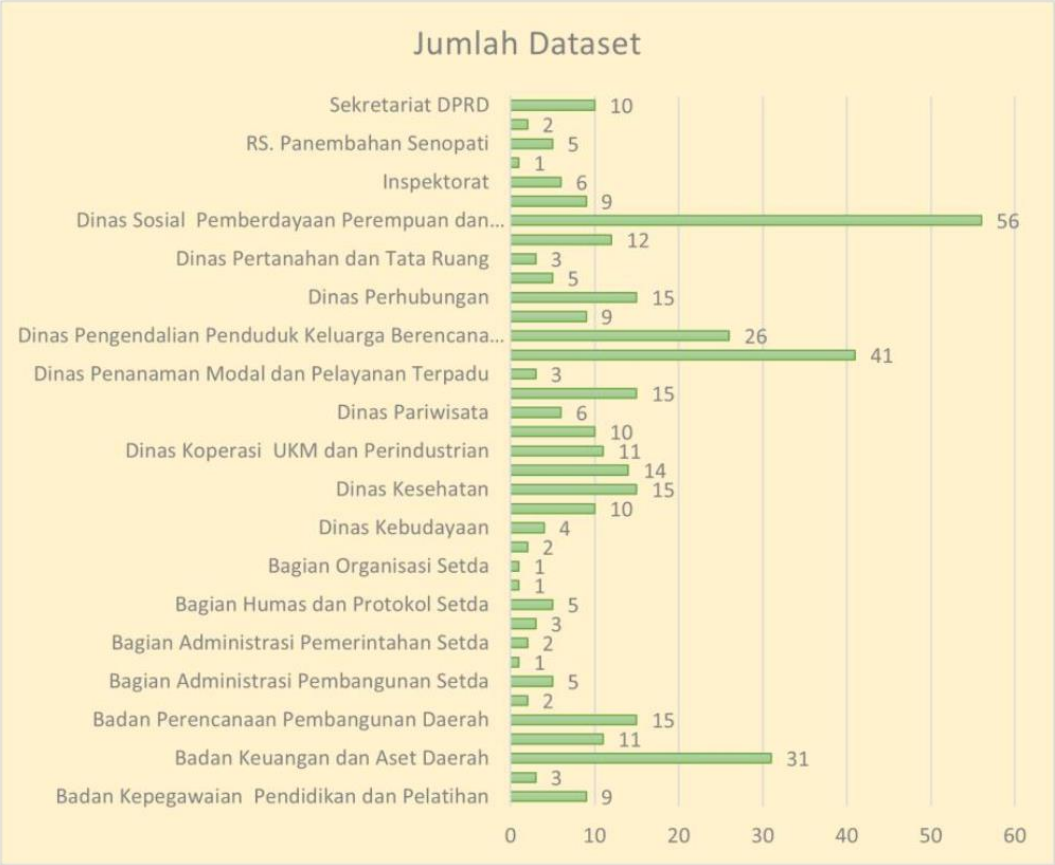


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Gambar 2 61 Grafik Dataset menurut Perangkat Daerah di Portal Data

Tolak ukur kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaran SDI, diantaranya sesuai permendagri 18/2020 dan permendagri 86/2017, sebagai berikut :

Tabel 2 142 Tolak Ukur Kinerja Penyelenggaraan SDI

| Indikator/Tolak Ukur Kinerja | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 |
| Jumlah dataset yang dipublikasi | dataset | 0 | 380 |
| Jumlah dataset yang berstatus privat | dataset | 0 | 18 |
| Jumlah *resource* yang dipublikasi | *resource* | 0 | 712 |
| Jumlah *resource* yang berstatus privat | *resource* | 0 | 27 |
| Jumlah data layer spasial yang dipublikasi | Layes spasial | 0 | 157 |
| Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan | % | 0 | 58.15 |
| Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 100 | 100 |
| Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | 100 | 100 |
| Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data | % | N/A | 100 |

| Indikator/Tolak Ukur Kinerja | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 |
| Persentase data yang dapat berbagi pakai | % | 0 | 95.48 |
| Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik | % | 83.75 | 100 |
| Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik | % | 83.75 | 100 |
| Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | sistem | 1 | 2 |
| Tersedianya buku profil daerah | buku | 1 | 1 |
| Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan | kegiatan | 42 | 43 |
| jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | kegiatan | 25 | 37 |
| jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | Survey | 0 | 0 |
| jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | kegiatan | 0 | 0 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Dalam hal penyelenggaran simpul jaringan, Kabupaten Bantul memperoleh dua penghargaan dalam penganugerahan Bhumandala Award 2020 yaitu Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori geoportal terbaik kabupaten, diterima pada tanggal 27 November 2020.

Kabupaten Bantul dinilai telah berhasil mengembangkan Simpul Jaringan dalam waktu relatif cepat. Kebijakan Satu Data Indonesia juga telah dimasukkan dalam simpul jaringan Kabupaten Bantul sesuai Perpres 39/2019. Disamping itu Kabupaten Bantul diapresiasi melibatkan seluruh perangkat daerah dalam memperkaya data yang ada di geoportal. Studio untuk pengolahan informasi geosoasial dan ruang pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM merupakan nilai lebih simpul jaringan Kabupaten Bantul. Prestasi ini membuktikan komitmen Kabupaten Bantul dalam mewujudkan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia.

### 2.3.1.2.15. Persandian

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan, diantaranya adalah pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Pengamanan persandian pada hakekatnya merupakan pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia mulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Pengamanan persandian meliputi:

- naskah dinas berklasifkasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi;
- komunikasi melalui jaringan, perlu ada jaminan terhadap keselamatan pesan melalui e-mail.
- informasi yang dihasilkan dan disimpan dalam bentuk arsip digital, kerahasiaan dilakukan dengan enkripsi dan keutuhan data dengan *hash function*.
- pengiriman informasi digital, kerahasiaannya perlu dilakukan dengan cara enkripsi jaringan.
- pengiriman dalam bentuk *hardcopy*, maka pengamanan dilakukan terhadap fisik pesan dan personil pembawa pesan.

Dalam operasional kegiatannya pengamanan persandian melaksanakan:

**a. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian**

Program ini bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen di pemerintahan Kabupaten Bantul. Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Pengamanan Berita Rahasia

Sesuai peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pengamanan keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun provinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya mutlak dilakukan. Proses penyandian dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat.

Proses penyandian harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh *sandi-man* karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional.

2) Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan

Bertujuan untuk melakukan deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara menanam peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat.

Tabel 2 143 Lokasi Penempatan Peralatan Penyadap

| No | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Ruang kerja dan Ruang Rapat Bupati | Ruang kerja dan Ruang Rapat Bupati | Ruang kerja dan ruang rapat Kepala Dinas PUPR |
| 2. | Ruang Kerja dan Ruang Rapat Wakil Bupati | Ruang kerja dan ruang rapat Wakil Bupati | Ruang kerja dan ruang rapat Dinas Kesehatan |
| 3. | Ruang Kerja Sekretaris Pribadi upati dan Wakil Bupati | Ruang Kerja Staff Ahli | Ruang kerja dan ruang rapat Inspektur Bantul |
| 4. | Ruang kerja dan ruang rapat Sekretaris Daerah | Ruang kerja dan ruang rapat Sekretaris Daerah | Ruang kerja Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| 5. | | | Ruang kerja Kasubag Teknologi Informasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pengadaan, Ruang Kerja Kassubag Pengadaan Barang dan Jasa, Ruang Rapat Madya, Ruang Rapat Utama dan Ruang Rapat Pratama |
| 6. | | | Ruang kerja Ketua DPRD Bantul |
| 7. | | | Ruang kerja dan ruang rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

3) Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemerintah Kabupaten Bantul

Dilakukan untuk mengamankan sinyal pengganggu saat kegiatan penting yang dihadiri pejabat tinggi, seperti kegiatan Syawalan Gubernur DIY di Kabupaten Bantul tahun 2020, Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul tahun 2020.

4) Penyelenggaraan Layanan Telekomunikasi Telepon dan Radio Komunikasi Internal Pemeritah Daerah

Jumlah sambungan telepon *extention* baik analog maupun IPPhone pada tahun 2020 mencapai 238 sambungan, sementara itu untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frequensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD, Satpol PP, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Lingkungan Hidup.

5) Gelar Jaring Persandian Daerah

Pelayanan koordinasi persandian dengan jajaran persandian se-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY(Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) di Pemda DIY, Polda DIY,Lanal Yogyakarta, Lanud Adisutjipto, Korem 072/Pamungkas,Kejati, dan Kabupaten/Kota se-DIY.

Sebagai UPT Teknis Persandian, di Pemkab. Bantul, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian tergabung dalam Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) DIY. Forkomsanda menjadi media komunikasi dan koordinasi di tingkat Daerah DIY, dengan tujuan untuk menyatukan pola pikir, pola tindak dan pola sikap petugas sandi di Lingkungan Pememerintah Daerah DIY.

6) Penyediaan Filter *Repeater* RPU

Penambahan *repeater* dilakukan pada titik-titik strategis yang tidak terjangkau oleh sinyal radio akibat *blind spot*. Tujuan penambahan *repeater* adalah menghindari adanya *signal loss* ketika informasi menempuh jarak yang cukup jauh, atau menemui halangan seperti gunung atau bukit, sehingga memungkinkan tercapainya komunikasi yang lebih efektif dengan kecepatan pengiriman yang lebih real-time demi kelancaran komunikasi.

7) Layanan Call Center 112

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, *call center* atau panggilan darurat di tingkat nasional dan daerah yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan kriminal harus menggunakan nomor 112, integrasi panggilan paling lambat sudah dilaksanakan pada tahun 2022. *Call Centre* 112 merupakan suatu inovasi sistem pelayanan pengaduan kepada masyarakat secara terpadu yang dapat diakses selama 24. *Call Centre* 112 dibentuk dan diresmikan oleh Bupati Bantul pada tanggal 18 November 2019.

Data panggilan darurat masuk sampai saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 144 Jumlah Panggilan Masuk Januari-November 2020

| Jumlah Panggilan Masuk dari Bulan Januari – November 2020 | |
|---|---|
| **Bulan** | **Jumlah Panggilan** |
| Januari | 41.852 |
| Februari | 28.915 |
| Maret | 42.168 |
| April | 31.849 |
| Mei | 34.385 |
| Juni | 30.899 |
| Juli | 25.124 |
| Agustus | 27.608 |
| September | 27.982 |
| Oktober | 29.069 |
| November | 16.133 |
| **Total** | **335.984** |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keamanan informasi dalam penerapan *Digital Government Service.*

Kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1) Penyediaan Frekuensi Radio Internal

Kegiatan ini berupa pemanfaatan radio komunikasi internal untuk mendukung komunikasi di beberapa Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sewa frekuensi untuk komunikasi radio dan pemeliharaan tower serta *repeater*-nya.

2) Penambahan Saluran Telepon

Saluran telepon kini telah menjangkau seluruh perangkat daerah dan kapanewon.

3) Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul

selama periode tahun 2021. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi. Berikut pelaksanaan kegiatan tersebut:

Tabel 2 145 Pelaksanan Kegiatan Pengamanan Sistem Elektronik

| No | Domain | Nama Sistem | PD Pengampu | Pelaksanaan Penilaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | https://sipentol.bantulkab.go.id/ | Sistem Pendaftaran Online Pengujian Kendaraan | Dinas Perhubungan | 19-24 Mei'21 |
| 2 | https://sidakui.bantulkab.go.id/ | Aplikasi Sistem Informasi Data Koperasi UMKM dan Industri (SIDAKUI) | DKUKMP | 29 Mar - 1 Apr'21<br>7 - 9 Apr'21<br>26 - 29 Apr'21 |
| 3 | https://simponi.bantulkab.go.id/ | Sistem Informasi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Terkini Kabupaten Bantul | Disdikpora | 15-16 Sep'20<br>22-23 Sep'20<br>16-21 Okt'20<br>25-29 Jan'21 |
| 4 | https://bkk.bantulkab.go.id/ | Aplikasi BKK Disnakertrans | Disnakertrans | 16-25 Mar'21 |
| 5 | simelog.* | Sistem Manajemen Logistik Obat | Dinkes | 8-10 Mar'21<br>21-23 Apr'21<br>24-27 Mei'21 |
| 6 | https://sisklb.bantulkab.go.id/ | Sistem Informasi Kejadian Luar Biasa | Dinkes | 22 Okt'20<br>4-6 Nov'20<br>16-19 Nov'20<br>1-3 Mar'21 |
| 7 | https://smartcity.bantulkab.go.id/ | Profil *Smart City* Pemkab Bantul | Diskominfo | 1-5 Feb'21 |
| 8 | https://simpatik.bantulkab.go.id/ | Aplikasi SIM Data Pariwisata | Dinpar | 14-15 Sept'20<br>12-13 Apr'21 |
| 9 | bukutamudiskominfo.kab-bantul.id | Aplikasi Buku Tamu | Diskominfo | 12-21 Apr'21 |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021 diolah

Pelaksanaan asesment dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas

sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen selama periode tahun 2021 sampai dengan 1 Juni 2021 sebagai berikut:

Tabel 2 146 Hasil Pelaksanaan Asesmen

| No | Kategori | Deskripsi | Jumlah Aplikasi |
|---|---|---|---|
| 1. | Aplikasi Baru | | 18 |
| | a. Layak | Telah selesai penilaian dan perbaikan | 3 |
| | b. Rawan | Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan | 7 |
| | c. Pending | Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan | 8 |
| 2. | Aplikasi Lama | | 3 |
| | a. Layak | Telah selesai penilaian dan perbaikan | 0 |
| | b. Rawan | Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan | 3 |
| | **Total Aplikasi yang dinilai** | | 21 |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

4) Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data-data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa:

1. Layanan penanggulangan dan pemulihan
2. Layanan penanganan kerawanan
3. Layanan penanganan artifak.

Selama tahun 2020 terjadi 12 insiden dengan rincian dan masing-masing penanganannya sebagai berikut:

Tabel 2 147 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020

| No. | Jenis Aplikasi | Tanggal Laporan | Jenis Serangan | Penanganan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil | 31 Maret 2020 | *Defacement* (Perubahan Tampilan Web) | *Take down* sementara selama upgrade aplikasi;<br><br>Perbaikan selesai pada akhir tahun 2020 |
| 2. | Sistem Informasi | 24 Maret 2020 | *Defacement* (Perubahan Tampilan Web) | Perbaikan |
| 3. | Sistem Informasi | 5 Mei 2020 | Akses server via web menggunakan *backdoor* yang ditanamkan di server | Perbaikan |
| 4. | Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal | 19 Juni 2020 | Ransomware | *Recovery* menggunakan data backup |
| 5. | Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil | 27 Juli 2020 | *Defacement* (Perubahan Tampilan Web) | *Take down* sementara, perbaikan menunggu anggaran tahun depan |
| 6. | Sistem Informasi dan layanan | 27 Juli 2020 | *Defacement* (Perubahan Tampilan Web) | *Take down* permanen sudah tersedia aplikasi pengganti |
| 7. | Sistem Informasi | 28 Juli 2020 | *Defacement* (Perubahan Tampilan Web) | *Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan |
| 8. | Sistem Informasi | 29 Juli 2020 | Terdeteksi Malware/ *Backdoor* di server | *Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan |
| 9. | Sistem Informasi dan Web Profil | 9 September 2020 | *Defacement* (Perubahan Tampilan Web) | Perbaikan |
| 10. | Sistem Informasi | 30 September 2020 | Terdeteksi Malware/ Backdoor di server | *Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan |
| 11. | Sistem Informasi | 5 Oktober 2020 | Terdeteksi Malware/ Backdoor di server | *Take down* permanen, tidak ada anggaran pemeliharaan/ rencana pengembangan |
| 12. | *Abuse Report* | 21 Desember 2020 | Malware pada perangkat end point (pc/ laptop) | *Tracing* dan blok ke ip tujuan serangan |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

### c. Capaian Indikator Kegiatan

Capaian indikator persandian tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 148 Capaian Indiaktor Utama Persandian

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian | % | NA | NA | NA | 10 | 15 |
| 2. | Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident | % | NA | NA | NA | 43 | 47 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

### 2.3.1.2.16. Kebudayaan

Kebudayaan saat ini menjadi isu strategis dalam pembangunan di Indonesia, tidak hanya memunculkan bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang dalam masyarakat namun sebagai modal pembangunan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa konsep. kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: a. nilai-nilai budaya; b. pengetahuan dan teknologi; c. bahasa; d. adat istiadat; e. tradisi luhur; f. benda; dan g. seni.

Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bantul berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya. Upaya pelestarian budaya yang dilakukan meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai tradisi budaya dan warisan budaya.

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah.

Kabupaten Bantul memiliki setidaknya tiga jenis kelompok seni dan budaya yang sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul, yaitu seni musik, seni tari dan seni teater.

Dengan berkembangnya kelompok seni maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan fasilitas bagi kelompok seni untuk semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah perlu memikirkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasikan karya-karyanya. Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul maka perlu dikembangkan wisata budaya yang merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal.

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) melaksanakan program kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Dana APBD dan Dana Keistimewaan DIY melalui mekanisme BKK.

**a. Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Budaya**

Dinas Kebudayaan (Kunda Kabudayan) mulai tahun 2017 mendapat Dana Keistimewaan dari Provinsi DIY. Mekanisme pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) mulai tahun 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk membina dan memberi ruang berekspresi seni dan budaya, serta pemeliharaan warisan budaya.

Sumber Data Nomor Induk Kesenian (NIK) pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2020 menunjukkan sejumlah 1.156 kelompok seni yang memiliki register kesenian berupa NIK, namun hanya 1.106 kelompok seni yang aktif. Fasilitasi kelompok seni meliputi festival dan pentas seni yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya berupa :

a. Festival : Jathilan, Wayang, Reog, Dolanan Anak, Hadroh, Musik Religi, Teater, Tari, Koes Plus-an, Campursari, Gejog Lesung, Montro, Bergodo;
b. Pentas seni : Pentas Wayang, Kethoprak, Jathilan, Reyog, Tari, Hadroh, Musik Religi, Campursari dan Koes Plus-an.

Tabel berikut ini adalah fasilitasi kelompok seni yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menggunakan anggaran Dana Keistimewaan DIY.

Tabel 2 149 Rekapitulasi Fasilitasi Kelompok Seni di Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2020

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Fasilitasi Kelompok Seni | 488 | 498 | 228 | 239 |

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Pada masa pandemi Covid-19 yang dirasakan pada tahun 2020, fasilitasi pertunjukan kelompok seni dilakukan secara daring, di gedung tertutup, tanpa penonton dan hanya untuk kesenian yang tidak terlalu banyak melibatkan peserta. Pertunjukan seni tetap dilaksanakan meskipun secara daring untuk selalu meningkatkan produktivitas pekerja seni. Kegiatan Gelar Budaya Jogya di Propinsi DIY, juga dikemas secara daring yaitu Festival Kethoprak, Festival Sendra Tari, dan Festival Teater.

Program kegiatan untuk pemeliharaan warisan budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda berupa pelestarian cagar budaya. Kabupaten Bantul memiliki 126 cagar budaya yang tersebar hampir di seluruh kapanewon, dengan kepemilikan dari Keraton Ngayogyakarta

Hadiningrat, Keraton Surakarta, Balai Pengelola Cagar Budaya (BPCB) DIY, Badan Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) DIY, PT KAI, PLN DIY, Dinas Kebudayaan DIY, UGM, DPUPKP Bantul, Dinas Perdagangan Bantul, Dinas Sosial Bantul, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bantul, Yayasan Kanisius, Pengurus Gereja, milik pribadi ataupun pemerintah kalurahan. Terdapat 126 cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Keputusan Gubernur DIY ataupun Keputusan Bupati Bantul sejak tahun 2000 disajikan secara terperinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2 150 Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bantul

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompleks Makam Giriloyo | Wukirsari, Imogiri | PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri | Tempat wisata religi | Keraton |
| 2 | Kompleks Makam Banyusumurup | Girirejo, Imogiri | PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri | Tempat wisata religi | Keraton |
| 3 | Monumen Bibis | Bangunjiwo, Kasihan | PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri | Bangunan tempat tinggal | Pribadi |
| 4 | Bangunan Cagar Budaya Dalem Bupati Puroloyo | Wukirsari, Imogiri | SK Gubernur DIY | Kantor Sekretariat Juru Kunci Purloyo | Keraton |
| 5 | Bangunan Cagar Budaya Joglo R. Ngt. Hadi Puspito | Sumberagung, Jetis | SK Gubernur DIY | Bangunan tempat tinggal | Pribadi |
| 6 | Bangunan Cagar Budaya Gereja Ganjuran | Sumbermulyo, Bambanglipuro | SK Gubernur DIY Tahun 2000 | Tempat ibadah dan wisata religi | Swasta |
| 7 | Bangunan Cagar Budaya Joglo Bp. Miji Yuwono | Trienggo, Bantul | SK Gubernur DIY Tahun 2002 | Bangunan tempat tinggal | Pribadi |
| 8 | Bangunan Cagar Budaya Joglo Broto Sudarmo | Gilangharjo, Pandak | SK Gubernur DIY Tahun 2002 | Masih ditempati sebagai rumah tinggal | Pribadi |
| 9 | Bangunan Cagar Budaya Dalem Kilen Joglo Ciptowening | Wukirsari, Imogiri | SK Gubernur DIY Tahun 2004 | Bangunan tempat tinggal dan Museum Batik | Pribadi |
| 10 | Struktur Cagar Budaya Saluran air PG Pajangan | Sendangsari, Pajangan | SK Gubernur DIY Tahun 2008 | Sarana irigasi | PSDA DIY |
| 11 | Bangunan Cagar Budaya Joglo Yusuf Sudirman | Jambidan, Banguntapan | SK Gubernur DIY Nomor 210/KEP/2010 | Bangunan tempat tinggal | Pribadi |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kawasan Cagar Budaya Kotagedhe | Banguntapan | SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 | Tempat wisata edukasi dan religi | Disbud DIY |
| 13 | Kawasan Cagar Budaya Imogiri | Imogiri | SK Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 | Tempat wisata religi | Keraton |
| 14 | Kawasan Cagar Budaya Kerta - Plered | Pleret | SK Gubernur DIY Nomor 211/KEP/2019 | Tempat wisata edukasi dan religi | Disbud DIY |
| 15 | Bangunan Kompleks Masjid Mataram Kotagede | Jagalan, Banguntapan | - PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri<br>- SK Bupati No. 458 Th 2016 | Tempat ibadah dan wisata religi | Keraton |
| 16 | Kompleks Makam Imogiri | Girirejo, Imogiri | - PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri<br>- SK Bupati No. 458 Th 2016 | Tujuan wisata religi segala umat beragama | Keraton |
| 17 | Bangunan Cagar Budaya Panggung Krapyak | Panggungharjo, Sewon | - PM.89/PW.007/MKP/2011, SK Menteri<br>- Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/KEP/2020<br>- SK Bupati No. 458 Th 2016 | Bangunan monumental | Keraton |
| 18 | Struktur Cagar Budaya Dam Kamijoro | Sendangsari, Pajangan | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Digunakan untuk pengairan | PSDA DIY |
| 19 | Bangunan Cagar Budaya Stasiun Palbapang | Palbapang, Bantul | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Digunakan sebagai kantor terminan Palbapang oleh Dinas Perhubungan Bantul | KAI |
| 20 | Bangunan Cagar Budaya Cagak ANIEM Palbapang | Palbapang, Bantul | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Tinggalan Tiang Listrik Peninggalan Kolonial masa Hindia Belanda | PLN DIY |
| 21 | Bangunan Cagar Budaya Joglo Lurah Dongkol Girirejo | Girirejo, Imogiri | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Digunakan sebagai tempat tinggal | Pribadi |
| 22 | Situs Cagar Budaya Candi Gampingan | Sitimulyo, Piyungan | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Situs wisata sejarah budaya | BPCB DIY |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 23 | Situs Cagar Budaya Candi Mantup | Baturetno, Banguntapan | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Situs wisata sejarah budaya | BPCB DIY |
| 24 | Situs Cagar Budaya Petirtaan Payak | Srimulyo, Piyungan | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Situs wisata sejarah budaya | BPCB DIY |
| 25 | Benda Cagar Budaya Watu Gilang Baturetno | Baturetno, Banguntapan | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Situs wisata sejarah budaya | BPCB DIY |
| 26 | Situs Cagar Budaya Gua Siluman | Banguntapan, Banguntapan | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Digunakan tempat untuk menepi atau bersemedi | Keraton |
| 27 | Kawasan Cagar Budaya Gua Jepang | Seloharjo, Imogiri | SK Bupati No. 458 Th 2016 | Wisata Sejarah | BPCB DIY |
| 28 | Benda Cagar Budaya Stoomwals PU | Palbapang, Bantul | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Tinggalan masa Kolonial Hindia-Belanda | DPUPKP BANTUL |
| 29 | Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Sri Hartinah | Girirejo, Imogiri | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Bangunan tempat tinggal | Pribadi |
| 30 | Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Sonopakis | Ngestiharjo, Kasihan | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Perlu tindakan penyelamatan dari pembangunan rumah warga sekitar | Keraton |
| 31 | Situs Cagar Budaya Pesanggrahan Ambarbinangun | Tirtonirmolo, Kasihan | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Wisma atlet oleh Balai Pemuda dan Olahraga DIY | Keraton |
| 32 | Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Parto Sukardjo | Tirtohargo, Kretek | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Bangunan tempat tinggal | Pribadi |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Rumah Tradisional Milik Mardi Utomo | Sendangsari, Pajangan | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Bangunan tempat tinggal | Pribadi |
| 34 | Struktur Cagar Budaya Dam Makam Mbulan | Sendangsari, Pajangan | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Digunakan untuk pengairan | PSDA DIY |
| 35 | Benda Cagar Budaya Arca Hayasya | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 36 | Benda Cagar Budaya Arca Mukunda | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 37 | Benda Cagar Budaya Arca Muraja | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 38 | Benda Cagar Budaya Arca Sukarasya | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 39 | Benda Cagar Budaya Arca Vajrabhasa | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 40 | Benda Cagar Budaya Arca Vajradhupa | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 41 | Benda Cagar Budaya Arca Vajragantha | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 42 | Benda Cagar Budaya Arca Vajragiti | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 43 | Benda Cagar Budaya Arca Vajrakarma | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 44 | Benda Cagar Budaya Arca Vajralasi | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 45 | Benda Cagar Budaya Arca Vajraloka | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 46 | Benda Cagar Budaya Arca Vajranrtya | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 47 | Benda Cagar Budaya Arca Vajrapani | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Benda Cagar Budaya Arca Vajraraga | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 49 | Benda Cagar Budaya Arca Vajraraksa | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 50 | Benda Cagar Budaya Arca Vajrasphota | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 51 | Benda Cagar Budaya Arca Vamsa | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 52 | Benda Cagar Budaya Arca Vinayaka | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 416 Th 2017 | Koleksi temuan oleh BPCB DIY | BPCB DIY |
| 53 | Benda Cagar Budaya Kotak Wayang Balok Batu Andesit | Pleret, Pleret | SK Bupati N0. 595 Th 2018 | | Pribadi |
| 54 | Struktur Cagar Budaya Sendang Moyo | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 596 Th 2018 | Tempat wisata religi | BPCB DIY |
| 55 | Struktur Cagar Budaya Jembatan Kretek Abang Madukismo | Tirtonirmolo, Kasihan | SK Bupati No.597 Th 2018 | Digunakan untuk jembatan oleh warga | DPUPKP BANTUL |
| 56 | Struktur Cagar Budaya Sendang Kasihan | Tamantirto , Kasihan | SK Bupati No. 598 Th 2018 | Tempat wisata religi | Keraton |
| 57 | Bangunan Cagar Budaya Masjid Wonokromo | Wonokromo, Pleret | SK Bupati No.599 Th 2018 | Tempat ibadah | Keraton |
| 58 | Benda Cagar Budaya Mushaf Bejen | Bantul, Bantul | SK Bupati No. 600 Th 2018 | Koleksi pribadi oleh pemilik | Pribadi |
| 59 | Bangunan Cagar Budaya Rumah Dinas Stasiun Sedayu | Argosari, Sedayu | SK Bupati No. 601 Th 2018 | Aset KAI yang tidak terpelihara | KAI |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Sendang Moyo | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 602 Th 2018 | Pembatas wilayah sendang | BPCB DIY |
| 61 | Benda Cagar Budaya Arca Agastya di Kompleks Sendang Kasihan | Tamantirto , Kasihan | SK Bupati No. 603 Th 2018 | | BPCB DIY |
| 62 | Bangunan Cagar Budaya Masjid Pathok Negoro Dongkelan | Tirtonirmolo, Kasihan | SK. Bupati No. 604 Th 2018 | Tempat ibadah | Keraton |
| 63 | Struktur Cagar Budaya Sumur Gumiling Plered | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 605 Th 2018 | Wisata Sejarah | Disbud DIY |
| 64 | Struktur Cagar Budaya Dinding Sisi Barat dan Utara Masjid Agung Plered | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 606 Th 2018 | Wisata Sejarah | Disbud DIY |
| 65 | Benda Cagar Budaya Dua Puluh Tiga Umpak Masjid Agung Plered | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 607 Th 2018 | Wisata Sejarah | Disbud DIY |
| 66 | Batu Balok Masjid Agung Plered | Pleret, Pleret | SK Bupati No.608 Th 2018 | Wisata Sejarah | Disbud DIY |
| 67 | Bangunan Cagar Budaya Stasiun Winongo | Tirtonirmolo, Kasihan | SK Bupati No. 609 Th 2018 | Gudang oleh warga | KAI |
| 68 | Struktur Cagar Budaya Lemah Dhuwur Keraton Kerto | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 610 Th 2018 | Wisata Sejarah | Disbud DIY |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Benda Cagar Budaya Umpak Kerto | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 611 Th 2018 | Wisata Sejarah | Disbud DIY |
| 70 | Struktur Cagar Budaya Makam Ki Dalang Panjang Mas | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 612 Th 2018 | Tempat wisata religi semua umat beragama | BPCB DIY |
| 71 | Bangunan Cagar Budaya Stasiun Bantul | Bantul, Bantul | SK Bupati No. 613 Th 2018 | Dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh masyarakat | KAI |
| 72 | Struktur Cagar Budaya Tembok Keliling Kompleks Makam Ratu Malang | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 614 Th 2018 | Tembok pembatas atau benteng makam | BPCB DIY |
| 73 | Struktur Cagar Budaya Sendang Banyuurip | Jatimulyo, Dlingo | SK Bupati No. 615 Th 2018 | Tempat wisata religi semua umat beragama | Keraton |
| 74 | Struktur Cagar Budaya Makam Ratu Malang | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 616 Th 2018 | Tujuan wisata religi segala umat beragama | BPCB DIY |
| 75 | Struktur Cagar Budaya Jembatan Kereta Api Winongo | Tirtonirmolo, Kasihan | SK Bupati No. 617 Th 2018 | Jembatan penyebrangan warga | KAI |
| 76 | Benda Cagar Budaya Arca Ganesha di Kompleks Sendang Kasihan | Tamantirto, Kasihan | SK Bupati No. 618 Th 2018 | | BPCB DIY |
| 77 | Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik Dwiningsih | Canden, Ketis | SK Bupati No. 619 Th 2018 | Bangunan tempat tinggal dan perkumpulan masyarakat | Pribadi |
| 78 | Struktur Cagar Budaya Gua Surocolo | Seloharjo, Pundong | SK Bupati No. 517 Th 2019 | Tempat wiata | BPCB DIY |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Benda Cagar Budaya Yoni Sembungan | Bangunjowo, Kasihan | SK Bupati No. 518 Th 2019 | | |
| 80 | Bangunan Masjid Pathok Negoro Babadan | Banguntapan, Banguntapan | SK Bupati No. 519 Th 2019 | Tempat ibadah | Keraton |
| 81 | Bangunan Cagar Budaya Pasar Angkruksari | Donotirto, Kretek | SK Bupati No. 520 Th 2019 | | Dinas Perdagangan |
| 82 | Bangunan Cagar Budaya Bale palereman (Transit Jenazah Raja-raja Mataram) | Girirejo, Imogiri | SK Bupati No. 521 Th 2019 | | |
| 83 | Bangunan Cagar Budaya Langgar Dhuwur | Jagalan, Banguntapan | SK Bupati No. 522 Th 2019 | | |
| 84 | Banguna Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Mojosari | Sitimulyo, Piyungan | SK Bupati No. 523 Th 2019 | Aula, gedung TK ABA Mojosari | Pemerintah Kalurahan Sitimulyo |
| 85 | Bangunan Cagar Budaya Bekas Kantor Sinder Tebu Madigondo | Sitimulyo, Piyungan | SK Bupati No. 524 Th 2019 | Sebagai Persatuan PAUD | Pemda Bantul |
| 86 | Banguna Cagar Budaya Rumah Tradisional Dinas kebudayaan DIY (Bekas Milik Bu Nur Johan) | Jagalan, Banguntapan | SK Bupati No. 525 Th 2019 | Sebagai Sarana untuk masyarakat | Dinas Kebudayaan DIY |
| 87 | Struktur Cagar Budaya Makam Syeh Maulana Maghribi | Parangtritis, Kretek | SK Bupati No. 526 Th 2019 | Tempat wisata religi | Keraton |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Situs Cagar Budaya Gunung Mungker | Srigading, Sanden | SK Bupati No. 527 Th 2019 | | Tanah milik warga |
| 89 | Bangunan Cagar Budaya Candi Gereja Hati Kuds Tuhan Yesus | Sumbermulyo, Bambanglipuro | SK Bupati No. 528 Th 2019 | Wisata Religi | Pengurus Gereja Papa Miskin |
| 90 | Struktur Cagar Budaya Cepuri Parangkusumo | Pleret, Pleret | SK Bupati No. 529 Th 2019 | Wisata Sejarah dan Religi | Keraton |
| 91 | Bangunan Cagar Budaya Pasar Sangkeh | Srigading, Sanden | SK Bupati No. 530 Th 2019 | Pasar | Pemerintah Kalurahan Srigading |
| 92 | Bangunan Cagar Budaya Dalem Kanjengan (Dalem Bupati Juru Kunci Makam Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) | Wukirsari, Imogiri | SK Bupati No. 531 Th 2019 | Tempat tinggal dan kantor juru kunci | Keraton Surakarta |
| 93 | Struktur Cagar Budaya Makan Giriloyo | Wukirsari, Imogiri | SK Bupati No. 532 Th 2019 | Wisata Religi | Keraton |
| 94 | Bangunan Cagar Budaya Masjid Giriloyo | Wukirsari, Imogiri | SK Bupati No. 533 Th 2019 | Tempat Ibadah | Keraton |
| 95 | Struktur Cagar Budaya Jagang Cepori Keraton Koragede | Jagalan, Banguntapan | SK Bupati No. 534 Th 2019 | | BPCB DIY |
| 96 | Bangunan Cagar Budaya Pasar Gatak | Sumbermulyo, Bambanglipuro | SK Bupati No. 535 Th 2019 | Los Pasar | Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Bangunan Cagar Budaya Rumah Tradisional Milik UGM | Jagalan, Banguntapan | SK Bupati No. 536 Th 2019 | Tempat tinggal dan wisata edukatif | UGM |
| 98 | Bangunan Cagar Budaya Monumen Segoroyoso | Segoroyoso, Pleret | SK Bupati No. 537 Th 2019 | | Dinas Sosial Bantul |
| 99 | Bangunan Cagar Budaya Rumah Singgah Gerilya Jenderal sudirman | Parangtritis, Kretek | SK Bupati No. 538 Th 2019 | Pos Napak tilas Rute Gerilya oleh Taruna Akmil | Pribadi |
| 100 | Struktur Cagar Budaya Sendang Seliran | Jagalan, Banguntapan | SK Bupati No. 539 Th 2019 | Tempat wisata religi semua umat beragama | Kraton |
| 101 | Omah Demamit | Seloharjo, Pundong | No. 688 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Gudang | pribadi |
| 102 | Kolam Renang John Kersch | Parangtritis, Kretek | No. 689 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Kolam renang umum | pribadi |
| 103 | Kamar Mandi Kolam Renang John Kersch | Parangtritis, Kretek | No. 690 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Kamar mandi | pribadi |
| 104 | Pagar Komplek Kolam Renang John Kersch | Parangtritis, Kretek | No. 691 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Pembatas tegalan | pribadi |
| 105 | SDN 1 Pundong | Srihardono, Pundong | No. 692 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Sarana pendidikan | Disdikpora Bantul |
| 106 | Rumah Tradisional milik Setyo Pranyoto | Argodadi, Sedayu | No. 693 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat tinggal | Pribadi |
| 107 | Song Kamal | Srimulyo, Piyungan | No. 694 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat tirakat | Di atas Tanah Sultan Ground |
| 108 | Rumah Tradisional Jawa milik Cokro | Srimulyo, Piyungan | No. 695 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat tinggal | pribadi |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Subroto | | | | |
| 109 | Makam Sunan Geseng | Srimulyo, Piyungan | No. 696 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat wisata religi | Kraton |
| 110 | Rumah Singgah Soedirman | Srimartani, Piyungan | No. 697 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat tinggal | pribadi |
| 111 | Makam KRT Mangunegoro Bupati Bantul I | Sitimulyo, Piyungan | No. 698 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat wisata religi | Pemerintah Kalurahan Sitimulyo |
| 112 | Arca Agastya Nomor Inventaris BG. 1815 | Guwosari, Pajangan | No. 703 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 113 | Arca Bodhisattwa Padmapani BG. 575 | Argodadi, Sedayu | No. 704 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 114 | Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.b | Sitimulyo, Piyungan | No. 705 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 115 | Arca Dhyani Buddha Wairocana Nomor Inventaris BG. 1470.c | Sitimulyo, Piyungan | No. 706 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 116 | Arca Bodhisattwa Candralokeswara Nomor Inventaris BG.1469 | Sitimulyo, Piyungan | No. 707 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 117 | Arca Jembhala Nomor Inventaris BG. 1474 | Sitimulyo, Piyungan | No. 708 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 118 | Cincin Emas Nomor Inventaris BG. 1475 | Sitimulyo, Piyungan | No. 709 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 119 | Arca Siwa dan Parwati Nomor Inventaris BG. 1252 | Baturetno, Banguntapan | No. 710 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 120 | Arca Siwa Nomor Inventaris BG. 349 | Sitimulyo, Piyungan | No. 711 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |

| No | Cagar Budaya | Lokasi | Penetapan | Pemanfaatan | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Koleksi Emas Nomor Inventaris BG. 1471 a-i | Sitimulyo, Piyungan | No. 712 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Koleksi temuan BPCB DIY | BPCB DIY |
| 122 | Pasar Sungapan | Argodadi, Sedayu | No. 713 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Los pasar | Dinas Perdagangan Bantul |
| 123 | Rumah Indis milik Bapak Muhadi Djajus | Sitimulyo, Piyungan | No. 714 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat tinggal | pribadi |
| 124 | SD Kanisius Ganjuran | Sumbermulyo, Bambanglipuro | No. 715 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Sarana pendidikan | Yayasan Kanisius |
| 125 | Penginapan John Kersch | Parangtritis, Kretek | No. 716 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Penginapan | pribadi |
| 126 | Rumah Tradisional milik Bapak Raditya Wahyu Kumara | Srigading, Sanden | No. 717 Tahun 2020, Tanggal 29 Desember 2020 | Tempat tinggal | pribadi |

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Data Budaya Tak Benda yang merupakan potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan sejak tahun 2013 hingga 2019 oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ada 18 jenis, disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2 151 Data Budaya Tak Benda potensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Bantul

| No | Data Budaya Tak Benda (Potensi Wbtb) Di Bantul | Domain / Objek Yang Dikaji | Ditetapkan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Register | SK Kemendikbud |
| 1 | Nama INDUSTRI GERABAH KASONGAN<br>Lokasi Kalurahan Kasongan, Kasihan, Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No. 192864/MPK.F /DO/2013<br>16 Desember 2013 | No. 238 / M / 2013<br>13 Desember 2013 |
| 2 | Nama BLANGKON YOGYAKARTA<br>Lokasi Pathen, Sumberagung, Jetis, Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No. 60085/MPK.E/ KB/2017<br>4 Oktober 2017 | No. 260 /M/ 2017<br>29 September 2017 |
| 3 | Nama MONTRO<br>Lokasi Kalurahan Pleret, Pleret, Bantul | Seni Pertunjukan | No. 60075/MPK.E/ KB/2017<br>4 Oktober 2017 | No. 260 /M/ 2017<br>29 September 2017 |
| 4 | Nama WEDANG UWUH IMOGIRI<br>Lokasi Kalurahan Imogiri, Imogiri, Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No. 60087/MPK.E/ KB/2017<br>4 Oktober 2017 | No. 260 /M/ 2017<br>29 September 2017 |
| 5 | Nama SRANDUL | Seni Pertunjukan | No. 60077/MPK.E/ KB/2017<br>4 Oktober 2017 | No. 260 /M/ 2017<br>29 September 2017 |
| 6 | Nama REBO PUNGKASAN<br>Lokasi Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul | Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan | No. 65675/MPK.E/ KB/ 2018<br>10 Oktober 2018 | No. 264 /M/ 2018<br>21 September 2018 |
| 8 | Nama NINI THOWONG YOGYAKARTA<br>Lokasi Kalurahan Panjangrejo, Pundong, Bantul | Seni Pertunjukan | No. 65675/MPK.E/ KB/2018<br>10 Oktober 2018 | No. 264 /M/ 2018<br>21 September 2018 |
| 9 | Nama BATIK NITIK YOGYAKARTA<br>Lokasi Kembangsongo, Trimulyo, Jetis, Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No. 65675/MPK.E/ KB/2018<br>10 Oktober 2018 | No. 264 /M/ 2018<br>21 September 2018 |
| 10 | Nama GEJOG LESUNG YOGYAKARTA<br>Lokasi Padukuhan Bendo, Imogiri, Imogiri | Seni Pertunjukan | No. 65675/MPK.E/ KB/2018<br>10 Oktober 2018 | No. 264 /M/ 2018<br>21 September 2018 |
| 11 | Nama BENTHIK YOGYAKARTA<br>Lokasi Kampung dolanan, Panggungharjo | Tradisi dan Ekspresi Lisan | No. 65675/MPK.E/ KB/2018<br>10 Oktober 2018 | No. 264 /M/ 2018<br>21 September 2018 |
| 12 | Nama ANDONG YOGYAKARTA<br>Lokasi Bengkel Pendowo | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No. 103617/MPK.E/ KB/2019<br>8 Oktober 2019 | No. 362 /M/ 2019<br>24 September 2019 |

| No | Data Budaya Tak Benda (Potensi Wbtb) Di Bantul | | Domain / Objek Yang Dikaji | Ditetapkan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Register | SK Kemendikbud |
| | | Limo, Pandeyan, Patalan, Jetis | | | |
| 13 | Nama<br>Lokasi | MIE LETHEK<br>Srandakan, Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No.103617/MPK.E/ KB/2019<br>8 Oktober 2019 | No. 362 /M/ 2019<br>24 September 2019 |
| 14 | Nama<br>Lokasi | SHOLAWAT MAULUD JAWI<br>Jejeran, Wonokromo, Pleret | Tradisi dan Ekspresi Lisan | No.103617/MPK.E/ KB/2019<br>8 Oktober 2019 | No. 362 /M/ 2019<br>24 September 2019 |
| 15 | Nama<br>Lokasi | CEMBENGAN YOGYAKARTA<br>Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul<br>PT Madu Baru | Adat istiadat masyarakat, Ritus, dan Perayaan | No.103617/MPK.E/ KB/2019<br>8 Oktober 2019 | No. 362 /M/ 2019<br>24 September 2019 |
| 16 | Nama<br>Lokasi | SATE KLATAHAK<br>Jejeran, Pleret, Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No.103617/MPK.E/ KB/2019<br>8 Oktober 2019 | No. 362 /M/ 2019<br>24 September 2019 |
| 17 | Nama<br>Lokasi | KERAJINAN KULIT TATAH SUNGGING YOGYAKARTA<br>Pucung, Wukirsari, Imogiri, Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No.103617/MPK.E/ KB/2019<br>8 Oktober 2019 | No. 362 /M/ 2019<br>24 September 2019 |
| 18 | Nama<br>Lokasi | PEWARNA ALAMI YOGYAKARTA<br>Giriloyo,Wukirsari, Imogiri,Bantul | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional | No.103617/MPK.E/ KB/2019<br>8 Oktober 2019 | No. 362 /M/ 2019<br>24 September 2019 |

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya merupakan salah satu upaya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan di tingkat desa/kalurahan Desa/Kalurahan adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimiliki.

Perkembangan desa/ kalurahan budaya di kabupaten Bantul sebanyak 12 Kalurahan telah ditetapkan menjadi Kalurahan Budaya dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016. Salah satu dari Kalurahan Budaya tersebut ditetapkan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Kalurahan Sabdodadi dengan Keputusan Gubernur Nomor 364/Kep/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Selain itu, Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya kalurahan budaya melalui rintisan desa/kalurahan budaya. Data rintisan

desa/kalurahan budaya yang berpotensi naik status jadi desa/kalurahan budaya terdapat Sembilan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020. Adapun Sembilan rintisan desa/kalurahan budaya yaitu Kalurahan Gadingsari (Sewon), Parangtritis (Kretek), Girirejo dan Sriharjo (Imogiri), Srimulyo (Piyungan), Muntuk (Dlingo), Sendangsari (Pajangan), Tamantirto (Kasihan), dan Argodadi (Sedayu).

**b. Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Dengan adanya UU Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, menjadi tampak jelas bahwa kebudayaan memegang peranan penting dalam segala lini pembangunan. Undang-Undang ini mengamanatkan agar kebudayaan yang ada diperlakukan dengan sebaik-baiknya melalui tindakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Berdasar Undang-Undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Capaian daerah dalam mengelola dan melestarikan kebudayaan tersebut sudah selayaknya mendapatkan apresiasi. Salah satu dukungan Pemerintah dalam mengapresiasi daerah dalam mengelola kebudayaannya tercermin dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang telah dikembangkan oleh UNESCO yaitu *Culture Development Indicators* (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, di antaranya: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Indeks ini bukan mengukur nilai budaya, namun diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. IPK dapat menjadi data dasar yang informatif dalam memonitor dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan, selain itu dapat menjadi suatu tolok ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan, sebagaimana Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah daerah dapat menggunakan IPK untuk menentukan arah kebijakan dalam upaya pencapaian pembangunan kebudayaan daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun IPK dengan menggunakan pendekatan metode survey dan kuisioner untuk mengukur 7 dimensi pembangunan kebudayaan.

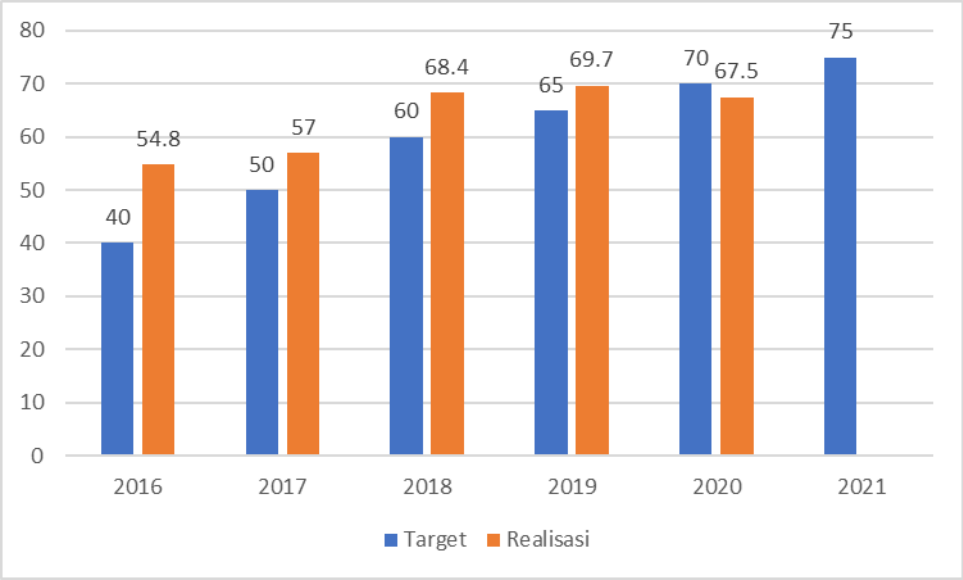


Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Gambar 2 62 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Capaian kinerja Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Bantul, terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 telah melampaui target capaian. Pada tahun 2020 IPK Kabupaten Bantul dibawah target yaitu 67,5. Kabupaten Bantul telah berusaha memetakan capaian kinerja pembangunan kebudayaan sejak tahun

2016, langkah tersebut diperkuat dengan kegiatan inventarisasi objek-objek kebudayaan serta menggali hambatan serta dukungan dalam pembangunan kebudayaan di wilayah ini. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi DIY tertinggi Nasional yaitu sebesar 73,79.

**c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 152 Indikator Kinerja Utama Bidang Kebudayaan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Desa/Kalurahan Budaya | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Cakupan Perlindungan Warisan Budaya (%) | NA | NA | - | 24 | 24 |

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021.

**2.3.1.2.17. Perpustakaan**

**a. Jumlah Perpustakaan**

Budaya literasi (baca,tulis dan ucap) masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Bantul, untuk itu pemerintah mempunyai peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *update*, selain itu memberikan layanan baca secara optimal kepada masyarakat di lokasi perpustakaan maupun perpustakaan keliling.

Perpustakaan di Kabupaten Bantul terdiri dari satu perpustakaan daerah dan layanan perpusatakaan keliling. Jangkauan layanan perpustakaan keliling sebanyak 192 lokasi, antara lain di sekolah (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA), tempat ibadah, komunitas, dan pojok baca. Selain itu layanan dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis di lokasi wisata dan *event-event* tertentu seperti *Car Freeday*. Layanan mandiri dilakukan di 57 lokasi dan

pelayanannya dilakukan selama 7 hari kerja. Semua unit armada yang ada, sudah menerapkan IT dengan sistem otomasi perpustakaan. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kapanewon dan 75 kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Pelayanan perpustakaan dilaksanakan pada hari Senin-Kamis dan Jum'at. Untuk Senin – Kamis pelayanan dimulai dari pukul 08.00 – 16.00 dan Jumat dari pukul 08.00 – 14.30 sedangkan untuk hari Sabtu - Minggu dilayani dari pukul 08.00 – 12.00 WIB, dan pelayanan diliburkan pada saat hari libur nasional dan cuti bersama. Namun pada masa pandemi ini perpustakaan hanya melayani pengunjung pada hari Senin sampai Jumat pada jam 07.30-14.30 WIB, namun untuk layanan keliling dihentikan sementara.

Tabel 2 153 Jenis Perpustakaan di Kabupaten Bantul tahun 2020

| No | Jenis Perpustakaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Perpustakaan Daerah/Kabupaten | 1 |
| 2 | Perpustakaan Kalurahan | 75 |
| 3 | Perpustakaan SD | 395 |
| 4 | Perpustakaan SMP | 116 |
| 5 | Perpustakaan SMA/SMK | 99 |
| 6 | Perpustakaan Khusus/Instansi | 9 |
| 7 | Perpustakaan Tempat Ibadah | 56 |
| 8 | Perpustakaan Komunitas | 106 |
| 9 | Perpustakaan Pondok Pesantren | 7 |
| | Jumlah | 864 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 75 kalurahan yang ada di Bantul seluruhnya sudah mempunyai perpustakaan. Perpustakaan sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar dari 395 SD/MI di Bantul seluruhnya mempunyai perpustakaan sekolah. Demikian pula untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dari 116 sekolah seluruhnya mempunyai perpustakaan.

Tabel 2 154 Jumlah Pojok Baca

| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2017 | 3 |
| 2 | 2018 | 10 |
| 3 | 2019 | 17 |

| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 4 | 2020 | 0 |
| | Jumlah | 30 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Pembangunan pojok baca merupakan sarana meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat. Dari tahun 2017 sampai dengan 2019 telah terbangun 30 pojok baca. Sedangkan tahun 2020 tidak dilakukan pembangunan pojok baca karena anggaran *direfocusing* untuk penanganan Covid-19.

Tabel 2 155 Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi

| No | Perpustakaan yang Terakreditasi | Jumlah s.d Th. 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Perpustakaan Desa/Kalurahan | 2 |
| 2 | Perpustakaan SD | 12 |
| 3 | Perpustakaan MI | 0 |
| 4 | Perpustakaan SMP | 7 |
| 5 | Perpustakaan MTs | 3 |
| 7 | Perpustakaan Khusus | 0 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Akreditasi perpustakaan dimaksudkan meningkatkan kinerja layanan sehingga dengan semakin banyak perpustakaan di Bantul yang terakrediatsi semakin baik kinerja layanan yang pada akhinya akan semakin banyak siswa dan masyarakat yang berkunjung. Apabila dibandingkan dengan jumlah yang ada, masih sedikit perpustakaan yang terakreditasi. Untuk perpustakaan desa/kalurahan baru 2,67% yang terakreditasi, 3,03% untuk jenjang SD, 0% MI, 7,6% SMP dan 12,5% MTs. Untuk mendukung akreditasi dilaksanakan dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

**b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan**

Jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau

berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2 156 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) | 345.368 | 518.693 | 732.826 | 841.154 | 140.366 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 345.368 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 menjadi 841.154 orang pengunjung. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya baca di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bantul antara lain disebabkan oleh metode layanan dengan menggunakan sistem otomasi, paket dan manual, penambahan lokasi layanan keliling, sarana prasarana dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber-AC, suasana nyaman serta tersedianya SDM pengelola perpustakaan yang memadai.

Pada tahun 2020 pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sebanyak 140.366, jumlah ini menurun dibandingkan data tahun 2019. Penurunan ini disebabkan pandemi covid. Untuk mengurangi risiko penularan covid, layanan perpustakaan sempat dihentikan sementara waktu dan pada saat dibuka kembali dilakukan pembatasan jumlah pengunjung dan dengan mewajibkan pengunjung memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk perpustakaan.

Tabel 2 157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Usia tahun 2020

| Jenis Pemustaka | Usia | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | | Jumlah Pengunjung Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| Paud/TK | 3-6 th | 672 | 1.163 | 1.835 |

| Jenis Pemustaka | Usia | Jumlah Pengunjung Perpustakaan | | Jumlah Pengunjung Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| SD | 7-12 th | 45.424 | 63.829 | 109.253 |
| SMP | 13-15 th | 1.111 | 2.392 | 3.503 |
| SMA | 16-18 th | 1.545 | 2.755 | 4.300 |
| Mahasiswa | >18 th | 852 | 1.692 | 2.544 |
| Pegawai | >18 th | 3.226 | 6.895 | 10.121 |
| Umum/lain-lain | >18 th | 3.038 | 5.772 | 8.810 |
| **Jumlah** | | **55.868** | **84.498** | **140.366** |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa 83,48% pengunjung perpustakaan adalah yang masih bersekolah. Bila dilihat dari jenjang pendidikan, siswa sekolah dasar merupakan pengunjung paling banyak, yaitu 109.253 (77,83%). Hal ini akuimerupakan hal yang menggembirakan, karena dapat menjadi adanya petunjuk minat baca. Sayangnya, data pengunjung SMP, SMA dan mahasiswa masih jauh selisihnya. Diharapkan apabila pandemi covid berakhir pemustaka yang datang ke perpustakaan meningkat kembali. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat, menambah inovasi layanan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan *online*.

**c. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah**

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan ketersediaan bahan pustaka dan bacaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Jumlah koleksi buku yang tersedia di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sejak tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya variasi koleksi. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 107.360 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 39.040 judul. Hal ini sudah memenuhi standar perpustakaan tipe A dengan koleksi sebanyak 17.000 judul. Selain itu, juga terdapat koleksi digital melalui *e-book* sebanyak 263 judul, masing-masing judul ada 8 buah, sehingga jumlah sebanyak 2.104 buah. Perkembangan

jumlah koleksi bahan pustaka dari 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 158 Jumlah Koleksi Buku/ Bahan Pustaka
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Judul | 38.782 | 40.300 | 39.040 | 39.547 | 39.812 |
| Buku | 102.292 | 104.300 | 107.360 | 113.897 | 114.162 |
| e-book | 0 | 0 | 2.104 | 2.104 | 3.372 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

**d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Perpustakaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 159 Indikator Kinerja Utama Bidang Perpustakaan
Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan (%) | 28,5 | 29 | 37,72 | 31 | -83,3 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021

## 2.3.1.2.18. Kearsipan

Arsip merupakan suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik maupun organisasi lainnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam

arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, urusan kearsipan merupakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk mendukung tugas dan fungsi kearsipan tersebut, telah ditempatkan sebanyak 16 orang tenaga arsiparis dan 156 orang pengelola kearsipan dengan jumlah arsip yang dikelola sebanyak 2.649 dokumen arsip statis. Pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengusulkan pemusnahan arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia(ANRI) berupa arsip Eks Keuangan kelompok B sebanyak 3.176 nomorberkas, dan arsip permanen sebanyak 375 nomorberkas.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adalah:

**a. Pengawasan dan Penilaian arsip**

Untuk mewujudkan tertib administrasi telah dilaksanakan pengawasan dan penilaian arsip kepada 52 Perangkat Daerah (PD). Hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 160 Data Hasil Pengawasan Kearsipan

| No | Kategori Nilai | Jumlah PD | |
|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 |
| 1 | Memuaskam | 0 | 2 |
| 2 | SangatBaik | 5 | 3 |

| No | Kategori Nilai | Jumlah PD | |
|---|---|---|---|
| 3 | Baik | 14 | 30 |
| 4 | Cukup | 7 | 4 |
| 5 | Kurang | 26 | 15 |
| | Jumlah | 52 | 54 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 baru sebanyak 5 perangkat daerah yang pengelolaan arsipnya dalam kategori sangat baik, 14 PD kategori baik, sementara 33 PD lainnya dalam kategori cukup dan kurang, sementara untuk tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah PD. yang pengelolaan arsipnya masuk dalam kategori sangat baik dan baik, yaitu menjadi sejumlah 33 PD.

**b. Akuisisi Arsip**

Selain melakukan pengawasan dan penilaian pengelolaan kearsipan, sejak tahun 2017 juga telah dilakukan akuisisi arsip terhadap berbagai macam peristiwa yang terjadi maupun dilaksanakan serta tokoh masyarakat, seniman, serta tokoh tokoh lainnya. Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 161 Daftar akuisisi yang telah dilaksanakan

| No. | Tahun | Obyek Akuisisi | Nama Tokoh |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017 | Tokoh keris | Mbah Djiwodiharjo |
| 2. | 2017 | Pelukis | Ki Joko Pekik |
| 3. | 2018 | Tokoh dalang | Ki Timbul Hadiprayitno |
| 4. | 2018 | Arsip event tradisional Gerbang Madu Srimulyo Piyungan | - |
| 5. | 2019 | Tokoh batik “Jogo Pertiwi” | - |
| 6. | 2020 | Tokoh “seniman dagelan | Ki Ngabdul |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan akuisisi sebanyak 6 arsip.

### c. Penyimpanan dan Pengelolaan Arsip

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi acuan dalam pengelolaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyimpan dan mengelola arsip sebanyak 4.427 penomoran arsip, secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 162 Jumlah Arsip yang Disimpan dan Dikelola pada Tahun 2020

| No | Jenis Arsip | Sudah dibuat daftar arsip/ temubalik | Belum dibuat daftar arsip/ temubalik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsip Aktif | 359 | 101 | 460 |
| 2. | Arsip Inaktif | 872 | 339 | 1211 |
| 3. | Arsip Statis | 937 | 384 | 1321 |
| 4 | Arsip yang Dialih mediakan | 1346 | 89 | 1435 |
| | Jumlah Total | 3514 | 913 | 4427 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa arsip aktif yang sudah dibuatkan daftar arsip temu balik sejumlah 359 arsip (78,04 %), Arsip in aktif sebanyak 872 arsip (72 %), Arsip statis sebanyak 937 arsip (70,93 %), dan Arsip yang di alih mediakan ada sebanyak 1346 arsip (93,73 %). Total arsip, yang disimpan dan dikelola pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.427 nomor arsip.

### d. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kearsipan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 163 Indikator Kinerja Utama BidangKearsipan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase OPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik (%) | 27 | 33 | 46,2 | 52 | 64,8 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021.

Dari tabel di atas diketahui bahwa semakin banyak perangkat daerah mampu menyelenggarakan kearsipan sesuai standar. Dari 54 perangkat daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak 27% perangkat daerah telah menyelenggarakan kearsipan sesuai standard dan pada tahun 2020 menjadi 35 perangkat daerah atau sebanyak 64,8%.

### 2.3.2. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

### a. Produksi Perikanan Budidaya

Terdapat 7 jenis ikan utama yang dibudidayakan di Kabupaten Bantul, yaitu gurami, nila, lele, bawal, patin, mas dan udang vanamei. Lele, nila dan gurami merupakan jenis ikan yang sangat diminati untuk dibudidayakan.

Tabel 2 164 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Komoditas | Produksi (Kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020** |
| 1 | Gurami | 1.860.867 | 2.028.830 | 2.164.370 | 1.723.948 | 1.672.601 |
| 2 | Nila | 1.924.565 | 2.114.000 | 2.567.437 | 2.618.329 | 2.482.902 |
| 3 | Lele | 6.738.202 | 7.094.430 | 7.028.122 | 7.425.503 | 7.498.039 |
| 4 | Bawal | 258.883 | 282.250 | 179.914 | 218.661 | 236.653 |
| 5 | Patin | 40.150 | 29.370 | 21.421 | 36.828 | 103.535 |
| 6 | Mas | 34.018 | 37.450 | 37.444 | 42.888 | 35.876 |
| 7 | Udang Vanamei | 507.038 | 440.890 | 292.292 | 374.440 | 599.444 |
| **JUMLAH** | | **11.363.724** | **12.027.236** | **12.291.000** | **12.440.597** | **12.629.050**** |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 1,51 % atau 188.453 kg dari 12.440.597 kg pada tahun 2019 menjadi 12.629.050 kg pada tahun 2020. Produksi pada 6 jenis ikan mengalami peningkatan dan didominasi lele. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebarnya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik. Kenaikan produksi ini disebabkan adanya penerapan teknologi baru di masyarakat yaitu teknologi Matlair (hemat lahan dan air), berupa kolam bulat dengan *inlet outlet* dan aerasi serta manajemen air secara intensif sehingga dapat meningkatkan padat tebar ikan lele sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Penurunan produksi ikan budidaya terjadi pada gurami, karena langkanya ketersediaan bibit gurami dan adanya penyakit ikan yang menyebabkan kematian gurami.

Pelaku usaha budidaya ikan di Kabupaten Bantul sebagian besar skala rumah tangga biasa disebut sebagai Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya. Pada tahun 2020 terdapat penambahan

RTP. Penambahan RTP budidaya ini terutama pada budidaya lele. Adanya teknologi Matlair menjadi daya tarik tersendiri karena mudah dan tidak memerlukan tempat yang luas, dapat diusahakan di pekarangan.

Tabel 2 165 Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | RTP Budidaya (unit) |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 5.176 |
| 2 | 2017 | 5.176 |
| 3 | 2018 | 5.176 |
| 4 | 2019 | 5.216 |
| 5 | 2020 | 5.416 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pengembangan budidaya perikanan didukung dengan pengembangan benih ikan melalui Balai Budidaya Ikan (BBI) yang berlokasi di Barongan, Sanden, Gesikan, Krapyak dan Pundong.

Tabel 2 166 Produksi Benih Ikan dari BBI di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Produksi Benih Ikan (ekor) |
|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2.600.854 |
| 2 | 2017 | 3.378.975 |
| 3 | 2018 | 4.629.118 |
| 4 | 2019 | 4.530.470 |
| 5 | 2020 | 4.118.504 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan di atas pada tahun 2020 diproduksi 4,11 juta ekor benih ikan dari BBI. Jika sandingkan dengan produksi perikanan budidaya (II.3-141) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 produksi ikan khususnya gurami, nila dan lele berkisar 10 juta s.d 11 juta kg. Artinya BBI belum mampu memenuhi kebutuhan benih dan kekurangan benih ini dipenuhi dari Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi benih berkualitas pada UPR, antara lain dengan memberikan bantuan induk gurami, lele, nila, dan sarana prasarana pembesaran ikan maupun perbenihan ikan. Selain itu juga

dilaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan serta pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya baik pembesaran maupun pembenihan ikan.

**b. Produksi Perikanan Tangkap**

Kabupaten Bantul memiliki pantai sepanjang 13,5 km dan terdapat usaha perikanan tangkap yang beraktifitas pada 5 unit TPI yaitu TPI Depok, TPI Ngepet, TPI Patihan, TPI Kuwaru dan TPI Ngentak.

Tabel 2 167 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | Jumlah (ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Produksi tangkap laut | 234,30 | 624,75 | 473,01 | 497,77 | 470,14 |
| 2 | Produksi tangkap perairan umum | 282,20 | 260,60 | 295,43 | 305,08 | 354,73 |
| Jumlah | | 516,50 | 885,35 | 768,44 | 802,85 | 824,87 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi ikan tangkap laut dibanding periode tahun sebelumnya yaitu sebesar -27,63 ton atau -5,5%. Sedangkan produksi tangkap perairan umum mengalami peningkatan 49,65 ton atau 16,2%. Walaupun terjadi penurunan produksi ikan tangkap laut, namun jenis ikan tangkap laut yang ada di Bantul tergolong dalam ikan ekonomis penting, antara lain ikan bawal dan ikan layur.

Peningkatan produksi ikan di perairan umum didukung program restocking ikan yang pada akhirnya meningkatkan produksi ikan tangkap perairan umum.

**c. Potensi Pengembangan Produksi Garam**

Pantai selatan Bantul selain kaya dengan potensi ikan, ternyata menyimpan kekayaaan alam yang bisa dijadikan komoditas unggulan salah satunya produksi garam kristal, dengan memanfaatkan air laut yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi dapat dikembangkan usaha produksi garam. Kegiatan produksi

garam di Bantul berawal dari pelatihan dan bantuan peralatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019.

Produksi garam baru terealisasi pada semester kedua tahun 2020, sejumlah 4.400 kg, dengan luas tambak garam 240 $m^2$. Lokasi produksi garam berada di Pantai Pandansari Wonoroto, Gadingsari, Sanden. Pada saat ini produksi garam berhenti karena peralatan mengalami rusak. Kegiatan memproduksi garam hanya menjadi usaha sampingan selain mengurus lahan dan sebagai nelayan.

**d. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 168 Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Perikanan (Ton) | 12.191,22 | 12.912,57 | 13.059,44 | 13.243,45 | 13.453,92 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

### 2.3.2.2. Pariwisata

**a. Kunjungan Wisatawan**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi sektor ini sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul. Meningkatnya jumlah wisatawan ke Kabupaten Bantul akan meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Jumlah wisatawan dan PAD sektor pariwisata disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 169 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Jumlah Wisatawan (Orang) | Jumlah PAD (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | 2.800.800 | 12.739.875.250,00 |
| 2. | 2017 | 3.711.384 | 17.090.253.000,00 |
| 3. | 2018 | 4.204.422 | 29.066.376.750,00 |
| 4. | 2019 | 5.166.615 | 31.756.578.250,00 |
| 5. | 2020 | 2.348.313 | 16.954.700.250,00 |

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mencapai 2.348.313. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap PAD 2020 mencapai Rp16.954.700.250,00. Pembangunan sektor pariwisata didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut di atas merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata.

Tabel 2 170 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Jenis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Daya Tarik Wisata** | | | | | | | |
| 1 | Alam | 20 | 20 | 25 | 32 | 55 | Unit | Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir |
| 2 | Buatan | 54 | 59 | 59 | 84 | 129 | Unit | Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Kalurahan Kalurahan Wisata |
| **B.** | **Usaha Pariwisata** | | | | | | | |
| 1 | Hotel bintang | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Unit | Sudah mempunyai ijin |
| 2 | Hotel non-bintang | 94 | 117 | 56 | 56 | 56 | Unit | Sudah mempunyai ijin |
| 3 | Restoran/rumah | 199 | 225 | 142 | 142 | 142 | Unit | |

| No. | Jenis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Daya Tarik Wisata** | | | | | | | |
| | makan | | | | | | | |
| 4 | Jasa perjalanan wisata | 25 | 67 | 33 | 33 | 33 | Unit | Sudah mempunyai ijin |

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Kunjungan wisata meningkat pada lima hari besar tertentu, yaitu padusan di obyek wisata Pantai Parangtritis; lebaran di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, obyek wisata Pantai Kuwaru, obyek wisata Goa Cerme, dan obyek wisata Goa Selarong; malam satu sura di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru; dan malam tahun baru di obyek wisata Pantai Parangtritis, obyek wisata Pantai Samas, obyek wisata Pantai Goa Cemara, obyek wisata Pantai Pandansimo, dan obyek wisata Pantai Kuwaru.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan berbagai macam *event* sebagai berikut:

Tabel 2 171 Data *Even*t Tahun 2019

| No. | Jenis Event |
|---|---|
| 1 | Festival Makanan Tradisional |
| 2 | Festival Ingkung |
| 3 | Festival Mie |
| 4 | Festival Lampion |
| 5 | Festival Fashion Street |
| 6 | Festival Dayung |
| 7 | Festival Jogja Air Show (JAS) |
| 8 | Festival Malam 1 Syuro |
| 9 | Festival Malam 15 Syuro |
| 10 | Pentas Jathilan |
| 11 | Pentas Campursari |
| 12 | Pentas Koes Plus |
| 13 | Pentas Akhir Tahun |
| 14 | Pentas Aktraksi Wisata Parangtritis |
| 15 | The Harmony Nature dan Culture Orchestra |
| 16 | Syimphoni Orkestra |
| 17 | Surving Kompetisi |

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Namun masih ada ketimpangan jumlah pengunjung yang dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 172 Jumlah Wisatawan Per Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Nama Destinasi Wisata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantai Parangtritis | 2.229.125 | 2.996.204 | 2.895.187 | 2.808.134 | 1.457.400 |
| Pantai Samas | 247.293 | 668.740 | 730.875 | 539.073 | 237.150 |
| Goa Cemara | 84.687 | | | | |
| Pandansimo | 140.050 | | | | |
| Kwaru | 49.307 | | | | |
| Goa Selarong | 36.818 | 36.652 | 37.847 | 38.700 | 20.130 |
| Goa Cerme | 13.520 | 9.788 | 7.924 | 6.828 | 3.403 |

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, mulai tahun 2017 untuk masuk obyek wisata Pantai Samas, Goa Cemara, Patehan, Kwaru, Pandansimo Baru dan Pandansimo dikenakan satu kali retribusi. Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui terdapat ketimpangan kunjungan wisatawan yang signifikan antara Pantai Parangtritis dan pantai lainnya. Kunjungan wisatawan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan misalnya di Pantai Parangtriris berkurang 50,06% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2 173 Desa Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Nama Desa Wisata | Alamat | Potensi Wisata | Jenis Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wukirsari | Wukirsari, Imogiri | Batik pewarna alami | Maju |
| 2 | Kakilangit | Mangunan, Dlingo | Alam, Kerajinan, Kuliner | Maju |
| 3 | Kampungsantan | Guwosari, Pajangan | Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung | Maju |
| 4 | Krebet | Sendangsari, Pajangan | Kerajinan Batik Kayu | Maju |
| 5 | Tembi | Timbulharjo, Sewon | Kerajinan, Outbond | Maju |
| 6 | Karangtengah | Karangtengah, imogiri | Alam, Kerajinan | Maju |
| 7 | TTSA | Mangunan, Dlingo | Alam, Budaya, Kerajinan | Maju |
| 8 | Kebonagung | Kebonagung, | Wisata Pendidikan | Maju |

| No | Nama Desa Wisata | Alamat | Potensi Wisata | Jenis Kategori |
|---|---|---|---|---|
| | | Imogiri | Pertanian | |
| 9 | Manding | Sabdodadi, Bantul | Sentra Kerajinan Kulit | Maju |
| 10 | Candran | Kebonagung, Imogiri | Museum tani, Kesenian | Maju |
| 11 | Lopati | Trimurti, Srandakan | Kuliner, Kerajinan | Berkembang |
| 12 | Karangasem | Muntuk, Dlingo | Alam, Kerajinan | Berkembang |
| 13 | Jipangan | Bangunjiwo, Kasihan | Budaya, Kerajinan | Berkembang |
| 14 | Kiringan | Canden, Jetis | Sentra Jamu Tradisional | Berkembang |
| 15 | Puton | Trimulyo, Jetis | Alam | Berkembang |
| 16 | Kalakijo | Guwosari, Pajangan | Budaya, Kuliner Ingkung | Embrio |
| 17 | Mangrove | Tirtohargo, Kretek | Alam, Konservasi Mangrove | Embrio |
| 18 | Laguna Depok | Parangtritis, Kretek | Outbond, Kuliner | Embrio |
| 19 | Ngringinan | Palbapang, bantul | Museum, Kuliner | Embrio |
| 20 | Mangir | Sendangsari, Pajangan | Wisata Sejarah Mataram, Kuliner | Embrio |
| 21 | Trimulyo | Trimulyo, Jetis | Cagar Budaya, Batik | Embrio |
| 22 | Jagalan | Jagalan, Banguntapan | Cagar Budaya, Kuliner | Embrio |
| 23 | Kampung Surocolo | Seloharjo, Pundong | Cagar Budaya, Budaya | Embrio |
| 24 | Kregan Kampung Gurami | Tirtomulyo, Kretek | Pertanian, Perikanan | Embrio |
| 25 | Juron | Pendowoharjo, Sewon | Kerajinan | Embrio |
| 26 | Ngembel Mbeji | Sendangsari, Pajangan | Alam, Budaya | Embrio |
| 27 | Gunung Cilik | Muntuk, Dlingo | Alam, Kerajinan, Budaya | Embrio |
| 28 | Bendo | Wukirsari, Imogiri | Alam, Kerajinan Genteng Tradisional | Embrio |
| 29 | Kajigelem | Bangunjiwo, Kasihan | Budaya, Gerabah | Embrio |
| 30 | Songgo Langit | Mangunan, Dlingo | Alam, Budaya, Kerajinan | Embrio |
| 31 | Goa Gajah (Lemahbang) | Mangunan, Dlingo | Alam, Goa Gajah | Embrio |
| 32 | Banyu Nibo Rejosari | Terong, Dlingo | Pertanian, Alam | Embrio |
| 33 | Guwosari Selarong | Guwosari, Pajangan | Cagar Budaya, Kerajinan | Embrio |
| 34 | Gilangharjo | Gilangharjo, Pandak | Alam, Budaya | Embrio |
| 35 | Goa Cemara | Gadingsari, Sanden | Alam, Outbond, Konservasi Penyu | Embrio |
| 36 | Pucungrejo | Wukirsari, Imogiri | Kerajinan Kulit | Embrio |

| No | Nama Desa Wisata | Alamat | Potensi Wisata | Jenis Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Imogiri | Imogiri | Budaya | Embrio |
| 38 | Srikemenut (wunut) | Sriharjo, Imogiri | Alam, Budaya | Embrio |
| 39 | Panjangrejo | Panjangrejo, Pundong | Alam, Gerabah | Embrio |
| 40 | Dewa Batu | Trimulyo, Jetis | Alam, Budaya | Embrio |
| 41 | Pandansari | Gadingsari, Sanden | Alam, Perkebunan Buah Naga | Embrio |
| 42 | Kalibuntung | Srihardono, Pundong | Out Bond Pendidikan | Embrio |
| 43 | Mulyodadi | Mulyodadi, Bambanglipuro | Kiliner, Seni Budaya | Embrio |

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

Pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Bantul perlu untuk terus ditingkatkan, terutama di Kawasan Pantai Selatan, sehingga kunjungan wisata tidak hanya terfokus di Pantai Parangtritis. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan dapat dijadikan peluang pengembangan destinasi wisata dengan tetap memperhatikan ciri khas Kabupaten Bantul.

**b. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pariwisata Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 174 Indikator Kinerja Utama Bidang Pariwisata Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) | 2.800.800 | 3.711.384 | 4.204.422 | 5.166.615 | 2.348.313 |
| Lama Tinggal Wisatawan (Hari) | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,56 |

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021.

### 2.3.2.3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. Sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB

meskipun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian pertumbuhannya relatif lebih cepat.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bantul sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Data Kelompok tani Kabupaten Bantul kurang lebih 850 kelompok tani, 1250 kelompok peternak, dan 500 kelompok perikanan.

### a. Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan utama di Kabupaten Bantul adalah padi, jagung, kacang tanah dan kacang kedelai.

Tabel 2 175 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Komoditas | | Tahun | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | | |
| 1 | Padi Sawah | | | | | | |
| | Luas Panen | 29.944,00 | 30.376,40 | 31.182,30 | 29.524 | 30.077 | ha |
| | Produktivitas (GKG) | 61,11 | 62,60 | 60,06 | 63,56 | 63,29 | ku/ha |
| | Produksi (GKG ) | 183.980,00 | 190.144,00 | 187.280,89 | 187.655 | 190.357 | ton |
| | Produksi beras | 116.275,00 | 119.790,67 | 119.899,86 | 120.099 | 121.867 | ton |
| | | | | | | | |
| 2 | Jagung | | | | | | |
| | Luas Panen | 3.647,00 | 3.283,00 | 3.565,10 | 4.934 | 3.452 | ha |
| | Produktivitas | 69,63 | 73,78 | 73,17 | 70,74 | 100,18 | ku/ha |
| | Produksi (pipilan kering) | 25.394,06 | 24.221,97 | 26.085,84 | 34.903 | 34.583 | ton |
| | | | | | | | |
| 3 | Kedelai | | | | | | |
| | Luas Panen | 980,40 | 969,00 | 1.213,60 | 909 | 616 | ha |
| | Produktivitas | 12,87 | 13,67 | 15,52 | 15,90 | 17,63 | ku/ha |
| | Produksi (wose kering) | 1.261,77 | 1.324,62 | 1.883,51 | 1.445 | 1.086 | ton |
| | | | | | | | |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi padi sebesar 1,21 % atau naik sebesar 2.275 ton dibandingkan tahun 2019. Dari produksi padi sebesar 188.089 ton gabah kering giling (GKG) pada

tahun 2019 menjadi 190.364 ton GKG pada tahun 2020. Peningkatan produksi padi tahun 2020 ini disebabkan kondisi iklim yang kondusif (curah hujan normal), distribusi pupuk subsidi lancar dan bantuan benih yang tepat waktu dengan mutu baik. Selain itu, organisme pengganggu tanaman (OPT) terkendali dengan adanya gerakan-gerakan pengendalian (Gerdal) diberbagai kelompok seluruh Kabupaten Bantul. Peningkatan produksi padi tersebut juga karena dukungan pemerintah berupa bantuan 50.000 kg benih untuk 206 kelompok tani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 2000 ha.

Produksi jagung pada tahun 2020 adalah 34.583 ton sedangkan tahun 2019 adalah 34.903 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami penurunan yaitu sebesar 0,9 % atau turun sebesar 320 ton dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi jagung terjadi akibat musim tanam jagung yang mundur satu bulan, menyebabkan terjadinya serangan penggerek batang (*Spodotera litura*/exigua) pada fase vegetatif. Ditambah lagi dengan mundurnya pemupukan karena mulai bulan September diterapkan Kartu Tani sehingga petani kesulitan mengakses kebutuhan pupuk. Di sisi lain, produktivitas jagung meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 30,06 ku/ha pada tahun 2020. Peningkatan produktivitas tersebut disebabkan oleh penggunaan kualitas unggul benih hibrida bantuan pemerintah dan budidaya yang lebih intensif. Bantuan berupa benih jagung dari pemerintah ini sebesar 15.000 kg diperuntukan kepada 134 kelompok petani di Kabupaten Bantul dengan luasan lahan 1000 ha.

Produksi kedelai, pada tahun 2020 ini juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunanan produksi kedelai mencapai 24,84% atau 359 ton. Produksi kedelai menurun karena penurunan luas panen yang disebabkan oleh penurunan luas tanam. Luas tanam yang turun disebabkan oleh minat petani yang rendah untuk budidaya kedelai, hal tersebut dikarenakan

harga jual panen yang rendah hasil produksi kurang diminati pengrajin tahu dan tempe, penanganan panen dan pasca panen yang relatif sulit. Disisi lain, produktivitas kedelai mengalami peningkatan sebesar 1,73 % pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Peningkatan produktivitas ini juga berupa dukungan pemerintah berupa bantuan benih dan pupuk. Bantuan pupuk yang diberikan berupa pupuk hayati sebesar 2.100 liter, rhizobium sebesar 175.000 gram, serta herbisida sebesar 2.100 liter yang diberikan kepada 113 kelompok tani.

**b. Produksi Tanaman Hortikultura**

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman sayuran yang banyak ditanam di Kabupaten Bantul antara lain bawang merah, cabai merah, dan pisang.

Tabel 2 176 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Komoditas /uraian | Tahun | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Bawang Merah | | | | | | |
| | Luas Panen | 765 | 830 | 835 | 893 | 860 | Ha |
| | Produksi | 7.859,40 | 7.910,2 | 7.979,8 | 9.427 | 9.487,6 | Ton |
| | Produktivitas | 10,29 | 9,53 | 9,61 | 10,56 | 11,03 | ton/ha |
| | | | | | | | |
| 2 | Cabai Merah | | | | | | ket |
| | Luas Panen | 116 | 366 | 402 | 298 | 561,5 | Ha |
| | Produksi | 409,25 | 1.497,6 | 1.925,6 | 1.166,4 | 1.667,7 | Ton |
| | Produktivitas | 3,52 | 4,09 | 4,79 | 3,91 | 2,97 | Ton/Ha |
| | | | | | | | |
| 3 | Pisang | | | | | | Ket |
| | Produksi | 6.095 | 6.095,9 | 5.902,90 | 6.727,8 | 5.109,00 | Ton |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 60 ton. Kenaikan produksi ini terjadi karena terdapat peningkatan luas tanam 58 ha dan peningkatan produktifitas sebesar 9,9% dikarenakan adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat.

Produksi cabai merah mengalami penurunan dari 1.752,6 ton pada tahun 2018 menjadi 1.166,41 ton pada tahun 2019 dan

kemabli meningkat menjadi 1.6677,7 ton di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan penurunan luas panen seluas 104 ha dan penurunan produktifitas sebesar 18,37%. Kemarau panjang menyebabkan ketersediaan air menjadi terbatas ini, petani mengurangi luas tanam cabenya. Tanaman cabe butuh air yang cukup agar pertumbuhanya optimum.

Pisang juga mengalami peningkatan produksi sebesar 13.97 % dari produksi sebesar 5.902,90 ton pada tahun 2018 menjadi 6.727,8 ton pada tahun 2019. Penurunan pisang ini dipengaruhi oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi.

### c. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul antara lain: tembakau, mete, tebu, kelapa dan kakao.

Tabel 2 177 Produktivitas Komoditas Perkebunan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Komoditas/ Uraian | Tahun | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Tembakau Rakyat | | | | | | |
| | Luas Panen | 172,00 | 316,00 | 305,00 | 175 | 174 | ha |
| | Produksi | 1.023,50 | 3.044 | 2.893,00 | 1.321,3 | 1.341,5 | ku |
| | | | | | | | (rajang kering) |
| | Produktivitas | 5,95 | 9,63 | 9,49 | 7,64 | 7,7 | ku/ha |
| | | | | | | | (rajang kering) |
| | | | | | | | |
| 2 | Tebu | | | | | | |
| | Luas Panen | 1.174,32 | 1.207,69 | 1.022,89 | 1.042,67 | 1.096 | Ha |
| | Produksi | 41.021,95 | 29.186,75 | 38.430,00 | 39.971,17 | 43.881,75 | ku (hablur) |
| | Produktivitas | 34,93 | 26,76 | 37,57 | 38,33 | 40,04 | ku/ha (hablur) |
| | | | | | | | |
| 3 | Kelapa | | | | | | |
| | Luas Panen | 7.064,07 | 10.464,73 | 7.050,03 | 7.107,81 | 7.120 | Ha |
| | Produksi | 91.342,50 | 112.677 | 103.931,80 | 104.794,70 | 105.836,9 | ku (kopra) |
| | Produktivitas | 12,93 | 15,87 | 14,74 | 14,74 | 14,9 | ku/ha (kopra) |
| | | | | | | | |
| 4 | Kakao | | | | | | |
| | Luas Panen | N/A | N/A | 7,2 | 18,1 | 18,3 | Ha |
| | Produksi | N/A | N/A | 28,34 | 65,18 | 162 | Ku |
| | Produktivitas | N/A | N/A | 3,94 | 15,16 | 8,9 | Ku/Ha |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Pada tahun 2020 produksi tembakau mengalami peningkatan sebesar 2,28 % atau 30,2 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 1,18 ku/ha dibanding tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen pada tahun 2020 sebanyak 33 Ha.

Produksi kelapa juga mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 173 ku. Meningkatnya produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,17 ha. Selain itu, jumlah kelapa yang produktif berbuah meningkat pada tahun 2020.

Produksi tebu tahun 2020 meningkat cukup signifikan sebesar 9,78 % atau 3.910,31 ku dibanding tahun 2019. Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga produksi tebu juga meningkat. Selain itu, cuaca cukup kondusif untuk budidaya tebu pada tahun 2020.

Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan baru di Kabupaten Bantul yang mulai dibudidayakan sejak tahun 2016. Produksi Kakao mengalami peningkatan dari 153,69 kwintal menjadi 162 kwintal atau mengalami peningkatan sebesar 5,1 %. Hal ini disebabkan karena bertambahnya luas panen dari 7,1 Ha pada tahun 2020 menjadi 18,3 Ha. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tanaman kakao yang mulai produktif berbuah.

**d. Produksi Komoditas Peternakan**

Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak Kecil, dan unggas.

Tabel 2 178 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Jenis ternak | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapi Potong | 56.799 | 56.139 | 58.895 | 62.582 | 66.098 | Ekor |
| 2 | Sapi Perah | 284 | 80 | 72 | 68 | 68 | Ekor |
| 3 | Kerbau | 544 | 248 | 206 | 218 | 217 | Ekor |
| 4 | Kuda | 1.977 | 1.258 | 1564 | 1.631 | 1.583 | Ekor |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi sapi potong tahun 2020 mengalami kenaikan 5,61% atau sebanyak 3.516 ekor dibanding tahun 2019. Peningkatan jumlah populasi sapi potong tidak terlepas dari keberhasilan program UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting) yang ada di tahun 2018-2019. Jumlah ini diharapkan masih akan terus meningkat mengingat masih berlangsungnya program tersebut.

Sapi perah mengalami penurunan populasi, sedangkan kerbau dan kuda mengalami sedikit peningkatan populasi. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya khusus dalam peningkatan populasi jenis ternak ini.

Tabel 2 179 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Jenis Ternak | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kambing | 108.199 | 87.195 | 94.332 | 95.467 | 95.104 | Ekor |
| 2 | Domba | 83.790 | 74.955 | 77.197 | 74.441 | 74.577 | Ekor |
| 3 | Babi | 5.329 | 3.544 | 5.024 | 5.136 | 4.512 | Ekor |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi ternak kecil di Kabupaten Bantul didominasi oleh ternak kambing. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi kambing sebesar 0,4%, hal ini dikarenakan adanya program Inseminasi Buatan Kambing/Domba bersubsidi. Populasi domba mengalami kenaikan sebesar 0,2%.

Tabel 2 180 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Unggas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayam buras | 1.019.461 | 792.862 | 829.916 | 966.371 | 975.546 | Ekor |
| 2 | Ayam ras petelur | 821.587 | 712.307 | 759.199 | 765.137 | 765.126 | Ekor |
| 3 | Ayam ras pedaging | 1.068.221 | 841.103 | 1.093.222 | 1.128.489 | 1.127.715 | Ekor |
| 4 | Itik | 222.265 | 163.528 | 184.978 | 201.805 | 202.180 | Ekor |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Populasi ternak unggas didominasi oleh ayam ras pedaging. Secara umum pada tahun 2020 terjadi kenaikan populasi unggas. Peningkatan ini didukung oleh menurunnya kejadian penyakit

menular seperti Avian Influenza. Avian Influenza atau Flu burung adalah penyakit akibat virus influenza yang menjangkiti unggas. Penyakit ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat kematian unggas dalam jumlah besar.

Komoditas hasil peternakan utama yang berasal dari ternak besar, ternak Kecil dan unggas tersebut di atas, meliputi daging telur dan susu. Komoditas ini mempunyai nilai gizi tinggi sehingga kebutuhan akan komoditas ini selalu meningkat. Meningkatnya kebutuhan tentu seyogyanya diiringi dengan peningkatan ketersediaannya.

Tabel 2 181 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Komoditas | Tahun | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Daging | 14.742.55 | 14.751.00 | 14.855.72 | 15.088.31 | 15.228.52 | Kg |
| 2 | Telur | 8.072.166 | 7.184.368 | 7.329.945 | 7.789.187 | 7.782.977 | Kg |
| 3 | Susu | 365.127 | 184.777 | 102.484 | 80.541 | 82.625 | Kg |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

Kenaikan produksi daging pada tahun 2020 dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Bantul serta kenaikan pemotongan hewan qurban saat idul adha yaitu naik 0,9% dari tahun 2019. Produksi susu mengalami penurunan dari tahun 2019 yang disebabkan karena penurunan populasi sapi perah dan banyaknya sapi perah yang usianya semakin menua/sudah tidak produktif lagi.

**e. Jenis Penyakit Hewan Ternak**

Jenis penyakit hewan ternak pada tahun 2020 sebanyak 4.984 kasus menurun dari tahun 2019 sebesar 6.209 kasus, dari jenis penyakit hewan tersebut dapat diketahui adanya tiga kasus penyakit terbanyak yang secara berurutan disebabkan oleh cacing (Helminthosis), Avitaminosis, dan Scabies.

Tabel 2 182 Kasus Penyakit Hewan Ternak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Nama Penyakit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmithosis | 2.256 | 3.221 | 4.344 | 4.182 | 2.809 |
| 2 | Avitaminosis | 221 | 827 | 1.301 | 1.504 | 724 |
| 3 | Scabies | 173 | 412 | 564 | 723 | 1.451 |
| | Total | 2.650 | 4.460 | 6.209 | 6.409 | 4.984 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

### f. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama bidang Pertanian Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 183 Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan | 9,94 | 0,113 | 0,13 | 1,57 | 0,71 |
| Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura | 14,09 | 7,94 | 0,85 | 3,83 | 2,91 |
| Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan | 7,8 | 0,17 | 0,24 | 1,09 | 2,80 |
| Pertumbuhan Produksi Daging | 4,24 | 20,52 | 0,71 | 0,57 | 0,93 |

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

## 2.3.2.4. Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintah daerah kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi. Kewenangan kab/kota dalam urusan kehutanan berupa pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kabupaten/kota. Kabupaten Bantul tidak memiliki TAHURA sehingga urusan kehutanan tidak dilaksanakan di kabupaten Bantul.

### 2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan ESDM oleh Kabupaten ini hanya terbatas pada sub urusan energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Dalam upaya menggali potensi sumber daya mineral di Kabupaten Bantul telah dilakukan kajian geothermal di Parang Wedang Kapanewon Kretek, hasil kajian menunjukkan bahwa energi panas bumi di Parang Wedang adalah 40°C, dan belum dapat dijadikan alternatif energi dikarenakan standar panas minimal energi panas bumi seharusnya 90°C.

### 2.3.2.6. Perdagangan

**a. Pasar Rakyat**

Penyebutan pasar rakyat sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tipe Kelas Pasar.

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Bantul terdapat 33 pasar dengan jumlah pedagang yang memiliki kios, los dan arahan sebanyak 7.962 pedagang. Pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sebesar 11,52% dari jumlah pedagang yang ada.

Tabel 2 184 Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul

| No | Nama Pasar | Tipe Pasar | Operasional Pasar | Jumlah Pedagang | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kios | Los dan Arahan | Kebutuhan Pokok |
| 1 | Pasar Imogiri | A | Harian | 99 | 759 | 142 |
| 2 | Pasar Bantul | A | Harian | 185 | 525 | 114 |
| 3 | Pasar Piyungan | A | Harian | 84 | 641 | 78 |
| 4 | Pasar Niten | A | Harian | 119 | 450 | 94 |
| 5 | Pasar Klitikan Niten | B | Harian | - | 172 | - |
| 6 | Pasar Ngipik | B | Harian | 20 | 144 | 18 |
| 7 | Pasar Pundong | B | Harian | - | 82 | 51 |
| 8 | Pasar Celep | B | Harian | 17 | 139 | 4 |
| 9 | Pasar Gatak | B | Harian | - | 192 | 10 |
| 10 | Pasar Jodog | B | Harian | 23 | 118 | 15 |

| No | Nama Pasar | Tipe Pasar | Operasional Pasar | Jumlah Pedagang | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kios | Los dan Arahan | Kebutuhan Pokok |
| 11 | Pasar Barongan | B | Harian | 43 | 135 | 63 |
| 12 | Pasar Pijenan | B | Harian | 30 | 140 | 15 |
| 13 | Pasar Dlingo | B | 2x dalam 5 hari | 18 | 170 | 20 |
| 14 | Pasar Panasan | B | 4x dalam 5 hari | 24 | 171 | 28 |
| 15 | Pasar Pleret | B | 2x dalam 5 hari | 71 | 497 | 70 |
| 16 | Pasar Jejeran | B | 3x dalam 5 hari | 71 | 497 | 45 |
| 17 | Pasar Angkruksari | B | 4x dalam 5 hari | 46 | 498 | 56 |
| 18 | Pasar Turi | B | 1x dalam 5 hari | - | 432 | 27 |
| 19 | Pasar Sorobayan | B | 2x dalam 5 hari | 9 | 138 | 17 |
| 20 | Pasar Mangiran | B | 2x dalam 5 hari | - | 252 | 19 |
| 21 | Pasar Gumulan | B | 1x dalam 5 hari | - | 269 | 3 |
| 22 | Pasar Sungapan | B | 2x dalam 5 hari | 6 | 88 | 3 |
| 23 | Pasar Semampir | B | 2x dalam 5 hari | 12 | 233 | 19 |
| 24 | Pasar Hewan Pandak | B | 2x dalam 5 hari | - | 13 | - |
| 25 | Pasar Hewan Imogiri | B | 1x dalam 5 hari | - | - | - |
| 26 | Pasar Janten | C | Harian | - | 52 | - |
| 27 | Pasar Grogol | C | Harian | - | 29 | 4 |
| 28 | Pasar Jragan | C | 3x dalam 5 hari | - | 43 | 1 |
| 29 | Pasar Koripan | C | 2x dalam 5 hari | - | 53 | - |
| 30 | Pasar Bendosari | D | 2x dalam 5 hari | - | 23 | - |
| 31 | Pasar Sangkeh | D | 2x dalam 5 hari | - | 4 | 1 |
| 32 | Pasar Unggas Bantul | - | 1x dalam 5 hari | 12 | 56 | - |
| 33 | Pasar Seni Gabusan | - | Harian | 58 | - | - |

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021

Data jumlah pedagang pasar yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebanyak 6.718 pedagang, dari jumlah tersebut terdapat beberapa pedagang yang memiliki kepemilikan ganda baik itu kios maupun los, dalam satu lokasi pasar maupun dalam lokasi pasar yang berbeda. Selain itu, terdapat beberapa pasar yang pedagangnya sama dan berpindah sesuai dengan hari pasaran / hari operasional pasar seperti Pasar Angkruksari - Pasar Turi, Pasar

Pleret - Pasar Jejeran, dan Pasar Sorobayan - Pasar Gumulan - Pasar Mangiran. Dinas Perdagangan telah melakukan validasi data pedagang berdasarkan NIK sebanyak 6.152 pedagang, sedangkan sisanya masih dalam proses input.

**b. Ekspor Bersih Perdagangan**

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 185 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volume ekspor | 9.642.793,22 | 10.168.084,06 | 15.828.755,06 | 6.645.724,59 | 15.841.100 |
| 2 | Nilai ekspor (US$) | 73.971.386,12 | 79.200.365,60 | 206.555.454 | 151.040.882,38 | 122.334.077,34 |
| 3 | Jumlah Negara | 42 | 77 | 83 | 79 | 77 |
| 4 | Macam komoditi | 36 | 34 | 43 | 39 | 49 |

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021, diolah

Nilai ekspor Kabupaten Bantul tahun 2020 mencapai US$122.334.077,34 turun US$21.600.000 dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit, wigs, dan gula kelapa, sedangkan negara tujuan ekpor utama adalah Jerman, Amerika Selatan, Australia, Inggris, dan Belanda

Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menurun sebesar 4,2 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 186 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

| No | Tahun | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |
|---|---|---|
| 1. | 2016 | 1.401,61 |
| 2. | 2017 | 1.482,8 |
| 3. | 2018 | 1.565,67 |
| 4. | 2019 | 1.645,73 |
| 5. | 2020 | 1.576,54 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

**c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama Perdagangan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 187 Indikator Kinerja Utama Bidang Perdagangan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekspor | 7 | 7 | 13,96 | 14,61 | -1,3 |
| Jumlah Pasar Tipe A | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan | 6,54 | 5,79 | 5,59 | 5,11 | -4,2 |

Sumber: Dinas Perdagangan, 2021.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan menurun sangat drastis. Hal tersebut diakibatkan karena dampak dari Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada sektor ekonomi, termasuk menurunnya jumlah permintaan ekspor barang ke luar negeri maupun perdagangan di dalam negeri.

## 2.3.2.7. Perindustrian

**a. Pertumbuhan Industri**

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Bantul setelah sektor pertanian. Kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Bantul diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing industri Kecil menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 188 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

| No | Sektor Industri | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja |
| 1. | Pangan | 8.754 | 29.019 | 9.095 | 29.783 | 9.320 | 30.785 | 9.712 | 31.267 | 9.824 | 31.375 |
| 2. | Sandang dan Kulit | 902 | 7.095 | 921 | 7.449 | 1.085 | 8.175 | 1.092 | 8.228 | 1.186 | 8.295 |

| No | Sektor Industri | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja | Jumlah Unit Usaha | Tenaga Kerja |
| 3. | Kerajinan Umum | 7.543 | 26.159 | 7.912 | 28.623 | 8.240 | 30.074 | 8.574 | 30.875 | 8.702 | 30.920 |
| 4. | Kimia dan Bahan Bangunan | 3.275 | 29.828 | 3.286 | 29.991 | 3.301 | 30.057 | 3.488 | 30.124 | 3.520 | 30.176 |
| 5. | Logam dan Jasa | 1.093 | 3.062 | 1.096 | 3.162 | 1.143 | 3.373 | 1.493 | 3.403 | 1.545 | 3.456 |
| **Jumlah** | | **21.567** | **95.164** | **22.310** | **99.008** | **23.089** | **102.464** | **24.359** | **103.897** | **24.777** | **104.222** |

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

Potensi IKM di Kabupaten Bantul sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645, tenaga kerja 99.920 orang, dan mampu memberikan kontribusi PDRB sebesar 15,17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3,47%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, terdapat Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bantul yaitu Kawasan Peruntukan Industri Piyungan (Lokasi Kalurahan Sitimulyo dan Kalurahan Srimulyo dengan luas 335,916 Hektar), Kawasan Peruntukan Industri Sedayu (Lokasi Kalurahan Argodadi dengan luas 207,34 Hektar), dan Kawasan Peruntukan Industri Pajangan (Lokasi Kalurahan Triwidadi dengan luas 71,51 Hektar). Kawasan Peruntukan Industri Piyungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 261 tahun 2015 ditetapkan sebagai Kawasan Industri yang berlokasi di Kalurahan Srimulyo dengan pengelola PT. Yogyakarta Isti Parama. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemda sudah menyiapkan dokumen (Masterplan dan FS), selain itu akan dibuat sistem informasi pengembangan industry dimana sistem informasi itu sudah berbasis bidang, termasuk nilai tanah dan lokasi peta bidangnya. Sistem ini diharapkan dapat membantu calon investor untuk menentukan atau memilih lokasi di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu Pajangan. Kemudian akan diprioritaskan untuk kemudahan pembuatan ijin untuk industri di lokasi KPI Sedayu Pajangan.

**b. Industri Kreatif**

Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), ada 16 Sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu aplikasi pengembangan game; arsitektur; Desain interior; Desain komunikasi visual; Desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Apabila sub sektor industri kreatif tersebut dapat dikembangkan melalui Program Produk Andalan Setempat (PAS) yang menjadi kebijakan prioritas kabupaten, pelaku usaha IKM pasti akan berkembang sesuai kebutuhan pasar. Capaian Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

Tabel 2 189 Cakupan Industri Kreatif di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Capaian Cakupan Industri Kreatif |
|---|---|---|
| 1. | 2016 | 39,50% |
| 2. | 2017 | 41,11% |
| 3. | 2018 | 42.90% |
| 4. | 2019 | 46,20% |
| 5 | 2020 | 46,20% |

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, 2021

**c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama Perindustrian di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 190 Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Industri | 2 | 3,4 | 3,49 | 3,5 | 1,8 |

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustian, 2021.

Pertumbuhan industri yang menurun pada tahun 2020 dari 3,5% menjadi 1,8% merupakan cakupan industri kreatif, dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga permintaan menurun, demikian juga pasokan bahan baku yang sulit diperoleh.

### 2.3.2.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pemerintah Pusat. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya kuota/jatah transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 191 Jumlah Transmigran di Kabupaten Bantul

| Tahun | Jumlah (KK) | Jumlah Jiwa |
|---|---|---|
| 2015 | 40 | 131 |
| 2016 | 50 | 150 |
| 2017 | 12 | 38 |
| 2018 | 28 | 94 |
| 2019 | 20 | 54 |
| 2020 | 20 | 54 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Jumlah KK transmigran pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah KK transmigran tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 50 KK dan 150 jiwa.

Jumlah KK transmigran pada tahun 2020 masih tetap sama dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 20 KK. Adapun lokasi tujuan penempatan transmigran sebagai berikut:

Tabel 2 192 Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020

| No. | Lokasi | Kuota (KK) |
|---|---|---|
| 1 | UPT Keladen Kecamatan Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur | 5 |
| 2 | UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat | 2 |

| No. | Lokasi | Kuota (KK) |
|---|---|---|
| 3 | UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan | 5 |
| 4 | UPT Bekkae SP 2 Kecamatan Bekkae Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan | 3 |
| 5 | UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulaesi Tenggara | 5 |
| | Jumlah | 20 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Adanya pandemi Covid 19 berdampak terhadap penempatan transmigran. Beberapa kegiatan penyuluhan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan karena menghindari kerumunan, selain itu pemberangkatan transmigran juga ditunda pada tahun 2021.

### 2.3.3. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

#### 2.3.3.1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

##### 2.3.3.1.1. Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas 10 Bagian.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut

Tabel 2 193 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Evaluasi Kinerja PD | 65 | 70 | 76,19 | 76,16 | N/A |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 78,78 | 87,57 | 88,70 | 86,97 | 88,03 |
| Nilai Evaluasi Kinerja | 3,4196 | 3,2641 | 3,4463* | 3,9815** | 3,4 |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | (Sangat Tinggi) | (Sangat Tinggi) | (Sangat Tinggi) | (Sangat Tinggi) | |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 73,66 (BB) | 77,90 (BB) | 81,39 (A) | 81,91 (A) | 80,92 |
| Persentase Belanja Pegawai | 55 | 52 | 43,46 | 47,37 | 43 |

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021.

### 2.3.3.1.2. Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka mendukung fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran, sekretariat Dewan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen, yaitu:

1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Bantul.
2) Integrasi program kerja DPRD dengan RPJM dan RKPD melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
3) Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Dewan yang telah diintegrasikan dengan program-program DPRD.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 194 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama | 94% | 94% | 100% | 82% | 100% |

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020 mencapai 100% dari target yang telah disesuaikan. Indikator kinerja Sekretariat DPRD mengalami perubahan target pada awal tahun. Hal ini sebagai dampak realokasi anggaran karena pandemi Covid-19 serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law sehingga beberapa Raperda perlu dilakukan penyesuaian.

### 2.3.3.2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.3.3.2.1. Perencanaan

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona, dan secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah DIY dan pemerintah pusat.

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berkualitas dan kompetitif baik dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas berbasis kinerja dan transparan memberi dampak

terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pembangunan secara komprehensif. Pengintegrasian perencanaan daerah dengan pengelolaan keuangan sampai dengan monev dan evaluasi kinerja dalam penerapan e-*Government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja utama bidang perencanaan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 195 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase rata-rata capaian sasaran daerah | NA | 94,35 | 105,46 | 107,31 | 98,77 |
| Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD | NA | 90 | 106,57 | 99,40 | 98,81 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021
Keterangan: Data "NA" pada 2016 disebabkan adanya perubahan IKU Bappeda.

### 2.3.3.2.2. Keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukan kinerja yang

semakian baik. Hal ini ditunjukkan dengan Persentase SILPA yang semakin kecil dari tahun ke tahun. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Proporsi Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2020 dikarenakan untuk Realisasi pendapatan dan Belanja yang berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.105.405.470.000,00 tidak dicatat dalam LRA TA 2020. Detail gambaran keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2 196 Gambaran Keuangan Kabupaten Bantul

| No | Bidang Urusan/ Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan | 1 (WTP) | 1 (WTP) | 1 (WTP) | 1 (WTP) | 1 (WTP) |
| 2 | Persentase SILPA terhadap APBD | 14,04% | 12,27% | 11,41% | 12,22% | 10,15% |
| 3 | Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana | - | - | - | - | - |
| 4 | Persentase belanja pendidikan (20%) | 38,95% | 31,92% | 31,11% | 30,20% | 27,09% |
| 5 | Persentase belanja kesehatan (10%) | 18,14% | 17,76% | 18,66% | 17,25% | 18,23% |
| 6 | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | 37,22% | 45,46% | 47,25% | 48,32% | 41,96%*) |
| | | 62,78% | 54,54% | 52,75% | 51,68% | 58,04%*) |
| 7 | Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan | 0,62% | 0,69% | 0,82% | 0,98% | 0,98% |
| 8 | Penetapan APBD | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat Waktu |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

*)Realisasi belanja termasuk belanja tidak Langsung yang berasal dari sumber Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN

dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;

2. Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas);
3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online, leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

### 2.3.3.2.3. Kepegawaian

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.

Data jumlah PNS di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Kabupaten Bantul semakin berkurang. Kondisi tersebut dikarenakan karena banyak PNS di Kabupaten Bantul yang memasuki masa purna tugas tetapi tidak diimbangi dengan rekruitmen PNS di Kabupaten Bantul. Hal ini dikarehakan karena proses rekruitmen PNS saat ini sangat tergantung dari persetujuan formasi dari Pemerintah Pusat.

Tabel 2 197 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah PNS Golongan I | | | Jumlah PNS Golongan II | | | Jumlah PNS Golongan III | | | Jumlah PNS Golongan IV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 2016 | 126 | 7 | 133 | 880 | 478 | 1358 | 2006 | 2781 | 4787 | 1801 | 2662 | 4463 |
| 2017 | 102 | 6 | 108 | 781 | 389 | 1170 | 1464 | 2290 | 3754 | 1311 | 2241 | 3552 |
| 2018 | 93 | 6 | 99 | 709 | 263 | 972 | 1456 | 2493 | 3949 | 1059 | 1939 | 2998 |

| Tahun | Jumlah PNS Golongan I | | | Jumlah PNS Golongan II | | | Jumlah PNS Golongan III | | | Jumlah PNS Golongan IV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 2019 | 86 | 5 | 91 | 664 | 360 | 1024 | 1446 | 2754 | 4200 | 932 | 1764 | 2696 |
| 2020 | 77 | 5 | 82 | 613 | 331 | 944 | 1297 | 2546 | 3843 | 824 | 1671 | 2495 |

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa pemenuhan kompetensi aparatur dan indeks kepuasan aparatur di Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul semakin mendukung bidang tugasnya.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 198 Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur | 84 | 89 | 89,03 | 90,14 | 92,38 |
| Nilai Indeks Kepuasan Aparatur | 73,55 | 81,32 | 82,44 | 87,24 | 88,33 |

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 2021

### 2.3.3.2.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau Litbang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi.

Di Kabupaten Bantul, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras

saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi sumber daya manusia.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah DIY maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan**.**

Menindaklanjuti *Roadmap* SIDa Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” (UPN) Yogyakarta dalam mengawali pengembangan indigofera sebagai tanaman pewarna batik alami, dan memberi pendampingan berupa *workshop* terkait (a) budidaya tanaman pewarna alami batik

(tanaman indigofera) dan (b) proses pembuatan pasta pewarna batik hingga proses pewarnaan batik menggunakan pasta indigofera.

Selain UPN Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Kerja sama ini tentang pengembangan industri dan kerajinan batik di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik, penerapan hasil penelitian dan pengembangan dan rekayasa teknologi, pengembangan Desain produk kerajinan dan batik, pelatihan teknis, penyediaan instruktur dan tenaga ahli, pemberian informasi dan layanan konsultasi, supervisi untuk mengembangkan IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Bantul.

Pengabdian kepada masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain: a) mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi, b) dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan, c) tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan. Terkait pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 199 Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian/Validitas/Survei oleh: | | | | | |
| | - Perguruan Tinggi | 4.381 | 3.463 | 3.310 | 2.453 | 152 |
| | - Lembaga Survei | 142 | 39 | 16 | 14 | 22 |
| 2 | Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat: | | | | | |
| | - Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) | 258 | 281 | 318 | 106 | 43 |
| Jumlah | | 4.781 | 3.783 | 3.644 | 2573 | 217 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

### 2.3.3.3 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

#### 2.3.3.3.1. Inspektorat Daerah

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar.

Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan

dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
(4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
(5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan-peraturan tersebut, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2 200 Target dan Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (THLP) Internal dan Eksternal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Uraian | Thn 2016 | | Thn 2017 | | Thn 2018 | | Thn 2019 | | Thn 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)Internal dan Eksternal | 89,5% | 90,50% | 90,00% | 91,78% | 90,50% | 90,49% | 91,00% | 91,73% | 91,50% | 91,5% |

Sumber : Inspektorat, 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Tahun 2020 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 82 personil. Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut

Tabel 2 201 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Jenis Jabatan | Jumlah | Kebutuhan | Kekurangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Struktural | | | |
| | Inspektur | 1 | 1 | 0 |
| | Sekretaris | 1 | 1 | 0 |
| | Inspektur Pembantu | 4 | 5 | 1 |
| | Kasubag | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Fungsional Tertentu | | | |
| | Auditor | 18 | 58 | 40 |
| | P2UPD | 10 | 48 | 38 |
| | Auditor Kepegawaian | 1 | 5 | 3 |
| **Jumlah** | | **39** | **121** | **82** |

Sumber: Inspektorat, 2021

Terkait dengan kompetensi tenaga fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah dilakukan pemetaan kompetensi terhadap pejabat fungsional yang ada. Kebutuhan kompetensi yang di butuhkan berdasarkan sasaran audit sejumlah 24 kompetensi yang harus didukung dengan 3 jenis diklat fungsional dan 21 jenis diklat substantif. Untuk 3 jenis diklat fungsional (JFT Pertama, JFT Muda, JFA Madya) 27 personil pejabat fungsional telah mengikuti semua, sedangkan untuk 21 jenis diklat substantif belum merata diikuti oleh pejabat fungsional dan dilakukan secara bertahap.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 202 Indikator Kinerja Pembangunan SPIP Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maturitas SPIP | Level 1 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
| | 1,92 | 2 | 3,075 | 3,18 | 3,075 |

Sumber: Inspektorat, 2021

### 2.3.3.4. Unsur Kewilayahan

#### 2.3.3.4.1. Kapanewon

Fungsi penunjang pemerintahan umum merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kapanewon. Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan

Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Panewu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kapanewon;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kalurahan;

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panewu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kapanewon.

Pencapaian indikator kinerja utama Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari data di tabel terlihat bahwa Pada Tahun 2020, kapanewon yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah Kapanewon Sanden (98,48) sedangan kapanewon yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kapanewon Sewon (90,99).

Tabel 2 203 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kapanewon Lingkup Kabupaten Bantul 2016-2020

| No | Kapanewon | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | Rerata IKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | Pundong | 85,1 | 96,9 | 97,1 | 90,6 | 93.74 | 91,55 |
| 2 | Sanden | 80,2 | 96,9 | 95,7 | 96,0 | 98.48 | 89,77 |
| 3 | Pleret | 81,9 | 96,6 | 96,8 | 89,7 | 95.82 | 89,00 |
| 4 | Kretek | 80,8 | 94,8 | 96,3 | 91,7 | 92.29 | 88,75 |
| 5 | Bambanglipuro | 77,8 | 97,1 | 97,4 | 90,2 | 95.73 | 88,22 |
| 6 | Piyungan | 80,2 | 93,8 | 95,6 | 91,6 | 93.67 | 88,08 |
| 7 | Dlingo | 77,6 | 95,1 | 95,2 | 91,3 | 95.96 | 88,00 |
| 8 | Imogiri | 80,0 | 89,8 | 97,2 | 91,2 | 92.15 | 87,64 |
| 9 | Bantul | 77,2 | 93,2 | 99,0 | 91,9 | 95.70 | 87,63 |
| 10 | Pajangan | 81,8 | 94,2 | 87,4 | 90,6 | 95.78 | 87,31 |
| 11 | Sedayu | 79,0 | 93,1 | 95,5 | 88,0 | 95.61 | 87,17 |
| 12 | Jetis | 79,1 | 94,7 | 94,8 | 89,1 | 92.77 | 87,13 |
| 13 | Sewon | 76,9 | 96,1 | 95,4 | 88,5 | 98.48 | 86,42 |
| 14 | Kasihan | 81,7 | 83,7 | 94,9 | 89,0 | 94.26 | 85,69 |
| 15 | Srandakan | 81,6 | 81,9 | 86,3 | 90,3 | 92.58 | 84,40 |
| 16 | Pandak | 79,5 | 82,9 | 84,6 | 92,2 | 92.45 | 82,50 |
| 17 | Banguntapan | 80,1 | 80,5 | 79,8 | 89,7 | 92.21 | 82,01 |
| Rerata IKM | | 80,0 | 91,8 | 93,5 | 96,17 | 94,13 | 87,13 |

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

### 2.3.3.5. Unsur Pemerintahan Umum

#### 2.3.3.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**a. Pembinaan Politik Daerah**

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Kantor Kementerian Agama serta Dinas Kependidikan Pemuda dan Olahraga.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu PILKADA tahun 2020 mencapai 80,32% menurun dibanding PILPRES 2019 mencapai 87,9%, Penurunan disebabkan PILKADA diselenggarakan dalam suasana pandemi Covid-19.

**b. Potensi Intoleransi**

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

**c. Pencapaian Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian indikator kinerja utama sub-urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Kabupaten Bantul sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2 204 Indikator Kinerja Utama Sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Bantul, Tahun 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah intoleransi di masyarakat (%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Persentase Pemilih yang | 0 | 0 | 0 | 87,89 | 80,32 |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berpartisipasi (%) | | | | | |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021
Keterangan : 2016-2018 tidak diselenggarakan pemilu

### 2.3.4. Layanan Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai kewenangan istimewa terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; 2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. kebudayaan; 4. pertanahan; dan 5. tata ruang. Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan pada Bab IV Perencanaan, Bupati/Walikota menyampaikan usulan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada *Paniradya Kaistimewan* pada bulan September. Penyampaian usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang dari Kabupaten/Kota berupa program dan kegiatan tahun n+2.

**a. Kelembagaan**

Urusan keistimewaan di bidang kelembagaan dengan mengakomodir aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan asli yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli. Implementasinya dengan mendesain kelembagaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan dengan penambahan nomenklatur keistimewaan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) serta penggantian nomenklatur kecamatan menjadi *Kapanewon* dan desa menjadi *kalurahan*. Penciri keunikan lainnya dilakukan melalui penyelarasan terhadap ketatalaksanaannya. Mendukung pelaksanaan penataan bentuk kelembagaan asli Kabupaten Bantul dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi produk hukum tindak lanjut urusan keistimewaan.

Pada sisi budaya kerja urusan keistimewaan bidang kelembagaan mereview budaya kerja pemerintah daerah dan internalisasi nilai-nilai keistimewaan pada ASN yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme ASN DIY termasuk di Kabupaten Bantul. SATRIYA (Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, Rela Melayani dan Ahli Profesional) merupakan reformasi birokrasi dalam perspektif keistimewaan dalam rangka pembaharuan sikap dan tindakan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

**b. Kebudayaan**

Salah satu semangat yang menjadi inti dari pelaksanaan keistimewaan adalah menjadikan filosofi budaya sebagai dasar pembangunan di segala bidang. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.

Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong peningkatan kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan *event* kebudayaan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat. *Event* kebudayaan berskala nasional di Kabupaten Bantul bertajuk "Festival Segoro Kidul" dimulai pada tahun 2022.

Berbagai capaian yang berasal dari program-program dan kegiatan inovatif menunjukkan urusan kebudayaan telah memberikan manfaat langsung bagi kegiatan seni dan budaya yang sebelumnya telah tumbuh di masyarakat. Perkembangan kalurahan budaya di kabupaten Bantul sebanyak 12 kalurahan ditetapkan menjadi Kalurahan Budaya dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016. Salah satu dari Kalurahan Budaya tersebut ditetapkan menjadi Kalurahan Mandiri Budaya yaitu Kalurahan Sabdodadi dengan Keputusan Gubernur Nomor 364/Kep/2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Selain itu, terdapat 9 (Sembilan) Rintisan Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 tanggal 9 Desember 2020.

Desa/Kalurahan Budaya adalah Desa/Kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dlimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Desa/Kalurahan Budaya sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata, pendidikan, ekonomi dan ketahanan pangan. Sementara itu aspek pemberdayaan

masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membawa spirit baru pembangunan kalurahan. Untuk mewujudkan kemandirian kalurahan diperlukan konsep yang dapat mewadahi dan mengakomodasi berbagai elemen kalurahan secara menyeluruh. Berbagai program pembangunan kalurahan yang ada di wilayah antara lain: Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), Desa *Preneur*, dan Desa Mandiri Pangan.

**1) Desa/Kalurahan Budaya**

Kabupaten Bantul memiliki duabelas (12) Desa/Kalurahan Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 262/Kep/2016, yaitu :

Tabel 2 205 Penetapan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

| No. | Nama Kalurahan | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Sabdodadi | Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul |
| 2 | Bangunjiwo | Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan |
| 3 | Dlingo | Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo |
| 4 | Gilangharjo | Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak |
| 5 | Mulyodadi | Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro |
| 6 | Panggungharjo | Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon |
| 7 | Seloharjo | Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong |
| 8 | Selopamioro | Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri |
| 9 | Sitimulyo | Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan |
| 10 | Srigading | Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden |
| 11 | Trimurti | Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan |
| 12 | Triwidadi | Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan |

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

Kabupaten Bantul berupaya mendorong terbentuknya kalurahan budaya melalui rintisan kalurahan budaya yang saat ini telah ditetapkan sembilan (9) kalurahan. Penetapan rintisan kalurahan budaya melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 686 Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 2 206 Penetapan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul

| No. | Nama Kalurahan | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Gadingsari | Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden |
| 2 | Parangtritis | Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek |
| 3 | Girirejo | Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri |
| 4 | Srimulyo | Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan |
| 5 | Muntuk | Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo |
| 6 | Sendangsari | Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan |
| 7 | Tamantirto | Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan |
| 8 | Sriharjo | Kalurahan Sriharji Kapanewon Imogiri |
| 9 | Argodadi | Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu |

Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 2021

**2) Desa Wisata**

Desa wisata adalah sebuah kawasan kalurahan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di kalurahan wisata memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Desa wisata menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat–istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang kalurahan yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung.

Penetapan Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bantul, sebagai berikut:

Tabel 2 207 Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Bantul

| No | Kalurahan | Nama | Potensi Wisata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabdodadi | Manding | Sentra Kerajinan Kulit | Maju |
| 2 | Timbulharjo | Tembi | Kerajinan, Outbond | Maju |
| 3 | Karangtengah | Karangtengah | Alam, Kerajinan | Maju |
| 4 | Kebonagung | Kebonagung | Wisata Pendidikan Pertanian | Maju |

| No | Kalurahan | Nama | Potensi Wisata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| | | Candran | Museum Tani, Kesenian | Maju |
| 5 | Wukirsari | Wukirsari | Batik pewarna alami | Maju |
| | | Pucungrejo | Kerajinan Kulit | Embrio |
| | | Bendo | Alam, Kerajinan Genteng Tradisional | Embrio |
| 6 | Mangunan | Kakilangit | Alam, Kerajinan, Kuliner | Maju |
| | | TTSA | Alam, Budaya, Kerajinan | Maju |
| | | Songgo Langit | Alam, Budaya, Kerajinan | Embrio |
| | | Goa Gajah (Lemahbang) | Alam, Goa Gajah | Embrio |
| 7 | Guwosari | Kampungsantan | Kerajinan tempurung, Kuliner Ingkung | Maju |
| | | Kalakijo | Budaya, Kuliner Ingkung | Embrio |
| | | Guwosari Selarong | Cagar Budaya, Kerajinan | Embrio |
| 8 | Sendangsari | Krebet | Kerajinan Batik Kayu | Maju |
| | | Mangir | Wisata Sejarah Mataram, Kuliner | Embrio |
| | | Ngembel Beji | Alam, Budaya | Embrio |
| 9 | Canden | Kiringan | Sentra Jamu Tradisional | Berkembang |
| 10 | Trimurti | Lopati | Kuliner, Kerajinan | Berkembang |
| 11 | Muntuk | Karangasem | Alam, Kerajinan | Berkembang |
| 12 | Bangunjiwo | Jipangan | Budaya, Kerajinan | Berkembang |
| | | Kajigelem | Budaya, Gerabah | Embrio |
| 13 | Trimulyo | Puton | Alam | Berkembang |
| | | Trimulyo | Cagar Budaya, Batik | Embrio |
| | | Dewa Batu | Alam, Budaya | Embrio |
| 14 | Jagalan | Kampung Gurami | Pertanian, Perikanan | Embrio |
| 15 | Tirtohargo | Mangrove | Alam, Konservasi Mangrove | Embrio |
| 16 | Tirtomulyo | Ngemel Benji | Alam, Budaya | Embrio |
| 17 | Parangtritis | Laguna Depok | Outbond, Kuliner | Embrio |
| 18 | Palbapang | Ngringinan | Museum, Kuliner | Embrio |
| 19 | Seloharjo | Kampung Surocolo | Cagar Budaya, Budaya | Embrio |
| | | Juron | Kerajinan | Embrio |
| 20 | Panjangrejo | Panjangrejo | Alam, Gerabah | Embrio |

| No | Kalurahan | Nama | Potensi Wisata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Srihardono | Kalibuntung | Outbond, Pendidikan | Embrio |
| 22 | Pendowoharjo | Gunung Cilik | Alam, Kerajinan, Budaya | Embrio |
| 23 | Gilangharjo | Gilangharjo | Alam, Budaya | Embrio |
| 24 | Gadingsari | Goa Cemara | Alam, Outbond, Konservasi Penyu | Embrio |
| | | Pandansari | Alam, Perkebunan Buah Naga | Embrio |
| 25 | Imogiri | Imogiri | Budaya | Embrio |
| 26 | Sriharjo | Srikeminut (wunut) | Alam, Budaya | Embrio |
| 27 | Terong | Banyu Nibo Rejosari | Pertanian, Alam | Embrio |
| 28 | Mulyodadi | Mulyodadi | Kuliner, Seni budaya | Embrio |

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

### 3) Desa *Prenuer*

Desa *Preneur* adalah kalurahan yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha milik kalurahan, unit usaha yang berada dalam lingkup kalurahan yang diusahakan oleh warga kalurahan itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian kalurahan dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Desa *Preneur* di Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sejumlah 7 kalurahan, yaitu: Trimurti, Mulyodadi, Gilangharjo, Sabdodadi, Panggungharjo, Bangunjiwo dan Dlingo.

### 4) Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Desa Prima merupakan sebuah kalurahan percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari

instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian menurunkan kemiskinan.

Desa Prima yang telah terbentuk di Kabupaten Bantul mencakup 26 kalurahan sebagai berikut :

Tabel 2 208 Kelompok Prima di Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 - 2019

| No. | Nama Kelompok Prima | Alamat | Tahun Dibentuk | Jumlah Hibah Diterima (Rp) | Jumlah Dana Sekarang (Rp) | Jumlah Anggota | | Produk Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Awal | Sekarang | |
| 1 | SEJAHTERA | SRIHARJO, IMOGIRI | 2009 | 37,500,000 | 83,112,000 | 24 | 53 | PEYEK, KACANG DAN KERIPIK SAGU |
| 2 | GADINGSARI MAKMUR | GADINGSARI, SANDEN | 2012 | 37,000,000 | 55,150,000 | 25 | 29 | PEYEK DAN UBI UNGU |
| 3 | MUKTI REJEKI | NITIPRAYAN DK VII NGESTIHARJO, KASIHAN | 2013 | 37,000,000 | 66,739,500 | 22 | 32 | TEMPE, TAS PERCA DAN DOMPET BATIK |
| 4 | ANYELIR | IMOGIRI, IMOGIRI | 2014 | 37,000,000 | 48,000,000 | 24 | 32 | SNACK DAN CEMILAN KRIPIK |
| 5 | TIMBUL REJEKI | TIMBULHARJO, SEWON | 2015 | 37,000,000 | 49,044,000 | 25 | 32 | KRIPIK GEMBUS |
| 6 | SELOMAJU | SELOPAMIORO, IMOGIRI | 2016 | 37,000,000 | 54,834,000 | 24 | 25 | KRIPIK TEMPE, KRIPIK DAUN TALOK, KRIPIK PARE, DAUN KRIKIL DAN DAUN KELOR |
| 7 | GIRI PRIMA TAMA | DLINGO, DLINGO | 2017 | 37,000,000 | 44,709,000 | 25 | 25 | WEDANG KEKEP S. BUNGA, TAS, MENGGLENG DAN EMPING GARUT |
| 8 | SEJAHTERA TERONG | TERONG, DLINGO | 2017 | 37,000,000 | 51,700,000 | 25 | 28 | PANGSIT DAUN KELOR |
| 9 | NIAGA PATALAN JETIS | PATALAN, JETIS | 2017 | 37,000,000 | 40,000,000 | 25 | 25 | KERAJINAN TAS |
| 10 | MANDIRI | NOGOSARI II, WUKIRSARI, IMOGIRI | 2017 | 37,000,000 | 51,224,000 | 25 | 25 | USAHA BOGA |
| 11 | AGUNG MANDIRI | KEBON AGUNG, IMOGIRI | 2018 | 37,000,000 | 45,098,700 | 25 | 25 | TELUR ASIN, ANEKA KRIPIK DAN KEMBANG GOYANG |
| 12 | MAJU MULYO | MULYODADI BAMBANGLIPURO | 2018 | 37,000,000 | 42,000,000 | 25 | 25 | TELUR ASIN, KRIPIK BAYAM, TAS DARI KAIN PERCA |
| 13 | SUMBER REJEKI | PAJANGAN, TRIWIDADI, PAJANGAN | 2018 | 37,000,000 | 37,000,000 | 25 | 25 | EMPING MELINJO, EMPING JAGUNG DAN EMPING GARUT |
| 14 | WANUDYOTOMO | KAL TAMANAN | 2018 | 37,000,000 | 37,000,000 | 25 | 27 | ANEKA OLAHAN KUE |

| No. | Nama Kelompok Prima | Alamat | Tahun Dibentuk | Jumlah Hibah Diterima (Rp) | Jumlah Dana Sekarang (Rp) | Jumlah Anggota | | Produk Unggulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Awal | Sekarang | |
| | | BANGUNTAPAN | | | | | | |
| 15 | MURTI MANDIRI | TRIMURTI, SRANDAKAN | 2018 | 37,000,000 | 48,100,000 | 25 | 25 | CRIPING, AMPAS TAHU, BAKPIA PISANG |
| 16 | OPTIMIS "SELOHARJO" | SELOHARJO, PUNDONG | 2018 | 37,000,000 | 45,895,000 | 25 | 39 | BAKPIA |
| 17 | NGUDI REJEKI | BANGUNHARJO SEWON | 2012 | 37,000,000 | 59,918,000 | 25 | 26 | BAKPIA, TEMPE |
| 18 | PANGGUNG MAKMUR | JL. KH. ALI MAKSUM PANGGUNGHARJO, SEWON | 2019 | 25,000,000 | 30,778,424 | 25 | 25 | ANEKA KUE, EMPING, ABON |
| 19 | GILANG LESTARI | GILANGHARJO, PANDAK | 2019 | 25,000,000 | 28,316,500 | 25 | 25 | JAMUR CRISPY |
| 20 | GADINGMAS | SRIGADING, SANDEN | 2019 | 25,000,000 | 30,280,200 | 25 | 25 | TELUR ASIN, TAHU WALIK, BATIK, KUE KERING, OLAHAN GULA KELAPA, KACANG-KACANGAN, DAN KUE BASAH |
| 21 | PRIMA JATI | JATIMULYO, DLINGO | 2019 | 25,000,000 | 30,103,000 | 25 | 25 | KUE KACANG |
| 22 | DULLOR SUBUR NECO | SABDODADI | 2019 | 25,000,000 | 26,175,000 | 25 | 25 | JUSSER, OKRA, DAN KENIKIR |
| 23 | NGUDI MUKTI | KARANGTENGAH, IMOGIRI | 2019 | 25,000,000 | 31,773,000 | 25 | 25 | METE, BUMBU PAWON, EMPING |
| 24 | SEKARNINGTYAS | BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN | 2012 | 37,000,000 | 57,216,000 | 25 | 36 | MAKANAN KERING |
| 25 | BANGKIT MANDIRI | CANDEN, JETIS | 2012 | 37,000,000 | 50,787,000 | 25 | 24 | JAMU GENDONG |
| 26 | SUMBER MAKMUR | SUMBERAGUNG, JETIS | 2018 | 37,000,000 | 48,265,000 | 25 | 22 | OLAHAN HASIL PERIKANAN |

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

### 5) Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan yang dikenali dengan istilah "Demapan" adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 2 209 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

| No | Kalurahan | Tahapan Demapan |
|---|---|---|
| 1 | Seloharjo | Exit Program |
| 2 | Srihardono | Exit Program |
| 3 | Sriharjo | Exit Program |
| 4 | Karangtengah | Exit Program |
| 5 | Selopamioro | Exit Program |
| 6 | Wukirsari | Exit Program |
| 7 | Girirejo | Exit Program |
| 8 | Tamantirto | Exit Program |
| 9 | Bangunjiwo | Exit Program |
| 10 | Bawuran | Exit Program |
| 11 | Segoroyoso | Exit Program |
| 12 | Wonolelo | Exit Program |
| 13 | Dlingo | Exit Program |
| 14 | Muntuk | Exit Program |
| 15 | Mangunan | Exit Program |
| 16 | Temuwuh | Exit Program |
| 17 | Jatimulyo | Exit Program |
| 18 | Jagalan | Exit Program |
| 19 | Argodadi | Exit Program |
| 20 | Argorejo | Exit Program |
| 21 | Triwidadi | Exit Program |
| 22 | Trimurti | - Tahapan Persiapan Tahun I,<br>- Tahap Penumbuhan Tahun II |
| 23 | Guwosari | Tahapan Persiapan Tahun I |

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021
Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan

**c. Pertanahan**

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yaitu penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdais 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kadipaten masing-masing sebagai badan hukum khusus, maka tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY yang digunakan bagi kelembagaan, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat di DIY harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadan tanah Kasultanan dan

Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Tabel 2 210 Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

| Inventarisasi Sultan Ground | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.432 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

**d. Tata Ruang**

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada Tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon. SRS Kasultanan yang terletak di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 211 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

| No | Kalurahan | Penanda Srs |
|---|---|---|
| **A.** | **Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon** | |
| 1 | Wukirsari | Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri |
| 2 | Imogiri | |
| 3 | Girirejo | |
| 4 | Panggungharjo | Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggung Krapyak |
| 5 | Jagalan | Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede |
| 6 | Banguntapan | Masjid Pathok Nagoro di Babadan |
| 7 | Tirtonirmolo | Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan |
| 8 | Parangtritis | Pantai Samas – Parangtritis |
| **B.** | **Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon** | |
| 1 | Segoroyoso | Kerto – Pleret |
| 2 | Pleret | |
| 3 | Wonokromo | |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

## 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

#### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2 212 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Jenis Pengeluaran Konsumsi | 2016 (%) | 2017 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Non Makanan | 58.44 | 56.94 | 60,60 | 58,65 | 57,53 |
| 2. | Makanan | 41,56 | 43,06 | 39,40 | 41,35 | 42,47 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga dikelompokkan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase pengeluaran untuk kelompok non makanan cenderung stabil. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian penduduk di Kabupaten Bantul semakin baik.

**b. Nilai Tukar Petani**

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana lt menunjukkan fluktuasi barang-barang yang dikomsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

NTP tidak relevan sebagai alat ukur kesejahteraan petani, karena NTP mengasumsikan tingkat produksi yang tetap dan tidak mengakomodir kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Oleh karena itu, NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani. NTP bukan mutlak

sebagai kesejehateraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga, namun belum tentu NTP meningkat karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani

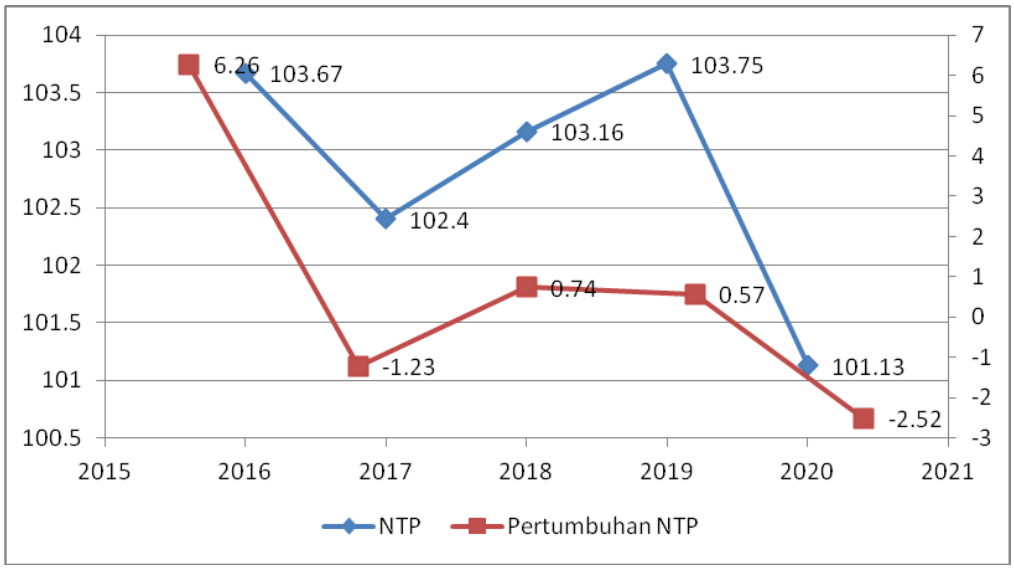


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2 63 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2016-2020

Gambar di atas menunjukkan perkembangan nilai tukar petani dari tahun 2015-2020 menggambarkan tren yang fluktuatif. NTP Kabupaten Bantul tahun 2020 memiliki indeks sebesar 101,13, lebih rendah dari tahun 2019 yaitu 103,75. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi.

### 2.4.2. Fasilitas Wilayah atau infrastruktur

#### a. Fasilitas Perbankan.

Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank BPR.

Tabel 2 213 Jumlah Kantor Bank Umum dan Bank BPR di Kabupaten Bantul

| Jenis | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR |
| Kantor Pusat | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Kantor Cabang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Cabang Pembantu | 34 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |

| Jenis | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR | Bank Umum | BPR |
| Kantor Kas | 25 | 35 | 25 | 36 | 25 | 38 | 23 | 36 | 23 | 37 |
| Jumlah Bank | 61 | 54 | 61 | 55 | 60 | 48 | 60 | 55 | 60 | 56 |
| | 115 | | 116 | | 118 | | 115 | | 116 | |
| Jumlah Penduduk | 928.676 | | 927.181 | | 939.718 | | 949.325 | | 954.706 | |
| Rasio Pelayanan per 1000 Penduduk (%) | 12,38 | | 12,51 | | 12,55 | | 12,11 | | 12,15 | |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah kantor bank umum di Kabupaten Bantul sebanyak 60, terdiri dari 2 kantor cabang, 35 cabang pembantu dan 23 kantor kas sedangkan jumlah kantor bank BPR sebanyak 56, terdiri dari 16 kantor pusat, 3 kantor cabang dan 37 kantor kas.

Rasio pelayanan perbankan di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dengan rata-rata di atas 12% per 1000 penduduk, artinya dalam 1000 penduduk terdapat 120 orang terlayani oleh perbankan. Pada tahun 2020, jumlah kantor bank bertambah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan penambahan jumlah kantor kas bank BPR.

### b. Penggunaan Listrik Rumah Tangga.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan seluruh rumah tangga di suatu wilayah.

Tabel 2 214 Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2019

| Realisasi | Jumlah KK | Jumlah PLG RMH Tangga PLN | Jumlah PLG RMH Tangga Non PLN | Jumlah PLG RMH Tangga Total | REPLN(%) | RE Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 312.530 | 282.357 | 57 | 282.414 | 90.35 | 90.36 |
| 2018 | 319.033 | 297.675 | 6.863 | 304.538 | 93.31 | 95.46 |
| 2019 | 325.082 | 313.194 | 6.553 | 319.747 | 96.34 | 98.36 |

Sumber: Dinas DPU ESDM DIY, 2021

Persentase RE total di Kabupaten Bantul tahun 2019 yaitu sebesar 98.36% dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Bantul telah menerima aliran listrik.

**c. Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi**

*E-Government* merupakan salah satu pengungkit dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Membangun Bantul *Smart City* merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan *e-Government* menitik beratkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS).

Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengembangkan aplikasi sebanyak 79 aplikasi, baik yang berbasis *dekstop* atau *android*, *online* maupun *offline*. Untuk mendukung pelayanan *Digital Government Services* di Kabuaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun infrastruktur jaringan utama (*backbone*) *fiber optic* sepajang 135,241 Km, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Jaringan utama ini memenuhi kebutuhan jaringan internet dan intranet seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dan sebagian kantor pemerintah kalurahan dengan kualitas jaringan *fiber optic* yang baik.

Tabel 2 215 Jumlah Wifi Publik di Kantor Pemerintah Kalurahan Menurut Kapanewon di Kabupaten Bantul Tahun 2019

| No. | Kapanewon | Jumlah Wifi Kalurahan |
|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 2 |
| 2 | Sanden | 4 |
| 3 | Kretek | 3 |
| 4 | Pundong | 3 |
| 5 | Bambanglipuro | 3 |
| 6 | Pandak | 2 |
| 7 | Bantul | 4 |
| 8 | Jetis | 4 |
| 9 | Imogiri | 5 |
| 10 | Dlingo | 4 |
| 11 | Pleret | 3 |

| No. | Kapanewon | Jumlah Wifi Kalurahan |
|---|---|---|
| 12 | Piyungan | 2 |
| 13 | Banguntapan | 4 |
| 14 | Sewon | 1 |
| 15 | Kasihan | 4 |
| 16 | Pajangan | 2 |
| 17 | Sedayu | 3 |
| Jumlah | | 53 |

Sumber : *https://data.bantulkab.go.id/dataset/fasilits-wifi-desa-di-kabupaten-bantul, 2021*

Hingga tahun 2019 jumlah kantor pemerintah kalurahan yang tidak tersambung jaringan *fiber optic* sebanyak 72 titik karena tidak dilalui jalur utama *fiber optic*. Untuk kantor pemerintah kalurahan yang tidak dilalui jalur utama (*backbone*) *fiber optic*, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memberikan fasilitas jaringan internet dan intranet melalui sambungan udara. Untuk itu dibangun infrastruktur tower internet dan intranet milik pemerintah sebanyak 135 tower yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan *Digital Government Services* di kantor pemerintah kalurahan juga difasilitasi wifi publik sebanyak 53 titik yang dapat diakses juga oleh masyarakat kalurahan.

### 2.4.3. Iklim Berinvestasi

#### a. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.

Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dimulai tahun 2012 dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang diperbarui setiap tahun. Tahun 2020 melalui SK Bupati Bantul Nomor 198 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul Tahun 2020. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, telah disusun road map reformasi birokrasi tahun 2018-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2016-2019 sebagai berikut :

Tabel 2 216 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2019

| No. | Area Perubahan | Bobot | Nilai Thn 2016 | Nilai Thn 2017 | Nilai Thn 2018 | Nilai Thn 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Komponen Pengungkit | | | | | |
| 1. | Penataan Sistem manajemen SDM | 15 | 6.79 | 9.67 | 10.95 | 12.95 |
| 2. | Penguatan pengawasan | 12 | 6.04 | 6.27 | 6.73 | 7.16 |
| 3. | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
| 4. | Penataan dan penguatan organisasi | 6 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.89 |
| 5. | Manajemen perubahan | 5 | 3.37 | 3.45 | 3.44 | 3.53 |
| 6. | Penguatan akuntabilitas | 6 | 4.10 | 4.34 | 4.37 | 4.38 |
| 7. | Penataan tatalaksana | 5 | 3.47 | 3.50 | 3.30 | 3.47 |
| 8. | Peningkatan kualitas pelayanan public | 6 | 4.33 | 4.53 | 4.51 | 4.52 |
| | Total Komponen Pengungkit (A) | 60 | 34.64 | 38.31 | 39.85 | 42.11 |
| | | | | | | |
| | Komponen Hasil | | | | | |
| 1. | Nilai akuntabilitas kinerja | 14.0 | 9.84 | 10.31 | 10.91 | 11.39 |
| 2. | Survey internal integritas organisasi | 6.0 | 3.88 | 3.58 | 4.45 | 4.47 |
| 3. | Survey eksternal persepsi korupsi | 7.0 | 6.49 | 5.90 | 6.30 | 6.06 |
| 4 | Opini BPK | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | Survey eksternal pelayanan public | 10.0 | 9.60 | 8.14 | 9.10 | 9.33 |
| | Total Komponen Hasil (B) | 40 | 32.79 | 30.93 | 33.76 | 34.25 |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) | 100 | 67.43 | 69.25 | 73.61 | 76.36 |
| | **Kategori** | | **B** | **B** | **BB** | **BB** |

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Revormasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang *holistic*.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan, indeks reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul tahun 2020 adalah 76,43 dengan kategori B, sebagai berikut :

Tabel 2 217 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No. | Area Perubahan | Bobot | Nilai Thn 2020 |
|---|---|---|---|
| A | Komponen Pengungkit | | |
| 1. | Pemenuhan | 20 | 14,73 |
| 2. | Hasil Antara Area Perubahan | 10 | 6,93 |
| 3. | Reform | 30 | 20,74 |
| | Total Komponen Pengungkit (A) | 60 | 42,40 |
| | | | |
| B | Komponen Hasil | | |
| 1. | Akuntabilitas Kinerja dan keuangan | 10 | 8,73 |
| 2. | Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 9,03 |
| 3. | Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | 10 | 8,28 |
| 4 | Kinerja Organisasi | 10 | 6,99 |
| | Total Komponen Hasil (B) | 40 | 34,03 |
| | Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) | 100 | 76,43 |
| | **Kategori** | | **BB** |

Sumber: Bagian Organisasi, 2021

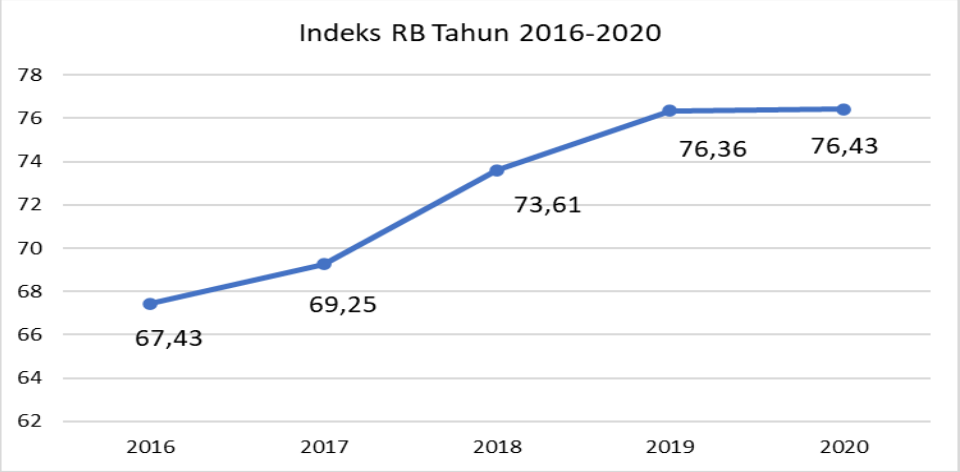


Sumber: Bagian Organisasi, 2021

Gambar 2 64 Grafik Indeks RB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah 76,43 (BB) Kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 yaitu 67,43. Meningkat dari kategori B (Cukup Baik) menjadi BB (Baik). Kategori B memiliki interprestasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi, sedangkan Kategori BB memiliki interprestasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

### b. Angka Kriminalitas

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2 218 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No. | Jenis Kriminal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah kasus Narkoba | 45 | 46 | 78 | 95 | 109 |
| 2 | Jumlah kasus Pembunuhan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Jumlah Kejahatan Seksual | 4 | 29 | 15 | 41 | 32 |
| 4 | Jumlah kasus Penganiayaan | 81 | 135 | 81 | 85 | 238 |
| 5 | Jumlah kasus Pencurian | 345 | 395 | 281 | 362 | 407 |
| 6 | Jumlah kasus Penipuan | 88 | 76 | 94 | 122 | 139 |
| 7 | Jumlah kasus Pemalsuan uang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Total Jumlah Tindak Kriminal Tertangani Selama 1 Tahun | 567 | 683 | 551 | 707 | 927 |
| 9 | Jumlah Penduduk | 928.676 | 927.181 | 939.718 | 945.441 | 954.706 |
| 10 | Angka Kriminalitas | 0,061 | 0,074 | 0,055 | 0,074 | 0,097 |

Sumber: Satpol PP, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka kriminalitas di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Angka kriminalitas tahun 2020 sebesar 0,097 artinya bahwa dalam setiap 1000 penduduk terdapat lebih dari 9 kasus kriminalitas.

Dilihat dari jenis kriminal yang mengalami peningkatan adalah kasus penganiyaan, penipuan, pencurian dan kasus narkoba. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut antara lain tekanan ekonomi yang cukup tinggi akibat pandemic covid-19, pengaruh media sosial/pergaulan.

**c. Jumlah Demonstrasi**

Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjukrasa. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Bantul tahun 2017-2020 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 219 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bantul Tahun 2017-2020

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bidang Ekonomi | | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Bidang Politik | 1 | | 1 | |
| 3 | Bidang Lainnya | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Mogok Kerja | | 6 | | 2 |
| Jumlah Demonstrasi | | 4 | 9 | 7 | 8 |

Sumber: Satuan Pol PP, 2021

Jumlah demonstrasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 9 demonstrasi dibanding tahun 2017 yang hanya ada 4 demonstrasi, untuk selanjutnya bersifat fluktuatif, dalam arti terjadi penurunan jumlah demonstrasi, terutama untuk kasus pemogokan kerja pada tahun 2019 menjadi 7 demonstrasi, namun naik lagi di tahun 2020 menjadi 8 demonstrasi.

**d. Kemudahan Perijinan.**

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, ditetapkanlah Keputusan Bupati Bantul nomor 38 tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang bertugas mengawal dan membantu peningkatan pelayanan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan atas izin berusaha,pengidentifikasian perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarisasi) dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, yang memberi tanggung jawab kepada DPMPT untuk menerima limpahan kewenangan melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul.

Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*-OSS).

Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara *online* tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2020 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 220 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS Kabupaten Bantul Tahun 2020

| **Perizinan OSS** | | |
|---|---|---|
| No | Nama Perizinan | Jumlah Jenis Perizinan |
| 1. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1 |
| 2. | Perizinan Perdagangan | 2 |
| 3. | Perizinan Perindustrian | 2 |
| 4. | Perizinan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) | 2 |
| 5. | Perizinan Pekerjaan Umum Peruamahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) dan Pertahanan | 3 |
| 6. | Perizinan Perhubungan | 2 |
| 7. | Perizinan Peternakan | 1 |
| 8. | Perizinan Kesehatan | 8 |
| 9. | Perizinan Usaha Pariwisata | 1 |
| 10. | Perizinan Tenaga Kerja | 1 |
| **Perizinan Non OSS** | | |
| 1. | Perizinan Dasar | 3 |
| 2. | Perizinan Kesehatan | 27 |
| 3. | Perizinan Usaha Perikanan | 1 |
| 4. | Perizinan Reklame | 1 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Selain adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu di mana proses penyelesaian izin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat yang diperlukan lengkap, jelas, dan benar, maka pengurusan izin juga dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis izin dalam obyek izin yang sama). Waktu yang diperlukan bagi pelayanan perizinan secara terperinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2 221 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

| **Nomor Induk Berusaha (NIB)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Perseorangan** | **Non Perseorangan** | |
| 1. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1 | | 8 | 11 | Tidak dipungut biaya |

| **Perdagangan** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen** | **Teknis** | |
| 2. | Surat Izin Usaha Perdagangan | Perdagangan Umum = - Toko Swalayan = 35 Pusat Perbelanjaan = 35 | 3 | 5 | Umum = - Swalayan berdiri sendiri = 3 Swalayan terintegrasi = 1 Pusat Perbelanjaan = 4 | Tidak dipungut biaya |
| 3. | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 30 | 5 | 5 | 3 | Tidak dipungut biaya |
| 4. | SIUP Mihol | 35 | 5 | 11 | Pengecer Gol B dan C = 3 Penjual Gol B dan C = 3 | Tidak dipungut biaya |

| Perindustrian | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen** | **Teknis** | |
| 5. | Izin Usaha Industri (IUI) | • SIINas selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri)<br>• Surat Keterangan Dirjend Pembina Kawasan Industri: selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikan ke SIINas<br>• Penyampaian Data Industri<br>• Izin Lokasi: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI<br>• Izin Lingkungan: paling lama 3 (tiga) tahun setelah diperoleh IUI (Izin Usaha Industri) | 20 | 5 | 4 | Tidak dipungut biaya |
| 6. | Izin Perluasan Industri (IPI) | 3 | 10 | 5 | 1 | Tidak dipungut biaya |
| **KUMKM** | | | | | | |
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen** | **Teknis** | |
| 7. | Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | Sesuai dengan SOP masing masing sektor | | 5 | | Tidak dipungut biaya |
| 8. | Izin Koperasi Simpan Pinjam | 30 | 30 | 5 | 7 | Tidak dipungut biaya |

| PUPKP dan Pertanahan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen** | **Teknis** | |
| 9. | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 30 | 5 | 6 | 1 | Tidak dipungut biaya |
| 10. | Tanda Daftar Usaha Perseorangan | 30 | 5 | 6 | 1 | Tidak dipungut biaya |
| 11. | Izin Lokasi | 10 | 10 | 8 | | Tidak dipungut biaya |

| Perhubungan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen** | **Adminis-trasi** | **Teknis** | |
| 12. | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang | 6 | 7 | 5 | 8 | Dalam Trayek = 4<br>Tidak Dalam Trayek = 5 | Rp. 5.000.000 |
| 13. | Izin Trayek | 6 Bulan | 7 | 5 | 9 | 4 | Rp. 5.000.000 |

A. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :
   1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek:
      a. Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin
   2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek :
      a. Izin angkutan dengan tujuan tertentu Rp 5.000.000 perizin;
      b. Izin angkutan pariwisata Rp 5.000.000 perIzin.

B. Retribusi Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang :
   Izin trayek antar Kabupaten/Kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi Rp. 5.000.000,- per izin

| Peternakan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen** | **Administrasi** | |
| 14. | Pendaftaran Usaha Peternakan | 2 bulan | 5 | 14 | - | Tidak dipungut biaya |

| Kesehatan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen Izin Usaha** | **Pemenuhan Komitmen Izin Komersial** | |
| 15. | Izin Usaha Apotek | 6 bulan | 9 | 5 | 5 | Tidak dipungut biaya |
| 16. | Mendirikan Rumah Sakit | 2 Tahun | 14 | 5 | 2 | Tidak dipungut biaya |
| 17. | Operasional Rumah Sakit | 3 bulan | 24 | 5 | 6 | Tidak dipungut biaya |
| 18. | Izin Operasional Klinik | 1 Bulan | 17 | 5 | 4 | Tidak dipungut biaya |
| 19. | Izin Operasional Laboratorium | 1 Bulan | 20 | 5 | 3 | Tidak dipungut biaya |
| 20. | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | 3 Bulan | 11 | 5 | 2 | Tidak dipungut biaya |
| 21. | Toko Alat Kesehatan | 2 Tahun | 15 | 5 | 3 | Tidak dipungut biaya |
| 22. | Toko Obat | 6 Bulan | 9 | 5 | 5 | Tidak dipungut biaya |

| Tanda Daftar Usaha Pariwisata | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Dokumen** | | |
| 23. | Tanda Daftar Usaha Pariwista | 12 | 3 | 5 | Tidak dipungut biaya |

| **Tenaga Kerja** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **Uraian** | **Lama Mengurus (hari kerja)** | | **Jumlah Persyaratan (Dokumen)** | | **Biaya Resmi** |
| | | **Pemenuhan Komitmen** | **Penyelesaian Dokumen** | **Pemenuhan Komitmen Izin Usaha** | **Pemenuhan Komitmen Izin Operasional** | |
| 24. | Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | 1 Tahun | 30 | 5 | 13 | Tidak dipungut biaya |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dari masing-masing sektor, serta pungutan biaya untuk pengurusan izin tersebut.

Dari keseluruhan proses perizinan yang dikelola oleh DPMPT dari rekapitulasi dari permohonan izin tahun 2016 -2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 222 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Permohonan izin | Izin diterbitkan | Izin ditolak | Izin dalam proses |
| 2016 | 6807 | 6021 | 165 | 621 |
| 2017 | 6165 | 5986 | 177 | 2 |
| 2018 | 5664 | 5502 | 148 | 14 |
| 2019 | 3793 | 2784 | 929 | 80 |
| 2020 | 5487 | 2827 | 2611 | 49 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

### e. Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta ketenagakerjaan.

Tabel 2 223 Perda yang Mendukung Iklim Usaha/Investasi di Kabupaten Bantul

| Jenis Perda |
|---|
| 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; |
| 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; |
| 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha; |
| 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang; |
| 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; |
| 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang; |
| 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038; |
| 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang |

| Jenis Perda |
|---|
| dan Peraturan Zonasi Bagian wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038;<br>9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;<br>10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;<br>11. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;<br>12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;<br>13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;<br>14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025;<br>15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. |

Sumber: Bagian Hukum, 2021

## f. Perkembangan Kemajuan Kalurahan

Kalurahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Status desa berdasarkan perkembangan kemajuan kalurahan dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil analisis terhadap status desa di Kabupaten IDM, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2 224 Status Desa di Kabupaten Bantul
Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

| No. | Kapanewon | IDM 2020 | Kalurahan | IDM 2020 | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srandakan | 0.8374 | Poncosari | 0,793 | MAJU |
| | | | Trimurti | 0,8817 | MANDIRI |
| 2 | Sanden | 0.8122 | Srigading | 0,8133 | MAJU |
| | | | Gadingsari | 0,8133 | MAJU |
| | | | Gadingharjo | 0,8094 | MAJU |
| | | | Murtigading | 0,8149 | MAJU |
| 3 | Kretek | 0.8165 | Tirtohargo | 0,7571 | MAJU |
| | | | Donotirto | 0,8178 | MAJU |

| No. | Kapanewon | IDM 2020 | Kalurahan | IDM 2020 | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Parangtritis | 0,8827 | MANDIRI |
| | | | Tirtosari | 0,8149 | MAJU |
| | | | Tirtomulyo | 0,8102 | MAJU |
| 4 | Pundong | 0.7760 | Seloharjo | 0,7229 | MAJU |
| | | | Srihardono | 0,8462 | MANDIRI |
| | | | Panjangrejo | 0,759 | MAJU |
| 5 | Bambanglipuro | 0.8477 | Sumbermulyo | 0,8787 | MANDIRI |
| | | | Sidomulyo | 0,8302 | MANDIRI |
| | | | Mulyodadi | 0,8343 | MANDIRI |
| 6 | Pandak | 0.8105 | Caturharjo | 0,8041 | MAJU |
| | | | Wijirejo | 0,8083 | MAJU |
| | | | Triharjo | 0,8143 | MAJU |
| | | | Gilangharjo | 0,8154 | MAJU |
| 7 | Pajangan | 0.7722 | Guwosari | 0,7708 | MAJU |
| | | | Triwidadi | 0,7624 | MAJU |
| | | | Sendangsari | 0,7833 | MAJU |
| 8 | Bantul | 0.7925 | Sabdodadi | 0,766 | MAJU |
| | | | Palbapang | 0,814 | MAJU |
| | | | Ringinharjo | 0,7432 | MAJU |
| | | | Bantul | 0,8105 | MAJU |
| | | | Trirenggo | 0,8287 | MAJU |
| 9 | Jetis | 0.8395 | Patalan | 0,8362 | MANDIRI |
| | | | Trimulyo | 0,8376 | MANDIRI |
| | | | Canden | 0,8456 | MANDIRI |
| | | | Sumberagung | 0,8384 | MANDIRI |
| 10 | Imogiri | 0.8067 | Selopamioro | 0,7611 | MAJU |
| | | | Kebonagung | 0,8132 | MAJU |
| | | | Sriharjo | 0,8138 | MAJU |
| | | | Karangtalun | 0,81 | MAJU |
| | | | Karangtengah | 0,7644 | MAJU |
| | | | Imogiri | 0,8987 | MANDIRI |
| | | | Wukirsari | 0,7767 | MAJU |
| | | | Girirejo | 0,8154 | MAJU |
| 11 | Dlingo | 0.8116 | Mangunan | 0,754 | MAJU |
| | | | Dlingo | 0,8148 | MAJU |
| | | | Muntuk | 0,8059 | MAJU |
| | | | Temuwuh | 0,8046 | MAJU |
| | | | Jatimulyo | 0,7929 | MAJU |
| | | | Terong | 0,8971 | MANDIRI |
| 12 | Banguntapan | 0.8323 | Tamanan | 0,8529 | MANDIRI |
| | | | Baturetno | 0,8879 | MANDIRI |
| | | | Jagalan | 0,7798 | MAJU |
| | | | Banguntapan | 0.9216 | MANDIRI |
| | | | Singosaren | 0,7524 | MAJU |
| | | | Wirokerten | 0,8324 | MANDIRI |
| | | | Jambidan | 0,8062 | MAJU |
| | | | Potorono | 0,8248 | MANDIRI |

| No. | Kapanewon | IDM 2020 | Kalurahan | IDM 2020 | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pleret | 0.8195 | Bawuran | 0,7521 | MAJU |
| | | | Wonokromo | 0,8916 | MANDIRI |
| | | | Wonolelo | 0,8005 | MAJU |
| | | | Segoroyoso | 0,7838 | MAJU |
| | | | Pleret | 0,8694 | MANDIRI |
| 14 | Piyungan | 0.8488 | Sitimulyo | 0,8137 | MAJU |
| | | | Srimulyo | 0.9195 | MANDIRI |
| | | | Srimartani | 0,8132 | MAJU |
| 15 | Sewon | 0.8244 | Pendowoharjo | 0,8121 | MAJU |
| | | | Bangunharjo | 0,8098 | MAJU |
| | | | Timbulharjo | 0,8116 | MAJU |
| | | | Panggungharjo | 0,864 | MANDIRI |
| 16 | Kasihan | 0.8254 | Tamantirto | 0,8138 | MAJU |
| | | | Tirtonirmolo | 0,8565 | MANDIRI |
| | | | Ngestiharjo | 0,8138 | MAJU |
| | | | Bangunjiwo | 0,8176 | MANDIRI |
| 17 | Sedayu | 0.8235 | Argodadi | 0,791 | MAJU |
| | | | Argosari | 0,786 | MAJU |
| | | | Argomulyo | 0,8829 | MANDIRI |
| | | | Argorejo | 0,834 | MANDIRI |

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Berdasarkan Tabel 2.208 analisis status desa di Kabupaten Bantul menurut IDM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Tidak ada satupun kalurahan di Kabupaten Bantul yang mendapat status 'Desa Sangat Tertinggal', 'Desa Tertinggal' dan "Desa Berkembang";
2) Menurut IDM, terdapat sejumlah 25 kalur dengan kriteria 'Desa Mandiri' dan 50 'Desa Maju';
3) Menurut *ranking* IDM, tiga kalurahan dengan skor tertinggi adalah Kalurahan Banguntapan di Kapanewon Banguntapan (0,9216); Kalurahan Srimulyo di Kapanewon Piyungan (0,9195); dan Kalurahan Imogiri di Kapanewon Imogiri (0,8987);
4) Adapun kalurahan dengan nilai terendah adalah Kalurahan Bawuran di Kapanewon Pleret (0,7521); Kalurahan

Ringinharjo di Kapanewon Bantul (0,7432); dan Kalurahan Seloharjo di Kapanewon Pundong (0,7229).

### 2.4.4. Sumber Daya Manusia

#### a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai tehnologi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Bantul paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 269.908 jiwa atau 27.82%, kemudian lulusan SD/sederajat menempati peringkat kedua sebesar 20%, dari jumlah penduduk di Kabupaten Bantul.

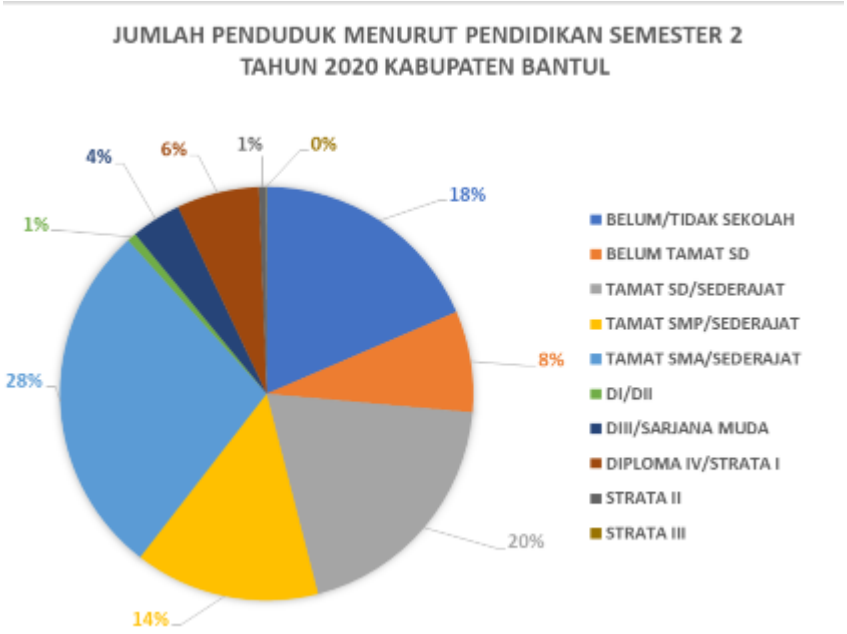


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2 65 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk didapatkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap

tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

**b. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 sebesar 44,20. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Bantul harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Rasio ketergantungan tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 (45,08) dan masih termasuk kategori tinggi. Oleh sebab itu untuk mengurangi rasio ketergantungan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan bagi lansia sehingga selain sehat dan kuat juga dapat lebih produktif.

Tabel 2 225 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bantul Tahun 2016–2020

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk usia < 15 tahun | 197.308 | 196.441 | 198.537 | 200.936 | 201.101 |
| 2 | Jumlah penduduk usia > 64 tahun | 90.550 | 92.668 | 91.837 | 94.029 | 91.539 |
| 3 | Jumlah penduduk usia usia tidak produktif (1+2) | 287.858 | 289.109 | 290.374 | 294.965 | 292.640 |
| 4 | Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun | 640.818 | 638.072 | 649.344 | 654.360 | 662.066 |
| 5 | Rasio ketergantungan (3/4) | 44,92 | 45,31 | 44,72 | 45,08 | 44,20 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

## 2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2 226 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **I** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | |
| | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73.5 | 73.56 | 73.66 | 73.77 | 73.86 | 73.65 | Melampaui (>) |
| | Angka Harapan Lama sekolah | Tahun | 14.73 | 14.74 | 15.03 | 15.15 | 15.17 | 15.38 | Belum tercapai (<) |
| | Angka Kemiskinan | Persen | 14.55 | 14.07 | 13.43 | 12.92 | 13.5 | 13.94 | Melampaui (>) |
| | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5.05 | 5.1 | 5.47 | 5.53 | -1.66 | -0.13 | Belum tercapai (<) |
| | Gini Ratio | Angka | 0.397 | 0.413 | 0.448 | 0.428 | 0.418 | 0.38 | Belum tercapai (<) |
| | Laju inflasi | Persen | 2.26 | 3.96 | 2.61 | 2.71 | 1.4 | Menurun/stabil | Belum tercapai (<) |
| | Angka Pengangguran Terbuka | Angka | 3 | 2.87 | 2.72 | 3.06 | 4.06 | 2.9 | Belum tercapai (<) |
| | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 78.42 | 78.67 | 79.45 | 80.01 | 80.01 | Meningkat | Sesuai (=) |
| | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Angka | 9.09 | 9.2 | 9.35 | 9.54 | 9.55 | 9 | Melampaui (>) |
| | Angka Harapan Lama Sekolah | Angka | 14.73 | 14.74 | 15.03 | 15.15 | 15.17 | 15.38 | Belum tercapai (<) |
| | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73.5 | 73.56 | 73.66 | 73.77 | 73.86 | 73.65 | Melampaui (>) |
| **II** | **Aspek Pelayanan Umum** | | | | | | | | |
| **A** | **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | | |
| | APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Persen | 98.7 | 98.75 | 108.41 | 106.24 | 97.7 | 98.9 | Belum tercapai (<) |
| | Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI | Persen | 96.12 | 98.2 | 98.45 | 95.26 | 92.77 | 96.4 | Belum tercapai (<) |
| | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs | Persen | 95 | 99.23 | 97.83 | 101.38 | 97.23 | 95.3 | Melampaui (>) |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | Persen | 84.1 | 88.68 | 89.55 | 85.86 | 86.55 | 84.65 | Melampaui (>) |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | Persen | 71.09 | 76.6 | 77.33 | 76.8 | 76.31 | 68.2 | Melampaui (>) |
| | Persentase Kelulusan SD/MI | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Melampaui (>) |
| | Persentase Kelulusan SMP/MTs | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Melampaui (>) |
| | Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs | Persen | 100 | 100 | 109.61 | 108.56 | 101.27 | 100 | Melampaui (>) |
| | Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | Persen | 100 | 100 | 108.54 | 111.18 | 105.93 | 100 | Melampaui (>) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | Angka putus sekolah SD/MI | Persen | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.02 | Melampaui (>) |
| | Angka putus sekolah SMP/MTs | Persen | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.02 | Melampaui (>) |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | | |
| | Angka Kematian Ibu (AKI) | per 100.000 KH | 96.77 | 72.8 | 108.3 | 99.49 | 157.6 | 157.6 | Sesuai (=) |
| | Angka Kematian Bayi (AKB) | per 1000 KH | 7.65 | 8.74 | 8.28 | 8.33 | 6.93 | 6.93 | Sesuai (=) |
| | Prevalensi Balita Gizi Buruk | Persen | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | Sesuai (=) |
| | Prevalensi Penderita HIV (Angka) | Persen | 0.083 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | Sesuai (=) |
| | Angka Kesakitan (Incidence Rate DBD) | per 100.000 Penduduk | 237.75 | 57.98 | 19.52 | 140 | 128 | 110 | Belum tercapai (<) |
| | Net Death Rate | per 1000 pasien | 18.69 | 16.98 | 22.62 | 18.7 | 21.17 | 16.6 | Belum tercapai (<) |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | | |
| | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap | Persen | 82.79 | 74.18 | 74.58 | 75.1 | 75.42 | 75.58 | Belum tercapai (<) |
| | Persentase Gedung | Persen | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | Sesuai (=) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | Pemerintah Kondisi Baik | | | | | | | | |
| | Persentase kecukupan air irigasi | Persen | 81.12 | 81.16 | 80.44 | 82.19 | 80.01 | 82.66 | Belum tercapai (<) |
| | Persentase Penanganan Banjir | Persen | 20.3 | 24.9 | 28.84 | 34 | 41.31 | 40.9 | Melampaui (>) |
| | Dokumen Tata Ruang yang sudah diperdakan | Jumlah | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Belum tercapai (<) |
| | Persentase Cakupan Pengendalian Tata Ruang | Persen | - | 71 | 70.35 | 72.5 | 75.01 | 77 | Belum tercapai (<) |
| **4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | |
| | Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani | Persen | 50.13 | 79.69 | 92.06 | 92.49 | 92.49 | 92.49 | Sesuai (=) |
| **5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | |
| | Persentase | Persen | 57 | 77.7 | 95.3 | 66 | 70 | 69 | Melampaui (>) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | penegakan PERDA | | | | | | | | |
| | Persentase Penyelesaian K3 | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sesuai (=) |
| | Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time 15 menit | Persen | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sesuai (=) |
| | Persentase Relokasi Warga | Persen | 9.09 | 27.28 | 36.36 | 89.09 | 132 | 81.82 | Melampaui (>) |
| | Persentase Sekolah Siaga Bencana | Persen | 2.69 | 3.19 | 3.97 | 4.12 | 4.51 | 4.2 | Melampaui (>) |
| **6** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | | |
| | Penanganan NAPZA | Jumlah | 4 | 5 | NA | NA | NA | Menurun | Belum tercapai (<) |
| | Persentase PMKS | Persen | 13.5 | 13.25 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 12.75 | Belum tercapai (<) |
| **B** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | | |
| | Upah Minimum Kabupaten | Rp. | 1,297,700.00 | 1,404,760.00 | 1,404,760.00 | 1,649,800.00 | 1,842,460.00 | 1,679,093.00 | Melampaui (>) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | | |
| | Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak | Angka | 0.38 | 0.38 | 0.73 | 0.73 | 0.18 | 0.38 | Melampaui (>) |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | | |
| | Ketersediaan Energi | (kkal/kapita/hari) | 3079 | 2993 | 3121 | 3123 | 3092 | 3095 | Belum tercapai (<) |
| | Ketersediaan Protein | (kkal/kapita/hari) | 75 | 78.36 | 87.23 | 89.95 | 82.9 | 72.8 | Melampaui (>) |
| | Skor Pola Pangan Harapan | Angka | 92.6 | 90.8 | 91.7 | 93.7 | 91.4 | 93.6 | Belum tercapai (<) |
| | Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani | Jumlah | 27 | 29 | 69 | 16 | 19 | 35 | Belum tercapai (<) |
| **4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | |
| | Cakupan Sertifikasi Tanah | Persen | NA | 100 | 93.16 | 99.37 | 100 | 96 | Melampaui (>) |
| **5** | **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks | 34 | 24 | 34.67 | 39.63 | 51.8 | 50 | Melampaui (>) |
| | Indeks Kualitas Udara (IKUd) | Indeks | 87.76 | 90.9 | 85.66 | 90.9 | 85.18 | 80 | Melampaui (>) |
| | Indeks Tutupan Lahan | Indeks | 27.5 | 27.51 | 43.15 | 53.09 | 54.82 | 52.93 | Melampaui (>) |
| | Volume sampah yang tertangani | (ribu/m3) | NA | 441 | 486.784 | 452.185 | 460.032 | 460 | Melampaui (>) |
| **6** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | | |
| | Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persen | NA | 97.83 | 97.83 | 99.55 | 99.63 | 91 | Melampaui (>) |
| | Cakupan Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil | Persen | NA | 91.74 | 85 | 85 | 78.05 | 90 | Belum tercapai (<) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 80.18 | 80.2 | 83.9 | 92.3 | 90.01 | 80.35 | Melampaui (>) |
| **7** | **URUSAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | | |
| | Jumlah Desa Mandiri | Jumlah | 14 | 16 | 22 | 24 | 27 | 22 | Melampaui (>) |
| **8** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | | |
| | Persentase kategori keluarga kurang sejahtera | Persen | 13.49 | 11.94 | 12 | NA | NA | Menurun | Sesuai (=) |
| | Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga | Rata-rata | 3.29 | 3.12 | 3.12 | NA | NA | Menurun | Sesuai (=) |
| | Total Fertility Rate (TFR) | Angka | NA | NA | NA | 1.67 | 1.67 | 1.83 | Belum tercapai (<) |
| **9** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | | |
| | Persentase Penurunan Kecelakaan Lalulintas | Persen | 5 | 6 | 1.99 | 1.95 | 1.83 | 1.83 | Sesuai (=) |
| **10** | **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | | |
| | Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services | Persen | 60 | 70.33 | 77.7 | 80.69 | 101.49 | 85 | Melampaui (>) |
| | Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik | Indeks | - | 75.23 | 75.33 | 78.56 | 100.04 | 83 | Melampaui (>) |
| **11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kesehatan Koperasi | Jumlah | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | Belum tercapai (<) |
| | Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas | Jumlah | 0 | 192 | 183 | 185 | 185 | 180 | Melampaui (>) |
| **12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | | |
| | Layanan perijinan tepat waktu | Persen | 81.6 | 70.98 | 83.87 | 83.8 | 96.92 | 83 | Belum tercapai (<) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 78.99 | 83.08 | 83.29 | 85.89 | 87.89 | 80 | Belum tercapai (<) |
| | Pertumbuhan realisasi investasi | Persen | 12.2 | 12.72 | 11.85 | 9.3 | 3.74 | 9,25 | Belum tercapai (<) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | | |
| | Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikut | Persen | 32 | 31.4 | 34.21 | 32.18 | 40.33 | 29 | Melampaui (>) |
| | Jumlah Pemuda Pelopor | Jumlah | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sesuai (=) |
| **14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | |
| | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | NA | NA | NA | 100 | 100 | 100 | Sesuai (=) |
| | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | NA | NA | NA | 100 | 100 | 100 | Sesuai (=) |
| **15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **PERSANDIAN** | | | | | | | | |
| | Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian | Persen | NA | NA | NA | 10 | 15 | 28 | Belum tercapai (<) |
| | Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident | Persen | NA | NA | NA | 43 | 47 | 45 | Melampaui (>) |
| **16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | |
| | Kalurahan Budaya | Jumlah | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | Belum tercapai (<) |
| | Cakupan Perlindungan Warisan Budaya | Persen | NA | NA | NA | 24 | 24 | 27 | Belum tercapai (<) |
| **17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan (%) | Persen | 28.5 | 29 | 37.72 | 31 | -38.3 | 32 | Belum tercapai (<) |
| **18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | Persentase SKPD yang menyeleng-garaan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik | Persen | 27 | 33 | 46.2 | 52 | 64.8 | 61 | Melampaui (>) |
| **C** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan produksi perikanan | Persen | 0.697 | 5.92 | 1.14 | 1.41 | 1.59 | 1.45 | Melampaui (>) |
| | Produksi Perikanan | Ton | 12191.22 | 12912.57 | 13059.44 | 13243.45 | 13453.92 | 13383 | Melampaui (>) |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan | Persen | 15 | 32.51 | 32.51 | 22.89 | -54.55 | -67 | Melampaui (>) |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Orang | 2800800 | 3405685 | 4204422 | 5166615 | 2348313 | 5486311 | Belum tercapai (<) |
| | Lama Tinggal Wisatawan | Hari | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.56 | 2.1 | Belum tercapai (<) |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan | Persen | 9.94 | 0.113 | 0.13 | 1.57 | 0.71 | 0.1025 | Melampaui (>) |
| | Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura | Persen | 14.09 | 7.94 | 0.85 | 3.83 | 2.91 | 1.1 | Melampaui (>) |
| | Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan | Persen | 7.8 | 0.17 | 0.24 | 1.09 | 2.8 | 0.3 | Melampaui (>) |
| | Pertumbuhan Produksi Daging | Persen | 4.24 | 20.52 | 0.71 | 0.57 | 0.93 | 0.9 | Melampaui (>) |
| | Produksi Daging | Ton | 14742.55 | 14751 | 14855.725 | 15088.317 | 15228.523 | 14644.26 | Melampaui (>) |
| | Produksi Tanaman Pangan | Ton | 215622.67 | 215867 | 216152 | 216152 | 226033.2 | 232034 | Belum tercapai (<) |
| | Produksi Tanaman Hortikultura | Ton | 14363.65 | 15503.7 | 15635.3 | 15635.3 | 16264.3 | 6697.25 | Melampaui (>) |
| | Produksi Tanaman Perkebunan | Ton | 14466.77 | 14490.78 | 145255.81 | 145255.81 | 15122.22 | 14604.08 | Melampaui (>) |
| **4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| **5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | | |
| | - | | - | - | - | - | - | - | |
| **6** | **URUSAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan Ekspor | Persen | 7 | 7 | 13.96 | 14.61 | -1.3 | 7 | Belum tercapai (<) |
| | Jumlah Pasar Tipe A | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | Melampaui (>) |
| | Pertumbuhan PDRB Subkategori Perdagangan | Persen | 6.54 | 5.79 | 5.59 | 5.11 | -4.2 | 5.62 | Belum tercapai (<) |
| **7** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | | |
| | Cakupan industri kreatif | Persen | 39.95 | 41.11 | 41.11 | 46.2 | 46.2 | 47 | Belum tercapai (<) |
| | Pertumbuhan Industri | Persen | 2 | 3.4 | 3.49 | 3.5 | 1.8 | 3 | Belum tercapai (<) |
| **8** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | |
| | Jumlah KK Transmigran | Jumlah | 50 | 12 | 28 | 20 | 20 | 50 | Belum tercapai (<) |
| **D** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| **1** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | |
| | Nilai Evaluasi Kinerja PD | Angka | 65 | 70 | 76.19 | 76.16 | 76 | 71 | Melampaui (>) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 78.78 | 87.57 | 88.7 | 86.97 | 87.89 | 83 | Melampaui (>) |
| | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Angka | 3,3 (Sangat Tinggi) | 3,4 (Sangat Tinggi) | 3,4 (Sangat Tinggi) | 3,4478 (Sangat Tinggi) | 3,4 (Sangat Tinggi) | 3,7 (Sangat Tinggi) | Belum tercapai (<) |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | Angka | 73,66 (BB) | 77,9 (BB) | 81,39 (A) | 81,91 (A) | 80,85 (A) | 82 (A) | Belum tercapai (<) |
| | Persentase Belanja Pegawai | Persen | 55 | 52 | 43.46 | 47.37 | 47 | 45 | Melampaui (>) |
| **2** | **SEKRETARIAT DEWAN** | | | | | | | | |
| | Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama | Persen | 94 | 94 | 100 | 82 | 100 | 100 | Sesuai (=) |
| **E** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| **1** | **PERENCANAAN** | | | | | | | | |
| | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah | Persen | NA | 94.35 | 105.46 | 107.31 | 98.77 | 94.9 | Melampaui (>) |
| | Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD | Persen | NA | 90 | 106.57 | 99.4 | 98.81 | 91.1 | Melampaui (>) |
| **2** | **KEUANGAN** | | | | | | | | |
| | Opini BPK terhadap | Kategori | 1 (WTP) | 1 (WTP) | 1 (WTP) | 1 (WTP) | 1 (WTP) | 1 (WTP) | Sesuai (=) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | laporan keuangan | | | | | | | | |
| | Persentase SILPA terhadap APBD | Persen | 14.04 | 12.27 | 11.41 | 12.22 | 10.15 | Menurun | Sesuai (=) |
| | Persentase belanja pendidikan (20%) | Persen | 38.95 | 31.92 | 31.11 | 30.2 | 27.09 | 20 | Melampaui (>) |
| | Persentase belanja kesehatan (10%) | Persen | 18.14 | 17.76 | 18.66 | 17.25 | 18.23 | 10 | Melampaui (>) |
| | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | Persen | 37.22 | 45.46 | 47.25 | 48.32 | 44.09 | Menurun | Sesuai (=) |
| | | Persen | 62.78 | 54.54 | 52.75 | 51.68 | 55.91 | Meningkat | Sesuai (=) |
| | Bagi hasil kabupaten dan Kalurahan | Persen | 0.62 | 0.69 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | Meningkat | Sesuai (=) |
| | Penetapan APBD | Kategori | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Sesuai (=) |
| **3** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | |
| | Persentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur | Persen | 84 | 89 | 89.03 | 90.14 | 92.38 | 91 | Melampaui (>) |
| | Nilai Indeks Kepuasan Aparatur | Indeks | 73.55 | 81.32 | 82.44 | 87.24 | 88.33 | 81.8 | Melampaui (>) |
| **4** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | |
| | Jumlah Penelitian/Survei dan Pengabdian kepada Masyarakat | Jumlah | 4781 | 3783 | 3644 | 2573 | 217 | Meningkat | Belum tercapai (<) |
| **F** | **UNSUR PENGAWASAN** | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | |
| | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | |
| | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal | Persen | 90.5 | 91.78 | 90.49 | 91.73 | 91.5 | 91,5 | Sesuai (=) |
| **G** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | |
| | **KECAMATAN** | | | | | | | | |
| | Rerata IKM | Indeks | 80 | 91.8 | 93.5 | 96.17 | 94.13 | 90 | Belum tercapai (<) |
| **G** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | |
| | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | | |
| | Jumlah intoleransi di masyarakat | Persen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sesuai (=) |
| | Persentase Pemilih yang Berpartisipasi | Persen | 0 | 0 | 0 | 87.89 | 80.32 | 70 | Melampaui (>) |
| **III** | **Aspek Daya Saing** | | | | | | | | |
| | Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI) | Klasifikasi | 62.9 | 75 | 75 | 7.72 | 7.7 | 8 | Belum tercapai (<) |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | NA | 71.57 | 74.36 | 76.77 | 76.77 | 78 | Belum tercapai (<) |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian kinerja | | | | | Standar (Target 2020) | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | Terhadap Layanan Infrastruktur | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 47.53 | 45.5 | 53.36 | 60.4 | 63.02 | 63 | Melampaui (>) |
| | Desa Tangguh Bencana | Persen | 20 | 29.33 | 37.33 | 46.67 | 46.67 | 45.33 | Melampaui (>) |
| | Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persen | 70.12 | 70.42 | 70.45 | 72.5 | 75.01 | 75 | Melampaui (>) |
| | Angka Kriminalitas | Angka | 0.061 | 0.074 | 0.055 | 0.074 | 0.076 | 0.065 | Belum tercapai (<) |
| | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 54.8 | 57 | 68.4 | 69.7 | 67.52 | 70 | Belum tercapai (<) |
| | Nilai Tukar Petani (NTP) | Angka | 103.67 | 102.4 | 103.16 | 103.75 | 101.13 | 101.9 | Belum tercapai (<) |

Sumber: Bappeda, 2021

## 2.6. KINERJA RPJMD 2016 – 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengalihan beberapa kewenangan dan urusan antar tingkat pemerintahan, perubahan substansi dan sistematika RPJMD dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dilakukan perubahan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018. Perubahan ini tidak mencakup indikator sasaran daerah, namun dilakukan penyesuaian target capaiannya. *Cascading* dokumen lima tahunan beserta target kinerja sasaran daerah periode kemarin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 227 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2016-2021 Kabupaten Bantul

| VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, Dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **MISI** | **TUJUAN** | **INDIKATOR TUJUAN** | **SASARAN DAERAH** | **INDIKATOR SASARAN** | **SATUAN** | **RPJMD** | **KONDISI AWAL** | **TARGET CAPAIAN** | | | | | | **KONDISI AKHIR** |
| | | | | | | | | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| 1 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN | Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI) | Terwujudnya penyelengga-raanpemerintahan daerah yang berkualitas | Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI) | Klasifikasi | RPJMD 11/2016 | | 60 (Baik) | 65 (Baik) | 70 (Baik) | 75 | 80 (Baik) | 85 (Sangat Baik) | |
| | | | | | | | Realisasi | N/A | 62,9 (Baik) | 75 (Baik) | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 7,5 (Baik) | 8,0 (Baik) | 8,5 (Sangat Baik) | 8,5 (Sangat Baik) |
| 2 | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur | Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Umur Harapan Hidup | Tahun | RPJMD 11/2016 | | 73,26 | 73,28 | 73,3 | 73.31 | 73.32 | 73.33 | |
| | | | | | | | Realisasi | 73,24 | 73,44 | 73,47 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 73,6 | 73,65 | 73,70 | 73,70 |
| | | | | Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas | Angka Harapan Lama sekolah | Tahun | RPJMD 11/2016 | | 15 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | |
| | | | | | | | Realisasi | 15 | 13,55 | 14,73 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 15,23 | 15,38 | 15,54 | 15,54 |
| 3 | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Angka Kemiskinan | Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu | Angka Kemiskinan | Persen | RPJMD 11/2016 | | 14,41 | 13,66 | 12,91 | 12,16 | 11,41 | 10,66 | |
| | | | | | | | Realisasi | 15,16 | 14,55 | 14,07 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | 12,13 | 10,86 | 9,59 | 8,32 | 8,32 |
| | | | Pertumbuhan Ekonomi | Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | RPJMD 11/2016 | | 5,25 | 5,3 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,6 | |
| | | | | | | | Realisasi | 5,1 | 5,06 | 5,1 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 5,45 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| | | | | | Gini Ratio | Angka | RPJMD 11/2016 | | 0,3149 | 0,3121 | 0,3093 | 0,3065 | 0,305 | 0,3025 | |
| | | | | | | | Realisasi | 0,3177 | 0,3967 | 0,41 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
| | | | | Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul | Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan | Persen | RPJMD 11/2016 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| | | | | | | | Realisasi | 4,85 | 12,03 | 21,59 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 24 |
| | | | | Terciptanya | Cakupan | Persen | RPJMD | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |

| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | RPJMD | KONDISI AWAL | TARGET CAPAIAN | | | | | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | industri kreatif yang berkualitas | industri kreatif | | 11/2016 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Realisasi | 22 | 39 | 41,11 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 45 | 47 | 50 | 50 |
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat | Pertumbuhan produksi tanaman pangan | Persen | RPJMD 11/2016 | | 0,1005 | 0,1010 | 0,1015 | 0,102 | 0,1025 | 0,103 | |
| | | | | | | | Realisasi | 0,1001 | 9,94 | 0,1133 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 0,1020 | 0,.1025 | 0,1030 | 0,1030 |
| | | | | | Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura | Persen | RPJMD 11/2016 | | 1,00 | 1,025 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,125 | |
| | | | | | | | Realisasi | 0,75 | 14,09 | 7,94 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 1,08 | 1,10 | 1,125 | 1,125 |
| | | | | | Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan | Persen | RPJMD 11/2016 | | 0,10 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | |
| | | | | | | | Realisasi | 0,09 | 7,8 | 0,17 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
| | | | | | Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) | Persen | RPJMD 11/2016 | | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | |
| | | | | | | | Realisasi | 0,45 | 4,24 | 20,52 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat | Pertumbuhan produksi perikanan | Persen | RPJMD 11/2016 | | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | |
| | | | | | | | Realisasi | 1,20 | 0,35 | 5,92 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,50 |
| 4 | Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana | Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur | Klasifikasi | RPJMD 11/2016 | | N/A | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |
| | | | | | | | Realisasi | N/A | N/A | 71,57 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 76 | 78 | 80 | 80 |
| | | | | Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | RPJMD 11/2016 | | 39 | 45 | 50 | 56 | 63 | 72 | |
| | | | | | | | Realisasi | 38 | 31,35 | 45,1 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 56 | 63 | 72 | 72 |
| | | | | Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana | Desa Tangguh Bencana | Persen | RPJMD 11/2016 | | 20 | 22,66 | 25,34 | 28 | 30,66 | 33,34 | |
| | | | | | | | Realisasi | 18 | 15 | 29,33 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 38,66 | 45,33 | 52 | 52 |

| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | RPJMD | KONDISI AWAL | TARGET CAPAIAN | | | | | | KONDISI AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persen | RPJMD 11/2016 | | 80 | 81 | 70,35 | 83 | 84 | 85 | |
| | | | | | | | Realisasi | 79 | 70 | 70,24 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 72,5 | 75 | 80,0 | 80,0 |
| 5 | Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa | Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat | Angka Kriminalitas | Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat | Angka Kriminalitas | Persen | RPJMD 11/2016 | | 0,040 | 0,038 | 0,035 | 0,03 | 0,028 | 0,027 | |
| | | | | | | | Realisasi | 0,04 | 0,061 | 0,074 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 0,070 | 0,065 | 0,060 | 0,060 |
| | | Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | RPJMD 11/2016 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| | | | | | | | Realisasi | 35 | 54,8 | 57,01 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Perubahan RPJMD | | - | - | - | 65 | 70 | 75 | 75 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Capaian kinerja pada Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 228 Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Bantul

| SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | Realisasi | | | | 2020 | | | Target akhir RPJMD | Capaian 2020 thd akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Target | Realisasi | %-realisasi | | |
| Terwujudnya penyelengga-raanpemerintahan daerah yang berkualitas | Indeks Tata Kelola Pemerintahan (*Indonesia Governance Index*/IGI) | Klasifikasi | 62,9 | 75 | 75 | 7,72 | 8,0 | 7,70 | 96,25 | 8,50 | 90,59 |
| Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73,5 | 73,56 | 73,66 | 73,77 | 73,65 | 73,86 | 100,29 | 73,70 | 100,22 |
| Terwujudnya | Angka | Tahun | 14,73 | 14,74 | 15,03 | 15,15 | 15,38 | 15,17 | 98,63 | 15,54 | 97,62 |

| SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | Realisasi | | | | 2020 | | | Target akhir RPJMD | Capaian 2020 thd akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Target | Realisasi | %-realisasi | | |
| akses dan mutu pendidikan yang berkualitas | Harapan Lama sekolah | | | | | | | | | | |
| Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu | Angka Kemiskinan | Persen | 14,55 | 14,07 | 13,43 | 12,92 | 9,59 | 13,50 | 59,22 | 8.32 | 37,74 |
| Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi | Persen | 5,05 | 5,1 | 5,47 | 5,53 | 5,50 | -1,66 | -30,18 | 5,6 | -29,64 |
| | Gini Ratio | Angka | 0,397 | 0,413 | 0,448 | 0,428 | 0,38 | 0,418 | 99,74 | 0,37 | 97,03 |
| Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul | Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan | Persen | 15 | 32,51 | 32,51 | 22,89 | 23 | -54,55 | -237,17 | 24 | -227,29 |
| Terciptanya industri kreatif yang berkualitas | Cakupan industri kreatif | Persen | 39,95 | 41,11 | 41,11 | 46,20 | 47 | 46,20 | 98,30 | 50 | 92,40 |
| Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat | Pertumbuhan produksi tanaman pangan | Persen | 0,074 | 0,1133 | 0,13 | 3,83 | 1,10 | 0,71 | 64,40 | 0,10 | 689,63 |
| | Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura | Persen | 14,09 | 36,974 | 0,85 | 1,09 | 1,10 | 2,91 | 264,55 | 1,125 | 258,67 |
| | Pertumbuhan produksi tanaman | Persen | 0,054 | 0,166 | 0,24 | 0,57 | 0,30 | 2,80 | 933,33 | 0,35 | 800,00 |

| SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | Realisasi | | | | 2020 | | | Target akhir RPJMD | Capaian 2020 thd akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Target | Realisasi | %-realisasi | | |
| | perkebunan | | | | | | | | | | |
| | Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas) | Persen | 4,24 | 20,52 | 0,71 | 1,57 | 0,90 | 0,93 | 103,33 | 1 | 93,00 |
| Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat | Pertumbuhan produksi perikanan | Persen | 0,697 | 5,92 | 1,14 | 1,41 | 1,45 | 1,59 | 109,66 | 1,50 | 106,00 |
| Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur | Angka | NA | 71,57 | 74,36 | 76,77 | 78,00 | 76,77 | 98,42 | 80,00 | 95,96 |
| Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 47,53 | 45,5 | 53,36 | 60,40 | 63,00 | 63,02 | 100,03 | 72,00 | 87,53 |
| Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana | Desa Tangguh Bencana | Persen | 20 | 29,33 | 37,33 | 46,67 | 45,33 | 46,67 | 102,93 | 52,00 | 89,73 |
| Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang | Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persen | 70,12 | 70,42 | 70,45 | 72,50 | 75,00 | 75,01 | 100,01 | 80,00 | 93,76 |

| SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | Realisasi | | | | 2020 | | | Target akhir RPJMD | Capaian 2020 thd akhir RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Target | Realisasi | %-realisasi | | |
| Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat | Angka Kriminalitas | Angka | 0,061 | 0,074 | 0,055 | 0,074 | 0,065 | 0,076 | 83,080 | 0,060 | 73,33 |
| Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 54,8 | 57 | 68,4 | 69,70 | 70,00 | 67,52 | 96,46 | 70,00 | 96,46 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Dari 13 sasaran daerah dengan 19 indikator sasaran, capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD diperoleh nilai terendah minus 227,29% untuk pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan dan nilai tertinggi 800% untuk pertumbuhan produksi tanaman perkebunan.

## 2.7. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengamanatkan bahwa urusan wajib dasar sebagai dasar penyusunan SPM ada enam bidang meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Materi muatan SPM meliputi:

a. Jenis pelayanan dasar

   Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

   Jenis pelayanan dasar berbeda-beda pada masing-masing jenis SPM (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial).

   Setiap jenis pelayanan dasar memiliki mutu pelayanan dasar yang ditetapkan oleh kementrian teknis.

b. Mutu pelayanan dasar

   Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

   Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Terkait.

c. Penerima layanan dasar

   Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya.

Pemenuhan SPM pada masing-masing bidang dapat menggunakan indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang.

### 2.7.1. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan

(Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang pendidikan.

Tabel 2 229 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

| No | Bidang Urusan Pendidikan | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | PAUD | Pendidikan anak usia dini | Jumlah anak usia 5 – 6 tahun dalam PAUD yang mendapat layanan | 27.060 | 27.060 | 100 | 25.029 | 25.029 | 100 |
| 2 | SD | Pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7 – 12 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI) yang mendapat layanan | 81.294 | 81.294 | 100 | 82.166 | 82.166 | 100 |
| 3 | SMP/MTs | Pendidikan dasar | Jumlah anak usia 12 – 15 tahun dalam pendidikan dasar (SMP/MTs) yang mendapat layanan | 39.578 | 39.578 | 100 | 41.006 | 41.006 | 100 |
| 4 | Pendidikan Kesetaraan | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 1.373 | 1.373 | 100 | 2.046 | 2.046 | 100 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021

### 2.7.2. Bidang Kesehatan

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang kesehatan.

Tabel 2 230 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

| No | Jenis Layanan Dasar | Indikator | 2019 | | | 2020 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sasaran | Realisasi | Capaian (%) | Sasaran | Realisasi | Capaian (%) | |
| 1. | Pelayanan kesehatan ibu hamil. | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil | 14.312 | 13.848 | 97 | 12.708 | 12.088 | 95,12 | 2019:<br>Beberapa ibu hamil belum melaksanakan K4 pada trimester 3 karena adanya mobilisasi penduduk atau pindah daerah<br><br>2020:<br>Ada ibu hamil kunjungan K1 sudah lewat dan tidak terpantau |
| 2. | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | 13.088 | 13.072 | 99,8 | 12.708 | 12.697 | 99,91 | 2019:<br>Ada ibu bersalin tidak di fasyankes walaupun dilayani oleh nakes<br><br>2020:<br>Ada ibu bersalin tidak di fasyankes |
| 3. | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 13.072 | 10.998 | 84,1 | 12.624 | 10.680 | 84,60 | 2019:<br>Beberapa bayi gagal IMD<br><br>2020:<br>- Beberapa bayi baru lahir belum dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).<br>- Kunjungan Neonatal (KN3) ditunda bahkan tidak dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19 |

| No | Jenis Layanan Dasar | Indikator | 2019 | | | 2020 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sasaran | Realisasi | Capaian (%) | Sasaran | Realisasi | Capaian (%) | |
| 4. | Pelayanan kesehatan balita | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 60.005 | 42.135 | 70,2 | 53.647 | 39.055 | 72.80 | 2019:<br>Masih ada balita yang belum tercatat ditimbang secara rutin<br><br>2020:<br>Deteksi Tumbuh Kembang Balita (DTKB) tidak dilaksanakan dengan maksimal karena pandemi COVID-19 |
| 5. | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 27.861 | 27.861 | 100 | 113.058 | 106.072 | 93,82 | 2020:<br>-screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19<br>-aplikasi mobscreen penjarkes belum optimal |
| 6. | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar | 98.438 | 98.438 | 100 | 584.084 | 407.090 | 69.70 | 2020:<br>screening tidak maksimal karena pandemi COVID-19 |
| 7. | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar | 49.942 | 41.063 | 82,2 | 121.619 | 35.247 | 28.98 | 2019:<br>Keterbatasan lansia mengisi form skrining<br><br>2020:<br>Banyak lansia yang masih terkendala dalam pengisian instrument deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan. |

| No | Jenis Layanan Dasar | Indikator | 2019 | | | 2020 | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sasaran | Realisasi | Capaian (%) | Sasaran | Realisasi | Capaian (%) | |
| 8. | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 29.337 | 29.337 | 100 | 60.204 | 36.777 | 61.09 | 2020: penderita Hipertensi yang mengakses fasyankes swasta belum terdata |
| 9. | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 11.954 | 11.954 | 100 | 21.138 | 13.584 | 64.26 | 2020: penderita yang mengakses fasyankes swasta belum terdata |
| 10. | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Persentase ODGJ berat yang mendapatan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 2.999 | 2.999 | 100 | 2.353 | 2.178 | 92.56 | 2020: kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah |
| 11. | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan peayanan TBC sesuai standar | 9.224 | 9022 | 98 | 4.438 | 4.438 | 100 | 2019: Orang terduga tuberculosis, disebabkan penderita TB tidak taat minum obat secara rutin |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 12.787 | 12.787 | 100 | 16.101 | 16.101 | 95.60 | 2020: Pandemi Covid-19 menyebabkan: - Pemeriksaan ANC terpadu tidak dilakukan pada beberapa ibu hamil - Layanan VCT mobile berhenti |

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Selain beberapa sebab di atas, capaian pelayanan tidak mencapai 100% juga disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan turunnya kunjungan karena ketakutan masyarakat periksa di fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19.

### 2.7.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2 231 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2020

| No | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) | 100% | $\frac{222.979}{222.979} x\ 100\ \% = 100\ \%$ | $\frac{329.616}{329.616} x\ 100\ \% = 100\ \%$ |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) | 100% | $\frac{318.539}{318.539} x\ 100\ \% = 100\ \%$ | $\frac{329.616}{329.616} x\ 100\ \% = 100\ \%$ |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

### 2.7.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2 232 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR (Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018) | TARGET | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota | Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani | 100% | $\frac{110}{110} x\ 100\ \% = 100\ \%$ | $\frac{10}{10} x\ 100\ \% = 100\ \%$ |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh penyediaan rumah layak huni karena terkena relokasi program pemerintah daerah | 100% | $\frac{5}{5} x\ 100\ \% = 100\ \%$ | $\frac{0}{0} x\ 100\ \% = 100\ \%$ |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

### 2.7.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengatur standar pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan dari dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..

Tabel 2 233 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Capaian | 2019 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana | 16.655 | 16.655 | 100% | 826.056 | 826.056 | 100% |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 82.334 | 82.334 | 100% | 954.706 | 954.706 | 100% |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 11.464 | 11.464 | 100% | 3.159 | 3.159 | 100% |
| 5. | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 227 | 227 | 100% | 130 | 130 | 100% |

Sumber: Satpol PP dan BPBD, 2021

### 2.7.6 Bidang Sosial

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi SPM bidang sosial.

Tabel 2 234 Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Rumus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial (Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma) | $\frac{200}{200} x\ 100\ \% = 100\%$ | $\frac{6535}{6535} x\ 100\ \% = 100\%$ | $\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$ |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial (Pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial) | $\frac{500}{500} x\ 100\ \% = 100\%$ | $\frac{1475}{1475} x\ 100\ \% = 100\%$ | $\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$ |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial (Bimbingan sosial dan bantuan bagi KK miskin non potensial/kesrakat dan lansia rentan sosial ekonomi) | $\frac{200}{200} x\ 100\ \% = 100\%$ | $\frac{7684}{7684} x\ 100\ \% = 100\%$ | $\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$ |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial (Penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat) | $\frac{57}{57} x\ 100\ \% = 100\%$ | $\frac{40}{40} x\ 100\% = 100\%$ | $\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan} x\ 100\ \%$ |

| No. | Uraian | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Rumus |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota (Penyediaan beras penyangga/Buffer stock) | $\frac{92}{92}\ x\ 100\% = 100\%$ | $\frac{405}{405}\ x\ 100\% = 100\%$ | $\frac{Jumlah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Target\ Penangan}\ x\ 100\ \%$ |

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, 2021

## 2.8. PARTISIPASI LEMBAGA SWASTA MELALUI CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) adalah bentuk tanggung jawab organisasi atau perusahaan terhadap masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Kabupaten Bantul, BUMN, lembaga keuangan non BUMN, instansi kesehatan, instansi pendidikan, dan perusahaan umum yang ada di Kabupaten Bantul telah banyak mengalokasikan dana *CSR* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Instansi/lembaga dan perusahaan yang memberikan dana CSR kepada masyarakat Bantul pada tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2 235 Pemanfaatan CSR di Kabupaten Bantul Tahun 2020

| No | Nama Lembaga/Perusahaan | Bidang Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL | Pariwisata, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan | 1.146.105.000 |
| 2 | BANK BRI KC BANTUL | Kesehatan | 25.000.000 |
| 3 | BANK BUKOPIN KCP BANTUL | Kesehatan | 19.000.000 |
| 4 | BANK MUAMALAT INDONESIA | Sosial, Pendidikan | 167.000.000 |
| 5 | BANK PANIN DUBAI SYARIAH | Sosial | 1.000.000 |
| 6 | BANK MANDIRI TASPEN YOGYAKARTA | Sosial, Kesehatan | 24.925.000 |
| 7 | BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA | Sosial | 381.967.600 |
| 8 | KSPPS TAMZIS BINA UTAMA KC BANTUL | Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup | 63.984.000 |
| 9 | KSU AMANAH INSANI MAKMUR | Sosial | 9.860.000 |

| No | Nama Lembaga/Perusahaan | Bidang Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 10 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK | Sosial, Pendidikan, Kesehatan | 2.178.177.225 |
| 11 | KSPPS BMT ASSALAM | Sosial, Pendidikan, Kesehatan | 106.327.000 |
| 12 | KSPPS BMT AD DA'WAH | Sosial, Pendidikan, Kesehatan | 55.393.900 |
| 13 | KSPPS BMT INTI TENTREM NUGRAHA (NITEN) | Sosial, Kesehatan, Pendidikan | 82.799.865 |
| 14 | KSPPS BMT MITRAMA | Sosial, Kesehatan | 68.897.500 |
| 15 | KOPWAN BMT AN-NISA' | Sosial | 900.000 |
| 16 | PT. PLN (PERSERO) UP3 YOGYAKARTA | Sosial | 165.000.000 |
| 17 | PT. TELKOM INDONESIA | UMKM dan Ekonomi Kreatif | 508.000.000 |
| 18 | PT. BANGUNAN JAYA MANDIRI | Sosial, Pendidikan, Kesehatan | 14.070.000 |
| 19 | PT. IDE STUDIO INDONESIA | Sosial, Pendidikan | 9.500.000 |
| 20 | PT. PRODUK REKREASI (KIDS FUN) | Sosial | 1.500.000 |
| 21 | PT. MADUBARU | Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan | 978.125.000 |
| 22 | AGUNG SWALAYAN | Kesehatan | 1.520.000 |
| 23 | KSP KOPERASI KREDIT ADIL DLINGO | Sosial, Pendidikan, Kesehatan | 25.975.000 |
| 24 | PT. CAHAYA MULIA PERSADA NUSA | Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan | 47.322.000 |
| 25 | PT. SURADI SEJAHTERA RAYA | Sosial, Pendidikan, Kesehatan | 239.500.000 |
| 26 | BANK INDONESIA PERWAKILAN DIY | UMKM dan Ekonomi Kreatif | 320.000.000 |
| 27 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA | Kesehatan | 8.140.000 |
| 28 | KSPPS BMT MOJO BANGUN SENTOSA | Sosial, Kesehatan | 45.588.000 |
| 29 | BANK TABUNGAN NEGARA KC YOGYAKARTA | Sosial | 60.000.000 |
| 30 | BANK TABUNGAN NEGARA KC BANTUL | Kesehatan | 3.777.500 |
| 31 | GAPENSI KABUPATEN BANTUL | Kesehatan | 28.500.000 |
| 32 | KELUARGA ALUMNI UGM (KAGAMA) | Kesehatan | 24.492.000 |
| 33 | IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) BANTUL | Kesehatan | Tidak menyebut nominal |
| 34 | PT. AMEYA LIVINGSTYLE INDONESIA | Kesehatan | 60.000.000 |
| 35 | YAYASAN WAHANA MANDIRI INDONESIA (YWMI) | Sosial, Lingkungan Hidup | 1.108.723.000 |
| 36 | PT. OUT OF ASIA | Sosial, LIngkungan HIdup, Pendidikan | 96.330.000 |
| 37 | PT. SAMITEX SEWON | Sosial, Kesehatan, Lingkungan Hidup | 16.200.000 |
| 38 | PERTAMINA TBBM REWULU | UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan, | 601.775.000 |

| No | Nama Lembaga/Perusahaan | Bidang Kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|---|
| | | Lingkungan Hidup | |
| 39 | KSPPS BMT EL BUMMI 381 | Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan | 182.931.000 |
| 40 | KSPPS BMT RIZQI BAROKAH | Pendidikan | 15.236.600 |
| 41 | KSPPS BMT SABIBUL MUHTADIN | Sosial, Kesehatan | 21.636.300 |
| 42 | KSPPS BMT INSAN SADAR USAHA | Sosial | 47.155.000 |
| 43 | KOPPONTREN AL-MUHSIN | Sosial | 6.033.000 |
| 44 | REAL ESTATE INDONESIA (REI) DPD DIY | Kesehatan | 22.505.000 |
| 45 | ASTRA MOTOR YOGYAKARTA | Kesehatan | 20.000.000 |
| 46 | PT. YOGYAKARTA TEMBAKAU INDONESIA | Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan | 126.790.500 |
| 47 | KSPPS BMT ARTHA AMANAH SANDEN | Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan | 474.660.750 |
| 48 | PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) KC YIA | Sosial, Lingkungan Hidup | 116.112.400 |
| 49 | ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI) | Kesehatan | 8.500.000 |
| 50 | PAGUYUBAN SUGENG REGIONAL DIY | Kesehatan | Tidak menyebut nominal |
| 51 | CABANG MUHAMMADIYAH KAPANEWON DLINGO | Kesehatan | Tidak menyebut nominal |
| 52 | KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU) MALAYSIA | Kesehatan | 2.550.000 |
| 53 | PT. ADI SATRIA ABADI (ASA) | Sosial | 47.060.000 |
| 54 | ROS IN HOTEL | Sosial | 19.300.000 |
| 55 | PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO | Sosial | 40.000.000 |
| 56 | PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) | Sosial | 40.000.000 |
| | | | 9.885.845.140 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

# BAB III
# GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainabilty*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## 3.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu dapat ditunjukkan dengan menganalisis pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, disamping itu juga dengan pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, Salah satu yang menunjukkan hal tersebut adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 9 (sembilan) kali berturut-turut sejak tahun 2012.

Dari sisi pendapatan dan belanja, Pada tahun 2016-2019 pendapatan dan belanja daerah selalu meningkat, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya dampak pandemi Covid-19.

### 3.1.2. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1, berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah. Namun demikian, patut dicermati adanya pola penurunan kemampuan mendanai belanja daerah, dari sebesar 1,124 pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 1,107 pada tahun 2020. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya: (1) menyusun *readiness criteria* untuk mencari dana APBN, DAK, dan Dana Keistimewaan; (2) opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan; (3) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah; (4) Pinjaman baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri; dan (4) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri.

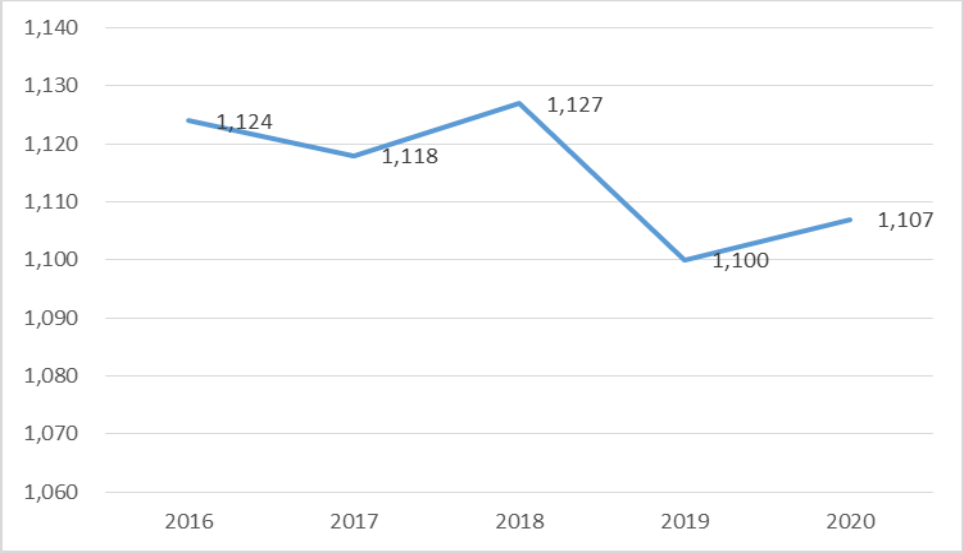


Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3.3 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah

Sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Pemerintah Daerah telah berupaya dalam pemenuhan pembiayaan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR), dan pada tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2015 tidak berlaku lagi. Pembiayaan CSR lebih dipertegas untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, dan program strategis yang selaras dengan prioritas program pemerintah daerah. Berikut tabel yang menunjukan realisasi CSR dari tahun 2016 sampai dengan 2020

yang menunjukkan tingkat pertumbuhan rerata 59,98% per tahun, sedangkan jumlah perusahaan yang memberikan CSR bersifat fluktuatif.

Tabel 3 1 Realisasi CSR Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Tahun | perusahaan | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 62 | 3.218.324.974 |
| 2 | 2017 | 41 | 10.550.863.240 |
| 3 | 2018 | 54 | 6.378.310.667 |
| 4 | 2019 | 61 | 8.629.852.289 |
| 5 | 2020 | 56 | 9.885.845.140 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan dalam rencana dan program kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan pada upaya mengatasi permasalahan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kinerja APBD merupakan gambaran singkat kinerja pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul meliputi perkembangan pendapatan dan belanja serta pembiayaan.

Tabel 3 2 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rerata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **4** | **PENDAPATAN** | 2,000,335 | 2,086,879 | 2,227,753 | 2,269,539 | 2.210.246 | 2,59% |
| 4:01 | Pendapatan Asli Daerah | 404,455 | 494,179 | 462,654 | 505,929 | 479.610 | 4,99% |
| 4:02 | Dana Perimbangan | 1,331,353 | 1,287,256 | 1,355,457 | 1,351,157 | 1.268.338 | -1,12% |
| 4:03:00 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 264,527 | 305,444 | 409,642 | 412,453 | 462.298 | 15,59% |
| | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA** | 2,016,544 | 2,076,742 | 2,165,652 | 2,283,585 | 2 .199.124 | 2,25% |
| 5:01 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.265.890 | 1.116.642 | 1.142.422 | 1.180.251 | 1.276.279 | 0,49% |
| 5:02 | BELANJA LANGSUNG | 750.654 | 960.100 | 1.023.229 | 1.103.334 | 922.845 | 6,49% |
| | Surplus (Defisit) | -16,209 | 10,137 | 62,101 | -14,046 | 11.121 | 12,07% |
| | | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | - | - | - | - | | |
| 6:01 | PENERIMAAN DAERAH | 293,078 | 261,454 | 256,630 | 296,985 | 238.679 | -4,14% |
| 6:02 | PENGELUARAN DAERAH | 24,752 | 24,365 | 39,573 | 48,892 | 11.599 | 2,03% |
| | | | | | | | |
| | **SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN** | 268,326 | 237,089 | 217,057 | 248,093 | 227.080 | -3,57% |
| | Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | 252,117 | 247,226 | 279,158 | 234,047 | 238.201 | -0,85% |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016-2020, sebesar 2,59% pertahun, sedangkan pertumbuhan rerata belanja daerah sebesar 2,25% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah semakin meningkat. Ditinjau dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan cenderung lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan adalah dari SiLPA, sedangkan kontribusi terbesar terhadap pengeluaran pembiayaan adalah dari penyertaan modal.

#### 3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, semua kelompok pendapatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan total pendapatan daerah. Uraian pertumbuhan pada masing-masing kelompok pendapatan daerah Kabupaten Bantul selama periode tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.2.

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rerata sebesar 4,99% pertahun atau melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang hanya berada pada kisaran 3-4% pertahun. Tahun 2017 pada komponen pendapatan lain-lain PAD yang sah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi hal ini disebabkan adanya Pendapatan Hibah dari BOS, namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pos PAD menurun dari tahun sebelumnya, hal ini karena ada kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah. Pertumbuhan komponen PAD dari pajak daerah mencapai sebesar 12,56% pertahun, retribusi tumbuh

8,11% pertahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh sebesar 4,85% pertahun, dan Lain-lain PAD yang sah tumbuh 1,37% pertahun;

- Dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 1,12%, Bagi Hasil Pajak mengalami pertumbuhan rerata sebesar 8,83%, Bagi Hasil SDA mengalami penurunan rerata sebesar 16,33%, DAU mengalami penurunan sebesar 1,87%, dan DAK mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,30%;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh 15,59% pertahun.

Tabel 3 3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.Juta) Tahun Anggaran 2016-2020

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **4** | **PENDAPATAN** | 2,000,335 | 2,086,879 | 2,227,753 | 2,269,539 | 2.210.246 | 2,59% |
| **4:01** | **Pendapatan Asli Daerah** | 404,455 | 494,179 | 462,654 | 505,929 | 479.610 | 4,99% |
| 4:01:01 | Pendapatan Pajak Daerah | 133,475 | 165,562 | 182,127 | 213,629 | 200.826 | 12,56% |
| 4:01:02 | Hasil Retribusi Daerah | 26,613 | 31,576 | 46,053 | 48,278 | 30.466 | 8,11% |
| 4:01:03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 21,068 | 20,130 | 19,653 | 21,945 | 25.138 | 4,85% |
| 4:01:04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 223,299 | 276,911 | 214,821 | 222,077 | 223.181 | 1,37% |
| **4:02** | **Dana Perimbangan** | 1,331,353 | 1,287,256 | 1,355,457 | 1,351,157 | 1.268.338 | -1,12% |
| **4:02:01** | Bagi Hasil Pajak | 34,633 | 30,048 | 29,871 | 19,355 | 35.645 | 8,83% |
| 4:02:02 | Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | 4,706 | 4,823 | 714 | 592 | 11.121 | -16,33% |
| 4:02:03 | Dana Alokasi Umum | 999,814 | 982,251 | 982,251 | 1,015,303 | 923.214 | -1,87% |
| 4:02:04 | Dana Alokasi Khusus | 292,200 | 270,134 | 342,621 | 315,907 | 308.644 | 2,30% |
| **4:03:00** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | 264,527 | 305,444 | 409,642 | 412,453 | 462.298 | 15,59% |
| 4:03:01 | Pendapatan Hibah | 6,149 | 10,599 | 139,342 | 77,281 | 83.860 | 312,75% |
| 4:03:02 | Bagi Hasil Pajak dr Prov dan Pemda lainya | 137,137 | 145,069 | 155,587 | 164,966 | 159.399 | 3,92% |
| 4:03:03 | Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | 99,913 | 131,691 | 113,326 | 165,850 | 191.989 | 19,99% |
| 4:03:04 | Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lainnya | 21,328 | 18,085 | 1,387 | 4,356 | 27.050 | 156,88% |
| 4:03:04 | Pendapatan Lainnya | - | - | - | - | - | - |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016–2020, diolah

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Bantul masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga diharapkan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan.

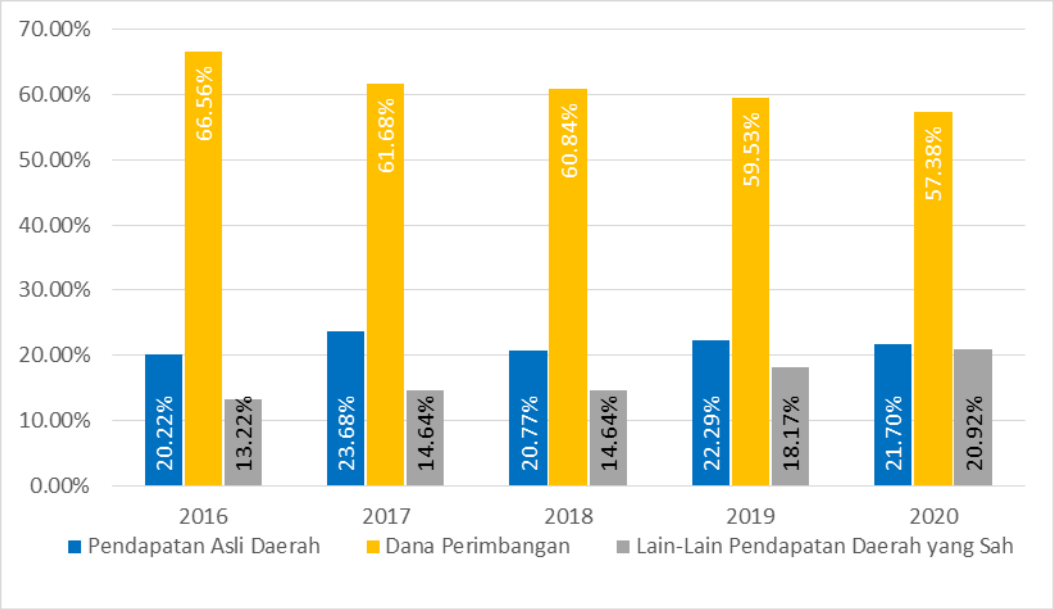


Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul 2016-2020

Selama periode tahun 2016-2020, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD selalu meningkat namun pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 target yang telah disusun pada awal tahun dilakukan penyesuaian dan *refocusing* pada Perubahan APBD Tahun 2020.

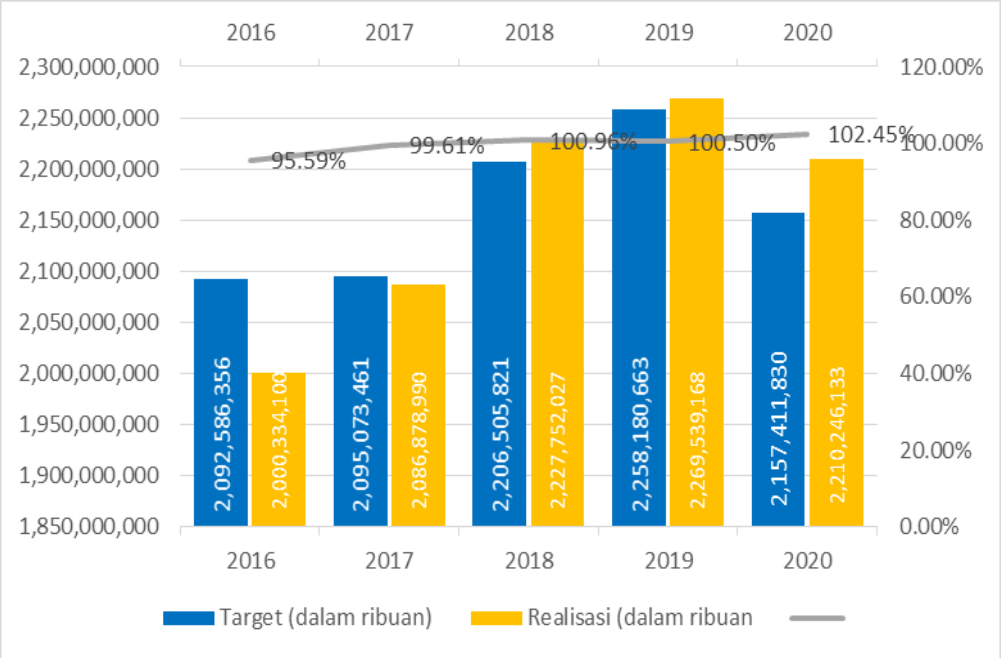


Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Dari Gambar di atas dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 target pendapatan tidak tercapai, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 ada penundaan dana transfer oleh pemerintah pusat pada DAK Non Fisik.

Cukup tingginya pencapaian target pendapatan daerah sebenarnya dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu: pertama, kinerja pengelola pendapatan daerah sudah baik sehingga dapat merealisasikan target yang ditetapkan; kedua, target pendapatan yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga sangat mudah bagi pengelola pendapatan daerah untuk merealisasikannya. Dari kedua perspektif tersebut mempunyai implikasi sama, bahwa pengelola pendapatan daerah perlu diberikan tantangan berupa target yang lebih tinggi di masa mendatang.

### 3.1.3. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dicerminkan dengan peran PAD terhadap total pendapatan daerah maupun belanja daerah. Daerah-daerah yang memiliki peran PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam memanfaatkan anggarannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat salah satu dimensi yang diukur yaitu kondisi keuangan daerah yang terdiri dari beberapa indikator maka perlu disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3 4 Indikator Dimensi Kondisi Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kemandirian Keuangan | 0,2022 | 0,2033 | 0,2077 | 0,2230 | 0,2170 |
| 2 | Fleksibilitas Keuangan | 1,573 | 1,998 | 1,976 | 1.974 | 1,972 |
| 3 | Solvabilitas Operasional | 0,9732 | 1,0148 | 0,9269 | 0,9451 | 0,8809 |
| 4 | Solvabilitas Jangka Pendek | 32,7679 | 17,7492 | 8,4630 | 6,2744 | 6,1438 |
| 5 | Solvabilitas Layanan | 2.564.950 | 2.606.274 | 2.742.242 | 2.852.578 | 2.866.769 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam indikator kemandirian keuangan pemerintah kabupaten bantul berkisar di angka 0,20 sampai dengan 0,22 hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten bantul masuk dalam katagori belum mandiri yang artinya masih sangat tergantung dengan dana transfer karena PAD hanya cukup untuk membiayai sebesar 22 persen belanja daerah.

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dalam hal pengelolaan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting , karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat besar.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul dengan daerah lain di DIY dan nasional tahun 2016-2020. Selama periode tersebut peran PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul mencapai kisaran angka 20 % sampai dengan 22 %. Pada tahun 2020, Kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja masih berada di bawah capaian Kabupaten/Kota di DIY dan capaian daerah kabupaten/kota lain secara nasional.

Tabel 3.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

| Tahun | Rasio PAD Terhadap Pendapatan | | | Rasio PAD Terhadap Belanja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bantul | Rata-rata DIY | Rata-rata Nasional | Bantul | Rata-rata DIY | Rata-rata Nasional |
| 2016 | 20,2% | 29,0% | 22,9% | 20,0% | 28,5% | 22,9% |
| 2017 | 20,3% | 29,6% | 25,4% | 20,4% | 30,5% | 25,9% |
| 2018 | 20,8% | 29,0% | 24,6% | 21,4% | 30,1% | 25,0% |
| 2019 | 22,3% | 29,0% | 24,5% | 22,2% | 29,4% | 24,7% |
| 2020 | 21,7% | 26,7% | 24,1% | 21,8% | 27,5% | 24,4% |

Sumber: Laporan Realisasi APBD, DJPK Kemenkeu RI, 2016-2020 (data per 16 Maret 2021, diolah)

Beberapa permasalahan optimalisasi pendapatan daerah, antara lain sebagai berikut:

- Belum memadainya sarana dan prasarana serta instrumen pendukung dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- Belum optimalnya pemutahiran secara *realtime* potensi database sumber-sumber penerimaan daerah.
- Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Sistem administrasi pencatatan penerimaan pembayaran daerah dengan memanfaatkan tehnologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum dikelola secara optimal.
- Masih terbatasnya ruang gerak BUMD dalam melakukan ekspansi bisnis.
- Ketergantungan penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi

hasil pajak dan bukan pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih cukup tinggi.

### 3.1.3.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas riil keuangan daerah. Tabel 3.6 berikut menunjukkan jumlah nominal dan Rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 2,02 triliun yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 2,20 triliun pada tahun 2020, selama periode tersebut belanja daerah mengalami peningkatan rerata sebesar 2,25% pertahun.

Dari sisi komponen belanja, belanja tidak langsung rerata mengalami penurunan sebesar 0,49%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,49% per tahun. Pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dari pertumbuhan belanja tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja Pemerintah Kabupaten Bantul semakin besar untuk kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik.

Sebagian besar pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, kecuali belanja pegawai. Pos belanja pegawai mengalami penurunan rerata sebesar 5,78% per

tahun, terutama terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ke Pemerintah DIY yang berimplikasi terhadap pemindahan belanja pegawai guru sekolah tingkat menengah ke Pemerintah DIY dan pada tahun 2020 belanja tunjangan profesi guru tidak dapat sepenuhnya terealisasi karena ada banyak guru yang pensiun, dan tidak terealisasinya tambahan penghasilan guru karena banyak guru yang sudah bersertifikasi sehingga tidak menerima tambahan penghasilan lagi selain itu juga adanya penurunan insentif pemungutan pajak daerah dikarenakan adanya penurunan dari target pendapatan pajak daerah akibat pandemi Covid-19.

Untuk belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan disebabkan pada tahun 2020 banyak alokasi anggaran belanja langsung yang direfocusing dan dialihkan ke belanja tidak terduga dalam rangka penangan covid-19.

Tabel 3 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp.Juta)

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rerata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| **5** | **BELANJA** | 2.016.544 | 2.076.742 | 2.165.652 | 2.283.585 | 2.199.124 | 2,25% |
| **05.01** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | 1.265.890 | 1.116.642 | 1.142.423 | 1.180.250 | 1.276.279 | 0,49% |
| 05.01.01 | Belanja Pegawai | 1.032.505 | 825.306 | 826.969 | 838.872 | 799.455 | -5,78% |
| 05.01.02 | Belanja Bunga | - | - | - | 39 | | |
| 05.01.03 | Belanja Hibah | 31.862 | 50.474 | 44.796 | 59.646 | 84.738 | 30,60% |
| 05.01.04 | Belanja Bantuan Sosial | 3.267 | 1.650 | 7.852 | 6.920 | 760 | 56,37% |
| 05.01.05 | Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan | 12.430 | 14.330 | 17.799 | 22.291 | 22.871 | 16,83% |
| 05.01.06 | Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan | 185.305 | 222.760 | 244.601 | 251.171 | 266.883 | 9,74% |
| 05.01.07 | Belanja Tidak Terduga | 521 | 2.121 | 406 | 1.312 | 101.572 | 2022,79% |
| **05.02** | **BELANJA LANGSUNG** | 750.654 | 960.099 | 1.023.229 | 1.103.334 | 922.845 | 6,49% |
| 05.02.01 | Belanja Pegawai | 44.679 | 69.976 | 93.830 | 113.645 | 126.114 | 30,70% |
| 05.02.02 | Belanja Barang dan Jasa | 421.914 | 557.504 | 591.238 | 652.975 | 580.329 | 9,38% |
| 05.02.03 | Belanja Modal | 284.061 | 332.619 | 338.160 | 336.714 | 216.401 | -4,35% |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Pengalokasian anggaran belanja APBD mencakup penyediaan alokasi belanja Pendidikan sebesar 20%, belanja Kesehatan 10% diluar gaji, belanja infrastruktur 25% dari penerimaan dana transfer dan belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja tidak langsung. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja tidak langsung mencapai kisaran angka sebesar 51% sampai dengan 63%, sedangkan proporsi belanja langsung mencapai kisaran angka 37% sampai dengan 48%.

Komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas riil keuangan daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat.

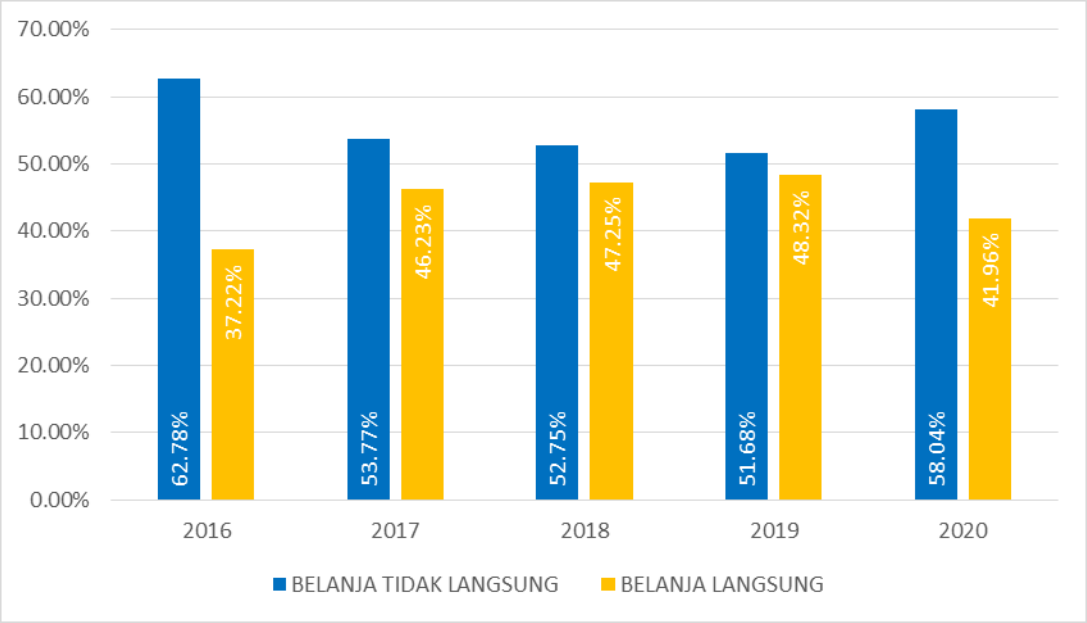


Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016– 2020, diolah

Gambar 3 3 Komposisi Belanja Kabupaten Bantul, 2016– 2020

Selama periode tahun 2016-2020, realisasi belanja belum sesuai rencana yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja daerah yang mencapai kisaran angka sebesar 85% sampai dengan 91%, sebagaimana pada gambar berikut:

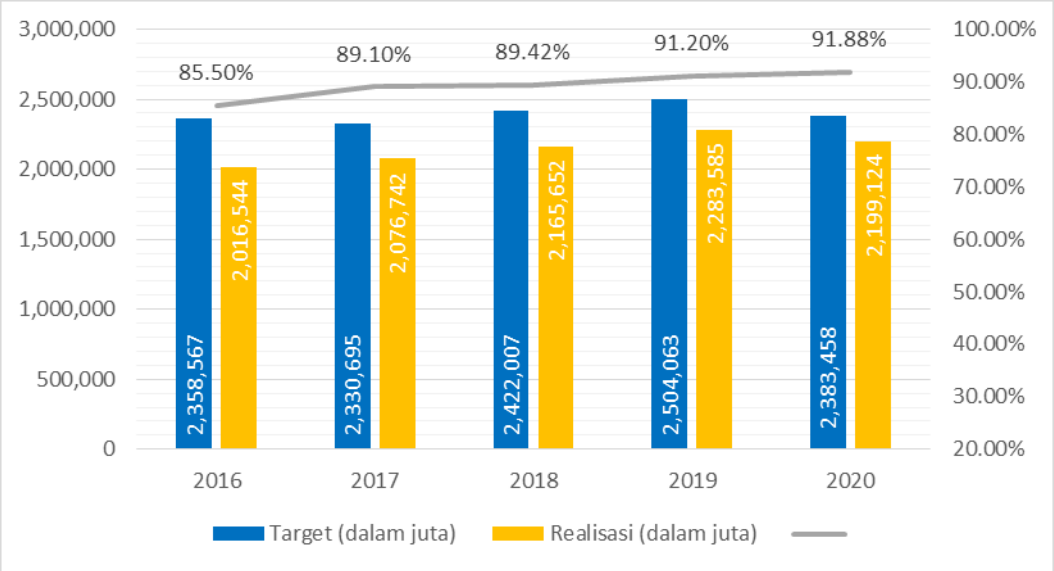


Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambar 3 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul, 2016-2020

Beberapa permasalahan utama perencanaan dan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Bantul antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya perencanaan program dan kegiatan yang diindikasikan oleh relatif besarnya jumlah belanja yang tidak terserap. Selain itu adanya peraturan dan kebijakan diluar kendali Pemerintah Kabupaten Bantul yang harus diacu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Belum optimalnya pengendalian belanja daerah sehingga masih terdapat inefisiensi belanja daerah, karena belum semua instrumen pengendalian belanja yang ada seperti Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) di implementasikan pada penganggaran.

3. Adanya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan,pelaksanaan dan pencairan anggaran.

### 3.1.3.2 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal daerah dan pemberian dana bergulir.

Tabel 3 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 (Rp.Juta)

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Surplus (Defisit) | -16.210 | 10.137 | 62.100 | -14.046 | 11.121 | 12,07% |
| | | | | | | | |
| **6** | **PEMBIAYAAN** | - | - | - | - | | |
| **06.01** | **PENERIMAAN DAERAH** | 293.078 | 261.454 | 256.630 | 296.985 | 238.679 | -4,14% |
| 06.01.01 | Sisa Lebih Perhitungan Th lalu | 283.026 | 254.842 | 247.145 | 279.158 | 234.048 | -4,05% |
| 06.01.02 | Transfer ke Dana Cadangan | - | - | - | - | | |
| 06.01.03 | Penerimaan Piutang Daerah | 8.711 | 6.613 | 9.486 | 7.853 | 3.918 | -11,99% |
| 06.01.04 | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | - | - | - | 7.000 | 0 | -100,00% |
| 06.01.05 | Penjualan aset daerah yang dipisahkan | 1.342 | - | - | 2.974 | 713 | -76,03% |
| | | | | | | | |
| **06.02** | **PENGELUARAN DAERAH** | 24.752 | 24.365 | 39.573 | 48.892 | 11.599 | 2,03% |
| 06.02.01 | Transfer Dana Cadangan | - | - | - | - | | |
| 06.02.02 | Penyertaan Modal | 16.045 | 17.150 | 31.500 | 34.300 | 8.001 | 5,69% |
| 06.02.03 | Pembayaran Hutang Pokok yang jatuh tempo | - | - | - | 7.000 | | -100,00% |
| 06.02.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 8.707 | 7.215 | 8.073 | 7.592 | 3.598 | -15,95% |
| | | | | | | | |
| | **Surplus (Defisit) Pembiayaan** | 268.326 | 237.089 | 217.058 | 248.094 | 227.080 | -3,57% |
| | **Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** | 252.117 | 247.226 | 279.158 | 234.048 | 238.201 | -0,85% |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyertaan Modal merupakan suatu upaya dalam penguatan modal untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Penyertaan modal diberikan kepada 4 (empat) BUMD, yaitu : PT. Bank BPD DIY, Perumda Aneka Dharma, Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, dan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini digunakan untuk modal tetap dan modal kerja, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada BUMD serta melihat kondisi kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3 7 Realisasi Penyertaan Modal dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

| No | URAIAN | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta) | DEVIDEN (Rp. Juta) | PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta) | DEVIDEN (Rp. Juta) | PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta) | DEVIDEN (Rp. Juta) | PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta) | DEVIDEN (Rp. Juta) | PENYERTAAN MODAL (Rp.Juta) | DEVIDEN (Rp. Juta) |
| 1 | PT BPD DIY | 10.045 | 17.151 | 7.500 | 16.442 | 23.000 | 15.247 | 23.000 | 17.353 | - | 20.154 |
| 2 | Perumda Aneka Dharma | - | 24 | 1.900 | - | 500 | - | 1.800 | - | - | - |
| 3 | Perumda Air Minum Tirta Projotamansari | 4.500 | 296 | 5.500 | 325 | 4.500 | 408 | 5.000 | 514 | 6.000 | 688 |
| 4 | PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) | 1.500 | 3.386 | 2.250 | 3.173 | 3.500 | 3.657 | 4.500 | | 2.001 | 4.025 |
| **JUMLAH** | | **16.045** | **20.858** | **17.150** | **19.939** | **31.500** | **19.312** | **34.300** | **21.684** | **8.001** | **24.867** |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi penyertaan modal dan bagian laba atas penyertaan modal Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.7. Pada periode tahun 2017-2020 hanya 3 (tiga) BUMD yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk deviden (pembagian atas laba yang dibagi) dan telah disetorkan sebagai PAD. Selama periode tersebut Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD . Secara umum kontribusi BUMD pada periode tahun 2016-2020, mengalami pertumbuhan pembagian laba rerata sebesar 4,85%.

Adapun kinerja dari PT BPD DIY dan tiga BUMD Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

a. PT. BPD DIY

PT Bank BPD DIY adalan bank umum yang kepemilikan sahamnya terdiri dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Yogyakarta dan 4 (empat) Kabupaten se DIY dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 dan dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Akhir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan setoran modal sebesar Rp.98.200.000.000,00, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan Keptusan Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017 telah disepakati untuk meningkatkan modal PT Bank BPD DIY. Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.392.800.000.000,00. Penambahan penyertaan modal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan memperluas kelembagaan, memperluas ruang gerak bank dalam

melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Perumda Aneka Dharma

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Dharma merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Daerah ini bergerak di bidang perdagangan umum, pelayanan jasa, pertanian, perindustrian, pertambangan, peternakan dan pariwisata. Perumda Aneka Dharma dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 berubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Aneka Dharma dengan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00. Sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp.9.015.063.051,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp10.984.936.949,00 dan diharapkan kekurangan tersebut dapat segera terpenuhi untuk pengembangan Perumda Aneka Dharma. Sampai dengan saat ini, Perumda Aneka Dharma masih mengalami beberapa kendala hal ini dapat terlihat masih rendahnya laba yang diperoleh bahkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kerugian sehingga Perumda Aneka Dharma belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul.

Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya penyehatan dan pengembangan Perumda Aneka Dharma baik dari Perumda Aneka Dharma maupun dari Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Aneka Dharma melalui penyertaan modal dengan tujuan untuk melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut tahun 2021 Perumda Aneka Dharma menyusun Rencana Bisnis Aneka Dharma Tahun 2022 – 2026 yang dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan operasionalisasi Perumda Aneka Dharma pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Di dalam rencana bisnis tersebut tertuang perencanaan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis inti yang saat ini digeluti dan berusaha mengembangkan bidang usaha baru yang lebih prospektif. Sampai saat ini beberapa progress perbaikan mulai dari sisi organisasi, pelaporan keuangan, Sumber Daya Manusia, operasional, sarana dan prasarana sudah dilakukan untuk memperbaiki citra dan kinerja Perumda Aneka Dharma.

Saat ini Perumda Aneka Dharma lebih fokus pada kegiatan kegiatan usaha inti, dalam hal ini usaha percetakan dan fotokopi. Perbaikan dan pengembangan melalui pembelian mesin dan peralatan baru perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayaanan sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu perlu juga mengembangkan bidang usaha baru yang prospektif sehingga meningkatkan citra dan kinerja perusahaan. Perbaikan dan pengembangan bidang usaha inti dan bidang usaha baru, dilakukan dengan menyusun rencana bisnis yang baik melalui analisis kondisi internal dan eksternal. Analisis internal mempertimbangkan kondisi Teknis dan Non Teknis, sedangkan analisis eksternal menggunakan analisis PEST (*Political, Economic, Social, Technological*). Adapun pengembangan usaha yang dilakukan antara lain:

1. Pendirian Apotek Dharma Bhakti Farma untuk mendukung PPBMP
2. Peternakan Kambing dan/atau domba
3. Pengembangan usaha Digital Printing Indoor Dharma Cetak
4. Perdagangan air kemasan Banew Dharma Tirta (distribrutor).

c. Perumda Air Minum Tirta Projotamansari

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 dan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Projotamansari dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00, sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp40.450.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp59.550.000.000,00. Penyertaan Modal yang selama ini diterima oleh Perumda Air Minum Tirta Projotamansari adalah untuk penyambungan saluran kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana nantinya akan diganti oleh Pemerintah. Hal ini tentunya masih belum mencukupi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang masih belum memadai utamanya untuk pembangunan kantor pusat sebagai salah satu upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu perlu tambahan penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirto Projotamansari.

Untuk meningkatkan pelayanan dan menambah cakupan pelayanan agar kebutuhan air minum masyarakat terpenuhi maka Perumda Air Minum Tirta Projotamansari mempunyai rencana pengembangan usaha:

1. Pemanfaatan Air SPAM Regional
2. Memaksimalkan kapasitas produksi
3. Menambah kapasitas Instalansi Pengolahan Air (IPA)
4. Rencana Pengamanan Air Minum dan memastikan keakuratan Water Meter Pelanggan
5. Peremajaan pipa pada jaringan pipa tua
6. Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW/Non Revenue Water)

7. Pembuatan Zona Air Minum Prima dilingkungan kantor pusat PDAM Bantul
8. Peningkatan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Banew”
9. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
10. Peningkatan SDM yang profesional
11. Peningkatan perfoma perusahaan.

d. PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)

Bank Bantul merupakan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bentuk badan hukum Perseroan terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019. Bank Bantul dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983. Adapun modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2020 modal yang telah disetor sebesar Rp79.029.999.525,00 dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp20.970.000.475,00. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa pembagian laba dibagi 55% untuk PAD. Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Bantul sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dengan tujuan untuk memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana pengembangan PT BPR Bank Bantul :

1. Pengembangan dan peningkatan layanan dan akses pasar bisnis
2. Mengembangkan produk kredit yang kompetitif
3. Pengadaan dan pengembangan tehnologi informasi
4. Memperkuat kelembagaan dan permodalan.
5. Pengembangan SDM yang berkompeten dan profesional

### 3.1.4. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Bantul pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp3,03 triliun yang meningkat menjadi sebesar Rp 3,48 triliun pada tahun 2020.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban

Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan.

Tabel 3 8 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | | | |
| **KAS** | **296.308.785.282** | **247.225.967.225** | **279.201.069.180** | **234.221.742.887** | **238.201.393.766** | **-4,51%** |
| Kas Di Kas Daerah | 221.268.668.754 | 229.851.336.933 | 262.466.433.454 | 209.212.057.577 | 200.803.065.465 | **-1,56%** |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran | 74.654.448 | 833.005.672 | 895.288.887 | 517.382.679 | 577.835.200 | **248,19%** |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | 460.910.384 | 713.824.537 | 202.892.821 | 144.893.486 | 114.418.736 | **-16,58%** |
| Kas Di Badan Layanan Umum Daerah | 30.269.625.120 | 13.541.504.539 | 13.932.533.084 | 18.688.863.886 | 29.197.443.270 | **9,50%** |
| Kas di Pengelola Dana Bergulir | 43.932.000 | 4.710.000 | | | | **-94,64%** |
| Kas di Bendahara BOS | 17.353.282.450 | 2.281.585.544 | 1.703.920.935 | 5.658.545.258 | 7.508.631.095 | **38,15%** |
| Kas di Bendahara Blockgrant | 26.837.712.126 | - | | | - | |
| Kas di KPU dan Panwas | - | - | | | - | |
| | | | | | | |
| **Piutang** | **49.605.707.271** | **64.302.519.439** | **66.825.617.211** | **79.054.966.424** | **63.139.859.320** | **7,93%** |
| Piutang Pajak | 85.821.335.423 | 97.093.170.135 | 106.385.740.777 | 120.990.006.411 | 130.486.662.479 | **11,07%** |
| Penyisihan Piutang Pajak | (49.426.187.389) | (58.055.308.123) | (65.663.925.171) | (73.764.443.405) | (83.337.103.485) | **13,97%** |
| Piutang Pajak Neto | 36.395.148.035 | 39.037.862.013 | 40.721.815.606 | 47.225.563.006 | 47.149.558.994 | **6,85%** |
| Piutang Retribusi | 2.087.948.332 | 2.336.181.964 | 1.162.781.234 | 965.762.321 | 1.229.028.167 | **-7,01%** |
| Penyisihan Piutang Retribusi | (50.500.464) | (54.447.542) | (55.663.242) | (81.290.252) | (68.504.614) | **10,09%** |
| Piutang Retribusi Netto | 2.037.447.868 | 2.281.734.422 | 1.107.117.992 | 884.472.069 | 1.160.523.553 | **-7,10%** |
| Piutang Lain-lain PAD | 35.055.495.307 | 50.808.323.947 | 56.653.223.726 | 66.623.914.285 | 55.014.174.115 | **14,15%** |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD | (23.882.383.938) | (27.825.400.943) | (31.656.540.112) | (35.678.982.936) | (40.184.397.341) | **13,90%** |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piutang Lain-lain PAD Netto | 11.173.111.368 | 22.982.923.004 | 24.996.683.613 | 30.944.931.349 | 14.829.776.774 | **21,54%** |
| | | | | | | |
| **Belanja Dibayar Dimuka** | **969.489.397** | **375.616.706** | **1.286.866.565** | **1.155.845.948** | **1.353.626.879** | **47,07%** |
| | | | | | | |
| **Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi** | **46.302.100** | **23.125.600** | **4.989.600** | - | - | -64,24% |
| | | | | | | |
| **Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)** | **14.204.551.854** | **14.776.862.986** | **13.340.761.956** | **13.043.382.057** | **12.713.282.011** | **-2,61%** |
| Penyisihan Piutang Lainnya | (8.793.485.753) | (9.264.018.934) | (9.673.315.403) | (9.961.494.004) | (10.177.475.432) | **3,73%** |
| Piutang Lainnya Netto | 5.411.066.101 | 5.512.844.052 | 3.667.446.553 | 3.081.888.053 | 2.535.806.579 | **-16,32%** |
| | | | | | | |
| **Piutang Lain-lain** | **1.420.076.050** | **2.699.133.341** | - | **4.565.313.667** | **5.230.278.485,00** | **52,32%** |
| | | | | | | |
| **Persediaan** | **48.774.707.770** | **49.634.079.007** | **30.712.021.915** | **53.729.871.567** | **62.671.691.153** | **13,81%** |
| | | | | | | |
| **Jumlah Aset Lancar** | **402.536.133.971** | **369.773.285.370** | **381.698.011.024** | **375.809.628.546** | **373.132.656.182** | **-1,79%** |
| | | | | | | |
| **Investasi Jangka Panjang** | | | | | | |
| **Investasi Nonpermanen** | | | | | | |
| Pinjaman Jangka Panjang | | | | | | |
| Investasi dalam SUN | | | | | | |
| Investasi Nonpermanen lainnya | | | | | | |
| **Jumlah Investasi nonpermanen** | | | | | | |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Investasi Permanen** | | | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 117.590.549.808 | 129.528.808.610 | 141.614.648.648 | 192.310.420.018 | 201.398.147.561 | **15,00%** |
| Investasi Permanen Lainnya | 111.561.713.151 | 119.040.767.501 | 148.337.286.340 | 157.901.380.798 | 159.601.719.394 | **9,71%** |
| Jumlah Investasi permanen | **229.152.262.959** | **248.569.576.111** | **289.951.934.988** | **350.211.800.816** | **360.999.866.955** | **12,25%** |
| | | | | | | |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **229.152.262.959** | **248.569.576.111** | **289.951.934.988** | **350.211.800.816** | **360.999.866.955** | **12,25%** |
| | | | | | | |
| **Aset Tetap** | | | | | | |
| Tanah | 535.067.314.152 | 517.919.614.242 | 517.793.609.992 | 518.697.554.092 | 528.259.669.252 | **-0,30%** |
| Peralatan dan Mesin | 514.461.731.544 | 561.102.664.151 | 697.431.861.950 | 795.637.620.716 | 857.132.572.730 | **13,79%** |
| Gedung dan Bangunan | 1.261.647.454.205 | 1.194.597.731.232 | 1.249.672.267.650 | 1.322.393.411.270 | 1.347.477.527.788 | **1,75%** |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.821.460.231.355 | 1.973.041.023.200 | 2.107.565.021.860 | 2.279.618.395.259 | 2.418.835.722.267 | **7,35%** |
| Aset Tetap Lainnya | 73.057.689.969 | 65.734.074.972 | 72.473.448.275 | 76.633.860.414 | 74.559.439.255 | **0,82%** |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 644.050.000 | - | - | - | - | |
| Akumulasi Penyusutan | (1.824.330.894.619) | (1.895.906.957.058) | (2.068.002.225.876) | (2.284.957.635.304) | (2.489.343.832.342) | **8,11%** |
| **Jumlah Aset Tetap** | **2.382.007.576.606** | **2.416.488.150.739** | **2.576.933.983.851** | **2.708.023.206.447** | **2.736.921.098.950** | **3,56%** |
| | | | | | | |
| **Dana Cadangan** | | | | | | |
| Dana Cadangan | | | | | | |
| **Jumlah Dana Cadangan** | | | | | | |
| | | | | | | |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aset Lainnya** | | | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | | | | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 764.419.414 | 742.769.414 | 15.311.414 | 15.311.414 | 15.311.414 | **-25,19%** |
| TGR | | | | | | |
| Aset Tak berwujud | 17.412.173.338 | 19.945.487.938 | 18.926.953.566 | 28.169.681.590 | 24.725.518.327 | **11,51%** |
| Aset Lain-lain | 6.350.410.718 | - | - | | | |
| Aset lain yang dibatasi penggunaannya | 238.727.239 | 229.284.603 | 238.882.149 | 795.205.530 | 1.501.519.876 | **80,48%** |
| Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud | (7.914.273.215) | (10.110.558.975) | (12.744.973.240) | (16.605.092.564) | (14.783.929.410) | **18,28%** |
| **Jumlah Aset Lainnya** | **16.851.457.495** | **10.806.982.981** | **6.436.173.889** | **12.375.105.970** | **11.458.420.208** | **2,14%** |
| | | | | | | |
| **JUMLAH ASET** | **3.030.547.431.031** | **3.045.637.995.200** | **3.255.020.103.753** | **3.446.419.741.778** | **3.482.512.042.295** | **3,58%** |
| | | | | | | |
| **KEWAJIBAN** | | | | | | |
| **Kewajiban Jangka Pendek** | | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 1.161.600 | - | 42.820.164 | 29.213.107 | - | **-65,89%** |
| Utang Bunga | - | - | - | | | |
| Bagian Lancar Utang Jangka panjang | - | - | - | | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 54.070.543 | 211.677.622 | 2.358.808.158 | 2.097.987.840 | 1.920.229.253 | **321,57%** |
| Utang Belanja | 8.987.426.141 | 13.717.202.977 | 30.589.186.848 | 35.202.753.758 | 36.850.544.830 | **48,85%** |
| Utang Jangka Pendek | - | - | - | | | |

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainnya | | | | | | |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **9.042.658.284** | **13.928.880.599** | **32.990.815.170** | **37.329.954.705** | **38.770.774.084** | **51,97%** |
| | | | | | | |
| **Kewajiban Jangka Panjang** | | | | | | |
| Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan | | | | | | |
| Utang Dalam Negeri-Obligasi | | | | | | |
| Premium (diskonto) obligasi | | | | | | |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | | | | | | |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | - | - | - | | | |
| | | | | | | |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **9.042.658.284** | **13.928.880.599** | **32.990.815.170** | **37.329.954.705** | **38.770.774.084** | **51,97%** |
| | | | | | | |
| **EKUITAS** | | | | | | |
| **Ekuitas** | **3.021.504.772.747** | **3.031.709.114.602** | **3.222.029.288.583** | **3.409.089.787.073** | **3.443.741.268.211** | **3,36%** |
| | | | | | | |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **3.030.547.431.031** | **3.045.637.995.200** | **3.255.020.103.753** | **3.446.419.741.788** | **3.482.512.042.295** | **3,58%** |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio akitivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3 9 Analisis Rasio Neraca Daerah (Rp juta) Kabupaten Bantul, 2016-2020

| Rasio | Rumus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Likuiditas | Aset Lancar | 402.536,00 | 369.773,00 | 381.698,00 | 375.809,00 | 373.133,00 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 9.043,00 | 13.929,00 | 32.991,00 | 37.330,00 | 38.771,00 |
| | Rasio Lancar | 44,52 | 26,55 | 11,57 | 10,07 | 9,62 |
| | Aset Lancar Persediaan | 353.761,00 | 320.139,00 | 350.986,00 | 322.080,00 | 310.461,00 |
| | Kewajiban Jangka Pendek | 9.043,00 | 13.929,00 | 32.991,00 | 37.330,00 | 38.771,00 |
| | Rasio Cepat | 39,12 | 22,98 | 10,64 | 8,63 | 8,01 |
| Rasio Solvabilitas | Total Hutang | 9.043,00 | 13.929,00 | 32.991,00 | 37.330,00 | 38.771,00 |
| | Total Aset | 3.030.547,00 | 3.045.638,00 | 3.255.020,00 | 3.446.420,00 | 3.482.512,00 |
| | Rasio Total Hutang (%) | 0,30% | 0,46% | 1,01% | 1,08% | 1,11% |
| | Total Hutang | 9.043,00 | 13.929,00 | 32.991,00 | 37.330,00 | 38.771,00 |
| | Total Ekuitas | 3.021.505,00 | 3.031.709,00 | 3.222.029,00 | 3.409.090,00 | 3.443.741,00 |
| | Rasio Hutang/Modal (%) | 0,30% | 0,46% | 1,02% | 1,10% | 1,13% |
| | Pendapatan Daerah | 2.000.334,00 | 2.086.879,00 | 2.227.752,00 | 2.269.539,00 | 2.210.246,00 |

| Rasio | Rumus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Aktivitas | Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah | 36.482,00 | 39.876,00 | 41.574,00 | 44.969,00 | 48.210,00 |
| | Rata-rata Umur Piutang | 6,66 | 6,97 | 6,81 | 7,23 | 7,96 |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, iolah

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 semakin menurun, yang berarti bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Bantul untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo semakin turun. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak

kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin Kecil rasio ini berarti semakin Kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2020 sebesar 1,09% artinya sebesar Rp1,09 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rerata umur piutang dan rerata umur persedian. Rasio rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Rumus perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi dua. Dari data tabel 3.10 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul cukup singkat, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 8 hari pada tahun 2020. Melihat Analisis Rasio Neraca Daerah maka perlu pencermatan dan perhatian lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terkait dengan piutang upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya :

- Pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan penerbitan surat tagihan pajak daerah atas piutang pajak yang masih menunggak untuk ketetapan pajak tahun 2013 - 2020;
- Pelaksanaan pelayanan pembayaran melalui mobil keliling untuk mengurangi pembayaran kolektif melalui dukuh;
- Penyusunan perbikan pada kebijakan pengelolaan pajak daerah;
- Perbaikan pada penatausahaan piutang pajak daerah;
- Pelaksanaan sunset policy untuk memutus mata rantai tunggakan PBB dari Tanah Kas Desa.

## 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantul pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

#### 3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Secara umum, proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul cukup tinggi yang mencapai rerata sebesar 89,42% pertahun selama periode tahun 2016-2020. Jika diperbandingkan proporsi realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja langsung yang mencapai rerata sebesar 89,50%, sedangkan belanja tidak langsung mencapai rerata sebesar 89,75%.

Tabel 3 10 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

| Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rerata |
| Belanja Tidak Langsung | 84,54% | 86,85% | 91,52% | 93,96% | 91,88% | 89,75% |
| Belanja Pegawai | 84,27% | 87,20% | 93,40% | 95,12% | 92,47% | 90,49% |
| Belanja Bunga | 0,00% | 0,00% | | 9,83% | | 3,28% |
| Belanja Hibah | 91,72% | 90,60% | 78,41% | 86,49% | 96,38% | 88,72% |
| Belanja Bantuan Sosial | 58,57% | 42,30% | 86,11% | 76,49% | 26,80% | 58,05% |
| Belanja Bagi Hasil kepada Pem.Prop, Pemda dan Pem. bawahan | 98,15% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,63% |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Pem.Prop,Pemda dan Pem.bawahan | 94,84% | 96,10% | 99,47% | 97,80% | 99,53% | 97,55% |
| Belanja Tidak Terduga | 2,19% | 6,18% | 1,23% | 7,87% | 71,15% | 17,72% |
| | | | | | | |
| Belanja Langsung | 87,16% | 91,97% | 87,18% | 88,41% | 92,80% | 89,50% |
| Belanja Pegawai | 87,92% | 95,10% | 94,29% | 94,99% | 97,34% | 93,93% |
| Belanja Barang dan Jasa | 87,58% | 91,03% | 90,61% | 95,17% | 92,01% | 91,28% |
| Belanja Modal | 86,44% | 92,89% | 80,19% | 76,15% | 92,44% | 85,62% |
| | | | | | | |
| Total Jumlah Belanja | 85,50% | 89,10% | 89,42% | 91,20% | 91,88% | 89,42% |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

### 3.2.1.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada

berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3 11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul, 2016-2020

| No. | Tahun | Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| | | (a) | ( b ) | (a) / (b) x 100% |
| 1. | 2016 | 1.131.440.506.084 | 2.041.295.978.974 | 55,43% |
| 2. | 2017 | 968.394.279.891 | 2.101.106.963.062 | 46,09% |
| 3. | 2018 | 981.014.504.512 | 2.205.224.260.352 | 44,49% |
| 4 | 2019 | 1.042.226.986.512 | 2.332.476.537.902 | 44,68% |
| 5 | 2020 | 913.904.940.061 | 2.210.723.452.965 | 41,34% |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan terdapat penurunan belanja aparatur tahun 2016-2020, namun terjadi peningkatan pada tahun 2019 karena ada kenaikan belanja antaa lain belanja gaji dan tunjangan, belanja makanan dan minumam pegawai tertentu dan belanja modal. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bantul tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3 12 Perkembangan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp |
| **A** | **Belanja Tidak Langsung** | **1.037.520.841.483** | **825.306.291.768** | **826.974.448.856** | **838.871.806.847** | **799.455.130.819** |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 714.667.286.650 | 663.489.993.481 | 728.708.331.992 | 736.474.607.351 | 694.559.843.827 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan | 308.820.477.912 | 148.260.815.093 | 79.000.640.426 | 78.600.404.750 | 81.681.945.062 |
| 3 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 4.001.999.949 | 5.941.836.000 | 11.439.120.000 | 13.866.000.000 | 14.463.480.000 |
| 4 | Belanja pemungutan Pajak dan retribusi Daerah (insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah) | 5.015.538.486 | 6.410.647.194 | 7.826.356.438 | 9.930.794.746 | 8.749.861.930 |
| 5 | Tunjangan Uang Makan | 5.015.538.486 | 1.203.000.000 | | | |
| | | | | | | |
| **B** | **Belanja Langsung** | **93.919.664.601** | **143.087.988.123** | **154.040.055.656** | **202.355.179.665** | **114.439.681.242** |
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 5.153.557.350 | 5.315.219.200 | 7.190.335.700 | 6.613.266.900 | 5.698.408.600 |
| 2 | Belanja Uang Lembur | 158.364.250 | 105.595.003 | 94.741.201 | 112.645.000 | 45.526.000 |
| 3 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 213.500.000 | 420.000.000 | 103.500.000 | 49.750.000 | 34.500.000 |
| 4 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.275.132.200 | 2.320.355.900 | 3.390.889.800 | 8.124.762.500 | 1.665.801.383 |
| 5 | Belanja Premi Asuransi | 14.859.650 | 6.567.897.370 | 10.847.352.364 | 20.755.630.871 | 21.291.371.178 |
| 6 | Belanja makanan dan minuman pegawai tertentu | 23.450.786.561 | 29.167.294.676 | 38.769.767.741 | 51.664.012.196 | 33.617.686.430 |
| 7 | Belanja pakaian dinas dan atributnya | 295.939.899 | 4.371.452.625 | 404.910.100 | 523.689.500 | 538.887.000 |
| 8 | Belanja Pakaian Kerja | 1.079.931.264 | 1.503.899.200 | 1.452.509.451 | 1.717.830.941 | 834.556.535 |
| 9 | Belanja perjalanan dinas | 27.795.508.307 | 35.352.013.236 | 37.088.865.955 | 32.100.809.618 | 11.728.590.921 |
| 10 | Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dan lain lainl) | 32.482.085.120 | 57.964.260.913 | 54.697.183.344 | 80.692.782.139 | 38.994.481.195 |
| | **Total Belanja Aparatur** | **1.131.440.506.084** | **968.394.279.891** | **981.014.504.512** | **1.042.226.986.512** | **913.904.940.061** |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

### 3.2.1.3. Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Belanja wajib ini digunakan untuk urusan wajib dan mengikat terkait kelangsungan kebutuhan organisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran dengan mempertimbangkan perubahan harga dan kebutuhan.

Tabel 3 13 Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020

| No | Uraian | 2016 (Rp.juta) | 2017 (Rp.juta) | 2018 (Rp.juta) | 2019 (Rp.juta) | 2020 (Rp.juta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **BELANJA** | **1,277,096** | **1,151,575** | **1,170,066** | **1,215,009** | **1,129,996** |
| **A.** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **1,247,923** | **1,108,512** | **1,116,398** | **1,147,678** | **1,037,680** |
| 1 | Gaji Dan Tunjangan | 714,667 | 663,490 | 728,708 | 737,475 | 694,560 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 308,820 | 148,261 | 79,001 | 78,600 | 81,682 |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | 4,002 | 5,942 | 11,440 | 13,866 | 14,463 |
| 4 | Belanja Hibah | 31,862 | 66,409 | 44,796 | 59,646 | 84,738 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 3,267 | 1,650 | 7,852 | 6,920 | 759 |
| 6 | Belanja Bantuan Keuangan | 185,305 | 222,760 | 244,601 | 251,171 | 161,478 |
| | | | | | | |
| **B.** | **BELANJA LANGSUNG** | **29,173** | **43,063** | **53,668** | **67,331** | **92,316** |
| 1 | Belanja Jasa Kantor | 28,944 | 36,075 | 42,717 | 46,525 | 70,989 |
| 2 | Belanja Premi Asuransi | 15 | 6,568 | 10,847 | 20,756 | 21,292 |
| 4 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 214 | 420 | 104 | 50 | 35 |
| | | | | | | |
| **II.** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **16,045** | **17,150** | **31,500** | **34,300** | **8,000** |
| 1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 16,045 | 17,150 | 31,500 | 34,300 | 8,000 |
| 2 | Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga | - | - | - | - | - |
| **JUMLAH (I + II)** | | **1,293,141** | **1,168,725** | **1,201,566** | **1,249,309** | **1,137,996** |
| **Jumlah Total Belanja** | | **2,016,544** | **2,076,742** | **2,165,652** | **2,283,585** | **2,094,142** |
| **Proporsi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Terhadap Total Belanja** | | **64.13%** | **56.28%** | **55.48%** | **54.71%** | **54.34%** |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel di atas Periode tahun 2017-2020 terdapat kecenderungan menurun dan mencapai 54,34% pada tahun 2020.

Mencermati rincian belanja, pada tahun 2017 dan 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada belanja hibah karena adanya kenaikan Belanja Operasional Pendidikan (BOP), dan premi asuransi karena adanya kebijakan terkait pemberian jaminan kesehatan, sedangkan pada tahun 2020 disebabkan *refocusing* anggaran diarahkan pada penanganan dampak pandemi Covid-19

### 3.2.2. Analisis Pembiayan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Bantul selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 2.000.335 | 2.086.879 | 2.227.753 | 2.269.539 | 2.210.246 |
| | **Dikurangi** | | | | | |
| 2 | Realisasi Belanja Daerah | 2.016.544 | 2.076.742 | 2.165.652 | 2.283.585 | 2.199.124 |
| | Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 24.752 | 24.365 | 39.573 | 48.892 | 11,599 |
| | **Surplus/Defisit Riil** | **(40.962)** | **(14.228)** | **22.527** | **(62,938)** | **(477)** |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Tabel 3 14 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 283,026 | 254,842 | 247,145 | 279,158 | 234,048 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | - | - | - | - | - |
| 3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | 1,342 | - | - | 2,974 | 713 |
| 4 | Penerimaan pinjaman daerah | - | - | - | 7,000 | - |
| 5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | - | - | - | - | - |
| **6** | Penerimaan piutang daerah | 8,711 | 6,613 | 9,486 | 7,853 | 3,918 |
| | Jumlah penerimaan daerah | 293,078 | 261,454 | 256,630 | 296,985 | 238,678 |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapaiya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan dalam rangka investasi daerah, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3 15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bantul, 2016-2020 (Rp juta)

| No. | Uraian | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1 | Jumlah SiLPA | 283,026 | | 254,842 | | 247,145 | | 279,158 | | 234,048 | |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | 54,827 | 19.37% | 31,213 | 12.25% | 36,137 | 14.62% | 30,108 | 10.79% | 26.678 | 11,40% |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | -12,367 | -4.37% | -135,427 | -53.14% | -51,893 | -21.00% | -21,898 | -7.84% | - | |
| 4 | Pelampauan Penerimaan lan-lain Pendapatan Daerah yg sah | -5,296 | -1.87% | 11,962 | 4.69% | 7,562 | 3.06% | 13,036 | 4.67% | - | |
| 5 | Sisa Penghematan Belanja | 245,955 | 86.90% | 342,024 | 134.21% | 253,954 | 102.76% | 256,355 | 91.83% | 207.370 | 88,60% |
| 6 | Kewajiban kepada Pihak III yang belum terselesaikan | - | | - | | - | | - | | - | |
| 7 | Kegiatan Lanjutan | - | | - | | - | | - | | - | |
| 8 | Koreksi SiLPA | - | - | 2.725 | 1,07% | (18) | -0,03% | - | - | - | - |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

SiLPA yang tinggi menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Peningkatan belanja daerah yang meningkat cukup signifikan tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga menyebabkan SiLPA yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Ada empat hal yang menyebabkan terjadinya SiLPA yaitu :

1. Pelampauan Target Pendapatan

   SiLPA terjadi karena adanya pelampauan target dari pendapatan, bila pelampauan PAD maka dapat memperbesar ruang fiskal dan meningkatkan tingkat kemandirian daerah tetapi apabila sebaliknya maka justru mengindikasikan penurunan dalam kemandirian daerah.

2. Efisiensi Belanja

   SiLPA di Kabupaten Bantul juga terjadi karena adanya efisiensi belanja program kegiatan sehingga terjadi penghematan belanja dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan prioritas lainnya.

3. Target belanja tidak tercapai

   SiLPA karena tidak terpenuhinya target belanja akan menyisakan kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya dan hal tersebut menunjukkan kinerja penyerapan belanja yang tidak optimal, antara lain karena tata kelola keuangan yang tidak tertib seperti lemahnya perencanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan lambatnya penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga.

### 3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19)

Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dampak Pandemi tersebut mengharuskan Pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelamatan baik dari sisi kesehatan maupun sisi perekonomian, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 diantaranya adalah untuk melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dana dan penggunaan APBD yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada triwulan II Tahun 2020 Pemerintah Bantul mulai melakukan penyesuaian penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja.

#### 3.2.3.1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2,31 trilyun, karena ada pandemi maka target tersebut dikoresi pada perubahan APBD 2020 menjadi Rp2,08 trilyun atau turun sebesar 10,05%. Penurunan pendapatan daerah terjadi pada hampir semua komponen pendapatan. Namun demikian masih ada

beberapa pendapatan yang mengalami kenaikan yaitu sumber pendapatan dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 4,21%; Dana perimbangan pada Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak naik sebesar 8,60% peningkatan ini berasal dari komponen pajak penghasilan; dan pendapatan hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 33,33% dimana kenaikan tersebut berasal dari Hibah kepada PDAM.

Tabel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

| URAIAN | ANGGARAN TAHUN 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH / (BERKURANG) | PERSENTASE PERUBAHAN |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **2.313.851.073.116,50** | **2.081.194.441.954,19** | **(232.656.631.162)** | **-10,05%** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **469.798.331.294,00** | **420.780.615.321,87** | **(49.017.715.972)** | **-10,43%** |
| Pajak Daerah | 195.000.000.000,00 | 175.265.482.000,00 | (19.734.518.000) | -10,12% |
| Retribusi Daerah | 46.832.583.434,00 | 24.354.322.386,00 | (22.478.261.048) | -48,00% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 23.707.166.955,00 | 24.704.142.455,07 | 996.975.500 | 4,21% |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 204.258.580.905,00 | 196.456.668.480,80 | (7.801.912.424) | -3,82% |
| | | | | |
| **DANA PERIMBANGAN** | **1.393.629.940.890,50** | **1.279.745.464.554,00** | **(113.884.476.337)** | **-8,17%** |
| Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | 28.634.067.890,50 | 31.097.246.000,00 | 2.463.178.110 | 8,60% |
| Dana Alokasi Umum | 1.025.870.924.000,00 | 931.996.005.000,00 | (93.874.919.000) | -9,15% |
| Dana Alokasi Khusus | 339.124.949.000,00 | 316.652.213.554,00 | (22.472.735.446) | -6,63% |
| | | | | |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **450.422.800.932,00** | **380.668.362.078,32** | **(69.754.438.854)** | **-15,49%** |
| Pendapatan Hibah | 4.500.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 1.500.000.000 | 33,33% |
| Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 167.733.524.432,00 | 152.621.840.588,32 | (15.111.683.844) | -9,01% |
| Dana Penyesuaian Otonomi Khusus | 192.493.982.000,00 | 191.989.028.000,00 | (504.954.000) | -0,26% |
| - Dana Insentif Daerah | 86.277.987.000,00 | 86.583.558.000,00 | 305.571.000 | 0,35% |
| - Dana Desa | 106.215.995.000,00 | 105.405.470.000,00 | (810.525.000) | -0,76% |
| Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 85.695.294.500,00 | 30.057.493.490,00 | (55.637.801.010) | -64,93% |

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

### 3.2.3.2. Belanja Daerah

Dengan penurunan target pendapatan daerah pada APBD 2020 maka belanja daerah pada perubahan APBD juga mengalami

penurunan sebesar 3,70%. Penurunan belanja tersebut terjadi pada semua mata anggaran belanja daerah, kecuali belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung dan pegawai serta belanja barang dan jasa pada belanja langsung.

Belanja Tidak terduga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 797,81%, hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran pada beberapa kegiatan dan penataan ulang dengan memperhatikan kebijakan dan instruksi pemerintah pusat yang ditekankan pada penanganan dampak pandemi Covid19 yang meliputi aspek kesehatan, penanggulangan dampak ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial.

Tabel.3.19 Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

| URAIAN | ANGGARAN TAHUN 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH / (BERKURANG) | PERSENTASE PERUBAHAN |
| **BELANJA DAERAH** | **2.474.907.091.918,14** | **2.383.458.652.405,17** | **(91.448.439.512,97)** | **-3,70%** |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **1.334.474.653.321,04** | **1.389.050.261.074,07** | **54.575.607.753** | **4,09%** |
| Belanja Pegawai | 917.865.137.233,00 | 864.539.520.207,34 | (53.325.617.026) | -5,81% |
| Belanja Bunga | - | - | - | - |
| Belanja Hibah | 90.916.212.000,00 | 87.919.851.200,00 | (2.996.360.800) | -3,30% |
| Belanja Bantuan Sosial | 6.810.000.000,00 | 2.835.000.000,00 | (3.975.000.000) | -58,37% |
| Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan | 22.871.517.593,40 | 22.871.517.593,40 | - | 0,00% |
| Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan | 280.110.271.960,00 | 268.118.528.110,00 | (11.991.743.850) | -4,28% |
| Belanja Tidak Terduga | 15.901.514.534,64 | 142.765.843.963,33 | 126.864.329.429 | 797,81% |
| | | | | |
| **BELANJA LANGSUNG** | **1.140.432.438.597,10** | **994.408.391.331,10** | **(146.024.047.266)** | **-12,80%** |
| Belanja Pegawai | 121.493.996.828,00 | 129.562.208.540,00 | 8.068.211.712 | 6,64% |
| Belanja Barang dan Jasa | 625.601.960.111,10 | 630.734.900.915,10 | 5.132.940.804 | 0,82% |
| Belanja Modal | 393.336.481.658,00 | 234.111.281.876,00 | (159.225.199.782) | -40,48% |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

### 3.2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan didominasi dari

SilPA yang berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi kegiatan tahun 2020. SilPA mengalami kenaikan sebesar 41,37% dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada sisi penerimaan penerimaan pinjaman daerah pada perubahan APBD 2020 diperhitungkan dalam rangka untuk biaya operasional RSUD dikarenakan klaim dari BPJS sering mengalami keterlambatan namun pelaksanaan pinjaman sampai akhir 2020 tidak direalisasikan.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 138,70%. Pengeluran pembiayaan didominasi dari penyertaan modal yang mengalami kenaikan sebesar 77,76% karena adanya tambahan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum yang semula sebesar Rp4.5 milyar menjadi Rp6 milyar.

Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

| URAIAN | ANGGARAN TAHUN 2020 | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | PERSENTASE PERUBAHAN |
|---|---|---|---|---|
| | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | | |
| **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **176.556.833.064,26** | **263.047.636.293,60** | **86.490.803.229** | **48,99%** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 165.556.833.064,26 | 234.047.636.293,60 | 68.490.803.229 | 41,37% |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | - | - | - |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | | 18.000.000.000,00 | 18.000.000.000 | |
| Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | |
| **PENGELURAAN PEMBIAYAAN** | **15.500.814.262,62** | **37.000.814.262,62** | **21.500.000.000** | **138,70%** |
| Penyertaan Modal | 4.500.814.262,62 | 8.000.814.262,62 | 3.500.000.000 | 77,76% |
| Pembayaran Pokok Pinjaman | - | 18.000.000.000,00 | 18.000.000.000 | |
| Dana Bergulir | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | - | 0,00% |
| PEMBIAYAAN NETTO | 161.056.018.801,64 | **226.046.822.030,98** | **64.990.803.229,34** | 40,35% |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

## 3.3. KERANGKA PENDANAAN

### 3. 3. 1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada dokumen Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026 dihitung hingga tahun 2026 dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dilakukan dengan teknik *forecasting least square* terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Bantul tahun 2007-2020. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level lokal DIY maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut antara lain sebagai berikut.

### 3. 3. 1. 1 **Pendapatan Daerah**

a. Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD diperkirakan akan mengalami kenaikan rerata pertumbuhan sebesar 3,42% pertahun. Dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi pajak maka Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 akan memproses perubahan peraturan daerah terkait dengan pajak daerah. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:
   1) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
   2) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait;
   3) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   4) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha;
   5) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
   6) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
   7) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
   8) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
   9) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak; dan
   10) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.

b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka Dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun seperti kenaikan gaji pegawai, Tunjangan Sertifikasi Guru.
c. Dana transfer DIY diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.
d. Dengan sudah disusunnya program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul sementara pembiayaan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bantul sangat terbatas maka diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya dengan cara menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan, seperti peran serta swasta melalui CSR, kemitraan, kerjasama, KPBU, filantropi dan sebagainya.

### 3. 3. 1. 2 **Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada:

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

1. Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan
6. Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
8. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*);

9. Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
10. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
11. Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:

1) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
3) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial. Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### 3. 3. 1. 3 **Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan:

1) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi kapasitas riil keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
3) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

| No | URAIAN | PROYEKSI APBD (Rp) | | | | | | Pertum-buhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| **4** | **PENDAPATAN** | **2.121.698.479.000** | **2.025.812.431.000** | **2.272.539.790.000** | **2.214.197.734.000** | **2.246.635.909.000** | **2.306.350.935.000** | **1,84%** |
| **4,01** | **Pendapatan Asli Daerah** | **495.767.307.000** | **493.854.008.000** | **520.280.302.000** | **535.634.373.000** | **551.833.901.000** | **585.897.304.000** | **3,42%** |
| 04,01,01 | Hasil Pajak Daerah | 221.912.299.000,00 | 221.979.000.000 | 246.313.246.000 | 259.002.532.000 | 272.352.367.000 | 303.021.040.000 | **6,51%** |
| 04,01,02 | Hasil Retribusi Daerah | 39.446.673.000,00 | 39.631.673.000 | 40.645.490.000 | 41.653.992.000 | 42.681.385.000 | 43.734.117.000 | **2,09%** |
| 04,01,03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 23.707.167.000,00 | 23.707.167.000 | 24.271.398.000 | 25.727.681.000 | 27.399.981.000 | 29.591.979.000 | **4,58%** |
| 04,01,04 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 210.701.168.000,00 | 208.536.168.000 | 209.050.168.000 | 209.250.168.000 | 209.400.168.000 | 209.550.168.000 | **-0,11%** |
| **4,02** | **Pendapatan Transfer** | **1.619.931.172.000** | **1.531.958.423.000** | **1.751.939.488.000** | **1.678.363.361.000** | **1.694.602.008.000** | **1.720.253.631.000** | **1,44%** |
| **04,02,01** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **1.343.338.184.000** | **1.343.338.184.000** | **1.377.511.321.000** | **1.402.550.118.000** | **1.425.711.264.000** | **1.451.851.970.000** | **1,57%** |
| | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 29.153.018.000,00 | 29.153.018.000 | 30.610.669.000 | 32.141.202.000 | 33.748.262.000 | 35.435.675.000 | **4,00%** |
| | Dana Alokasi Umum | 941.315.965.000,00 | 941.315.965.000 | 959.200.968.000 | 978.384.988.000 | 995.506.725.000 | 1.015.416.859.000 | **1,53%** |
| | Dana Alokasi Khusus | 233.146.510.000,00 | 233.146.510.000 | 237.365.284.000 | 241.689.528.000 | 246.121.877.000 | 250.665.036.000 | **1,46%** |
| | DID | **30.323.619.000,00** | 30.323.619.000 | 30.323.619.000 | 30.323.619.000 | 30.323.619.000 | 30.323.619.000 | |
| | Dana Desa | **109.399.072.000,00** | 109.399.072.000 | 120.010.781.000 | 120.010.781.000 | 120.010.781.000 | 120.010.781.000 | **1,94%** |
| **04,02,02** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **276.592.988.000** | **188.620.239.000** | **374.748.167.000** | **276.013.243.000** | **269.090.744.000** | **268.601.661.000** | **7,57%** |
| | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainya | 152.713.899.000,00 | 158.913.899.000 | 166.065.025.000 | 173.537.951.000 | 181.347.159.000 | 189.507.781.000 | **4,41%** |
| | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya | 123.879.089.000,00 | 29.706.340.000 | 208.683.142.000 | 102.475.292.000 | 87.743.585.000 | 79.093.880.000 | **90,27%** |
| **4,03** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **6.000.000.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 04,03,01 | Pendapatan Hibah | 6.000.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **2.267.724.883.000** | **2.141.090.935.000** | **2.393.941.289.000** | **2.335.845.090.000** | **2.369.572.795.000** | **2.433.807.603.000** | **1,59%** |
| **5,01** | **Belanja Operasi** | **1.713.809.666.000** | **1.664.248.301.000** | **1.749.162.898.000** | **1.788.861.823.000** | **1.825.602.113.000** | **1.874.927.528.000** | **1,85%** |
| 05,01,01 | Belanja Pegawai | 951.471.887.000 | 976.142.986.000 | 992.330.204.000 | 1.009.871.614.000 | 1.027.786.933.000 | 1.046.916.030.000 | **1,93%** |

| No | URAIAN | PROYEKSI APBD (Rp) | | | | | | Pertum-buhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 05,01,02 | Belanja Barang dan Jasa | 634.395.529.000 | 626.235.407.000 | 693.493.694.000 | 706.480.209.000 | 735.116.180.000 | 765.104.498.000 | **3,89%** |
| 05,01,05 | Belanja Hibah | 122.107.250.000 | 55.601.908.000 | 57.339.000.000 | 66.510.000.000 | 56.699.000.000 | 56.907.000.000 | **-9,95%** |
| 05,01,06 | Belanja Bantuan Sosial | 5.835.000.000 | 6.268.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | **0,63%** |
| **5,02** | **Belanja Modal** | **242.068.319.000,00** | **135.929.147.000** | **295.684.951.000** | **194.601.647.000** | **188.439.165.000** | **198.185.404.000** | **8,30%** |
| **5,03** | **Belanja Tidak Terduga** | **34.055.411.000,00** | **22.686.428.000** | **20.000.000.000** | **20.000.000.000** | **20.000.000.000** | **20.000.000.000** | **-9,05%** |
| **5,04** | **Belanja Transfer** | **277.791.487.000** | **318.227.059.000** | **329.093.440.000** | **332.381.620.000** | **335.531.517.000** | **340.694.671.000** | **4,29%** |
| 05,04,01 | Belanja Bagi Hasil | 26.103.398.000,00 | 26.103.398.000 | 28.695.874.000 | 30.065.652.000 | 31.503.375.000 | 34.675.516.000 | **5,91%** |
| 05,04,02 | Belanja Bantuan Keuangan | 251.688.089.000,00 | 292.123.661.000 | 300.397.566.000 | 302.315.968.000 | 304.028.142.000 | 306.019.155.000 | **4,15%** |
| | | | | | | | | |
| **Surplus (Defisit)** | | **(146.026.404.000)** | **(115.278.503.000)** | **(121.401.499.000)** | **(121.647.356.000)** | **(122.936.886.000)** | **(127.456.668.000)** | **-2,16%** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | | | |
| **6,01** | **Penerimaan Pembiayaan** | **182.026.404.000** | **151.278.503.000** | **158.401.499.000** | **158.647.356.000** | **159.936.886.000** | **164.456.668.000** | **-1,68%** |
| 06,01,01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 171.026.404.000 | 140.278.503.000 | 146.401.499.000 | 146.647.356.000 | 147.936.886.000 | 152.456.668.000 | **-1,90%** |
| 06,01,02 | Penerimaan Piutang Daerah | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | **1,82%** |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | | | | |
| **6,02** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **36.000.000.000** | **36.000.000.000** | **37.000.000.000** | **37.000.000.000** | **37.000.000.000** | **37.000.000.000** | **0,56%** |
| 06,02,01 | Penyertaan Modal | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | **0,00%** |
| 06,02,02 | Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo | - | - | - | - | - | - | |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | **1,82%** |
| | | | - | | | | | |
| | **SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN** | **146.026.404.000** | **115.278.503.000** | **121.401.499.000** | **121.647.356.000** | **122.936.886.000** | **127.456.668.000** | **-2,16%** |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pendapatan daerah diperkirakan rerata tumbuh sebesar 1,84% pertahun. Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Bantul diperkirakan mencapai sebesar Rp.2,12 triliun. Tahun 2022 merupakan awal pemulihan dari pandemi Covid-19, diasumsikan pandemi Covid sudah dapat diatasi, total pendapatan daerah diperkirakan kembali tumbuh mencapai sebesar Rp.2,03 triliun dan meningkat menjadi Rp.2,31 triliun pada tahun 2026.

Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Pandemi Covid-19, belanja daerah juga diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 1,59%. Pada tahun 2021, belanja daerah dalam APBD mencapai nilai nominal sebesar Rp.2,27 triliun yang kemudian diperkirakan menjadi sebesar Rp.2,14 triliun pada tahun 2022, dan menjadi sebesar Rp.2,43 triliun pada tahun 2026. Dilihat dari masing-masing pos belanja daerah maka terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja operasi yang diperkirakan mengalami peningkatan rerata pertahun sebesar 1,85%. Sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan akan mengalami peningkatan rerata sebesar 8,30% pertahun

Selanjutnya berdasarkan perimbangan pendapatan dan belanja daerah maka dapat ditemukan selisih defisit APBD Kabupaten Bantul yang akan ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2021-2026, SiLPA diperkirakan mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dari sebesar Rp. 171,03 milyar pada tahun 2021 dan tahun 2026 mencapai sebesar Rp.152,46 milyar.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah perlu peningkatan modal BUMD melalui penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyertaan Modal pada BUMD di proyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026

| BUMD | PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Rp.JUTA) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| PT. BPD DIY | 15.000 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 12.230 | 15.200 |
| PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.970 | 2.000 |
| PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| PERUMDA ANEKA DHARMA | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **JUMLAH** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

### 3. 3. 1. 4 Penjelasan Proyeksi masing-masing Pos Pendapatan dan Belanja Daerah

Metode yang digunakan dalam memproyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah terdiri dari expert judgement dan teknik forecasting trend linear. Gambaran proyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Proyeksi Pajak Daerah tahun 2021-2026, berdasarkan penilaian kecenderungan data realisasi berbagai jenis pajak daerah selama periode 10 tahun terakhir, maka secara keseluruhan pos pajak

daerah mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,51% selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dari sebesar Rp.221,91 milyar pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.303,02 milyar pada tahun 2026. Pertumbuhan pajak daerah cukup signifikan, didasari oleh perkiraan akan terjadinya kondisi kenormalan dari pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Perekonomian daerah Kabupaten Bantul akan tumbuh ditandai dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi kreatif, pariwisata dan usaha Kecil dan menengah yang selama ini telah banyak memberi kontribusi terhadap realisasi pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan seterusnya. Adapun proyeksi rincian pajak daerah tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

- Pajak Hotel diperkirakan pulih kembali pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 5%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,11 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos.
- Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadi 7 % pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026.
- Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Cukup optimisnya

pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan, adapun rerata pertumbuhan pajak hiburan sebesar 5,25% pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.876 Juta, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1,15 milyar pada tahun 2026. Prediksi pertumbuhan ini optimis dapat tercapai karena didukung pulihnya kegiatan pariwisata pada tahun 2023.

- Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah dan ditahun 2026 mencapai sekitar Rp.3,03 milyar. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu. Namun pendapatan pajak reklame dapat dioptimalkan dengan menempatkan reklame ditempat yang strategis selain lokasi yang ada pembatasan jumlah titik reklame.
- Pajak Penerangan Jalan mulai tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5% pertahun sesuai dengan perkembangan data realisasi pada 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar Rp.47,51 milyar dan terus meningkat sampai tahun 2026 mencapai sebesar Rp.57,74 milyar.
- Pajak Parkir diperkirakan mulai pemulihan pada tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh mencapai 7%. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi Rp.260 juta pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.337 juta pada tahun 2026.

- Pajak air bawah tanah diperkirakan tumbuh mencapai sebesar 4,01% pertahun. Pada tahun 2021 mencapai kisaran Rp.781 juta kemudian meningkat menjadi Rp.949 juta pada tahun 2026. Hambatan dalam pengembangan sumber pendapatan dari pajak air bawah tanah ini adalah adanya potensi perusakan lingkungan hidup akibat terlalu dieksploitasi. Perlu dicarikan solusi agar pajak air bawah tanah tetap optimal dan lingkungan hidup tetap terpelihara.
- Pajak sarang burung walet setiap tahun hanya ditarget sebesar Rp2.000,000 karena potensi Kecil dan semakin hilang, selayaknya pos ini dipertimbangkan terkait dengan efisien pendapatan dan belanja sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat(4) yang mana menyebutkan bahwa apabila potensi jenis pajak kurang memadai dapat tidak dipungut.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.938 juta pada tahun 2026. Rerata pertumbuhan pajak mineral bukan logam sebesar 5% pertahun.
- Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5%, dengan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) setiap 3(tiga) tahun sekali. Pada tahun 2021 PBB P2 ditarget sebesar Rp.55,13 milyar dan meningkat sebesar Rp.55,68 milyar dan seterusnya menjadi Rp.87,52 milyar pada tahun 2026.
- BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5 % dikarenakan adanya efek kenaikan NJOP setiap 3(tiga) tahun sekali. Pajak ini ditarget sebesar Rp.93,71 milyar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp.92,78 milyar pada tahun 2022 dan seterusnya meningkat menjadi Rp.125,02 milyar pada tahun 2026.

Selanjutnya beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang antara lain:

- Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos.
- Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya.
- Pajak hiburan perlu didorong dengan meningkatkan atraksi seni dan budaya di Bantul seiring dengan pengembangan objek dan destinasi pariwisata.
- Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu.
- Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.
- Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan, namun demikian perlu ada kordinasi yang efektif dengan pihak terkait lainnya.

Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Pajak Hotel | 4.034 | 4.115 | 4.236 | 4.448 | 4.670 | 4.903 | Pajak Hotel diperkirakan baru awal masa pemulihan pada tahun 2022 dan mulai dengan tingkat pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan rerata pertahun sebesar 5% mulai tahun 2023. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,12 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos |
| 01.02 | Pajak Restoran | 16.348 | 16.675 | 17.492 | 18.717 | 20.027 | 21.429 | Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadai rerata pertahun mencapai sebesar 7%. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026 |
| 01.03 | Pajak Hiburan | 876 | 876 | 938 | 1.003 | 1.073 | 1.149 | Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Cukup optimisnya pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk |

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan |
| 01.04 | Pajak Reklame | 2.499 | 2.524 | 2.624 | 2.755 | 2.893 | 3.038 | Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu. |
| 01.05 | Pajak Penerangan Jalan | 47.506 | 47.506 | 49.882 | 52.376 | 54.995 | 57.744 | Pajak ini diperkirakan tumbuh sebesar 5 % pertahun mulai tahun 2023. |
| 01.06 | Pajak Parkir | 257 | 260 | 275 | 294 | 315 | 337 | Pajak Parkir diperkirakan masuk awal pemulihan pada tahun 2022 Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 7 %. |
| 01.07 | Pajak Air Bawah Tanah | 781 | 789 | 820 | 861 | 904 | 949 | Pajak air bawah tanah ditargetkan sebesar Rp.781 juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan tumbuh sebesar 4,01% pertahun |
| 01.08 | Pajak Sarang Burung Walet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Potensi Kecil dan target yang dipatok tetap sebesar Rp2.000,000 pertahun |

| No | Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 772 | 780 | 810 | 851 | 893 | 938 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5%. |
| 01.10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 55.125 | 55.676 | 66.150 | 69.458 | 72.930 | 87.516 | Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5 % pertahun, dengan penyesuaian NJOP setiap 3 tahun. |
| 01.11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 93.713 | 92.776 | 103.084 | 108.238 | 113.650 | 125.015 | BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5% dan terdapat efek kenaikan NJOP PBB setiap 3 tahun. |
| J U M L A H | | 221.912 | 221.979 | 246.313 | 259.003 | 272.352 | 303.021 | Rerata Pertumbuhan 6,%1% |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

2. Proyeksi retribusi daerah tahun 2021-2026 akan mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% pertahun. Hal ini dihitung berdasarkan justifikasi pola data realisasi masing-masing pos retribusi daerah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021, perolehan retribusi daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp.39,45 milyar yang kemudian menjadi sebesar Rp.39,63 milyar pada tahun 2022, dan mencapai sebesar Rp.43,73 milyar pada tahun 2026. Lima pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, serta retribusi parkir.

Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

| NO | URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETRIBUSI JASA UMUM | 7.502.283.120 | 7.502.283.120 | 7.739.885.860 | 8.017.680.724 | 8.215.717.438 | 8.418.645.659 | |
| | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1.799.855.120 | 1.799.855.120 | 1.880.848.600 | 1.915.486.787 | 1.962.799.311 | 2.011.280.454 | DLH<br>Dinas perdagangan |
| | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 330.750.000 | 330.750.000 | 345.633.750 | 361.187.269 | 370.108.595 | 379.250.277 | Dinas Perhubungan |
| | Retribusi Pelayanan Pasar | 3.173.092.000 | 3.173.092.000 | 3.215.881.140 | 3.365.095.791 | 3.448.213.657 | 3.533.384.534 | Dinas perdagangann |
| | Retribusi PKB - Buku Uji | 1.203.247.500 | 1.203.247.500 | 1.257.393.638 | 1.288.976.351 | 1.320.814.067 | 1.353.438.174 | Dinas Perhubungan |
| | Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.360.000 | 8.736.200 | 8.951.984 | 9.173.098 | Dinas Kesehatan |
| | Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi | 535.500.000 | 535.500.000 | 559.597.500 | 584.779.388 | 599.223.439 | 614.024.258 | Dinas KOMINFO |
| | Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus | 21.602.500 | 21.602.500 | 22.574.613 | 23.590.470 | 24.173.155 | 24.770.232 | DPUPKP |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan | 224.400.000 | 224.400.000 | 234.498.000 | 245.050.410 | 251.103.155 | 257.305.403 | DPPPKP |
| | Retribusi Pengolahan Limbah Cair | 112.200.000 | 112.200.000 | 117.249.000 | 122.525.205 | 125.551.578 | 128.652.702 | DPUPKP |
| | Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang | 93.636.000 | 93.636.000 | 97.849.620 | 102.252.853 | 104.778.498 | 107.366.527 | Dinas Perdagangan |
| 2 | RETRIBUSI JASA USAHA | 29.275.889.984 | 29.295.889.984 | 30.117.021.171 | 30.772.242.728 | 31.530.855.896 | 32.309.668.037 | |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.241.595.000 | 1.261.595.000 | 1.297.466.775 | 1.355.852.780 | 1.389.342.344 | 1.423.659.100 | DPUPKP' DPPKP;<br>Dinas Perhubungan;<br>DLH |
| | Retribusi Tempat Pelelangan Ikan | 86.700.000 | 86.700.000 | 90.601.500 | 94.678.568 | 97.017.129 | 99.413.452 | DPPKP |
| | Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum | 122.173.000 | 122.173.000 | 127.670.785 | 133.415.970 | 136.711.344 | 140.088.115 | Dinas Perhubungan |
| | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 192.710.000 | 192.710.000 | 201.381.950 | 210.444.138 | 215.642.108 | 220.968.468 | Dinas Perhubungan |
| | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.225.000 | 5.460.125 | 5.594.990 | 5.733.186 | Bagian Umum |

| NO | URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 25.200.875.000 | 25.200.875.000 | 25.858.630.513 | 26.322.224.490 | 26.970.922.208 | 27.637.103.986 | Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 2.316.586.984 | 2.316.586.984 | 2.420.833.398 | 2.529.770.901 | 2.592.256.242 | 2.656.284.971 | DPPKP |
| | Retribusi Rumah Potong Hewan | 110.250.000 | 110.250.000 | 115.211.250 | 120.395.756 | 123.369.531 | 126.416.759 | DPPKP |
| | | | | | | | | |
| 3 | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | 2.668.500.000 | 2.668.500.000 | 2.788.582.500 | 2.864.068.713 | 2.934.811.210 | 3.005.803.778 | |
| | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 2.205.000.000 | 2.205.000.000 | 2.304.225.000 | 2.357.915.125 | 2.416.155.629 | 2.474.337.404 | DPUPKP |
| | Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA | 463.500.000 | 463.500.000 | 484.357.500 | 506.153.588 | 518.655.582 | 531.466.374 | Dina Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | | 39.446.673.104 | 39.466.673.104 | 40.645.489.532 | 41.653.992.164 | 42.681.384.544 | 43.734.117.474 | |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3. Untuk proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan dengan metode forecasting trend linear. Selama periode tahun 2021-2026, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 4,58% pertahun, dari sebesar Rp.23,7 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.29,59 milyar pada tahun 2026. Peningkatan perolehan pendapatan daerah dari pos ini didasari oleh pertumbuhan perekonomian nasional dan regional DIY yang akan berdampak pada semakin meningkatnya laba bersih sektor usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti BPD DIY dan PD BPR Bank Bantul, PD Aneka Dharma, PDAM dan BUKP.

4. Lain-lain PAD tidak dilakukan estimasi karena pos ini hanya bersifat insidentil menampung berbagai kemungkinan adanya dana pendapatan daerah. Beberapa pos yang dominan dari pendapatan ini berasal dari pendapatan BLUD, deposito, dana bergulir, denda, pengembalian kerugian dan beberapa pos lainnya. Berdasarkan angka realisasi yang ada diperkirakan sepanjang tahun 2021-2026, pendapatan dari lain-lain PAD lebih kurang sebesar Rp209,55 milyar pertahun.

5. Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata yang berkisar antara 4 - 5% pertahun sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal. Perkiraan dan justifikasi tersebut dilakukan karena forecasting yang dilakukan atas data realisasi tahun 2007-2019 menghasilkan model estimasi dan angka perkiraan yang fluktuatif.
Sesuai dengan meningkatnya iklim investasi yang makin kondusif di Kabupaten Bantul maka jumlah realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja diperkirakan juga akan terus meningkat, hal ini akan

berdampak pada meningkatnya pembayar pajak penghasilan pasal 21 di Kabupaten Bantul yang otomatis akan menjadi potensi Bagi Hasil Pajak. Berdasarkan data realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja selama periode tahun 2015-2020 terlihat adanya peningkatan jumlah investasi PMA dan PMDN serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul.

Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

| No. | Tahun | Jumlah Investor | | | Jumlah Tenaga Kerja | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PMA | PMDN | Jumlah | PMA | PMDN | Jumlah |
| 1 | 2016 | 37 | 5 | 42 | 10.364 | 9.366 | 19.730 |
| 2 | 2017 | 46 | 15 | 61 | 13.880 | 9.880 | 23.760 |
| 3 | 2018 | 47 | 47 | 94 | 15.311 | 11.610 | 26.921 |
| 4 | 2019 | 106 | 103 | 209 | 17.146 | 11.834 | 28.980 |
| 5 | 2020 | 96 | 338 | 434 | 17.385 | 12.068 | 29.453 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

6. Dana Alokasi Umum diestimasi dengan menggunakan justifikasi pertumbuhan realisasi beberapa tahun belakangan, hal ini dilakukan akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan. Selama periode tahun 2021-2026, DAU diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 1,53% pertahun yaitu berada pada kisaran tingkat pertumbuhan DAU periode 2014-2019. Pada tahun 2021, DAU diperkirakan mencapai sebesar Rp.941.3 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1.015,4 milyar pada tahun 2026.

7. Dana Alokasi Khusus hanya diprediksi DAK Non Fisik saja terutama untuk DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD tersebut mengalami pertumbuhan rerata 1,46% dengan asumsi adanya kenaikan gaji pokok. Sementara untuk alokasi DAK yang lain tidak dapat diprediksi hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,

sebelum ada informasi dari Pemerintah maka tidak bisa mencantumkan prediksi dari Dana Alokasi Khusus tersebut.

8. Dana Insentif Daerah tidak dilakukan proyeksi karena pendapatan tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dan diasumsikan tetap selama periode 2021 - 2026.

9. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi dengan menggunakan metode forecasting linear terhadap data Bagi Hasil Pajak Provinsi pada periode tahun 2007-2019. Dari hasil perhitungan ditemukan rerata pertumbuhan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar 4,41% pertahun selama periode tahun 2021-2026.

10. Proyeksi belanja Operasi tahun 2021-2026 menggunakan metode forecasting linear dan justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja operasi mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,85%. Belanja operasi lebih di dominasi dari belanja pegawai yang mencapai 56% sampai 59% dari pos belanja lainnya. Adapun penjelasan proyeksi masing-masing belanja operasi sebagai berikut:

a. Pos belanja pegawai diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,93% pertahun, dari sebesar Rp.951,47 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1,05 triliun pada tahun 2026. Kenaikan belanja tersebut digunakan mendukung belanja kepegawaian berupa gaji, tunjangan, insentif serta belanja-belanja yang terkait dengan dukungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan

misi pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Anggaran belanja pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2022-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), sedangkan pengelolaan gaji tetap dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah

b. Belanja barang dan jasa diperkirakan sedikit mengalami peningkatan rerata sebesar 3,89% sepanjang periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja barang dan jasa diperkirakan mencapai sebesar Rp634,40 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp626,24 milyar pada tahun 2022 dan kembali mengalami pertumbuhan menjadi sebesar Rp.765,10 milyar pada tahun 2026. Justifikasi pertumbuhan belanja barang dan jasa tersebut didasarkan pada kisaran angka pertumbuhan yang dapat mempertahankan proporsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah yang pada periode 2014-2019 berada pada kisaran angka 18 - 28%.

c. Belanja Hibah menggunakan metode forecasting trend linear. Belanja hibah diproyeksikan tidak sepenuhnya mengikuti hasil forecasting namun juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp.122,11milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.55,60 milyar pada tahun 2022. Pada tahun 2024 megalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.66,51 milyar dikarenakan adanya PILKADA serentak.

d. Belanja Bantuan Sosial dilakukan justifikasi nilai berdasarkan nilai median. Hal tersebut disebabkan oleh variasi data antar tahun yang sangat berbeda yang menghasilkan estimasi dan angka perkiraan yang tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Proyeksi Belanja Modal untuk tahun 2021 - 2026 menggunakan metode justifikasi akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan, Pada tahun 2021 belanja modal mencapai Rp242,07 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp135,93 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 mencapai sebesar Rp198,18 milyar, Selama periode 2022-2026 belanja modal mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dikarenakan pada periode tersebut tidak memprediksi belanja yang berasal dari sumber dana DAK Fisik,

12. Belanja tidak terduga tidak dilakukan proyeksi karena sifatnya untuk keperluan darurat dan tidak bisa diprediksi sehingga diasumsikan tetap dalam kisaran angka sebesar Rp20 milyar pertahun.

13. Proyeksi Belanja Transfer tahun 2021-2026 menggunakan metode justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil. Hasilnya pos ini diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 4,29% pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 ditarget sebesar Rp.277,79 milyar kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.318,23 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp.340.69 milyar.

14. Belanja Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk setiap Kalurahan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah. Selama periode tahun 2021-2026, belanja bagi hasil mengalami pertumbuhan rerata sebesar 5,91% pertahun, dari sebesar Rp26,10 milyar pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp34,68 milyar pada tahun 2026.

15. Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan mengalami peningkatan rerata sebesar 4,15 % pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 jumlah belanja bantuan keuangan mencapai sebesar Rp251,12 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp292,67milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp306,09 milyar pada tahun 2026.

### 3. 3. 2 **Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Analisis kerangka pendanaan dalam RPJMD bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja

dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan earkmark) dan belanja tertentu.Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten bantul pada program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021 - 2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam penghitungan Kapasitas Riil Keuangan daerah adalah

- Langkah pertama: menghitung kapasitas riil penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,
- Langkah kedua: menghitung jumlah total pendapatan mengikat yang dimiiki daerah yaitu pendapatan DAK dan Dana penyesuaian dan Otsus. Kedua jenis pendapatan ini memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tersedia,
- Langkah Ketiga: Menghitung jumlah nominal total belanja mengikat yang dimiliki oleh daerah, yaitu belanja gaji, tunjangan pegawai dan belanja transfer, juga termasuk dalam belanja mengikat yaitu belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perangkat daerah.
- Langkah Keempat: menghitung jumlah belanja wajib yang harus dikeluarkan oleh daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, diantaranya belanja untuk mendukung program pendidikan yang mencapai 20% dari alokasi belanja, kemudian belanja untuk kesehatan yang mencapai 10% dari belanja

daerah, dan kebutuhan belanja BLUD pada beberapa perangkat daerah.

- Langkah Kelima: menghitung Kapasitas riil keuangan daerah dengan rumus berikut Kapasitas Riil Keuangan Daerah = Kapasitas riil penerimaan daerah – (Pendapatan Mengikat + Belanja Mengikat + Belanja Wajib Daerah).

Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| **KAPASITAS RIIL PENERIMAAN DAERAH** | **2.292.724.883.000** | **2.166.090.934.000** | **2.418.941.289.000** | **2.360.845.090.000** | **2.394.572.795.000** | **2.458.807.603.000** |
| PENDAPATAN DAERAH | 2.121.698.479.000 | 2.025.812.431.000 | 2.272.539.790.000 | 2.214.197.734.000 | 2.246.635.909.000 | 2.306.350.935.000 |
| SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN | 171.026.404.000 | 140.278.503.000 | 146.401.499.000 | 146.647.356.000 | 147.936.886.000 | 152.456.668.000 |
| | | | | | | |
| **PENDAPATAN MENGIKAT** | **372.869.201.000** | **372.869.201.000** | **387.699.684.000** | **392.023.928.000** | **396.456.277.000** | **400.999.436.000** |
| DAK | 233.146.510.000 | 233.146.510.000 | 237.365.284.000 | 241.689.528.000 | 246.121.877.000 | 250.665.036.000 |
| Dana Penyesuaian | 139.722.691.000 | 139.722.691.000 | 150.334.400.000 | 150.334.400.000 | 150.334.400.000 | 150.334.400.000 |
| | | | | | | |
| **BELANJA MENGIKAT** | **1.051.272.293.000** | **1.099.234.070.000** | **1.145.509.299.000** | **1.148.800.127.000** | **1.168.804.017.000** | **1.194.513.293.000** |
| Belanja Pegawai | 781.733.920.000 | 806.405.019.000 | 818.373.462.000 | 831.590.629.000 | 845.073.598.000 | 859.659.537.000 |
| Belanja Transfer | 138.068.796.000 | 178.504.368.000 | 178.759.040.000 | 182.047.220.000 | 185.197.117.000 | 190.360.271.000 |
| Belanja yang terkait dengan biaya Rutin Perangkat Daerah | 131.469.577.000 | 114.324.683.000 | 148.376.797.000 | 135.162.278.000 | 138.533.302.000 | 144.493.485.000 |
| | | | | | | |
| **BELANJA WAJIB** | **477.592.573.000** | **461.539.015.000** | **481.026.448.000** | **496.847.006.000** | **504.570.398.000** | **519.426.959.000** |
| Belanja Pendidikan(20% dari belanja barang dan jasa + modal ) | 194.010.988.000 | 184.202.298.000 | 196.961.171.000 | 209.033.223.000 | 213.328.981.000 | 222.738.493.000 |
| Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal ) | 103.581.585.000 | 97.386.717.000 | 104.115.277.000 | 107.863.783.000 | 111.291.417.000 | 116.738.466.000 |
| BLUD | 180.000.000.000 | 179.950.000.000 | 179.950.000.000 | 179.950.000.000 | 179.950.000.000 | 179.950.000.000 |

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| | | | | | | |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| | | | | | | |
| **TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT** | **1.926.734.067.000** | **1.958.642.286.000** | **2.039.235.431.000** | **2.062.671.061.000** | **2.094.830.692.000** | **2.139.939.688.000** |
| | | | | | | |
| **KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH** | **365.990.816.000** | **207.448.648.000** | **379.705.858.000** | **298.174.029.000** | **299.742.103.000** | **318.867.915.000** |
| Persentase | **15,96%** | **9,58%** | **15,70%** | **12,63%** | **12,52%** | **12,97%** |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Keterangan : Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp207,45 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. dan mencapai Rp318,87 milyar pada tahun 2026, dengan asumsi adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin PD agar lebih efektif dan efisien.

Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp. Juta) | (Rp. Juta) | (Rp. Juta) | (Rp. Juta) | (Rp. Juta) | (Rp. Juta) |
| Pendapatan daerah | 2.121.698 | 2.025.812 | 2.272.540 | 2.214.198 | 2.246.636 | 2.306.351 |
| Pencairan Dana Cadangan (sesuai peraturan daerah) | - | - | - | - | - | - |
| Sisa lebih riil perhitungan anggaran | 171.026 | 140.279 | 146.401 | 146.647 | 147.937 | 152.457 |
| **Total penerimaan** | 2.292.725 | 2.166.091 | 2.418.941 | 2.360.845 | 2.394.573 | 2.458.808 |
| **Dikurangi** | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Wajib Mengikat | 1.901.734 | 1.933.642 | 2.014.235 | 2.037.671 | 2.069.831 | 2.114.940 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - | - | - | - | - | - |
| **KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN** | 365.991 | 207.449 | 379.706 | 298.174 | 299.742 | 318.868 |
| Persentase | 15,96% | 9,58% | 15,70% | 12,63% | 12,52% | 12,97% |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021
Keterangan: Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat menggunakan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam tiga kelompok prioritas:

a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

| Uraian | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Rp, Juta) | % | (Rp, Juta) | % | (Rp, Juta) | % | (Rp, Juta) | % | (Rp, Juta) | % | (Rp, Juta) | % |
| Prioritas I | 1.926.734 | 84,04% | 1.958.642 | 90,42% | 2.039.235 | 84,31% | 2.062.671 | 87,38% | 2.094.831 | 87,49% | 2.139.940 | 87,04% |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 365.991 | | 207.449 | | 379.706 | | 298.174 | | 299.742 | | 318.868 | |
| Prioritas II | 227.049 | 9,90% | 134.579 | 6,22% | 304.367 | 12,58% | 213.664 | 9,04% | 225.043 | 9,39% | 243.961 | 9,92% |
| Prioritas III | 138.942 | 6,06% | 72.870 | 3,36% | 75.339 | 3,11% | 84.510 | 3,58% | 74.699 | 3,12% | 74.907 | 3,04% |
| **Jumlah** | 2.292.725 | 100% | 2.166.091 | 100% | 2.418.941 | 100% | 2.360.845 | 100% | 2.394.573 | 100% | 2.458.808 | 100% |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

### 3.3.2.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD Kabupaten

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program Program yang telah disusun oleh Pemerintah Ka bupaten Bantul sementara ada keterbatasan anggaran dalam APBD maka tidak semua program-program dapat dibiayai dengan APBD Kabupaten Bantul. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kemitraan, pinjaman dan TSLP/CSR. Selanjutnya dalam RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 TSLP/CSR dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.29 Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

| Tahun | Nominal (Rp) |
|---|---|
| 2021 | 8.348.811.699 |
| 2022 | 8.941.577.329 |
| 2023 | 9.685.456.452 |
| 2024 | 10.513.191.039 |
| 2025 | 11.407.144.393 |
| 2026 | 12.372.614.015 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Metode yang digunakan untuk memproyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu teknik *forecasting Moving Average* dengan menggunakan data Realisasi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp8,94 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan mencapai Rp.12,37 milyar pada tahun 2026, Pertumbuhan CSR/TLSP diperkirakan sebesar 8,19% dengan asumsi adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan tingkat inflasi sebesar 3%.

# BAB IV
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

## 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

### 4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan untuk penentuan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul disesuaikan dengan bidang urusan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

#### 4.1.1.1. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

**1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan**

(1) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.

(2) Adanya peserta didik putus sekolah.
Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.

(3) Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.

(4) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

(5) Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.

(6) Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.

**2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan**

(1) Adanya kasus balita gizi buruk yang dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

(2) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular.
Terjadi kenaikan kasus penyakit menular terutama diare dan kasus TB. Diperparah dengan adanya pandemic Covid-19.

(3) Adanya kematian ibu melahirkan.
Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

(4) Adanya kematian bayi.
Nilai AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 sebesar 6,93.

(5) Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(6) Capaian tatanan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah. Capaian PHBS di lingkup rumah tangga baru mencapai 53%.

(7) Belum optimalnya fasilitas layanan bidang Kesehatan.

**3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

(1) Adanya jaringan jalan yang mengalami kerusakan.
Terdapat 24,58% jalan kabupaten dalam kondisi belum mantap.

(2) Adanya kejadian banjir disebagian wilayah.
Persentase penanganan banjir luapan baru mencapai 40,9% (365,47ha) dari luas daerah rawan banjir luapan 893.56 ha.

(3) Adanya Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang belum terlayani/tercukupi air dengan baik sebesar 19,09%.

(4) Cakupan akses terhadap air minum yang layak belum mencapai 100%. Akses terhadap air minum yang layak baru 96,81%. Di beberapa wilayah belum memiliki akses air minum yang layak.

(5) Cakupan akses sanitasi yang layak belum mencapai 100%.
Akses sanitasi yang layak baru 84,83%.

(6) Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan pola ruang.
Kesesuaian pola ruang tahun 2020 dengan kriteria 'sesuai' sebesar 75,01%; 'belum sesuai' sebesar 14,05%; dan 'tidak sesuai' sebesar 10,94%. Ketidaksesuaian terbesar adalah pada Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering.

**4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

(1) Adanya RTLH yang belum tertangani.

(2) Adanya Kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul.
Penanganan kumuh sesuai Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 mencapai 92,49%.

(3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman.

**5. Urusan Pemerintah Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat**

(1) Belum optimalnya penegakan perda.
Persentase penegakan perda sebesar 70% pada tahun 2020.

(2) Sebagian masyarakat belum sadar hukum.

(3) Tingkat risiko bencana tinggi.
Indeks Risiko Bencana tahun 2020 adalah 187,2 masuk dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Bantul yang berada pada daerah rawan bencana.

(4) Tingkat kerentanan bencana masih tinggi.

(5) Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Belum semua Kalurahan ditetapkan sebagai Kalurahan Tanggap Bencana, baru mencapai 35 Kalurahan (46,67%). Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) baru mencapai 23 SPAB (4,51%).

(6) Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran.

**6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial**

(1) Tingkat kemiskinan masih tinggi.
Angka kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 13,5 %.

(2) Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

(3) Belum sinerginya kesiap-siagaan kedaruratan kebencanaan dan penangan korban bencana.

(4) Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

(5) Sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik belum ramah difabel.

#### 4.1.1.2. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

**1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja**

(1) Kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

Pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

(2) Adanya ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

(3) Informasi pasar kerja yang belum optimal.

(4) Penumbuhan dan pengembangan pekerja mandiri belum optimal.

**2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

(1) Belum efektifnya peran satuan tugas perlindungan.

(2) Belum efektifnya pemenuhan hak-hak perempuan.

(3) Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kasus KDRT mencapai 200 kasus.

(4) Belum efektifnya peran Pengarusutamaan Gender (PUG).

(5) Belum optimalnya peran Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

(6) Adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun).

(7) Persentase sekolah ramah anak masih rendah.

(8) Belum optimalnya peran Forum Anak dalam proses pembangunan lima klaster KLA.

**3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan**

(1) Kurangnya cadangan pangan pemerintah.

Cadangan pangan daerah Kabupaten Bantul baru mencapai 5,036 ton dari target 283 ton.

(2) Adanya kalurahan rentan pangan.

Menurut Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul terdapat 18 kalurahan rentan pangan.

**4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan**

(1) Pendataan tanah belum optimal.

Masih terdapat 26,29% tanah yang belum terdaftar pada tahun 2020.

(2) Adanya konflik kepemilikan tanah antara warga dengan pemerintah. Konflik yang terjadi didominasi kasus tukar guling tanah.

**5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup**

(1) Kualitas lingkungan hidup belum baik.

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 atau kategori cukup baik (60<IKLH≤70).

(2) Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Ruang terbuka hijau perkotaan baru mencapai 14,34%.

(3) Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

(4) Penanganan hutan mangrove belum berkelanjutan.

Luasan Kawasan Hutan Mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul mencapai 14 Ha dengan Luas Lahan Konservasi Aktif sebesar 6 Ha.

(5) Belum maksimalnya pengelolaan sampah.

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 $m^3$/th, sementara jumlah yang tertangani baru sebanyak 452.185,43 $m^3$/th atau 74,28%.

**6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

(1) Banyak data yang dilaporkan masyarakat yang tidak valid.

(2) Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk *update* data base.

(3) Belum semua anak usia 0 – 16 tahun memiliki KIA.

(4) Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih rendah (57,79%).

(5) Pemuthakiran data kependudukan belum optimal.

**7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

(1) Sebagian aparatur kalurahan belum memenuhi standar kompetensi.
(2) Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan kalurahan.
(3) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir.
(4) Belum optimalnya peran PKK dalam gerakan pembangunan masyarakat.
(5) Masih kecilnya jumlah Desa Mandiri (25 kalurahan dari 75 kalurahan yang ada).
(6) Belum semua kalurahan memiliki BUMDes.

**8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

(1) Angka Pasangan Usia Subur (PUS) *unmet need* menunjukkan tren meningkat.
(2) Semakin menurunnya persentase jumlah peserta KB baru.
(3) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

**9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan**

(1) Tingkat pelanggaran lalulintas masih tinggi.
(2) Tingkat kepadatan lalu lintas tidak merata.
V/C rasio Kabupaten Bantul bervariasi antara 0,17 – 0,45.
(3) Belum meratanya lampu penerangan jalan.
(4) Belum maksimalnya alat kelengkapan jalan.
(5) Adanya pemanfaatan ruang milik jalan yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

**10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika**

(1) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

(2) Belum efektifnya pemanfaatan sarana prasarana Teknologi Informasi sebagai alat komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

(3) Infrastruktur Teknologi Informasi belum menjangkau semua tempat layanan publik.

Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik pada tahun 2019 mencapai 78,56.

**11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.**

(1) Proporsi koperasi sehat sangat rendah (3,5%).

(2) Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha.

**12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal**

(1) Iklim investasi belum mampu menarik investor.

(2) Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah.

(3) Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Perizinan Online Daerah.

**13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

(1) Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.

(2) Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.

(3) Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

**14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik**

(1) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral.

Penyediaan data statistik beberapa indikator strategis belum bisa disediakan dalam skala kabupaten, diantaranya nilai inflasi, nilai tukar petani, ICOR, PDRB triwulan, dan indikator SDG's seperti jumlah pengguna telepon, internet, dan sebagainya yang memerlukan survei.

(2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial.

Jumlah pemanfaatan data geospasial sebanyak 1 aplikasi yaitu sistem informasi dashboard Portal Satu Data Bantul (https://data.bantulkab.go.id/), belum dimanfaatkan pada aplikasi di sektor lainnya.

**15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian**

(1) Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi.

(2) Kurangnya peralatan persandian yang memenuhi standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan**

(1) Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal.

(2) Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal.

(3) Belum terbangunnya Taman Budaya Bantul.

**17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan**

(1) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi.

(2) Rendahnya minat dan budaya baca sebagian masyarakat.

(3) Terbatasnya jumlah pustakawan.

(4) Kurangnya koleksi pustaka yang berkualitas dan terbaru.

(5) Masih minimnya jumlah dan variasi *e-book.*

(6) Belum adanya akses layanan perpustakaan *online*.

**18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan**

(1) Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip. Sebanyak 15 perangkat daerah termasuk dalam kategori kurang dalam pengelolaan arsip.

(2) Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.

**4.1.1.3. Urusan Pemerintah Pilihan**

**1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan**

(1) Tidak ada regenerasi menjadi nelayan.

(2) Belum optimalnya produksi ikan tangkap.

(3) Menurunnya produksi perikanan budidaya, terutama komoditas gurami.

(4) Belum tersentra dan terkelolanya dengan baik budidaya perikanan.

(5) Terbatasnya ketersediaaan bibit, pakan dan air dalam jumlah dan kualitas.

(6) Belum optimalnya pengelolaan pasca panen.

**2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata**

(1) Kunjungan wisatawan tidak merata pada seluruh destinasi.

(2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis masyarakat.

(3) Belum optimalnya SDM pengelola wisata.

(4) Kurangnya fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari.

(5) Belum optimalnya promosi wisata.

**3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian**

(1) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.

(2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan marginal dan lahan pekarangan.
(3) Semakin menipisnya ketersediaan air dan distribusi belum merata.
(4) Semakin menurunnya minat menjadi petani.
(5) Belum optimalnya pengelolaan peternakan secara profesional.

**4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan**

(1) Belum memadainya ketersediaan sarana prasarana pasar rakyat.
(2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar rakyat.
(3) Belum terwujudnya iklim perdagangan yang baik.

**5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian**

(1) Belum optimalnya pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
(2) Masih kecilnya pertumbuhan industri manufaktur.
(3) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.

**6. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi**

(1) Kurang sesuainya lokasi yang tersedia dengan minat calon transmigran.
(2) Terbatasnya kuota transmigran.

### 4.1.1.4. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

**1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

**a) Sekretariat Daerah**

(1) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 76,43 (BB) kategori Baik, dengan interprestasi: secara instansional mampu

mewujudkan sebagian besar sasaran reformasi birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

(2) Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan daerah.

(3) Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

**b) Sekretariat DPRD**

Belum optimalnya peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

**2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**a) Perencanaan**

(1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data.

(2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.

(3) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan.

**b) Keuangan**

(1) Belum efektifnya manajemen keuangan daerah.

(2) Belum optimalnya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

(3) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

**c) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

(1) Belum terpenuhinya formasi ASN.

(2) Belum optimalnya penataan PNS sesuai dengan formasi.

(3) Masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat.

**d) Penelitian dan Pengembangan**

Belum optimalnya hasil penelitian dan pengkajian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

**3. Unsur Pengawasan**

**Inspektorat Daerah**

(1) Belum optimalnya evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

(2) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

**4. Unsur Kewilayahan**

**Kapanewon**

(1) Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu, terkait pelayanan administrasi kependudukan, perizinan non usaha, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

(2) Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

(3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kalurahan, terkait penyusunan Peraturan Kalurahan/Lurah, pengelolaan keuangan kalurahan, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kalurahan.

**5. Unsur Pemerintahan Umum**

**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

(1) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama.

(2) Adanya kenakalan remaja.
(3) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama.
(4) Belum terkoordinirnya pemantauan aktivitas WNA.

### 4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah

Permasalahan pokok merupakan permasalahan yang diprioritaskan menjadi agenda utama RPJMD, yaitu :

(1) Belum optimalnya pertumbuhan PDRB per kapita.
(2) Tingginya angka kemiskinan.
(3) Adanya ketimpangan pendapatan.
(4) Adanya ketimpangan wilayah.
(5) Adanya dampak pandemi Covid-19 pada sebagian besar sektor kehidupan masyakat.
(6) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
(7) Belum terpenuhinya kualitas tenaga kerja yang kompeten.
(8) Masih terjadinya kematian ibu dan bayi.
(9) Masih adanya balita stunting.
(10) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
(11) Masih adanya kenakalan remaja
(12) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama
(13) Belum terpenuhinya cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi.
(14) Adanya RTLH yang belum tertangani.
(15) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik yang ramah difabel.
(16) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
(17) Adanya penurunan kualitas lingkungan hidup.
(18) Belum optimalnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
(19) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.
(20) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal.

### 4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Pencapaian indikator makro daerah merupakan cerminan aspek kesejahteraan masyarakat.

**1) PDRB**

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besaran peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen, stabil pada rentang waktu 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66.

**2) PDRB per kapita**

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020. Program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat diharapkan akan meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Bantul untuk tahun-tahun selanjutnya.

**3) Angka Kemiskinan**

Tingkat Kemiskinan merupakan besarnya persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2016 adalah 14,55% sampai dengan 2019 mengalami penurunan mencapai 12,92%, tetapi tahun 2020

pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali menjadi 13,50%.

**4) Ketimpangan Pendapatan**

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik, meningkat kemudian menurun. Pada tahun 2020 Indeks Gini membaik pada 0,418, dan diharapkan pada tahun 2021 dan seterusnya Indeks Gini ini akan semakin turun (membaik). Indeks Gini Bantul masuk dalam kategori ketimpangan "moderat" (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan "tinggi" (di atas 0,5).

**5) Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pada periode 2016-2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi. Perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 TPT cenderung menurun kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan akibat adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga perlu tindakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat pengangguran terbuka.

## 4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal

yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

### 4.2.1. Telaah Isu Internasional

**1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Develoment Goals* (SDG's)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Develoment Goals* (SDG's) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's.

SDG's menggantikan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. 17 tujuan adalah:

1. Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.

4. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh-pengaruhnya.
14. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.

16. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

## 2. Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine- to- machine*, komunikasi *human- to- machine*, *Artificial Intelligence* (AI), serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

## 3. Pandemi Covid-19

WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus Corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi dikarenakan penyebarannya yang meluas.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2O2O, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses tranformasinya akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

### 4.2.2. Telaah Isu Nasional

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Hal ini tertuang dalam PP nomor 12 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

**Beberapa Isu Nasional sebagai berikut :**

1. **Undang Undang Cipta Kerja**

Keberadaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya. Teknis penyusunan UUCK menggunakan model Omnibus Law mencakup sepuluh bidang kebijakan sebagai berikut: (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (2) Ketenagakerjaan (3) Kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM (4) Kemudahan berusaha (5) Dukungan riset dan inovasi (6) Pengadaan tanah (7) Kawasan Ekonomi (8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek

Strategi Nasional (9) Pelaksanaan administrasi pemerintah (10) Pengenaan sanksi.

UU Cipta Kerja memberikan perhatian pada bidang-bidang yang memudahkan investasi dengan penekanan pada aspek ekonomi. Terdapat 49 Peraturan pelaksana turunan UUCK. 49 Peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.

2. **Pandemi Covid-19**

Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new norrnal*], yang proses tranformasinya diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-l9.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produk yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak

relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*) sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing,* dan *Robotics*.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, dan belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid- 19.

3. **Reformasi Ekonomi**

Kebijakan pengendalian inflasi merupakan salah satu reformasi ekonomi yang diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada sepuluh komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3)

memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Kebijakan moneter bersinergi dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan UMKM dan korporasi. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga.

4. **Penguatan Sistem Kesehatan Nasional**

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat (Germas), kapasitas *health security* terutama *surveilans*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

5. **Reformasi Sistem Perlindungan Sosial**

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error,* terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi Covid-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui

peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

6. **Reformasi Sistem Ketahanan Bencana**

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana difokuskan pada lima klaster, yaitu (1) bencana geologi, tektonik, dan vulkanik, (2) bencana hidrometeorologi, (3) bencana lingkungan, (4) bencana non alam, serta (5) dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan.

Pada klaster bencana nonalam akan difokuskan pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, termasuk penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah di masa depan. Dukungan ini diperkuat melalui peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan.

Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi difokuskan pada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (pentahelix); (2) menyusun rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (Kalurahan/RW/RT); serta (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana

berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancarnan bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/ rumah sakit).

Dalam usaha penguatan sistem operasi tanggap darurat, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik, serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat diperkuat terhadap pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

Penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan dalam pemulihan pembangunan pascabencana nonalam akan berdampak secara baik dengan memprioritaskan sektor-sektor fundamental seperti kesehatan, sosial-ekonomi, dan pangan di wilayah yang

memiliki dampak paparan tinggi dan wilayah pembangunan strategis, yang didukung dengan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun kepercayaan publik. Secara umum, peningkatan kolaborasi lintas sektor harus diutamakan dalam pemulihan sosial ekonomi yang memperhatikan aspek penguatan sistem ketahanan bencana secara terintegrasi dan keberlanjutan agenda pembangunan

### 4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta

#### 4.2.3.1. Telaah RPJPD DIY

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005- 2025 memuat Visi: ***Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD DIY sebagai berikut:

Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025

| MISI | Tahapan | Prioritas |
|---|---|---|
| 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal. | a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, | Pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan. |
| | b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, | Penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing |
| | c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin,manajer , pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), | Pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan. |
| | d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, | Peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional. |
| | e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, | Pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi. |
| | f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, | Penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. |
| | g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional, | Upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global. |
| | h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan | Perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan. |

| MISI | Tahapan | Prioritas |
|---|---|---|
| | (*knowledge society*), | |
| | i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, | Penciptaan *research research* unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. |
| | j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, | Pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip "pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua". |
| | k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, | Perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar. |
| | l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, | Penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan. |
| | m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, | Pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan. |
| | n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, | Pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga. |
| 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. | a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada: | 1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya; |
| | | 2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya; |
| | | 3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, moderen, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat. |
| | b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang | 1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan; |
| | | 2) Mempertahankan dan mengembangkan "kantong-kantong" |

| MISI | Tahapan | Prioritas |
|---|---|---|
| | berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, | kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat; |
| | | 3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya; |
| | | 4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam event-event budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia. |
| 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. | a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman, | 1) Fasilitasi wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE); |
| | | 2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu; |
| | | 3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional; |
| | | 4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan; |
| | | 5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata. |
| | b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, | 1) Pengembangan produk Pariwisata; |
| | | 2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat |
| | | 3) Pengembangan usaha pariwisata |
| | | 4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri, dengan titik berat :<br>a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata;<br>b) Pengembangan informasi pasar wisatawan; |

| MISI | Tahapan | Prioritas |
|---|---|---|
| | industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata, | c) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi. |
| | | 5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, dengan titik berat :<br>a) Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan,<br>investasi dan kebudayaan;<br>b) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata. |
| | | 6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, dengan titikberat pada peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata; |
| | | 7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat :<br>a) Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata;<br>b) Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan. |
| 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. | a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial | 1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; |
| | | 2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial; |
| | | 3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat; |
| | | 4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat. |
| | b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan, | 1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan; |
| | | 2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga Kesehatan sanitasi lingkungan rumahtangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik; |
| | | 3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular. |
| | c. Menyediakan tenaga kerja yang | peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis |

| MISI | Tahapan | Prioritas |
|---|---|---|
| | memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, | kultural, standarisasi, kompentensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional. |
| | d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif, | pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur. |
| | e. Meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, | peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal. |
| | f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat, | Penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. |
| | g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya | 1) Pemantapan budaya berkerajinan (*craftsmanship*) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif. |

| MISI | Tahapan | Prioritas |
|---|---|---|
| | berkerajinan (*craftmanship*) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi, | 2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar |
| | h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, | Perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong. |
| | i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan, | Pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata. |
| | j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan prioritas: | 1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata;<br>2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian. |
| | k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis | 1) Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan; |

| MISI | Tahapan | Prioritas |
|---|---|---|
| | dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, | 2) Penanganan masalah pembangunan secara terpadu; |
| | | 3) Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat; |
| | | 4) Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas; |
| | | 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat :<br>a) Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang porfesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya;<br>b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima. |
| | | 8) Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat; |
| | | 9) Membudayanya manajeman penanggulangan dan pencegahan bencana. |

#### 4.2.3.2. Telaah RTRW DIY

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. RTRW DIY memuat rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan kawasan strategis.

**1. Rencana Struktur Ruang Wilayah**

a. Sistem Perkotaan

1) Sistem perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yaitu Yogyakarta berupa Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi sebagian Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Banguntapan;
2) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah Bantul;
3) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) terdiri atas ibu kota kapanewon dan satuan permukiman yang meliputi: ibu kota Kapanewon Piyungan, ibu kota Kapanewon Kretek, ibu kota Kapanewon Imogiri, ibu kota Kapanewon Sedayu.

b. sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana terdiri atas: sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

1) Sistem Jaringan Transportasi, Sistem jaringan transportasi darat melalui pengembangan sistem jaringan jalan; sistem lalu lintas dan angkutan jalan; dan sistem jaringan kereta api.
   a) Sistem jaringan jalan terdiri atas: jaringan jalan nasional; jaringan jalan provinsi; terminal penumpang; terminal barang; dan jembatan timbang.

(1) Jaringan jalan nasional terdiri atas:
   (a) Jalan arteri primer terdiri atas: peningkatan dan atau pengembangan jalan baru yang terdiri atas *Jogja Outer Ringroad* yang meliputi Sentolo-Imogiri; Imogiri-Piyungan; dan Piyungan-Prambanan.
   (b) Jalan kolektor primer terdiri atas Yogyakarta – Piyungan; Piyungan – batas Kabupaten Gunung Kidul; Yogyakarta – batas kota Bantul; Jalan Pemuda Bantul; Jalan Kolonel Sugiyono Bantul; Jalan Brigadir Jenderal Katamso Bantul; Jalan Panembahan Senopati Bantul; Bantul – Simpang Kweden; Simpang Kweden – Bakulan; Bakulan – Kretek; Kretek – Parangtritis.

(2) Jaringan jalan provinsi terdiri atas:
   (a) Jalan kolektor primer dua yaitu Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis), Palbapang – Simpang Kweden, Bakulan – Barongan, Imogiri – Dodogan, dan Piyungan – Terong.
   (b) Jalan kolektor primer tiga yaitu Barongan – Bibal, Sedayu – Pandak, Bantul – Srandakan.
   (c) Jalan strategis provinsi (1) Yogyakarta – Barongan, Palbapang – Samas, Dawung – Makam Imogiri, Sampakan – Singosaren, Patuk – Terong, Terong – Dlingo, Siluk – Kretek, Srandakan – Poncosari – Pandansimo, Poncosari – Kretek, Parangtritis – batas Bantul 2, Gedongkuning – Wonocatur, Prambanan – Piyungan; (2) Jalan Jalur Lintas Selatan yang meliputi Pandansimo – Samas – Parangtritis – Batas Bantul 1.

b) Sistem jaringan kereta api, jaringan jalur kereta api umum terdiri atas jalur kereta api Samas – Yogyakarta –

Borobudur dan jalur kereta api bandar udara baru Kapanewon Temon – Samas – Parangtritis.

2) Sistem Jaringan Energi.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan energi listrik tenaga hibrid dan pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY.

3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: sistem jaringan pengolahan air limbah; sistem jaringan persampahan; sistem jaringan drainase; dan jalur evakuasi bencana.

a) Sistem jaringan pengholahan air limbah terdiri atas: (1) pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di: Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul; dan Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul; (2) pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kapanewon Bambanglipuro.

b) Sistem jaringan persampahan terdiri atas (1) pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan; (2) pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R (*reduce,reuse, recycle)*, dan tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung sistem 3R (*reduce, reuse, recycle)*; (3) pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kapanewon Piyungan.

**2. Rencana Pola Ruang Wilayah**

a. Kawasan lindung

1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya terdiri atas:

a) Kawasan hutan lindung meliputi Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 1.041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) hektar;
b) Kawasan resapan air meliputi Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 2.018,24 (dua ribu delapan belas koma dua empat) hektar.

2) Kawasan Konservasi

Cagar Alam Imogiri di Kapanewon Imogiri dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar.

3) Kawasan Lindung Geologi

a) Kawasan cagar alam geologi

Gumuk Pasir Parangtritis di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, dengan luas 141,10 (seratus empat puluh satu koma satu nol) hektar, zona penunjang dengan luas 176,43 (seratus tujuh puluh enam koma empat tiga) hektar, dan zona peruntukan terbatas dengan luas 95,27 (sembilan puluh lima koma dua tujuh) hektar.

b) Kawasan perlindungan air tanah

Kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo di Kabupaten Bantul, dengan luas 9.250,43 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh koma empat tiga) hektar.

c) Kawasan sekitar mata air

Kawasan sekitar mata air meliputi Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu.

4) Kawasan Terbuka Hijau

   Terdapat di Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul.

5) Kawasan Rawan Bencana Alam

   a) Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek;
   b) Kawasan rawan tsunami di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
   c) Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
   d) Kawasan rawan banjir meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
   e) Kawasan rawan gempa bumi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
   f) Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo.

6) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya meliputi Kawasan cagar budaya Imogiri dan Kawasan cagar budaya Kerto – Pleret.

b. Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Rencana pola ruang Kawasan budi daya terdiri atas: Kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan hutan rakyat; Kawasan peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; Kawasan pertahanan dan keamanan; dan Kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, terdapat di Kapanewon Dlingo, dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;
2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, terdapat di Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon Srandakan dengan luas 3.131,18 (tiga ribu seratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektar;
3) Kawasan Peruntukan Pertanian, terdiri atas kawasan budi daya tanaman pangan; dan kawasan budi daya perkebunan.
    a) Kawasan budi daya tanaman pangan terdiri atas kawasan lahan pangan beririgasi; kawasan lahan pangan tidak beririgasi; dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
        (1) Kawasan lahan pangan beririgasi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis,

Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 12.666,53 (Dua belas ribu enam ratus enam puluh enam koma lima tiga) hektar;

(2) Kawasan lahan pangan tidak beririgasi di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 8.459,93 (Delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar.

(3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:

(a) Lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas 14.407,50 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima nol) hektar;

(b) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 4.667,51 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima satu) hektar.

b) Kawasan budi daya perkebunan terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon

Srandakan, dengan luas 3.139,99 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar.

4) Kawasan Peruntukan Perikanan. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap; dan kawasan perikanan budi daya.
   a) Kawasan perikanan tangkap terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai yang didukung dengan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Depok; Pangkalan Pendaratan Ikan Kuwaru; Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo; Pangkalan Pendaratan Ikan Samas; Pangkalan Pendaratan Ikan Patihan.
   b) Kawasan perikanan budi daya terdapat di kawasan minapolitan Kapanewon Pandak dan kawasan perikanan budidaya Kapanewon Sanden.
5) Kawasan Peruntukan Pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
   a) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Imogiri, dengan luas 186,09 (seratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar;
   b) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret,

Kecamatam Kasihan dan Kapanewon Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar;

c) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kecamatam Kasihan dan Kapanewon Dlingo dengan luas 247,42 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektar.

6) Kawasan Peruntukan Industri

a) Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri di Kapanewon Piyungan dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Sedayu dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;

b) Sentra industri kecil menengah terdapat di Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Sewon, Kapanewon Jetis, Kapanewon Sanden, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Piyungan.

7) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa

wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis.

8) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu dengan luas 19.479,58 (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima delapan) hektar.

a) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 356,87 (tiga ratus lima puluh enam koma delapan tujuh) hektar;

b) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri,

Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, dan Kapanewon Pajangan dengan luas 8.730,79 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi meliputi pengembangan kawasan riset di Kawasan Pantai Selatan dan pengembangan Kawasan pendidikan tinggi di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

**3. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah DIY**

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Kawasan Strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri dari: Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten; Di Bantul hanya ada Kawasan Strategis Kasultanan antara lain:

1) Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
2) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
3) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
4) Masjid Pathok Nagoro;
5) Pantai Samas – Parangtritis;
6) Kerto – Pleret;
7) Karst Gunungsewu.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

1) Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
2) Kawasan Temon – Prambanan, terdiri atas Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.

3) Kawasan Tempel – Parangtritis, terdiri atas Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
4) Kawasan Pantai Selatan DIY terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.
   1) Kawasan Bentang Alam Karst terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul.
   2) Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis terdapat di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, yakni Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

#### 4.2.3.3. Telaah Keistimewaan DIY

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul terkait erat dengan predikat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai

baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 'keistimewaannya" menyusuri lorong sejarah. Dengan demikian, secara yuridis Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang tersusun nanti harus memiliki kapasitas "mendukung" dan "menguatkan" keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dimana terdapat keterkaitan dengan Kraton dan Pakulaman yang dipercaya mempunyai makna simbolik, penuh dengan nilai-nilai filosofis yang mencerminkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan pemimpinnya, dan antara manusia dengan manusia lainnya perlu dipertahankan dan dilestarikan atas dasar filosofi tradisional di bawah ini:

**1) Hamemayu Hayuning Bawana**

Konsep Hamemayu Hayuning Bawana merupakan suatu konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Dikatakan universal karena konsep ini mampu melintasi versi-versi nilai dari ruang dan waktu sejak HB I sampai saat ini. Dikatakan komprehensif karena konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari spiritual, budaya, tata ruang, lingkungan sampai ekonomi. Dikatakan holistik, karena konsep ini mencakup tidak hanya sekedar dua dimensi kehidupan saja (ruang dan waktu), melainkan mencakup dimensi ketiga yang berupa nilai-nilai transendental.

**2) Sangkan Paraning Dumadi**

Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (Sangkan Paraning Dumadi). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula mulanira). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya

(jagad gedhé; makrokosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikrokosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni).

Sangkan Paraning Dumadi menjadi landasan tata ruang dalam konsep berpikir Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan HB-I) ketika wilayah kerajaannya. Konsep Sangkan Paraning Dumadi terungkap pada pola tata ruang berupa sumbu imajiner yang menjadi salah satu nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menonjol dalam bentuk fisik sebagai warisan budaya, yaitu berupa pola kota atau tata kota yang mengikuti sumbu imajiner Gunung Merapi – Laut Selatan.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bantul nantinya ada aspek melindungi, melestarikan, menguatkan, mempertahankan, meneguhkan, dan mengembangkan satuan-satuan keunikan ruang dan tata ruang berbasis budaya untuk turut serta dalam mengungkapkan nilai-nilai dan semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tata ruang di wilayah Kabupaten Bantul.

**3) Manunggaling Kawula lan Gusti**

Ditinjau dari aspek tata ruang wilayah, Daerah Istimewa Yogyakarta ditata secara istimewa oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan konsep yang tinggi dan sarat makna yang divisualisasikan dalam Warisan Budaya yang meliputi Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan (Samudra Indonesia). Warisan Budaya ini menggambarkan Sumbu Imajiner yang selaras dengan konsep Tri

Hita Karana dan Tri Angga (Parahyangan–Pawongan–Palemahan atau Hulu–Tengah–Hilir serta nilai Utama–Madya–Nistha). Konsep Tri Hita Karana, ada tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga, dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofi sumbu imajiner tersebut. Konsep kosmogoni yang Hinduistis ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I diubah menjadi Konsep Islam-Jawa Manunggaling Kawula Gusti (Jagad Gedhe dan Jagad Cilik).

**4) Sumbu Imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi (asas harmonisasi lingkungan)**

Kabupaten Bantul dilewati oleh sumbu imajiner yaitu Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan. Secara filosofi sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun min Allah), manusia dengan manusia (hablun min Annas), manusia dengan alam yang termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, dan air (tirta) dari laut Selatan, angin (maruta) dan angkasa (eiter).

**5) Catur Gatra Tunggal**

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan konsep dasar pembentukan Inti Kota. Catur Gatra Tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas: kraton, masjid, alun-alun, dan pasar adalah elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dalam perkembangannya konsep ini dimaknai dengan elemen identitas berupa tempat ibadah, kantor pemerintahan, alun-alun dan pasar.

Catur Gatra Tunggal sebagai konsep filosofis merupakan salah satu konsep inti yang mendasari keberadaan identitas Kabupaten Bantul. Artinya konsep yang bersifat makro-filosofis dan konsep mikro-filosofis merupakan konsepsi bagi tata ruang Kabupaten Bantul.

### 4.2.3.4. Telaah RPJMD DIY

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, yaitu **"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".**

Misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

***1)*** **Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan.
c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

***2)*** **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;**

a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).

Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "Silang Belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Etos, dalam konteks Trilogi SDM DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan- penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu

kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memilki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Isu strategis berdasarkan Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 yaitu:

**1. Tingginya Angka Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan DIY memang masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan pada RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dengan kondisi DIY capaian saat ini per September 2017 sebesar 12.36 %, ditarget dalam RAD SDGs/TPB DIY secara bertahap diupayakan diturunkan dengan target per tahun kurang lebih 1% pertahun sehingga diharapkan pada 5 (lima)tahun mendatang Tahun 2022 turun menjadi 7 %.

Jika dilihat perkembangan pengurangan kemiskinan terdapat perbedaan karakter antar kabupaten/kota. Berdasarakan kajian dari BPS, Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DIY. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang.

**2. Tingginya Ketimpangan Wilayah**

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Komposisi struktur ekonomi tiap Kabupaten/kota menarik untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Bantul penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Melihat perbedaan karakter tersebut kebutuhan investasi di Kabupaten/kota, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan Kabupaten/kota tereliminir.

Ketimpangan di DIY tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari masing-masing Kabupaten-kota. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

Jika dilihat ketimpangan di dalam masing-masing Kabupaten/kota, Bantul angka indeks gini tinggi. Jika dicermati, struktur ekonomi di kabupaten tersebut masih didominasi oleh Sektor Agraris. Situasi tersebut nampaknya selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet yang menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut.

### 3. Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Risiko Bencana Alam

Isu terkait lingkungan hidup mencakup antara lain pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), dampak pembangunan terhadap lingkungan serta ketersediaan sumber daya air.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tahun 2015 menunjukkan

bahwa nilai ISPU DIY sebesar 30,5 yang berada dalam kategori relatif sehat/baik.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2015 diketahui bahwa kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Dissolved Oxygen* (DO), kadar residu terlarut/*Total Dissolved Solid* (TDS), dan kandungan bahan kimia lain yang terkandung di air Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik, Sungai Bedog, Sungai Gadjahwong, Sungai Code, dan Sungai Winongo telah melampaui ambang batas Baku Mutu kualitas air. Nilai BOD di sembilan sungai tersebut hampir seluruhnya telah jauh melebihi ambang batas, baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir. Nilai COD sebagian besar sungai juga sudah melampaui ambang batas, namun nilai DO di semua bagian di sembilan sungai masih memenuhi standard baku mutu. Begitu pula untuk parameter TDS (zat padat terlarut), semua sampel air sungai masih berada di bawah baku mutu maksimum yang ditentukan.

Masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan air dan sebaliknya kebanjiran yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan produktivitas penduduk.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar Samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan air laut.

Permasalahan di DIY dalam penanggulangan bencana adalah:

1) Beban kondisi fisik DIY yang rawan bencana (terdapat 12 acaman

bencana di 301 kalurahan rawan bencana dari 438 kalurahan se-DIY).

2) Pengarusutamaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pembangunan masih perlu diterjemahkan secara lebih jelas dalam program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
3) Kapasitas kelembagaan yang kurang, yaitu masih rendahnya kapasitas dalam pengarusutamaan PRB dalam pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pemahaman strategi dan kebijakan pada pra, saat dan setelah bencana.
4) Suprastruktur/budaya penyelenggara pemerintahan dan masyarakat belum pro- Pengurangan Risiko Bencana, paradigma masih didominasi dengan tanggap darurat serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya data dan pemanfaatan data.
5) Jejaring potensi penanggulangan bencana belum optimal, koordinasi antara *stakeholder* belum padu di dalam penanggulangan bencana, peran swasta masih di tanggap darurat dan akademisi (kampus) masih lebih dominan dalam posisi sebagai menara gading dalam penanggulangan bencana.

**4. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, hingga akhir tahun 2016, diketahui kesesuaian pemanfaaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,74 %. Sementara itu, kesesuaian pemanfaaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan budidaya adalah sebesar 66,51 %. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Beberapa isu

strategis terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan tersebut pada umumnya adalah kawasan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi dikarenakan melonjaknya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal dengan belum ditetapkannya lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pada tahun 2014- 2015, lahan pertanian mengalami penurunan dari 76.26 % menjadi 76.04 %. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang kemanfaatannya (lahan-lahan produktif harus dilindungi fungsi dan pemanfaatannya melalui program PLP2B).

Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal dan apartemen berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun akan meningkatkan koefisien dasar bangunan (KDB) sehingga berpotensi mengakibatkan genangan dan banjir. Urbanisasi (proses perubahan suatu kawasan menjadi kota) juga turut mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di DIY. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2014-2015 terjadi kenaikan persentase lahan terbangun dari 23.75 % menjadi 23.96%.

**5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal**

Infrastruktur strategis merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah, yang dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah

kawasan pesisir selatan DIY. Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan selatan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah terutama pada penurunan penyimpangan PDRB di kawasan selatan terhadap PDRB di kawasan Utara (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), serta penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, bandara, jalur kereta api penghubung dan TOD. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.

Salah satu penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan yaitu Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektar.

Pembangunan infrastruktur strategis lain di kawasan pesisir selatan DIY adalah pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lingkar Selatan). Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah transportasi. Dengan adanya transportasi suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya transportasi ini memerlukan dukungan dari infrastruktur yang ada berupa jalan.

**6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi**

Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya. SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai peningkatan taraf pendidikan melalui revolusi karakter siswa melalui pendidikan karakter dan perluasan pendidikan berbasis ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan atau vokasi.

**7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda**

Sebagaimana tercantum dalam Visi RPJP 2005-2025, kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Upaya pembangunan kebudayaan semakin intens terutama seusai penetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Semakin kuatnya upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda maupun tak benda menghadapi ancaman kerusakan sejumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perkotaan dan faktor alamiah. Hingga tahun 2017 Cagar Budaya dan warisan budaya yang terdiri dari benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan cagar budaya berjumlah 2.239 buah, yang sudah mendapatkan SK sejumlah 1331, baru sejumlah 492 yang dilestarikan. Sementara itu, dalam aspek tak benda, sejumlah warisan budaya tak benda yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra telah mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda nasional sejumlah 40 buah dari 911 ragam budaya tak benda, sedangkan yang sudah masuk database Warisan Budaya tak benda di tingkat pusat berjumlah 246 buah. Organisasi seni dan budaya berjumlah 6293, yang dinilai telah maju karena managemen dan kiprahnya di tingkat nasional dan internasional berjumlah 93 organisasi.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya.

Upaya-upaya pelestarian budaya yang mencakup legalitas dan pelindungan fisik, penguatan, serta pemanfaatan akan terus ditingkatkan untuk mencapai Visi RPJPD mendatang.

**8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance)***

Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

**9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif**

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari yang mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing- masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap

peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

### 4.2.4. Telaah Isu Daerah

#### 4.2.4.1. Telaah RPJP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabuputen Bantul Tahun 2006- 2025.

Visi Kabupaten Bantul 2006-2025, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.**

Penekanan pada lima tahun keempat adalah pencapaian struktur perekonomian yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif lokal yang didukung SDM berkualitas, berdaya saing dengan penerapan IPTEK yang terus meningkat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025

| Misi | Tahap IV | Prioritas Tahap IV |
|---|---|---|
| Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. | • Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, peningkataan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan.<br>• Pemenuhan sekolah berkualitas melalui peningkatan fasilitas pendidikan.<br>• Pemenuhan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.<br>• Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan pekembangan ilmu dan teknologi.<br>• Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan; |
| | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan; | • Pemantapan mutu sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.<br>• Penerapan budaya hidup sehat dan bersih.<br>• Pemenuhan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.<br>• Pemenuhan status gizi masyarakat yang baik dan bermutu.<br>• Pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.<br>• Peningkaan manajemen kesehatan.<br>• Peningkatan pemakaian obat tradisional. |
| | Peningkatan perluasan kesempatan kerja, | • Penciptaan wirausaha baru.<br>• Pemantapan sistem rekruitmen tenaga kerja. |

| Misi | Tahap IV | Prioritas Tahap IV |
|---|---|---|
| | kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi; | • Peningkatan sarana dan cakupan permodalan<br>• Pemantapan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi dan kerjasama di tingkat internasional.<br>• Peningkatan tenaga trampil dan produktif.<br>• Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha.<br>• Terpenuhinya kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif. |
| | Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi pasar bebas dunia sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mncapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia. | • Kemandirian unit-unit usaha industri kecl da kerajinan rakyat.<br>• Terpenuhinya bahan baku secara mandiri.<br>• Perluasan jangkauan pemasaran<br>• Pemantapan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri.<br>• Pengembangan sistem industri, yang ramah lingkungan, dan kemantapan koperasi.<br>• Pembentukan kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai.<br>• Terpenuhinya produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengganggguran.<br>• Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya.<br>• Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif. |
| | Peningkatan jaringan infrasruktur yang | • Peningkatan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelyanan dasar di diseluruh |

| Misi | Tahap IV | Prioritas Tahap IV |
|---|---|---|
| | handal, guna meningkatkan aksebilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis | wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.<br>• Pemenuhan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksebilitas wilayah.<br>• Pemenuhan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air.<br>• Pemenuhan teknologi informasi ke seluruh wilayah.<br>• Terbangunnya JJLS. |
| | Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan; | • Penataan ruang bagi kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru.<br>• Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.<br>• Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang ada. |
| | Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang. | • Pemantapan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lngkungan dan penegakan hukum.<br>• Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lidung.<br>• Terpenuhinya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam;<br>• Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan di seluruh wilayah. |

| Misi | Tahap IV | Prioritas Tahap IV |
|---|---|---|
| | Pengurangan risiko bencana alam melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana. | • Penataan dan pembangunan permukiman berbasis bencana.<br>• Penguatan kelembagaan dan kemampuan seluruh masyarakat baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana.<br>• Penangana korban bencana alam yang cepat dan responsif.<br>• Pemenuhan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana. |
| | Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. | • Pemanyapan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam sustu suanan yang agamis dan dmokratis.<br>• Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan dareh, membina akhlak yan mulia dan memupuk etos kerja.<br>• Pemantapan kerukunan hidup beragama dengan meingkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.<br>• Pemantapan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehataan reproduksi serta kelangsunagn hidup ibu anak.<br>• Terpenuhinya sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial. |
| | Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda | • Terpenuhinya kualitas yang baik, sarana prasarana penunjang olahraga.<br>• Pemantapan budaya olah raga dalam kehidupan di masyarakat.<br>• Perluasan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemantapan kelembagaan kepemudaan yang berwawasan dan tetap berpegang teguh menjaga negara kesatuan RI.<br>• Peningkatan dan mempertahankan prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. |

| Misi | Tahap IV | Prioritas Tahap IV |
|---|---|---|
| | | |
| | Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, beraklaq mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yag dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beerbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis | • Pemantapan dan pembudayaan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis.<br>• Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.<br>• Terciptanya manusia-manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang mah Esa dan peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatnya rasa salin percaya, toleransi dan harmonis antar kelompok masyarakat. |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab | Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel | • Aparat pemerinah yang profesional dan lembaga pemerintah yang mantap denan berdasarkan tata kelola pememrintah yang peduli pada kepentingan rakyat.<br>• Pemantapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.<br>• Pemantapan sistem tata kelola inventarisasi aset daerah.<br>• Pemantapan manajemen keuangan daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha.<br>• Mewujudkan kepastian perlindungan, penegakkan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global.<br>• Kemantapan etika birokrasi, budaya kerja, penetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan. |
| | Peningkatan | 2. Pemantapan teknologi informasi |

| Misi | Tahap IV | Prioritas Tahap IV |
|---|---|---|
| | kualitas pelayanan kepada masyarakat | dalam pelayanan public<br>3. Pemantapan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar mutu pelayanan.<br>4. Pemenuhan srana dan prasarana publik yang berkualitas. |
| | Mewujudkan ketertiban masyarakat | • Pemantapan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat<br>• Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana<br>• Terciptanya kondosi yang aman, tertib, dan terkendali dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. |
| | Menjujung tinggi HAM yang berlandaskan kesadaran menjalankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. | Pemantapan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM. |

### 4.2.4.2. Telaah RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

**a. Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang**

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

1) Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

1) Menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
2) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
3) Menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
4) Mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
5) Mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah meliputi:

a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
b. Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
c. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
e. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan

f. Meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | Sistem perkotaan dan perdesaan | Pemantapan fungsi dan peranan Kota PKN dan PKW | Pemantapan fungsi pengembangan wilayah pada PKN, PKW dan PKL | Kapanewon Bantul, Banguntapan, Kasihan, Sewon, Sedayu, Piyungan, Imogiri, Kretek, Srandakan, Jetis, Pleret, Bambanglipuro, Dlingo, Pajangan, Pandak, Pundong dan Sanden | | |
| | | Pengembangan fungsi dan peranan Kota PKL, PPK dan PPL | Peningkatan fungsi pengembangan wilayah pada PKL, PPK dan PPL | | | |
| | | Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah | 1. Pemantapan sistem pelayanan lembaga keuangan, terutama bank dan koperasi/lemba ga perkreditan | Seluruh wilayah di Kab. Bantul | | |
| | | | 2. Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana Perkantoran | Seluruh wilayah di Kab. Bantul | | |
| | | | 3. Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA) | Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan | | |
| | | | 4. Pengembangan dan pemantapan fungsi fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, lab. klinik dan fasilitas pendukung) | | | |
| | | | 5. Pemantapan fungsi fasilitas perdagangan (pasar harian, mingguan, toko dan warung) | | | |
| | | | 6. Pemantapan fasilitas komunikasi (kantor pos dan fasilitas telekomunikasi lainnya) | | | |
| | | Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi | Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan | | |

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| | | Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa | Pengembangan Jaringan Pusat Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Bintek dan Pendampingan) | Seluruh wilayah Tingkat Desa/Kalurahan Kabupaten Bantul | | |
| | | Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan | Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian | Kapanewon Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro | | |
| | | | | Kapanewon Pundong, Jetis dan Pleret,Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro | | |
| | | | | Kapanewon Pajangan, Sanden, Pleret | | |
| 2 | Jaringan Sarana Prasara dan Utilitas Daerah | Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat | 1. Peningkatan jalan lokal-kolektor primer | Kapanewon Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Pajangan, Sanden, Pleret | | |
| | | | 2. Peningkatan jalan kolektor–arteri pada ruang Nglebeng- RSU Kodya | | | |
| | | | 3. Pembangunan jalan arteri . primer Ring Road | | | |
| | | | 4. Pembangunan jalan arteri . primer Pantai Selatan | Pantai Selatan | | |
| | | | 5. Pengembangan terminal Tipe B | | | |
| | | | 6. Peningkatan Keselamatan LL Jalan Lokal | Se Kabupaten Bantul | | |
| | | | 7. Pemasangan Prasarana APILL | Se Kabupaten Bantul | | |
| | | | 8. Pengembangan Terminal Barang | Piyungan | | |
| | | | 9. Pemasangan Prasarana Rambu Jl. Kolektor Sekunder | Se Kabupaten Bantul | | |
| | | Pengembangan jaringan energi | Peningkatan pelayanan jaringan listrik perkotaan dan pengembangan cakupan jaringan listrik perdesaan | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | Pembangunan Pembangkit Listrik | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | Pengembangan jaringan telekomunikasi | Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi satelit maupun terestrial | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | Pengembangan Informasi, komunikasi dan media massa | Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| | | | Pengembangan Jaringan pusat komunikasi dan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan dan pengembangan informasi pembangunan daerah | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | Kerjasama informasi dan media massa | Penyebarluasan dan pengembangan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | | Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | Pengembangan struktur jaringan irigasi | 1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Seluruh wilayah Kabupaten Bantul | | |
| | | | 2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, | Seluruh wilayah Kabupaten Bantul | | |
| | | Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan | 1. Peningkatan jaringan drainase perkotaan | Seluruh wilayah Kabupaten Bantul | | |
| | | | 2. Peningkatan jaringan air minum | Se-Kabupaten Bantul | | |
| | | | 3. Pengembangan sistem persampahan | Se- Kabupaten Bantul | | |
| | | | 4. Pengembangan sistem pengolahan limbah terpusat | Se- Kabupaten Bantul | | |
| | | | 5. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Permakaman | Seluruh wilayah Kabupaten Bantul | | |
| | | | 6. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | Pengembangan jaringan penerangan jalan dan lingkungan | 1. Penambahan jaringan penerangan jalan pada jalan arteri dan kolektor | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | | 2. Pengembangan jaringan penerangan lingkungan | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

**b. Telaah terhadap Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul juga mengikuti arahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali serta Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Tata Ruang DIY. Berdasarkan peraturan tersebut maka rencana pola ruang lindung Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| KAWASAN LINDUNG | | | | | | |
| 1 | Kawasan Perlindungan Kawasan di Bawahnya | Hutan Lindung | 1 Pengendalian kegiatan dalam hutan lindung | Kec. Dlingo, Imogiri dan Sanden (hutan bakau) | | |
| | | Kawasan Konservasi dan resapan air | 1. Pengendalian kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air, Sumur Resapan | Kec. Dlingo, Imogiri, Piyungan, Pleret, Pundong dan Kretek | | |
| | | | 2 . Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan konservasi | | | |
| 2 | Kawasan lindung setempat | Kawasan sempadan sungai | Konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | Kawasan sempadan pantai | Konservasi dan rehabilitasi sempadan pantai | Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek | | |
| | | Kawasan sekitar mata air | Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air | Kapanewon Kretek, Pundong, Dlingo, Piyungan, Sanden, Pandak dan Pajangan | | |
| | | Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan | 1 Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan | Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Sedayu, Piyungan dan Bantul. | | |
| | | | 2 Peningkatan kuantitas jumlah dan luasan RTH | | | |
| | | | 3 Peningkatan kualitas RTH melalui penataan dan penggalakan penanaman pohon pada RTH | | | |

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| KAWASAN LINDUNG | | | | | | |
| | | | 4 Penunjukan, penanaman dan pemeliharaan hutan kota | | | |
| 3 | Kawasan suaka alam | Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan | 1 Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya | Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pajangan, Pundong, Pleret, Sewon, Pandak | | |
| | | | 2 Pemeliharaan, perawatan dan dan perlindungan Cagar Budaya | | | |
| | | | 3 Kerjasama perlindungan Cagar Budaya di Kotagede | Kapanewon Banguntapan | | |

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| KAWASAN BUDIDAYA | | | | | | |
| 1 | Kawasan peruntukan pertanian | Pengembangan pertanian | Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| | | | Pengembangan Pertanian pangan | | | |
| | | Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi | Peningkatan ketahanan pangan | | | |
| | | | Pengembangan pertanian perkebunan | | | |
| | | | Pengembangan hutan rakyat | | | |

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| KAWASAN BUDIDAYA | | | | | | |
| | | | Pengembangan Kawasan Minapolitan | Kec. Pandak, Kec. Pundong, Kec. Sedayu, Kec. Piyungan, Kec. Banguntapan Kec. Sanden | | |
| | | | Pengembangan SDM Perikanan | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| 2 | Kawasan peruntukan industri | Penetapan peraturan pengendalian untuk kegiatan industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Daerah | Penyusunan perda tentang peraturan pengendalian industri kecil dan menengah | | | |
| | | Pengembangan dan peningkatan kawasan industri | Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri | Kec. Sedayu dan Piyungan | | |
| | | | Penyusunan peraturan pemberian insentif dan disinsentif kawasan industri | | | |
| | | | Konsolidasi pelaku industri pada kawasan industri | | | |
| | | | Promosi dan Penjaringan investor baru | | | |
| | | | 5 Pembangunan dan peningkatan kawasan industri | | | |
| | | Pengembangan industri kecil | 1 Penataan Struktur IKM | | | |

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| KAWASAN BUDIDAYA | | | | | | |
| | | dan menengah | 2 Pengembangan IKM | | | |
| | | | 3. Pengembangan koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang melayani KUKM yang ada di wilayah itu | Seluruh wilayah Kab. Bantul | | |
| 3 | Kawasan peruntukan pariwisata | Pengembangan destinasi pariwisata | 1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan | | | |
| | | | 2 Pengembangan tujuan wisata baru | | | |
| | | | 3 Dukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah | | | |
| | | | 4. Pelestarian dan Pengelolaan Benda dan Cagar Budaya | | | |
| | | Peningkatan pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi | 1. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata | Kec. Banguntpan, Bantul, Imogiri, Kretek, Sanden, Srandakan, Kasihan, Pajangan | | |
| | | | 2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana | | | |
| 4 | Kawasan peruntukan permukiman | Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman | 1. Penyusunan rencana pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan | Seluruh Wilayah Kab. Bantul di luar kawasan lindung | | |
| | | | 2. Pengembangan permukiman dengan pola Kasiba/Lisiba | | | |

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Indikasi Kegiatan | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| KAWASAN BUDIDAYA | | | | | | |
| | | | 3. Pengembangan permukiman khusus seperti perumahan nelayan, perumahan buruh industri dan perumahan | | | |
| | | | 4. Pengembangan dan pengendalian perumahan formal | | | |
| | | | 5. Pengembangan dan fasilitasi perumahan swadaya | | | |
| | | | - Jalan Lingkungan | | | |
| | | | - Drainase | | | |
| | | | 6. Pembangunan BKM sebagai permukiman strategis | Kec. Pajangan dan Kec. Kasihan | | |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

**c. Telaah terhadap Rencana Kawasan Strategis**

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, yaitu:

a. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten, terdiri dari:
   a) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
   b) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
   c) Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan;
   d) Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
   e) Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
   f) Kawasan Strategis Industri Piyungan.
b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan:
   a) Gabusan –Manding – Tembi (GMT) dan
   b) Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).
c. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten, yaitu:
   a) Kawasan Strategis Agrowisata di Kapanewon Dlingo dan Agropolitan di Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, KapanewonPundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan
   b) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis

| No. | Fungsi | Indikasi Program | Lokasi | Tahapan Pelaksanaan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Periode III | Periode IV |
| | | | | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |
| 1 | Kawasan Strategis Ekonomi | Pengembangan Kawasan KonvensiPameran (MICE) Skala Internasional di kawasan JEC | KapanewonBanguntapan | | |
| | | Pengembangan Perumahan dan Permukiman berbentuk kota satelit | Kapanewon Banguntapan, Sewon dan Kasihan | | |
| | | Pengembangan kawasan industri | Kapanewon Sedayu dan Piyungan | | |
| | | Pengembangan Bantul Kota Mandiri | Kapanewon Kasihan dan Pajangan | | |
| | | Pengembangan Wisata Bahari di sepanjang pantai selatan | Kapanewon Kretek, Sanden dan Srandakan | | |
| | | Pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut | Kapanewon Kretek, Sanden, Srandakan | | |
| 2 | Kawasan Strategis Sosio-Kultural | Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan Kerajinan pada Desa Wisata Gabusan – Manding – Tembi | Kapanewon Bantul, Sewon | | |
| | | Pengembangan Desa Wisata Cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi) | Kapanewon Kasihan, Pajangan | | |
| | | Pelesatarian Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan wisata di kawasan sekitarnya | Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan, | | |
| 3 | Kawasan Strategis Lingkungan Hidup | Pengembangan Agrowisata | Kapanewon Dlingo, Sanden | | |
| | | Konservasi gumuk pasir | Kapanewon. Kretek, Sanden dan Srandakan | | |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

### 4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak

menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) yang tidak/belum ada data.
2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam progam daerah untuk target dimaksud.
3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu upaya tembahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataanannya.
4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

**a. Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi**

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersedian air masih melebihi kebutuhan namun harus

diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m3/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m3/th atau 74,28%.

Sementara itu, untuk produk limbah yang dihasilkan yang tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumput Tinja (IPLT).

Atas dasar hal tersebut, permasalahan kualitas air minum dan sanitasi menjadi perhatian serius karena membawa dampak secara luas dan mengancam keberlanjutan kehidupan dan lingkungan.

**b. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana**

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkaan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi sekali, yaitu 187,02. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat, dengan jumlah korban akibat bencana mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kesiapsiagan dan upaya penyiapan dan pengurangan risiko yang terjadi. Upaya ini menjadi penting karena dampak bencana dimaksud sangat besar dan mengancam banyak orang.

**c. Penurunan kualitas lingkungan hidup**

Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 60,40 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70). IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan, namun capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

Selain kualitas lingkungan hidup, ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian salah satunya keberadaan ekosistem mangrove, ekosistem gumuk pasir. Keberadaan gumuk pasir ini mulai terganggu dengan semakin banyaknya aktifitas manusia di sekitar gumuk. Kondisi

saat ini hanya 9 % area gumuk dalam kondisi baik, 41% kondisi sedang, 50% kondisi buruk.

**d. Alih fungsi lahan**

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari perkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir mencapai 34 Ha/tahun, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

**e. Tingginya angka kemiskinan**

Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul.

**f. Ketimpangan Pendapatan**

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah.

Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

**g. Ketimpangan Wilayah**

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas lingkungan.

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Namun, tujuan tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon

Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.

KLHS RPJMD memberikan rekomendasi program agar penyusunan RPMJD sesuai dengan aspek pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi berupa program dalam Permendagri 90 tahun 2019.

Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD

| Isu Strategis KLHS | Rekomendasi Program |
|---|---|
| Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi | • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah<br>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>• Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)<br>• Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)<br>• Program Pengelolaan Persampahan |
| Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana | • Program Penanggulangan Bencana<br>• Program Penanggulangan Kebakaran<br>• Program Penanganan Bencana |
| Penurunan kualitas lingkungan hidup | • Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)<br>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) |
| Alih fungsi lahan | • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |

| Isu Strategis KLHS | Rekomendasi Program |
|---|---|
| | • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| Tingginya angka kemiskinan | • Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial<br>• Program Perlindungan Perempuan<br>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)<br>• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>• Program Peningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum<br>• Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia<br>• Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan<br>• Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga<br>• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| Ketimpangan Pendapatan | • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>• Program Penempatan Tenaga Kerja<br>• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral<br>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif<br>• Program Pemasaran Pariwisata<br>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan<br>• Program Pengembangan Ekspor<br>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)<br>• Program Pengembangan UMKM<br>• Program Promosi Penanaman Modal<br>• Program Hubungan Industrial<br>• Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kerjasama Daerah)<br>• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri<br>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota<br>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| Ketimpangan Wilayah | • Program Pengelolaan Pendidikan |

| Isu Strategis KLHS | Rekomendasi Program |
|---|---|
| | • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>• Program Perlindungan Dan Jaminan<br>• Program Pelatihan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja<br>• Program Aplikasi Informatika<br>• Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kerjasama Daerah)<br>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)<br>• Program Pengembangan UMKM<br>• Program Penempatan Tenaga Kerja |

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020.

### 4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Bantul.

Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain

| No | Periode RPJMD/ Visi | Misi | Sasaran | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOGYAKARTA 2017-2022<br><br>“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan | Meningkatkan Kesejahtaraan dan Keberdayaan Masyarakat | Ketahanan pangan masyarakat meningkat | Keberhasilan kebijakan sektor pertanian Kabupaten Bantul dapat menyebabkan surpus pangan dan mempengaruhi ketahanan pangan daerah sekitar Bantul, termasuk Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta bisa dikatakan tidak memiliki lahan pertanian. Pasokan pangan berasal dari luar Kota Yogyakarta.<br><br>Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan ditempuh. Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kota Yogyakarta terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di hulunya, sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul. |
| | | Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta | Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun | Upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bantul antara lain dengan strategi perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran melalui modernisasi pasar rakyat. Produk lokal yang dihasilkan UMK diharapkan mampu bersaing bahkan dapat memasuki pasar Yogyakarta, sedangkan modernisasi pasar rakyat diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern yang berkembang pesat di Kota Yogyakarta. |

| No | Periode RPJMD/ Visi | Misi | Sasaran | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Disamping itu, pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat melalui peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata. Kerjasama pariwisata dengan Kota Yogyakarta diharapkan agar ada sinergi pada pakert-paket kunjungan wisata lintas wilayah. |
| | | | Investasi di Kota Yogyakarta meningkat | Meningkatnya investasi di Kota Yogyakarta mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul. Banyak tenaga kerja dari Kab. Bantul yang bekerja di Kota Yogyakarta. |
| | | Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta | Gangguan ketentraman dan ketertiban masyakarat menurun | Gangguan trantibbum di Kota Yogyakarta dapat berpengaruh pada daerah perbatasan, dan sebaliknya. Kejadian “klithih” sering terjadi di daerah perbatasan. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum . |
| | | Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya | Kualitas pendidikan meningkat | Peningkatan kualitas pendidikan melalui strategi peningkatan daya saing pendidikan, agar mampu bersaing dengan kualitas pendidikan Kota Yogyakarta. Diharapkan masyarakat Bantul lebih memilih bersekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. |
| | | | Harapan hidup masyarakat meningkat | Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga. Warga Kabupaten Bantul yang bertempat tinggal di perbatasan memeriksakan kesehatan pada fasilitas |

| No | Periode RPJMD/ Visi | Misi | Sasaran | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kesehatan di Kota Yogyakarta. |
| | | | Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat | Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa. |
| | | Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan | Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat | Perlu upaya yang kuat untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kota Yogyakarta memiliki lahan yang sangat terbatas. Sehingga banyak pekerja Kota Yogyakarta memilih tempat tinggal di luar Kota Yogyakarta.<br><br>Hal ini mengkhawatirkan keberadaan lahan pertanian terutama di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta.<br><br>Diperlukan upaya yang kuat dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul, agar tidak beralih ke fungsi yang lain. |
| | | | Kualitas lingkungan hidup Meningkat | Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan.<br>Air dari Kota Yogyakarta mengalir menuju hilir yaitu wilayah Kabupaten Bantul. Apabila kondisi air sungai buruk mempengaruhi kondisi air di Kabupaten Bantul.<br><br>Disamping itu, sampah dari Kota Yogyakarta dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang yang juga berada di |

| No | Periode RPJMD/ Visi | Misi | Sasaran | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kabupaten Bantul.<br><br>Diperlukan kesadaran warga Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bjiak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul |
| | | Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman | Infrastruktur wilayah meningkat | Pembangunan infrastruktur terutama di wilayah perbatasan diperlukan koordinasi lintas kabupaten/kota agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut.<br>Kerjasama penanganan jalan, transportasi, penyediaan air bersih dan drainase difasilitasi oleh Sekretariat Bersama Kartamantul. |
| | | | | |
| 2 | KULON PROGO 2017-2022 "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa." | Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan | Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda | Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kulon Progo dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa. |
| | | Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas | Meningkatnya Pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah | Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo secara langsung maupun tidak langsung bagi Kabupaten Bantul. Pembangunan JJLS merupakan jalur alternative dari dan ke Bandara, wilayah Pantai Selatan Kabupaten Bantul semakin terbuka. |
| | | | | |

| No | Periode RPJMD/ Visi | Misi | Sasaran | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SLEMAN 2020-2026 Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong | Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas | Terkelolanya lingkungan hidup dalam rangka Pembangunan yang berkelanjutan | Di DIY, Sleman merupakan daerah hulu, yang banyak memiliki sumber mata air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Bantul merupakan daerah hilir, dimana air yang diterima dalam kualitas dan kuantitasnya sudah menurun. Hal ini menyebabkan kondisi sungai di wilayah Bantul memiliki kualitas yang tidak baik.<br><br>Disamping itu, sampah dari Sleman dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang yang juga berada di Kabupaten Bantul.<br><br>Diperlukan kesadaran warga Sleman dalam menjaga tutupan lahan di daerah hulu agar smber mata air tetap terjaga. Disamping itu dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bjiak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul. |
| | | Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. | Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat | Prasarana olahraga di Kabupaten Sleman relative lebih banyak. Masyarakat Bantul di daerah perbatasan untuk meningkatkan prestasi keolahragaan memilih mengikuti club olah raga Sleman. |
| | | Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. | Meningkatnya produktivitas pertanian | Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kabupaten Sleman sebagai daerah hulu terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi |

| No | Periode RPJMD/ Visi | Misi | Sasaran | Keterkaitan |
|---|---|---|---|---|
| | | | | oleh kondisi di hulunya, sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul. |
| | | Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong. | Meningkatnya pelestarian warisan budaya | Adanya kesamaan budaya antara masyarakat sleman dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa. |
| | | | | |
| 4 | GUNUNGKIDUL 2020-2026 Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026 | Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat | Gunung Kidul memiliki Pelabuhan Perikanan Sadeng. Aktivitas perikanan di Pelabuhan ini berjalan cukup baik mengingat lokasinya berada di teluk. Kapal-kapal nelayan Bantul mendarat di pelabuhan ini, mengingat Bantul tidak memiliki pelabuhan perikanan. Hanya perahu saja yang dapat mendarat di pantai Bantul.<br><br>Disamping memiliki Pelabuhan Perikanan, Gunung Kidul juga memiliki wisata alam pantai yang indah dengan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Agar dapat bersaing dengan pantai Gunung Kidul, Bantul harus segera meningkatkan pengelolaan pantainya. |

### 4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Bantul

Berdasarkan telaah permasalahan pembangunan daerah, dokumen perencanaan kabupaten/ kota sekitar dan isu-isu strategis internasional, nasional dan provinsi DIY, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Bantul sebagai berikut:

**1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pertumbuhan jasmani, kemampuan intelektual dan mental spiritual. Masing-masing unsur diuraikan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan jasmani**

  Pertumbuhan jasmani dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan sampai masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Keselamatan ibu melahirkan dan bayinya perlu mendapat perhatian. Di Kabupaten Bantul masih terjadi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting.

  Kematian ibu masih terjadi. Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

  Kematian bayi masih terjadi. Angka Kematian Bayi mencapai 6,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020.

  Balita dengan kasus gizi buruk sebanyak 57 kasus pada tahun 2020. Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan. Perhatian pada ibu, bayi dan balita perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas melalui optimalisasi peran POSYANDU.

Disamping upaya kesehatan, anak membutuhkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terutama dari tindak kekerasan. Dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Kabupaten Bantul berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), namun saat ini pada kategari madya, 11 Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana), dan 13 Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana) dan terdapat 11 Forum anak tingkat kecamatan/kapanewon.

- **Kemampuan intelektual**

Kemampuan intelektual seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul belum merata dilihat dari kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik.

Kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh pencapaian akreditasi yang dikeluarkan oleh BANSN, dengan hasil SD: 84,06%, MI: 72,72%, SMP: 68,82% dan MTS: 72,00%.

Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari banyaknya guru bersertifikat. Guru bersertifikat pada jenjang PAUD: 58%, SD: 50,71%, MI: 43,7%, SMP: 64,42% dan MTS: 50,07%.

Perlunya optimalisasi pelaksanaan PAUD untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Kualitas SDM yang baik menentukan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan. Pada Tahun 2020 proporsi usia kerja sebesar 69,35%, sedangkan proporsi bukan usia kerja 30,65%

sehingga rasio ketergantungannya 44,20. Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Pemanfaatan peluang ini dapat dimanfaatkan dengan prasyarat iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Namun kondisi saat ini kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Tahun 2020 pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

- **Kemampuan mental spiritual**

Kemampuan mental spiritual adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemampuan mental spiritual dapat dilihat dari:

- Ketaatan dalam menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.
- Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kenakalan remaja berupa kasus “Klithih” yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

**2) Masih Tingginya Ketimpangan**

Ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.

- **Ketimpangan pendapatan**

  Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indeks gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik. Pada tahun 2020 angka indeks Gini membaik pada 0,418. Nilai ini masuk dalam kategori ketimpangan "moderat" (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan "tinggi" (di atas 0,5).

  Ketimpangan pendapatan pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Pengurangan angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki 13,5% jumlah penduduk miskin, meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,92%. Hal ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul.

  Upaya peningkatan pelayanan bagi warga miskin perlu dilakukan dengan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. Di tingkat desa, perlu pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Pukesos). Integrasi SLRT dengan Puskesos bisa menjadi sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu upaya untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan adalah pengembangan industri kreatif. Komoditas industri kreatif yang diproduksi antara lain *furniture,* gerabah, batik, tatah sungging, produk kulit, batik kayu, perak, anyaman, keris dan fashion. Produk-produk tersebut rata-rata dibuat oleh *home industry.* Kualitas industry kreatif Kabupaten Bantul belum optimal. Cakupan Industri kreatif baru mencapai 46,20 % pada 2020 meningkat dari 39,5% di tahun 2016.

Industri kreatif mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata. Industri kreatif dan sektor pariwisata telah membentuk hubungan simbiosis mutualisme.

Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun menjadi 2.348.313 wisatawan dari 5.166.615 wisatawan pada tahun 2019, akibad pandemic covid-19. Perlu upaya untuk memulihkan kunjungan wisatawan pada saat pandemic berakhir dengan menjadikan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif.

Untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif, selain sektor industri dan sektor pariwisata di atas, sektor pertanian perlu dioptimalkan terutama dalam penyediaan bahan baku kuliner.

- **Ketimpangan wilayah**

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpotret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru,

meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian.

Kabupaten Bantul dibagi menjadi 4 bagian wilayah perkotaan, yaitu (1) Wilayah Kapanewon Bantul, Kasihan, Sewon dan Banguntapan sudah tergabung dalam sebuah Aglomerasi Perkotaan yang sangat terikat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (2) Wilayah Pantai Selatan yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata dan keistimewaan di Samas dan Parangtritis, terhubung dengan JJLS, (3) wilayah Bantul Barat dan (4) wilayah Bantul Timur.

Penyediaan infrastruktur jalan untuk mendukung 4 bagian wilayah perkotaan di atas perlu mendapat perhatian terutama pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang.

Pada penyediaan infrastrukur pelayanan publik saat ini belum sepenuhnya ramah difabel, baru sedikit kantor pelayanan public sudah ramah difabel.

Dalam upaya terwujudnya pemukiman yang bersih dan sehat pengembangan sarana prasarana sanitasi perlu menjadi perhatian. Saat ini produk limbah domestik yang dihasilkan dan tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersedian air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Tahun 2021 terdapat 6.381 rumah masuk kategori RTLH. Dari jumlah tersebut 3.792 sudah tertangani, tersisa 2.589. Pembangunan RTLH harus berlanjut agar semua rumah layak huni.

**3) Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup**

- **Degradasi lingkungan,**

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 yaitu cukup baik (60<IKLH≤70), IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis

seluas 477,75 ha. Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%.

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari perkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir cukup tinggi, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m3/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m3/th atau 74,28%. Perlu peningkatan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan desa. Harapannya sampah selesai di tingkat desa.

- **Bencana**

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkaan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi

sekali, yaitu 187,2. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat. Target manageman bencana dalam hal ini *Respon Time* 15 menit telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

**4) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 76,43 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interprestasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, pada komponen Reform diperoleh nilai kecil. Upaya untuk meningkatkan nilai komponen Reform perlu dilakukan deregulasi kebijakan yang merupakan salah satu unsur dalam komponen Reform terutama pada penyederhanaan peraturan perundangan, mengeliminasi peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Hal ini sejalan dengan penerapan UUCK yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

# BAB V
# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

## 5.1. Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

**"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

⇩

Visi Pembangunan DIY 2017-2022:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

⇩

Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul

## 5.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

   Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

   Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul

| No. | Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024 | Misi Pembangunan DIY 2017- 2022 | Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia | Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban | Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa |
| 2 | Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing | Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban | Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif |
| 3 | Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan | Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban | Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif |
| 4 | Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban | Misi 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana |
| 5 | Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa | Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban | Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa |
| 6 | Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya | Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis | Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima |
| 7 | Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga | Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis | Misi 5 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan |

| No. | Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024 | Misi Pembangunan DIY 2017- 2022 | Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026 |
|---|---|---|---|
| | | | Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia Dan Difabel |
| 8 | Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya | Misi 2<br>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis | Misi 1<br>Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima |
| 9 | Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan | Misi 2<br>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis | Misi 1<br>Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima |

Keselarasan misi RPJP Kabupaten Bantul dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

| Misi RPJPD Bantul untuk RPJMD Ke-4 (2020-2025) | Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 |
|---|---|
| Misi 2<br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik dan Bertanggung Jawab | Misi 1<br>Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima |
| Misi 1<br>Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | Misi 2<br>Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa |
| Misi 1<br>Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | Misi 3<br>Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif |
| Misi 1<br>Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan | Misi 4<br>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana |

| Misi RPJPD Bantul untuk RPJMD Ke-4 (2020-2025) | Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 |
|---|---|
| dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | |
| Misi 1<br>Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | Misi 5<br>Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel |

## 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026.

Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026

**VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika**

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN | | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 76,43 (BB) | 78,00 (BB) | 80,00 (BB) | 82,00 (BB) | 82,5 (BB) | 83,25 (BB) | 83,75 (BB) | 83,75 (BB) |
| | | | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | Angka | 3,4463 | 4,0815 | 4,1315 | 4,1815 | 4,2315 | 4,2815 | 4,3315 | 4,3315 |
| | | | | Opini Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK | Nilai | 80,67 | 82 | 82,5 | 83,5 | 83,75 | 84 | 84,5 | 84,5 |
| | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,24 | 3,24 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,45 |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 88,03 | 88,03 | 88,1 | 88,4 | 88,8 | 89,1 | 89,5 | 89,5 |
| 2 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa | Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 80,01 | 80,02 | 80,63 | 81,09 | 81,54 | 81,99 | 82,44 | 82,44 |

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Usia Harapan Hidup | Tahun | 73,86 | 73,9 | 74,01 | 74,11 | 74,2 | 74,29 | 74,39 | 74,39 |
| | | | Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,17 | 15,19 | 15,22 | 15,25 | 15,26 | 15,3 | 15,32 | 15,32 |
| | | | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya | Desa /Kalurahan Pamor Budaya | Kalurahan | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| | | Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya | | Indeks Rasa Aman | Indeks | n/a | n/a | 2,7 | 2,73 | 2,76 | 2,79 | 2,81 | 2,81 |
| | | | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis | Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif | Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | -1,66 | 3,12 | 3,8 | 3,97 | 4,48 | 4,83 | 5,12 | 5,12 |
| | | | Terwujudnya pemerataan pendapatan | Rasio Gini | Angka | 0,381 | 0,370 | 0,360 | 0,350 | 0,325 | 0,320 | 0,310 | 0,310 |
| | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,06 | 4,06 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| | | | | Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif | Persen | n/a | n/a | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4 | Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana | Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan | | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Indeks | n/a | n/a | 73,71 | 75,05 | 76,40 | 77,47 | 79,08 | 79,08 |
| | | | Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | Indeks kualitas infrastruktur | Indeks | n/a | n/a | 75,13 | 76,90 | 78,68 | 80,46 | 82,24 | 82,24 |
| | | | | Kesesuaian pemanfataan ruang | Persen | 75,01 | 80,00 | 75,03 | 75,05 | 75,07 | 75,10 | 75,20 | 75,20 |
| | | | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 63,02 | 63,02 | 62,75 | 63,59 | 64,42 | 65,24 | 66,07 | 66,07 |
| | | | Terwujudnya penurunan risiko bencana | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 187,20 | 181,26 | 175,51 | 169,94 | 164,55 | 159,33 | 154,27 | 154,27 |
| 5 | Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel | Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat | | Tingkat Kemiskinan | Persen | 13,50 | 13,50 | 13,77 | 12,90 | 12,50 | 12,05 | 11,50 | 11,50 |
| | | | Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)) | Orang | 72.101 | 72.101 | 72.296 | 71.667 | 71.380 | 71.059 | 70.688 | 70.668 |
| | | Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 95,12 | 95,18 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,75 | 96,90 | 96,90 |
| | | | Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 64,78 | n/a | 69,36 | 71,01 | 72,66 | 74,31 | 75,96 | 75,96 |
| | | | | Kategori Kabupaten Layak Anak | Kategori | Madya | Madya | Nindya | Utama | Utama | KLA | KLA | KLA |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

# BAB VI
# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

## 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bantul mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Dalam kerangka tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, sementara arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang ada, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut.

### 6.1.1. Analisis SWOT

#### a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

**Kekuatan**

1. Banyaknya destinasi wisata.
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Banyaknya UKM dan industri kreatif.
4. Kinerja aparatur yang meningkat.
5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi.
6. Banyaknya kelompok seni budaya.
7. Kuatnya tradisi/adat istiadat.
8. Keanekaragaman kuliner.
9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi.
10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah.
11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha.
12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat.

**Kelemahan**

1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat.
2. Pengangguran cukup tinggi.
3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif.
4. Sarana dan Prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.

5. Kualitas Pendidikan belum merata.
6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah.
7. Penanganan masalah Kesehatan belum optimal.
8. Ketimpangan infrastruktur wilayah.
9. Pemenuhan layanan dasar belum merata
10. Perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah.
11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik.
12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN cukup tinggi yaitu sebesar 12,05%.
13. Jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosis Cukup tinggi
14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah.
15. Nilai-nilai budaya luhur daerah mulai hilang.
16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat.
17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadahi.
18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik.
19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk baru tertangani sebanyak 74,28%.
20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local.
22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola.
23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang).
24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020).

**b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

**Peluang**

1. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY
2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri.
4. Kemajuan teknologi informasi.
5. Keberadaan Bandara YIA.
6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR.
7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.
8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta.

**Ancaman**

1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan.
4. Penurunan kualitas lingkungan hidup.
5. Wilayah rawan bencana.
6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial.
7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda.
8. Tingginya laju urbanisasi.
9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY.

Adapun analisa SWOT dari kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut adalah:

Tabel 6 1 Analisis SWOT

| FAKTOR-FAKTOR INTERNAL / FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL | KEKUATAN (STRENGTHS) | KELEMAHAN (WEAKNESSES) |
|---|---|---|
| | 1. Banyaknya destinasi wisata.<br>2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<br>3. Banyaknya UKM dan industri kreatif<br>4. Kinerja aparatur yang meningkat.<br>5. Ketersediaan Jaringan telekomunikasi<br>6. Banyaknya kelompok seni budaya<br>7. kuatnya tradisi/adat istiadat<br>8. Keanekaragaman kuliner<br>9. Potensi berbagai jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi<br>10. Adanya Perda tentang Rencana Tata ruang Daerah<br>11. Tersedianya berbagai produk hukum yang mendukung iklim usaha<br>12. Terbentuknya banyak Kalurahan Tanggap Bencana serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)<br>13. Potensi lahan pertanian untuk penyediaan pangan masyarakat | 1. Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat<br>2. Pengangguran cukup tinggi<br>3. Produk dan SDM Bantul belum kompetitif.<br>4. Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.<br>5. Kualitas Pendidikan belum merata<br>6. Masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah<br>7. Penanganan masalah kesehatan belum optimal<br>8. Ketimpangan infrastruktur wilayah<br>9. Belum meratanya pemenuhan layanan dasar<br>10. perlindungan terhadap kelompok rentan masih rendah<br>11. Capaian Indikator Lingkungan Hidup belum baik<br>12. Jumlah penduduk yang belum terdaftar JKN masih cukup tinggi yaitu sebesar 12,05%<br>13. Masih cukup tingginya jumlah penderita beberapa penyakit menular seperti TBC, HIV, pneumonia balita, diare, DBD, leptospirosos<br>14. Aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan rendah<br>15. Nilai-nilai luhur budaya daerah mulai hilang<br>16. Menurunnya jiwa nasionalisme di masyarakat<br>17. Sebagian kondisi sarana prasarana umum belum memadahi<br>18. Konservasi lahan belum dilaksanakan dengan baik<br>19. Timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul baru tertangani sebanyak 74,28%,<br>20. Kurangnya fasilitasi dan sarana prasarana pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda |

| | | |
|---|---|---|
| | | 21. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local<br>22. Proporsi pasar dengan type A masih rendah. Hanya terdapat 4 pasar tipe A dari 33 pasar yang dikelola.<br>23. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi (rata-rata lebih dari 4/hari dengan jumlah korban lebih dari 6 orang)<br>24. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi (0.57% tahun 2020) |
| **PELUANG (OPPORTUNITIES)** | **Asumsi Strategi SO** | **Asumsi Strategi WO** |
| 1. Kebijakan pengembangan Kawasan selatan DIY<br>2. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional<br>3. Pengembangan Kawasan peruntukan industri<br>4. Kemajuan Teknologi Informasi<br>5. Keberadaan Bandara YIA<br>6. Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR<br>7. Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat<br>8. Tingginya kebutuhan pangan di Kota Yogyakarta | 1. S4,5 – O4: Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan<br>2. S4,5-O4: Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum<br>3. S4,5-O4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan<br>4. S4,5-O4: Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur<br>5. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah<br>6. S2,4,5-O4: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah<br>7. S4,5-O4: Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah<br>8. S4,5-O4: Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan<br>9. S4,5-O4: Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan<br>10. S1,2,5,6,8 –O1,2,4,6,7: Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat<br>11. S3,5,10,11- O3,4,5: Meningkatkan pertumbuhan industri<br>12. S9,13-O4,7: Meningkatkan pola konsumsi pangan | 1. W5,6,9– O4,6,7: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan<br>2. W14-O4,6,7: Meningkatkan kualitas UMKM<br>3. W8,17,24 - O1,2,3,5:Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur<br>4. W11,18 – O1,2,3: Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup<br>5. W4,10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif<br>6. W10 – O4,6: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak<br>7. W10-O4,6: Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak<br>8. W20-O4,6,7: Meningkatkan prestasi olahraga<br>9. W20-O4,6,7: Meningkatkan kualitas pemuda<br>10. W2,3-O3,5:Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif<br>11. W2,25-O4,6: Meningkatkan Ketahanan dan kesejahtreraan Keluarga |

| | | |
|---|---|---|
| | 13. S13-O4,5,8 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian<br>14. S9-O1,5,8: Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan<br>15. S11-O1,2,3,4:Mempermudah investasi dalam berbagai bidang.<br>16. S2,5-O4,6,7: Pengembangan Potensi Desa<br>17. S3,5,8,11-O2,4,6,7: Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif | |
| **ANCAMAN (THREATS)** | **Asumsi Strategi ST** | **Asumsi Strategi WT** |
| 1. Persaingan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan produk daerah, termasuk destinasi wisata.<br>2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian.<br>3. Adanya pasar bebas menyebabkan produk lokal tersisihkan<br>4. Penurunan kualitas lingkungan hidup<br>5. Wilayah rawan bencana<br>6. Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan masalah kesehatan dan sosial<br>7. Pengaruh budaya asing yang semakin besar pada generasi muda<br>8. Tingginya laju urbanisasi<br>9. Kondisi Bantul yang merupakan daerah hilir di DIY | 1. S5,7,12-T5,6: Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana<br>2. S2-T7: Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat<br>3. S3,11-T1Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi<br>4. S10-T2,8: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | 1. W1,23– T3,6: Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran<br>2. W19-T4,9: Meningkatkan kualitas Pengelolaan persampahan<br>3. W16-T7,8: Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama<br>4. W15,21 - T7,8: Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah<br>5. W7,12,13-T6:Menguatkan sistem Kesehatan<br>6. W7,12,13-T6:Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat<br>7. W11-T6: Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat |

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati Terpilih.

Program Unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan menghadirkan pelayanan publik prima, meliputi:
   a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
   b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan;
   c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkna layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, meliputi:
   a. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa melalui peningkatan peran orang tua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah;
   b. Pengembangan kapasitas pendidikan dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal;
   c. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat;
   e. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit dan Puskesmas se-kabupaten Bantul;
   f. Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga;

g. Optimalisasi peran Posyandu dan Posdaya untuk layanan kesehatan pada fungsi promotif dan preventif;
h. Pembangunan sarana prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet;
i. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan;
j. Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi;
k. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa;
l. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah;
m. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;
n. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif, meliputi:
   a. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air
   b. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas
   c. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hortikultura
   d. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif
   e. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
   f. Modernisasi pasar rakyat
   g. Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas

h. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana, meliputi:
   a. Pemulihan fungsi sungai dan pencegahan erosi
   b. Perbaikan sistem drainase dan pengolahan limbah industri dan permukiman
   c. Pengolahan sampah dan limbah organik dan non-organik menjadi sumberdaya ekonomi dan energi terbarukan
   d. Konservasi satwa dan tumbuhan endemik untuk pemulihan keseimbangan ekosistem
   e. Pembangunan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi pedesaan
   f. Peningkatan ketersediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi yang merata
   g. Peningkatan sistem penanggulangan bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumberdaya manusia.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel, meliputi:
   a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
   b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan sosial
   c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan
   d. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan
   e. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel.

Penentuan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten Bantul selain mempertimbangkan program unggulan bupati terpilih,

juga memperhatikan kebijakan daerah yang berfokus pada upaya-upaya peningkatan dan penguatan sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah.

### 6.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika**

**Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | √√ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengaturan tata laksana perangkat daerah | √√ | √√ | √√ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | √√ | √√ | √√ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum | Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan | √√ | √√ | √√ | √ | √ |
| | | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangiunan daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kualitas | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah | | | | | |
| | | Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur | Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah | Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan inovasi pembangunan daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah | Peningkatan tata kelola keuangan daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik | √ | √ | √√ | √ | √ |
| | | | Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi | √ | √ | √√ | √ | √ |
| | | | Peningkatan pengamanan informasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan | Peningkatan tata kelola kearsipan | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kearsipan | | | | | | |
| | | Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyrakat | Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan | √ | √ | √ | √ | √ |
| **Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa** | | | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Menguatkan sistem kesehatan | Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat | Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat | Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan | Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | | Meningkatkan prestasi olahraga | Fasilitasi minat dan bakat generasi muda | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | | | Pembangunan sarana prasarana olah raga | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | | Meningkatkan kualitas pemuda | Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | | | Peningkatan kapasitas kepemudaan | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah | Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | | | Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | | | Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan | √ | √ | √ | √ | √√ |
| | | | Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis | Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban | Peningkatan penegakan perda | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan peran serta | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | masyarakat | masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban | | | | | |
| | | Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama | Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ |
| **Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif** | | | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas | Terwujudnya pemerataan pendapatan | Meningkatkan pola konsumsi pangan | Peningkatan ketersediaan pangan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian | Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan | Peningkatan produksi perikanan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkaan nilai tambah perikanan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan pengawasan dan pengendalaian | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat | Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Promosi dan | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kerjasama pariwisata | | | | | |
| | | | Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata | √√ | √ | √ | √ | √ |
| | | Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran | Modernisasi pasar rakyat/ tradisional | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi | Peningkatan Kualitas perkoperasian | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Mempermudah investasi dalam berbagai bidang. | Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif | Peningkatan kompetensi tenaga kerja | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan kerjasama dengan perusahaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Pengembangan Potensi Desa | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan kalurahan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh kalurahan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif | Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatkan kualitas UMKM | Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan pertumbuhan industri | Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan Kawasan Peruntukan industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| **Misi 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana** | | | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan | Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan | √ | √√ | √√ | √ | √ |
| | | | Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Terwujudnya lingkungan hidup yang | Meningkatkan pengendalian pencemaran dan | Penanganan pencemaran lingkungan hidup | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemulihan fungsi lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | berkualitas | kerusakan lingkungan hidup | hidup dan ekosistem | | | | | |
| | | | Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan | Pengurangan dan penanganan sampah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Terwujudnya penurunan risiko bencana | Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana | Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana | √ | √ | √ | √ | √ |
| **Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.** | | | | | | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat | Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif | Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pembangunan infrastruktur ramah difabel | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | | Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak | Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Menyediakan Layanan Ramah Anak | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ |
| | | Meningkatkan Ketahanan dan kesejahtreraan Keluarga | Pengendalian laju pertumbuhan penduduk | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga | √ | √ | √ | √ | √ |

Keterangan:

√√: program prioritas

√ : program reguler

Selanjutnya untuk memberikan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahun, ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahunan sebagai berikut:

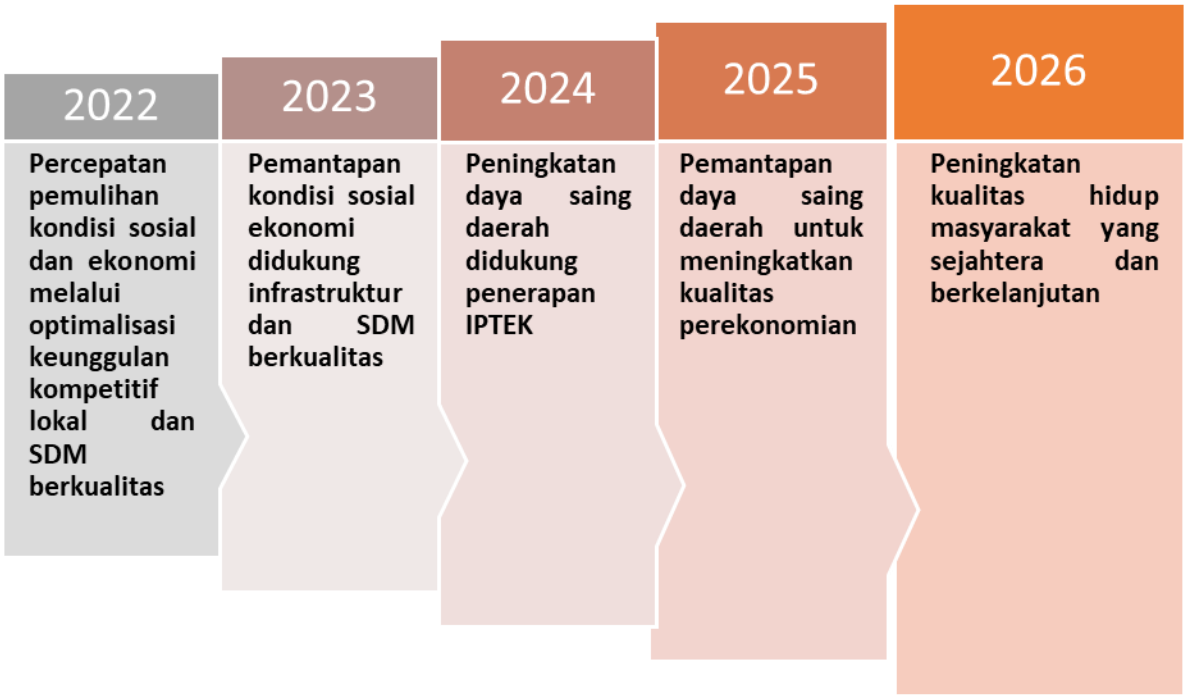


Gambar 6 1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Untuk memantapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul perlu didukung oleh prioritas pembangunan daerah. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**1. Pencapaian Kota/Kabupaten Kreatif**

Konteks pembangunan Kota Kreatif di Indonesia dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo dimana Ekonomi Kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Konsep pembangunan Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia adalah :

a. Fokus kepada pengembangan ide dan kreativitas;
b. Eksistensi komunitas kreatif (*bottom-up*); dan
c. Rantai nilai kreasi-produksi-distribusi-konsumsi-konservasi.

Indikator kota/kabupaten kreatif yang harus dipenuhi oleh semua kota/kabupaten yang mengajukan ke UNESCO terdiri dari 18 indikator.

Tabel 6 2 Target Pencapaian 18 Indikator Kabupaten Kreatif

| No | Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peran dan dasar-dasar bidang kreatif dalam sejarah kota. | v | v | v | v | v | Kriya Kuliner |
| 2 | Pentingnya ekonomi dan dinamika sektor budaya. | v | v | v | v | v | Kriya Kuliner |
| 3 | Pameran, konferensi, konvensi, dan peristiwa nasional dan atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh kota selama lima tahun terakhir. | v | v | v | v | v | |
| 4 | Festival, konvensi, dan acara skala besar lainnya yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir. | v | v | v | v | v | |
| 5 | Mekanisme, kursus, dan program untuk mempromosikan pendidikan kreativitas dan seni bagi kaum muda di bidang kreatif | v | v | v | v | v | Bimtek dan Pelatihan Industri Kreatif, ISI, Balai Besar Kerajinan dan Batik DIY |
| 6 | Belajar seumur hidup, pendidikan tinggi, sekolah kejuruan, sekolah musik dan drama, residensi dan pembentukan pendidikan tinggi lainnya yang mengkhususkan diri di bidang kreatif yang menjadi perhatian. | v | v | v | v | v | Lokal Batik, Tatah Sungging, Memasak di Pendidikan Dasar, ISI, SMKI, SMSR, Akademi Teknologi Kulit, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik |
| 7 | Pusat penelitian | v | v | v | v | v | ISI, Balai Besar |

| No | Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan program di bidang kreatif yang menjadi perhatian. | | | | | | Batik dan Kerajinan DIY, Balai Besar Kulit, Karet, Plastik |
| 8 | Ruang dan pusat kreasi yang diakui, berproduksi, dan penyebaran kegiatan barang dan jasa di bidang kreatif yang menjadi perhatian, di tingkat professional. | v | v | v | v | v | Gazebo Batik Giriloyo, Koperasi Setyo Bawono, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging |
| 9 | Fasilitas utama dan ruang-ruang budaya yang didedikasikan untuk berlatih, promosi, dan sosialisasi di bidang kreatif yang menjadi perhatian dan ditujukan untuk masyarakat umum dan atau pemirsa tertentu (Pemuda, kelompok rentan, dan lain-lain.) | v | v | v | v | v | Giriloyo, Rumah Kreatif Bantul, Dekranasda Bantul, PSWG, Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, Rumah Produksi Tatah Sungging |
| 10 | Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir untuk mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan budaya, khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian, terutama yang ditujukan kelompok sosial yang rentan atau tidak beruntung. | v | v | v | v | v | Bantul Ekspo, Bantul Juoss, Pentas Wayang Kulit |
| 11 | Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun | v | v | v | v | v | |

| No | Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | terakhir di bidang kreatif yang bersangkutan yang telah membantu dan atau memperkuat hubungan kerja sama antara kota, sektor swasta, pencipta, masyarakat sipil, dan atau akademisi. | | | | | | |
| 12 | Peran profesional utama dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang aktif di bidang kreatif yang menjadi perhatian. | v | v | v | v | v | Jagad, Komunitas Gerabah Bantul, Komunitas Ingkung, Persatuan Dalang Indonesia, Asosiasi Sate Klathak |
| 13 | Kebijakan dan langkah-langkah utama dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan status pencipta dan mendukung karya kreatif khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian. | v | v | v | v | V | Indikasi Geografis Batik dan Gerabah |
| 14 | Kebijakan dan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mendukung pendirian dan pengembangan industri budaya lokal yang dinamis di bidang kreatif yang menjadi perhatian. | v | v | v | v | v | Sentra Industri Kecil Menengah, Pembangunan Rumah Produksi Tatah Sungging, Pembangunan Showroom Batik di Wijirejo dan Triharjo, Pembangunan Gazebo Batik Giriloyo, Land Mark Kasongan |
| 15 | Kerjasama internasional utama di bidang kreatif yang menjadi perhatian, dikembangkan dengan kota dari berbagai Negara dalam lima tahun | | | v | v | v | |

| No | Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | terakhir. | | | | | | |
| 16 | Mekanisme dukungan, program, dan proyek yang dilakukan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan mendirikan sinergi antara bidang kreatif yang menjadi perhatian dengan sedikitnya satu bidang kreatif lainnya yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral) | | v | v | v | v | Promosi/Pameran, PSWG |
| 17 | Inisiatif kerjasama internasional dan atau kemitraan yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir yang melibatkan sedikitnya dua dari tujuh bidang kreatif yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral) | | | v | v | V | |
| 18 | Fasilitas utama dan ketersediaan infrastruktur dan acara, seperti pameran, konferensi, dan konvensi, yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan bidang kreatif yang dicakup oleh jaringan daripada bidang kreatif utama yang menjadi perhatian oleh aplikasi | | | v | v | V | |

Semua kota yang memenuhi indikator tersebut akan bergabung menjadi bagian dari anggota UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN). Menurut *Mission Statement Bologna Creative Cities Meeting, Creative Cities Network* bertujuan untuk memperkuat kreasi, produksi, distribusi dan menikmati barang-barang dan layanan budaya pada level lokal, mempromosikan kreativitas dan ekpresi kreatif khususnya di tengah kelompok rentan, termasuk perempuan dan generasi muda; meningkatkan akses dan partisipasi dalam dan untuk kehidupan budaya sama baiknya dengan menikmati barang-barang budaya itu sendiri; serta mengintegrasikan budaya dan industri kreatif ke dalam rencana pembangunan lokal.

Pencapaian Kabupaten Kreatif di dukung oleh pembangunan sektor:

**a. Pertanian**

Salah satu Program Strategis Nasional bidang pertanian adalah *Food Estate. Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Program *food estate* diharapkan mampu meningkatkan produksi bahan baku untuk menunjang industri kreatif Kabupaten Bantul. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi :

a) Rehabilitasi irigasi pertanian (irigasi air tanah dangkal dan irigasi air tanah dalam)
b) Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian
c) Sarana dan prasarana pasca panen
d) Renovasi Puskeswan
e) Pengembangan pakan konsentrat unggas.

Kegiatan di atas didukung rehabilitasi:

1) Bidang Irigasi,
   Rehabilitasi jaringan irigasi

2) Bidang Jalan:
   a) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan
   b) Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan rekonstruksi/ peningkatan kapasitas jalan.

**b. Industri**

Produk unggulan industri kreatif yang dimiliki Kabupaten Bantul:

- Kriya: Furniture, Batik, Gerabah, Batik Kayu, Tatah Sungging, Produk Kulit, Perak, Anyaman, Keris, Fashion
- Kuliner: Ingkung, Sate Klathak, Wedang Uwuh, Mie Lethek, Bakpia, Adrem, Peyek Tumpuk, Geplak, Mie Des.

Untuk mendukung dan mengembangkan produk unggulan kriya dan kuliner dilakukan peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro, fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil, serta pengembangan klaster industri kreatif.

**c. Pariwisata**

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata
- pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata
- revitalisasi Daya Tarik Wisata
- akselerasi pembangunan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah
- pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah(DPD) berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan *live-in* wisata desa/kalurahan budaya meliputi :
  a) DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai kawasan wisata alam, budaya, pendidikan, dirgantara, religi dan olahraga;
  b) DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai kawasan wisata alam perbukitan, budaya, sejarah, agro wisata, olahraga dan Industri;

c) DPD-Songgo Negoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai kawasan wisata ekonomi kreatif, kerajinan, budaya, pendidikan, sejarah, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition(MICE);

d) DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai kawasan wisata kerajinan, sejarah, budaya, kuliner dan epdesaan; dan

e) DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai kawasan wisata alam, kuliner, budaya, olahraga, dan kerajinan.

**2. Kabupaten Layak Anak :**

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana.

Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh Kapanewon di kabupaten tersebut layak anak, dan Kapanewon dapat dikatakan layak anak apabila seluruh desa/kalurahannya layak anak, begitu pula desa/kalurahan dikatakan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak.

Target pencapaian kategori Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:

Tabel 6 3 Target Pencapaian Kategori Kabupaten Layak Anak

| No | Indikator | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Kategori Kabupaten Layak Anak | Madya | Nindya | Utama | Utama | KLA | KLA |
| 2 | Nilai KLA | n/a | 730 | 830 | 890 | 910 | 950 |
| 3 | Kapanewon Layak Anak | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | Kalurahan Layak Anak | n/a | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |

Dalam upaya mewujudkan target di atas, maka dilakukan beberapa rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut:

Tabel 6 4 Rencana Pengelolaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 -2026

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Penyusunan Perda KLA | v | | | | |
| 2 | Sosialisasi Perda KLA | | v | | | |
| 3 | Pengelolaan KLA Kapanewon dan Kalurahan | v | v | v | v | v |
| 4 | Pengelolaan Forum Anak Bantul | v | v | v | v | v |
| 5 | Bimbingan teknis administrasi KLA Perlindungan Anak | v | v | v | v | v |
| 6 | Monitoring Evaluasi | v | v | v | v | v |

Pencapaian Kabupaten Layak Anak didukung :

**a. Penyelenggaraan PAUD**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sasaran penyelenggaraan PAUD adalah untuk menciptakan PAUD Holistik Integratif yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan.

PAUD HI atau PAUD Holistik Integratif adalah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan

kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Satuan PAUD merupakan wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalin kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM.

Arah kebijakan pengembangan PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 5 Arah Kebijakan Pengembangan PAUD

| No | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Kurasi PAUD | 75 Lokus Lembaga PAUD | 933 Lokus lembaga PAUD | Inovasi PAUD | Inovasi PAUD | Inovasi PAUD |
| 2 | Pemetaan kondisi | Peningkatan kualitas SDM | Peningkatan kualitas SDM | Pengadaan event festival PAUD | Pengadaan event festival PAUD | Pengadaan event festival PAUD |
| 3 | Penguatan dasar hukum PAUD | Peningkatan Sarana dan prasarana | Peningkatan Sarana dan prasarana | Pemberian Reward | Pemberian Reward | Pemberian Reward |
| 4 | Penguatan kurikulum | Booster Talent | Booster Talent | Booster Talent | Booster Talent | Booster Talent |
| 5 | | Penjalinan kemitraan dengan berbagai | Kemitraan PAUD dengan lembaga | Pengembangan peran PAUD dalam | Pengembangan peran PAUD dalam | Pengembangan peran PAUD dalam pendampingan |

| No | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | pihak | pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO | pendampingan tumbuh kembang anak | pendampingan tumbuh kembang anak | tumbuh kembang anak |
| 6 | | Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi | Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan |
| 7 | | Inovasi PAUD | Inovasi PAUD | | | |

**b. Penyelenggaraan POSYANDU**

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar terpadu yang bersumberdaya masyarakat, dalam arti diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas. Keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya.

Tujuan penyelenggaraan POSYANDU adalah Peningkatan mutu dan pelayanan Posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sasaran Posyandu yang aman, bersih, sehat, nyaman, indah dan universal akses dengan layanan kesehatan, konseling, penganekaragaman pangan, peningkatan ekonomi keluarga.

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Diversifikasi pembiayaan
2. Menjalin kemitraan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Melakukan kurasi
5. Penerapan IT
6. Peningkatan inovasi
7. Peningkatan kualitas SDM

Arah kebijakan pengembangan POSYANDU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 6 Arah Kebijakan Pengembangan POSYANDU

| No | Arah Kebijakan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Melakukan Kurasi | Penentuan 933 Lokus | Peningkatan kualitas SDM | Peningkatan kualitas SDM | Peningkatan kualitas SDM | Peningkatan kualitas SDM |
| 2 | Pemetaan kondisi | Peningkatan kualitas SDM | Peningkatan Sarana dan prasarana | Peningkatan Sarana dan prasarana | Peningkatan Sarana dan prasarana | Peningkatan Sarana dan prasarana |
| 3 | Penguatan dasar hukum | Peningkatan Sarana dan prasarana | Optimalisasi peran posyandu dalam pendataan dan pelayanan kesehatan | Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi | Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi | Pengembangan peran posyandu dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi |
| 4 | Penguatan SDM | Penguatan Anggaran | Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO | Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO | Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO | Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO |
| 5 | | Kemitraan Posyandu dengan lembaga pendidikan, fasyankes, posyandu, NGO | Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi | Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi | Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi | Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi |
| 6 | | Peningkatan layanan dengan berbasis aplikasi | Inovasi posyandu | Inovasi posyandu | Inovasi posyandu | Inovasi posyandu |
| 7 | | Inovasi posyandu | Pengadaan event festival posyandu | Pengadaan event festival posyandu | Pengadaan event festival posyandu | Pengadaan event festival posyandu |
| 8 | | | Pemberian Reward | Pemberian Reward | Pemberian Reward | Pemberian Reward |
| 9 | | | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan |

### c. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)

SLRT adalah sistem layanan yang dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin. SLRT merupakan sistem yang ada di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat kalurahan terdapat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). SLRT dan Puskessos diharapkan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat mewujudkan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga

miskin untuk memperoleh layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya mewujudkan Puskesos-SLTR, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan dan SK Bupati Bantul Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Tabel 6 7 Rencana Kegiatan Puskesos-SLRT tahun 2022 -2026

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Kelembagaan : Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM | v | | | | | |
| 2 | Advokasi anggaran: Kelengkapan kerja SDM dan insentif | | v | | | | |
| 3 | Inovasi : One Stop Service Best Practice Tanggul Bantul | | | v | | | |
| 4 | Festival Puskesos : replikasi model Puskesos 75 kalurahan | | | | v | | |
| 5 | Revitalisasi Puskesos: Bimbingan lanjut Puskesos, supervisi, evaluasi, inovasi berkelanjutan | | | | | v | v |

### 3. Permukiman Bersih dan Sehat

Pembangunan sanitasi yang menyeluruh, berkualitas, dan berkelanjutan akan mewujudkan permukiman bersih dan sehat. Kegiatan pembangunan sanitasi dilaksanakan melalui:

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sanitasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat;
b. Peningkatan akses masyarakat terhadap air limbah;
c. Gerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat;
d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam PHBS;
e. Penggalangan dan upaya dukungan pendanaan dari berbagai pihak untuk percepatan pembangunan sanitasi;

Pembangunan sanitasi meliputi : penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan pengelolaan drainasi.

Tabel 6 8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

| Pembangunan Sanitasi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|
| Penanganan Air Limbah Domestik | Peningkatan lingkungan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bantul melalui pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga yang berwawasan lingkungan | Tersusunnya regulasi pengelolaan air limbah |
| | | Tersedianya lahan dalam pembangunan IPAL sebanyak 11 lokasi |
| Pengelolaan Sampah | Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah | Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sampai tahun 2025 |
| | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui TPS 3R/ bank sampah | Meningkatnya Pengelolaan sampah perkotaan dengan sistem TPS 3R/ bank sampah pada tahun 2025 |
| Penanganan Drainasi | Peningkatan kualitas pelayanan sub sektor drainase | Meningkatnya pelayanan drainase dengan mengurangi genangan pada daerah rawan sebesar 110 ha sampai tahun 2025 |
| | Peningkatan pembiayaan melalui dana APBD | Terwujudnya kerjasama kemitraan antara pemerintah |

| Pembangunan Sanitasi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|
| | (Kabupaten Bantul dan DIY) dan kemitraan | daerah dengan swasta/lembaga/masyarakat/ program pada tahun 2025 |
| | Peningkatan pengetahuan masyarakat dan kesadaran dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sal drainase | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan drainase pada tahun 2025 |

Sumber: Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Dari tabel tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi di atas, maka ditetapkan target penanganan air limbah domestik dan penanganan drainase sebagai berikut :

Tabel 6 9 Target Penanganan Air Limbah Domestik dan Penanganan Drainase Tahun 2021 - 2025

| Komponen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **1. Air limbah domestic** | | | | | |
| a. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S) | 94.48% | 94.11% | 93.74% | 93.37% | 93.00% |
| b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T) | 5.52% | 5.89% | 6.26% | 6.63% | 7.00% |
| **2. Drainase (bebas genangan/ banjir)** | | | | | |
| a. Risiko Sangat Tinggi | 50% | 62.5% | 74.5% | 87% | 100% |
| b. Risiko Tinggi | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten, 2019

Target pengelolaan persampahan sesuai dengan Rencana Induk Persampahan sebagai berikut

Tabel 6 10 Target Pengelolaan Persampahan Tahun 2021 - 2025

| Komponen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Persampahan** | | | | | |
| a. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 20,91% | 21,35% | 21,78% | 22,37% | 22,81% |

| Komponen | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| b. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 42,42% | 44,16% | 45,87% | 46,86% | 50,07% |

Sumber : Dokumen Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul, 2021

## 4. Implementasi Undang Undang Cipta Kerja

Terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan 49 peraturan pelaksana turunannya yang terdiri dari 45 Peraturan pemerintah dan 4 Peraturan Presiden berimplikasi terhadap keberadaan produk hukum di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, untuk melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perbup yang disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Perda atau Perbup yang disesuaikan antara lain:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) karena akan menimbulkan duplikasi perizinan pemanfaatan ruang.
2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing karena sudah tidak

relevan dengan PP Nomor 34 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021

4. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
5. Perevisian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Gudang
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Menara Telekomunikasi sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap pembahasan.
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah disiapkan untuk mengatur rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

### 6.1.3. Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu indikator kondisi pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap

warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Pemenuhan SPM mengacu pada indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar.

Pemenuhan SPM pada enam bidang diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 11 Program Pelayanan Dasar RPJMD dalam Pemenuhan SPM

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase capaian SPM Pendidikan | n/a | 100 Persen | Rp91.970.069.372 | 100 Persen | Rp92.470.069.372 | 100 Persen | Rp92.922.332.372 | 100 Persen | Rp93.342.756.372 | 100 Persen | Rp99.342.756.372 | 100 Persen | Rp470.047.983.860 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | n/a | 66 Persen | Rp217.410.642.120 | 70 Persen | Rp217.710.642.120 | 75 Persen | Rp218.010.642.120 | 79 Persen | Rp218.310.642.120 | 83 Persen | Rp220.810.642.120 | 83 Persen | Rp1.092.253.210.600 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 indeks | 1 indeks | Rp21.022.955.117 | 1 indeks | Rp24.842.065.331 | 1 indeks | Rp22.369.095.882 | 1 indeks | Rp26.822.863.349 | 1 indeks | Rp22.196.026.290 | 1 indeks | Rp117.253.005.969 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | indeks peningkatan kapasitas SDMK | 1 indeks | 1 indeks | Rp352.754.220 | 1 indeks | Rp354.000.000 | 1 indeks | Rp356.000.000 | 1 indeks | Rp358.000.000 | 1 indeks | Rp360.000.000 | 1 indeks | Rp1.780.754.220 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM | Indeks | 1 indeks | 1 | Rp645.00 | 1 indeks | Rp665.00 | 1 | Rp670.00 | 1 indeks | Rp675.00 | 1 indeks | Rp680.00 | 1 indeks | Rp3.335.0 | DINAS |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | capaian SPM | | indeks | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 00.000 | KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.00 0.000 | 1 indeks | Rp665.00 0.000 | 1 indeks | Rp670.00 0.000 | 1 indeks | Rp675.00 0.000 | 1 indeks | Rp680.00 0.000 | 1 indeks | Rp3.335.0 00.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp725.00 0.000 | 1 indeks | Rp743.00 0.000 | 1 indeks | Rp750.00 0.000 | 1 indeks | Rp768.00 0.000 | 1 indeks | Rp785.00 0.000 | 1 indeks | Rp3.771.0 00.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.00 0.000 | 1 indeks | Rp665.00 0.000 | 1 indeks | Rp670.00 0.000 | 1 indeks | Rp675.00 0.000 | 1 indeks | Rp680.00 0.000 | 1 indeks | Rp3.335.0 00.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp706.72 0.400 | 1 indeks | Rp725.00 0.000 | 1 indeks | Rp743.00 0.000 | 1 indeks | Rp761.00 0.000 | 1 indeks | Rp2.901.4 17.064 | 1 indeks | Rp5.837.1 37.464 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.00 0.000 | 1 indeks | Rp665.00 0.000 | 1 indeks | Rp670.00 0.000 | 1 indeks | Rp675.00 0.000 | 1 indeks | Rp680.00 0.000 | 1 indeks | Rp3.325.0 00.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.00 0.000 | 1 indeks | Rp665.00 0.000 | 1 indeks | Rp670.00 0.000 | 1 indeks | Rp675.00 0.000 | 1 indeks | Rp680.00 0.000 | 1 indeks | Rp3.325.0 00.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp866.000.000 | 1 indeks | Rp870.000.000 | 1 indeks | Rp872.000.000 | 1 indeks | Rp875.000.000 | 1 indeks | Rp4.328.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp705.832.000 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp755.000.000 | 1 indeks | Rp3.678.832.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.245.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp745.000.000 | 1 indeks | Rp765.000.000 | 1 indeks | Rp770.000.000 | 1 indeks | Rp775.000.000 | 1 indeks | Rp780.000.000 | 1 indeks | Rp3.835.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp650.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp687.000.000 | 1 indeks | Rp3.362.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.245.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp700.000.000 | 1 indeks | Rp710.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.520.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp877.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.297.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp682.000.000 | 1 indeks | Rp699.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.481.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp682.000.000 | 1 indeks | Rp699.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.481.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp755.000.000 | 1 indeks | Rp765.000.000 | 1 indeks | Rp3.738.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp803.844.080 | 1 indeks | Rp810.000.000 | 1 indeks | Rp815.000.000 | 1 indeks | Rp820.000.000 | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp4.073.844.080 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp861.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.246.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp695.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp730.000.000 | 1 indeks | Rp3.585.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp867.000.000 | 1 indeks | Rp4.247.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM | Indeks | 1 indeks | 1 | Rp645.00 | 1 indeks | Rp665.00 | 1 | Rp670.00 | 1 indeks | Rp675.00 | 1 indeks | Rp680.00 | 1 indeks | Rp3.335.0 | DINAS |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | capaian SPM | | indeks | 0.000 | | 0.000 | indeks | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | 00.000 | KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Bed Occupation Rate (BOR) | 57,29 Persen | - | - | 67 Persen | 55.000.000 | 69 Persen | 59.950.000 | 71 Persen | 64.746.000 | 73 Persen | 69.279.000 | 73 Persen | 248.975.000 | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Turn Over Interval (TOI) | 2,69 hari | - | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Bed Turn Over (BTO) | 46,29 kali | - | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah | 82,36 Persen | 83,56 Persen | Rp1.684.064.441 | 84,38 Persen | Rp8.744.242.764 | 85,19 Persen | Rp8.918.667.040 | 85,98 Persen | Rp9.489.533.744 | 86,76 Persen | Rp9.962.587.119 | 86,76 Persen | Rp38.799.095.108 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | tangga di seluruh kabupaten yang layak | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 84,83 Persen | 87,86 Persen | Rp4.896.417.653 | 89,89 Persen | Rp5.351.716.994 | 91,92 Persen | Rp5.436.888.693 | 93,95 Persen | Rp5.500.577.563 | 95,98 Persen | Rp5.650.635.319 | 95,98 Persen | Rp26.836.236.222 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 100 Persen | Rp3.788.800.826 | 100 Persen | Rp4.784.865.801 | 100 Persen | Rp4.813.352.381 | 100 Persen | Rp4.984.687.619 | 100 Persen | Rp4.499.156.802 | 100 Persen | Rp22.870.863.429 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 Persen | 100 Persen | Rp2.384.412.000 | 100 Persen | Rp2.479.788.771,20 | 100 Persen | Rp4.887.460.448 | 100 Persen | Rp2.541.472.297 | 100 Persen | Rp3.436.809.527,02 | 100 Persen | Rp15.729.943.044 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 01 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 20 Persen | 25 Persen | Rp3.190.686.000 | 30 Persen | Rp2.855.000.000 | 35 Persen | Rp3.068.000.000 | 40 Persen | Rp3.160.800.000 | 45 Persen | Rp3.034.241.000 | 60 Persen | Rp15.308.727.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Indeks Pemulihan Pascabencana | n/a | n/a | | 45 Persen | | 55 Persen | | 60 Persen | | 65 Persen | | 75 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan | 14,48 Menit | < 15 Menit | Rp393.930.000 | < 15 Menit | Rp690.000.000 | < 15 Menit | Rp495.000.000 | | Rp666.000.000 | < 15 Menit | Rp732.600.000 | < 15 Menit | Rp2.977.530.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | n/a | 60 Persen | Rp673.959.448 | 70 Persen | Rp523.959.448 | 75 Persen | Rp523.959.448 | 80 Persen | Rp523.959.448 | 85 Persen | Rp523.959.448 | 85 Persen | Rp2.769.797.240 | DINAS SOSIAL |
| 01 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, | 80 Persen | 75 Persen | Rp8.938.751.920 | 75 Persen | Rp9.188.751.920 | 75 Persen | Rp9.788.924.104 | 80 Persen | Rp9.788.751.920 | 80 Persen | Rp10.288.751.920 | 80 Persen | Rp47.993.931.784 | DINAS SOSIAL |

| KODE | | | JENIS PELAYANAN DASAR SPM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | n/a | 70 Persen | | 70 Persen | | 70 Persen | | 80 Persen | | 80 Persen | | 80 Persen | | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | 50 persen | 55 Persen | Rp4.074.365.740 | 60 Persen | Rp4.141.265.740 | 70 Persen | Rp4.141.265.740 | 75 Persen | Rp4.341.265.740 | 80 Persen | Rp5.004.080.834 | 80 Persen | Rp21.702.243.794 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | 57 Persen | 100 Persen | Rp250.582.500 | 100 Persen | Rp250.582.500 | 100 Persen | Rp518.608.626 | 100 Persen | Rp518.608.626 | 100 Persen | Rp918.608.626 | 100 Persen | Rp2.456.990.878 | DINAS SOSIAL |

### 6.1.4. Arah Kebijakan Keistimewaan

Urusan keistimewaan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota di DIY meliputi empat (4) hal yaitu (1) Kelembagaan; (2) Kebudayaan; (3) Pertanahan; dan (4) Tata Ruang.

**1. Kelembagaan**

Implementasi kewenangan kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Keistimewaan DIY adalah bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Arah kebijakan kelembagaan meliputi: 1) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli, 2) mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional, 3) mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan. Strategi - strategi yang dapat dilakukan pada urusan kelembagaan adalah:

a) Mempedomani nilai–nilai luhur budaya DIY dan internalisasi keistimewaan setiap ASN sebagai penyelenggara pemerintahan;
b) Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memperkuat keistimewaan;
c) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi;
d) Sinergitas dengan kelembagaan nasional;
e) Menerapkan prinsip *rightsizing*;
f) Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*;
g) Mendesain lembaga dan ketatalaksanaan yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan.

**2. Kebudayaan**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

Tindak lanjut atas kewenangan urusan kebudayaan tertuang dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, yang bertujuan untuk:

a) menguatkan karakter dan jati diri masyarakat;
b) mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya DIY dalam kehidupan masyarakat, lembaga, dan pemerintah;
c) mengembangkan kebudayaan DIY untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya DIY di tengah peradaban dunia;
d) mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan adanya perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan, maka nomenklatur Kalurahan Budaya dimaknai sebagai Desa/Kalurahan Budaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Dalam kerangka Kalurahan Mandiri, Kabupaten Bantul akan mewujudkan Kalurahan Pamor Budaya.

Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai doa kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten

Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Kalurahan Pamor Budaya (versi Bantul) dimaknai sama dengan Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya (versi DIY). Dengan demikian indikator yang dipergunakan serta PD pengampunya, meliputi:

a) Desa/Kalurahan Budaya: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
b) Desa Wisata: Dinas Pariwisata
c) Rintisan Desa *Preneur*: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
d) Desa Prima: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

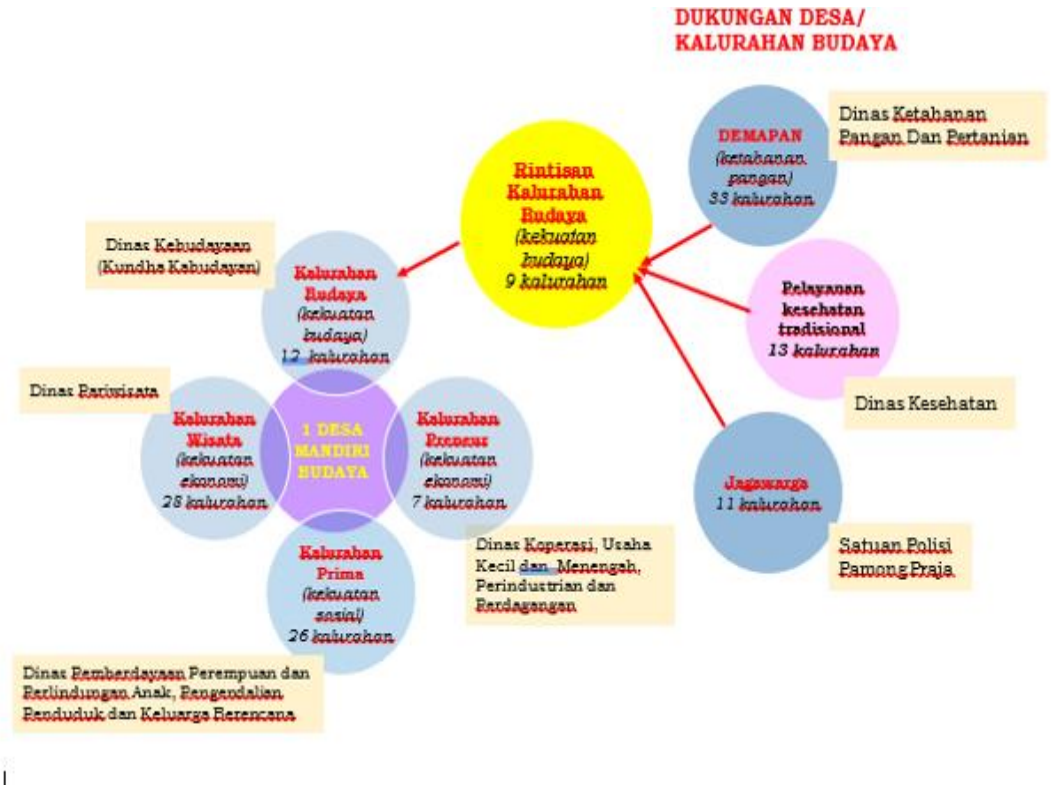


Gambar 6 2 Kondisi Desa/Kalurahan Budaya di Kabupaten Bantul Tahun 2021

Desa/Kalurahan Budaya adalah kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Pembentukan Kalurahan Budaya merupakan salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni budaya yang berada di tingkat kalurahan. Tujuannya adalah untuk memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. Bidang utama dalam memperkuat dan mengapresiasi budaya adalah pada sektor pariwisata dan ekonomi. Sementara itu aspek ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan keterlindungan warga menjadi isu penting dalam proses pembangunan kebudayaan.

a. Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Demapan adalah kalurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Pada tahun 2020, terdapat 23 Demapan di Kabupaten Bantul, yaitu:

Tabel 6 12 Penetapan Kalurahan Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul

| No | Kalurahan | Tahapan Demapan |
|---|---|---|
| 1 | Seloharjo | Exit Program |
| 2 | Srihardono | Exit Program |
| 3 | Sriharjo | Exit Program |
| 4 | Karangtengah | Exit Program |
| 5 | Selopamioro | Exit Program |
| 6 | Wukirsari | Exit Program |

| No | Kalurahan | Tahapan Demapan |
|---|---|---|
| 7 | Girirejo | Exit Program |
| 8 | Tamantirto | Exit Program |
| 9 | Bangunjiwo | Exit Program |
| 10 | Bawuran | Exit Program |
| 11 | Segoroyoso | Exit Program |
| 12 | Wonolelo | Exit Program |
| 13 | Dlingo | Exit Program |
| 14 | Muntuk | Exit Program |
| 15 | Mangunan | Exit Program |
| 16 | Temuwuh | Exit Program |
| 17 | Jatimulyo | Exit Program |
| 18 | Jagalan | Exit Program |
| 19 | Argodadi | Exit Program |
| 20 | Argorejo | Exit Program |
| 21 | Triwidadi | Exit Program |
| 22 | Trimurti | - Tahapan Persiapan Tahun I,<br>- Tahap Penumbuhan Tahun II |
| 23 | Guwosari | Tahapan Persiapan Tahun I |

Keterangan : Exit Program berarti Kalurahan menjadi Demapan
Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan, 2021

b. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang meliputi: tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis pelayanan kesehatan tradisional, tata cara pelayanan kesehatan tradisional, sumber daya, penelitian dan pengembangan, publikasi dan periklanan, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif.

Di Kabupaten Bantul rintisan puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer telah dilaksanakan sejak tahun 2011 di Puskesmas Kasihan II dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya dengan anggaran Dana Keistimewaan Provinsi DIY telah digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di puskesmas dan padukuhan percontohan. Pelayanan dalam gedung

yang dikembangkan yaitu: (1) Akupuntur; (2) Akupresur; (3) Obat Tradisional; (4) Pijat Bayi/Balita, dan (5) Meditasi. Sedangkan untuk pelayanan luar gedung yang bersifat pemberdayaan masyarakat yaitu berupa Asuhan Mandiri Akupresur dan Asuhan Mandiri Ramuan Jamu. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2021 telah mencakup 7 puskesmas, yaitu Puskesmas Kasihan II, Banguntapan II, Imogiri I, Sedayu II, Jetis II, Pajangan dan Piyungan serta 12 padukuhan percontohan.

Rencana pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer hingga tahun 2026 mencakup 17 Puskesmas, dan satu Griya Sehat yang dibangun dengan *sharing* sumber dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 13 Rencana pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer di Puskesmas

| No | Tahun | Puskesmas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 1. Pajangan<br>2. Sewon II | |
| 2 | 2023 | 1. Kasihan I<br>2. Dlingo II<br>3. Griya Sehat | Usulan pembebasan lahan Griya Sehat dengan Dana Keistimewaan Tahun 2023 |
| 3 | 2024 | 1. Dlingo I<br>2. Pandak II<br>3. Griya Sehat | Usulan pembangunan Griya Sehat dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 |
| 4 | 2025 | 1. Imogiri II<br>2. Srandakan<br>3. Griya Sehat | Operasional Griya Sehat dengan anggaran APBD Kabupaten Bantul |
| 5 | 2026 | 1. Sedayu II<br>2. Sanden<br>3. Griya Sehat | |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2021

c. Jagawarga

Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2019 menjelaskan definisi Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna

melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan jagawarga berdasarkan prakarsa dan kebutuhan masyarakat, sekelompok orang dapat membentuk Jaga Warga di tingkat padukuhan dengan mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada.

Fungsi jaga warga yaitu 1) mendorong/menggerakkan prakarsa masyarakat melalui Pranata Sosial dalam upaya menggali, menjaga, dan menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah, dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat; 2) melakukan mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat; dan 3) melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan dan pengukuhan Jaga Warga di Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2021 telah mencakup 262 padukuhan, dan akan dilakukan pembentukan Jaga Warga secara bertahap sehingga pada tahun 2026 di seluruh padukuhan telah terdapat Jaga Warga. Pemetaan pembentukan Jaga Warga di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 14 Pembentukan Kelompok Jaga Warga di Kabupaten Bantul

| Uraian | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembentukan Jaga Warga | 20 padukuhan | 150 padukuhan | 200 padukuhan | 200 padukuhan | 109 padukuhan |

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2021

### 3. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan dinyatakan Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten

berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang ada di Kabupaten Bantul sudah selesai dilaksanakan yaitu sejumlah 4.088 bidang tanah. Sedangkan pendaftaran tanah desa yang sudah mendapatkan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan sebagai berikut:

Tabel 6 15 Progres Penyusunan Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan di Kabupaten Bantul

| No. | Kalurahan | Kapanewon | Keterangan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kirim DIY | Hasil Review DPTR DIY | Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik) |
| 1 | Sumberagung | Jetis | 13 Mei 2019 | 21 Mei 2019 | No. 3 Tahun 2019 |
| 2 | Imogiri | Imogiri | 06 Mei 2019 | 13 Mei 2019 | No. 2 Tahun 2019 |
| 3 | Sidomulyo | Bambanglipuro | 06 Mei 2019 | 13 Mei 2019 | No. 1 Tahun 2019 |
| 4 | Potorono | Banguntapan | 20 Maret 2019 | 13 Mei 2019 | No. 2 Tahun 2019 |
| 5 | Terong | Dlingo | 22 Juli 2019 | 06 Agustus 2019 | No. 3 Tahun 2019 |
| 6 | Wonokromo | Pleret | 19 Juni 2019 | 05 Juli 2019 | No. 6 Tahun 2019 |
| 7 | Trimurti | Srandakan | 10 Juli 2019 | 06 Agustus 2019 | No. 4 Tahun 2019 |
| 8 | Mangunan | Dlingo | 19 Juli 2019 | 25 Juli 2019 | No. 7 Tahun 2019 |
| 9 | Kebonagung | Imogiri | 19 Juli 2019 | 25 Juli 2019 | No. 4 Tahun 2019 |
| 10 | Tirtonirmolo | Kasihan | 20 Maret 2019 | 21 Mei 2019 | No. 4 Tahun 2019 |
| 11 | Guwosari | Pajangan | 10 Juli 2019 | 25 Juli 2019 | No. 7 Tahun 2019 |
| 12 | Tirtosari | Kretek | 10 Juli 2019 | 06 Agustus 2019 | No. 3 Tahun 2019 |
| 13 | Muntuk | Dlingo | 19 Juni 2019 | 05 Juli 2019 | No. 2 Tahun 2019 |
| 14 | Sitimulyo | Piyungan | 13 Agustus 2019 | 06 Agustus 2019 | No. 13 Tahun 2019 |
| 15 | Argorejo | Sedayu | 28 Agustus 2019 | 24/09/2019 | No. 7 Tahun 2019 |
| 16 | Tamanan | Banguntapan | 19 Juni 2019 | 05 Juli 2019 | No. 7 Tahun 2019 |
| 17 | Baturetno | Banguntapan | 11 Oktober 2019 | 14 Oktober 2019 | No. 7 Tahun 2019 |
| 18 | Sumbermulyo | Bambanglipuro | 18 Oktober 2019 | 28 Oktober 2019 | No. 8 Tahun 2019 |
| 19 | Mulyodadi | Bambanglipuro | 01 Oktober 2019 | 28 Oktober 2019 | No. 11 Tahun 2019 |

| No. | Kalurahan | Kapanewon | Keterangan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kirim DIY | Hasil Review DPTR DIY | Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik) |
| 20 | Triwidadi | Pajangan | 28 Agustus 2019 | 30 September 2019 | No. 7 Tahun 2019 |
| 21 | Jatimulyo | Dlingo | 01 Juli 2019 | 06 Agustus 2019 | No. 5 Tahun 2019 |
| 22 | Wukirsari | Imogiri | 13 Agustus 2019 | 24 September 2019 | No. 11 Tahun 2019 |
| 23 | Karangtalun | Imogiri | 24 Oktober 2019 | 28 Oktober 2019 | No. 05 Tahun 2019 |
| 24 | Pleret | Pleret | 13 Agustus 2019 | 24 September 2019 | No. 8 Tahun 2019 |
| 25 | Banguntapan | Banguntapan | 27 Maret 2019 | 13 Mei 2019 | No. 07 Tahun 2019 |
| 26 | Argodadi | Sedayu | 28 September 2019 | 31 Desember 2019 | No. 07 Tahun 2019 |
| 27 | Tirtomulyo | Kretek | 13 Agustus 2019 | 24 September 2019 | No. 04 Tahun 2019 |
| 28 | Panggungharjo | Sewon | 19 Juni 2019 | 05 Juli 2019 | No. 5 Tahun 2019 |
| 29 | Girirejo | Imogiri | 10 Juli 2019 | 06 Agustus 2019 | No.6 Tahun 2019 |
| 30 | Parangtritis | Kretek | 28 Agustus 2019 | 24 September 2019 | No. 10 Tahun 2019 |
| 31 | Srigading | Sanden | 13 Agustus 2019 | 24 September 2019 | No. 2 Tahun 2019 |
| 32 | Gadingsari | Sanden | 02 Mei 2019 | 21 Mei 2019 | No. 1 Tahun 2020 (4) |
| 33 | Tirtohargo | Kretek | 07 Januari 2020 | 31 Januari 2020 | No. 04 Tahun 2020 (4) |
| 34 | Triharjo | Pandak | 27 Februari 2020 | 19 Mei 2020 | No. 06 Tahun 2020 (4) |
| 35 | Jagalan | Banguntapan | 11 Oktober 2019 | 31 Desember 2019 | No. 06 Tahun 2020 (4) |
| 36 | Sriharjo | Imogiri | 14 September 2020 | 24 September 2020 | No. 07 Tahun 2020 (4) |
| 37 | Sendangsari | Pajangan | 22 Juli 2020 | 10 Agustus 2020 | No. 9 Tahun 2020 (4) |
| 38 | Temuwuh | Dlingo | 07 Januari 2020 | 31 Januari 2020 | No. 5 Tahun 2020 (4) |
| 39 | Argomulyo | Sedayu | 07 Januari 2020 | 25 Februari 2020 | No. 9 Tahun 2020 (4) |
| 40 | Poncosari | Srandakan | 07 Januari 2020 | 31 Januari 2020 | No. 2 Tahun 2020 (4) |
| 41 | Donotirto | Kretek | 09 Juni 2020 | 03 Juli 2020 | No. 7 Tahun 2020 (4) |
| 42 | Panjangrejo | Pundong | 29 September 2020 | 12 Oktober 2020 | No. 7 Tahun 2020 (4) |
| 43 | Karangtengah | Imogiri | 27 Juli 2020 | 10 Agustus 2020 | No. 5 Tahun 2020 (4) |
| 44 | Ngestiharjo | Kasihan | 14 September 2020 | 24 September 2020 | No. 10 Tahun 2020 (4) |
| 45 | Srihardono | Pundong | 07 Januari 2020 | 25 Februari 2020 | No. 10 Tahun 2020 (4) |
| 46 | Caturharjo | Pandak | 27 Februari 2020 | 19 Mei 2020 | No. 11 Tahun 2020 (4) |
| 47 | Singosaren | Banguntapan | 07 Januari 2020 | 31 Januari 2020 | No. 6 Tahun 2020 (4) |
| 48 | Trirenggo | Bantul | 27 Juli 2020 | 10 Agustus 2020 | No. 07 Tahun 2020 (4) |

| No. | Kalurahan | Kapanewon | Keterangan | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kirim DIY | Hasil Review DPTR DIY | Arsip Perdes DPTR Bantul (Fisik) |
| 49 | Murtigading | Sanden | 23 Juni 2020 | 03 Juli 2020 | No. 07 Tahun 2020 (4) |
| 50 | Segoroyoso | Pleret | 21 September 2020 | 12 Oktober 2020 | No. 06 Tahun 2020 (4) |
| 51 | Seloharjo | Pundong | 14 September 2020 | 24 September 2020 | No. 7 Tahun 2020 (4) |
| 52 | Bawuran | Pleret | 18 November 2020 | 07 Januari 2021 | No. 1 Tahun 2021 (4) |
| 53 | Patalan | Jetis | 21 September 2020 | 12 Oktober 2020 | No. 10 Tahun 2020 (4) |
| 54 | Bangunjiwo | Kasihan | 04 November 2020 | 07 Januari 2021 | No. 1 Tahun 2021 (4) |
| 55 | Tamantirto | Kasihan | 22 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 03 Tahun 2021 (4) |
| 56 | Wijirejo | Pandak | 22 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 1 Tahun 2021 (4) |
| 57 | Sabdodadi | Bantul | 18 Oktober 2019 | 31 Desember 2019 | No. 3 Tahun 2021 (4) |
| 58 | Palbapang | Bantul | 30 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 3 Tahun 2021 (4) |
| 59 | Canden | Jetis | 22 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 03 Tahun 2020 (4) |
| 60 | Srimulyo | Piyungan | 14 September 2020 | 24 September 2020 | No. 6 Tahun 2020 (4) |
| 61 | Argosari | Sedayu | 22 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 02 Tahun 2021 (4) |
| 62 | Trimulyo | Jetis | 30 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 3 Tahun 2021 (4) |
| 63 | Wonolelo | Pleret | 09 Juni 2020 | 03 Juli 2020 | No. 11 Tahun 2020 (4) |
| 64 | Gadingharjo | Sanden | 22 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 2 Tahun 2021 (4) |
| 65 | Bantul | Bantul | 15 April 2020 | 06 Mei 2020 | No. 4 Tahun 2020 (4) |
| 66 | Srimartani | Piyungan | 30 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 4 Tahun 2021 (4) |
| 67 | Selopamioro | Imogiri | 07 Januari 2020 | 31 Januari 2020 | No. 6 Tahun 2020 (4) |
| 68 | Pendowoharjo | Sewon | 18 November 2020 | 09 Februari 2021 | No. 2 Tahun 2021 (4) |
| 69 | Timbulharjo | Sewon | 22 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 3 Tahun 2021 (4) |
| 70 | Jambidan | Banguntapan | 31 Desember 2020 | 22 Januari 2021 | No. 01 Tahun 2021 (4) |
| 71 | Ringinharjo | Bantul | 07 Januari 2020 | 31 Januari 2020 | No. 02 Tahun 2021 (4) |
| 72 | Dlingo | Dlingo | 01 Juli 2019 | 06 Agustus 2019 | No. 13 Tahun 2020 (4) |
| 73 | Bangunharjo | Sewon | 30 Desember 2020 | 07 Januari 2021 | No. 3 Tahun 2021 (4) |
| 74 | Gilangharjo | Pandak | 05 September 2019 | 28 Oktober 2019 | No. 2 Tahun 2021 (4) |
| 75 | Wirokerten | Banguntapan | 15 April 2020 | 06 Mei 2020 | * |

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

Sementara itu untuk tanah yang belum memiliki Peraturan Desa/ Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan akan dilakukan pendaftaran tanah. Rencana pendaftaran tanah kalurahan pada tahun 2021 – 2026 akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 6 16 Rincian Inventarisasi Tanah Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

| Inventarisasi Tanah Kalurahan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), 2021

## 4. Tata Ruang

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, menjelaskan adanya pembagian satuan ruang strategis pada Satuan Ruang Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan yang selanjutnya disebut SRS Kasultanan adalah Satuan Ruang Tanah Kasultanan yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. SRS Kasultanan terdiri atas SRS Kasultanan pada tanah Keprabon, dan SRS Kasultanan pada tanah bukan Keprabon, yang terletak di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 6 17 Kalurahan dan Satuan Ruang Strategis di Kabupaten Bantul

| No | Kalurahan | Penanda SRS |
|---|---|---|
| **A.** | **Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon** | |
| 1 | Wukirsari | Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri |
| 2 | Imogiri | |
| 3 | Girirejo | |
| 4 | Panggungharjo | Bagian dari Sumbu Filosofis di Panggung Krapyak |
| 5 | Jagalan | Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede |
| 6 | Banguntapan | Masjid Pathok Nagoro di Babadan |
| 7 | Tirtonirmolo | Masjid Pathok Nagoro di Dongkelan |
| 8 | Parangtritis | Pantai Samas – Parangtritis |

| No | Kalurahan | Penanda SRS |
|---|---|---|
| **A.** | **Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon** | |
| **B.** | **Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon** | |
| 1 | Segoroyoso | Kerto – Pleret |
| 2 | Pleret | |
| 3 | Wonokromo | |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

Pemanfaatan ruang pada SRS yang diperbolehkan meliputi :

Tabel 6 18 Arah Pemanfaatan Tata Ruang Keistimewaan DIY di Kabupaten Bantul

| No | Satuan Ruang Strategis | Arahan Pemanfaatan Ruang |
|---|---|---|
| 1. | Makam Raja-Raja di Imogiri | Zona inti berupa rehabilitasi/pengembangan bangunan makam Imogiri yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip pelestarian cagar budaya.<br><br>Zona penyangga antara lain:<br>1. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan<br>2. bangunan baru dengan menggunakan gaya arsitektur tradisional Jawa. |
| 2. | Sumbu filosofi | 1. pemanfaatan ruang di kanan dan kiri sumbu filosofi menyesuaikan dengan makna dari sumbu filosofi; dan<br><br>2. pemanfaatan ruang pada satuan ruang Sumbu Filosofi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:<br>a. ketinggian bangunan mengikuti kemiringan sudut 45$^{o}$ (empat puluh lima derajat) dari as Sumbu Filosofi;<br>b. ketinggian bangunan paling tinggi 18 (delapan belas) meter pada area yang berjarak 60 (enam puluh) meter diukur dari batas ruang milik jalan; dan<br>c. bangunan baru menggunakan gaya arsitektur bangunan berciri khas Yogyakarta. |
| 3. | Masjid dan makam Raja Mataram di Kotagede | 1. kegiatan ekonomi skala kecil;<br>2. wisata budaya dan sejarah;<br>3. *home stay*; dan<br>4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. |
| 4. | Masjid Pathok Negoro | 1. kegiatan ekonomi skala masyarakat;<br>2. wisata budaya dan sejarah; dan<br>3. pendidikan dan pengembangan budaya |

| No | Satuan Ruang Strategis | Arahan Pemanfaatan Ruang |
|---|---|---|
| | | |
| 5. | Samas – Parangtritis | 1. pembangunan pelindung pantai;<br>2. pengembangan fasilitas pendukung pariwisata diarahkan ke pantai Samas;<br>3. pembuatan jalan sebagai pembatas sempadan pantai;<br>4. penangkapan hasil laut;<br>5. pangkalan pendaratan ikan;<br>6. pengembangan energi terbarukan;<br>7. pendidikan dan penelitian;<br>8. pariwisata terbatas dan minat khusus;<br>9. pembudidayaan terbatas pada Wilayah diluar sempadan pantai;<br>10. pembangunan fasilitas umum; dan<br>11. pengembangan sistem mitigasi bencana. |
| 6. | Kerto – Pleret | 1. wisata budaya dan sejarah;<br>2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;<br>3. bangunan pendukung fungsi Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan<br>4. fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan |

Sumber: RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2021

### 6.1.5. Arah Kebijakan Penanggulangan Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan pertengahan Juni 2021 belum ada tanda pandemi akan berakhir. Perlu kebijakan Kabupaten Bantul untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pandemi.

Strategi ke depan yang dilakukan adalah dengan penguatan layanan Kesehatan, dengan arah kebijakan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga dan optimalisasi peran posyandu untuk layanan kesehatan.

Di tingkat kabupaten dengan meneruskan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Keberhasilan mengatasi pandemi bertumpu

pada masyarakat, maka secara preventif sosialisasi dan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas akan terus dikampanyekan. Secara konsisten dilakukan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) pengetesan, pelacakan, isolasi/karantina, dan pengobatan, juga didorong semakin tinggi cakupan masyarakat yang mendapat suntikan vaksin covid.

Secara kuratif dengan penguatan sistem layanan kesehatan, layanan Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid(RSLKC) dan Shelter. Memastikan ketersediaan tempat tidur perawatan, ketersediaan obat, sumberdaya manusia, dan alat pelindung diri.

Pandemi mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta melambatnya perekonomian, untuk itu kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi

Pemulihan perekonomian dilakukan dengan:

1. Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan melakukan fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis komunitas;
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan dengan arah kebijakan optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan dan pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;
3. Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran dengan perlindungan dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa, modernisasi pasar rakyat, peningkatan kualitas perkoperasian;
4. Mempermudah investasi dalam berbagai bidang dengan penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan,

pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat;

5. Pengembangan SDM Industri Kreatif dengan penyiapan tenaga kerja kompetitif.

### 6.1.6. Kebijakan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Kebijakan pembangunan/rehabilitasi gedung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Pembangunan/ rehabilitasi gedung pada kurun tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6 19 Rencana Pembangunan Gedung di Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

| No | Jenis Gedung | Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp) | | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Shelter Kessos | 1.700 | - | - | - | - | - | - Dinsos P3A<br>- Melanjutkan pembangunan tahun 2020 |
| 2 | RS tipe D | 5.000 | - | 10.000 | - | - | - | - Dinas Kesehatan<br>- Melanjutkan pembangunan tahun 2018 |
| 3 | MPP | - | 3000 | - | - | - | - | DPMPT dan DPUPKP |
| 4 | Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan<br>- Usul Dana Keistimewaan |
| 5 | Rumah Dinas Wabup | - | 4.500 | - | - | - | - | DPUPKP |
| 6 | Pembangunan Rumdin Kajari | - | 1.500 | - | - | - | - | DPUPKP |
| 7 | Pembangunan DPRD | - | - | - | - | 60.000 | 60.000 | DPUPKP |
| 8 | Rehabilitasi Kantor PDAM | - | - | 4500 | 4000 | - | - | DPUPKP |
| 9 | Pembangunan Gedung Metrologi | - | - | 2000 | - | - | - | DPUPKP |
| 10 | Pembangunan TPR | - | - | - | - | 4000 | - | DPUPKP |
| 11 | Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) | - | - | 3000 | - | | - | DPUPKP |
| 12 | Pembangunan Kantor | - | - | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | DPUPKP |

| No | Jenis Gedung | Tahun Rencana dan Anggaran (Jutaan Rp) | | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Baru 1 unit/tahun | | | | | | | |
| 13 | Intermediate Treatment Facility (ITF) | - | - | 2500 | - | - | - | DPUPKP |
| 14 | Kantor Baznas | - | - | 1.000 | - | - | - | DPUPKP |
| 15 | Taman Budaya | - | - | 70.000 | 30.000 | 10.000 | - | Disnas Kebudayaan dan DPUPKP |
| 16 | Rehabilitasi UPT DLLAJ | - | - | 2.000 | - | - | - | Dinas Perhubungan dan DPUPKP |
| 17 | Rumah Pemotongan Hewan | - | - | 8.000 | - | - | - | - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian<br>- Usul Dana Keistimewaan |
| 18 | Pelataran Bekas pasar lama Imogiri | - | - | - | 13.500 | - | - | - DPUPKP<br>- Usul Dana Keistimewaan |
| 19 | Tempat Evakuasi Sementara Bulak Makbul | - | - | - | - | 5.000 | - | - BPBD<br>- Usul Dana Keistimewaan |
| 20 | Pembangunan UPT Persampahan | - | - | - | 2000 | - | - | DLH |
| 21 | Balai Benih Ikan | - | - | - | 2000 | - | - | Dinas Kelautan |
| 22 | Laboratorium Pertanian | - | - | - | - | 1500 | - | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 23 | Pengembangan Rumah Sakit | - | - | - | - | 6400 | - | Dinas Kesehatan |
| | **Jumlah** | **7.100** | **11.000** | **115.000** | **63.500** | **88.900** | **72.000** | |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021

## 6.2. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

### 6.2.1. Program Pembangunan Pendukung Sasaran Daerah

Perumusan program pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan tahap yang sangat penting karena akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas, dimana program prioritas secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Secara lebih detail gambaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 6 20 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | **Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN | Indeks Reformasi Birokrasi | 78,00 (BB) | 80,00 (BB) | | 82,00 (BB) | | 82,5 (BB) | | 83,25 (BB) | | 83,75 (BB) | | 83,75 (BB) | | |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | 4,0815 | 4,1315 | | 4,1815 | | 4,2315 | | 4,2815 | | 4,3315 | | 4,3315 | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 83 Angka | Rp10.378.679.400 | 83 Angka | Rp10.513.147.000 | 83 Angka | Rp10.685.947.000 | 83 Angka | Rp10.976.575.000 | 83 Angka | Rp11.585.396.000 | 83 Angka | Rp54.139.744.400 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | |
| | | | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | |
| 4 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 92 Persen | Rp1.043.927.600 | 92 Persen | Rp1.057.394.000 | 92 Persen | Rp1.071.352.000,00 | 92 Persen | Rp1.085.280.000,00 | 92 Persen | Rp1.099.172.000,00 | 92 Persen | Rp5.357.125.600 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase Rancangan Perda | 100 Persen | 100 Persen | Rp442.575.000 | 100 Persen | Rp448.284.000 | 100 Persen | Rp454.201.000 | 100 Persen | Rp460.106.000 | 100 Persen | Rp465.995.000 | 100 Persen | Rp2.271.161.000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | yang diharmonisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | 100 Persen | 100 Persen | Rp7.686.962.700 | 100 Persen | Rp7.786.125.000 | 100 Persen | Rp7.888.902.000 | 100 Persen | Rp7.991.458.000 | 100 Persen | Rp8.093.749.000 | 100 Persen | Rp39.447.196.700 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN | Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti | 100 Persen | 100 Persen | Rp339.850.000 | 100 Persen | Rp344.234.000 | 100 Persen | Rp348.778.000 | 100 Persen | Rp353.312.000 | 100 Persen | Rp357.834.000 | 100 Persen | Rp1.744.008.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender | 80 Persen | 80 Persen | Rp1.095.088.900 | 80 Persen | Rp1.109.216.000 | 80 Persen | Rp1.123.858.000 | 80 Persen | Rp1.138.468.000 | 80 Persen | Rp1.153.040.000 | 80 Persen | Rp5.619.670.900 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional | 0 Persen | 87,5 Persen | 261.050.000 | 88 Persen | 261.050.000 | 88,5 Persen | 261.050.000 | 89 Persen | 261.050.000 | 89,5 Persen | 261.050.000 | 89,5 Persen | Rp1.305.250.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | 6,67 Persen | 88 persen | 500.000.000 | 88,5 persen | 500.000.000 | 89 persen | 500.000.000 | 89,5 persen | 500.000.000 | 90 persen | 500.000.000 | 90 persen | Rp2.500.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | 87,5 Persen | 88 Persen | 200.000.000 | 88,5 Persen | 650.000.000 | 89 Persen | 300.000.000 | 89.50 Persen | 300.000.000 | 90 Persen | 350.000.000 | 90 Persen | Rp1.800.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul | 80.5 Persen | 81 Persen | 150.000.000 | 82 Persen | 200.000.000 | 83 Persen | 230.000.000 | 84 Persen | 245.000.000 | 85 Persen | 250.000.000 | 85 Persen | Rp1.075.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 84 Angka | Rp28.007.830.550 | 84 Angka | Rp30.796.194.663 | 85 Angka | Rp34.625.814.130 | 85 Angka | Rp37.263.395.543 | 85 Angka | Rp40.989.735.097 | 85 Angka | Rp171.682.969.982 | SEKRETARIAT DPRD |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 80 Persen | 82 Persen | Rp14.943. 253.450 | 84 Persen | Rp13.013. 911.337 | 86 Persen | Rp11.035. 494.870 | 88 Persen | Rp8.316.6 40.457 | 90 Persen | Rp9.980.2 50.903 | 90 Persen | Rp57.289.55 1.018 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 1 0 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 90 Persen | 95 Persen | Rp330.50 2.000 | 100 Persen | Rp460.44 6.000 | 100 Persen | Rp506.41 3.800 | 100 Persen | Rp554.06 5.000 | 100 Persen | Rp601.31 5.000 | 100 Persen | Rp2.452.741 .800 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | 10 Persen | 10 Persen | Rp0 | 20 Persen | Rp320.00 0.000 | 50 Persen | Rp200.00 0.000 | 70 Persen | Rp200.00 0.000 | 90 Persen | Rp200.00 0.000 | 90 Persen | Rp920.000.0 00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85,5 Angka | Rp1.595.7 55.060 | 86 Angka | Rp1.675.5 42.813 | 86,5 Angka | Rp1.759.3 19.954 | 87 Angka | Rp1.675.5 42.813 | 87,5 Angka | Rp1.759.3 19.954 | 87,5 Angka | Rp8.465.480 .593 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 Persen | 100 Persen | Rp2.351.1 35.980 | 100 Persen | Rp3.117.1 73.929 | 100 Persen | Rp3.475.2 19.775 | 100 Persen | Rp4.348.5 90.929 | 100 Persen | Rp4.646.1 05.575 | 100 Persen | Rp17.938.22 6.189 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi | 95 Persen | 95 Persen | | 95,5 Persen | | 96 Persen | | 96,5 Persen | | 97 Persen | | 97 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 5 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.572.022.220 | 100 Persen | Rp1.650.623.331 | 100 Persen | Rp1.733.154.498 | 100 Persen | Rp1.650.623.331 | 100 Persen | Rp1.733.154.498 | 100 Persen | Rp8.339.577.877 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul | 7 Persen | 20 Persen | Rp381.726.000 | 40 Persen | Rp741.084.500 | 60 Persen | Rp741.084.500 | 75 Persen | Rp741.084.500 | 90 Persen | Rp741.084.500 | 90 Persen | Rp3.346.064.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 82,43 Angka | Rp98.789.110.760 | 82,5 Angka | Rp101.629.595.400 | 82,55 Angka | Rp102.195.950.000 | 82,6 Angka | Rp102.562.571.700 | 82,65 Angka | Rp105.113.512.700 | 82,65 Angka | Rp510.290.740.560 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| 5 | 0 3 | 0 2 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | n/a | 30 Persen | Rp8.953.282.240 | 31 Persen | Rp6.528.762.100 | 32 Persen | Rp6.377.996.500 | 32 Persen | Rp6.426.537.800 | 32 Persen | Rp6.527.537.800 | 32 Persen | Rp34.814.116.440 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Peta Kompetensi ASN | n/a | 6 Persen | | 9 Persen | | 12 Persen | | 15 Persen | | 18 Persen | | 18 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | | | | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | n/a | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | n/a | 100 Persen | Rp230.343.740 | 100 Persen | Rp241.860.927 | 100 Persen | Rp253.953.973 | 100 Persen | Rp241.860.927 | 100 Persen | Rp253.953.973 | 100 Persen | Rp1.221.973.541 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) | 59 Persen | 60 Persen | Rp215.832.480 | 61 Persen | Rp250.000.000 | 62 Persen | Rp300.000.000 | 63 Persen | Rp400.000.000 | 64 Persen | Rp700.000.000 | 64 Persen | Rp1.865.832.480 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 68 Persen | 69 Persen | Rp19.236.000 | 70 Persen | Rp50.000.000 | 71 Persen | Rp1.133.865.000 | 72 Persen | Rp152.673.000 | 73 Persen | Rp167.080.000 | 73 Persen | Rp1.522.854.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | 80 Persen | 80 Persen | Rp299.595.500 | 83 Persen | Rp500.000.000 | 85 Persen | Rp550.000.000 | 88 Persen | Rp605.000.000 | 90 Persen | Rp665.500.000 | 90 Persen | Rp2.620.095.500 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84,14 Angka | 84,5 Angka | Rp684.094.393.140 | 85 Angka | Rp707.546.236.000 | 85 Angka | Rp716.438.030.000 | 85,5 Angka | Rp730.029.284.000 | 85,5 Angka | Rp737.972.504.000 | 85,5 Angka | Rp3.576.080.447.140 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penetapan APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Rp342.169.016.830 | Tepat Waktu | Rp324.547.097.500 | Tepat Waktu | Rp325.811.451.000 | Tepat Waktu | Rp318.197.011.000 | Tepat Waktu | Rp323.284.972.890 | Tepat Waktu | Rp1.634.009.549.220 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 87,84 Persen | 89 Persen | | 89 Persen | | 90 Persen | | 90 Persen | | 91 Persen | | 91 Persen | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.262.739.710 | 100 Persen | Rp1.470.000.000 | 100 Persen | Rp1.542.000.000 | 100 Persen | Rp2.114.000.000 | 100 Persen | Rp1.692.000.000 | 100 Persen | Rp8.080.739.710 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.302.989.220 | 100 Persen | Rp12.193.391.500 | 100 Persen | Rp12.827.418.000 | 100 Persen | Rp13.430.197.000 | 100 Persen | Rp14.082.037.110 | 100 Persen | Rp62.836.032.830 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK | 82,00 | 82,50 | | 83,50 | | 83,75 | | 84,00 | | 84,50 | | 84,50 | | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas | 0 | 0 | 0 | 38,89 Persen | 219.857.000 | 44,44 Persen | 241.842.700 | 50 Persen | 266.026.970 | 55,56 Persen | 292.629.000 | 55,56 Persen | Rp1.020.355.670 | INSPEKTORAT DAERAH |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,93 angka | 83 Angka | Rp2.141.908.600 | 83 Angka | Rp2.855.001.803 | 83 Angka | Rp3.695.858.239 | 83 Angka | Rp4.260.897.302 | 83 Angka | Rp5.176.587.857 | 83 Angka | Rp18.130.253.801 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku | n/a | 12 Persen | Rp194.072.500 | 13 Persen | Rp303.445.378 | 14 Persen | Rp449.410.881 | 15 Persen | Rp643.072.513 | 16 Persen | Rp1.003.533.390 | 16 Persen | Rp2.593.534.663 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | n/a | 20 Persen | Rp1.293.514.900 | 25 Persen | Rp1.432.401.820 | 30 Persen | Rp1.710.576.180 | 35 Persen | Rp2.367.871.214 | 40 Persen | Rp2.701.817.752 | 40 Persen | Rp9.506.181.867 | INSPEKTORAT DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,24 | 3,25 | | 3,3 | | 3,35 | | 3,4 | | 3,45 | | 3,45 | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 86 Angka | Rp1.684.961.498 | 87 Angka | Rp2.132.464.458 | 89 angka | Rp2.195.710.604 | 90 Angka | Rp2.415.281.266 | 92 Angka | Rp2.695.307.791 | 92 Angka | Rp11.123.725.617 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 1 6 | 0 2 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 50 Persen | 70 Persen | Rp1.309.327.700 | 71 Persen | Rp1.639.360.514 | 72 Persen | Rp1.671.101.718 | 73 Persen | Rp1.698.953.412 | 74 Persen | Rp1.868.848.754 | 74 Persen | Rp8.187.592.098 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital | 28,57 Persen | 42,86 Persen | Rp500.000.000 | 57,14 Persen | Rp1.680.350.000 | 71,43 Persen | Rp1.848.385.000 | 85,71 Persen | Rp2.033.223.500 | 100 Persen | Rp2.236.545.850 | 100 Persen | Rp8.298.504.350 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 6 | 0 3 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,67 Angka | 2,75 Angka | Rp9.684.574.802 | 2,85 Angka | Rp9.824.181.468 | 2,9 Angka | Rp10.206.599.615 | 2,95 Angka | Rp10.592.259.576 | 2,95 Angka | Rp11.251.485.534 | 2,95 Angka | Rp51.559.100.995 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 2 0 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 100 Persen | 100 Persen | Rp176.400.000 | 100 Persen | Rp170.665.000 | 100 Persen | Rp207.968.750 | 100 Persen | Rp228.765.625 | 100 Persen | Rp251.642.187 | 100 Persen | Rp1.035.441.562 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 2 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 60 Persen | 65 Persen | Rp844.457.000 | 70 Persen | Rp1.332.186.560 | 75 Persen | Rp1.374.185.313 | 80 Persen | Rp1.301.129.621 | 81 Persen | Rp2.508.509.884 | 81 Persen | Rp7.360.468.378 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,03 | 88,10 | | 88,40 | | 88,80 | | 89,10 | | 89,50 | | 89,50 | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,<br><br>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,<br><br>KAPANEWON |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 8 | 0 4 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100 Persen | 100 Persen | Rp604.839.580 | 100 Persen | Rp463.100.000 | 100 Persen | Rp399.410.000 | 100 Persen | Rp439.351.000 | 100 Persen | Rp417.610.000 | 100 Persen | Rp2.324.310.580 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 1 8 | 0 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan | 100 Persen | 100 Persen | Rp102.785.120 | 100 Persen | Rp96.800.000 | 100 Persen | Rp106.480.000 | 100 Persen | Rp117.128.000 | 100 Persen | Rp117.128.000 | 100 Persen | Rp540.321.120 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 83 Angka | Rp3.270.576.670 | 83.25 Angka | Rp3.527.457.358 | 83.50 Angka | Rp3.764.203.094 | 83.75 Angka | Rp4.029.945.929 | 84 Angka | Rp5.157.228.194 | 84 Angka | Rp19.749.411.245 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 1 2 | 0 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | 99 Persen | 99,81 Persen | Rp626.137.394 | 99,82 Persen | Rp674.715.761 | 99,83 Persen | Rp735.641.493 | 99,84 Persen | Rp792.979.817 | 99,85 Persen | Rp872.277.799 | 99,85 Persen | Rp3.701.752.264 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 1 2 | 0 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 96 Persen | 96 Persen | Rp431.856.669 | 96,1 Persen | Rp461.006.962 | 96,2 Persen | Rp500.562.813 | 96,3 Persen | Rp538.619.094 | 96,4 Persen | Rp592.481.004 | 96,4 Persen | Rp2.524.526.542 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 1 2 | 0 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | 99 Persen | 99,5 Persen | Rp376.741.530 | 99,6 Persen | Rp900.380.308 | 99,7 Persen | Rp441.413.428 | 99,8 Persen | Rp479.554.771 | 99,9 Persen | Rp520.910.248 | 99,9 Persen | Rp2.719.000.285 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 1 2 | 0 5 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat | 99 Persen | 100 Persen | Rp89.968.737 | 100 Persen | Rp98.965.611 | 100 Persen | Rp108.862.172 | 100 Persen | Rp119.748.389 | 100 Persen | Rp113.902.755 | 100 Persen | Rp531.447.664 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON BANTUL |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON BANTUL |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 angka | 86 Angka | Rp537.101.000 | 87 Angka | Rp679.013.140 | 88 Angka | Rp916.883.140 | 89 Angka | Rp1.159.235.140 | 90 Angka | Rp1.719.035.140 | 90 Angka | Rp5.011.267.560 | KAPANEWON BANTUL |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 98 Persen | 90 Persen | Rp31.520.000 | 91 Persen | Rp32.976.000 | 92 Persen | Rp32.976.000 | 93 Persen | Rp32.976.000 | 94 Persen | Rp32.976.000 | 94 Persen | Rp163.424.000 | KAPANEWON BANTUL |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 | 100 Persen | Rp84.800.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp352.600.000 | KAPANEWON BANTUL |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp98.000.000 | KAPANEWON BANTUL |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp143.690.000 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp844.753.440 | KAPANEWON BANTUL |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 79,59 Angka | 80 Angka | Rp556.197.000 | 81 Angka | Rp641.466.500 | 82 Angka | Rp795.269.000 | 83 Angka | Rp976.385.000 | 84 Angka | Rp1.225.508.000 | 84 Angka | Rp4.194.825.500 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 95 Angka | 95 Angka | Rp41.187.500 | 95 Angka | Rp70.750.000 | 95 Angka | Rp81.000.000 | 95 Angka | Rp115.000.000 | 95 Angka | Rp174.500.000 | 95 Angka | Rp482.437.500 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 90 Persen | Rp125.436.000 | 91 Persen | Rp137.450.000 | 92 Persen | Rp168.000.000 | 93 Persen | Rp172.000.000 | 94 Persen | Rp255.000.000 | 94 Persen | Rp857.886.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100% | 100 Persen | Rp91.653.500 | 100 Persen | Rp101.653.500 | 100 Persen | Rp131.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp270.000.000 | 100 Persen | Rp734.307.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp5.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000,00 | 100 Persen | Rp21.000.000,00 | 100 Persen | Rp32.000.000,00 | 100 Persen | Rp63.000.000,00 | 100 Persen | Rp131.000.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON DLINGO |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON DLINGO |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 85 Angka | Rp564.587.500 | 86 Angka | Rp681.232.000 | 87 Angka | Rp830.000.000 | 88 Angka | Rp992.239.000 | 89 Angka | Rp1.537.926.000 | 89 Angka | Rp4.605.984.500 | KAPANEWON DLINGO |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 100 Persen | Rp31.995.000 | 100 Persen | Rp45.000.000 | 100 Persen | Rp90.000.000 | 100 Persen | Rp110.000.000 | 100 Persen | Rp145.000.000 | 100 Persen | Rp421.995.000 | KAPANEWON DLINGO |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 85 Persen | 100 Persen | Rp138.447.500 | 100 Persen | Rp170.000.000 | 100 Persen | Rp210.000.000 | 100 Persen | Rp240.000.000 | 100 Persen | Rp245.000.000 | 100 Persen | Rp1.003.447.500 | KAPANEWON DLINGO |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp104.587.000 | 100 Persen | Rp120.000.000 | 100 Persen | Rp120.000.000 | 100 Persen | Rp170.000.000 | 100 Persen | Rp180.000.000 | 100 Persen | Rp694.587.000 | KAPANEWON DLINGO |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.980.000 | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp38.710.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp139.690.000 | KAPANEWON DLINGO |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 80 Angka | Rp586.982.500 | 81 Angka | Rp633.681.000 | 81 Angka | Rp728.092.000 | 82 Angka | Rp864.621.000 | 82 Angka | Rp1.370.710.000 | 82 Angka | Rp4.184.086.500 | KAPANEWON IMOGIRI |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 95 Persen | Rp37.200.000 | 96 Persen | Rp55.000.000 | 97 Persen | Rp80.000.000 | 98 Persen | Rp125.000.000 | 100 Persen | Rp155.000.000 | 100 Persen | Rp452.200.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 95 Persen | Rp188.122.500 | 96 Persen | Rp210.000.000 | 97 Persen | Rp280.000.000 | 98 Persen | Rp341.000.000 | 100 Persen | Rp390.000.000 | 100 Persen | Rp1.409.122.500 | KAPANEWON IMOGIRI |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 95 Persen | Rp49.750.000 | 96 Persen | Rp130.000.000 | 97 Persen | Rp160.000.000 | 98 Persen | Rp180.000.000 | 100 Persen | Rp205.000.000 | 100 Persen | Rp724.750.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp18.600.000 | 100 Persen | Rp50.000.000 | 100 Persen | Rp93.000.000 | 100 Persen | Rp100.000.000 | 100 Persen | Rp110.000.000 | 100 Persen | Rp371.600.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON JETIS |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON JETIS |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 80 Angka | Rp577.192.500 | 81 Angka | Rp663.568.500 | 81 Angka | Rp895.779.500 | 82 Angka | Rp1.152.411.500 | 82 Angka | Rp1.722.260.500 | 82 Angka | Rp5.011.212.500 | KAPANEWON JETIS |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 91 Persen | Rp25.475.000 | 92 Persen | Rp28.187.500 | 93 Persen | Rp28.187.500 | 94 Persen | Rp28.187.500 | 94 Persen | Rp28.187.500 | 94 Persen | Rp138.225.000 | KAPANEWON JETIS |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 92 Persen | Rp130.585.000 | 93 Persen | Rp161.266.500 | 94 Persen | Rp161.266.500 | 95 Persen | Rp161.266.500 | 95 Persen | Rp161.266.500 | 95 Persen | Rp775.651.000 | KAPANEWON JETIS |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp119.087.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp651.137.500 | KAPANEWON JETIS |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp15.000.000 | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp36.000.000 | KAPANEWON JETIS |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON KRETEK |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON KRETEK |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,16 Angka | 80 Angka | Rp623.496.000 | 81 Angka | Rp520.847.000 | 81 Angka | Rp634.537.000 | 82 Angka | Rp840.830.000 | 82 Angka | Rp985.535.000 | 84 Angka | Rp3.605.245.000 | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 90 Persen | Rp56.700.000 | 90 Persen | Rp100.000.000 | 91 Persen | Rp104.000.000 | 91 Persen | Rp108.000.000 | 92 Persen | Rp250.000.000 | 92 Persen | Rp618.700.000 | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 80 Persen | Rp135.000.000 | 82 Persen | Rp173.000.000 | 83 Persen | Rp217.000.000 | 85 Persen | Rp229.000.000 | 87 Persen | Rp341.000.000 | 87 Persen | Rp1.095.000.000 | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 95 Persen | 87 Persen | Rp73.000.000 | 88 Persen | Rp135.000.000 | 89 Persen | Rp197.000.000 | 90 Persen | Rp206.000.000 | 92 Persen | Rp315.000.000 | 92 Persen | Rp926.000.000 | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp4.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp16.000.000 | 100 Persen | Rp18.000.000 | 100 Persen | Rp50.000.000 | 100 Persen | Rp98.000.000 | KAPANEWON KRETEK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON KASIHAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON KASIHAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 85 Angka | Rp624.412.800 | 86 Angka | Rp755.586.439 | 87 Angka | Rp900.321.527 | 88 Angka | Rp983.380.527 | 89 Angka | Rp1.310.023.712 | 89 Angka | Rp4.573.725.005 | KAPANEWON KASIHAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 100 Persen | Rp60.147.000 | 100 Persen | Rp61.681.100 | 100 Persen | Rp84.569.320 | 100 Persen | Rp144.569.320 | 100 Persen | Rp214.820.257 | 100 Persen | Rp565.786.997 | KAPANEWON KASIHAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 90 Persen | Rp98.440.367 | 90 Persen | Rp111.462.477 | 90 Persen | Rp134.306.972 | 90 Persen | Rp194.306.972 | 90 Persen | Rp274.966.087 | 90 Persen | Rp813.482.875 | KAPANEWON KASIHAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 90 Persen | 90 Persen | Rp40.146.000 | 90 Persen | Rp35.679.800 | 90 Persen | Rp73.367.760 | 90 Persen | Rp103.367.760 | 90 Persen | Rp164.198.151 | 90 Persen | Rp416.759.471 | KAPANEWON KASIHAN |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp46.777.833 | 100 Persen | Rp89.301.184 | 100 Persen | Rp117.713.421 | 100 Persen | Rp147.713.421 | 100 Persen | Rp215.064.793 | 100 Persen | Rp616.570.652 | KAPANEWON KASIHAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PANDAK |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PANDAK |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 80 Angka | Rp503.750.000 | 81 Angka | Rp595.188.000 | 82 Angka | Rp807.961.000 | 83 Angka | Rp989.991.000 | 83 Angka | Rp1.474.032.000 | 83 Angka | Rp4.370.922.000 | KAPANEWON PANDAK |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 89 Persen | 90 Persen | Rp32.650.000 | 91 Persen | Rp37.900.000 | 92 Persen | Rp46.250.000 | 93 Persen | Rp66.600.000 | 94 Persen | Rp81.500.000 | 94 Persen | Rp264.900.000 | KAPANEWON PANDAK |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 82 Persen | Rp179.895.000 | 84 Persen | Rp224.935.000 | 86 Persen | Rp238.110.000 | 88 Persen | Rp266.950.000 | 88 Persen | Rp303.500.000 | 88 Persen | Rp1.213.390.000 | KAPANEWON PANDAK |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 82 Persen | 82 Persen | Rp94.850.000 | 84 Persen | Rp134.850.000 | 86 Persen | Rp134.850.000 | 88 Persen | Rp149.000.000 | 88 Persen | Rp184.850.000 | 88 Persen | Rp698.400.000 | KAPANEWON PANDAK |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp6.310.000 | 100 Persen | Rp8.400.000 | 100 Persen | Rp18.400.000 | 100 Persen | Rp22.500.000 | 100 Persen | Rp26.750.000 | 100 Persen | Rp82.360.000 | KAPANEWON PANDAK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 95 Persen | Rp45.300.000 | 95 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PUNDONG |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 95 Persen | Rp50.000.000 | 95 Persen | Rp50.000.000 | 95 Persen | Rp50.000.000 | 95 Persen | Rp50.000.000 | 95 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PUNDONG |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 persen | Rp399.541.000 | 86 persen | Rp525.870.520 | 88 persen | Rp728.127.745 | 89 persen | Rp953.350.684 | 90 persen | Rp1.479.373.976 | 90 persen | Rp4.086.263.925 | KAPANEWON PUNDONG |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 persen | Rp32.012.500 | 92 persen | Rp29.974.875 | 93 persen | Rp31.473.619 | 94 persen | Rp33.047.299 | 95 persen | Rp34.699.664 | 95 persen | Rp161.207.957 | KAPANEWON PUNDONG |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 80 persen | Rp210.794.000 | 82 persen | Rp215.638.605 | 83 persen | Rp226.420.535 | 85 persen | Rp237.741.712 | 86 persen | Rp249.628.640 | 86 persen | Rp1.140.223.492 | KAPANEWON PUNDONG |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 87 persen | Rp169.492.500 | 88 persen | Rp169.916.250 | 89 persen | Rp178.412.063 | 90 persen | Rp187.332.666 | 91 persen | Rp196.699.299 | 91 persen | Rp901.852.778 | KAPANEWON PUNDONG |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp4.790.000 | 100 persen | Rp14.925.750 | 100 Persen | Rp25.672.038 | 100 Persen | Rp16.455.639 | 100 Persen | Rp17.278.421 | 100 Persen | Rp79.121.848 | KAPANEWON PUNDONG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PLERET |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PLERET |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 80 Angka | Rp549.024.000 | 80 Angka | Rp621.299.000 | 81 Angka | Rp770.338.000 | 81 Angka | Rp869.984.000 | 82 Angka | Rp1.424.155.000 | 82 Angka | Rp4.234.800.000 | KAPANEWON PLERET |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 Persen | Rp38.992.500 | 90 Persen | Rp51.500.000 | 95 Persen | Rp72.000.000 | 95 Persen | Rp119.500.000 | 100 Persen | Rp110.000.000 | 100 Persen | Rp391.992.500 | KAPANEWON PLERET |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 90 Persen | Rp126.387.500 | 90 Persen | Rp151.000.000 | 95 Persen | Rp180.500.000 | 95 Persen | Rp232.000.000 | 100 Persen | Rp240.000.000 | 100 Persen | Rp929.887.500 | KAPANEWON PLERET |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 90 Persen | Rp115.475.000 | 90 Persen | Rp135.000.000 | 95 Persen | Rp160.000.000 | 95 Persen | Rp185.000.000 | 100 Persen | Rp190.000.000 | 100 Persen | Rp785.475.000 | KAPANEWON PLERET |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp8.015.000 | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp55.000.000 | 100 Persen | Rp60.000.000 | 100 Persen | Rp178.015.000 | KAPANEWON PLERET |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 82 Angka | Rp525.235.000 | 83 Angka | Rp614.882.000 | 84 Angka | Rp766.327.000 | 85 Angka | Rp955.906.000 | 86 Angka | Rp1.364.391.000 | 86 Angka | Rp4.226.741.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 92 Persen | Rp42.072.500 | 93 Persen | Rp75.000.000 | 94 Persen | Rp115.000.000 | 95 Persen | Rp125.000.000 | 96 Persen | Rp165.000.000 | 96 Persen | Rp522.072.500 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 100 Persen | Rp124.932.500 | 100 Persen | Rp136.400.000 | 100 Persen | Rp155.000.000 | 100 Persen | Rp177.950.000 | 100 Persen | Rp235.750.000 | 100 Persen | Rp830.032.500 | KAPANEWON PIYUNGAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp135.000.000 | 100 Persen | Rp150.000.000 | 100 Persen | Rp165.000.000 | 100 Persen | Rp185.000.000 | 100 Persen | Rp245.000.000 | 100 Persen | Rp880.000.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp8.015.000 | 100 Persen | Rp17.500.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp40.000.000 | 100 Persen | Rp45.000.000 | 100 Persen | Rp145.515.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 80 Angka | Rp626.138.500 | 81 Angka | Rp730.288.000 | 81 Angka | Rp806.700.000 | 82 Angka | Rp875.900.000 | 82 Angka | Rp1.114.100.000 | 82 Angka | Rp4.153.126.500 | KAPANEWON PAJANGAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 88 Persen | Rp36.387.500 | 89 Persen | Rp55.000.000 | 90 Persen | Rp95.464.000 | 91 Persen | Rp150.000.000 | 92 Persen | Rp255.500.000 | 92 Persen | Rp592.351.500 | KAPANEWON PAJANGAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 88 Persen | Rp74.797.000 | 89 Persen | Rp87.500.000 | 90 Persen | Rp125.000.000 | 91 Persen | Rp185.000.000 | 92 Persen | Rp281.211.000 | 92 Persen | Rp753.508.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 88 Persen | Rp10.210.000 | 89 Persen | Rp16.000.000 | 90 Persen | Rp73.000.000 | 91 Persen | Rp120.000.000 | 92 Persen | Rp194.000.000 | 92 Persen | Rp413.210.000 | KAPANEWON PAJANGAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp97.249.000 | 100 Persen | Rp100.000.000 | 100 Persen | Rp130.000.000 | 100 Persen | Rp145.498.000 | 100 Persen | Rp200.000.000 | 100 Persen | Rp672.747.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SANDEN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SANDEN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 100 Angka | 80 Angka | Rp505.086.000 | 81 Angka | Rp527.633.400 | 82 Angka | Rp754.492.400 | 83 Angka | Rp985.079.400 | 85 Angka | Rp1.523.654.400 | 85 Angka | Rp4.295.945.600 | KAPANEWON SANDEN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 angka | Rp55.797.500 | 91 Angka | Rp73.000.000 | 92 Angka | Rp74.000.000 | 93 Angka | Rp75.000.000 | 94 Angka | Rp76.000.000 | 94 Angka | Rp353.797.500 | KAPANEWON SANDEN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 80 Persen | Rp147.554.500 | 81 Persen | Rp166.207.600 | 82 Persen | Rp167.207.600 | 83 Persen | Rp168.207.600 | 84 Persen | Rp169.207.600 | 84 Persen | Rp818.384.900 | KAPANEWON SANDEN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 87 Persen | Rp98.000.000 | 88 Persen | Rp111.000.000 | 89 Persen | Rp112.000.000 | 90 Persen | Rp113.000.000 | 91 Persen | Rp114.000.000 | 91 Persen | Rp548.000.000 | KAPANEWON SANDEN |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp13.000.000 | 100 Persen | Rp66.000.000 | 100 Persen | Rp67.000.000 | 100 Persen | Rp68.000.000 | 100 Persen | Rp69.000.000 | 100 Persen | Rp283.000.000 | KAPANEWON SANDEN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp481.662.000 | 86 Angka | Rp585.850.000 | 87 Angka | Rp798.206.000 | 88 Angka | Rp1.012.352.000 | 89 Angka | Rp1.530.821.000 | 89 Angka | Rp4.408.891.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 90 Persen | Rp44.500.000 | 91 Persen | Rp46.750.000 | 92 Persen | Rp49.000.000 | 93 Persen | Rp51.500.000 | 94 Persen | Rp54.000.000 | 94 Persen | Rp245.750.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 95 Persen | 95 Persen | Rp146.875.000 | 95 Persen | Rp155.000.000 | 96 Persen | Rp162.750.000 | 97 Persen | Rp171.000.000 | 98 Persen | Rp180.000.000 | 98 Persen | Rp815.625.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 95 Persen | 95 Persen | Rp132.125.000 | 95 Persen | Rp138.750.000 | 96 Persen | Rp145.000.000 | 97 Persen | Rp152.250.000 | 98 Persen | Rp160.000.000 | 98 Persen | Rp728.125.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp9.622.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.500.000 | 100 Persen | Rp11.000.000 | 100 Persen | Rp11.550.000 | 100 Persen | Rp52.672.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SEWON |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SEWON |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 90 angka | 90 Angka | Rp661.307.388 | 90 Angka | Rp677.434.308 | 91 Angka | Rp818.371.308 | 91 Angka | Rp958.371.308 | 92 Angka | Rp1.378.865.268 | 92 Angka | Rp4.494.349.580 | KAPANEWON SEWON |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 88 Persen | Rp58.215.000 | 89 Persen | Rp60.215.000 | 90 Persen | Rp60.215.000 | 91 Persen | Rp63.351.000 | 92 Persen | Rp63.351.000 | 92 Persen | Rp305.347.000 | KAPANEWON SEWON |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 88 Persen | Rp57.620.112 | 89 Persen | Rp60.535.000 | 90 Persen | Rp120.535.000 | 91 Persen | Rp210.535.000 | 92 Persen | Rp310.164.040 | 92 Persen | Rp759.389.152 | KAPANEWON SEWON |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp88.357.500 | 100 Persen | Rp164.154.692 | 100 Persen | Rp194.154.692 | 100 Persen | Rp220.194.692 | 100 Persen | Rp276.154.692 | 100 Persen | Rp943.016.268 | KAPANEWON SEWON |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.350.000 | 100 Persen | Rp76.390.000 | 100 Persen | Rp98.516.000 | 100 Persen | Rp98.516.000 | 100 Persen | Rp119.556.000 | 100 Persen | Rp403.328.000 | KAPANEWON SEWON |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SEDAYU |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp598.889.000 | 86 Angka | Rp626.997.000 | 87 Angka | Rp856.620.000 | 88 Angka | Rp1.110.913.000 | 89 Angka | Rp1.675.020.000 | 89 Angka | Rp4.868.439.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| 7 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 Persen | Rp25.050.000 | 91 Persen | Rp40.900.000 | 92 Persen | Rp40.900.000 | 93 Persen | Rp40.900.000 | 94 Persen | Rp40.900.000 | 94 Persen | Rp188.650.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| 7 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 100 Persen | Rp65.400.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp369.000.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| 7 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp145.850.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp343.850.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| 7 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp6.000.000 | 100 Persen | Rp188.000.000 | 100 Persen | Rp198.000.000 | 100 Persen | Rp188.000.000 | 100 Persen | Rp188.000.000 | 100 Persen | Rp768.000.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp605.041.500 | 86 Angka | Rp707.071.700 | 87 Angka | Rp901.750.000 | 88 Angka | Rp1.105.000.000 | 89 Angka | Rp1.567.000.000 | 89 Angka | Rp4.885.863.200 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 91 Persen | Rp39.500.000 | 92 Persen | Rp45.000.000 | 93 Persen | Rp60.000.000 | 94 Persen | Rp85.000.000 | 95 Persen | Rp115.000.000 | 95 Persen | Rp344.500.000 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 92 Persen | Rp114.962.500 | 93 Persen | Rp124.962.500 | 94 Persen | Rp144.962.500 | 95 Persen | Rp163.434.500 | 96 Persen | Rp214.484.500 | 96 Persen | Rp762.806.500 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 95 Persen | Rp129.225.000 | 95 Persen | Rp147.241.800 | 96 Persen | Rp167.241.800 | 97 Persen | Rp177.241.800 | 98 Persen | Rp225.650.000 | 98 Persen | Rp846.600.400 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.600.000 | 100 Persen | Rp11.750.000 | 100 Persen | Rp14.501.700 | 100 Persen | Rp16.255.700 | 100 Persen | Rp20.366.500 | 100 Persen | Rp73.473.900 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | | | Jumlah Misi 1 | | | | Rp1.256.108.874.180 | | Rp1.276.275.482.000 | | Rp1.297.013.284.000 | | Rp1.311.735.592.000 | | Rp1.349.904.046.000 | | Rp6.491.037.278.180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Misi 2: Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 80,02 | 80,63 | | 81,09 | | 81,54 | | 81,99 | | 82,44 | | 82,44 | | DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA |
| | | | Sasaran Daerah: Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | Umur Harapan Hidup | 73,90 | 74,01 | | 74,11 | | 74,20 | | 74,29 | | 74,39 | | 74,39 | | DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 angka | 82,15 angka | Rp140.000.000.000 | 82,50 angka | Rp140.126.643.000 | 82,90 angka | Rp140.242.452.000 | 83,10 angka | Rp140.347.144.000 | 83,50 angka | Rp143.866.547.000 | 83,50 angka | Rp704.582.786.000 | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Capaian SPM Rumah Sakit | 77,50 Persen | 80 Persen | | 80,50 Persen | | 81,00 Persen | | 81,50 Persen | | 82,00 Persen | | 82,00 Persen | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Bed Occupation Rate (BOR) | 57,29 Persen | - | Rp0 | 67 Persen | Rp55.000.000 | 69 Persen | Rp59.950.000 | 71 Persen | Rp64.746.000 | 73 Persen | Rp69.279.000 | 73 Persen | Rp248.975.000 | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Turn Over Interval (TOI) | 2,69 hari | - | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Bed Turn Over (BTO) | 46,29 kali | - | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.733.836.320 | 84,15 Angka | Rp2.750.930.000 | 84,30 Angka | Rp2.763.020.000 | 84,40 Angka | Rp2.776.600.000 | 84,50 Angka | Rp2.798.350.000 | 84,50 Angka | Rp13.822.736.320 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 indeks | 1 indeks | Rp21.022.955.117 | 1 indeks | Rp24.842.065.331 | 1 indeks | Rp22.369.095.882 | 1 indeks | Rp26.822.863.349 | 1 indeks | Rp22.196.026.290 | 1 indeks | Rp117.253.005.969 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | 1 indeks | 1 indeks | Rp352.754.220 | 1 indeks | Rp354.000.000 | 1 indeks | Rp356.000.000 | 1 indeks | Rp358.000.000 | 1 indeks | Rp360.000.000 | 1 indeks | Rp1.780.754.220 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 4 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 indeks | 1 indeks | Rp826.883.000 | 1 indeks | Rp831.000.000 | 1 indeks | Rp837.000.000 | 1 indeks | Rp842.850.000 | 1 indeks | Rp851.000.000 | 1 indeks | Rp4.188.733.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan Desa Siaga purnama mandiri | 36 Kalurahan | 40 Kalurahan | Rp943.664.600 | 45 Kalurahan | Rp957.000.000 | 50 Kalurahan | Rp948.000.000 | 55 Kalurahan | Rp950.500.000 | 60 Kalurahan | Rp953.000.000 | 60 Kalurahan | Rp4.752.164.600 | DINAS KESEHATAN |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 25,93 Persen | 33 Persen | Rp600.000.000 | 40 Persen | Rp4.044.050.000 | 48 Persen | Rp1.865.000.000 | 55 Persen | Rp2.035.000.000 | 62 Persen | Rp2.205.000.000 | 62 Persen | Rp10.749.050.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | 180.645.120 | 84,15 Angka | Rp185.500.000 | 84,30 Angka | Rp190.000.000 | 84,40 Angka | Rp194.000.000 | 84,50 Angka | Rp198.000.000 | 84,50 Angka | Rp948.145.120 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pelayanan Jamkesda | 100 Persen | 100 persen | 37.128.755.263 | 100 persen | Rp37.129.000.000 | 100 persen | Rp37.130.000.000 | 100 persen | Rp37.131.000.000 | 100 persen | Rp37.132.000.000 | 100 persen | Rp185.650.755.263 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | 176.881.680 | 100 Persen | Rp182.000.000 | 100 Persen | Rp186.000.000 | 100 Persen | Rp190.650.000 | 100 Persen | Rp194.000.000 | 100 Persen | Rp929.531.680 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pelayanan Labkesda | 100 persen | 100 persen | 500.000.000 | 100 persen | Rp1.000.000.000 | 100 persen | Rp500.000.000 | 100 persen | Rp500.000.000 | 100 persen | Rp500.000.000 | 100 persen | Rp3.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | 2.325.448.000 | 84,15 Angka | Rp1.755.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.765.000.000 | 84,40 Angka | Rp1.775.000.000 | 84,50 Angka | Rp1.785.000.000 | 84,50 Angka | Rp9.405.448.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.461.858.400 | 84,15 Angka | Rp2.300.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.380.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.475.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.580.000.000 | 84,50 Angka | Rp12.196.858.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.405.268.800 | 84,15 Angka | Rp2.526.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.653.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.786.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.925.000.000 | 84,50 Angka | Rp13.295.268.800 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp768.000.000 | 1 indeks | Rp785.000.000 | 1 indeks | Rp3.771.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.920.358.400 | 84,15 Angka | Rp3.005.000.000 | 84,30 Angka | Rp3.110.000.000 | 84,40 Angka | Rp3.215.000.000 | 84,50 Angka | Rp3.320.000.000 | 84,50 Angka | Rp15.570.358.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.850.678.294 | 84,15 Angka | Rp2.659.182.000 | 84,30 Angka | Rp2.715.265.000 | 84,40 Angka | Rp2.772.370.000 | 84,50 Angka | Rp2.830.517.000 | 84,50 Angka | Rp13.828.012.294 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp706.720.400 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp761.000.000 | 1 indeks | Rp2.901.417.064 | 1 indeks | Rp5.837.137.464 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.949.358.400 | 84,15 Angka | Rp1.990.980.000 | 84,30 Angka | Rp2.033.699.600 | 84,40 Angka | Rp2.077.173.592 | 84,50 Angka | Rp2.121.417.064 | 84,50 Angka | Rp10.172.628.656 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.588.749.800 | 84,15 Angka | Rp1.624.495.869 | 84,30 Angka | Rp1.645.190.828 | 84,40 Angka | Rp1.666.041.736 | 84,50 Angka | Rp1.687.053.163 | 84,50 Angka | Rp8.211.531.396 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.216.541.116 | 84,15 Angka | Rp2.275.520.964 | 84,30 Angka | Rp2.336.033.988 | 84,40 Angka | Rp2.397.934.838 | 84,50 Angka | Rp2.461.258.209 | 84,50 Angka | Rp11.687.289.115 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.466.089.600 | 84,15 Angka | Rp695.000.000 | 84,30 Angka | Rp705.000.000 | 84,40 Angka | Rp715.000.000 | 84,50 Angka | Rp725.000.000 | 84,50 Angka | Rp4.306.089.600 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.075.268.800 | 84,15 Angka | Rp2.130.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.186.250.000 | 84,40 Angka | Rp2.243.781.250 | 84,50 Angka | Rp2.302.625.781 | 84,50 Angka | Rp10.937.925.831 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp866.000.000 | 1 indeks | Rp870.000.000 | 1 indeks | Rp872.000.000 | 1 indeks | Rp875.000.000 | 1 indeks | Rp4.328.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.360.179.200 | 84,15 Angka | Rp1.396.600.000 | 84,30 Angka | Rp1.417.700.000 | 84,40 Angka | Rp1.437.600.000 | 84,50 Angka | Rp1.456.300.000 | 84,50 Angka | Rp7.068.379.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp705.832.000 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp755.000.000 | 1 indeks | Rp3.678.832.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.272.316.420 | 84,15 Angka | Rp1.655.600.000 | 84,30 Angka | Rp1.676.356.000 | 84,40 Angka | Rp1.697.269.560 | 84,50 Angka | Rp1.718.342.255 | 84,50 Angka | Rp9.019.884.235 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.245.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.974.931.725 | 84,15 Angka | Rp2.077.334.231 | 84,30 Angka | Rp2.184.700.942 | 84,40 Angka | Rp2.189.700.942 | 84,50 Angka | Rp2.302.185.989 | 84,50 Angka | Rp10.728.853.829 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp745.000.000 | 1 indeks | Rp765.000.000 | 1 indeks | Rp770.000.000 | 1 indeks | Rp775.000.000 | 1 indeks | Rp780.000.000 | 1 indeks | Rp3.835.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.705.952.000 | 84,15 Angka | Rp1.660.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.695.600.000 | 84,40 Angka | Rp1.731.812.000 | 84,50 Angka | Rp145.000.000 | 84,50 Angka | Rp6.938.364.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp650.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp687.000.000 | 1 indeks | Rp3.362.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.280.789.600 | 84,15 Angka | Rp1.314.168.000 | 84,30 Angka | Rp1.333.699.000 | 84,40 Angka | Rp1.352.994.000 | 84,50 Angka | Rp1.372.461.000 | 84,50 Angka | Rp6.654.111.600 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.245.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.860.862.400 | 84,15 Angka | Rp2.865.504.000 | 84,30 Angka | Rp2.970.504.000 | 84,40 Angka | Rp3.075.504.000 | 84,50 Angka | Rp3.180.504.000 | 84,50 Angka | Rp14.952.878.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp700.000.000 | 1 indeks | Rp710.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.520.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.988.358.400 | 84,15 Angka | Rp2.422.950.000 | 84,30 Angka | Rp2.451.130.000 | 84,40 Angka | Rp2.479.540.000 | 84,50 Angka | Rp2.508.180.000 | 84,50 Angka | Rp12.850.158.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp877.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.297.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.384.037.982 | 84,15 Angka | Rp712.000.000 | 84,30 Angka | Rp734.000.000 | 84,40 Angka | Rp755.000.000 | 84,50 Angka | Rp765.000.000 | 84,50 Angka | Rp5.350.037.982 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp682.000.000 | 1 indeks | Rp699.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.481.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.626.068.800 | 84,15 Angka | Rp1.640.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.650.000.000 | 84,40 Angka | Rp1.660.000.000 | 84,50 Angka | Rp1.670.000.000 | 84,50 Angka | Rp8.246.068.800 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp682.000.000 | 1 indeks | Rp699.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.481.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp777.179.200 | 84,15 Angka | Rp798.000.000 | 84,30 Angka | Rp810.000.000 | 84,40 Angka | Rp820.000.000 | 84,50 Angka | Rp835.000.000 | 84,50 Angka | Rp4.040.179.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp755.000.000 | 1 indeks | Rp765.000.000 | 1 indeks | Rp3.738.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.903.940.063 | 84,15 Angka | Rp2.720.040.000 | 84,30 Angka | Rp2.757.920.000 | 84,40 Angka | Rp2.786.920.000 | 84,50 Angka | Rp2.806.800.000 | 84,50 Angka | Rp13.975.620.063 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp803.844.080 | 1 indeks | Rp810.000.000 | 1 indeks | Rp815.000.000 | 1 indeks | Rp820.000.000 | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp4.073.844.080 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.005.768.800 | 84,15 Angka | Rp1.998.780.605 | 84,30 Angka | Rp2.099.719.635 | 84,40 Angka | Rp2.205.455.616 | 84,50 Angka | Rp2.316.228.396 | 84,50 Angka | Rp10.625.953.052 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp861.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.246.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.930.448.000 | 84,15 Angka | Rp2.940.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.950.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.960.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.970.000.000 | 84,50 Angka | Rp14.750.448.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp695.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp730.000.000 | 1 indeks | Rp3.585.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.800.979.200 | 84,15 Angka | Rp1.667.600.000 | 84,30 Angka | Rp1.674.600.000 | 84,40 Angka | Rp1.681.600.000 | 84,50 Angka | Rp1.686.600.000 | 84,50 Angka | Rp8.511.379.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp867.000.000 | 1 indeks | Rp4.247.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.651.878.200 | 84,15 Angka | Rp2.657.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.663.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.669.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.675.000.000 | 84,50 Angka | Rp13.315.878.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.818.858.400 | 84,15 Angka | Rp1.634.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.644.000.000 | 84,40 Angka | Rp1.654.000.000 | 84,50 Angka | Rp1.664.000.000 | 84,50 Angka | Rp8.414.858.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.455.179.200 | 84,15 Angka | Rp1.481.075.000 | 84,30 Angka | Rp1.507.466.125 | 84,40 Angka | Rp1.534.178.117 | 84,50 Angka | Rp1.561.215.789 | 84,50 Angka | Rp7.539.114.231 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 0 2 | 0 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan | Angka Harapan Lama Sekolah | 15,19 | 15,22 | | 15,25 | | 15,26 | | 15,3 | | 15,32 | | 15,32 | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 angka | 82 Angka | Rp5.009.338.342 | 82 Angka | Rp5.233.481.342 | 82 Angka | Rp5.533.481.342 | 82 Angka | Rp5.833.481.342 | 82 Angka | Rp6.921.161.342 | 82 Angka | Rp28.530.943.710 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase capaian SPM Pendidikan | n/a | 100 Persen | Rp91.970.069.372 | 100 Persen | Rp92.470.069.372 | 100 Persen | Rp92.922.332.372 | 100 Persen | Rp93.342.756.372 | 100 Persen | Rp99.342.756.372 | 100 Persen | Rp470.047.983.860 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | n/a | 66 Persen | Rp217.410.642.120 | 70 Persen | Rp217.710.642.120 | 75 Persen | Rp218.010.642.120 | 79 Persen | Rp218.310.642.120 | 83 Persen | Rp220.810.642.120 | 83 Persen | Rp1.092.253.210.600 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya | 3,88 Persen | 4,18 Persen | Rp800.000.000 | 4,48 Persen | Rp3.175.000.000 | 4,78 Persen | Rp4.390.000.000 | 5,07 Persen | Rp2.390.000.000 | 5,37 Persen | Rp2.590.000.000 | 5,37 Persen | Rp13.345.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 80 Angka | Rp831.968.820 | 80 Angka | Rp850.000.000 | 80 Angka | Rp900.000.000 | 80 Angka | Rp950.000.000 | 80 Angka | Rp1.000.000.000 | 80 Angka | Rp4.531.968.820 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 2 3 | 0 2 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 7,61 Persen | 10,08 Persen | Rp416.798.700 | 12,55 Persen | Rp527.804.000 | 14,02 Persen | Rp2.050.000.000 | 17,48 Persen | Rp600.000.000 | 19,95 Persen | Rp1.000.000.000 | 19,95 Persen | Rp4.594.602.700 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 9 | 0 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi Olahraga | n/a | 55 Medali | Rp8.350.081.966 | 65 Medali | Rp8.650.081.966 | 80 Medali | Rp8.900.081.966 | 100 Medali | Rp9.250.081.966 | 130 Medali | Rp11.750.081.966 | 130 Medali | Rp46.900.409.830 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 9 | 0 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | n/a | 80 Persen | Rp1.445.340.480 | 81 Persen | Rp1.745.340.480 | 82 Persen | Rp1.995.340.480 | 83 Persen | Rp2.345.340.480 | 84 Persen | Rp4.845.340.480 | 84 Persen | Rp12.376.702.400 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 1 9 | 0 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Organisasi Pramuka yang aktif | n/a | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp3.215.053.600 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran Daerah: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | Desa /Kalurahan Pamor Budaya | 3 | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 12 | | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)<br><br>didukung oleh :<br>DINAS PARIWISATA<br><br>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 80,98 Angka | Rp1.036.350.000 | 81 Angka | Rp1.093.102.000 | 81,3 Angka | Rp1.152.071.001 | 81,5 Angka | Rp1.213.332.240 | 81,6 Angka | Rp1.656.258.364 | 81,6 Angka | Rp6.151.113.605 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | 54 Persen | 61,03 Persen | Rp1.425.000.000 | 68,38 Persen | Rp3.936.386.000 | 75,74 Persen | Rp6.862.053.999 | 83,08 Persen | Rp5.733.225.960 | 90,44 Persen | Rp6.077.448.556 | 90,44 Persen | Rp24.034.114.515 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | | | | Bahasa Sastra yang dilestarikan | n/a | 18 Pelestarian | Rp3.300.000.000 | 46 Pelestarian | Rp6.879.050.000 | 76 Pelestarian | Rp7.770.950.000 | 104 Pelestarian | Rp7.177.450.500 | 132 Pelestarian | Rp7.756.495.550 | 132 Pelestarian | Rp32.883.946.050 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | | | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | n/a | 219 Pelestarian | Rp10.125.000.000 | 454 Pelestarian | Rp15.783.924.000 | 691 Pelestarian | Rp16.251.193.000 | 953 Pelestarian | Rp18.324.602.300 | 1215 Pelestarian | Rp28.641.062.530 | 1215 Pelestarian | Rp89.125.781.830 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya | Indeks Rasa Aman | n/a | 2,70 | | 2,73 | | 2,76 | | 2,79 | | 2,81 | | 2,81 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | Sasaran Daerah:Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis | Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | n/a | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 78 Angka | 79 Angka | Rp2.952.127.000 | 80 Angka | Rp3.063.643.229 | 81 Angka | Rp3.370.007.552 | 82 Angka | Rp3.437.407.703 | 83 Angka | Rp3.781.148.473 | 83 Angka | Rp16.604.333.956 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 5 | 0 2 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 Persen | 100 Persen | Rp2.384.412.000 | 100 Persen | Rp2.479.788.771 | 100 Persen | Rp4.887.460.448 | 100 Persen | Rp2.541.472.297 | 100 Persen | Rp3.436.809.527 | 100 Persen | Rp15.729.943.044 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga | 27,22 Persen | 29,37 Persen | Rp600.000.000 | 45,44 Persen | Rp1.500.000.000 | 66,88 Persen | Rp2.500.000.000 | 88,31 Persen | Rp3.500.000.000 | 100 Persen | Rp1.500.000.000 | 100 Persen | Rp9.600.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 1 | 0 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi | 37,33 Persen | 57,33 Persen | Rp2.229.678.400 | 84 Persen | Rp2.849.967.990 | 100 Persen | Rp33.599.967.990 | 100 Persen | Rp2.400.000.000 | 100 Persen | Rp2.500.000.000 | 100 Persen | Rp43.579.614.380 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp522.514.010 | 86 Angka | Rp808.737.010 | 87 Angka | Rp1.182.745.010 | 88 Angka | Rp800.000.000 | 89 Angka | Rp950.000.000 | 89 Angka | Rp4.263.996.030 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 0 1 | 0 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan | 95 Persen | 95 Persen | Rp341.009.000 | 100 Persen | Rp391.000.000 | 100 Persen | Rp416.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp450.000.000 | 100 Persen | Rp1.998.009.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 0 1 | 0 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan Pembinaan Ormas | 10,36 Persen | 18 Persen | Rp61.000.000 | 23 Persen | Rp126.000.000 | 28 Persen | Rp226.000.000 | 33 Persen | Rp125.000.000 | 37 Persen | Rp168.049.000 | 37 Persen | Rp706.049.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 0 1 | 0 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama | 100 Persen | 100 Persen | Rp360.293.590 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp1.960.293.590 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD | 100 Persen | 100 Persen | Rp222.267.000 | 100 Persen | Rp447.267.000 | 100 Persen | Rp547.267.000 | 100 Persen | Rp409.446.000 | 100 Persen | Rp450.000.000 | 100 Persen | Rp2.076.247.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Lokasi Yang di prakondisi | n/a | - | Rp0 | 16,67 Persen | Rp417.000.000 | 25 Persen | Rp575.000.000 | 25 Persen | Rp645.000.000 | 33 Persen | Rp740.000.000 | 100 Persen | Rp2.377.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | Jumlah Misi 2 | | | | Rp633.154.020.520 | | Rp655.941.315.000 | | Rp696.175.958.000 | | Rp667.901.479.000 | | Rp695.494.573.000 | | Rp3.348.667.345.520 | |
| | | | **Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tujuan: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 3,12 | 3,8 | | 3,97 | | 4,48 | | 4,83 | | 5,12 | | 5,12 | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN |
| | | | Sasaran Daerah:Terwujudnya pemerataan pendapatan | Rasio Gini | 0,370 | 0,360 | | 0,350 | | 0,325 | | 0,320 | | 0,310 | | 0,310 | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANDINAS PARIWISATADINAS KUKMP PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan | 30,67 Persen | 37,33 Persen | Rp235.000.000 | 42,67 Persen | Rp340.000.000 | 48 Persen | Rp400.000.000 | 53,33 Persen | Rp390.000.000 | 58,67 Persen | Rp450.000.000 | 58,67 Persen | Rp1.815.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 09 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik | n/a | 14,28 Persen | Rp2.900.000 | 28,57 Persen | Rp20.000.000 | 57,14 Persen | Rp20.000.000 | 85,71 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp30.000.000 | 100 Persen | Rp92.900.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 147,57 Persen | 149 Persen | Rp525.935.120 | 151 Persen | Rp1.276.750.000 | 153 Persen | Rp1.276.750.000 | 155 Persen | Rp1.276.750.000 | 157 Persen | Rp1.519.750.000 | 157 Persen | Rp5.875.935.120 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan | 24 Persen | 22,67 Persen | Rp80.687.000 | 21,33 Persen | Rp211.000.000 | 20 Persen | Rp211.000.000 | 18,67 Persen | Rp211.000.000 | 17,33 Persen | Rp325.000.000 | 17,33 Persen | Rp1.038.687.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 100 Persen | 100 Persen | Rp31.000.000 | 100 Persen | Rp61.000.000 | 100 Persen | Rp61.000.000 | 100 Persen | Rp61.000.000 | 100 Persen | Rp86.000.000 | 100 Persen | Rp300.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | | | | 100 Persen | Rp2.833.025.000 | | | | | | | 100 Persen | Rp2.833.025.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 84 Angka | Rp1.845.737.082 | 85 Angka | Rp2.576.729.802 | 85 Angka | Rp2.351.698.802 | 85 Angka | Rp2.230.167.802 | 85 Angka | Rp2.572.698.802 | 85 Angka | Rp11.577.032.290 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.585.571.950 | 100 Persen | Rp2.746.076.470 | 100 Persen | Rp3.146.076.470 | 100 Persen | Rp3.446.076.470 | 100 Persen | Rp4.196.951.470 | 100 Persen | Rp15.120.752.830 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Ketersediaan sarana peternakan | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.699.075.000 | 100 Persen | Rp922.125.000 | 100 Persen | Rp922.125.000 | 100 Persen | Rp922.125.000 | 100 Persen | Rp1.892.125.000,00 | 100 Persen | Rp6.357.575.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.941.072.488 | 100 Persen | Rp1.314.455.368 | 100 Persen | Rp1.314.455.368 | 100 Persen | Rp2.814.455.368 | 100 Persen | Rp1.578.210.368 | 100 Persen | Rp8.962.648.960 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Produksi Daging | 15.222 Ton | 15.326 Ton | | 15.588 Ton | | 15.713 ton | | 15.850 Ton | | 15.961 Ton | | 15.961 Ton | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | 100 Persen | 100 Persen | Rp70.000.000 | 100 Persen | Rp570.000.000 | 100 Persen | Rp570.000.000 | 100 Persen | Rp570.000.000 | 100 Persen | Rp595.000.000 | 100 Persen | Rp2.375.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | 100 Persen | 100 Persen | Rp2.700.000 | 100 Persen | Rp22.000.000 | 100 Persen | Rp22.000.000 | 100 Persen | Rp22.000.000 | 100 Persen | Rp32.000.000 | 100 Persen | Rp100.700.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,3 ton/ha | 6,31 ton/ha | Rp792.243.360 | 6,315 ton/ha | Rp1.028.323.360 | 6,32 ton/ha | Rp1.028.323.360 | 6,325 ton/ha | Rp1.028.323.360 | 6,33 ton/ha | Rp1.213.323.360 | 6,33 ton/ha | Rp5.090.536.800 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Kalurahan Bahari yang direvitalisasi | n/a | 0 | 0 | 20 Persen | 125.000.000 | 60 Persen | 250.000.000 | 80 Persen | 125.000.000 | 100 Persen | 125.000.000 | 100 Persen | Rp625.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 84 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp3.500.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan tangkap | 829 ton | 829 ton | Rp187.675.000 | 831 ton | Rp292.175.120,00 | 833 ton | Rp404.490.000,00 | 835 ton | Rp662.675.120,00 | 837 ton | Rp319.975.120,00 | 837 ton | Rp1.866.990.360 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi perikanan budidaya | 12.740 ton | 12.740 ton | Rp1.459.882.000 | 12.805 ton | Rp1.474.817.880,00 | 12.878 ton | Rp3.610.882.000,00 | 12.959 ton | Rp1.613.413.880,00 | 13.046 ton | Rp2.133.888.880,00 | 13.046 ton | Rp10.292.884.640 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | 5 Persen | 5 Persen | Rp3.900.000 | 5 Persen | Rp3.900.000,00 | 5 Persen | Rp53.900.000,00 | 5 Persen | Rp53.900.000,00 | 5 Persen | Rp79.900.000,00 | 5 Persen | Rp195.500.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase produksi perikanan yang diolah | 2 Persen | 2 Persen | Rp42.900.000 | 2 Persen | Rp162.900.000,00 | 2 Persen | Rp127.900.000,00 | 5 Persen | Rp156.900.000,00 | 5 Persen | Rp306.950.000,00 | 5 Persen | Rp797.550.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Desa Wisata | 32 Persen | 33,33 Persen | Rp1.000.000.000 | 34,67 Persen | Rp2.379.500.000 | 36 Persen | Rp1.475.000.000 | 37,33 Persen | Rp1.525.000.000 | 38,67 Persen | Rp1.760.000.000 | 93 Persen | Rp8.139.500.000 | DINAS PARIWISATA |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | n/a | Rp0 | 100 Persen | Rp735.000.000 | 100 Persen | Rp0 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | Rp1.635.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 80 Angka | Rp4.278.552.000 | 80 Angka | Rp4.570.540.000 | 82 Angka | Rp4.872.137.000 | 83 Angka | Rp5.183.648.000 | 84 Angka | Rp6.765.820.000 | 84 Angka | Rp25.670.697.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | n/a | 2,71 Persen | Rp2.902.000.000 | 3,13 Persen | Rp5.402.000.000 | 3,13 Persen | Rp3.602.000.000 | 3,13 Persen | Rp8.902.000.000 | 3,13 Persen | Rp7.902.000.000 | 3,13 Persen | Rp28.710.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | n/a | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp4.834.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 3 0 | 0 2 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 50 Persen | 51 Persen | Rp160.000.000 | 52 Persen | Rp168.000.000 | 53 Persen | Rp184.800.000 | 54 Persen | Rp194.044.000 | 55 Persen | Rp213.444.000 | 55 Persen | Rp920.284.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 3 0 | 0 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 1 Persen | 2 Persen | Rp6.070.923.713 | 3 Persen | Rp7.294.730.000 | 4 Persen | Rp6.623.334.000 | 5 Persen | Rp6.923.334.000 | 6 Persen | Rp8.200.000.000 | 6 Persen | Rp35.112.321.713 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 3 0 | 0 4 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) | 8 Persen | 7 Persen | Rp179.957.500 | 7 Persen | Rp188.955.375 | 6 Persen | Rp207.850.900 | 6 Persen | Rp218.243.400 | 5 Persen | Rp242.000.000 | 5 Persen | Rp1.037.007.175 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 3 0 | 0 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai ekspor | 83 juta US$ | 80 juta US$ | Rp654.020.000 | 90 juta US$ | Rp686.721.000 | 100 juta US$ | Rp755.393.100 | 110 juta US$ | Rp873.162.700 | 120 juta US$ | Rp1.200.000.000 | 500 juta US$ | Rp4.169.296.800 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 3 0 | 0 6 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 25 Persen | 27 Persen | Rp349.223.100 | 30 Persen | Rp384.145.000 | 32 Persen | Rp422.559.500 | 35 Persen | Rp443.687.400 | 40 Persen | Rp488.056.200 | 40 Persen | Rp2.087.671.200 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 3 0 | 0 7 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | 0 Persen | - | Rp0 | 10 Persen | Rp300.000.000 | 15 Persen | Rp500.000.000 | 20 Persen | Rp525.000.000 | 25 Persen | Rp600.000.000 | 25 Persen | Rp1.925.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,34 angka | 81 Angka | Rp2.775.856.027 | 81.5 Angka | Rp3.217.891.625 | 82 Angka | Rp3.505.716.000 | 82,5 Angka | Rp3.682.832.000 | 83 Angka | Rp4.333.290.583 | 83 Angka | Rp17.515.586.235 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 17 | 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 2,5 Persen | 2,5 Persen | Rp24.835.120 | 2,5 Persen | Rp28.000.000 | 2,5 Persen | Rp29.500.000 | 2,5 Persen | Rp31.000.000 | 2,5 Persen | Rp32.000.000 | 2,5 Persen | Rp145.335.120 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 66,88 Persen | 70,23 Persen | Rp121.110.120 | 73,58 Persen | Rp155.895.000 | 75,25 Persen | Rp159.543.000 | 76,92 Persen | Rp166.757.500 | 78,59 Persen | Rp194.992.000 | 78,59 Persen | Rp798.297.620 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 56,54 Persen | 59,52 Persen | Rp26.835.120 | 63,99 Persen | Rp47.500.000 | 65,48 Persen | Rp50.000.000 | 66,96 Persen | Rp52.500.000 | 68,45 Persen | Rp55.000.000 | 68,45 Persen | Rp231.835.120 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 60 Persen | 60 Persen | Rp554.286.350 | 60 Persen | Rp169.774.000 | 60 Persen | Rp175.938.500 | 60 Persen | Rp187.325.000 | 60 Persen | Rp221.936.000 | 60 Persen | Rp1.309.259.850 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan | 5 Persen | 5 Persen | Rp108.497.240 | 5 Persen | Rp281.127.000 | 5 Persen | Rp296.384.000 | 5 Persen | Rp314.845.000 | 5 Persen | Rp372.966.000 | 5 Persen | Rp1.373.819.240 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | kemitraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84,99 | 85 Angka | Rp1.167.283.800 | 85 Angka | Rp1.009.881.000 | 85 Angka | Rp1.521.264.000 | 85 Angka | Rp1.625.315.000 | 85 Angka | Rp2.494.934.000 | 85 Angka | Rp7.818.677.800 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 1 8 | 0 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota | n/a | 100 Persen | Rp149.330.000 | 100 Persen | Rp233.500.000 | 100 Persen | Rp256.850.000 | 100 Persen | Rp282.535.000 | 100 Persen | Rp236.500.000 | 100 Persen | Rp1.158.715.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 1 8 | 0 3 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | 7,85 Persen | 8,30 Persen | Rp278.587.500 | 11,29 Persen | Rp340.038.000 | 12,79 Persen | Rp406.688.000 | 15,29 Persen | Rp480.003.000 | 17,79 Persen | Rp473.038.000 | 17,79 Persen | Rp1.978.354.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 1 8 | 0 5 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Persen | 100 Persen | Rp379.462.000 | 100 Persen | Rp413.962.000 | 100 Persen | Rp422.712.000 | 100 Persen | Rp432.337.000 | 100 Persen | Rp430.237.000 | 100 Persen | Rp2.078.710.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,06 | 3,90 | | 3,50 | | 3,40 | | 3,30 | | 3,20 | | 3,20 | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Nilai | 80 Nilai | Rp3.000.000.000 | 81 Nilai | Rp2.500.000.000 | 82 Nilai | Rp3.000.000.000 | 83 Nilai | Rp3.250.000.000 | 84 Nilai | Rp3.500.000.000 | 84 Nilai | Rp15.250.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 0 7 | 0 3 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 18,5 Persen | 18,5 Persen | Rp3.400.000.000 | 19,5 Persen | Rp2.600.000.000 | 20,5 Persen | Rp2.750.000.000 | 21,5 Persen | Rp3.050.000.000 | 22,5 Persen | Rp3.350.000.000 | 22,5 Persen | Rp15.150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 0 7 | 0 4 | PROGRAM PENEMPATAN | Persentase Tenaga kerja | 54 Persen | 54 Persen | Rp7.595.276.000 | 56 Persen | Rp7.639.007.000 | 58 Persen | Rp7.929.068.000 | 60 Persen | Rp8.346.856.000 | 62 Persen | Rp8.845.071.000 | 62 Persen | Rp40.355.278.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | TENAGA KERJA | yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | | | | | | | | | | | | | | TRANSMIGRASI |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 35 Persen | 35 Persen | Rp1.350.000.000 | 36 Persen | Rp875.000.000 | 37 Persen | Rp900.000.000 | 38 Persen | Rp950.000.000 | 39 Persen | Rp975.000.000 | 39 Persen | Rp5.050.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3 | 32 | 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Penempatan Transmigrasi | 72 Persen | 74 Persen | Rp575.000.000 | 80 Persen | Rp600.000.000 | 90 Persen | Rp625.000.000 | 100 Persen | Rp650.000.000 | 100 Persen | Rp700.000.000 | 100 Persen | Rp3.150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Nilai | 82Angka | Rp824.075.615 | 83 Angka | Rp865.278.871 | 84 Angka | Rp908.542.814 | 85 Angka | Rp953.969.955 | 86 Angka | Rp1.001.668.453 | 86 Angka | Rp4.553.535.708 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan | n/a | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp700.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 13 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan | n/a | 100 Persen | Rp30.000.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp40.000.000 | 100 Persen | Rp45.000.000 | 100 Persen | Rp50.000.000 | 100 Persen | Rp200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 100 Persen | Rp3.458.543.215 | 100 Persen | Rp4.516.401.480 | 100 Persen | Rp4.222.310.172 | 100 Persen | Rp3.882.498.130 | 100 Persen | Rp4.294.388.138 | 100 Persen | Rp20.374.141.135 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | n/a | 100 Persen | Rp2.488.565.670 | 100 Persen | Rp4.063.753.649 | 100 Persen | Rp4.493.629.014 | 100 Persen | Rp4.971.991.915 | 100 Persen | Rp5.168.197.409 | 100 Persen | Rp21.186.137.657 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 10 | 11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. | n/a | 16 Persen | Rp600.000.000 | 36 Persen | Rp650.000.000 | 56 Persen | Rp700.000.000 | 77 Persen | Rp750.000.000 | 100 Persen | Rp800.000.000 | 100 Persen | Rp3.500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan | 25 Persen | 33 Persen | Rp1.057.984.500 | 41,67 Persen | Rp1.300.092.000 | 50 Persen | Rp1.300.092.000 | 58,33 Persen | Rp1.300.092.000 | 66,67 Persen | Rp1.300.092.000 | 66,67 Persen | Rp6.258.352.500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya pemerataan pendapatan | Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif | n/a | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | DINAS PARIWISATA<br><br>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | n/a | n/a | Rp0 | 25 Persen | Rp522.000.000 | 35 Persen | Rp622.000.000 | 50 Persen | Rp622.000.000 | 100 Persen | Rp622.000.000 | 100 Persen | Rp2.388.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | n/a | 2 CBT | Rp171.000.000 | 2 CBT | Rp549.000.000 | 2 CBT | Rp49.000.000 | 2 CBT | Rp499.000.000 | 2 CBT | Rp49.000.000 | 2 CBT | Rp1.317.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang berizin | 45 Persen | 50 Persen | Rp599.342.940 | 55 Persen | Rp530.997.000 | 60 Persen | Rp564.096.000 | 65 Persen | Rp612.759.000 | 70 Persen | Rp736.976.000 | 70 Persen | Rp3.044.170.940 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | 55 Persen | 60 Persen | Rp410.733.440 | 65 Persen | Rp358.033.000 | 70 Persen | Rp364.207.500 | 75 Persen | Rp379.917.000 | 80 Persen | Rp420.988.000 | 80 Persen | Rp1.933.878.940 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Rintisan Desa Preneur | 9,33 persen | 10,67 persen | Rp400.000.000 | 12 persen | Rp593.000.000 | 13,33 persen | Rp828.000.000 | 14,67 persen | Rp406.000.000 | 17,33 persen | Rp393.000.000 | 17,33 persen | Rp2.620.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian pemasaran pada Desa Preneur | 0 Persen | 14 Persen | Rp400.000.000 | 28 Persen | Rp1.447.073.000 | 40 Persen | Rp2.528.000.000 | 50 Persen | Rp2.537.000.000 | 70 Persen | Rp2.537.000.000 | 70 Persen | Rp9.449.073.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 81,50% | 85,97 Persen | Rp1.684.041.210 | 90,65 Persen | Rp2.702.391.000 | 95,32 Persen | Rp2.151.503.500 | 100 Persen | Rp2.305.827.000 | 100 Persen | Rp2.773.672.217 | 100 Persen | Rp11.617.434.927 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100 Persen | 100 Persen | Rp25.735.120 | 100 Persen | Rp44.500.000 | 100 Persen | Rp49.000.000 | 100 Persen | Rp52.000.000 | 100 Persen | Rp57.000.000 | 100 Persen | Rp228.235.120 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 3 1 | 0 4 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten | 0 Persen | 0 Persen | Rp0 | 0,22 Persen | Rp50.000.000 | 0,22 Persen | Rp62.000.000 | 0,22 Persen | Rp63.000.000 | 0,22 Persen | Rp65.000.000 | 0,22 Persen | Rp240.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | | Jumlah Misi 3 | | | | Rp61.564.136.300 | | Rp78.235.765.000 | | Rp77.131.520.000 | | Rp85.482.063.000 | | Rp93.618.840.000 | | Rp396.032.324.300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Misi 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tujuan : Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan | Indeks Pembangunan Infrastruktur | n/a | 66,1175 | | 67,26 | | 67,88 | | 69,50 | | 70,61 | | 70,61 | | DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD |
| | | | Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | Indeks kualitas infrastruktur | n/a | 73,71 | | 75,05 | | 76,40 | | 77,47 | | 79,08 | | 79,08 | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 3 | 0 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa) | 80,62 Persen | 81,03 Persen | Rp22.050.532.539 | 81,44 Persen | Rp22.812.684.000 | 81,85 Persen | Rp22.993.952.400 | 82,26 Persen | Rp23.063.347.640 | 82,67 Persen | Rp23.139.682.404 | 82,67 Persen | Rp114.060.198.983 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 0 3 | 1 0 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 75,42 Persen | 75,83 Persen | Rp39.940.351.125 | 76,24 Persen | Rp40.913.427.855 | 76,65 Persen | Rp40.954.770.640 | 77,06 Persen | Rp41.110.247.704 | 77,47 Persen | Rp42.120.859.933 | 77,47 Persen | Rp205.039.657.257 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya | n/a | 0 | Rp0 | 65 Persen | Rp70.000.000.000 | 90 Persen | Rp30.000.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000.000 | 100 Persen | Rp0 | 100 Persen | Rp110.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82,83 | 83 Angka | Rp6.231.608.230 | 83,5 Angka | Rp6.088.747.424 | 84 Angka | Rp6.292.974.714 | 84 Angka | Rp6.667.624.734 | 84 Angka | Rp6.729.739.755 | 84 Angka | Rp32.010.694.857 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 0 3 | 0 8 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Gedung pemerintah yang laik fungsi | n/a | 10 Persen | Rp11.093.340.360 | 20 Persen | Rp25.059.600.452 | 30 Persen | Rp15.501.452.323 | 40 Persen | Rp66.089.613.546 | 50 Persen | Rp73.228.230.810 | 50 Persen | Rp190.972.237.491 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 0 3 | 1 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 71,34 Persen | 72,84 Persen | Rp790.328.980 | 74,34 Persen | Rp842.300.472 | 75,84 Persen | Rp906.530.519 | 77,34 Persen | Rp1.077.183.571 | 78,84 Persen | Rp1.104.901.928 | 78,84 Persen | Rp4.721.245.470 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 3 | 0 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten | 29,93 Persen | 30 Persen | Rp12.435.566.438 | 35 Persen | Rp12.785.572.133 | 40 Persen | Rp12.914.129.346 | 45 Persen | Rp13.655.542.281 | 50 Persen | Rp14.421.096.509 | 50 Persen | Rp66.211.906.707 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 81,5 Persen | 82,4 Persen | | 83,3 Persen | | 84,2 Persen | | 85,1 Persen | | 86 Persen | | 86 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 3 | 0 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | 82,36 Persen | 83,56 Persen | Rp1.684.064.441 | 84,38 Persen | Rp8.744.242.764 | 85,19 Persen | Rp8.918.667.040 | 85,98 Persen | Rp9.489.533.744 | 86,76 Persen | Rp9.962.587.119 | 86,76 Persen | Rp38.799.095.108 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 3 | 0 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | 21,33 Persen | 22,67 Persen | Rp824.650.000 | 25,33 Persen | Rp2.500.000.000 | 28 Persen | Rp600.000.000 | 30,67 Persen | Rp600.000.000 | 33,33 Persen | Rp600.000.000 | 33,33 Persen | Rp5.124.650.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 0 3 | 0 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 84,83 Persen | 87,86 Persen | Rp4.896.417.653 | 89,89 Persen | Rp5.351.716.994 | 91,92 Persen | Rp5.436.888.693 | 93,95 Persen | Rp5.500.577.563 | 95,98 Persen | Rp5.650.635.319 | 95,98 Persen | Rp26.836.236.222 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 0 3 | 0 6 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | n/a | 3,97 Persen | Rp3.635.314.000 | 4,6 Persen | Rp5.035.548.547 | 5,23 Persen | Rp5.309.103.402 | 5,86 Persen | Rp5.540.013.742 | 6,49 Persen | Rp4.636.195.116 | 6,49 Persen | Rp24.156.174.807 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 4 | 0 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 100 Persen | Rp3.788.800.826 | 100 Persen | Rp4.784.865.801 | 100 Persen | Rp4.813.352.381 | 100 Persen | Rp4.984.687.619 | 100 Persen | Rp4.499.156.802 | 100 Persen | Rp22.870.863.429 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 0 4 | 0 3 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 0 Persen | 10,59 Persen | Rp4.266.816.699 | 21,18 Persen | Rp5.589.155.000 | 31,77 Persen | Rp5.648.070.500 | 42,36 Persen | Rp5.762.877.550 | 52,95 Persen | Rp5.939.165.305 | 52,95 Persen | Rp27.206.085.054 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 04 | 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rumah layak huni | 98,75 Persen | 99,18 Persen | Rp421.652.609 | 99,39 Persen | Rp2.128.675.558 | 99,6 Persen | Rp2.348.253.042 | 99,8 Persen | Rp2.493.951.306 | 100 Persen | Rp2.692.300.000 | 100 Persen | Rp10.084.832.515 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100 Persen | 100 Persen | Rp406.039.100 | 100 Persen | Rp451.000.000 | 100 Persen | Rp496.100.000 | 100 Persen | Rp545.710.000 | 100 Persen | Rp600.281.000 | 100 Persen | Rp2.499.130.100 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | Rp73.174.300.000 | 100 Persen | Rp850.000.000 | 100 Persen | Rp425.000.000 | 100 Persen | Rp425.000.000 | 100 Persen | Rp75.374.300.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuaiperaturan perundang-undangan | n/a | 0 | Rp0 | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | Rp3.390.000.000 | 100 Persen | Rp3.680.000.000 | 100 Persen | Rp2.010.000.000 | 100 Persen | Rp9.580.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,00 angka | 80,50 Angka | Rp965.187.000 | 80,75 Angka | Rp965.187.000 | 81 Angka | Rp1.061.705.000 | 81,25 Angka | Rp1.167.875.000 | 81,50 Angka | Rp1.284.662.000 | 81,50 Angka | Rp5.444.616.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kabupaten | 30,43 | 30,43 | Rp13.012.540.000 | 30,43 | Rp9.220.389.000 | 30,43 | Rp10.689.762.000 | 30,43 | Rp12.312.443.000 | 30,43 | Rp14.128.890.000 | 30,43 | Rp59.364.024.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota | 0,30 angka | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran Daerah : Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | Kesesuaian pemanfataan ruang | 80,00 | 75,03 | | 75,05 | | 75,07 | | 75,10 | | 70,20 | | 70,20 | | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TATA SASANA) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 3 | 0 9 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | n/a | n/a | Rp0,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp600.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1 | 0 3 | 1 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | n/a | 70 Persen | Rp1.397.829.950 | 70,1 Persen | Rp2.350.000.000 | 70,2 Persen | Rp1.495.000.000 | 70,3 Persen | Rp970.000.000 | 70,4 Persen | Rp970.000.000 | 70,4 Persen | Rp7.182.829.950 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1 | 0 3 | 1 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten | n/a | 90 Persen | Rp500.000.000 | 90 Persen | Rp1.910.000.000 | 90 Persen | Rp150.000.000 | 90 Persen | Rp150.000.000 | 90 Persen | Rp150.000.000 | 90 Persen | Rp2.860.000.000 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,71 | 82 Angka | Rp941.654.430 | 83 Angka | Rp950.143.500 | 84 Angka | Rp923.791.000 | 85 Angka | Rp1.571.656.000 | 86 Angka | Rp2.310.564.000 | 86 Angka | Rp6.697.808.930 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2 | 1 0 | 0 4 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | n/a | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp60.000.000 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2 | 1 0 | 1 0 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | n/a | 90 Persen | Rp386.090.620 | 90 Persen | Rp13.400.000.000 | 90 Persen | Rp11.400.000.000 | 90 Persen | Rp10.400.000.000 | 90 Persen | Rp400.000.000 | 90 Persen | Rp35.986.090.620 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2 | 1 0 | 1 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 20,73 Persen | 33,03 Persen | Rp4.220.382.000 | 35,37 Persen | Rp7.318.511.500 | 44,74 Persen | Rp10.746.608.000 | 54,58 Persen | Rp11.010.451.000 | 64,89 Persen | Rp8.651.181.000 | 64,89 Persen | Rp41.947.133.500 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | Sasaran Daerah: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,02 | 62,75 | | 63,59 | | 64,42 | | 65,24 | | 66,07 | | 66,07 | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 3 | 1 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | 0 | Rp0 | 100 Persen | Rp100.000.000 | 100 Persen | Rp250.000.000 | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | Rp250.000.000 | 100 Persen | Rp1.100.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 83 Angka | 3.278.515.080 | 83,25 Angka | Rp3.587.161.040 | 83,5 Angka | 5.787.774.040 | 83,75 Angka | Rp3.980.745.040 | 84 Angka | 4.191.158.040 | 84 Angka | Rp20.825.353.240 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 1 1 | 0 3 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | n/a | 70 Persen | 4.895.237.000 | 75 Persen | Rp1.745.000.000 | 80 Persen | 1.590.000.000 | 85 Persen | Rp1.705.000.000 | 90 Persen | 1.800.000.000 | 90 Persen | Rp11.735.237.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 1 1 | 0 4 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | n/a | 30 Persen | 3.782.201.120 | 32 Persen | Rp5.895.936.560 | 34 Persen | 5.426.000.000 | 36 Persen | Rp6.268.600.000 | 38 Persen | 5.850.000.000 | 38 Persen | Rp27.222.737.680 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 1 1 | 0 8 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | n/a | 5 Persen | 82.820.500 | 5 Persen | Rp106.000.000 | 5 Persen | 117.000.000 | 5 Persen | Rp124.000.000 | 5 Persen | 145.000.000 | 5 Persen | Rp574.820.500 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 1 1 | 0 9 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional | n/a | 1 penghargaan | 16.310.000 | 1 penghargaan | Rp40.000.000 | 1 penghargaan | 44.000.000 | 1 penghargaan | Rp50.000.000 | 1 penghargaan | 55.000.000 | 5 penghargaan | Rp205.310.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 0 2 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | n/a | 14,29 Persen | 382.795.740 | 57,14 Persen | Rp1.700.000.000 | 85,71 Persen | 910.000.000 | 100 Persen | Rp170.000.000 | 100 Persen | 175.000.000 | 100 Persen | Rp3.337.795.740 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 1 1 | 0 5 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | n/a | 31,35 Persen | 14.675.000 | 33,10 Persen | Rp15.000.000 | 34,84 Persen | 20.000.000 | 36,58 Persen | Rp22.500.000 | 38,32 Persen | 23.000.000 | 100 Persen | Rp95.175.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 1 1 | 0 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | n/a | 16,67 Persen | 31.900.000 | 23,33 Persen | Rp51.000.000 | 25 Persen | 64.000.000 | 31 Persen | Rp73.000.000 | 33,33 Persen | 82.000.000 | 34 Persen | Rp301.900.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 1 1 | 1 0 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | n/a | 100 Persen | 14.950.000 | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | 25.000.000 | 100 Persen | Rp30.000.000 | 100 Persen | 35.000.000 | 100 Persen | Rp124.950.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 1 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 41,36 Persen | 42,42 Persen | 8.290.292.560 | 44,16 Persen | Rp10.086.535.400 | 45,87 Persen | 10.303.791.960 | 46,86 Persen | Rp10.913.471.960 | 50,07 Persen | 13.208.471.960 | 50,07 Persen | Rp52.802.563.840 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran Daerah : Terwujudnya penurunan risiko bencana | Indeks Risiko Bencana | 181,26 | 175,51 | | 169,94 | | 164,55 | | 159,33 | | 154,27 | | 154,27 | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 3 | 1 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | 0 | Rp0 | 100 Persen | Rp350.000.000 | 100 Persen | Rp220.000.000 | 100 Persen | Rp5.050.000.000 | 100 Persen | Rp80.000.000 | 100 Persen | Rp5.700.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 80,50 angka | 81,00 Angka | Rp5.564.133.000 | 81,50 Angka | Rp10.902.809.000 | 82,00 Angka | Rp7.693.333.000 | 82,50 Angka | Rp6.247.815.000 | 83,00 Angka | Rp7.802.762.000 | 83,00 Angka | Rp38.210.852.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 20 Persen | 25 Persen | Rp3.190.686.000 | 30 Persen | Rp2.855.000.000 | 35 Persen | Rp3.068.000.000 | 40 Persen | Rp3.160.800.000 | 45 Persen | Rp3.034.241.000 | 45 Persen | Rp15.308.727.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Indeks Pemulihan Pascabencana | n/a | n/a | | 45 Persen | | 55 Persen | | 60 Persen | | 65 Persen | | 65 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan | 14,48 Menit | < 15 Menit | Rp393.930.000 | < 15 Menit | Rp690.000.000 | < 15 Menit | Rp495.000.000 | < 15 Menit | Rp666.000.000 | < 15 Menit | Rp732.600.000 | < 15 Menit | Rp2.977.530.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | Jumlah Misi 4 | | | | Rp164.347.613.000 | | Rp361.180.510.000 | | Rp240.015.010.000 | | Rp277.390.268.000 | | Rp263.279.362.000 | | Rp1.306.212.763.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Misi 5: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat | Tingkat Kemiskinan | 13,50 | 13,37 | | 12,90 | | 12,50 | | 12,05 | | 11,50 | | 11,50 | | DINAS SOSIAL |
| | | | Sasaran Daerah:Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 72.101 | 72.296 | | 71.667 | | 71.380 | | 71.059 | | 70.668 | | 70.668 | | DINAS SOSIAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Angka | 82 Angka | Rp1.442.465.488 | 82 Angka | Rp1.471.857.672 | 83 Angka | Rp1.442.465.362 | 83 Angka | Rp1.442.465.362 | 83 Angka | Rp1.942.358.268 | 83 Angka | Rp7.741.612.152 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 0 6 | 0 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | 57 Persen | 60 Persen | Rp673.959.448 | 70 Persen | Rp523.959.448 | 75 Persen | Rp523.959.448 | 80 Persen | Rp523.959.448 | 85 Persen | Rp523.959.448 | 85 Persen | Rp2.769.797.240 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 0 6 | 0 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 80 Persen | 75 Persen | Rp8.938.751.920 | 75 Persen | Rp9.188.751.920 | 75 Persen | Rp9.788.924.104 | 80 Persen | Rp9.788.751.920 | 80 Persen | Rp10.288.751.920 | 80 Persen | Rp47.993.931.784 | DINAS SOSIAL |
| | | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | n/a | 70 Persen | | 70 Persen | | 70 Persen | | 80 Persen | | 80 Persen | | 80 Persen | | DINAS SOSIAL |
| 1 | 0 6 | 0 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | 50 persen | 55 Persen | Rp4.074.365.740 | 60 Persen | Rp4.141.265.740 | 70 Persen | Rp4.141.265.740 | 75 Persen | Rp4.341.265.740 | 80 Persen | Rp5.004.080.834 | 80 Persen | Rp21.702.243.794 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 0 6 | 0 6 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 57 Persen | 100 Persen | Rp250.582.500 | 100 Persen | Rp250.582.500 | 100 Persen | Rp518.608.626 | 100 Persen | Rp518.608.626 | 100 Persen | Rp918.608.626 | 100 Persen | Rp2.456.990.878 | DINAS SOSIAL |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 6 | 0 7 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | 75 Persen | 75 Persen | Rp159.334.904 | 75 Persen | Rp152.030.720 | 80 Persen | Rp252.030.720 | 80 Persen | Rp375.547.904 | 80 Persen | Rp475.547.904 | 80 Persen | Rp1.414.492.152 | DINAS SOSIAL |
| | | | Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 95,18 | 95,5 | | 96 | | 96,5 | | 96,75 | | 96,9 | | 96,9 | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | n/a | 69,36 | | 71,01 | | 72,66 | | 74,31 | | 75,96 | | 75,96 | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 2 | 0 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Desa Prima | 37,33 Persen | 37,33 Persen | Rp550.000.000 | 38,67 Persen | Rp635.000.000 | 40 Persen | Rp775.000.000 | 41,33 Persen | Rp860.000.000 | 42,67 Persen | Rp815.000.000 | 42,67 Persen | Rp3.635.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 0 8 | 0 2 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 57 persen | 62 Persen | Rp63.875.000 | 66 Persen | Rp71.875.000 | 69 Persen | Rp457.899.000 | 72 Persen | Rp547.899.000 | 75 Persen | Rp612.899.000 | 75 Persen | Rp1.754.447.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 0 8 | 0 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0.0004 | 0.00035 | Rp434.963.300 | 0.00032 | Rp434.708.820 | 0.00031 | Rp905.000.000 | 0.00028 | Rp925.000.000 | 0.00026 | Rp940.000.000 | 0.00026 | Rp3.639.672.120 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 0 8 | 0 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase partisipasi perempuan di lembaga | 6 persen | 7 persen | Rp34.460.120 | 8 Persen | Rp34.460.120 | 9 Persen | Rp194.000.000 | 10 Persen | Rp294.000.000 | 11 Persen | Rp394.000.000 | 11 Persen | Rp950.920.240 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak | Kategori Kabupaten Layak Anak | Madya | Nindya | | Utama | | Utama | | KLA | | KLA | | KLA | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 8 | 0 6 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan desa layak anak | n/a | 15 Kalurahan | Rp55.799.245 | 30 Kalurahan | Rp55.799.245 | 45 Kalurahan | Rp900.000.000 | 60 Kalurahan | Rp900.000.000 | 75 Kalurahan | Rp900.000.000 | 75 Kalurahan | Rp2.811.598.490 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 0 8 | 0 7 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 70 Persen | 100 Persen | Rp629.728.475 | 100 Persen | Rp629.728.700 | 100 Persen | Rp881.000.000 | 100 Persen | Rp886.000.000 | 100 Persen | Rp891.000.000 | 100 Persen | Rp3.917.457.175 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah | INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ *IMPACT / OUTCAME)* | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | X X | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Nilai | 83 Angka | Rp1.938.485.000 | 83 Angka | Rp1.250.000.000 | 83 Angka | Rp1.500.000.000 | 83 Angka | Rp1.650.000.000 | 83 Angka | Rp1.732.500.000 | 83 Angka | Rp8.070.985.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 1 4 | 0 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR)) | 1,67 Angka | 1,66 Angka | Rp150.544.950 | 1,65 Angka | Rp150.000.000 | 1,64 Angka | Rp165.000.000 | 1,63 Angka | Rp181.500.000 | 1,62 Angka | Rp194.700.000 | 1,62 Angka | Rp841.744.950 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 1 4 | 0 3 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | n/a | 77,2 Persen | Rp5.548.497.130 | 77,2 Persen | Rp2.344.401.250 | 77,2 Persen | Rp2.090.369.135 | 77,2 Persen | Rp2.704.599.135 | 77,2 Persen | Rp4.127.300.000 | 77,2 Persen | Rp16.815.166.650 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 1 4 | 0 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina | 82,5 Persen | 83 Persen | Rp970.477.780 | 84 Persen | Rp973.795.865 | 84,5 Persen | Rp973.795.865 | 85 Persen | Rp1.123.795.865 | 85,5 Persen | Rp1.750.076.000 | 85,5 Persen | Rp5.791.941.375 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | Jumlah Misi 5 | | | | Rp25.916.291.000 | | Rp22.308.217.000 | | Rp25.509.318.000 | | Rp27.063.393.000 | | Rp31.510.782.000 | | Rp132.308.001.000 | |
| | | | Jumlah Total | | | | Rp2.141.090.935.000 | | Rp2.393.941.289.000 | | Rp2.335.845.090.000 | | Rp2.369.572.795.000 | | Rp2.433.807.603.000 | | Rp11.674.257.712.000 | |

# BAB VII
# KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

## 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Bantul berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program baik mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*out come*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari ABPD Kabupaten Bantul. Namun juga oleh sumber pendapatan lainnya (APBN, APBD Propinsi DIY dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah pada RPJMD Tahun 2021–2026 dapat dilihat dari proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat pada tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 7.1

Tabel 7 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Bantul

| Uraian | Proyeksi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH | 2.292.724.883.000 | 2.166.090.934.000 | 2.418.941.289.000 | 2.360.845.090.000 | 2.394.572.795.000 | 2.458.807.602.000 |
| BELANJA DAERAH | 2.267.724.883.000 | 2.141.090.935.000 | 2.393.941.289.000 | 2.335.845.090.000 | 2.369.572.795.000 | 2.433.807.603.000 |
| Belanja Operasi | 1.713.809.666.000 | 1.664.248.301.000 | 1.748.842.898.000 | 1.788.661.823.000 | 1.825.402.113.000 | 1.874.727.528.000 |
| Belanja Pegawai | 951.471.887.000 | 976.142.986.000 | 992.330.204.000 | 1.009.871.614.000 | 1.027.786.933.000 | 1.046.916.030.000 |
| Belanja Barang dan Jasa | 634.395.529.000 | 626.235.407.000 | 693.493.694.000 | 706.480.209.000 | 735.116.180.000 | 765.104.498.000 |
| Belanja Hibah | 122.107.250.000 | 55.601.908.000 | 57.339.000.000 | 66.510.000.000 | 56.699.000.000 | 56.907.000.000 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.835.000.000 | 6.268.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| Belanja Modal | 242.068.319.000,00 | 135.929.147.000 | 295.684.951.000 | 194.601.647.000 | 188.439.165.000 | 198.185.403.000 |
| Belanja Tidak Terduga | 34.055.411.000,00 | 22.686.428.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Belanja Transfer | 277.791.487.000 | 318.227.059.000 | 329.093.440.000 | 332.381.620.000 | 335.531.517.000 | 340.694.671.000 |
| Belanja Bagi Hasil | 26.103.398.000,00 | 26.103.398.000 | 28.695.874.000 | 30.065.652.000 | 31.503.375.000 | 34.675.516.000 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 251.688.089.000,00 | 292.123.661.000 | 300.397.566.000 | 302.315.968.000 | 304.028.142.000 | 306.019.155.000 |

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

## 7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020. Seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung pencapaian SDG's, kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan pembangunan nasional.

Program Perangkat Daerah Kabupaten Bantul beserta pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2022 – 2026 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 7 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 angka | 82 Angka | Rp5.009.338.342 | 82 Angka | Rp5.233.481.342 | 82 Angka | Rp5.533.481.342 | 82 Angka | Rp5.833.481.342 | 82 Angka | Rp6.921.161.342 | 82 Angka | Rp28.530.943.710 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase capaian SPM Pendidikan | n/a | 100 Persen | Rp91.970.069.372 | 100 Persen | Rp92.470.069.372 | 100 Persen | Rp92.922.332.372 | 100 Persen | Rp93.342.756.372 | 100 Persen | Rp99.342.756.372 | 100 Persen | Rp470.047.983.860 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 1 | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | n/a | 66 Persen | Rp217.410.642.120 | 70 Persen | Rp217.710.642.120 | 75 Persen | Rp218.010.642.120 | 79 Persen | Rp218.310.642.120 | 83 Persen | Rp220.810.642.120 | 83 Persen | Rp1.092.253.210.600 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya | 3,88 Persen | 4,18 Persen | 800.000.000 | 4,48 Persen | 3.175.000.000 | 4,78 Persen | 4.390.000.000 | 5,07 Persen | 2.390.000.000 | 5,37 Persen | 2.590.000.000 | 83 Persen | Rp13.345.000.000 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.733.836.320 | 84,15 Angka | Rp2.750.930.000 | 84,30 Angka | Rp2.763.020.000 | 84,40 Angka | Rp2.776.600.000 | 84,50 Angka | Rp2.798.350.000 | 84,50 Angka | Rp13.822.736.320 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1 indeks | 1 indeks | Rp21.022.955.117 | 1 indeks | Rp24.842.065.331 | 1 indeks | Rp22.369.095.882 | 1 indeks | Rp26.822.863.349 | 1 indeks | Rp22.196.026.290 | 1 indeks | Rp117.253.005.969 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | 1 indeks | 1 indeks | Rp352.754.220 | 1 indeks | Rp354.000.000 | 1 indeks | Rp356.000.000 | 1 indeks | Rp358.000.000 | 1 indeks | Rp360.000.000 | 1 indeks | Rp1.780.754.220 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi) | 1 indeks | 1 indeks | Rp826.883.000 | 1 indeks | Rp831.000.000 | 1 indeks | Rp837.000.000 | 1 indeks | Rp842.850.000 | 1 indeks | Rp851.000.000 | 1 indeks | Rp4.188.733.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan Desa Siaga purnama mandiri | 36 Kalurahan | 40 Kalurahan | Rp943.664.600 | 45 Kalurahan | Rp957.000.000 | 50 Kalurahan | Rp948.000.000 | 55 Kalurahan | Rp950.500.000 | 60 Kalurahan | Rp953.000.000 | 60 Kalurahan | Rp4.752.164.600 | DINAS KESEHATAN |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | 25,93 Persen | 33 Persen | Rp600.000.000 | 40 Persen | Rp4.044.050.000 | 48 Persen | Rp1.865.000.000 | 55 Persen | Rp2.035.000.000 | 62 Persen | Rp2.205.000.000 | 62 Persen | Rp10.749.050.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp180.645.120 | 84,15 Angka | Rp185.500.000 | 84,30 Angka | Rp190.000.000 | 84,40 Angka | Rp194.000.000 | 84,50 Angka | Rp198.000.000 | 84,50 Angka | Rp948.145.120 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pelayanan Jamkesda | 100 Persen | 100 persen | Rp37.128.755.263 | 100 persen | Rp37.129.000.000 | 100 persen | Rp37.130.000.000 | 100 persen | Rp37.131.000.000 | 100 persen | Rp37.132.000.000 | 100 persen | Rp185.650.755.263 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp176.881.680 | 100 Persen | Rp182.000.000 | 100 Persen | Rp186.000.000 | 100 Persen | Rp190.650.000 | 100 Persen | Rp194.000.000 | 100 Persen | Rp929.531.680 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pelayanan Labkesda | 100 persen | 100 persen | Rp500.000.000 | 100 persen | Rp1.000.000.000 | 100 persen | Rp500.000.000 | 100 persen | Rp500.000.000 | 100 persen | Rp500.000.000 | 100 persen | Rp3.000.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.325.448.000 | 84,15 Angka | Rp1.755.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.765.000.000 | 84,40 Angka | Rp1.775.000.000 | 84,50 Angka | Rp1.785.000.000 | 84,50 Angka | Rp9.405.448.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.461.858.400 | 84,15 Angka | Rp2.300.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.380.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.475.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.580.000.000 | 84,50 Angka | Rp12.196.858.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.405.268.800 | 84,15 Angka | Rp2.526.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.653.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.786.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.925.000.000 | 84,50 Angka | Rp13.295.268.800 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp768.000.000 | 1 indeks | Rp785.000.000 | 1 indeks | Rp3.771.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.920.358.400 | 84,15 Angka | Rp3.005.000.000 | 84,30 Angka | Rp3.110.000.000 | 84,40 Angka | Rp3.215.000.000 | 84,50 Angka | Rp3.320.000.000 | 84,50 Angka | Rp15.570.358.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.850.678.294 | 84,15 Angka | Rp2.659.182.000 | 84,30 Angka | Rp2.715.265.000 | 84,40 Angka | Rp2.772.370.000 | 84,50 Angka | Rp2.830.517.000 | 84,50 Angka | Rp13.828.012.294 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp706.720.400 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp761.000.000 | 1 indeks | Rp2.901.417.064 | 1 indeks | Rp5.837.137.464 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.949.358.400 | 84,15 Angka | Rp1.990.980.000 | 84,30 Angka | Rp2.033.699.600 | 84,40 Angka | Rp2.077.173.592 | 84,50 Angka | Rp2.121.417.064 | 84,50 Angka | Rp10.172.628.656 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.588.749.800 | 84,15 Angka | Rp1.624.495.869 | 84,30 Angka | Rp1.645.190.828 | 84,40 Angka | Rp1.666.041.736 | 84,50 Angka | Rp1.687.053.163 | 84,50 Angka | Rp8.211.531.396 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.216.541.116 | 84,15 Angka | Rp2.275.520.964 | 84,30 Angka | Rp2.336.033.988 | 84,40 Angka | Rp2.397.934.838 | 84,50 Angka | Rp2.461.258.209 | 84,50 Angka | Rp11.687.289.115 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.466.089.600 | 84,15 Angka | Rp695.000.000 | 84,30 Angka | Rp705.000.000 | 84,40 Angka | Rp715.000.000 | 84,50 Angka | Rp725.000.000 | 84,50 Angka | Rp4.306.089.600 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.075.268.800 | 84,15 Angka | Rp2.130.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.186.250.000 | 84,40 Angka | Rp2.243.781.250 | 84,50 Angka | Rp2.302.625.781 | 84,50 Angka | Rp10.937.925.831 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp866.000.000 | 1 indeks | Rp870.000.000 | 1 indeks | Rp872.000.000 | 1 indeks | Rp875.000.000 | 1 indeks | Rp4.328.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.360.179.200 | 84,15 Angka | Rp1.396.600.000 | 84,30 Angka | Rp1.417.700.000 | 84,40 Angka | Rp1.437.600.000 | 84,50 Angka | Rp1.456.300.000 | 84,50 Angka | Rp7.068.379.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp705.832.000 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp755.000.000 | 1 indeks | Rp3.678.832.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.272.316.420 | 84,15 Angka | Rp1.655.600.000 | 84,30 Angka | Rp1.676.356.000 | 84,40 Angka | Rp1.697.269.560 | 84,50 Angka | Rp1.718.342.255 | 84,50 Angka | Rp9.019.884.235 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.245.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.974.931.725 | 84,15 Angka | Rp2.077.334.231 | 84,30 Angka | Rp2.184.700.942 | 84,40 Angka | Rp2.189.700.942 | 84,50 Angka | Rp2.302.185.989 | 84,50 Angka | Rp10.728.853.829 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp745.000.000 | 1 indeks | Rp765.000.000 | 1 indeks | Rp770.000.000 | 1 indeks | Rp775.000.000 | 1 indeks | Rp780.000.000 | 1 indeks | Rp3.835.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.705.952.000 | 84,15 Angka | Rp1.660.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.695.600.000 | 84,40 Angka | Rp1.731.812.000 | 84,50 Angka | Rp145.000.000 | 84,50 Angka | Rp6.938.364.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp650.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp687.000.000 | 1 indeks | Rp3.362.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.280.789.600 | 84,15 Angka | Rp1.314.168.000 | 84,30 Angka | Rp1.333.699.000 | 84,40 Angka | Rp1.352.994.000 | 84,50 Angka | Rp1.372.461.000 | 84,50 Angka | Rp6.654.111.600 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.245.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.860.862.400 | 84,15 Angka | Rp2.865.504.000 | 84,30 Angka | Rp2.970.504.000 | 84,40 Angka | Rp3.075.504.000 | 84,50 Angka | Rp3.180.504.000 | 84,50 Angka | Rp14.952.878.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp700.000.000 | 1 indeks | Rp710.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.520.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.988.358.400 | 84,15 Angka | Rp2.422.950.000 | 84,30 Angka | Rp2.451.130.000 | 84,40 Angka | Rp2.479.540.000 | 84,50 Angka | Rp2.508.180.000 | 84,50 Angka | Rp12.850.158.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp877.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.297.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.384.037.982 | 84,15 Angka | Rp712.000.000 | 84,30 Angka | Rp734.000.000 | 84,40 Angka | Rp755.000.000 | 84,50 Angka | Rp765.000.000 | 84,50 Angka | Rp5.350.037.982 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp682.000.000 | 1 indeks | Rp699.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.481.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.626.068.800 | 84,15 Angka | Rp1.640.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.650.000.000 | 84,40 Angka | Rp1.660.000.000 | 84,50 Angka | Rp1.670.000.000 | 84,50 Angka | Rp8.246.068.800 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp682.000.000 | 1 indeks | Rp699.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp3.481.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp777.179.200 | 84,15 Angka | Rp798.000.000 | 84,30 Angka | Rp810.000.000 | 84,40 Angka | Rp820.000.000 | 84,50 Angka | Rp835.000.000 | 84,50 Angka | Rp4.040.179.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp743.000.000 | 1 indeks | Rp750.000.000 | 1 indeks | Rp755.000.000 | 1 indeks | Rp765.000.000 | 1 indeks | Rp3.738.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.903.940.063 | 84,15 Angka | Rp2.720.040.000 | 84,30 Angka | Rp2.757.920.000 | 84,40 Angka | Rp2.786.920.000 | 84,50 Angka | Rp2.806.800.000 | 84,50 Angka | Rp13.975.620.063 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp803.844.080 | 1 indeks | Rp810.000.000 | 1 indeks | Rp815.000.000 | 1 indeks | Rp820.000.000 | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp4.073.844.080 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.005.768.800 | 84,15 Angka | Rp1.998.780.605 | 84,30 Angka | Rp2.099.719.635 | 84,40 Angka | Rp2.205.455.616 | 84,50 Angka | Rp2.316.228.396 | 84,50 Angka | Rp10.625.953.052 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp861.000.000 | 1 indeks | Rp865.000.000 | 1 indeks | Rp4.246.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.930.448.000 | 84,15 Angka | Rp2.940.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.950.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.960.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.970.000.000 | 84,50 Angka | Rp14.750.448.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp695.000.000 | 1 indeks | Rp715.000.000 | 1 indeks | Rp720.000.000 | 1 indeks | Rp725.000.000 | 1 indeks | Rp730.000.000 | 1 indeks | Rp3.585.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.800.979.200 | 84,15 Angka | Rp1.667.600.000 | 84,30 Angka | Rp1.674.600.000 | 84,40 Angka | Rp1.681.600.000 | 84,50 Angka | Rp1.686.600.000 | 84,50 Angka | Rp8.511.379.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp825.000.000 | 1 indeks | Rp845.000.000 | 1 indeks | Rp850.000.000 | 1 indeks | Rp860.000.000 | 1 indeks | Rp867.000.000 | 1 indeks | Rp4.247.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp2.651.878.200 | 84,15 Angka | Rp2.657.000.000 | 84,30 Angka | Rp2.663.000.000 | 84,40 Angka | Rp2.669.000.000 | 84,50 Angka | Rp2.675.000.000 | 84,50 Angka | Rp13.315.878.200 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.818.858.400 | 84,15 Angka | Rp1.634.000.000 | 84,30 Angka | Rp1.644.000.000 | 84,40 Angka | Rp1.654.000.000 | 84,50 Angka | Rp1.664.000.000 | 84,50 Angka | Rp8.414.858.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp645.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.335.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,95 angka | 84 Angka | Rp1.455.179.200 | 84,15 Angka | Rp1.481.075.000 | 84,30 Angka | Rp1.507.466.125 | 84,40 Angka | Rp1.534.178.117 | 84,50 Angka | Rp1.561.215.789 | 84,50 Angka | Rp7.539.114.231 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | 1 indeks | 1 indeks | Rp635.000.000 | 1 indeks | Rp665.000.000 | 1 indeks | Rp670.000.000 | 1 indeks | Rp675.000.000 | 1 indeks | Rp680.000.000 | 1 indeks | Rp3.325.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 angka | 82,15 angka | Rp140.000.000.000 | 82,50 angka | Rp140.126.643.000 | 82,90 angka | Rp140.242.452.000 | 83,10 angka | Rp140.347.144.000 | 83,50 angka | Rp143.866.547.000 | 83,50 angka | Rp704.582.786.000 | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Capaian SPM Rumah Sakit | 77,50 Persen | 80 Persen | | 80,50 Persen | | 81,00 Persen | | 81,50 Persen | | 82,00 Persen | | 82,00 Persen | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 2 | 2 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Bed Occupation Rate (BOR) | 57,29 Persen | - | Rp0 | 67 Persen | Rp55.000.000 | 69 Persen | Rp59.950.000 | 71 Persen | Rp64.746.000 | 73 Persen | Rp69.279.000 | 73 Persen | Rp248.975.000 | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Turn Over Interval (TOI) | 2,69 hari | - | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | 2 hari | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | | | | Bed Turn Over (BTO) | 46,29 kali | - | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | 50 kali | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya | n/a | 0 | Rp0 | 65 Persen | Rp70.000.000.000 | 90 Persen | Rp30.000.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000.000 | 100 Persen | Rp0 | 100 Persen | Rp110.000.000.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | Rp73.174.300.000 | 100 Persen | Rp850.000.000 | 100 Persen | Rp425.000.000 | 100 Persen | Rp425.000.000 | 100 Persen | Rp75.374.300.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82,83 | 83 Angka | Rp6.231.608.230 | 83,5 Angka | Rp6.088.747.424 | 84 Angka | Rp6.292.974.714 | 84 Angka | Rp6.667.624.734 | 84 Angka | Rp6.729.739.755 | 84 Angka | Rp32.010.694.857 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten | 29,93 Persen | 30 Persen | Rp12.435.566.438 | 35 Persen | Rp12.785.572.133 | 40 Persen | Rp12.914.129.346 | 45 Persen | Rp13.655.542.281 | 50 Persen | Rp14.421.096.509 | 50 Persen | Rp66.211.906.707 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | 81,5 Persen | 82,4 Persen | | 83,3 Persen | | 84,2 Persen | | 85,1 Persen | | 86 Persen | | 86 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | 82,36 Persen | 83,56 Persen | Rp1.684.064.441 | 84,38 Persen | Rp8.744.242.764 | 85,19 Persen | Rp8.918.667.040 | 85,98 Persen | Rp9.489.533.744 | 86,76 Persen | Rp9.962.587.119 | 86,76 Persen | Rp38.799.095.108 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | 21,33 Persen | 22,67 Persen | Rp824.650.000 | 25,33 Persen | Rp2.500.000.000 | 28 Persen | Rp600.000.000 | 30,67 Persen | Rp600.000.000 | 33,33 Persen | Rp600.000.000 | 33,33 Persen | Rp5.124.650.000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | 84,83 Persen | 87,86 Persen | Rp4.896.417.653 | 89,89 Persen | Rp5.351.716.994 | 91,92 Persen | Rp5.436.888.693 | 93,95 Persen | Rp5.500.577.563 | 95,98 Persen | Rp5.650.635.319 | 95,98 Persen | Rp26.836.236.222 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | n/a | 3,97 Persen | Rp3.635.314.000 | 4,6 Persen | Rp5.035.548.547 | 5,23 Persen | Rp5.309.103.402 | 5,86 Persen | Rp5.540.013.742 | 6,49 Persen | Rp4.636.195.116 | 6,49 Persen | Rp24.156.174.807 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa) | 80,62 Persen | 81,03 Persen | Rp22.050.532.539 | 81,44 Persen | Rp22.812.684.000 | 81,85 Persen | Rp22.993.952.400 | 82,26 Persen | Rp23.063.347.640 | 82,67 Persen | Rp23.139.682.404 | 82,67 Persen | Rp114.060.198.983 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Gedung pemerintah yang laik fungsi | n/a | 10 Persen | Rp11.093.340.360 | 20 Persen | Rp25.059.600.452 | 30 Persen | Rp15.501.452.323 | 40 Persen | Rp66.089.613.546 | 50 Persen | Rp73.228.230.810 | 50 Persen | Rp190.972.237.491 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | n/a | n/a | Rp0,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp150.000.000,00 | 100 Persen | Rp600.000.000,00 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | 75,42 Persen | 75,83 Persen | Rp39.940.351.125 | 76,24 Persen | Rp40.913.427.855 | 76,65 Persen | Rp40.954.770.640 | 77,06 Persen | Rp41.110.247.704 | 77,47 Persen | Rp42.120.859.933 | 77,47 Persen | Rp205.039.657.257 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | 71,34 Persen | 72,84 Persen | Rp790.328.980 | 74,34 Persen | Rp842.300.472 | 75,84 Persen | Rp906.530.519 | 77,34 Persen | Rp1.077.183.571 | 78,84 Persen | Rp1.104.901.928 | 78,84 Persen | Rp4.721.245.470 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | n/a | 70 Persen | Rp1.397.829.950 | 70,1 Persen | Rp2.350.000.000 | 70,2 Persen | Rp1.495.000.000 | 70,3 Persen | Rp970.000.000 | 70,4 Persen | Rp970.000.000 | 70,4 Persen | Rp7.182.829.950 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten | n/a | 90 Persen | Rp500.000.000 | 90 Persen | Rp1.910.000.000 | 90 Persen | Rp150.000.000 | 90 Persen | Rp150.000.000 | 90 Persen | Rp150.000.000 | 90 Persen | Rp2.860.000.000 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | 100 Persen | 100 Persen | Rp3.788.800.826 | 100 Persen | Rp4.784.865.801 | 100 Persen | Rp4.813.352.381 | 100 Persen | Rp4.984.687.619 | 100 Persen | Rp4.499.156.802 | 100 Persen | Rp22.870.863.429 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | 0 Persen | 10,59 Persen | Rp4.266.816.699 | 21,18 Persen | Rp5.589.155.000 | 31,77 Persen | Rp5.648.070.500 | 42,36 Persen | Rp5.762.877.550 | 52,95 Persen | Rp5.939.165.305 | 52,95 Persen | Rp27.206.085.054 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 04 | 04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rumah layak huni | 98,75 Persen | 99,18 Persen | Rp421.652.609 | 99,39 Persen | Rp2.128.675.558 | 99,6 Persen | Rp2.348.253.042 | 99,8 Persen | Rp2.493.951.306 | 100 Persen | Rp2.692.300.000 | 100 Persen | Rp10.084.832.515 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | 100 Persen | 100 Persen | Rp406.039.100 | 100 Persen | Rp451.000.000 | 100 Persen | Rp496.100.000 | 100 Persen | Rp545.710.000 | 100 Persen | Rp600.281.000 | 100 Persen | Rp2.499.130.100 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 1 | 05 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 78 Angka | 79 Angka | Rp2.952.127.000 | 80 Angka | Rp3.063.643.229 | 81 Angka | Rp3.370.007.552 | 82 Angka | Rp3.437.407.703 | 83 Angka | Rp3.781.148.473 | 83 Angka | Rp16.604.333.956 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100 Persen | 100 Persen | Rp2.384.412.000 | 100 Persen | Rp2.479.788.771,20 | 100 Persen | Rp4.887.460.448 | 100 Persen | Rp2.541.472.297 | 100 Persen | Rp3.436.809.527,02 | 100 Persen | Rp15.729.943.044 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga | 27,22 Persen | 29,37 Persen | 600.000.000 | 45,44 Persen | 1.500.000.000 | 66,88 Persen | 2.500.000.000 | 88,31 Persen | 3.500.000.000 | 100 Persen | 1.500.000.000 | 100 Persen | Rp9.600.000.000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | - | Rp0 | 100 Persen | Rp350.000.000 | 100 Persen | Rp220.000.000 | 100 Persen | Rp5.050.000.000 | 100 Persen | Rp80.000.000 | 100 Persen | Rp5.700.000.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah | 80 angka | 81,00 Angka | Rp5.564.133.000 | 81,50 Angka | Rp10.902.809.000 | 82,00 Angka | Rp7.693.333.000 | 82,50 Angka | Rp6.247.815.000 | 83,00 Angka | Rp7.802.762.000 | 83,00 Angka | Rp38.210.852.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 01 | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 20 Persen | 25 Persen | Rp3.190.686.000 | 30 Persen | Rp2.855.000.000 | 35 Persen | Rp3.068.000.000 | 40 Persen | Rp3.160.800.000 | 45 Persen | Rp3.034.241.000 | 45 Persen | Rp15.308.727.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Indeks Pemulihan Pascabencana | n/a | n/a | | 45 Persen | | 55 Persen | | 60 Persen | | 65 Persen | | 65 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 Persen | 100 Persen | Rp393.930.000 | 100 Persen | Rp690.000.000 | 100 Persen | Rp495.000.000 | 100 Persen | Rp666.000.000 | 100 Persen | Rp732.600.000 | 100 Persen | Rp2.977.530.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82 Angka | 82 Angka | Rp1.442.465.488 | 82 Angka | Rp1.471.857.672 | 83 Angka | Rp1.442.465.362 | 83 Angka | Rp1.442.465.362 | 83 Angka | Rp1.942.358.268 | 83 Angka | Rp7.741.612.152 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | 57 Persen | 60 Persen | Rp673.959.448 | 70 Persen | Rp523.959.448 | 75 Persen | Rp523.959.448 | 80 Persen | Rp523.959.448 | 85 Persen | Rp523.959.448 | 85 Persen | Rp2.769.797.240 | DINAS SOSIAL |
| 01 | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | 80 Persen | 75 Persen | Rp8.938.751.920 | 75 Persen | Rp9.188.751.920 | 75 Persen | Rp9.788.924.104 | 80 Persen | Rp9.788.751.920 | 80 Persen | Rp10.288.751.920 | 80 Persen | Rp47.993.931.784 | DINAS SOSIAL |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | n/a | 70 Persen | | 70 Persen | | 70 Persen | | 80 Persen | | 80 Persen | | 80 Persen | | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | 50 persen | 55 Persen | Rp4.074.365.740 | 60 Persen | Rp4.141.265.740 | 70 Persen | Rp4.141.265.740 | 75 Persen | Rp4.341.265.740 | 80 Persen | Rp5.004.080.834 | 80 Persen | Rp21.702.243.794 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | 57 Persen | 100 Persen | Rp250.582.500 | 100 Persen | Rp250.582.500 | 100 Persen | Rp518.608.626 | 100 Persen | Rp518.608.626 | 100 Persen | Rp918.608.626 | 100 Persen | Rp2.456.990.878 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | 75 Persen | 75 Persen | Rp159.334.904 | 75 Persen | Rp152.030.720 | 80 Persen | Rp252.030.720 | 80 Persen | Rp375.547.904 | 80 Persen | Rp475.547.904 | 80 Persen | Rp1.414.492.152 | DINAS SOSIAL |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | - |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 07 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Nilai | 80 Nilai | Rp3.000.000.000 | 81 Nilai | Rp2.500.000.000 | 82 Nilai | Rp3.000.000.000 | 83 Nilai | Rp3.250.000.000 | 84 Nilai | Rp3.500.000.000 | 84 Nilai | Rp15.250.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 18,5 Persen | 18,5 Persen | Rp3.400.000.000 | 19,5 Persen | Rp2.600.000.000 | 20,5 Persen | Rp2.750.000.000 | 21,5 Persen | Rp3.050.000.000 | 22,5 Persen | Rp3.350.000.000 | 22,5 Persen | Rp15.150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 54 Persen | 54 Persen | Rp7.595.276.000 | 56 Persen | Rp7.639.007.000 | 58 Persen | Rp7.929.068.000 | 60 Persen | Rp8.346.856.000 | 62 Persen | Rp8.845.071.000 | 62 Persen | Rp40.355.278.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 35 Persen | 35 Persen | Rp1.350.000.000 | 36 Persen | Rp875.000.000 | 37 Persen | Rp900.000.000 | 38 Persen | Rp950.000.000 | 39 Persen | Rp975.000.000 | 39 Persen | Rp5.050.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 08 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Desa Prima | 37,33 Persen | 37,33 Persen | Rp550.000.000 | 38,67 Persen | Rp635.000.000 | 40 Persen | Rp775.000.000 | 41,33 Persen | Rp860.000.000 | 42,67 Persen | Rp815.000.000 | 42,67 Persen | Rp3.635.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | 57 persen | 62 Persen | Rp63.875.000 | 66 Persen | Rp71.875.000 | 69 Persen | Rp457.899.000 | 72 Persen | Rp547.899.000 | 75 Persen | Rp612.899.000 | 75 Persen | Rp1.754.447.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan | 0.0004 | 0.00035 | Rp434.963.300 | 0.00032 | Rp434.708.820 | 0.00031 | Rp905.000.000 | 0.00028 | Rp925.000.000 | 0.00026 | Rp940.000.000 | 0.00026 | Rp3.639.672.120 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 6 persen | 7 persen | Rp34.460.120 | 8 Persen | Rp34.460.120 | 9 Persen | Rp194.000.000 | 10 Persen | Rp294.000.000 | 11 Persen | Rp394.000.000 | 11 Persen | Rp950.920.240 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan desa layak anak | n/a | 15 Kalurahan | Rp55.799.245 | 30 Kalurahan | Rp55.799.245 | 45 Kalurahan | Rp900.000.000 | 60 Kalurahan | Rp900.000.000 | 75 Kalurahan | Rp900.000.000 | 75 Kalurahan | Rp2.811.598.490 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | 100 Persen | 100 Persen | Rp629.728.475 | 100 Persen | Rp629.728.700 | 100 Persen | Rp881.000.000 | 100 Persen | Rp886.000.000 | 100 Persen | Rp891.000.000 | 100 Persen | Rp3.917.457.175 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan | 30,67 Persen | 37,33 Persen | Rp235.000.000 | 42,67 Persen | Rp340.000.000,00 | 48 Persen | Rp400.000.000,00 | 53,33 Persen | Rp390.000.000,00 | 58,67 Persen | Rp450.000.000,00 | 58,67 Persen | Rp1.815.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 09 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik | n/a | 14,28 Persen | Rp2.900.000 | 28,57 Persen | Rp20.000.000,00 | 57,14 Persen | Rp20.000.000 | 85,71 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp30.000.000 | 100 Persen | Rp92.900.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | 147,57 Persen | 149 Persen | Rp525.935.120 | 151 Persen | Rp1.276.750.000,00 | 153 Persen | Rp1.276.750.000 | 155 Persen | Rp1.276.750.000 | 157 Persen | Rp1.519.750.000 | 157 Persen | Rp5.875.935.120 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan | 24 Persen | 22,67 Persen | Rp80.687.000 | 21,33 Persen | Rp211.000.000 | 20 Persen | Rp211.000.000 | 18,67 Persen | Rp211.000.000 | 17,33 Persen | Rp325.000.000 | 17,33 Persen | Rp1.038.687.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 100 Persen | 100 Persen | Rp31.000.000 | 100 Persen | Rp61.000.000,00 | 100 Persen | Rp61.000.000,00 | 100 Persen | Rp61.000.000,00 | 100 Persen | Rp86.000.000,00 | 100 Persen | Rp300.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 10 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81,04 | 82 Angka | Rp941.654.430 | 83 Angka | Rp950.143.500 | 84 Angka | Rp923.791.000 | 85 Angka | Rp1.571.656.000 | 86 Angka | Rp2.310.564.000 | 86 Angka | Rp6.697.808.930 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2 | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | n/a | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp60.000.000 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2 | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | n/a | 90 Persen | Rp386.090.620 | 90 Persen | Rp13.400.000.000 | 90 Persen | Rp11.400.000.000 | 90 Persen | Rp10.400.000.000 | 90 Persen | Rp400.000.000 | 90 Persen | Rp35.986.090.620 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2 | 10 | 11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | 20,73 Persen | 33,03 Persen | Rp4.220.382.000 | 35,37 Persen | Rp7.318.511.500 | 44,74 Persen | Rp10.746.608.000 | 54,58 Persen | Rp11.010.451.000 | 64,89 Persen | Rp8.651.181.000 | 64,89 Persen | Rp41.947.133.500 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 2 | 11 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | 0 | - | 100 Persen | Rp100.000.000 | 100 Persen | 250.000.000 | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | 250.000.000 | 100 Persen | Rp1.100.000.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 83 Angka | 3.278.515.080 | 83,25 Angka | Rp3.587.161.040 | 83,5 Angka | 5.787.774.040 | 83,75 Angka | Rp3.980.745.040 | 84 Angka | 4.191.158.040 | 84 Angka | Rp20.825.353.240 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | n/a | 14,29 Persen | 382.795.740 | 57,14 Persen | Rp1.700.000.000 | 85,71 Persen | 910.000.000 | 100 Persen | Rp170.000.000 | 100 Persen | 175.000.000 | 100 Persen | Rp3.337.795.740 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | n/a | 70 Persen | 4.895.237.000 | 75 Persen | Rp1.745.000.000 | 80 Persen | 1.590.000.000 | 85 Persen | Rp1.705.000.000 | 90 Persen | 1.800.000.000 | 90 Persen | Rp11.735.237.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | n/a | 30 Persen | 3.782.201.120 | 32 Persen | Rp5.895.936.560 | 34 Persen | 5.426.000.000 | 36 Persen | Rp6.268.600.000 | 38 Persen | 5.850.000.000 | 38 Persen | Rp27.222.737.680 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | n/a | 31,35 Persen | 14.675.000 | 33,10 Persen | Rp15.000.000 | 34,84 Persen | 20.000.000 | 36,58 Persen | Rp22.500.000 | 38,32 Persen | 23.000.000 | 100 Persen | Rp95.175.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | n/a | 16,67 Persen | 31.900.000 | 23,33 Persen | Rp51.000.000 | 25 Persen | 64.000.000 | 31 Persen | Rp73.000.000 | 33,33 Persen | 82.000.000 | 34 Persen | Rp301.900.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | n/a | 5 Persen | 82.820.500 | 5 Persen | Rp106.000.000 | 5 Persen | 117.000.000 | 5 Persen | Rp124.000.000 | 5 Persen | 145.000.000 | 5 Persen | Rp574.820.500 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional | n/a | 1 penghargaan | 16.310.000 | 1 penghargaan | Rp40.000.000 | 1 penghargaan | 44.000.000 | 1 penghargaan | Rp50.000.000 | 1 penghargaan | 55.000.000 | 5 penghargaan | Rp205.310.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | n/a | 100 Persen | 14.950.000 | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | 25.000.000 | 100 Persen | Rp30.000.000 | 100 Persen | 35.000.000 | 100 Persen | Rp124.950.000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 41,36 Persen | 42,42 Persen | 8.290.292.560 | 44,16 Persen | Rp10.086.535.400 | 45,87 Persen | 10.303.791.960 | 46,86 Persen | Rp10.913.471.960 | 50,07 Persen | 13.208.471.960 | 50,07 Persen | Rp52.802.563.840 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 83 Angka | Rp3.270.576.670 | 83.25 Angka | Rp3.527.457.358 | 83.50 Angka | Rp3.764.203.094 | 83.75 Angka | Rp4.029.945.929 | 84 Angka | Rp5.157.228.194 | 84 Angka | Rp19.749.411.245 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | 99 Persen | 99,81 Persen | Rp626.137.394 | 99,82 Persen | Rp674.715.761 | 99,83 Persen | Rp735.641.493 | 99,84 Persen | Rp792.979.817 | 99,85 Persen | Rp872.277.799 | 99,85 Persen | Rp3.701.752.264 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | 96 Persen | 96 Persen | Rp431.856.669 | 96,1 Persen | Rp461.006.962 | 96,2 Persen | Rp500.562.813 | 96,3 Persen | Rp538.619.094 | 96,4 Persen | Rp592.481.004 | 96,4 Persen | Rp2.524.526.542 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | 99 Persen | 99,5 Persen | Rp376.741.530 | 99,6 Persen | Rp900.380.308 | 99,7 Persen | Rp441.413.428 | 99,8 Persen | Rp479.554.771 | 99,9 Persen | Rp520.910.248 | 99,9 Persen | Rp2.719.000.285 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 12 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat | 99 Persen | 100 Persen | Rp89.968.737 | 100 Persen | Rp98.965.611 | 100 Persen | Rp108.862.172 | 100 Persen | Rp119.748.389 | 100 Persen | Rp113.902.755 | 100 Persen | Rp531.447.664 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | n/a | 82 Angka | Rp824.075.615 | 83 Angka | Rp865.278.871 | 84 Angka | Rp908.542.814 | 85 Angka | Rp953.969.955 | 86 Angka | Rp1.001.668.453 | 86 Angka | Rp4.553.535.708 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan | n/a | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp700.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 13 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan | n/a | 100 Persen | Rp30.000.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp40.000.000 | 100 Persen | Rp45.000.000 | 100 Persen | Rp50.000.000 | 100 Persen | Rp200.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | 100 Persen | 100 Persen | Rp3.458.543.215 | 100 Persen | Rp4.516.401.480 | 100 Persen | Rp4.222.310.172 | 100 Persen | Rp3.882.498.130 | 100 Persen | Rp4.294.388.138 | 100 Persen | Rp20.374.141.135 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | n/a | 100 Persen | Rp2.488.565.670 | 100 Persen | Rp4.063.753.649 | 100 Persen | Rp4.493.629.014 | 100 Persen | Rp4.971.991.915 | 100 Persen | Rp5.168.197.409 | 100 Persen | Rp21.186.137.657 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 10 | 11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. | n/a | 16 Persen | Rp600.000.000 | 36 Persen | Rp650.000.000 | 56 Persen | Rp700.000.000 | 77 Persen | Rp750.000.000 | 100 Persen | Rp800.000.000 | 100 Persen | Rp3.500.000.000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan | 25 Persen | 33 Persen | Rp1.057.984.500 | 41,67 Persen | Rp1.300.092.000 | 50 Persen | Rp1.300.092.000 | 58,33 Persen | Rp1.300.092.000 | 66,67 Persen | Rp1.300.092.000 | 66,67 Persen | Rp6.258.352.500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 2 | 14 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 83 Angka | Rp1.938.485.000 | 83 Angka | Rp1.250.000.000 | 83 Angka | Rp1.500.000.000 | 83 Angka | Rp1.650.000.000 | 83 Angka | Rp1.732.500.000 | 83 Angka | Rp8.070.985.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR)) | 1,67 Angka | 1,66 Angka | Rp150.544.950 | 1,65 Angka | Rp150.000.000 | 1,64 Angka | Rp165.000.000 | 1,63 Angka | Rp181.500.000 | 1,62 Angka | Rp194.700.000 | 1,62 Angka | Rp841.744.950 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | n/a | 77,2 Persen | Rp5.548.497.130 | 77,2 Persen | Rp2.344.401.250 | 77,2 Persen | Rp2.090.369.135 | 77,2 Persen | Rp2.704.599.135 | 77,2 Persen | Rp4.127.300.000 | 77,2 Persen | Rp16.815.166.650 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina | 82,5 Persen | 83 Persen | Rp970.477.780 | 84 Persen | Rp973.795.865 | 84,5 Persen | Rp973.795.865 | 85 Persen | Rp1.123.795.865 | 85,5 Persen | Rp1.750.076.000 | 85,5 Persen | Rp5.791.941.375 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2 | 15 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | 0 | Rp0 | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | Rp3.390.000.000 | 100 Persen | Rp3.680.000.000 | 100 Persen | Rp2.010.000.000 | 100 Persen | Rp9.580.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,00 angka | 80,50 Angka | Rp965.187.000 | 80,75 Angka | Rp965.187.000 | 81 Angka | Rp1.061.705.000 | 81,25 Angka | Rp1.167.875.000 | 81,50 Angka | Rp1.284.662.000 | 81,50 Angka | Rp5.444.616.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN | Rasio Konektivitas Kabupaten | 30,43 | 30,43 | Rp13.012.540.000 | 30,43 | Rp9.220.389.000 | 30,43 | Rp10.689.762.000 | 30,43 | Rp12.312.443.000 | 30,43 | Rp14.128.890.000 | 30,43 | Rp59.364.024.000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota | 0,30 angka | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | 0,30 angka | | |
| 2 | 16 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital | 28,57 Persen | 42,86 Persen | Rp500.000.000 | 57,14 Persen | Rp1.680.350.000 | 71,43 Persen | Rp1.848.385.000 | 85,71 Persen | Rp2.033.223.500 | 100 Persen | Rp2.236.545.850 | 100 Persen | Rp8.298.504.350 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 86 Angka | Rp1.684.961.498 | 87 Angka | Rp2.132.464.458 | 89 angka | Rp2.195.710.604 | 90 Angka | Rp2.415.281.266 | 92 Angka | Rp2.695.307.791 | 92 Angka | Rp11.123.725.617 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 16 | 02 | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | 50 Persen | 70 Persen | Rp1.309.327.700 | 71 Persen | Rp1.639.360.514 | 72 Persen | Rp1.671.101.718 | 73 Persen | Rp1.698.953.412 | 74 Persen | Rp1.868.848.754 | 74 Persen | Rp8.187.592.098 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 16 | 03 | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,67 Angka | 2,75 Angka | Rp9.684.574.802 | 2,85 Angka | Rp9.824.181.468 | 2,9 Angka | Rp10.206.599.615 | 2,95 Angka | Rp10.592.259.576 | 2,95 Angka | Rp11.251.485.534 | 2,95 Angka | Rp51.559.100.995 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | |
| 2 | 17 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,34 angka | 81 Angka | Rp2.775.856.027 | 81.5 Angka | Rp3.217.891.625 | 82 Angka | Rp3.505.716.000 | 82,5 Angka | Rp3.682.832.000 | 83 Angka | Rp4.333.290.583 | 83 Angka | Rp17.515.586.235 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 2,5 Persen | 2,5 Persen | Rp24.835.120 | 2,5 Persen | 28.000.000 | 2,5 Persen | 29.500.000 | 2,5 Persen | 31.000.000 | 2,5 Persen | 32.000.000 | 2,5 Persen | Rp145.335.120 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 66,88 Persen | 70,23 Persen | Rp121.110.120 | 73,58 Persen | Rp155.895.000 | 75,25 Persen | Rp159.543.000 | 76,92 Persen | Rp166.757.500 | 78,59 Persen | Rp194.992.000 | 78,59 Persen | Rp798.297.620 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 56,54 Persen | 59,52 Persen | Rp26.835.120 | 63,99 Persen | 47.500.000 | 65,48 Persen | 50.000.000 | 66,96 Persen | 52.500.000 | 68,45 Persen | 55.000.000 | 68,45 Persen | Rp231.835.120 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 60 Persen | 60 Persen | Rp554.286.350 | 60 Persen | Rp169.774.000 | 60 Persen | Rp175.938.500 | 60 Persen | Rp187.325.000 | 60 Persen | Rp221.936.000 | 60 Persen | Rp1.309.259.850 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standa risasi,dan kemitraan | 5 Persen | 5 Persen | Rp108.497.240 | 5 Persen | Rp281.127.000 | 5 Persen | Rp296.384.000 | 5 Persen | Rp314.845.000 | 5 Persen | Rp372.966.000 | 5 Persen | Rp1.373.819.240 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang berizin | 45 Persen | 50 Persen | Rp599.342.940 | 55 Persen | Rp530.997.000 | 60 Persen | Rp564.096.000 | 65 Persen | Rp612.759.000 | 70 Persen | Rp736.976.000 | 70 Persen | Rp3.044.170.940 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | 55 Persen | 60 Persen | Rp410.733.440 | 65 Persen | Rp358.033.000 | 70 Persen | Rp364.207.500 | 75 Persen | Rp379.917.000 | 80 Persen | Rp420.988.000 | 80 Persen | Rp1.933.878.940 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Rintisan Desa Preneur | 9,33 Persen | 10,67 persen | Rp400.000.000 | 12 persen | Rp593.000.000 | 13,33 persen | Rp828.000.000 | 14,67 persen | Rp406.000.000 | 17,33 persen | Rp393.000.000 | 17,33 persen | Rp2.620.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian pemasaran pada Desa Preneur | 0 Persen | 14 Persen | Rp400.000.000 | 28 Persen | Rp1.447.073.000 | 40 Persen | Rp2.528.000.000 | 50 Persen | Rp2.537.000.000 | 70 Persen | Rp2.537.000.000 | 70 Persen | Rp9.449.073.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 | 85 Angka | Rp1.167.283.800 | 85 Angka | Rp1.009.881.000 | 85 Angka | Rp1.521.264.000 | 85 Angka | Rp1.625.315.000 | 85 Angka | Rp2.494.934.000 | 85 Angka | Rp7.818.677.800 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota | n/a | 100 Persen | Rp149.330.000 | 100 Persen | Rp233.500.000 | 100 Persen | Rp256.850.000 | 100 Persen | Rp282.535.000 | 100 Persen | Rp236.500.000 | 100 Persen | Rp1.158.715.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | 7,85 Persen | 8,30 Persen | 278.587.500 | 11,29 Persen | 340.038.000 | 12,79 Persen | 406.688.000 | 15,29 Persen | 480.003.000 | 17,79 Persen | 473.038.000 | 17,79 Persen | Rp1.978.354.500 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | 100 Persen | 100 Persen | Rp604.839.580 | 100 Persen | Rp463.100.000 | 100 Persen | Rp399.410.000 | 100 Persen | Rp439.351.000 | 100 Persen | Rp417.610.000 | 100 Persen | Rp2.324.310.580 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 100 Persen | 100 Persen | Rp379.462.000 | 100 Persen | Rp413.962.000 | 100 Persen | Rp422.712.000 | 100 Persen | Rp432.337.000 | 100 Persen | Rp430.237.000 | 100 Persen | Rp2.078.710.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan | 100 Persen | 100 Persen | Rp102.785.120 | 100 Persen | Rp96.800.000 | 100 Persen | Rp106.480.000 | 100 Persen | Rp117.128.000 | 100 Persen | Rp117.128.000 | 100 Persen | Rp540.321.120 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 19 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | n/a | 80 Persen | Rp1.445.340.480 | 81 Persen | Rp1.745.340.480 | 82 Persen | Rp1.995.340.480 | 83 Persen | Rp2.345.340.480 | 84 Persen | Rp4.845.340.480 | 84 Persen | Rp12.376.702.400 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi Olahraga | n/a | 55 Medali | Rp8.350.081.966 | 65 Medali | Rp8.650.081.966 | 80 Medali | Rp8.900.081.966 | 100 Medali | Rp9.250.081.966 | 130 Medali | Rp11.750.081.966 | 130 Medali | Rp46.900.409.830 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Organisasi Pramuka yang aktif | n/a | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp643.010.720 | 18 Organisasi | Rp3.215.053.600 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | 20 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 100 Persen | 100 Persen | Rp176.400.000 | 100 Persen | Rp170.665.000 | 100 Persen | Rp207.968.750 | 100 Persen | Rp228.765.625 | 100 Persen | Rp251.642.187 | 100 Persen | Rp1.035.441.562 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 21 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 60 Persen | 65 Persen | Rp844.457.000 | 70 Persen | Rp1.332.186.560 | 75 Persen | Rp1.374.185.313 | 80 Persen | Rp1.301.129.621 | 81 Persen | Rp2.508.509.884 | 81 Persen | Rp7.360.468.378 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2 | 22 | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 80,98 Angka | Rp1.036.350.000 | 81 Angka | Rp1.093.102.000 | 81,3 Angka | Rp1.152.071.001 | 81,5 Angka | Rp1.213.332.240 | 81,6 Angka | Rp1.656.258.364 | 81,6 Angka | Rp6.151.113.605 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan | 54 Persen | 61,03 Persen | 1.425.000.000 | 68,38 Persen | 3.936.386.000 | 75,74 Persen | 6.862.053.999 | 83,08 Persen | 5.733.225.960 | 90,44 Persen | 6.077.448.556 | 90,44 Persen | Rp24.034.114.515 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | URUSAN KEBUDAYAAN | Bahasa Sastra yang dilestarikan | n/a | 18 Pelestarian | 3.300.000.000 | 46 Pelestarian | 6.879.050.000 | 76 Pelestarian | 7.770.950.000 | 104 Pelestarian | 7.177.450.500 | 132 Pelestarian | 7.756.495.550 | 132 Pelestarian | Rp32.883.946.050 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | | | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | n/a | 219 Pelestarian | 10.125.000.000 | 454 Pelestarian | 15.783.924.000 | 691 Pelestarian | 16.251.193.000 | 953 Pelestarian | 18.324.602.300 | 1215 Pelestarian | 28.641.062.530 | 1215 Pelestarian | Rp89.125.781.830 | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| 2 | 23 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 80 Angka | Rp831.968.820 | 80 Angka | Rp850.000.000 | 80 Angka | Rp900.000.000 | 80 Angka | Rp950.000.000 | 80 Angka | Rp1.000.000.000 | 80 Angka | Rp4.531.968.820 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | 7,61 Persen | 10,08 Persen | Rp416.798.700 | 12,55 Persen | Rp527.804.000 | 14,02 Persen | Rp2.050.000.000 | 17,48 Persen | Rp600.000.000 | 19,95 Persen | Rp1.000.000.000 | 19,95 Persen | Rp4.594.602.700 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 24 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) | 59 Persen | 60 Persen | Rp215.832.480 | 61 Persen | Rp250.000.000 | 62 Persen | Rp300.000.000 | 63 Persen | Rp400.000.000 | 64 Persen | Rp700.000.000 | 64 Persen | Rp1.865.832.480 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 2 | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 68 Persen | 69 Persen | Rp19.236.000 | 70 Persen | Rp50.000.000 | 71 Persen | Rp1.133.865.000 | 72 Persen | Rp152.673.000 | 73 Persen | Rp167.080.000 | 73 Persen | Rp1.522.854.000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3 | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Kalurahan Bahari yang direvitalisasi | n/a | 0 | 0 | 20 Persen | 125.000.000 | 60 Persen | 250.000.000 | 80 Persen | 125.000.000 | 100 Persen | 125.000.000 | 100 Persen | Rp625.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 84 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp700.000.000 | 85 Angka | Rp3.500.000.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan tangkap | 829 ton | 829 ton | Rp187.675.000 | 831 ton | Rp292.175.120,00 | 833 ton | Rp404.490.000,00 | 835 ton | Rp662.675.120,00 | 837 ton | Rp319.975.120,00 | 837 ton | Rp1.866.990.360 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi perikanan budidaya | 12.740 ton | 12.740 ton | Rp1.459.882.000 | 12.805 ton | Rp1.474.817.880,00 | 12.878 ton | Rp3.610.882.000,00 | 12.959 ton | Rp1.613.413.880,00 | 13.046 ton | Rp2.133.888.880,00 | 13.046 ton | Rp10.292.884.640 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | 5 Persen | 5 Persen | Rp3.900.000 | 5 Persen | Rp3.900.000,00 | 5 Persen | Rp53.900.000,00 | 5 Persen | Rp53.900.000,00 | 5 Persen | Rp79.900.000,00 | 5 Persen | Rp195.500.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 3 | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase produksi perikanan yang diolah | 2 Persen | 2 Persen | Rp42.900.000 | 2 Persen | Rp162.900.000,00 | 2 Persen | Rp127.900.000,00 | 5 Persen | Rp156.900.000,00 | 5 Persen | Rp306.950.000,00 | 5 Persen | Rp797.550.000 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | 26 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Desa Wisata | 32 Persen | 33,33 Persen | Rp1.000.000.000 | 34,67 Persen | Rp2.379.500.000 | 36 Persen | Rp1.475.000.000 | 37,33 Persen | Rp1.525.000.000 | 38,67 Persen | Rp1.760.000.000 | 93 Persen | Rp8.139.500.000 | DINAS PARIWISATA |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | n/a | Rp0 | 100 Persen | Rp735.000.000 | 100 Persen | Rp0 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp500.000.000 | 100 Persen | Rp1.635.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 80 Angka | Rp4.278.552.000 | 80 Angka | Rp4.570.540.000 | 82 Angka | Rp4.872.137.000 | 83 Angka | Rp5.183.648.000 | 84 Angka | Rp6.765.820.000 | 84 Angka | Rp25.670.697.000 | DINAS PARIWISATA |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | n/a | 2,71 Persen | Rp2.902.000.000 | 3,13 Persen | Rp5.402.000.000 | 3,13 Persen | Rp3.602.000.000 | 3,13 Persen | Rp8.902.000.000 | 3,13 Persen | Rp7.902.000.000 | 3,13 Persen | Rp28.710.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | n/a | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp966.800.000 | 2 Persen | Rp4.834.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | n/a | n/a | Rp0 | 25 Persen | Rp522.000.000 | 35 Persen | Rp622.000.000 | 50 Persen | Rp622.000.000 | 100 Persen | Rp622.000.000 | 100 Persen | Rp2.388.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | n/a | 2 CBT | Rp171.000.000 | 2 CBT | Rp549.000.000 | 2 CBT | Rp49.000.000 | 2 CBT | Rp499.000.000 | 2 CBT | Rp49.000.000 | 2 CBT | Rp1.317.000.000 | DINAS PARIWISATA |
| 3 | 27 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | n/a | n/a | | 100 Persen | Rp2.833.025.000 | | | | | | | 100 Persen | Rp2.833.025.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84 Angka | 84 Angka | Rp1.845.737.082 | 85 Angka | Rp2.576.729.802 | 85 Angka | Rp2.351.698.802 | 85 Angka | Rp2.230.167.802 | 85 Angka | Rp2.572.698.802 | 85 Angka | Rp11.577.032.290 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.585.571.950 | 100 Persen | Rp2.746.076.470 | 100 Persen | Rp3.146.076.470 | 100 Persen | Rp3.446.076.470 | 100 Persen | Rp4.196.951.470 | 100 Persen | Rp15.120.752.830 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Ketersediaan sarana peternakan | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.699.075.000 | 100 Persen | Rp922.125.000 | 100 Persen | Rp922.125.000 | 100 Persen | Rp922.125.000 | 100 Persen | Rp1.892.125.000,00 | 100 Persen | Rp6.357.575.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.941.072.488 | 100 Persen | Rp1.314.455.368 | 100 Persen | Rp1.314.455.368 | 100 Persen | Rp2.814.455.368 | 100 Persen | Rp1.578.210.368 | 100 Persen | Rp8.962.648.960 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Produksi Daging | 15.326 Ton | 15.456 Ton | | 15.588 Ton | | 15.713 ton | | 15.850 Ton | | 15.961 Ton | | 15.961 Ton | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | 100 Persen | 100 Persen | Rp70.000.000 | 100 Persen | Rp570.000.000 | 100 Persen | Rp570.000.000 | 100 Persen | Rp570.000.000 | 100 Persen | Rp595.000.000 | 100 Persen | Rp2.375.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | 100 Persen | 100 Persen | Rp2.700.000 | 100 Persen | Rp22.000.000 | 100 Persen | Rp22.000.000 | 100 Persen | Rp22.000.000 | 100 Persen | Rp32.000.000 | 100 Persen | Rp100.700.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | 6,3 ton/ha | 6,31 ton/ha | Rp792.243.360 | 6,315 ton/ha | Rp1.028.323.360 | 6,32 ton/ha | Rp1.028.323.360 | 6,325 ton/ha | Rp1.028.323.360 | 6,33 ton/ha | Rp1.213.323.360 | 6,33 ton/ha | Rp5.090.536.800 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 30 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 50 Persen | 51 Persen | Rp160.000.000 | 52 Persen | Rp168.000.000 | 53 Persen | Rp184.800.000 | 54 Persen | Rp194.040.000 | 55 Persen | Rp213.444.000 | 55 Persen | Rp920.284.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat | 1 Persen | 2 Persen | Rp6.070.923.713 | 3 Persen | Rp7.294.730.000 | 4 Persen | Rp6.623.334.000 | 5 Persen | Rp6.923.334.000 | 6 Persen | Rp8.200.000.000 | 6 Persen | Rp35.112.321.713 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) | 8 Persen | 7 Persen | Rp179.957.500 | 7 Persen | Rp188.955.375 | 6 Persen | Rp207.850.900 | 6 Persen | Rp218.243.400 | 5 Persen | Rp242.000.000 | 5 Persen | Rp1.037.007.175 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai ekspor | 83 juta US$ | 80 juta US$ | Rp654.020.000 | 90 juta US$ | Rp686.721.000 | 100 juta US$ | Rp755.393.100 | 110 juta US$ | Rp873.162.700 | 120 juta US$ | Rp1.200.000.000 | 500 juta US$ | Rp4.169.296.800 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | 25 Persen | 27 Persen | Rp349.223.100 | 30 Persen | Rp384.145.000 | 32 Persen | Rp422.559.500 | 35 Persen | Rp443.687.400 | 40 Persen | Rp488.056.200 | 40 Persen | Rp2.087.671.200 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | 0 Persen | - | Rp0 | 10 Persen | Rp300.000.000 | 15 Persen | Rp500.000.000 | 20 Persen | Rp525.000.000 | 25 Persen | Rp600.000.000 | 25 Persen | Rp1.925.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | 81,50% | 85,97 Persen | Rp1.684.041.210 | 90,65 Persen | Rp2.702.391.000 | 95,32 Persen | Rp2.151.503.500 | 100 Persen | Rp2.305.827.000 | 100 Persen | Rp2.773.672.217 | 100 Persen | Rp11.617.434.927 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 100 Persen | 100 Persen | Rp25.735.120 | 100 Persen | Rp44.500.000 | 100 Persen | Rp49.000.000 | 100 Persen | Rp52.000.000 | 100 Persen | Rp57.000.000 | 100 Persen | Rp228.235.120 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota | 0 Persen | 0 Persen | Rp0 | 0,22 Persen | Rp50.000.000 | 0,22 Persen | Rp62.000.000 | 0,22 Persen | Rp63.000.000 | 0,22 Persen | Rp65.000.000 | 0,22 Persen | Rp240.000.000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3 | 32 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Penempatan Transmigrasi | 72 Persen | 74 Persen | Rp575.000.000 | 80 Persen | Rp600.000.000 | 90 Persen | Rp625.000.000 | 100 Persen | Rp650.000.000 | 100 Persen | Rp700.000.000 | 100 Persen | Rp3.150.000.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 4 | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 83 Angka | Rp10.378.679.400 | 83 Angka | Rp10.513.147.000 | 83 Angka | Rp10.685.947.000 | 83 Angka | Rp10.976.575.000 | 83 Angka | Rp11.585.396.000 | 83 Angka | Rp54.139.744.400 | SEKRETARIAT DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | |
| | | | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | |
| 4 | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 92 Persen | 92 Persen | Rp1.043.927.600 | 92 Persen | Rp1.057.394.000 | 92 Persen | Rp1.071.352.000,00 | 92 Persen | Rp1.085.280.000,00 | 92 Persen | Rp1.099.172.000,00 | 92 Persen | Rp5.357.125.600 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | 100 Persen | 100 Persen | Rp442.575.000 | 100 Persen | Rp448.284.000 | 100 Persen | Rp454.201.000 | 100 Persen | Rp460.106.000 | 100 Persen | Rp465.995.000 | 100 Persen | Rp2.271.161.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | 100 Persen | 100 Persen | Rp7.686.962.700 | 100 Persen | Rp7.786.125.000 | 100 Persen | Rp7.888.902.000 | 100 Persen | Rp7.991.458.000 | 100 Persen | Rp8.093.749.000 | 100 Persen | Rp39.447.196.700 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti | 100 Persen | 100 Persen | Rp339.850.000 | 100 Persen | Rp344.234.000 | 100 Persen | Rp348.778.000 | 100 Persen | Rp353.312.000 | 100 Persen | Rp357.834.000 | 100 Persen | Rp1.744.008.000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender | 80 Persen | 80 Persen | Rp1.095.088.900 | 80 Persen | Rp1.109.216.000 | 80 Persen | Rp1.123.858.000 | 80 Persen | Rp1.138.468.000 | 80 Persen | Rp1.153.040.000 | 80 Persen | Rp5.619.670.900 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional | 0 Persen | 87,5 Persen | 261.050.000 | 88 Persen | 261.050.000 | 88,5 Persen | 261.050.000 | 89 Persen | 261.050.000 | 89,5 Persen | 261.050.000 | 89,5 Persen | Rp1.305.250.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | 6,67 Persen | 88 persen | 500.000.000 | 88,5 persen | 500.000.000 | 89 persen | 500.000.000 | 89,5 persen | 500.000.000 | 90 persen | 500.000.000 | 90 persen | Rp2.500.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | 87,5 Persen | 88 Persen | 200.000.000 | 88,5 Persen | 650.000.000 | 89 Persen | 300.000.000 | 89.50 Persen | 300.000.000 | 90 Persen | 350.000.000 | 90 Persen | Rp1.800.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul | 80.5 Persen | 81 Persen | 150.000.000 | 82 Persen | 200.000.000 | 83 Persen | 230.000.000 | 84 Persen | 245.000.000 | 85 Persen | 250.000.000 | 85 Persen | Rp1.075.000.000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 4 | 02 | | SEKRETARIAT DEWAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 02 | 01 | PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 angka | 84 Angka | Rp28.007.830.550 | 84 Angka | Rp30.796.194.663 | 85 Angka | Rp34.625.814.130 | 85 Angka | Rp37.263.395.543 | 85 Angka | Rp40.989.735.097 | 85 Angka | Rp171.682.969.982 | SEKRETARIAT DPRD |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | 80 Persen | 82 Persen | Rp14.943.253.450 | 84 Persen | Rp13.013.911.337 | 86 Persen | Rp11.035.494.870 | 88 Persen | Rp8.316.640.457 | 90 Persen | Rp9.980.250.903 | 90 Persen | Rp57.289.551.018 | SEKRETARIAT DPRD |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 90 Persen | 95 Persen | Rp330.502.000 | 100 Persen | Rp460.446.000 | 100 Persen | Rp506.413.800 | 100 Persen | Rp554.065.000 | 100 Persen | Rp601.315.000 | 100 Persen | Rp2.452.741.800 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2 | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | 10 Persen | 10 Persen | Rp0 | 20 Persen | Rp320.000.000 | 50 Persen | Rp200.000.000 | 70 Persen | Rp200.000.000 | 90 Persen | Rp200.000.000 | 90 Persen | Rp920.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85,5 Angka | Rp1.595.755.060 | 86 Angka | Rp1.675.542.813 | 86,5 Angka | Rp1.759.319.954 | 87 Angka | Rp1.675.542.813 | 87,5 Angka | Rp1.759.319.954 | 87,5 Angka | Rp8.465.480.593 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | 100 Persen | 100 Persen | Rp2.351.135.980 | 100 Persen | Rp3.117.173.929 | 100 Persen | Rp3.475.219.775 | 100 Persen | Rp4.348.590.929 | 100 Persen | Rp4.646.105.575 | 100 Persen | Rp17.938.226.189 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi | 95 Persen | 95 Persen | | 95,5 Persen | | 96 Persen | | 96,5 Persen | | 97 Persen | | 97 Persen | | |
| 5 | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.572.022.220 | 100 Persen | Rp1.650.623.331 | 100 Persen | Rp1.733.154.498 | 100 Persen | Rp1.650.623.331 | 100 Persen | Rp1.733.154.498 | 100 Persen | Rp8.339.577.877 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | |
| | | | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 Persen | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | 80 Persen | 80 Persen | Rp299.595.500 | 83 Persen | Rp500.000.000 | 85 Persen | Rp550.000.000 | 88 Persen | Rp605.000.000 | 90 Persen | Rp665.500.000 | 90 Persen | Rp2.620.095.500 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 84,14 Angka | 84,5 Angka | Rp684.094.393.140 | 85 Angka | Rp707.546.236.000 | 85 Angka | Rp716.438.030.000 | 85,5 Angka | Rp730.029.284.000 | 85,5 Angka | Rp737.972.504.000 | 85,5 Angka | Rp3.576.080.447.140 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 05 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penetapan APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Rp342.169.016.830 | Tepat Waktu | Rp324.547.097.500 | Tepat Waktu | Rp325.811.451.000 | Tepat Waktu | Rp318.197.011.000 | Tepat Waktu | Rp323.284.972.890 | Tepat Waktu | Rp1.634.009.549.220 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | Tepat Waktu | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | 87,84 Persen | 89 Persen | | 89 Persen | | 90 Persen | | 90 Persen | | 91 Persen | | 91 Persen | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | 100 Persen | 100 Persen | Rp1.262.739.710 | 100 Persen | Rp1.470.000.000 | 100 Persen | Rp1.542.000.000 | 100 Persen | Rp2.114.000.000 | 100 Persen | Rp1.692.000.000 | 100 Persen | Rp8.080.739.710 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 5 | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Realisasi PAD | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.302.989.220 | 100 Persen | Rp12.193.391.500 | 100 Persen | Rp12.827.418.000 | 100 Persen | Rp13.430.197.000 | 100 Persen | Rp14.082.037.110 | 100 Persen | Rp62.836.032.830 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 5 | 03 | | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul | 7 Persen | 20 Persen | Rp381.726.000 | 40 Persen | Rp741.084.500 | 60 Persen | Rp741.084.500 | 75 Persen | Rp741.084.500 | 90 Persen | Rp741.084.500 | 90 Persen | Rp3.346.064.000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 81 Angka | 82,43 Angka | Rp98.789.110.760 | 82,5 Angka | Rp101.629.595.400 | 82,55 Angka | Rp102.195.950.000 | 82,6 Angka | Rp102.562.571.700 | 82,65 Angka | Rp105.113.512.700 | 82,65 Angka | Rp510.290.740.560 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| 5 | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | n/a | 30 Persen | Rp8.953.282.240 | 31 Persen | Rp6.528.762.100 | 32 Persen | Rp6.377.996.500 | 32 Persen | Rp6.426.537.800 | 32 Persen | Rp6.527.537.800 | 32 Persen | Rp34.814.116.440 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | | | | Peta Kompetensi ASN | n/a | 6 Persen | | 9 Persen | | 12 Persen | | 15 Persen | | 18 Persen | | 18 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | | | | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | n/a | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | 100 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| 5 | 05 | | PENELITIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | n/a | 100 Persen | Rp230.343.740 | 100 Persen | Rp241.860.927 | 100 Persen | Rp253.953.973 | 100 Persen | Rp241.860.927 | 100 Persen | Rp253.953.973 | 100 Persen | Rp1.221.973.541 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas | 0 | 0 | 0 | 38,89 Persen | 219.857.000 | 44,44 Persen | 241.842.700 | 50 Persen | 266.026.970 | 55,56 Persen | 292.629.000 | 55,56 Persen | Rp1.020.355.670 | INSPEKTORAT DAERAH |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,93 angka | 83 Angka | Rp2.141.908.600 | 83 Angka | Rp2.855.001.803 | 83 Angka | Rp3.695.858.239 | 83 Angka | Rp4.260.897.302 | 83 Angka | Rp5.176.587.857 | 83 Angka | Rp18.130.253.801 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku | n/a | 12 Persen | Rp194.072.500 | 13 Persen | Rp303.445.378 | 14 Persen | Rp449.410.881 | 15 Persen | Rp643.072.513 | 16 Persen | Rp1.003.533.390 | 16 Persen | Rp2.593.534.663 | INSPEKTORAT DAERAH |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | n/a | 20 Persen | Rp1.293.514.900 | 25 Persen | Rp1.432.401.820 | 30 Persen | Rp1.710.576.180 | 35 Persen | Rp2.367.871.214 | 40 Persen | Rp2.701.817.752 | 40 Persen | Rp9.506.181.867 | INSPEKTORAT DAERAH |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | 45.300.000 | 100 Persen | 66.040.000 | 100 Persen | 66.040.000 | 100 Persen | 66.040.000 | 100 Persen | 66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON BANTUL |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | 0 | 82 Persen | 50.000.000 | 83 Persen | 50.000.000 | 84 Persen | 50.000.000 | 85 Persen | 50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON BANTUL |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 86 Angka | Rp537.101.000 | 87 Angka | Rp679.013.140 | 88 Angka | Rp916.883.140 | 89 Angka | Rp1.159.235.140 | 90 Angka | Rp1.719.035.140 | 90 Angka | Rp5.011.267.560 | KAPANEWON BANTUL |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 98 Persen | 90 Persen | Rp31.520.000 | 91 Persen | Rp32.976.000 | 92 Persen | Rp32.976.000 | 93 Persen | Rp32.976.000 | 94 Persen | Rp32.976.000 | 94 Persen | Rp163.424.000 | KAPANEWON BANTUL |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 100 Persen | Rp84.800.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp66.950.000 | 100 Persen | Rp352.600.000 | KAPANEWON BANTUL |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp19.600.000 | 100 Persen | Rp98.000.000 | KAPANEWON BANTUL |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp143.690.000 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp175.265.860 | 100 Persen | Rp844.753.440 | KAPANEWON BANTUL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 79,59 Angka | 80 Angka | Rp556.197.000 | 81 Angka | Rp641.466.500 | 82 Angka | Rp795.269.000 | 83 Angka | Rp976.385.000 | 84 Angka | Rp1.225.508.000 | 84 Angka | Rp4.194.825.500 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 95 Angka | 95 Angka | Rp41.187.500 | 95 Angka | Rp70.750.000 | 95 Angka | Rp81.000.000 | 95 Angka | Rp115.000.000 | 95 Angka | Rp174.500.000 | 95 Angka | Rp482.437.500 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 90 Persen | Rp125.436.000 | 91 Persen | Rp137.450.000 | 92 Persen | Rp168.000.000 | 93 Persen | Rp172.000.000 | 94 Persen | Rp255.000.000 | 94 Persen | Rp857.886.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp91.653.500 | 100 Persen | Rp101.653.500 | 100 Persen | Rp131.000.000 | 100 Persen | Rp140.000.000 | 100 Persen | Rp270.000.000 | 100 Persen | Rp734.307.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp5.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000,00 | 100 Persen | Rp21.000.000,00 | 100 Persen | Rp32.000.000,00 | 100 Persen | Rp63.000.000,00 | 100 Persen | Rp131.000.000 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON DLINGO |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON DLINGO |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 angka | 85 Angka | Rp564.587.500 | 86 Angka | Rp681.232.000 | 87 Angka | Rp830.000.000 | 88 Angka | Rp992.239.000 | 89 Angka | Rp1.537.926.000 | 89 Angka | Rp4.605.984.500 | KAPANEWON DLINGO |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 100 Persen | Rp31.995.000 | 100 Persen | Rp45.000.000 | 100 Persen | Rp90.000.000 | 100 Persen | Rp110.000.000 | 100 Persen | Rp145.000.000 | 100 Persen | Rp421.995.000 | KAPANEWON DLINGO |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 85 Persen | 100 Persen | Rp138.447.500 | 100 Persen | Rp170.000.000 | 100 Persen | Rp210.000.000 | 100 Persen | Rp240.000.000 | 100 Persen | Rp245.000.000 | 100 Persen | Rp1.003.447.500 | KAPANEWON DLINGO |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp104.587.000 | 100 Persen | Rp120.000.000 | 100 Persen | Rp120.000.000 | 100 Persen | Rp170.000.000 | 100 Persen | Rp180.000.000 | 100 Persen | Rp694.587.000 | KAPANEWON DLINGO |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.980.000 | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp38.710.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp139.690.000 | KAPANEWON DLINGO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 85 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 100 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 80 Angka | Rp586.982.500 | 81 Angka | Rp633.681.000 | 81 Angka | Rp728.092.000 | 82 Angka | Rp864.621.000 | 82 Angka | Rp1.370.710.000 | 100 Persen | Rp4.184.086.500 | KAPANEWON IMOGIRI |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 95 Persen | Rp37.200.000 | 96 Persen | Rp55.000.000 | 97 Persen | Rp80.000.000 | 98 Persen | Rp125.000.000 | 100 Persen | Rp155.000.000 | 100 Persen | Rp452.200.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 95 Persen | Rp188.122.500 | 96 Persen | Rp210.000.000 | 97 Persen | Rp280.000.000 | 98 Persen | Rp341.000.000 | 100 Persen | Rp390.000.000 | 100 Persen | Rp1.409.122.500 | KAPANEWON IMOGIRI |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 95 Persen | Rp49.750.000 | 96 Persen | Rp130.000.000 | 97 Persen | Rp160.000.000 | 98 Persen | Rp180.000.000 | 100 Persen | Rp205.000.000 | 100 Persen | Rp724.750.000 | KAPANEWON IMOGIRI |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp18.600.000 | 100 Persen | Rp50.000.000 | 100 Persen | Rp93.000.000 | 100 Persen | Rp100.000.000 | 100 Persen | Rp110.000.000 | 0 Persen | Rp371.600.000 | KAPANEWON IMOGIRI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON JETIS |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON JETIS |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 80 Angka | Rp577.192.500 | 81 Angka | Rp663.568.500 | 81 Angka | Rp895.779.500 | 82 Angka | Rp1.152.411.500 | 82 Angka | Rp1.722.260.500 | 82 Angka | Rp5.011.212.500 | KAPANEWON JETIS |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 91 Persen | Rp25.475.000 | 92 Persen | Rp28.187.500 | 93 Persen | Rp28.187.500 | 94 Persen | Rp28.187.500 | 94 Persen | Rp28.187.500 | 94 Persen | Rp138.225.000 | KAPANEWON JETIS |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 92 Persen | Rp130.585.000 | 93 Persen | Rp161.266.500 | 94 Persen | Rp161.266.500 | 95 Persen | Rp161.266.500 | 95 Persen | Rp161.266.500 | 95 Persen | Rp775.651.000 | KAPANEWON JETIS |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp119.087.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp133.012.500 | 100 Persen | Rp651.137.500 | KAPANEWON JETIS |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp15.000.000 | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp5.250.000 | 100 Persen | Rp36.000.000 | KAPANEWON JETIS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON KRETEK |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON KRETEK |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,16 angka | 80 Angka | Rp623.496.000 | 81 Angka | Rp520.847.000 | 81 Angka | Rp634.537.000 | 82 Angka | Rp840.830.000 | 82 Angka | Rp985.535.000 | 84 Angka | Rp3.605.245.000 | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 90 Persen | Rp56.700.000 | 90 Persen | Rp100.000.000 | 91 Persen | Rp104.000.000 | 91 Persen | Rp108.000.000 | 92 Persen | Rp250.000.000 | 92 Persen | Rp618.700.000 | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 80 Persen | Rp135.000.000 | 82 Persen | Rp173.000.000 | 83 Persen | Rp217.000.000 | 85 Persen | Rp229.000.000 | 87 Persen | Rp341.000.000 | 87 Persen | Rp1.095.000.000 | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 95 Persen | 87 Persen | Rp73.000.000 | 88 Persen | Rp135.000.000 | 89 Persen | Rp197.000.000 | 90 Persen | Rp206.000.000 | 92 Persen | Rp315.000.000 | 92 Persen | Rp926.000.000 | KAPANEWON KRETEK |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp4.000.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp16.000.000 | 100 Persen | Rp18.000.000 | 100 Persen | Rp50.000.000 | 100 Persen | Rp98.000.000 | KAPANEWON KRETEK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON KASIHAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON KASIHAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 85 Angka | Rp624.412.800 | 86 Angka | Rp755.586.439 | 87 Angka | Rp900.321.527 | 88 Angka | Rp983.380.527 | 89 Angka | Rp1.310.023.712 | 89 Angka | Rp4.573.725.005 | KAPANEWON KASIHAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 100 Persen | Rp60.147.000 | 100 Persen | Rp61.681.100 | 100 Persen | Rp84.569.320 | 100 Persen | Rp144.569.320 | 100 Persen | Rp214.820.257 | 100 Persen | Rp565.786.997 | KAPANEWON KASIHAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 90 Persen | Rp98.440.367 | 90 Persen | Rp111.462.477 | 90 Persen | Rp134.306.972 | 90 Persen | Rp194.306.972 | 90 Persen | Rp274.966.087 | 90 Persen | Rp813.482.875 | KAPANEWON KASIHAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 90 Persen | 90 Persen | Rp40.146.000 | 90 Persen | Rp35.679.800 | 90 Persen | Rp73.367.760 | 90 Persen | Rp103.367.760 | 90 Persen | Rp164.198.151 | 90 Persen | Rp416.759.471 | KAPANEWON KASIHAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp46.777.833 | 100 Persen | Rp89.301.184 | 100 Persen | Rp117.713.421 | 100 Persen | Rp147.713.421 | 100 Persen | Rp215.064.793 | 100 Persen | Rp616.570.652 | KAPANEWON KASIHAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PANDAK |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PANDAK |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 80 Angka | Rp503.750.000 | 81 Angka | Rp595.188.000 | 82 Angka | Rp807.961.000 | 83 Angka | Rp989.991.000 | 83 Angka | Rp1.474.032.000 | 83 Angka | Rp4.370.922.000 | KAPANEWON PANDAK |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 89 Persen | 90 Persen | Rp32.650.000 | 91 Persen | Rp37.900.000 | 92 Persen | Rp46.250.000 | 93 Persen | Rp66.600.000 | 94 Persen | Rp81.500.000 | 94 Persen | Rp264.900.000 | KAPANEWON PANDAK |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 82 Persen | 82 Persen | Rp179.895.000 | 84 Persen | Rp224.935.000 | 86 Persen | Rp238.110.000 | 88 Persen | Rp266.950.000 | 88 Persen | Rp303.500.000 | 88 Persen | Rp1.213.390.000 | KAPANEWON PANDAK |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 82 Persen | 82 Persen | Rp94.850.000 | 84 Persen | Rp134.850.000 | 86 Persen | Rp134.850.000 | 88 Persen | Rp149.000.000 | 88 Persen | Rp184.850.000 | 88 Persen | Rp698.400.000 | KAPANEWON PANDAK |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp6.310.000 | 100 Persen | Rp8.400.000 | 100 Persen | Rp18.400.000 | 100 Persen | Rp22.500.000 | 100 Persen | Rp26.750.000 | 100 Persen | Rp82.360.000 | KAPANEWON PANDAK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000,00 | 100 Persen | Rp66.040.000,00 | 100 Persen | Rp66.040.000,00 | 100 Persen | Rp66.040.000,00 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PUNDONG |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PUNDONG |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 persen | Rp399.541.000 | 86 persen | Rp525.870.520 | 88 persen | Rp728.127.745 | 89 persen | Rp953.350.684 | 90 persen | Rp1.479.373.976 | 90 persen | Rp4.086.263.925 | KAPANEWON PUNDONG |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 persen | Rp32.012.500 | 92 persen | Rp29.974.875 | 93 persen | Rp31.473.619 | 94 persen | Rp33.047.299 | 95 persen | Rp34.699.664 | 95 persen | Rp161.207.957 | KAPANEWON PUNDONG |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 90 Persen | 80 persen | Rp210.794.000 | 82 persen | Rp215.638.605 | 83 persen | Rp226.420.535 | 85 persen | Rp237.741.712 | 86 persen | Rp249.628.640 | 86 persen | Rp1.140.223.492 | KAPANEWON PUNDONG |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 87 persen | Rp169.492.500 | 88 persen | Rp169.916.250 | 89 persen | Rp178.412.063 | 90 persen | Rp187.332.666 | 91 persen | Rp196.699.299 | 91 persen | Rp901.852.778 | KAPANEWON PUNDONG |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp4.790.000 | 100 Persen | Rp14.925.750 | 100 Persen | Rp25.672.038 | 100 Persen | Rp16.455.639 | 100 Persen | Rp17.278.421 | 100 Persen | Rp79.121.848 | KAPANEWON PUNDONG |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PLERET |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PLERET |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 80 Angka | Rp549.024.000 | 80 Angka | Rp621.299.000 | 81 Angka | Rp770.338.000 | 81 Angka | Rp869.984.000 | 82 Angka | Rp1.424.155.000 | 82 Angka | Rp4.234.800.000 | KAPANEWON PLERET |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 Persen | Rp38.992.500 | 90 Persen | Rp51.500.000 | 95 Persen | Rp72.000.000 | 95 Persen | Rp119.500.000 | 100 Persen | Rp110.000.000 | 100 Persen | Rp391.992.500 | KAPANEWON PLERET |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 90 Persen | Rp126.387.500 | 90 Persen | Rp151.000.000 | 95 Persen | Rp180.500.000 | 95 Persen | Rp232.000.000 | 100 Persen | Rp240.000.000 | 100 Persen | Rp929.887.500 | KAPANEWON PLERET |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 90 Persen | Rp115.475.000 | 90 Persen | Rp135.000.000 | 95 Persen | Rp160.000.000 | 95 Persen | Rp185.000.000 | 100 Persen | Rp190.000.000 | 100 Persen | Rp785.475.000 | KAPANEWON PLERET |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp8.015.000 | 100 Persen | Rp20.000.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp55.000.000 | 100 Persen | Rp60.000.000 | 100 Persen | Rp178.015.000 | KAPANEWON PLERET |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 82 Angka | Rp525.235.000 | 83 Angka | Rp614.882.000 | 84 Angka | Rp766.327.000 | 85 Angka | Rp955.906.000 | 86 Angka | Rp1.364.391.000 | 86 Angka | Rp4.226.741.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 92 Persen | Rp42.072.500 | 93 Persen | Rp75.000.000 | 94 Persen | Rp115.000.000 | 95 Persen | Rp125.000.000 | 96 Persen | Rp165.000.000 | 96 Persen | Rp522.072.500 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 100 Persen | Rp124.932.500 | 100 Persen | Rp136.400.000 | 100 Persen | Rp155.000.000 | 100 Persen | Rp177.950.000 | 100 Persen | Rp235.750.000 | 100 Persen | Rp830.032.500 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp135.000.000 | 100 Persen | Rp150.000.000 | 100 Persen | Rp165.000.000 | 100 Persen | Rp185.000.000 | 100 Persen | Rp245.000.000 | 100 Persen | Rp880.000.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp8.015.000 | 100 Persen | Rp17.500.000 | 100 Persen | Rp35.000.000 | 100 Persen | Rp40.000.000 | 100 Persen | Rp45.000.000 | 100 Persen | Rp145.515.000 | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80 Angka | 80 Angka | Rp626.138.500 | 81 Angka | Rp730.288.000 | 81 Angka | Rp806.700.000 | 82 Angka | Rp875.900.000 | 82 Angka | Rp1.114.100.000 | 82 Angka | Rp4.153.126.500 | KAPANEWON PAJANGAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 88 Persen | Rp36.387.500 | 89 Persen | Rp55.000.000 | 90 Persen | Rp95.464.000 | 91 Persen | Rp150.000.000 | 92 Persen | Rp255.500.000 | 92 Persen | Rp592.351.500 | KAPANEWON PAJANGAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 88 Persen | Rp74.797.000 | 89 Persen | Rp87.500.000 | 90 Persen | Rp125.000.000 | 91 Persen | Rp185.000.000 | 92 Persen | Rp281.211.000 | 92 Persen | Rp753.508.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 88 Persen | Rp10.210.000 | 89 Persen | Rp16.000.000 | 90 Persen | Rp73.000.000 | 91 Persen | Rp120.000.000 | 92 Persen | Rp194.000.000 | 92 Persen | Rp413.210.000 | KAPANEWON PAJANGAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp97.249.000 | 100 Persen | Rp100.000.000 | 100 Persen | Rp130.000.000 | 100 Persen | Rp145.498.000 | 100 Persen | Rp200.000.000 | 100 Persen | Rp672.747.000 | KAPANEWON PAJANGAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SANDEN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SANDEN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 100 Angka | 80 Angka | Rp505.086.000 | 81 Angka | Rp527.633.400 | 82 Angka | Rp754.492.400 | 83 Angka | Rp985.079.400 | 85 Angka | Rp1.523.654.400 | 85 Angka | Rp4.295.945.600 | KAPANEWON SANDEN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 Persen | Rp55.797.500 | 91 Persen | Rp73.000.000 | 92 Persen | Rp74.000.000 | 93 Persen | Rp75.000.000 | 94 Persen | Rp76.000.000 | 94 Persen | Rp353.797.500 | KAPANEWON SANDEN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 80 Persen | Rp147.554.500 | 81 Persen | Rp166.207.600 | 82 Persen | Rp167.207.600 | 83 Persen | Rp168.207.600 | 84 Persen | Rp169.207.600 | 84 Persen | Rp818.384.900 | KAPANEWON SANDEN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 87 Persen | Rp98.000.000 | 88 Persen | Rp111.000.000 | 89 Persen | Rp112.000.000 | 90 Persen | Rp113.000.000 | 91 Persen | Rp114.000.000 | 91 Persen | Rp548.000.000 | KAPANEWON SANDEN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp13.000.000 | 100 Persen | Rp66.000.000 | 100 Persen | Rp67.000.000 | 100 Persen | Rp68.000.000 | 100 Persen | Rp69.000.000 | 100 Persen | Rp283.000.000 | KAPANEWON SANDEN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp481.662.000 | 86 Angka | Rp585.850.000 | 87 Angka | Rp798.206.000 | 88 Angka | Rp1.012.352.000 | 89 Angka | Rp1.530.821.000 | 89 Angka | Rp4.408.891.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 90 Persen | Rp44.500.000 | 91 Persen | Rp46.750.000 | 92 Persen | Rp49.000.000 | 93 Persen | Rp51.500.000 | 94 Persen | Rp54.000.000 | 94 Persen | Rp245.750.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 95 Persen | 95 Persen | Rp146.875.000 | 95 Persen | Rp155.000.000 | 96 Persen | Rp162.750.000 | 97 Persen | Rp171.000.000 | 98 Persen | Rp180.000.000 | 98 Persen | Rp815.625.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 95 Persen | 95 Persen | Rp132.125.000 | 95 Persen | Rp138.750.000 | 96 Persen | Rp145.000.000 | 97 Persen | Rp152.250.000 | 98 Persen | Rp160.000.000 | 98 Persen | Rp728.125.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp9.622.000 | 100 Persen | Rp10.000.000 | 100 Persen | Rp10.500.000 | 100 Persen | Rp11.000.000 | 100 Persen | Rp11.550.000 | 100 Persen | Rp52.672.000 | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SEWON |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SEWON |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 90 angka | 90 Angka | Rp661.307.388 | 90 Angka | Rp677.434.308 | 91 Angka | Rp818.371.308 | 91 Angka | Rp958.371.308 | 92 Angka | Rp1.378.865.268 | 92 Angka | Rp4.494.349.580 | KAPANEWON SEWON |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 88 Persen | Rp58.215.000 | 89 Persen | Rp60.215.000 | 90 Persen | Rp60.215.000 | 91 Persen | Rp63.351.000 | 92 Persen | Rp63.351.000 | 92 Persen | Rp305.347.000 | KAPANEWON SEWON |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 88 Persen | Rp57.620.112 | 89 Persen | Rp60.535.000 | 90 Persen | Rp120.535.000 | 91 Persen | Rp210.535.000 | 92 Persen | Rp310.164.040 | 92 Persen | Rp759.389.152 | KAPANEWON SEWON |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp88.357.500 | 100 Persen | Rp164.154.692 | 100 Persen | Rp194.154.692 | 100 Persen | Rp220.194.692 | 100 Persen | Rp276.154.692 | 100 Persen | Rp943.016.268 | KAPANEWON SEWON |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.350.000 | 100 Persen | Rp76.390.000 | 100 Persen | Rp98.516.000 | 100 Persen | Rp98.516.000 | 100 Persen | Rp119.556.000 | 100 Persen | Rp403.328.000 | KAPANEWON SEWON |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp598.889.000 | 86 Angka | Rp626.997.000 | 87 Angka | Rp856.620.000 | 88 Angka | Rp1.110.913.000 | 89 Angka | Rp1.675.020.000 | 89 Angka | Rp4.868.439.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 100 Persen | 90 Persen | Rp25.050.000 | 91 Persen | Rp40.900.000 | 92 Persen | Rp40.900.000 | 93 Persen | Rp40.900.000 | 94 Persen | Rp40.900.000 | 94 Persen | Rp188.650.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 100 Persen | Rp65.400.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp75.900.000 | 100 Persen | Rp369.000.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 100 Persen | Rp145.850.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp49.500.000 | 100 Persen | Rp343.850.000 | KAPANEWON SEDAYU |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp6.000.000 | 100 Persen | Rp188.000.000 | 100 Persen | Rp198.000.000 | 100 Persen | Rp188.000.000 | 100 Persen | Rp188.000.000 | 100 Persen | Rp768.000.000 | KAPANEWON SEDAYU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | n/a | 100 Persen | Rp45.300.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp66.040.000 | 100 Persen | Rp309.460.000 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | n/a | 0 Persen | Rp0 | 82 Persen | Rp50.000.000 | 83 Persen | Rp50.000.000 | 84 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp50.000.000 | 85 Persen | Rp200.000.000 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp605.041.500 | 86 Angka | Rp707.071.700 | 87 Angka | Rp901.750.000 | 88 Angka | Rp1.105.000.000 | 89 Angka | Rp1.567.000.000 | 89 Angka | Rp4.885.863.200 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | 90 Persen | 91 Persen | Rp39.500.000 | 92 Persen | Rp45.000.000 | 93 Persen | Rp60.000.000 | 94 Persen | Rp85.000.000 | 95 Persen | Rp115.000.000 | 95 Persen | Rp344.500.000 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | 100 Persen | 92 Persen | Rp114.962.500 | 93 Persen | Rp124.962.500 | 94 Persen | Rp144.962.500 | 95 Persen | Rp163.434.500 | 96 Persen | Rp214.484.500 | 96 Persen | Rp762.806.500 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 100 Persen | 95 Persen | Rp129.225.000 | 95 Persen | Rp147.241.800 | 96 Persen | Rp167.241.800 | 97 Persen | Rp177.241.800 | 98 Persen | Rp225.650.000 | 98 Persen | Rp846.600.400 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 7 | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen | 100 Persen | Rp10.600.000 | 100 Persen | Rp11.750.000 | 100 Persen | Rp14.501.700 | 100 Persen | Rp16.255.700 | 100 Persen | Rp20.366.500 | 100 Persen | Rp73.473.900 | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| 8 | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | XX | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 85 Angka | 85 Angka | Rp522.514.010 | 86 Angka | Rp808.737.010 | 87 Angka | Rp1.182.745.010 | 88 Angka | Rp800.000.000 | 89 Angka | Rp950.000.000 | 100 Angka | Rp4.263.996.030 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan | 95 Persen | 95 Persen | Rp341.009.000 | 100 Persen | Rp391.000.000 | 100 Persen | Rp416.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp450.000.000 | 100 Persen | Rp1.998.009.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi | 37,33 Persen | 57,33 Persen | Rp2.229.678.400 | 84 Persen | Rp2.849.967.990 | 100 Persen | Rp33.599.967.990 | 100 Persen | Rp2.400.000.000 | 100 Persen | Rp2.500.000.000 | 100 Persen | Rp43.579.614.380 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan Pembinaan Ormas | 10,36 Persen | 18 Persen | Rp61.000.000 | 23 Persen | Rp126.000.000 | 28 Persen | Rp226.000.000 | 33 Persen | Rp125.000.000 | 37 Persen | Rp168.049.000 | 95 Persen | Rp706.049.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN /PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | | TARGET | Rp | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| (1) | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama | 100 Persen | 100 Persen | Rp360.293.590 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp400.000.000 | 100 Persen | Rp1.960.293.590 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD | 100 Persen | 100 Persen | Rp222.267.000 | 100 Persen | Rp447.267.000 | 100 Persen | Rp547.267.000 | 100 Persen | Rp409.446.000 | 100 Persen | Rp450.000.000 | 100 Persen | Rp2.076.247.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2 | 22 | 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Lokasi Yang di prakondisi | n/a | - | Rp0 | 16,67 Persen | Rp417.000.000 | 25 Persen | Rp575.000.000 | 25 Persen | Rp645.000.000 | 33 Persen | Rp740.000.000 | 100 Persen | Rp2.377.000.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | Rp2.141.090.935.000 | | Rp2.393.941.289.000 | | Rp2.335.845.090.000 | | Rp2.369.572.795.000 | | Rp2.433.807.603.000 | | Rp11.674.257.712.000 | |

# BAB VIII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berupa indikator kinerja makro daerah, indikator kinerja utama daerah (sasaran daerah) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (sasaran perangkat daerah).

Indikator kinerja makro bertujuan menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Indikator kinerja makro Kabupaten Bantul tahun 2022-2026 sebagai berikut:

Tabel 8 1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 80.01 | 80.02 | 80.63 | 81.09 | 81.54 | 81.99 | 82.44 | 82.44 |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | % | 13.50 | 13.50 | 13.37 | 12.9 | 12.5 | 12.05 | 11.5 | 11.5 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4.06 | 4.06 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.20 |
| 4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | -1.66 | 3.12 | 3.80 | 3.97 | 4.48 | 4.83 | 5.12 | 5.12 |
| 5 | Rasio Gini | Angka | 0.381 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.325 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Tabel 8 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

| Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | Angka | 3,4463 | 4,0815 | 4,1315 | 4,1815 | 4,2315 | 4,2815 | 4,3315 | 4,3315 | IKU PEMDA |
| Opini Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | IKU PEMDA |

| Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK | Nilai | 80,67 | 82 | 82,5 | 83,5 | 83,75 | 84 | 84,5 | 84,5 | IKU PEMDA |
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,24 | 3,24 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,45 | IKU PEMDA |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 88,03 | 88,03 | 88,1 | 88,4 | 88,8 | 89,1 | 89,5 | 89,5 | IKU PEMDA |
| Usia Harapan Hidup | Tahun | 73.86 | 73,9 | 74,01 | 74,11 | 74,2 | 74,29 | 74,39 | 74,39 | IKU PEMDA |
| Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,17 | 15,19 | 15,22 | 15,25 | 15,26 | 15,3 | 15,32 | 15,32 | IKU PEMDA |
| Desa /Kalurahan Pamor Budaya | Kalurahan | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | IKU PEMDA |
| Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PEMDA |
| Rasio Gini | Angka | 0,381 | 0,370 | 0,360 | 0,350 | 0,325 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | IKU PEMDA |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,06 | 4,06 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | IKU PEMDA |

| Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif | Persen | n/a | n/a | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PEMDA |
| Indeks kualitas infrastruktur | Indeks | n/a | n/a | 73,71 | 75,05 | 76,4 | 77,47 | 79,08 | 79,08 | IKU PEMDA |
| Kesesuaian pemanfataan ruang | Persen | 75,01 | 80 | 75,03 | 75,05 | 75,07 | 75,1 | 75,2 | 75,2 | IKU PEMDA |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 63,02 | 63,02 | 62,75 | 63,59 | 64,42 | 65,2435 | 66,072 | 66,072 | IKU PEMDA |
| Indeks Risiko Bencana | Indeks | 187,2 | 181,26 | 175,51 | 169,94 | 164,55 | 159,33 | 154,27 | 154,27 | IKU PEMDA |
| Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)) | Orang | 72.101 | 72.101 | 72.296 | 71.667 | 71.380 | 71.059 | 70.668 | 70.668 | IKU PEMDA |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 64,78* | n/a | 69,36 | 71,01 | 72,66 | 74,31 | 75,96 | 75,96 | IKU PEMDA |
| Kategori Kabupaten Layak Anak | Kategori | Madya | Madya | Nindya | Utama | Utama | KLA | KLA | KLA | IKU BUPATI |

Penetapan indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini:.

Tabel 8 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Bantul

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| I | Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 80.01 | 80.02 | 80.63 | 81.09 | 81.54 | 81.99 | 82.44 | 82.44 | TUJUAN | DINKES<br>RSUD<br>UPTD PUSKESMAS<br>DIKPORA |
| | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73,86 | 73,9 | 74,01 | 74,11 | 74,2 | 74,29 | 74,39 | 74,39 | IKU PEMDA | DINAS KESEHATAN |
| | Net Death Rate (NDR) | permil | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19.5 | IKU PD | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | Angka Kematian Ibu | per 100.000 kelahiran hidup | 157 | 85 | 88.7 | 80.7 | 72.6 | 64.5 | 56.5 | 56.5 | IKU PD | DINAS KESEHATAN |
| | Angka Kematian Bayi | per 1000 kelahiran hidup | 6.93 | 8 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | IKU PD | DINAS KESEHATAN |
| | Case Fatalilty Rate Covid 19 | Persen | 2.8 | 2.75 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 2 | 1,75 | 1.75 | IKU PD | DINAS KESEHATAN |
| | Insiden Rate DBD | per 100.000 penduduk | 128 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 105 | IKU PD | DINAS KESEHATAN |
| | Prevalensi stunting | Persen | 9.74 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | IKU PD | DINAS KESEHATAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Angka Harapan Lama sekolah | Tahun | 15,17 | 15,19 | 15,22 | 15,25 | 15,26 | 15,3 | 15,32 | 15,32 | IKU PEMDA | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 93,91 | 93,91 | 94 | 94,22 | 94,25 | 94,26 | 94,3 | 94,3 | IKU PD | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 94,88 | 94,88 | 95 | 95,22 | 95,25 | 95,26 | 95,3 | 95,3 | IKU PD | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 98,35 | 98,35 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | IKU PD | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 13,57 | 13,57 | 14 | 14,22 | 14,25 | 14,26 | 14,30 | 14,30 | IKU PD | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan | Persen | -83,3 | 33 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35 | IKU PD | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan | Indeks | 90 | 90 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87 | IKU PD | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Peningkatan prestasi olahraga | Persen | n/a | n/a | 10 | 18 | 23 | 25 | 30 | 30 | IKU PD | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | persen | 3,42 | 3,42 | 3.42 | 3.43 | 3.44 | 3.45 | 3.46 | 3.46 | IKU PD | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Desa /Kalurahan Pamor Budaya | Kalurahan | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | IKU PEMDA | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)<br><br>didukung oleh :<br>DINAS PARIWISATA<br><br>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN<br><br>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | Desa/ Kalurahan | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | IKU PD | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | Indeks Rasa Aman | Indeks | n/a | n/a | 2,7 | 2,73 | 2,76 | 2,79 | 2,81 | 2,81 | TUJUAN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PEMDA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,<br><br>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Presentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | Presentase Pemilih yang berpartisipasi | Persen | 80,32 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | IKU PD | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Jumlah Intoleransi di masyarakat | Angka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IKU PD | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan. | Jumlah kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IKU PD | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi | Persen | -1.66 | 3.12 | 3.8 | 3.97 | 4.48 | 4.83 | 5.12 | 5.12 | TUJUAN | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,<br>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>DINAS PARIWISATA<br>DINAS KUKMP PERDAGANGAN |
| | Rasio Gini | Angka | 0,381 | 0,370 | 0,360 | 0,350 | 0,325 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | IKU PEMDA | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,<br>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>DINAS PARIWISATA<br>DINAS KUKMP PERDAGANGAN |
| | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Angka | 91.4 | 91.4 | 90.4 | 90.8 | 91 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | IKU PD | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Pertumbuhan produksi sektor pertanian | % | 0.712 | 0.712 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | IKU PD | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Pertumbuhan produksi sektor perikanan | % | 1.59 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | IKU PD | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Orang | 2.348.313 | 1.870.000 | 2.057.000 | 2.262.700 | 2.488.970 | 2.737.867 | 3.011.654 | 3.011.654 | IKU PD | DINAS PARIWISATA |
| | Lama Tinggal Wisatawan | Hari | 1,56 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,1 | 2,1 | IKU PD | DINAS PARIWISATA |
| | Jumlah Belanja Wisatawan | Rupiah/org | 675.000 | 708.750 | 744.188 | 781.397 | 820.467 | 861.490 | 904.565 | 904.565 | IKU PD | DINAS PARIWISATA |
| | Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB | Rupiah (Miliar) | 1.576,54 | 1.725,60 | 1.788,16 | 1.850,72 | 1.913,28 | 1.975,84 | 2.038,40 | 2.038,40 | IKU PD | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | persen | n/a | 1,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 16,5 | IKU PD | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Nilai Realisasi Investasi | Rupiah (Miliar) | 1594,75 | 1684,64 | 1824,47 | 2030,54 | 2290,35 | 2640,66 | 3110,56 | 3110,56 | IKU PD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,06 | 4,06 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | IKU PEMDA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Jumlah tenaga kerja yang terserap | orang | 5000 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 11500 | IKU PD | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri | Kalurahan | 25 | 27 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 73 | IKU PD | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| | Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif | Persen | n/a | n/a | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PEMDA | DINAS PARIWISATA<br><br>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi | jumlah parameter | n/a | n/a | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | IKU PD | DINAS PARIWISATA |
| | Pertumbuhan industri kreatif | persen | n/a | 0.2 | 0.31 | 0.41 | 0.56 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | IKU PD | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Pertumbuhan industri | persen | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | IKU PD | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | persen | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | IKU PD | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Tingkat Kemiskinan | persen | 13,5 | 13,5 | 13.37 | 12,9 | 12,5 | 12,05 | 11,5 | 11,5 | TUJUAN | DINAS SOSIAL |
| | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Orang | 72.101 | 71.101 | 71.296 | 71.667 | 71.380 | 71.059 | 70.688 | 70.668 | IKU PEMDA | DINAS SOSIAL |
| | PPKS yang dilayani dan ditangani | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | DINAS SOSIAL |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 95,12 | 95,18 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,75 | 96,90 | 96,90 | TUJUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 64,78 | n/a | 69,36 | 71,01 | 72,66 | 74,31 | 75,96 | 75,96 | IKU PEMDA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak | Prevalensi | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | IKU PD | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Kategori Kabupaten Layak Anak | Kategori | Madya | Madya | Nindya | Utama | Utama | KLA | KLA | KLA | IKU PEMDA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Nilai KLA | Angka | 632,9 | n/a | 730 | 830 | 890 | 910 | 950 | 950 | IKU PD | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Rata-rata jumlah anak dalam keluarga | Angka | 2.56 | 2.54 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.35 | 2.3 | 2.3 | IKU PD | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| II | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | |
| A | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase capaian SPM Pendidikan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | Persen | n/a | n/a | 66 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 79 Persen | 83 Persen | 83 Persen | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya | Persen | n/a | 3,88 Persen | 4,18 Persen | 4,48 Persen | 4,78 Persen | 5,07 Persen | 5,37 Persen | 5,37 Persen | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | |
| | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Angka | 82,38 angka | 85 angka | 82,15 angka | 82,50 angka | 82,90 angka | 83,10 angka | 83,50 angka | 83,50 angka | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | Capaian SPM Rumah Sakit | Persen | 77,50 Persen | 77,50 Persen | 80 Persen | 80,50 Persen | 81 Persen | 81,50 Persen | 82 Persen | 82 Persen | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | Bed Occupation Rate (BOR) | persen | 57,29 Persen | 57,29 Persen | 65 Persen | 67 Persen | 69 Persen | 71 Persen | 73 Persen | 73 Persen | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | Turn Over Interval (TOI) | hari | 2,69 hari | 2,69 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |
| | Bed Turn Over (BTO) | kali | 46,29 kali | 46,29 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | | DINAS KESEHATAN |
| | Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi. | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | | DINAS KESEHATAN |
| | Cakupan Pelayanan Jamkesda | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | | UPTD JAMKESDA |
| | Cakupan Pelayanan Labkesda | Persen | n/a | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | | UPTD LABKESDA |
| | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | angka | 83,92 angka | 83.95 angka | 84 angka | 84,15 angka | 84,30 angka | 84,40 angka | 84,50 angka | 84,50 angka | | 27 PUSKESMAS |
| | Cakupan Pelayanan Puskesmas | persen | n/a | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | | 27 PUSKESMAS |
| | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | | DINAS KESEHATAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri | Kalurahan | 36 Kaluraha n | 36 Kalurahan | 40 Kaluraha n | 45 Kalurah an | 50 Kalurah an | 55 Kalurah an | 60 Kalurah an | 60 Kalurahan | | DINAS KESEHATAN |
| | Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | Persen | 18,5 Persen | 25,93 Persen | 33 Persen | 40 Persen | 48 Persen | 55 Persen | 62 Persen | 62,9 Persen | | DINAS KESEHATAN |
| | Indeks capaian SPM | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | | 27 PUSKESMAS |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa) | Persen | 80,62 Persen | 80,62 Persen | 81,03 Persen | 81,44 Persen | 81,85 Persen | 82,26 Persen | 82,67 Persen | 82,67 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Persen | 75,42 Persen | 75,42 Persen | 75,83 Persen | 76,24 Persen | 76,65 Persen | 77,06 Persen | 77,47 Persen | 77,47 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya | Persen | n/a | n/a | 0 | 65 Persen | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Gedung pemerintah yang laik fungsi | Persen | n/a | n/a | 10 Persen | 20 Persen | 30 Persen | 40 Persen | 50 Persen | 50 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 71,34 Persen | 71,34 Persen | 72,84 Persen | 74,34 Persen | 75,84 Persen | 77,34 Persen | 78,84 Persen | 78,84 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten | Persen | 29,93 Persen | 29,93 Persen | 30 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 45 Persen | 50 Persen | 50 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 82,06 Persen | 81,5 Persen | 82,4 Persen | 83,3 Persen | 84,2 Persen | 85,1 Persen | 86 Persen | 86 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | Persen | 82,36 Persen | 82,36 Persen | 83,56 Persen | 84,38 Persen | 85,19 Persen | 85,98 Persen | 86,76 Persen | 86,76 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | Persen | 21,33 Persen | 21,33 Persen | 22,67 Persen | 25,33 Persen | 28 Persen | 30,67 Persen | 33,33 Persen | 33,33 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Persen | 84,83 Persen | 84,83 Persen | 87,86 Persen | 89,89 Persen | 91,92 Persen | 93,95 Persen | 95,98 Persen | 95,98 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | Persen | n/a | n/a | 3,97 Persen | 4,6 Persen | 5,23 Persen | 5,86 Persen | 6,49 Persen | 6,49 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | Persen | n/a | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | Persen | n/a | n/a | 70 Persen | 70,1 Persen | 70,2 Persen | 70,3 Persen | 70,4 Persen | 70,4 Persen | | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten | Persen | n/a | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | Persen | 82,99 Persen | 82,99 Persen | 10,59 Persen | 21,18 Persen | 31,77 Persen | 42,36 Persen | 52,95 Persen | 52,95 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Persentase rumah layak huni | Persen | 98,75 Persen | 98,75 Persen | 99,18 Persen | 99,39 Persen | 99,6 Persen | 99,8 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga | Persen | n/a | 27,22 Persen | 29,37 Persen | 45,44 Persen | 66,88 Persen | 88,31 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 20 Persen | 20 Persen | 25 Persen | 30 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 45 Persen | 45 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Indeks Pemulihan Pascabencana | Indeks | n/a | n/a | n/a | 45 Persen | 55 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 65 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | Persen | 55 Persen | 57 Persen | 60 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | DINAS SOSIAL |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 80 Persen | 80 Persen | 75 Persen | 75 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | | DINAS SOSIAL |
| | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | Persen | n/a | n/a | 70 Persen | 70 Persen | 70 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | | DINAS SOSIAL |
| | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | Persen | 50 persen | 50 persen | 55 Persen | 60 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | | DINAS SOSIAL |
| | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | Persen | 99 Persen | 57 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS SOSIAL |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | Persen | n/a | 75 Persen | 75 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | | DINAS SOSIAL |
| B | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 17,5 Persen | 18,5 Persen | 18,5 Persen | 19,5 Persen | 20,5 Persen | 21,5 Persen | 22,5 Persen | 22,5 Persen | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Persen | 52 Persen | 54 Persen | 54 Persen | 56 Persen | 58 Persen | 60 Persen | 62 Persen | 62 Persen | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Persen | 32 Persen | 35 Persen | 35 Persen | 36 Persen | 37 Persen | 38 Persen | 39 Persen | 39 Persen | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | |
| | Capaian Desa Prima | Persen | 30,67 Persen | 37,33 Persen | 37,33 Persen | 38,67 Persen | 40 Persen | 41,33 Persen | 42,67 Persen | 42,67 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 57 persen | 57 persen | 62 Persen | 66 Persen | 69 Persen | 72 Persen | 75 Persen | 75 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Rasio kekerasan terhadap perempuan | per 100.000 penduduk perempuan | 0.0004 | 0.0004 | 0.00035 | 0.00032 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00026 | 0.00026 | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Persentase partisipasi perempuan di lembaga | Persen | 6 persen | 6 persen | 7 persen | 8 Persen | 9 Persen | 10 Persen | 11 Persen | 11 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan desa layak anak | Kalurahan | n/a | n/a | 15 Kaluraha n | 30 Kalurah an | 45 Kalurah an | 60 Kalurah an | 75 Kalurah an | 75 Kalurahan | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | n/a | 70 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan | Persen | 30,67 Persen | 30,67 Persen | 37,33 Persen | 42,67 Persen | 48 Persen | 53,33 Persen | 58,67 Persen | 58,67 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik | Unit | n/a | n/a | 14,28 Persen | 28,57 Persen | 57,14 Persen | 85,71 Persen | 100 Persen | 5 unit | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 144,57 Persen | 147,57 Persen | 149 Persen | 151 Persen | 153 Persen | 155 Persen | 157 Persen | 157 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan | Persen | n/a | 24 Persen | 22,67 Persen | 21,33 Persen | 20 Persen | 18,67 Persen | 17,33 Persen | 5 Kalurahan | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | | |
| | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Persen | 100 Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | Persen | n/a | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Persen | 14,98 persen | 20,73 Persen | 33,03 Persen | 35,37 Persen | 44,74 Persen | 54,58 Persen | 64,89 Persen | 64,89 Persen | | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | Persen | 66,67 Persen | n/a | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 85 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | Persen | 27,79 Persen | n/a | 30 Persen | 32 Persen | 34 Persen | 36 Persen | 38 Persen | 38 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | Persen | n/a | n/a | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional | Penghargaan | 1 penghargaan | n/a | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 5 penghargaan | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | Persen | 0 Persen | n/a | 14,29 Persen | 57,14 Persen | 85,71 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | Persen | n/a | n/a | 31,35 Persen | 33,10 Persen | 34,84 Persen | 36,58 Persen | 38,32 Persen | 100 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | Persen | n/a | n/a | 16,67 Persen | 23,33 Persen | 25 Persen | 31 Persen | 33,33 Persen | 34 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | Persen | 100 Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 41,36 Persen | 41,36 Persen | 42,42 Persen | 44,16 Persen | 45,87 Persen | 46,86 Persen | 50,07 Persen | 50,07 Persen | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Persen | n/a | 99 Persen | 99,81 Persen | 99,82 Persen | 99,83 Persen | 99,84 Persen | 99,85 Persen | 99,85 Persen | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | n/a | 96 Persen | 96 Persen | 96,1 Persen | 96,2 Persen | 96,3 Persen | 96,4 Persen | 96,4 Persen | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | Persen | n/a | 99 Persen | 99,5 Persen | 99,6 Persen | 99,7 Persen | 99,8 Persen | 99,9 Persen | 99,9 Persen | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat | Persen | n/a | 99 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| | Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| | Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. | Persen | n/a | n/a | 16 Persen | 36 Persen | 56 Persen | 77 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan | Persen | n/a | 25 Persen | 33 Persen | 41,67 Persen | 50 Persen | 58,33 Persen | 66,67 Persen | 66,67 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | |
| | Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR)) | Angka | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | n/a | n/a | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina | Persen | 82 Persen | 82,5 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 84,5 Persen | 85 Persen | 85,5 Persen | 85,5 Persen | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 9 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Rasio Konektivitas Kabupaten | Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Kinerja lalu lintas Kabupaten | Angka | 0,39 | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | | DINAS PERHUBUNGAN |
| 10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | Persen | 43,4 Persen | 50 Persen | 70 Persen | 71 Persen | 72 Persen | 73 Persen | 74 Persen | 74 Persen | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital | Persen | 28,57 | 28,57 Persen | 42,86 Persen | 57,14 Persen | 71,43 Persen | 85,71 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Angka | 2,67 Angka | 2,67 Angka | 2,75 Angka | 2,85 Angka | 2,9 Angka | 2,95 Angka | 2,95 Angka | 2,95 Angka | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase UMKM yang berizin | Persen | 78,11 Persen | 45 Persen | 50 Persen | 55 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 70 Persen | 70 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | Persen | 55 persen | 55 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Capaian Rintisan Desa Preneur | Persen | n/a | 9,33 persen | 10,67 persen | 12 persen | 13,33 persen | 14,67 persen | 17,33 persen | 17,33 persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Capaian pemasaran pada Desa Preneur | Persen | 0 Persen | 0 Persen | 14 Persen | 28 Persen | 40 Persen | 50 Persen | 70 Persen | 70 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 0 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 67.55 Persen | 66,88 Persen | 70,23 Persen | 73,58 Persen | 75,25 Persen | 76,92 Persen | 78,59 Persen | 78,59 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 60.12 Persen | 56,54 Persen | 59,52 Persen | 63,99 Persen | 65,48 Persen | 66,96 Persen | 68,45 Persen | 68,45 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 59,2 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan | Persen | 13,38 persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | |
| | Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | Persen | 3,47 Persen | 7,85 Persen | 8,30 Persen | 11,29 Persen | 12,79 Persen | 15,29 Persen | 17,79 Persen | 17,79 Persen | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah prestasi Olahraga | medali | 50 medali | n/a | 55 medali | 65 medali | 80 medali | 100 medali | 130 medali | 130 medali | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | n/a | n/a | 80 Persen | 81 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 84 Persen | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | Organisasi Pramuka yang aktif | Organisasi | n/a | n/a | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 100 persen | 100 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | 60 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 81 Persen | 81 Persen | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Persen | 46 Persen | 54 Persen | 61,03 Persen | 68,38 Persen | 75,74 Persen | 83,08 Persen | 90,44 Persen | 90,44 Persen | | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | Bahasa Sastra yang dilestarikan | Pelestarian | n/a | n/a | 18 Pelestarian | 46 Pelestarian | 76 Pelestarian | 104 Pelestarian | 132 Pelestarian | 132 Pelestarian | | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | Pelestarian | n/a | n/a | 219 Pelestarian | 454 Pelestarian | 691 Pelestarian | 953 Pelestarian | 1215 Pelestarian | 1215 Pelestarian | | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase perputakaan yang terakreditasi | Persen | 4,94 Persen | 7,61 Persen | 10,08 Persen | 12,55 Persen | 14,02 Persen | 17,48 Persen | 19,95 Persen | 19,95 Persen | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | | | | | | |
| | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Persen | 58,9 Persen | 59 Persen | 60 Persen | 61 Persen | 62 Persen | 63 Persen | 64 Persen | 64 Persen | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Persen | 67 Persen | 68 Persen | 69 Persen | 70 Persen | 71 Persen | 72 Persen | 73 Persen | 73 Persen | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| C | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | |
| | Kalurahan Bahari yang direvitalisasi | Persen | n/a | n/a | 0 | 20 Persen | 60 Persen | 80 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | Produksi perikanan tangkap | Ton | 829 Ton | 829 ton | 829 ton | 831 ton | 833 ton | 835 ton | 837 ton | 837 ton | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | Produksi perikanan budidaya | Ton | 12.740 ton | 12.740 ton | 12.740 ton | 12.805 ton | 12.878 ton | 12.959 ton | 13.046 ton | 13.046 ton | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase produksi perikanan yang diolah | Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Desa Wisata | Persen | n/a | 32 Persen | 33,33 Persen | 34,67 Persen | 36 Persen | 37,33 Persen | 38,67 Persen | 93 Persen | | DINAS PARIWISATA |
| | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PARIWISATA |
| | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Persen | n/a | n/a | 2,71 Persen | 3,13 Persen | 3,13 Persen | 3,13 Persen | 3,13 Persen | 15,19 Persen | | DINAS PARIWISATA |
| | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Persen | n/a | n/a | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 10 Persen | | DINAS PARIWISATA |
| | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persen | n/a | n/a | n/a | 25 Persen | 35 Persen | 50 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS PARIWISATA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah CBT | n/a | n/a | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | | DINAS PARIWISATA |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 persen | 100 Persen | 0 persen | 0 persen | 0 persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Ketersediaan sarana peternakan | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Produksi Daging | Ton | 15.222 Ton | 15.326 Ton | 15.456 Ton | 15.588 Ton | 15.713 ton | 15.850 Ton | 15.961 Ton | 15.961 Ton | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Ton/ha | 6,3 ton/ha | 6,3 ton/ha | 6,31 ton/ha | 6,315 ton/ha | 6,32 ton/ha | 6,325 ton/ha | 6,33 ton/ha | 6,33 ton/ha | | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 6 | URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Persen | 67,09 persen | 50 Persen | 51 Persen | 52 Persen | 53 Persen | 54 Persen | 55 Persen | 55 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi | Persen | 0,5 persen | 1 Persen | 2 Persen | 3 Persen | 4 Persen | 5 Persen | 6 Persen | 5 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) | Persen | 10 persen | 8 Persen | 7 Persen | 7 Persen | 6 Persen | 6 Persen | 5 Persen | 5 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Nilai ekspor | juta US$ | 122 juta US$ | 83 juta US$ | 80 juta US$ | 90 juta US$ | 100 juta US$ | 110 juta US$ | 120 juta US$ | 500 juta US$ | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 42,79% | 25 Persen | 27 Persen | 30 Persen | 32 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 40 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | Persen | 0 Persen | 0 Persen | - | 10 Persen | 15 Persen | 20 Persen | 25 Persen | 25 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Persen | 0 Persen | 81,5 Persen | 85,97 Persen | 90,65 Persen | 95,32 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten | Persen | 0.20 Persen | 0 Persen | 0 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 8 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Penempatan Transmigrasi | persen | 0 Pesen | 72 Persen | 74 Persen | 80 Persen | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| D | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Angka | 85 Angka | 85 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Persen | 90 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender | Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional | Persen | n/a | 0 Persen | 87,5 Persen | 88 Persen | 88,5 Persen | 89 Persen | 89,5 Persen | 89,5 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | Persen | 7,75 Persen | 87,5 persen | 88 persen | 88,5 persen | 89 persen | 89,5 persen | 90 persen | 90 persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | Persen | n/a | 87,5 Persen | 88 Persen | 88,5 Persen | 89 Persen | 89.50 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul | Persen | 80 persen | 80.5 Persen | 81 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2 | SEKRETARIAT DEWAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Persen | 80 Persen | 80 Persen | 82 Persen | 84 Persen | 86 Persen | 88 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | SEKRETARIAT DPRD |
| E | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERENCANAAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | 90 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | Persen | 10 persen | 10 persen | 10 Persen | 20 Persen | 50 Persen | 70 Persen | 90 persen | 90 persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi | Persen | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95,5 Persen | 96 Persen | 96,5 Persen | 97 Persen | 97 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2 | KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | Persen | n/a | 80 Persen | 80 Persen | 83 Persen | 85 Persen | 88 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | Penetapan APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Persen | n/a | 87,84 Persen | 89 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Persen | 98,91 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | Persentase Realisasi PAD | Persen | 88,57 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| 3 | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | | |
| | Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | 7 Persen | 20 Persen | 40 Persen | 60 Persen | 75 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Persen | n/a | n/a | 30 Persen | 31 Persen | 32 Persen | 32 Persen | 32 Persen | 32 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | Peta Kompetensi ASN | Persen | n/a | n/a | 6 Persen | 9 Persen | 12 Persen | 15 Persen | 18 Persen | 18 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 4 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| F | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | |
| | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | | | | | | |
| | Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas | Persen | n/a | 0 | 0 | 38,89 Persen | 44,44 Persen | 50 Persen | 55,56 Persen | 55,56 Persen | | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku | Persen | n/a | n/a | 12 Persen | 13 Persen | 14 Persen | 15 Persen | 16 Persen | 16 Persen | | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Persen | n/a | n/a | 20 Persen | 25 Persen | 30 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 40 Persen | | INSPEKTORAT DAERAH |
| G | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BANTUL |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON BANTUL |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | persen | n/a | 98 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | | KAPANEWON BANTUL |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BANTUL |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BANTUL |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BANTUL |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 2 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | angka | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| 3 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON DLINGO |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON DLINGO |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | persen | n/a | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON DLINGO |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | persen | n/a | 85 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON DLINGO |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON DLINGO |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON DLINGO |
| 4 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON IMOGIRI |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON IMOGIRI |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON IMOGIRI |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON IMOGIRI |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON IMOGIRI |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON IMOGIRI |
| 5 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON JETIS |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON JETIS |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | 94 Persen | | KAPANEWON JETIS |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | | KAPANEWON JETIS |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON JETIS |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON JETIS |
| 6 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON KRETEK |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON KRETEK |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | KAPANEWON KRETEK |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 80 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 85 Persen | 87 Persen | 87 Persen | | KAPANEWON KRETEK |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 95 Persen | 87 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | KAPANEWON KRETEK |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON KRETEK |
| 7 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON KASIHAN |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON KASIHAN |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | persen | n/a | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON KASIHAN |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | | KAPANEWON KASIHAN |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | persen | n/a | 90 Persen | 90 persen | 90 persen | 90 persen | 90 persen | 90 persen | 90 persen | | KAPANEWON KASIHAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON KASIHAN |
| 8 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PANDAK |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON PANDAK |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | | KAPANEWON PANDAK |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 82 Persen | 82 Persen | 84 Persen | 86 Persen | 88 Persen | 88 Persen | 88 Persen | | KAPANEWON PANDAK |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 82 Persen | 82 Persen | 84 Persen | 86 Persen | 88 Persen | 88 Persen | 88 Persen | | KAPANEWON PANDAK |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PANDAK |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 9 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PUNDONG |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON PUNDONG |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 persen | 92 persen | 93 persen | 94 persen | 95 persen | 95 persen | | KAPANEWON PUNDONG |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 90 Persen | 80 persen | 82 persen | 83 persen | 85 persen | 86 persen | 86 persen | | KAPANEWON PUNDONG |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 87 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | | KAPANEWON PUNDONG |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PUNDONG |
| 10 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PLERET |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON PLERET |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PLERET |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PLERET |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PLERET |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PLERET |
| 11 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON PIYUNGAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 96 Persen | | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PIYUNGAN |
| 12 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PAJANGAN |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON PAJANGAN |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | KAPANEWON PAJANGAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | KAPANEWON PAJANGAN |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 87 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | KAPANEWON PAJANGAN |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON PAJANGAN |
| 13 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SANDEN |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON SANDEN |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | | KAPANEWON SANDEN |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 80 Persen | 81 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 84 Persen | | KAPANEWON SANDEN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 87 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | | KAPANEWON SANDEN |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SANDEN |
| 14 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 98 Persen | | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 98 Persen | | KAPANEWON SRANDAKAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SRANDAKAN |
| 15 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SEWON |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON SEWON |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | KAPANEWON SEWON |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | | KAPANEWON SEWON |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SEWON |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SEWON |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 16 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SEDAYU |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON SEDAYU |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | | KAPANEWON SEDAYU |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SEDAYU |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SEDAYU |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON SEDAYU |
| 17 | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BANGUNTAPAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 95 Persen | | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 96 Persen | | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 98 Persen | | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| G | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | |
| | Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi | Persen | 22,66 Persen | 37,33 Persen | 57,33 Persen | 84 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan | Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Cakupan Pembinaan Ormas | Persen | 5 Persen | 10,36 Persen | 18 Persen | 23 Persen | 28 Persen | 33 Persen | 37 Persen | 37 Persen | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Kerukunan Antar Umat Beragama | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | Cakupan Lokasi yang di prakondisi | Persen | n/a | n/a | n/a | 16,67 Persen | 25 Persen | 25 Persen | 33 Persen | 100 Persen | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| III | Aspek Daya Saing | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 76,43 (BB) | 78,00 (BB) | 80,00 (BB) | 82,00 (BB) | 82,5 (BB) | 83,25 (BB) | 83,75 (BB) | 83,75 (BB) | TUJUAN | Semua Perangkat Daerah |
| | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | Angka | 3,4463 | 4,0815 | 4,1315 | 4,1815 | 4,2315 | 4,2815 | 4,3315 | 4,3315 | IKU PEMDA | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten | Persen | 80,92 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | IKU PD | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B | Persen | 90 | 90 | 90 | 93 | 94 | 95 | 100 | 100 | IKU PD | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | SEKRETARIAT DAERAH |
| | Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah | Persen | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | IKU PD | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Persentase Raperda yang Disetujui Bersama | Persen | 80 | 80 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | IKU PD | SEKRETARIAT DPRD |
| | Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi | Persen | 94,5 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | IKU PD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Capaian Indeks Profesionalitas ASN | nilai | 68,08 | 68,5 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | IKU PD | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA |
| | Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | IKU PD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik | persen | 64,8 | 70 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 95 | IKU PD | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | Opini Laporan Keuangan | predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | IKU PEMDA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | Jumlah | n/a | n/a | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | IKU PD | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | % | 21.69 | 17 | 21.69 | 22.19 | 22.69 | 23.19 | 23.69 | 23.69 | IKU PD | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | Nilai Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK | Nilai | 80,67 | 82 | 82,5 | 83,5 | 83,75 | 84 | 84,5 | 84,5 | IKU PEMDA | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten | persen | 91,5 | 92 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85 | 85 | 85 | IKU PD | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | IKU PD | INSPEKTORAT DAERAH |
| | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,24 | 3,24 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,45 | IKU PEMDA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Index kualitas layanan informasi publik | Angka | 83.03 | 80 | 83.75 | 84 | 84.25 | 84.5 | 84.75 | 84.75 | IKU PD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Nilai Indeks Pembangunan TIK | angka | n/a | n/a | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | IKU PD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | angka | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 3 | 3 | IKU PD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 88,03 | 88,03 | 88,1 | 88,4 | 88,8 | 89,1 | 89,5 | 89,5 | IKU PEMDA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,<br><br>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,<br><br>KAPANEWON |
| | IKM Kinerja PTSP | nilai/angka | 87.89 | 80.5 | 85.25 | 85.5 | 85.75 | 86 | 86.25 | 86.25 | IKU PD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Persen | 99,63 | 91 | 99,81 | 99,82 | 99,83 | 99,84 | 99,85 | 99,85 | IKU PD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data | Lembaga | n/a | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | IKU PD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | IKM Kapanewon | angka | 95,5 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON BANTUL |
| | IKM Kapanewon | angka | 95,73 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | IKU PD | KAPANEWON BAMBANGLIPURO |
| | IKM Kapanewon | angka | 95,54 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON DLINGO |
| | IKM Kapanewon | angka | 91,11 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON IMOGIRI |
| | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | IKU PD | KAPANEWON JETIS |
| | IKM Kapanewon | angka | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | IKU PD | KAPANEWON KRETEK |
| | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON KASIHAN |
| | IKM Kapanewon | angka | 92,27 | 92,45 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON PANDAK |
| | IKM Kapanewon | angka | 93 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON PUNDONG |
| | IKM Kapanewon | angka | 95,82 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | IKU PD | KAPANEWON PLERET |
| | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | IKU PD | KAPANEWON PIYUNGAN |
| | IKM Kapanewon | angka | 95,78 | 90 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | IKU PD | KAPANEWON PAJANGAN |
| | IKM Kapanewon | angka | 98,48 | 100 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | IKU PD | KAPANEWON SANDEN |
| | IKM Kapanewon | angka | 92,58 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON SRANDAKAN |
| | IKM Kapanewon | angka | 90,99 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON SEWON |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | IKM Kapanewon | angka | 95,61 | 95 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | IKU PD | KAPANEWON SEDAYU |
| | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | IKU PD | KAPANEWON BANGUNTAPAN |
| | Indeks Pembangunan Infrastruktur | Indeks | n/a | n/a | 66,12 | 67,26 | 67,88 | 69,50 | 70,61 | 70,61 | TUJUAN | DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD |
| | Indeks kualitas infrastruktur | Indeks | n/a | n/a | 73,71 | 75,05 | 76,40 | 77,47 | 79,08 | 79,08 | IKU PEMDA | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Tingkat Kemantapan Jalan | persen | 78.02 | 78.02 | 78.43 | 78.84 | 79.25 | 79.66 | 80.07 | 80.07 | IKU PD | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Rasio bangunan gedung yang laik fungsi | Persen | n/a | n/a | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | IKU PD | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | 80,01 | 80,01 | 80,37 | 80,73 | 81,09 | 81,45 | 81,81 | 81,81 | IKU PD | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Penduduk berakses air minum layak | Persen | 82,36 | 82,36 | 83,56 | 84,38 | 85,19 | 85,98 | 86,76 | 86,76 | IKU PD | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Penduduk berakses sanitasi yang layak | Persen | 84,83 | 84,83 | 87,86 | 90,89 | 93,92 | 96,95 | 100 | 100 | IKU PD | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Penanganan kawasan kumuh | Persen | 92,49 | 92,49 | 10,59 | 21,18 | 31,77 | 42,36 | 52,95 | 52,95 | IKU PD | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas | Persen | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 3,66 | 5,49 | 7,32 | 9,15 | 9,15 | IKU PD | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Kesesuaian pemanfataan ruang | Persen | 75,01 | 80 | 75,03 | 75,05 | 75,07 | 75,1 | 75,2 | 75,2 | IKU PEMDA | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG |
| | Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Persen | n/a | n/a | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74 | IKU PD | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG |
| | Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan | Persen | n/a | n/a | 74 | 75 | 77 | 81 | 85 | 85 | IKU PD | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 63,02 | 63,02 | 62,75 | 63,59 | 64,42 | 65,24 | 66,07 | 66,07 | IKU PEMDA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Indeks Kualitas Air (IKA) | Angka | 51,8 | 56 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42 | IKU PD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Angka | 85,18 | 90 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89 | IKU PD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021) | Target Kinerja | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026) | Keterangan | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Angka | 54,82 | 61,2 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 | IKU PD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha | Persen | n/a | n/a | 83,33 | 76,67 | 75 | 69 | 66,67 | 66,67 | IKU PD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Capaian pengelolaan sampah | Persen | 61,16 | 61,82 | 63,33 | 65,51 | 67,65 | 69,23 | 72,88 | 72,88 | IKU PD | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 187,2 | 181,26 | 175,51 | 169,94 | 164,55 | 159,33 | 154,27 | 154,27 | IKU PEMDA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Indeks Ketahanan Daerah | angka | 0,89 | 0,9 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | IKU PD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan | menit | 14,48 | 14,46 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | IKU PD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

# BAB IX
# PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arah pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya dalam merencanakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan pencapaian visi jangka panjang, yaitu "Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis" akan dapat terwujud pula.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan penyusunan RKPD setiap tahunnya.
2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengendalian dan evaluasi didasarkan dari pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD setiap tahun.
3) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul akan menyusun RKPD Tahun 2027 pada tahun 2026, yang merupakan tahun terakhir RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam hal pada tahun 2026 RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bantul pada periode berkenaan, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan RKP Tahun 2027, program strategis nasional yang berlokasi di Bantul, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diterbitkan oleh

Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

# CASCADING

# CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima** | **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN** | | | | | | **Indeks Reformasi Birokrasi** | **Indeks** | **76,43 (BB)** | **78,00 (BB)** | **80,00 (BB)** | **82,00 (BB)** | **82,5 (BB)** | **83,25 (BB)** | **83,75 (BB)** | **83,75 (BB)** | **Hasil penilaian KemenPAN RB atas laporan kinerja Pemerintah Daerah** | **Semua Perangkat Daerah** | **KEMENPAN RB** |
| | | | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | | | | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) | Angka | 3,4463 | 4,0815 | 4,1315 | 4,1815 | 4,2315 | 4,2815 | 4,3315 | 4,3315 | Hasil penilaian Kemendagri atas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | SEKRETARIAT DAERAH | KEMENDAGRI |
| | | | | Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | Nilai Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten | Persen | 80,92 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | Nilai AKIP yang dikeluarkan Kemenpan RB | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Perikatan Kerjasama dikali 100% | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | | | Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100% | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | Pengaturan tata laksana perangkat daerah | | | Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100 | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B | Persen | 90 | 90 | 90 | 93 | 94 | 95 | 100 | 100 | Jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi jumlah perangkat daerah yang dinilai x 100% | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam | | | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti / jumlah kebijakan yang dihasilkan per tahun x 100% | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah | Persen | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | Jumlah tingkat capaian seluruh program Setda dibagi jumlah program Setda | SEKRETARIAT DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Angka | 85 Angka | 85 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL | |
| | | | | | | | | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dibagi Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang dihasilkan x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | |
| | | | | | | | | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah perangkat daerah x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Persen | 90 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | 92 Persen | Jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disediakan dibagi jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang harus disediakan x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
| | | | | | | | | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM | |
| | | | | | | | | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | | | | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Kebijakan Perekonomian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan Perekonomian dan SDA yang dihasilkan x 100% | SEKREATRIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA | |
| | | | | | | | | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender | Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Nilai realisasi pengadaan dengan metode tender dibagi nilai rencana pengadaan dengan metode tender x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional | Persen | n/a | 0 Persen | 87,5 Persen | 88 Persen | 88,5 Persen | 89 Persen | 89,5 Persen | 89,5 Persen | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | |
| | | | | | | | | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan | Persen | 7,75 Persen | 87,5 persen | 88 persen | 88,5 persen | 89 persen | 89,5 persen | 90 persen | 90 persen | Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan dibagi Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM | |
| | | | | | | | | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | Persen | n/a | 87,5 Persen | 88 Persen | 88,5 Persen | 89 Persen | 89.50 Persen | 90 Persen | 90 Persen | Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul | Persen | 80 persen | 80.5 Persen | 81 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Jumlah perangkat daerah yang menerapkan budaya pemerintahan SATRIYA dibagi jumlah perangkat daerah x 100^ | SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI | |
| | | | | Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum | Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan | Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD | | Persentase Raperda yang Disetujui Bersama | Persen | 80 | 80 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | (Jumlah Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N) x 100% | SEKRETARIAT DPRD | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Raperda yang Dibahas Bersama | Persen | 80 Persen | 80 Persen | 82 Persen | 84 Persen | 86 Persen | 88 Persen | 90 Persen | 90 Persen | (Jumlah Raperda yang dibahas bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N) x 100% | SEKRETARIAT DPRD | |
| | | | | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | | Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah | | | Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi | Persen | 94,5 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi dbagi jumlah indikator sasaran RPJMD X 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | 90 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage) | Persen | 10 persen | 10 persen | 10 persen | 20 Persen | 50 Persen | 70 Persen | 90 persen | 90 persen | Rata-rata persentase luas zona inti terkonservasi dibagi luas zona inti per Geoheritage | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang sesuai dibagi jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang diamanatkan peraturan Mendagri x 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | | | | | Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi | Persen | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95,5 Persen | 96 Persen | 96,5 Persen | 97 Persen | 97 Persen | Jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah x 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | | | | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kali 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah sub kegiatan PD bidang perekonomian dan SDA dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang perekonomian dan SDA kali 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | | | | | Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang infrastruktur dan kewilayahan kali 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur | Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur | Meningkatnya profesionalisme ASN | | Capaian Indeks Profesionalitas ASN | nilai | 68,08 | 68,5 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | BKN |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | 7 Persen | 20 Persen | 40 Persen | 60 Persen | 75 Persen | 90 Persen | 90 Persen | Jumlah ASN yang mendapatkan internalisasi Keistimewaan dibagi jumlah seluruh ASN (jabatan administrator dan pengawas) dikali 100% | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | | | | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN | Persen | n/a | n/a | 30 Persen | 31 Persen | 32 Persen | 32 Persen | 32 Persen | 32 Persen | Jumlah tambahan formasi yang disetujui Menpan dibagi jumlah kekurangan kebutuhan formasi dikali 100% | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | | | | | | | | Peta Kompetensi ASN | Persen | n/a | n/a | 6 Persen | 9 Persen | 12 Persen | 15 Persen | 18 Persen | 18 Persen | Jumlah aparatur yang sudah dinilai kompetensinya dibagi jumlah total ASN | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | | | | | | | | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah pelanggaran yang tertangani dibagi pelanggaran disiplin dikali 100% | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | | | | Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah | Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah<br>Peningkatan inovasi pembangunan daerah | Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan | | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa dibagi jumlah hasil penelitian dan pengembangan x 100% | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | | | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan | Peningkatan tata kelola kearsipan | Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar | | Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik | Persen | 64,8 | 70 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 95 | Jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah PD kali 100% | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Persen | 58,9 Persen | 59 Persen | 60 Persen | 61 Persen | 62 Persen | 63 Persen | 64 Persen | 64 Persen | T = (a + i + s + j) / 4<br>T= tingkat ketersediaan arsip<br>a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip<br>i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip<br>s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik<br>j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan kerutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Persen | 67 Persen | 68 Persen | 69 Persen | 70 Persen | 71 Persen | 72 Persen | 73 Persen | 73 Persen | T = (m + b + g + a + c + i) / 6<br>T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban<br>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK<br>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK<br>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan / atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK<br>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK<br>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK<br>i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | | | | Opini Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | BPK |
| | | | | Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah | Peningkatan tata kelola keuangan daerah<br>Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah | | Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | Jumlah | n/a | n/a | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Jumlah catatan hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas | Persen | n/a | 80 Persen | 80 Persen | 83 Persen | 85 Persen | 88 Persen | 90 Persen | 90 Persen | (Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Penetapan APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Penetapan Rancangan Perda APBD<br>1. Tepat Waktu ( 100 %)<br>2. Tidak Tepat Waktu ( 50 %) | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | | | Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>1. Tepat Waktu ( 100 %)<br>2. Tidak Tepat Waktu ( 50 %) | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | | | Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD | Persen | n/a | 87,84 Persen | 89 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | (Realisasi Belanja Daerah dibagi anggaran belanja daerah) x 100% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 | Persen | 98,91 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah aset unaudit dibagi jumlah aset hasil audit) x 100% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | | | Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah | Meningkatnya kemampuan keuangan daerah | | Persentase PAD terhadap pendapatan daerah | Persen | 21,69 | 17 | 21,69 | 22,19 | 22,69 | 23,19 | 23,69 | 23,69 | PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Realisasi PAD | Persen | 88,57 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100% | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | |
| | | | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | | | | Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK | Nilai | 80,67 | 82 | 82,5 | 83,5 | 83,75 | 84 | 84,5 | 84,5 | Hasil Monitoring dari 8 area intervensi yang dilakukan KPK | INSPEKTORAT DAERAH | KPK |
| | | | | Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten | Persen | 91,5 | 92 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85 | 85 | 85 | Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dibagi seluruh LHP BPK dikali 100% | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | | | Optimalisasi asistensi dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan | | | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | level | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas | Persen | n/a | 0 | 0 | 38,89 Persen | 44,44 Persen | 50 Persen | 55,56 Persen | 55,56 Persen | jumlah PD pelaksana Danais yang telah menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dibagi seluruh PD pelaksana Danais dikali 100% | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku | Persen | n/a | n/a | 12 Persen | 13 Persen | 14 Persen | 15 Persen | 16 Persen | 16 Persen | Peningkatan PD yang taat terhadap peraturan yang berlaku dibagi seluruh PD dikali 100% | INSPEKTORAT DAERAH | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko | Persen | n/a | n/a | 20 Persen | 25 Persen | 30 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 40 Persen | PD yang menerapkan Manajemen Resiko dibagi seluruh PD dikali 100% | INSPEKTORAT DAERAH | |
| | | | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 3,24 | 3,24 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,45 | Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | KEMENPAN RB |
| | | | | Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik<br>Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | | Index kualitas layanan informasi publik | Angka | 83.03 | 80 | 83,75 | 84 | 84,25 | 84,5 | 84,75 | 84,75 | Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | | | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten | Persen | 43,4 Persen | 50 Persen | 70 Persen | 71 Persen | 72 Persen | 73 Persen | 74 Persen | 74 Persen | (Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk) | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | Peningkatan pengamanan informasi | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | | Nilai Indeks Pembangunan TIK | angka | n/a | n/a | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | Survey Indeks Pembangunan TIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital | Persen | 28,57 | 28,57 Persen | 42,86 Persen | 57,14 Persen | 71,43 Persen | 85,71 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Kawasan SRS dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100% | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | | Pengembangan aplikasi dan statistik | | Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | angka | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,85 | 3 | 3 | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | | | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | Angka | 2,67 Angka | 2,67 Angka | 2,75 Angka | 2,85 Angka | 2,9 Angka | 2,95 Angka | 2,95 Angka | 2,95 Angka | Hasil penilaian Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | | | | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Persen | 100 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) dibagi (Jumlah PD)*100% | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 100 persen | 100 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah PD)*100% | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah | Persen | 60 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 81 Persen | 81 Persen | (Jumlah nilai per area keamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)*100% | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
| | | | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Angka | 88,03 | 88,03 | 88,10 | 88,40 | 88,80 | 89,10 | 89,50 | 89,50 | Nilai rata-rata SKM perangkat daerah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,<br>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,<br>KAPANEWON | BAGIAN ORGANISASI |
| | | | | Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyrakat | Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan | Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu | | IKM Kinerja PTSP | nilai/angka | 87,89 | 80,5 | 85,25 | 85,5 | 85,75 | 86 | 86,25 | 86,25 | Nilai SKM perangkat daerah | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | | | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Cakupan pelayanan perizinan dan informasi | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100% | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100% | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | | | | Peningkatan kualitas pelayanan adminsitrasi kependudukan | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan | | Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Persen | 99,63 | 91 | 99,81 | 99,82 | 99,83 | 99,84 | 99,85 | 99,85 | Jumlah Persentase kepemilikan dokumen adminduk ( Kepemilikan KK, KTPEL, KIA, Akte Kelahiran 0-18thn dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | | | | | | Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data | Lembaga | n/a | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | Jumlah PD yang menggunakan hak akses | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk | Persen | n/a | 99 Persen | 99,81 Persen | 99,82 Persen | 99,83 Persen | 99,84 Persen | 99,85 Persen | 99,85 Persen | Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100% | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil | Persen | n/a | 96 Persen | 96 Persen | 96,1 Persen | 96,2 Persen | 96,3 Persen | 96,4 Persen | 96,4 Persen | Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / 4 jenis dokumen x 100% | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan | Persen | n/a | 99 Persen | 99,5 Persen | 99,6 Persen | 99,7 Persen | 99,8 Persen | 99,9 Persen | 99,9 Persen | Jumlah Data Anomali atau ganda dibagi jumlah data adminduk x 100% | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Persentase Pemanfaatan Profil Kependudkan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat | Persen | n/a | 99 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah buku profil yang disebarkan / jumlah buku profil yang diterbitkan x 100% | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 95,5 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Bantul | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON BANTUL | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON BANTUL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 98 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON BANTUL | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON BANTUL | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON BANTUL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON BANTUL | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 95,73 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Bambanglipuro | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON BAMBANGLIPURO | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON BAMBANGLIPURO | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON BAMBANGLIPURO | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON BAMBANGLIPURO | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON BAMBANGLIPURO | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON BAMBANGLIPURO | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 95,54 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Dlingo | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON DLINGO | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON DLINGO | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON DLINGO | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 85 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON DLINGO | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON DLINGO | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON DLINGO | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 91,11 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Imogiri | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON IMOGIRI | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON IMOGIRI | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON IMOGIRI | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 100 Persen | 100 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON IMOGIRI | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON IMOGIRI | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON IMOGIRI | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Jetis | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON JETIS | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON JETIS | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | 94 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON JETIS | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON JETIS | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON JETIS | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON JETIS | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Kretek | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON KRETEK | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON KRETEK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON KRETEK | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 80 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 85 Persen | 87 Persen | 87 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON KRETEK | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 95 Persen | 87 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 92 Persen | 92 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON KRETEK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON KRETEK | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Kasihan | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON KASIHAN | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON KASIHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON KASIHAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 93 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON KASIHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 93 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON KASIHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON KASIHAN | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 92,27 | 92,45 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Pandak | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON PANDAK | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON PANDAK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON PANDAK | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 82 Persen | 82 Persen | 84 Persen | 86 Persen | 88 Persen | 88 Persen | 88 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON PANDAK | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 82 Persen | 82 Persen | 84 Persen | 86 Persen | 88 Persen | 88 Persen | 88 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON PANDAK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON PANDAK | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 93 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Pundong | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON PUNDONG | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON PUNDONG | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 persen | 92 persen | 93 persen | 94 persen | 95 persen | 95 persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON PUNDONG | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 90 Persen | 80 persen | 82 persen | 83 persen | 85 persen | 86 persen | 86 persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON PUNDONG | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 87 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON PUNDONG | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON PUNDONG | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 95,82 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Pleret | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON PLERET | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON PLERET | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON PLERET | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON PLERET | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON PLERET | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON PLERET | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Piyungan | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON PIYUNGAN | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON PIYUNGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 96 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON PIYUNGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON PIYUNGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON PIYUNGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON PIYUNGAN | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 95,78 | 90 | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Pajangan | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON PAJANGAN | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON PAJANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON PAJANGAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON PAJANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 87 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON PAJANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON PAJANGAN | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 98,48 | 100 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Sanden | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON SANDEN | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON SANDEN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON SANDEN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 80 Persen | 81 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 84 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON SANDEN | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 87 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 91 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON SANDEN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON SANDEN | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 92,58 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Srandakan | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON SRANDAKAN | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON SRANDAKAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON SRANDAKAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 98 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON SRANDAKAN | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 98 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON SRANDAKAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON SRANDAKAN | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 90,99 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Sewon | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON SEWON | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON SEWON | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON SEWON | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 90 Persen | 88 Persen | 89 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 92 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON SEWON | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON SEWON | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON SEWON | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 95,61 | 95 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Sedayu | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON SEDAYU | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON SEDAYU | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 100 Persen | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 94 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON SEDAYU | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON SEDAYU | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON SEDAYU | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON SEDAYU | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | | IKM Kapanewon | angka | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | Nilai SKM perangkat daerah | Kapanewon Banguntapan | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100% | KAPANEWON BANGUNTAPAN | |
| | | | | | | | | Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | Persen | n/a | n/a | 0 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan | KAPANEWON BANGUNTAPAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik | Persen | n/a | 90 Persen | 91 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 95 Persen | Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100% | KAPANEWON BANGUNTAPAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat | Persen | n/a | 100 Persen | 92 Persen | 93 Persen | 94 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 96 Persen | ((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2 | KAPANEWON BANGUNTAPAN | |
| | | | | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Persen | n/a | 100 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 96 Persen | 97 Persen | 98 Persen | 98 Persen | (Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100% | KAPANEWON BANGUNTAPAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan wilayah pelayanan | KAPANEWON BANGUNTAPAN | |
| 2 | **Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa** | **Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya** | | | | | | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **Indeks** | **80,01** | **80,02** | **80,63** | **81,09** | **81,54** | **81,99** | **82,44** | **82,44** | **IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]<br>Dimana:<br>X(1) : Indeks harapan hidup<br>X(2) : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata- rata lama sekolah)<br>X(3) : Indeks standar hidup layak** | **DINKES<br>RSUD<br>UPTD PUSKESMAS<br>DIKPORA** | **BPS BANTUL** |
| | | | Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi | | | | | Umur Harapan Hidup | Tahun | 73.86 | 73,90 | 74,01 | 74,11 | 74,20 | 74,29 | 74,39 | 74,39 | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur | DINKES<br>RSUD<br>UPTD PUSKESMAS | BPS BANTUL |
| | | | | Menguatkan sistem kesehatan | Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan | Menurunnya angka kematian | | Net Death Rate (NDR) | permil | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 | 19,5 | Angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit setiap 1000 pasien keluar. | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI | |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD | Angka | 82,38 angka | 85 angka | 82,15 angka | 82,50 angka | 82,90 angka | 83,10 angka | 83,50 angka | 83,50 angka | Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI | |
| | | | | | | | | Capaian SPM Rumah Sakit | Persen | 77,50 Persen | 77,50 Persen | 80 Persen | 80,50 Persen | 81 Persen | 81,50 Persen | 82 Persen | 82 Persen | Indikator SPM rumah sakit yang tercapai dibagi seluruh indikator SPM rumah sakit x 100% | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Bed Occupation Rate (BOR) | persen | 57,29 Persen | 57,29 Persen | 65 Persen | 67 Persen | 69 Persen | 71 Persen | 73 Persen | 73 Persen | Jumlah hari perawatan dibagi (jumlah tempat tidur dikali 365 hari) dikali 100% | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI | |
| | | | | | | | | Turn Over Interval (TOI) | hari | 2,69 hari | 2,69 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | 2 hari | ((Jumlah tempat tidur x 365 hari)-Jumlah Pasien yang Keluar)dibagi Jumlah Pasien yang Keluar | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI | |
| | | | | | | | | Bed Turn Over (BTO) | kali | 46,29 kali | 46,29 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | 50 kali | Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) dibagi Jumlah Tempat Tidur | RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI | |
| | | | | Menguatkan sistem kesehatan | Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan | | Angka Kematian Ibu | per 100.000 kelahiran hidup | 157 | 85 | 88,7 | 80,7 | 72,6 | 64,5 | 56,5 | 56,5 | Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup x100.000 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat | Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan | | | Angka Kematian Bayi | per 1000 kelahiran hidup | 6,93 | 8 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | Jumlah kematian bayi dalam satu tahun dibagi jumlah lahir hidup kali 1000 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | | Case Fatalilty Rate Covid 19 | Persen | 2,8 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 2 | 1,75 | 1,75 | Jumlah kematian karena covid 19 dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penderita covid 19 dalam kurun waktu yang sama dikali 100% | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | Indeks komposit yang dihitung dari : Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP ditambah Indeks Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan perhitungan : (50% x capaian indeks fasilitas pelayanan kesehatan) + (50% x capaian indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP) | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi. | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | Indeks komposit yang di hitung dari : (20 % x capaian pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)) + ( 20% x capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga) + (20% x Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)) +(20% x Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan) + (20% x Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga) | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pelayanan Jamkesda | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | Jumlah orang yang mendapat pendampingan pembiayaan kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pendampingan pembiayaan kesehatan dikali 100% | UPTD JAMKESDA | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Pelayanan Labkesda | Persen | n/a | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | Jumlah orang yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pelayanan laboratorium kesehatan dikali 100% | UPTD LABKESDA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD | angka | 83,92 angka | 83.95 angka | 84 angka | 84,15 angka | 84,30 angka | 84,40 angka | 84,50 angka | 84,50 angka | Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah | 27 PUSKESMAS | |
| | | | | | | | | Cakupan Pelayanan Puskesmas | persen | n/a | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | Jumlah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas dibagi (5 layanan UKM dan 4 Layanan UKM) dikali 100% | 27 PUSKESMAS | |
| | | | | Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat | Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat | Meningkatnya pembudayaan masyarakat sehat | | Insiden Rate DBD | per 100.000 penduduk | 128 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 105 | Jumlah orang yang sakit DBD dalam1 tahun dibagi jumlah penduduk x 100.000 | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan | | | Prevalensi stunting | Persen | 9,74 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | Jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek dibagi total jumlah balita dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100% | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | Indeks komposit yang dihitung dari : (50% x Persentase pemenuhan SDMK) + (50% x Persentase SDMK memiliki STR) | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri | Kalurahan | 36 Kalurahan | 36 Kalurahan | 40 Kalurahan | 45 Kalurahan | 50 Kalurahan | 55 Kalurahan | 60 Kalurahan | 60 Kalurahan | Desa Siaga Purnama Mandiri | DINAS KESEHATAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi | Persen | 18,5 Persen | 25,93 Persen | 33 Persen | 40 Persen | 48 Persen | 55 Persen | 62 Persen | 62,9 Persen | Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehata Tradisional (Yankestrad) terintegrasi / seluruh Puskesmas * 100% | DINAS KESEHATAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks capaian SPM | Indeks | n/a | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | 1 indeks | (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil) + (9% x capaian ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan) + ( 9% x capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir) + (9% x capaian pelayanan kesehatan bayi sesuai standar) + ( 8 % x capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 15 -59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar) + (8% x capaian penduduk usia 59 tahun ke atas mendapatkan skriing kesehatan sesuai standar) + ( 8% capaian penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar) + ( 8% penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + (8% x ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar) + ( 8% x capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar) + ( 8% x capaian orang dengan resiko terinfeksi HIV yang endapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar) | 27 PUSKESMAS | |
| | | | Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan | | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 15,17 | 15,19 | 15,22 | 15,25 | 15,26 | 15,3 | 15,32 | 15,32 | $HLS^t_a$ = FK x $\sum^{a}_{i=a}(E^t_i / P^t_i)$<br><br>Keterangan:<br>- $HLS^t_a$ = harapan lama sekolah pada umur a di tahun t.<br>- $E^t_i$ = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t.<br>- $P^t_i$ = penduduk usia i pada tahun t.<br>- i = usia {a, a+1, … , n}.<br>- FK = faktor koreksi pesantren (jumlah santri sekolah dan mukim dibagi jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah 1).<br>- Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim dikali jumlah santri sekolah.<br>- Rasio santri mukim = jumlah bermukim dibagi jumlah santri seluruhnya. | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | BPS BANTUL |
| | | | | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan | Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, | Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD | | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Persen | 93,91 | 93,91 | 94 | 94,22 | 94,25 | 94,26 | 94,3 | 94,3 | (Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD) / (Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada Kabupaten bersangkutan)*100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | Perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah | Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Persen | 94,88 | 94,88 | 95 | 95,22 | 95,25 | 95,26 | 95,3 | 95,3 | (Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) / (Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan)*100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persen | 98,35 | 98,35 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 98,9 | (Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama) / (Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan)*100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | Pembinaan pendidikan kesagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa | Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Persen | 13,57 | 13,57 | 14 | 14,22 | 14,25 | 14,26 | 14,30 | 14,30 | (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan) / (Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan)*100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase capaian SPM Pendidikan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 | 100 Persen | 100 Persen | Rata-rata persentase capaian SPM SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM | Persen | n/a | n/a | 66 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 79 Persen | 83 Persen | 83 Persen | Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF berkualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) dikali 100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya | Persen | n/a | 3,88 Persen | 4,18 Persen | 4,48 Persen | 4,78 Persen | 5,07 Persen | 5,37 Persen | 5,37 Persen | Jumlah sekolah berbasis budaya dibagi dengan jumlah sekolah yang ada dikalikan 100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan | Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal | Meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka | | Persentase pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan | Persen | -83,3 | 33 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35 | Jumlah pemustaka yg berkunjung ke perpustakaan dibagi jumlah penduduk kali 100% | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | | | | | | Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan | Indeks | 90 | 90 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87 | Nilai SKM | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase perpustakaan yang terakreditasi | Persen | 4,94 Persen | 7,61 Persen | 10,08 Persen | 12,55 Persen | 14,02 Persen | 17,48 Persen | 19,95 Persen | 19,95 Persen | Jumlah perpustakaan terakreditasi dibagi jumlah perpustakaan di wilayahnya kali 100% | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | | | Meningkatkan prestasi olahraga | Fasilitasi minat dan bakat generasi muda<br>Pembangunan sarana prasarana olah raga<br>Pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet | Meningkatnya prestasi olahraga | | Peningkatan prestasi olahraga | Persen | n/a | n/a | 10 | 18 | 23 | 25 | 30 | 30 | Jumlah perolehan medali tahun x - Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dibagi Jumlah perolehan medali tahun (x-1) dikali seratus | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Jumlah prestasi Olahraga | medali | 50 medali | n/a | 55 medali | 65 medali | 80 medali | 100 medali | 130 medali | 130 medali | Jumlah prestasi olahraga level DIY, Nasional, dan Internasional | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | Meningkatkan kualitas pemuda | Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan<br>Peningkatan kapasitas kepemudaan<br>Peningkatan kapasitas kepramukaan | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Persen | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,43 | 3,44 | 3,45 | 3,46 | 3,46 | (Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun di Kabupaten)*100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persen | n/a | n/a | 80 Persen | 81 Persen | 82 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 84 Persen | (Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten) / (Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten)*100% | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Organisasi Pramuka yang aktif | Organisasi | n/a | n/a | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | 18 Organisasi | Jumlah Organisasi Pramuka yang aktif | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah | | | | | Desa /Kalurahan Pamor Budaya | Kalurahan | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | Jumlah Desa/Kalurahan yang memiliki 4 pedikat sekaligus (sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa *Preneur* dan Desa Prima) | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)<br><br>didukung oleh :<br>DINAS PARIWISATA<br><br>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN<br><br>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) |
| | | | | Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah | Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa<br>Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan<br>Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa<br>Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan<br>Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan | Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah | | Rintisan Desa/Kalurahan Budaya | Kalurahan | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | Jumlah Desa/Kalurahan yang ditetapkan sebagai Rintisan Desa / Kalurahan Budaya | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan | Persen | 46 Persen | 54 Persen | 61,03 Persen | 68,38 Persen | 75,74 Persen | 83,08 Persen | 90,44 Persen | 90,44 Persen | Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan Budaya Benda yang Terdata dikali 100% | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) | |
| | | | | | | | | Bahasa Sastra yang dilestarikan | Pelestarian | n/a | n/a | 18 Pelestarian | 46 Pelestarian | 76 Pelestarian | 104 Pelestarian | 132 Pelestarian | 132 Pelestarian | Jumlah Pelestarian Bahasa Sastra tahun N | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) | |
| | | | | | | | | Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan | Pelestarian | n/a | n/a | 219 Pelestarian | 454 Pelestarian | 691 Pelestarian | 953 Pelestarian | 1215 Pelestarian | 1215 Pelestarian | Jumlah Pelestarian Seni, Adat Tradisi tahun N | DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) | |
| | | **Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya** | | | | | | **Indeks Rasa Aman** | **Indeks** | **n/a** | **n/a** | **2,70** | **2,73** | **2,76** | **2,79** | **2,81** | **2,81** | **Survey masyarakat oleh lembaga independen** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | **LEMBAGA INDEPENDEN** |
| | | | Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis | | | | | Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Persen | n/a | n/a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibumLINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,<br><br>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat | Peningkatan penegakan perda<br>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masrayakat | | Persentase gangguan trantribum yang dapat di selesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | (Jumlah pengaduan yang ditangani) / (Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk)*100% | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Persen | 70 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ) / (Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi)*100% | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga | Persen | n/a | 27,22 Persen | 29,37 Persen | 45,44 Persen | 66,88 Persen | 88,31 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Kelompok jagawarga di padukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan dikali 100% | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |
| | | | | Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama | Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat | Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan | | Persentase Pemilih yang berpartisipasi | Persen | 80,32 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100% | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi | Persen | 22,66 Persen | 37,33 Persen | 57,33 Persen | 84 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan berdemokrasi /Jumlah desa se Kabupaten Bantul x 100% | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama | Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat | Meningkatnya kondusifitas masyarakat | | Jumlah intoleransi di masyarakat | Angka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah kasus intoleransi di masyarakat | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan | Persen | 95 Persen | 95 Persen | 95 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan /jumlah sekolahx 100% | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Cakupan Pembinaan Ormas | Persen | 5 Persen | 10,36 Persen | 18 Persen | 23 Persen | 28 Persen | 33 Persen | 37 Persen | 37 Persen | Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100% | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Kerukunan Antar Umat Beragama | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | FKUB Aktif /FKUB se Kab. Bantul x 100% | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | Menguatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama | Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat | Meningkatnya kondusifitas masyarakat | | Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan. | Jumlah kejadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dibagi permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dikali 100% | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Lokasi Yang di prakondisi | Persen | n/a | n/a | n/a | 16,67 Persen | 25 Persen | 25 Persen | 33 Persen | 100 Persen | Jumlah Lokasi yang diprakondisi | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 3 | **Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif** | **Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas** | | | | | | **Laju Pertumbuhan Ekonomi** | **Persen** | **-1,66** | **3,12** | **3,80** | **3,97** | **4,48** | **4,83** | **5,12** | **5,12** | **Pertumbuhan PDRB**<br>**PDRB(t+1) – PDRB(t) x 100%**<br>**PDRB(t)**<br>**Dimana:**<br>**t+1= tahun pengamatan PDRB**<br>**t= tahun pengamatan PDRB sebelumnya** | **DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,**<br><br>**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**<br><br>**DINAS PARIWISATA**<br><br>**DINAS KUKMP PERDAGANGAN** | **BPS BANTUL** |
| | | | Terwujudnya pemerataan pendapatan | | | | | Rasio Gini | Angka | 0,381 | 0,370 | 0,360 | 0,350 | 0,325 | 0,320 | 0,310 | 0,310 | G = 1- á Pi (Qi + Qi-1)<br><br>dimana:<br>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i<br>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i<br>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:<br>G < 0,3= ketimpangan rendah<br>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang<br>G > 0,5= ketimpangan tinggi | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,<br><br>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN<br><br>DINAS PARIWISATA<br><br>DINAS KUKMP PERDAGANGAN | BPS BANTUL |
| | | | | Meningkatkan pola konsumsi pangan | Peningkatan ketersediaan pangan<br>Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan | Meningkatnya kualitas pangan masyarakat | | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Angka | 91,4 | 91,4 | 90,4 | 90,8 | 91 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan | Persen | 30,67 Persen | 30,67 Persen | 37,33 Persen | 42,67 Persen | 48 Persen | 53,33 Persen | 58,67 Persen | 58,67 Persen | Desa Mandiri Pangan yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100% | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik | Persen | n/a | n/a | 14,28 Persen | 28,57 Persen | 57,14 Persen | 85,71 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah lumbung pangan yang operasional dibagi total lumbung dikali 100%<br>Jumlah Lumbung Tahun 2020 = 7 Unit | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 144,57 Persen | 147,57 Persen | 149 Persen | 151 Persen | 153 Persen | 155 Persen | 157 Persen | 157 Persen | (Jumlah cadangan pangan ) / (Jumlah kebutuhan pangan)*100% | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Desa Rentan Rawan Pangan | Persen | n/a | 24 Persen | 22,67 Persen | 21,33 Persen | 20 Persen | 18,67 Persen | 17,33 Persen | 17,33 Persen | Jumlah desa rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dikali 100%<br>Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan Tahun 2020 = 18 Kalurahan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100 % | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian | Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air<br>Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian<br>Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak<br>Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian<br>Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata | Meningkatnya produksi pertanian | | Pertumbuhan produksi sektor pertanian | Persen | 0,712 | 0,712 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | Rata - rata pertumbuhan produksi pertanian (Pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 persen | 100 Persen | 0 persen | 0 persen | 0 persen | 100 Persen | Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100% | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Ketersediaan sarana pertanian | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah sarana pertanian yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dikalikan 100 % | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | | Ketersediaan sarana peternakan | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah sarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana peternakan dikalikan 100 % | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana yang digunakan dengan baik | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah prasarana pertanian yang digunakan dibagi jumlah prasarana pertanian yang tersedia dikalikan 100 % | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | | Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah bibit ternak yang diberikan fasilitas perlindungan | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ) dibagi (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))*100% | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | | Produksi Daging | Ton | 15.222 Ton | 15.326 Ton | 15.456 Ton | 15.588 Ton | 15.713 ton | 15.850 Ton | 15.961 Ton | 15.961 Ton | Jumlah daging sapi. Kambing, itik dan ayam | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah kejadian yang difasilitasi dibagi jumlah bencana dikalikan 100 % | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dikalikan 100 % | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Produktivitas pertanian per hektar per tahun | Ton/ha | 6,3 ton/ha | 6,3 ton/ha | 6,31 ton/ha | 6,315 ton/ha | 6,32 ton/ha | 6,325 ton/ha | 6,33 ton/ha | 6,33 ton/ha | (Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun) | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan | Peningkatan produksi perikanan<br>Peningkaan nilai tambah perikanan<br>Peningkatan pengawasan dan pengendalain | Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat | | Pertumbuhan produksi sektor perikanan | Persen | 1.59 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dikali 100% | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Kalurahan Bahari yang direvitalisasi | Persen | n/a | n/a | 0 | 20 Persen | 60 Persen | 80 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Kalurahan bahari yang direvitalisasi dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100% | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Produksi perikanan tangkap | Ton | 829 Ton | 829 ton | 829 ton | 831 ton | 833 ton | 835 ton | 837 ton | 837 ton | Jumlah Produksi perikanan tangkap | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Produksi perikanan budidaya | Ton | 12.740 ton | 12.740 ton | 12.740 ton | 12.805 ton | 12.878 ton | 12.959 ton | 13.046 ton | 13.046 ton | Jumlah produksi perikanan budidaya | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Penurunan jumlah pelanggaran aturan | Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | Jumlah pelanggaran aturan tahun n dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dikalikan 100 % | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase produksi perikanan yang diolah | Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah/Total Jumlah produksi olahan ikan dibagi jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya dikalikan 100% | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| | | | | Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat | Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata<br>Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata<br>Peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata<br>Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata | Meningkatnya kualitas pariwisata | | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Orang | 2.348.313 | 1.870.000 | 2.057.000 | 2.262.700 | 2.488.970 | 2.737.867 | 3.011.654 | 3.011.654 | Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun ke n | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | | Lama Tinggal Wisatawan | Hari | 1,56 | 1 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | Rata-rata lama kunjungan wisata dalam satu tahun | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | | Jumlah Belanja Wisatawan | Rupiah/org | 675.000 | 708.750 | 744.188 | 781.397 | 820.467 | 861.490 | 904.565 | 904.565 | Rata -rata belanja wisatawan saat berkunjung | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan Desa Wisata | Persen | n/a | 32 Persen | 33,33 Persen | 34,67 Persen | 36 Persen | 37,33 Persen | 38,67 Persen | 93 Persen | Desa wisata yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100% | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Persen | n/a | n/a | 2,71 Persen | 3,13 Persen | 3,13 Persen | 3,13 Persen | 3,13 Persen | 15,19 Persen | Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana di destinasi wisata baru dibagi total destinasi wisata dikali 100% | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Persen | n/a | n/a | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 2 Persen | 10 Persen | Jumlah Wisatawan Tahun n dikurangi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikali seratus persen | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran | Modernisasi pasar tradisional | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | | Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB | Rupiah (Miliar) | 1576,54 | 1.725,60 | 1.788,16 | 1.850,72 | 1.913,28 | 1.975,84 | 2.038,40 | 2.038,40 | Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data BPS) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | Persen | 67,09 persen | 50 Persen | 51 Persen | 52 Persen | 53 Persen | 54 Persen | 55 Persen | 55 Persen | (Jumlah pelaku usaha yang telah memilki izin sesuai ketentuan) / (Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)*100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi | Persen | 0,5 persen | 1 Persen | 2 Persen | 3 Persen | 4 Persen | 5 Persen | 6 Persen | 5 Persen | (Jumlah omzet pedagang di lokasi pasar 't' yang telah mendapatkan fasilitas pengembangan/pengelolaan dikurangi omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) dibagi (omzet pedagang di lokasi pasar 't'sebelum dilakukan pengembangan) x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu) | Persen | 10 persen | 8 Persen | 7 Persen | 7 Persen | 6 Persen | 6 Persen | 5 Persen | 5 Persen | Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapok (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Nilai ekspor | juta US$ | 122 juta US$ | 83 juta US$ | 80 juta US$ | 90 juta US$ | 100 juta US$ | 110 juta US$ | 120 juta US$ | 500 juta US$ | Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n (sumber data Disperindag DIY) | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen | 42,79% | 25 Persen | 27 Persen | 30 Persen | 32 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 40 Persen | (Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan) / (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten)*100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri | Persen | 0 Persen | 0 Persen | - | 10 Persen | 15 Persen | 20 Persen | 25 Persen | 25 Persen | (Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi | Peningkatan Kualitas perkoperasian | Meningkatnya koperasi yang berkualitas | | Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas | persen | n/a | 1,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 16,5 | jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100%<br><br>Koperasi yang berkualitas = Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 0 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | 2,5 Persen | Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun n / jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 67.55 Persen | 66,88 Persen | 70,23 Persen | 73,58 Persen | 75,25 Persen | 76,92 Persen | 78,59 Persen | 78,59 Persen | Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah koeprasi aktif x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 60.12 Persen | 56,54 Persen | 59,52 Persen | 63,99 Persen | 65,48 Persen | 66,96 Persen | 68,45 Persen | 68,45 Persen | Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Persen | 59,2 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | 60 Persen | Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi aktif x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan | Persen | 13,38 persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan akses kemitraan dibagi jumlah koperasi aktif x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | Mempermudah investasi dalam berbagai bidang. | Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat | Meningkatnya nilai investasi | | Nilai Realisasi Investasi | Rupiah (Miliar) | 1.594,75 | 1.684,64 | 1.824,47 | 2.030,54 | 2.290,35 | 2.640,66 | 3.110,56 | 3.110,56 | Nilai Investasi PMDN + PMA sampai dengan tahun n | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100% | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | | | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase peningkatan investasi di Kabupaten | Persen | 3,47 Persen | 7,85 Persen | 8,30 Persen | 11,29 Persen | 12,79 Persen | 15,29 Persen | 17,79 Persen | 17,79 Persen | (Jumlah investasi thn n – Jumlah investasi tahun-1) di kabupaten) / (Jumlah investasi di tahun n - 1 di Kabupaten)*100% | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100% | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | | Terwujudnya pemerataan pendapatan | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,06 | 4,06 | 3,90 | 3,50 | 3,40 | 3,30 | 3,20 | 3,20 | Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja x100% | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BPS BANTUL |
| | | | | Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif | Peningkatan kompetensi tenaga kerja<br>Penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar<br>Peningkatan kerjasama dengan perusahaan | Meningkatknya serapan tenaga kerja | | Jumlah tenaga kerja yang terserap | orang | 5000 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 11500 | Jumlah tenaga kerja yang terserap | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 17,5 Persen | 18,5 Persen | 18,5 Persen | 19,5 Persen | 20,5 Persen | 21,5 Persen | 22,5 Persen | 22,5 Persen | (Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi) / (Jumlah tenaga kerja keseluruhan)*100% | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | Persen | 52 Persen | 54 Persen | 54 Persen | 56 Persen | 58 Persen | 60 Persen | 62 Persen | 62 Persen | (Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan) / (Jumlah pencaker yang terdaftar)*100% | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | Persen | 32 Persen | 35 Persen | 35 Persen | 36 Persen | 37 Persen | 38 Persen | 39 Persen | 39 Persen | (Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak) / (Jumlah Perusahaan)*100% | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase Penempatan Transmigrasi | Persen | 0 Persen | 72 Persen | 74 Persen | 80 Persen | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | ( jumlah kk ditempatkan / jumlah kuota x100%) | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| | | | | Pengembangan Potensi Desa | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa<br>Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa<br>Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa | Meningkatnya jumlah Desa Mandiri | | Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri | Kalurahan | 25 | 27 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 73 | Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENATAAN DESA | Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Kalurahan Sasaran Penataan Kalurahan, dibagi jumlah seluruh Kalurahan , dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar kalurahan dibagi Pelaksanaan Kerjasama Antar Kalurahan dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dengan baik dibagi jumlah seluruh Kalurahan, dikali 100 % | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan | Persen | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah kelompok binaan LPM dibagi Jumlah LPM dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. | Persen | n/a | n/a | 16 Persen | 36 Persen | 56 Persen | 77 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Kalurahan yang dilakukan inventarisasi tanah kalurahan dibagi seluruhkalurahan dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan | Persen | n/a | 25 Persen | 33 Persen | 41,67 Persen | 50 Persen | 58,33 Persen | 66,67 Persen | 66,67 Persen | Kalurahan yang melaksanakan urusan keistimewaan kelembagan berdasarkan Peraturan bupati Kewenangan Kalurahan dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN | |
| | | | Terwujudnya pemerataan pendapatan | | | | | Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif | Persen | n/a | n/a | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total komponen dikali 100%) | DINAS PARIWISATA<br><br>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | *Indonesia Creative Cities Network* (ICCN) atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia |
| | | | | Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif | Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif | Meningkatnya jaringan ekonomi kreatif | | Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi | jumlah parameter | n/a | n/a | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | Capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persen | n/a | n/a | n/a | 25 Persen | 35 Persen | 50 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Persentase dari n+1 sub sektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi HAKI | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah CBT | n/a | n/a | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | 2 CBT | Peningkatan desa wisata yang sudah mandiri (CBT = Community Based Tourism) | DINAS PARIWISATA | |
| | | | | Meningkatkan kualitas UMKM | Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro<br><br>Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil | Meningkatnya kualitas UMKM | | Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas | Persen | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Jumlah usaha mikro binaan tahun ke n yang meningkat omset dan asetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan tahun ke n dikali 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UMKM yang berizin | Persen | 78,11 Persen | 45 Persen | 50 Persen | 55 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 70 Persen | 70 Persen | Jumlah usaha mikro yang berizin / jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya | Persen | 55 persen | 55 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Rintisan Desa Preneur | Persen | n/a | 9,33 persen | 10,67 persen | 12 persen | 13,33 persen | 14,67 persen | 17,33 persen | 17,33 persen | Rintisan Desa Preneur dibagi seluruh Kalurahan dikali 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian pemasaran pada Desa Preneur | Persen | 0 Persen | 0 Persen | 14 Persen | 28 Persen | 40 Persen | 50 Persen | 70 Persen | 70 Persen | Desa Preneur yang dipromosikan/dipasarkan dibagi seluruh Desa Preneur yang ditetapkan dikali 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | Meningkatkan pertumbuhan industri | Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan<br><br>Pengembangan Kawasan Peruntukan industri Piyungan dan Sedayu-Pajangan<br><br>Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif | Meningkatnya pertumbuhan industri | | Pertumbuhan industri | Persen | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | | Pertumbuhan industri kreatif | Persen | n/a | 0,2 | 0,31 | 0,41 | 0,56 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK | Persen | 0 Persen | 81,5 Persen | 85,97 Persen | 90,65 Persen | 95,32 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator / target * (100/N)%<br>N akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen | 100 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlah izin yang dikeluarkan )*100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten | Persen | 0.20 Persen | 0 Persen | 0 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | 0,22 Persen | Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIINAS / Total populasi perusahaan industri kecol menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab. Kota x 100% | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |
| 4 | **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana** | **Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan** | | | | | | **Indeks Pembangunan Infrastruktur** | **Indeks** | **n/a** | **n/a** | **66,12** | **67,26** | **67,88** | **69,50** | **70,61** | **70,61** | **(indeks kualitas infrastruktur+ kesesuaian pemanfaatan ruang + IKLH + IRB yang setarakan dalam persen) dibagi 4** | **DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD** | **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** |
| | | | Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | | | | | Indeks kualitas infrastruktur | Indeks | n/a | n/a | 73,71 | 75,05 | 76,40 | 77,47 | 79,08 | 79,08 | (40% x tingkat kemantapan jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh) | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata<br><br>Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | | Tingkat Kemantapan Jalan | Persen | 78,02 | 78,02 | 78,43 | 78,84 | 79,25 | 79,66 | 80,07 | 80,07 | (Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap)+(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten dan jalan desa)*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa) | Persen | 80,62 | 80,62 Persen | 81,03 Persen | 81,44 Persen | 81,85 Persen | 82,26 Persen | 82,67 Persen | 82,67 Persen | (Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan desa)*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat kemantapan jalan kabupaten | Persen | 75,42 | 75,42 Persen | 75,83 Persen | 76,24 Persen | 76,65 Persen | 77,06 Persen | 77,47 Persen | 77,47 Persen | (Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten)*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | | Rasio bangunan gedung yang laik fungsi | Persen | n/a | n/a | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi ( / Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya | Persen | n/a | n/a | 0 | 65 Persen | 90 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Pemenuhan sarana prasarana pada tahun n dibagi dengan target rencana pembangunan TB secara keseluruhan | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Gedung pemerintah yang laik fungsi | Persen | n/a | n/a | 10 Persen | 20 Persen | 30 Persen | 40 Persen | 50 Persen | 50 Persen | (Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah ) *100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 71,34 Persen | 71,34 Persen | 72,84 Persen | 74,34 Persen | 75,84 Persen | 77,34 Persen | 78,84 Persen | 78,84 Persen | (Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator/teknisi / analis) / (Jumlah tenaga operator/ teknisi/ analis di wilayah Kabupaten) | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | 80,01 | 80,01 | 80,37 | 80,73 | 81,09 | 81,45 | 81,81 | 81,81 | (Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha),dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting) / (Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten )*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten | Persen | 29,93 Persen | 29,93 Persen | 30 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 45 Persen | 50 Persen | 50 Persen | (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ) / (Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha))*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | | Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik | Persen | 82,06 Persen | 81,5 Persen | 82,4 Persen | 83,3 Persen | 84,2 Persen | 85,1 Persen | 86 Persen | 86 Persen | Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten x100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | | Penduduk berakses air minum layak | Persen | 82,36 | 82,36 | 83,56 | 84,38 | 85,19 | 85,98 | 86,76 | 86,76 | Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi Jumlah penduduk seluruhnya x100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak | Persen | 82,36 Persen | 82,36 Persen | 83,56 Persen | 84,38 Persen | 85,19 Persen | 85,98 Persen | 86,76 Persen | 86,76 Persen | (Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten ) / (Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten)*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | | Penduduk berakses sanitasi yang layak | Persen | 84,83 | 84,83 | 87,86 | 90,89 | 93,92 | 96,95 | 100 | 100 | (Jumlah penduduk dengan akses sanitasi yang layak) / (Jumlah total penduduk) * 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R | Persen | 21,33 Persen | 21,33 Persen | 22,67 Persen | 25,33 Persen | 28 Persen | 30,67 Persen | 33,33 Persen | 33,33 Persen | Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) di kali 100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak | Persen | 84,83 Persen | 84,83 Persen | 87,86 Persen | 89,89 Persen | 91,92 Persen | 93,95 Persen | 95,98 Persen | 95,98 Persen | (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) / (Jumlah rumah di Kabupaten)*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan | Persen | n/a | n/a | 3,97 Persen | 4,6 Persen | 5,23 Persen | 5,86 Persen | 6,49 Persen | 6,49 Persen | (Panjang drainase ditanganI) / (Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten) *100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman | Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | | Penanganan kawasan kumuh | Persen | 92,49 | 92,49 | 10,59 | 21,18 | 31,77 | 42,36 | 52,95 | 52,95 | Luas kawasan kumuh yang tertangani dibagi total kawasan kumuh dikali 100%<br><br>Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan : SK Bupati No. 220 Tahun 2016 selesai di tahun 2021<br>Tahun 2021 sd 2026 berdasarkan : SK Bupati No. 82 Tahun 2021 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n) / (jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n)*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani | Persen | 82,99 Persen | 82,99 Persen | 10,59 Persen | 21,18 Persen | 31,77 Persen | 42,36 Persen | 52,95 Persen | 52,95 Persen | (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)) / (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha))*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase rumah layak huni | Persen | 98,75 Persen | 98,75 Persen | 99,18 Persen | 99,39 Persen | 99,6 Persen | 99,8 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah ) *100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU) / (Jumlah unit rumah Kabupaten)*100% | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | 100 Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur | Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas | Meningkatnya keselamatan lalu lintas | | Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas | Persen | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 3,66 | 5,49 | 7,32 | 9,15 | 9,15 | Selisih kejadian kecelakaan lalulintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalulintas pada tahun baseline x 100% | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rasio Konektivitas Kabupaten | Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | 30,43 Persen | Rasio konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | | | | | | | Kinerja lalu lintas Kabupaten | Angka | 0,39 | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | 0,30 angka | V / C Ratio di Jalan kabupaten | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | | Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik | | | | | Kesesuaian pemanfaatan ruang | Persen | 75,01 | 80,00 | 75,03 | 75,05 | 75,07 | 75,10 | 75,20 | 75,20 | Pemanfaatan ruang / perencanaan ruang x 100% | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang<br>Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | | Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Persen | n/a | n/a | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 73,50 | 74,00 | 74,00 | Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan tata ruang | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | | | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan | Persen | n/a | n/a | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Dokumen raperbup RTBL / target dokumen raperbup RTBL tahun bersangkutan x 100% | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang | Persen | n/a | n/a | 70 Persen | 70,1 Persen | 70,2 Persen | 70,3 Persen | 70,4 Persen | 70,4 Persen | Rerata (dokumen raperbup dan raperda rencana tata ruang / target total dokumen); (rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui/jumlah total permohonan); (Rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas/rekom FPRD atau TKPRD yang diterbitkan + temuan pengawasan yang ditindak lanjuti/rekom FPRD atau TKPRD yg didalwas) | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten | Persen | n/a | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | Rerata capaian perencanaan dan pemanfaatan / target capaian tahun bersangkutan x 100% | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang | Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang<br>Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang | Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah | | Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan | Persen | n/a | n/a | 74 | 75 | 77 | 81 | 85 | 85 | Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan pertanahan | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Persen | 100 Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | {Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani} / {Jumlah pengaduan sengketa garapan}*100% | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | | | | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan) | Persen | n/a | n/a | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | 90 Persen | bidang tanah terdaftar, bidang tanah dengan rekom pemanfaatan / total bidang tanah yang menjadi target tahun bersangkutan x 100 % | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten | Persen | 14,98 persen | 20,73 Persen | 33,03 Persen | 35,37 Persen | 44,74 Persen | 54,58 Persen | 64,89 Persen | 64,89 Persen | tanah yang dikelola (tanah yang dilakukan penatausahaan (bidang yang telah dilaksanakan pendaftaran ke BPN) akumulatif dari tahun2 sebelumnya) / total tanah kasultanan x 100 % | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA) | |
| | | | Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas | | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 63,02 | 63,02 | 62,75 | 63,59 | 64,42 | 65,24 | 66,07 | 66,07 | IKLH = (0.376xIKA)+(0.405xIKU)+ (0.219xIKL) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Penanganan pencemaran lingkungan hidup<br>Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem<br>Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup | Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Indeks Kualitas Air (IKA) | Angka | 51,80 | 56,00 | 40,00 | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,00 | IKA = Ii + Ij + Ik + Im | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Angka | 85,18 | 90,00 | 87,00 | 87,50 | 88,00 | 88,50 | 89,00 | 89,00 | IKUd = 100-((50/0,9) x(Ieu-0,1)) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Angka | 54,82 | 61,20 | 57,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | 65,00 | 65,00 | IKTL = 100-((84,3-((LTL/ LWK) x 100)) x(50/54,3)) | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara | Persen | 66,67 Persen | n/a | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 85 Persen | 90 Persen | 90 Persen | Jumlah penanganan sumber pencemaran air dan udara yang dilaksanakan dibagi jumlah standar/ideal penanganan sumber pencemaran air dan udara dikali 100 persen | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan | Persen | 27,79 Persen | n/a | 30 Persen | 32 Persen | 34 Persen | 36 Persen | 38 Persen | 38 Persen | Jumlah luas tutupan lahan pada tahun n dibagi jumlah luas wilayah dikali 100 persen | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup | Persen | n/a | n/a | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | 5 Persen | Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi jumlah lembaga kemsyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100% | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional | Penghargaan | 1 penghargaan | n/a | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 1 penghargaan | 5 penghargaan | Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/ nasional | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup | Penanganan pencemaran lingkungan hidup<br>Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem<br>Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup | Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha | Persen | n/a | n/a | 83,33 | 76,67 | 75 | 69 | 66,67 | 66,67 | {Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten} dibagi {usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}*100% | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup | Persen | 0 Persen | n/a | 14,29 Persen | 57,14 Persen | 85,71 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah perencanaan yang dilakukan pada tahun n dibagi jumlah perencanaan yang harus disusun dikali 100 persen | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3 | Persen | n/a | n/a | 31,35 Persen | 33,10 Persen | 34,84 Persen | 36,58 Persen | 38,32 Persen | 100 Persen | Jumlah usaha yang menindaklanjuti persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100% | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan | Persen | n/a | n/a | 16,67 Persen | 23,33 Persen | 25 Persen | 31 Persen | 33,33 Persen | 34 Persen | Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100% | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup | Persen | 100 Persen | n/a | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Pengaduan masyarakat yang tertangani) dibagi ( total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi) x 100% | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan | Pengurangan dan penanganan sampah | Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | Capaian pengelolaan sampah | Persen | 61,16 | 61,82 | 63,33 | 65,51 | 67,65 | 69,23 | 72,88 | 72,88 | (Total volume sampah yang dapat dikurangi + Total volume sampah yang dapat ditangani) dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten x 100% | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase jumlah sampah yang tertangani | Persen | 41,36 Persen | 41,36 Persen | 42,42 Persen | 44,16 Persen | 45,87 Persen | 46,86 Persen | 50,07 Persen | 50,07 Persen | (Total volume sampah yang dapat ditangani) / (Total vol timbulan sampah kabupaten)*100% | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Terwujudnya penurunan risiko bencana | | | | | Indeks Risiko Bencana | Indeks | 187,2 | 181,26 | 175,51 | 169,94 | 164,55 | 159,33 | 154,27 | 154,27 | IRB= Bahaya*Kerentanan/Kapasitas | BPBD | BNPB |
| | | | | Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana | Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan<br>Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu<br>Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik<br>Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana<br>Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana<br>Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana<br>Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana | Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | | Indeks Ketahanan Daerah | angka | 0,89 | 0,9 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | Assesment 71 indikator | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan | Persen | n/a | n/a | 0 | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Persen | 20 Persen | 20 Persen | 25 Persen | 30 Persen | 35 Persen | 40 Persen | 45 Persen | 45 Persen | Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana dikali 100% | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100% | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100% | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | | | | | | Indeks Pemulihan Pascabencana | Indeks | n/a | n/a | n/a | 45 Persen | 55 Persen | 60 Persen | 65 Persen | 65 Persen | Penilaian pemulihan Infrastruktur Pendidikan; Infrastruktur Kesehatan dan Rumah Tinggal; dan Infrastruktur Ekonomi | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | | Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana | Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan<br>Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu<br>Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik<br>Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana<br>Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana<br>Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana<br>Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana | Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan | | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan | menit | 14,48 | 14,46 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | (Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) ditambah (jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan / atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) dibagi (Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten)*100% | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| **5** | **Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel** | **Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat** | | | | | | **Tingkat Kemiskinan** | **Persen** | **13,50** | **13,50** | **13,37** | **12,90** | **12,50** | **12,05** | **11,50** | **11,50** | **Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)** | **DINAS SOSIAL** | **BPS BANTUL** |
| | | | Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) | | | | | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Orang | 72.101 | 72.101 | 72.296 | 71.667 | 71.380 | 71.059 | 70.668 | 70.668 | Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | DINAS SOSIAL | Dinas Sosial |
| | | | | Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif | Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga<br>Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial<br>Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan<br>Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel<br>Pembangunan infrastruktur ramah difabel | Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | | PPKS yang dilayani dan ditangani | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Jumlah PPKS yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah PPKS dikali 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS | Persen | 55 Persen | 57 Persen | 60 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 85 Persen | 85 Persen | Jumlah PSKS yang mampu menangani PPKS dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | Persen | 80 Persen | 80 Persen | 75 Persen | 75 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah PMKS/PPKS dikali 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani | Persen | n/a | n/a | 70 Persen | 70 Persen | 70 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Jumlah PPKS yang diikutsertakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS Kabupaten dikali 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial | Persen | 50 persen | 50 persen | 55 Persen | 60 Persen | 70 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah PPKS Bantul dikali 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | Persen | 99 Persen | 57 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial | Persen | n/a | 75 Persen | 75 Persen | 75 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dibagi jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang terdata dikali 100% | DINAS SOSIAL | |
| | | **Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat** | | | | | | **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** | **Indeks** | **95,12** | **95,18** | **95,50** | **96,00** | **96,50** | **96,75** | **96,90** | **96,90** | **IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | **BPS BANTUL** |
| | | | Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak | | | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 64,78* | n/a | 69,36 | 71,01 | 72,66 | 74,31 | 75,96 | 75,96 | IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BPS BANTUL |
| | | | | Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak | Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak<br>Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | | Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak | Prevalensi | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan diatas 18 tahun dan jumlah anak dikali 1.000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Capaian Desa Prima | Persen | 30,67 Persen | 37,33 Persen | 37,33 Persen | 38,67 Persen | 40 Persen | 41,33 Persen | 42,67 Persen | 42,67 Persen | Desa prima yg ditetapkan dibagi semua Kalurahan dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

## CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN DAERAH | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN PD | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN | CAPAIAN 2020 | KONDISI AWAL (2021) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR (2026) | FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR | PERANGKAT DAERAH | PENGUKUR INDIKATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| | | | | | | | PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Persen | 57 persen | 57 persen | 62 Persen | 66 Persen | 69 Persen | 72 Persen | 75 Persen | 75 Persen | Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung APBD dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Rasio kekerasan terhadap perempuan | per 100.000 penduduk perempuan | 0.0004 | 0.0004 | 0.00035 | 0.00032 | 0.00031 | 0.00028 | 0.00026 | 0.00026 | Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi 100.000 penduduk perempuan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase partisipasi perempuan di lembaga | Persen | 6 persen | 6 persen | 7 persen | 8 Persen | 9 Persen | 10 Persen | 11 Persen | 11 Persen | Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga dibagi jumlah penduduk perempuan Bantul dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | | Kategori Kabupaten Layak Anak | Kategori | Madya | Madya | Nindya | Utama | Utama | KLA | KLA | KLA | Predikat berdasarkan jumlah rentang (range) nilai: Pratama: 500-600, Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900), KLA (lbh dr 900). | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | KEMEN PPPA |
| | | | | Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak | Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak<br>Menyediakan Layanan Ramah Anak | Meningkatnya nilai evaluasi KLA | | Nilai KLA | Angka | 632,9 | n/a | 730 | 830 | 890 | 910 | 950 | 950 | nilai Evaluasi KLA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Cakupan desa layak anak | Kalurahan | n/a | n/a | 15 Kalurahan | 30 Kalurahan | 45 Kalurahan | 60 Kalurahan | 75 Kalurahan | 75 Kalurahan | Jumlah Desa layak anak | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Persen | n/a | 70 persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dibagi jumlah anak Kabupaten Bantul dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga | Pengendalian laju pertumbuhan penduduk<br>Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga | Kelahiran penduduk terkendali | | Rata-rata jumlah anak dalam keluarga | Angka | 2,56 | 2,54 | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,35 | 2,3 | 2,3 | Rata-rata jumlah anak per keluarga = Jumlah anak dibagi Jumlah keluarga | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR)) | Angka | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate* /mCPR) | Persen | n/a | n/a | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | 77,2 Persen | (Jumlah peserta KB Aktif Modern) / (Jumlah Pasangan Usia Subur)*100% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |
| | | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina | Persen | 82 Persen | 82,5 Persen | 83 Persen | 84 Persen | 84,5 Persen | 85 Persen | 85,5 Persen | 85,5 Persen | Jumlah kelompok Tribina yang melaksanakan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dibagi Jumlah Kelompok Tribina dikali 100% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

BAPPEDA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**
**Jl. R.W. Monginsidi 01 Kompleks Parasamya Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711**
**https://bappeda.bantulkab.go.id**